

BAB II

GAMBARAN UMUM

KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Kabupaten Bantul

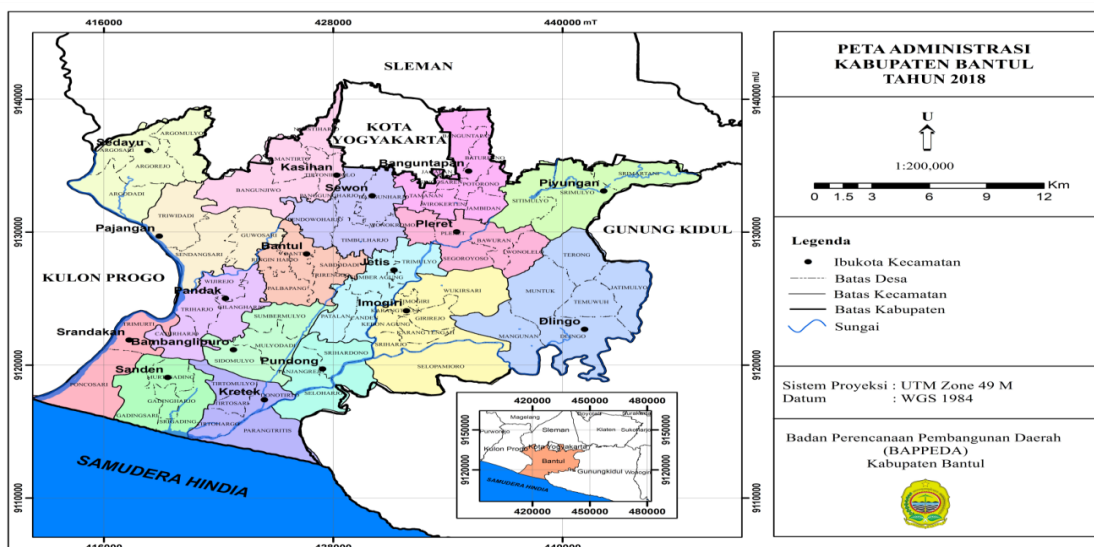
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1. Karakteristik Lokasi Dan Wilayah

2.1.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Daerah Istimewa Yogyakarta secara administratif terdiri atas empat kabupaten dan satu kota. Salah satu kabupaten adalah Kabupaten Bantul yang memiliki luas wilayah 506,85 km² atau 15,91% dari luas DIY. Wilayah administratif Kabupaten Bantul memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman
- Sebelah Selatan : Samudera Hindia
- Sebelah Barat : Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Sleman
- Sebelah Timur : Kabupaten Gunungkidul



Sumber: Bappeda Kabupaten Bantul, 2019

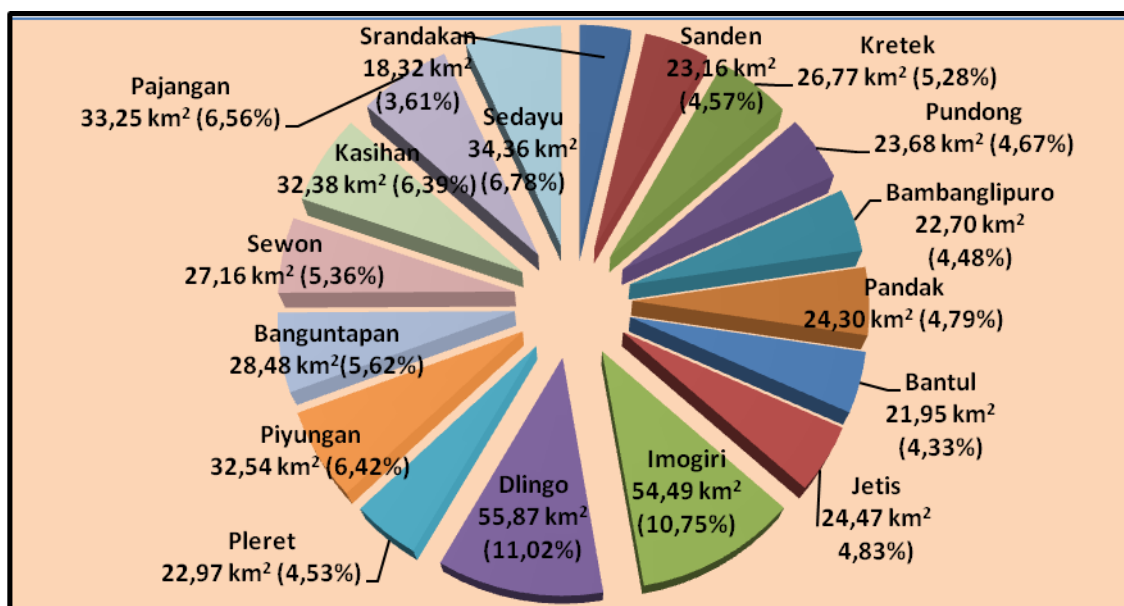
Gambar 2.1. Peta Administrasi Kabupaten Bantul

Perbatasan wilayah dengan kabupaten lain telah dibuat pilar-pilar batas wilayah yang bertujuan untuk tertib administrasi di wilayah perbatasan dan langkah antisipasi terhadap potensi terjadinya konflik terkait batas wilayah di masa mendatang. Pemasangan pilar batas wilayah mengacu pada Permendagri nomor 76 tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas daerah. Berikut acuan batas Kabupaten Bantul dengan Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2007 Tentang Batas Daerah Kabupaten Gunungkidul dengan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Batas Daerah Kota Yogyakarta dengan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2013 Tentang Batas Daerah Kabupaten Bantul dengan Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Meskipun telah dilakukan pemasangan pilar batas wilayah, namun jarak antar pilar masih cukup jauh sehingga masih diperlukan perapatan pilar batas.

Secara administratif Kabupaten Bantul terdiri dari 17 kecamatan. Kecamatan Dlingo adalah kecamatan yang mempunyai wilayah paling luas, yaitu 55,87 km² sementara Kecamatan Srandakan adalah kecamatan dengan wilayah paling sempit, yaitu 18,32 Km². Persentase luas wilayah menurut kecamatan di Kabupaten Bantul disajikan pada Gambar 2.2.



Sumber: Bappeda Kabupaten Bantul, 2019

Gambar 2.2. Luas Wilayah menurut Kecamatan di Kabupaten Bantul

Selain itu, wilayah Kabupaten Bantul juga terbagi atas 75 desa dan 933 pedukuhan dengan jumlah desa dan pedukuhan yang terbanyak terletak di Kecamatan Imogiri, yaitu 8 desa dan 72 pedukuhan. Sementara kecamatan dengan jumlah desa dan pedukuhan paling sedikit adalah Kecamatan Srandakan, yaitu dua desa dan 43 pedukuhan. Berdasarkan klasifikasi wilayah, desa di Kabupaten Bantul dibagi menjadi desa pedesaan (*rural area*) sebanyak 41 desa dan desa perkotaan (*urban area*) sebanyak 34 desa. Secara rinci klasifikasi wilayah desa di Kabupaten Bantul dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Klasifikasi Wilayah Desa di Kabupaten Bantul

No.	Kecamatan	Klasifikasi Wilayah			
		Desa Pedesaan	Luas (km²)	Desa Perkotaan	Luas (km²)
1	Srandakan	Poncosari (24 dusun)	11,86	Trimurti (19 dusun)	6,46
2	Sanden	Sri Gading(20 dusun)	7,57	Gadingsari (18 dusun)	8,12
				Gadingharjo (6 dusun)	3,08
3	Kretek	Tirtohargo (6 dusun)	3,62	Donotirto (13dusun)	4,70
		Parangtritis (11 dusun)	11,87		
		Tirtosari(7 dusun)	2,39		
		Tirtomulyo (15 dusun)	4,19		
4	Pundong	Seloharjo (16 dusun)	11,10	Srihardono (17 dusun)	6,87

No.	Kecamatan	Klasifikasi Wilayah			
		Desa Perdesaan	Luas (km ²)	Desa Perkotaan	Luas (km ²)
		Panjangrejo (16 dusun)	5,71		
5	Bambanglipuro	Sumbermulyo (16 dusun)	8,19	Sidomulyo (15 dusun)	8,05
				Mulyodadi (14 dusun)	6,45
6	Pandak	Caturharjo (14 dusun)	5,93	Wijirejo (10 dusun)	4,68
		Triharjo (10 dusun)	6,43		
		Gilangharjo (15 dusun)	7,26		
7	Pajangan	Guwosari (15 dusun)	8,78	Triwidadi (22 dusun)	12,71
				Sendangsari (18 dusun)	11,76
8	Bantul	Sabdodadi (5 dusun)	2,32	Palbapang (10 dusun)	5,53
				Ringinharjo (6 dusun)	2,77
				Bantul (12 dusun)	5,24
				Trirenggo (17 dusun)	6,10
9	Jetis	Patalan (20 dusun)	5,65	Trimulyo (12 dusun)	7,11
		Can den (15 dusun)	5,36	Sumberagung (17 dusun)	6,35
10	Imogiri	Selopamioro (18 dusun)	22,75	Kebonagung (5 dusun)	1,87
		Sriharjo (13 dusun)	6,32	Karangtalun (5 dusun)	1,21
		Karangtengah (6 dusun)	2,88	Imogiri (4 dusun)	0,83
				Wukirsari (16 dusun)	15,39
				Girirejo (5 dusun)	3,24
11	Dlingo	Mangunan (6 dusun)	9,52	Dlingo (10 dusun)	9,16
		Muntuk (11 dusun)	12,85		
		Temuwuh (12 dusun)	7,67		
		Jatimulyo (10 dusun)	8,91		
		Terong (9 dusun)	7,76		
12	Banguntapan	Tamanan (9 dusun)	3,75	Baturetno (8 dusun)	3,94
		Jagalan (2 dusun)	0,27	Banguntapan (11 dusun)	8,33
		Singosaren (5 dusun)	0,67		
		Wirokerten (8 dusun)	3,86		
		Jambidan (7 dusun)	3,76		
		Potorono (9 dusun)	3,90		
13	Pleret	Bawuran (7 dusun)	4,97	Wonokromo (12 dusun)	4,34
		Wonolelo (8 dusun)	4,54	Pleret (11 dusun)	4,25
		Segoroyoso (9 dusun)	4,87		
14	Piyungan	Sitimulyo (21 dusun)	9,40	Srimulyo (22 dusun)	14,56
				Srimartani (17 dusun)	8,58
15	Sewon	Pendowoharjo (16 dusun)	6,98	Bangunharjo (17 dusun)	6,79
		Timbulharjo (16 dusun)	7,78	Panggungharjo (14 dusun)	5,61
16	Kasihan	Tamantirto (10 dusun)	6,72	Tirtonirmolo (12 dusun)	5,13
		Ngestiharjo (12 dusun)	5,10		
		Bangunjiwo (19 dusun)	15,43		
17	Sedayu	Argodadi (14 dusun)	11,21	Argosari (13 dusun)	6,37
		Argomulyo (14 dusun)	9,55	Argorejo (13 dusun)	7,23
	Jumlah	41 desa	289,65 (28.965 ha)	34 desa	217,20 (21.720 ha)

Sumber: Bappeda Kabupaten Bantul (diolah), 2019

2.1.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis

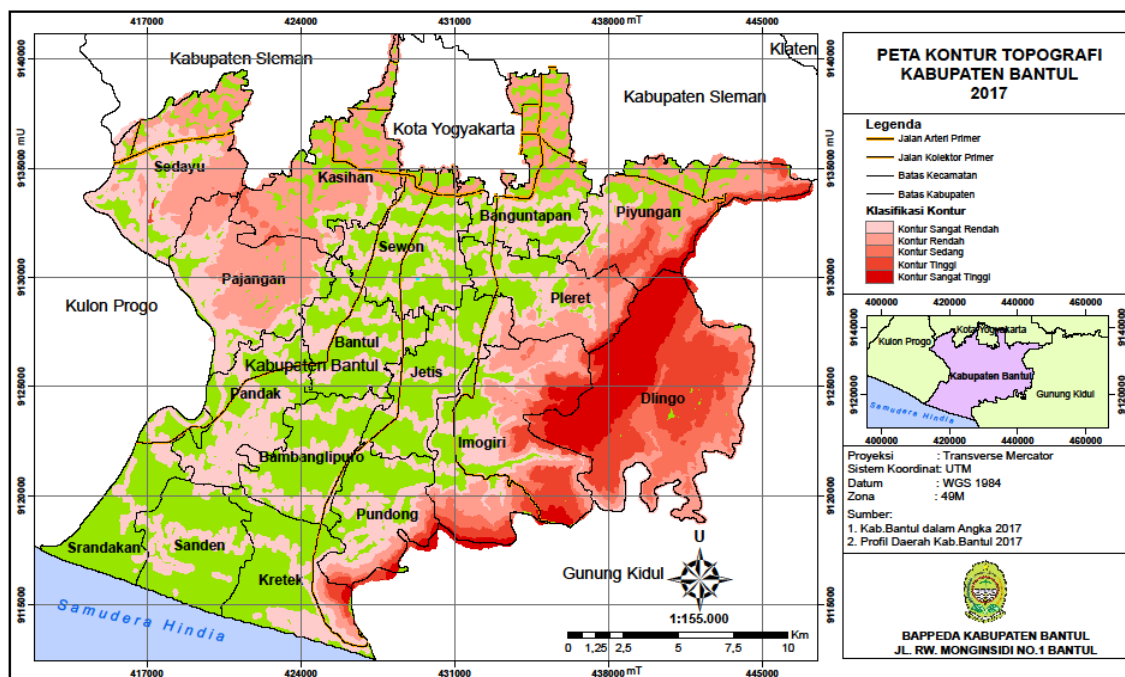
Secara geografis, wilayah Kabupaten Bantul terletak antara 110°12'34"-110°31'08" Bujur Timur dan 07°44'04"-08°00'27" Lintang Selatan. Apabila dilihat dari bentang alamnya, wilayah Kabupaten Bantul terdiri dari daerah dataran yang terletak pada bagian tengah dan daerah perbukitan yang terletak pada bagian timur dan barat,

serta kawasan pantai di sebelah selatan. Kondisi bentang alam tersebut relatif membujur dari utara ke selatan. Posisi Kabupaten Bantul berada paling selatan di wilayah DIY yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia yang kaya akan sumberdaya laut.

2.1.1.1.3. Topografi

Secara topografis, Kabupaten Bantul terbagi menjadi daerah dataran, daerah perbukitan serta daerah pantai. Satuan fisiografi Kabupaten Bantul sebagian besar berada pada dataran aluvial (*Fluvio Volcanic Plain*), perbukitan di sisi barat dan timur serta fisiografi pantai. Adapun pembagian satuan fisiografi yang lebih rinci di Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

- a. Daerah di bagian timur merupakan jalur perbukitan berlereng terjal dengan kemiringan lereng dominan curam ($>70\%$) dan ketinggian mencapai 400 meter dari permukaan air laut. Daerah ini terbentuk oleh formasi Nglanggeran dan Wonosari;
- b. Daerah di bagian selatan ditempati oleh gisik dan gumuk-gumuk pasir (*fluviomarine*) dengan kemiringan lereng datar-landai. Daerah ini terbentuk oleh material lepas dengan ukuran pasir kerakal;
- c. Daerah di bagian tengah merupakan dataran aluvial (*Fluvio Volcanic Plain*), yang dipengaruhi oleh Graben Bantul dan terendapi oleh material vulkanik dari endapan vulkanik Merapi;
- d. Daerah di bagian barat merupakan perbukitan rendah dengan kemiringan lereng landai-curam dan ketinggian mencapai 150 meter dari permukaan air laut, daerah ini terbentuk oleh formasi Sentolo.



Sumber: Bappeda Kabupaten Bantul, 2019

Gambar 2.3. Peta Kontur Topografi Kabupaten Bantul

Ditinjau dari tingkat kemiringan lahan, wilayah Kabupaten Bantul sebagian besar memiliki kemiringan 0-2% seluas 31.425 ha (62%) yang tersebar di wilayah selatan, tengah, dan utara. Tingkat kemiringan lahan 2% hingga 40% sebesar 15.251 ha (30,09%) berada di wilayah timur dan barat. Sedangkan sebagian kecil wilayah timur dan barat seluas 4.009 ha (7,9%) mempunyai kemiringan lereng di atas 40% dengan luas sebesar 15.251 ha (30,09%) paling banyak di Kecamatan Dlingo dan Imogiri. Tingkat kemiringan lahan di Kabupaten Bantul, secara rinci disajikan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Luas Daerah di Kabupaten Bantul menurut Tingkat Kemiringan Tanah

No.	Kecamatan	Luas kemiringan tanah/lereng (ha)						Jumlah
		0 – 2%	2 - 8%	8-15%	15-25%	25-40%	>40%	
1	Srandakan	1.680	152	-	-	-	-	1.832
2	Sanden	2.100	216	-	-	-	-	2.316
3	Kretek	1.883	288	-	27	11	468	2.677
4	Pundong	1.387	171	-	90	108	612	2.368

No.	Kecamatan	Luas kemiringan tanah/lereng (ha)						Jumlah
		0 - 2%	2 - 8%	8-15%	15-25%	25-40%	>40%	
5	Bambanglipuro	2.198	72	-	-	-	-	2.270
6	Pandak	2.124	306	-	-	-	-	2.430
7	Pajangan	815	661	1.046	162	394	247	3.325
8	Bantul	2.180	-	-	15	-	-	2.195
9	Jetis	2.192	81	-	144	-	30	2.447
10	Imogiri	1.436	585	279	900	954	1.295	5.449
11	Dlingo	72	1.946	268	572	1.433	1.296	5.587
12	Banguntapan	2.848	-	-	-	-	-	2.848
13	Pleret	873	431	365	55	547	26	2.297
14	Piyungan	2.129	702	-	-	423	-	3.254
15	Sewon	2.708	-	-	8	-	-	2.716
16	Kasihan	2.262	-	598	182	161	35	3.238
17	Sedayu	2.538	227	300	138	233	-	3.436
TOTAL		31.425	5.838	2.856	2.293	4.264	4.009	50.685

Sumber: BPN Kabupaten Bantul, 2019

Selanjutnya, ditinjau dari tingkat ketinggian lahan, sebagian besar wilayah Kabupaten Bantul memiliki ketinggian kurang dari 100 meter dari permukaan laut, yaitu seluas 39.932 ha, dan sisanya sebesar 10.753 ha memiliki ketinggian 100-500 meter dari permukaan laut yang Data ketinggian lahan di Kabupaten Bantul, secara rinci disajikan pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3. Luas Daerah di Kabupaten Bantul Menurut Ketinggian dari Permukaan Laut

No.	Kecamatan	Luas (Ha) dan Ketinggian tempat (dpl)					Jumlah
		0 - 7m	7 - 25m	25-100m	100-500m	>500m	
1.	Srandakan	1.056	776	-	-	-	1.832
2.	Sanden	1.235	1.081	-	-	-	2.316
3.	Kretek	924	1.462	190	101	-	2.677
4.	Pundong	-	1.930	239	199	-	2.368
5.	Bambanglipuro	-	1.482	788	-	-	2.270
6.	Pandak	-	1.312	1.118	-	-	2.430
7.	Pajangan	-	221	2.652	452	-	3.325
8.	Bantul	-	-	2.195	-	-	2.195
9.	Jetis	-	-	2.436	11	-	2.447
10.	Imogiri	-	791	2.386	2.272	-	5.449
11.	Dlingo	-	-	815	4.772	-	5.587
12.	Banguntapan	-	-	2.373	475	-	2.848
13.	Pleret	-	-	1.952	345	-	2.297
14.	Piyungan	-	-	1.907	1.347	-	3.254
15.	Sewon	-	-	2.716	-	-	2.716
16.	Kasihan	-	-	2.608	630	-	3.238
17.	Sedayu	-	-	3.287	149	-	3.436
TOTAL		3.215	9.055	27.662	10.753	-	50.685

Sumber: BPN Kabupaten Bantul, 2019

2.1.1.1.4. Geologi

Formasi adalah suatu susunan batuan yang mempunyai keseragaman ciri-ciri geologis yang nyata, baik terdiri dari satu macam jenis batuan, maupun perulangan dari dua jenis batuan atau lebih yang terletak di permukaan bumi atau di bawah permukaan. Geologi menunjukkan kelompok-kelompok batuan yang berguna sebagai indikator terdapatnya suatu bahan tambang.

Jenis batuan yang terdapat di Kabupaten Bantul secara umum terdiri dari tiga jenis batuan yaitu batuan beku, batuan sedimen, dan batuan endapan. Berdasarkan sifat-sifat batumannya dapat dirinci menjadi beberapa formasi dengan formasi terluas adalah Endapan Gunung Merapi Muda dengan jenis batuan pasir vulkanik klastik, lanau, dan gravel. Jenis dan luas formasi geologi di Kabupaten Bantul secara keseluruhan disajikan pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4. Jenis dan Luas Formasi Geologi di Kabupaten Bantul

No.	Formasi Geologi	Jenis Batuan	Luas (ha)
1.	Endapan Gunung Merapi Muda	Pasir vulkanik klastik, lanau, gravel	23.316
2.	Semilir-Nglanggran	Breksi, batupasir, tuff	12.164
3.	Sentolo	Batu gamping berlapis, napal, tuff	9.123
4.	Wonosari	Batugamping, karang, lagoon	4.055
5.	Sambipitu	Konglomerat, batupasir	1.520
6.	Endapan Aluvium	Pasir tersortasi	507
Jumlah			50.685

Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul, 2019

2.1.1.1.5. Hidrologi

Di wilayah Kabupaten Bantul terdapat tiga Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu DAS Progo, DAS Opak, dan DAS Oyo. DAS di wilayah Kabupaten Bantul menempati lahan seluas 49.039,51 ha dengan luas oncoran mencapai 16.133,05 sawah-ha. Sungai-sungai tersebut merupakan sungai yang berair sepanjang tahun (permanen), meskipun untuk sungai yang kecil pada musim kemarau debit airnya relatif sedikit. Salah satu fungsi dari masing-masing DAS adalah untuk

mengairi areal pertanian. Di samping itu air sungai juga dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, kebutuhan air persawahan di wilayah Kabupaten Bantul relatif dapat terpenuhi.

Tabel 2.5. Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Bantul

No.	DAS	Sub DAS	Luas (Ha)	Sub Luas DAS(Ha)	Luas Lahan yang Diairi (Ha)	Sub Luas Oncoran (Sawah-Ha)
1	Progo	Progo	3.952,79		1.459,20	
		Bedog	7.111,44		1.108,36	
		Timoho	3.392,12		894,89	
				14.456,35		3.462,45
2	Opak	Opak	7.044,72		2.059,02	
		Buntung	888,43		251,28	
		Code	144,50		754,13	
		Gadjahwong	1.966,03		867,73	
		Gawe	981,80		199,34	
		Kuning	282,83		165,23	
		Bulus	1.927,40		1.247,36	
		Belik	532,60		354,65	
		Tambakbayan	958,61		611,29	
		Winongo Kecil	4.346,25		2.700,72	
		Winongo	5.594,68		2.753,70	
				24.667,85		11.964,45
3	Oyo	Oyo	3.923,72		103,97	
		Plilan	791,35		337,00	
		Celeng	2.526,90		176,53	
		Kedungmiri	916,15		88,65	
		Dlingo	1.757,18		-	
				9.915,30		706,15
		Jumlah		49.039,51		16.133,05

Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul, 2019

2.1.1.1.6. Klimatologi

Data curah hujan pada akhir tahun 2018 di Kabupaten Bantul diperkirakan dalam kategori rendah yakni kisaran 0-20 mm dengan sifat hujan yang pada umumnya antara bawah normal – normal, kelembaban udara berkisar antara 75-85 % dan suhu maksimum berkisar 29-33°C, Suhu rata-rata 25-27°C dan suhu minimum 20-23°C.

Pada tahun 2018 wilayah di Bantul yang berpotensi kekeringan (>60 hari) antara lain Banguntapan, Bantul, Dlingo, Imogiri, Kasihan, Piyungan, Pleret dan Sewon. Kekeringan yang dimaksud adalah berkurangnya curah hujan dari keadaan normal dalam jangka waktu yang Panjang (kekeringan meteorologis).

Perkiraan musim kemarau juga terjadi pada awal 2019 yang mencapai puncaknya pada bulan Agustus. Hal ini disebabkan sirkulasi angin di Indonesia ditentukan oleh pola perbedaan tekanan udara di Australia dan Asia. Pola tekanan udara ini mengikuti pola peredaran matahari dalam setahun yang mengakibatkan sirkulasi angin di Indonesia umumnya membentuk pola monsun, yaitu sirkulasi angin yang mengalami perubahan arah setiap setengah tahun sekali. Pola angin baratan terjadi karena adanya tekanan tinggi di Asia yang berkaitan dengan berlangsungnya musim hujan di sebagian besar wilayah Indonesia. Pola angin timuran/tenggara terjadi karena adanya tekanan tinggi di Australia yang berkaitan dengan berlangsungnya musim kemarau di sebagian besar wilayah Indonesia.

2.1.1.1.7. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan adalah informasi yang menggambarkan sebaran pemanfaatan lahan yang ada di Kabupaten Bantul. Luas lahan di Kabupaten Bantul sebesar 50.685 ha terbagi dalam beberapa klasifikasi penggunaan lahan yang terdiri dari permukiman, sawah, tegal, dan kebun campur, hutan, tanah tandus, tambak dan lainnya. Data penggunaan lahan di Kabupaten Bantul disajikan pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6. Penggunaan Lahan Tahun 2014-2018 di Kabupaten Bantul

No.	Klasifikasi penggunaan Lahan	Luas Lahan (ha)				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Permukiman	3.963,1758 (7,82%)	3.997,3018 (7,88%)	4.022,3897 (7,94%)	4.061,5542 (8,01%)	4.115,63 (8,12%)
2.	Sawah	15.831,6239 (31,24%)	15.786,7911 (31,15%)	15.757,8323 (31,09%)	15.713,2745 (31,00%)	15.684,02 (30,94%)
3.	Tegal	6.626,6348 (13,07%)	6.621,5972 (13,06%)	6.485,7696 (12,80%)	6.484,0135 (12,79%)	6.483,42 (12,79%)
4.	Kebun Campur	16.593,9278 (32,74%)	16.581,1645 (32,73%)	16.958,2259 (33,46%)	16.943,8098 (33,43%)	16.941,76 (33,43%)

No.	Klasifikasi penggunaan Lahan	Luas Lahan (ha)				
		2014	2015	2016	2017	2018
5.	Kebun Rakyat	-	-	-	-	-
6.	Hutan	1.385 (2,73%)	1.385 (2,73%)	1.136,185 (2,24%)	1.136,185 (2,24%)	1.136,19 (2,24%)
7.	Tanah Tandus	543 (1,07%)	543 (1,07%)	543 (1,07%)	543 (1,07%)	543 (1,07%)
8.	Waduk	-	-	-	-	-
9.	Tambak	30 (0,06%)	30 (0,06%)	30 (0,06%)	30 (0,06%)	30 (0,06%)
10.	Lainnya	5.711,6377 (11,27%)	5.740,1485 (11,32%)	5.751,5975 (11,35%)	5.773,163 (11,39%)	5.750,98 (11,35%)
Jumlah		50.685 (100%)	50.685 (100%)	50.685 (100%)	50.685 (100%)	50.685 (100%)

Sumber: BPN Kabupaten Bantul, 2019

Dari data penggunaan lahan di Kabupaten Bantul tahun 2014-2018 pada Tabel 2.7 di atas, dapat diketahui bahwa pada kurun waktu tersebut terjadi pengurangan luas lahan sawah, tegal, dan kebun campur. Namun, di sisi lain pada kurun waktu yang sama terjadi penambahan luas lahan permukiman. Hal ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Bantul terjadi proses alih fungsi lahan sawah, tegal, dan kebun campur menjadi lahan permukiman.

Adanya alih fungsi lahan sawah, tegal, dan kebun campur menjadi lahan permukiman ini tentunya akan berdampak pada berkurangnya lahan pertanian, menurunnya produksi pangan, terancamnya keseimbangan ekosistem, serta banyaknya buruh tani yang kehilangan pekerjaan yang berakibat pada tingginya angka urbanisasi. Oleh karena itu, diperlukan adanya kebijakan strategis dari Pemerintah Bantul terkait pengurangan alih fungsi lahan sawah, tegal, dan kebun campur serta hutan menjadi lahan permukiman. **Rata-rata alih fungsi lahan** pertanian ke lahan non pertanian tahun 2014-2018 sebesar 38,11 Ha/tahun. Berkurangnya lahan pertanian dapat mempengaruhi produksi pangan, keseimbangan ekosistem, serta pendapatan penduduk di sektor pertanian.

2.1.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030, rencana pola ruang Kabupaten Bantul terdiri atas:

1. Kawasan Lindung Kabupaten

Rencana pengembangan Kawasan Lindung Kabupaten meliputi:

a. Kawasan hutan lindung

Penyebaran kawasan hutan lindung meliputi Desa Dlingo, Desa Mangunan, Desa Muntuk, Desa Jatimulyo, Desa Temuwuh, Desa Terong Kecamatan Dlingo, Desa Wonolelo Kecamatan Pleret, Desa Wukirsari Kecamatan Imogiri, dan Desa Srimulyo Kecamatan Piyungan.

b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yaitu kawasan resapan air yang direncanakan seluas kurang lebih 1.001 Ha (1,98%) yang tersebar di sebagian wilayah Desa Parangtritis Kecamatan Kretek, sebagian wilayah Desa Argorejo, Desa Argomulyo Kecamatan Sedayu, sebagian di Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan, sebagian wilayah Desa Seloharjo Kecamatan Pundong, hampir seluruh wilayah Kecamatan Imogiri, hampir seluruh wilayah Kecamatan Pleret, hampir seluruh wilayah Kecamatan Piyungan dan seluruh wilayah Kecamatan Dlingo.

c. Kawasan perlindungan setempat

Kawasan perlindungan setempat adalah kawasan sempadan sungai, kawasan sempadan pantai, kawasan sekitar mata air, dan ruang terbuka hijau perkotaan kabupaten dengan sebaran sebagai berikut:

- 1) Kawasan sempadan sungai direncanakan seluas 2.805 Ha (5,53%) atau 58% dari luas DAS di Kabupaten Bantul dengan penyebaran di kiri dan kanan aliran sungai meliputi Sungai Opak, Sungai Oyo, Sungai Progo, Sungai Krusuk, Sungai Timoho, Sungai Konteng, Sungai Kramat, Sungai

Bedog, Sungai Winongo, Sungai Bulus, Sungai Code, Sungai Belik, Sungai Gadjahwong, Sungai Kedung Semerangan, Sungai Tambakbayan, Sungai Kuning, Sungai Buntung, Sungai Gawe, Sungai Kenteng, Sungai Plilan, Sungai Celeng, dan Sungai Kedungmiri.

- 2) Kawasan sempadan pantai mencakup areal sepanjang garis pantai dengan lebar paling rendah 100 meter dari pasang paling tinggi ke arah daratan dan sepanjang 13,5 km atau seluas kurang lebih 123 Hektar (0,24%) yang tersebar di Desa Poncosari Kecamatan Srandakan, Desa Gadingsari, Desa Srigading Kecamatan Sanden dan Desa Tirtoharjo, Desa Parangtritis Kecamatan Kretek.
 - 3) Kawasan lindung sekitar mata air direncanakan seluas kurang lebih 1.578 Ha (3,11%) yang tersebar di Desa Parangtritis (Kecamatan Kretek), Desa Seloharjo, dan Desa Panjangrejo (Kecamatan Pundong), Desa Muntuk, Desa Mangunan, Desa Dlingo, Desa Temuwuh, Desa Terong, dan Desa Jatimulyo (Kecamatan Dlingo), Desa Srimulyo, dan Desa Srimartani (Kecamatan Piyungan), Desa Caturharjo dan Desa Triharjo (Kecamatan Pandak), Desa Srigading, Desa Gadingsari, dan Desa Gadingharjo (Kecamatan Sanden) serta Desa Sendangsari (Kecamatan Pajangan). Masing-masing kawasan mata air ditetapkan zona bebas kegiatan budidaya paling rendah dalam radius 200 meter dari pusat kawasan.
 - 4) Kawasan ruang terbuka hijau (RTH) direncanakan paling rendah 30% dari luas kawasan perkotaan, meliputi 20% RTH Publik dan 10% RTH privat.
- d. Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya
- Kawasan suaka alam yaitu Cagar Alam Imogiri di Desa Girirejo, Kecamatan Imogiri. Kawasan pelestarian alam meliputi kawasan mangrove terletak di Desa Tirtoharjo Kecamatan Kretek dan

kawasan konservasi penyu di Desa Srigading, Kecamatan Sanden. Sedangkan persebaran kawasan cagar budaya meliputi:

- Masjid Agung Kotagede di Desa Jagalan, Kecamatan Banguntapan dan Museum Wayang Kekayon di Desa Baturetno, Kecamatan Banguntapan;
- Kompleks Makam Raja-raja di Desa Imogiri, Kecamatan Imogiri;
- Situs Ambarbinangun dan Masjid Patok Negara di Desa Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan;
- Petilasan/Ziarah Mangir di Desa Sendangsari dan Gua Selarong di Desa Guwosari, Kecamatan Pajangan;
- Petilasan Keraton Mataram di Desa Pleret dan Desa Segoroyoso, Kecamatan Pleret;
- Cagar Budaya Pendidikan di Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon; dan
- Makam Sewu di Desa Wijirejo, Kecamatan Pandak.

e. Kawasan rawan bencana

Kawasan rawan bencana meliputi kawasan rawan gempa bumi, kawasan rawan longsor, kawasan rawan banjir, kawasan rawan gelombang pasang, dan kawasan rawan kekeringan, meliputi :

- 1) Kawasan rawan gempa bumi terdapat di seluruh wilayah Kabupaten Bantul;
- 2) Kawasan rawan longsor terdapat di Kecamatan Imogiri, Kecamatan Dlingo, Kecamatan Pleret, Kecamatan Piyungan, dan Kecamatan Pundong;
- 3) Kawasan rawan banjir terdapat di Kecamatan Kretek, Kecamatan Srandakan, Kecamatan Sanden, Kecamatan Pandak, Kecamatan Jetis, Kecamatan Pundong, dan Kecamatan Pleret;
- 4) Kawasan rawan gelombang pasang terdapat di Kecamatan Kretek, Kecamatan Srandakan, dan Kecamatan Sanden, sebagian Kecamatan Pandak, sebagian Kecamatan Pundong,

sebagian Kecamatan Imogiri, sebagian Kecamatan Jetis, dan sebagian Kecamatan Bambanglipuro;

- 5) Kawasan rawan kekeringan terdapat di Kecamatan Dlingo, sebagian Kecamatan Piyungan, sebagian Kecamatan Pajangan, sebagian Kecamatan Pleret, sebagian Kecamatan Imogiri, sebagian Kecamatan Pundong, sebagian Kecamatan Sedayu, sebagian Kecamatan Kasihan, dan sebagian Kecamatan Kretek.

2. Kawasan Budidaya Kabupaten

Rencana pengembangan kawasan budidaya Kabupaten terdiri atas:

a. Kawasan peruntukan hutan rakyat

Kawasan peruntukan kehutanan (hutan rakyat) direncanakan seluas kurang lebih 8.545 Ha (16,86%) penyebarannya difokuskan pada Kecamatan Piyungan, Kecamatan Pleret, Kecamatan Dlingo, Kecamatan Imogiri, Kecamatan Pajangan, Kecamatan Jetis, Kecamatan Pundong, Kecamatan Kretek, Kecamatan Bambanglipuro, Kecamatan Sedayu, Kecamatan Kasihan, Kecamatan Srandakan, Kecamatan Pandak, dan Kecamatan Sanden.

b. Kawasan peruntukan pertanian

Kawasan peruntukan pertanian meliputi kawasan pertanian lahan basah, kawasan pertanian lahan kering, dan kawasan peternakan, yaitu:

- 1) Kawasan pertanian lahan basah direncanakan seluas ± 13.324 Ha (26,29%) difokuskan terutama pada bagian tengah dan selatan, tetapi penyebarannya terdapat di seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Kasihan hanya sebagian kecil wilayah;
- 2) Kawasan pertanian lahan kering direncanakan seluas ± 5.247 Ha (10,35%) difokuskan terutama pada bagian timur yaitu di Desa Jatimulyo, Desa Terong, Desa Muntuk, Desa Dlingo Kecamatan Dlingo, sebagian Desa Srimartani, Desa Srimulyo, Desa Sitimulyo Kecamatan Piyungan, Desa Wonolelo, Desa

Bawuran, Desa Segoroyoso Kecamatan Pleret, Desa Imogiri, Desa Selopamioro, Desa Wukirsari, Desa Girirejo, Desa Karangtalun Kecamatan Imogiri, Desa Parangtritis Kecamatan Kretek, Desa Seloharjo Kecamatan Pundong.

3) Kawasan Peternakan meliputi:

- Peternakan itik di Kecamatan Kretek, Kecamatan Bantul, dan Kecamatan Sanden;
- Peternakan sapi perah di Kecamatan Srandakan, Kecamatan Banguntapan, Kecamatan Jetis, dan Kecamatan Sedayu;
- Peternakan sapi potong dan kambing tersebar di hampir seluruh kecamatan;
- Peternakan babi di Kecamatan Srandakan dan Kecamatan Kasihan;
- Peternakan kerbau di Kecamatan Sanden dan Kecamatan Banguntapan;
- Peternakan kelinci di Kecamatan Sanden.

c. Kawasan peruntukan perikanan

Kawasan peruntukan perikanan terdiri dari:

- Kawasan peruntukan perikanan tangkap direncanakan di wilayah Kecamatan Srandakan, Kecamatan Sanden dan Kecamatan Kretek untuk pengembangan jenis perikanan laut dan untuk jenis perikanan darat direncanakan di seluruh kecamatan;
- Kawasan peruntukan budidaya perikanan direncanakan di Kecamatan Banguntapan, Kecamatan Pandak, Kecamatan Piyungan, Kecamatan Pundong, Kecamatan Sanden, dan Kecamatan Sedayu.

d. Kawasan peruntukan pertambangan

Kawasan peruntukan pertambangan terdapat di :

- Kecamatan Dlingo berupa Breksi Andesit, Batu Gamping, Batu Pasir, Batu Lempung, dan Fosfat;

- Kecamatan Imogiri berupa Breksi Andesit, Batu Gamping, Mangaan, Lempung, Breksi Pumice, Batu Pasir Tufan, dan Batu Pasir Pumice;
- Kecamatan Piyungan berupa Lempung, Breksi Pumice, dan Batu Pasir Pumice;
- Kecamatan Banguntapan berupa Usaha Lempung dan Tanah Urug;
- Kecamatan Sewon berupa Batu Pasir dan Tanah Urug;
- Kecamatan Pleret berupa Batu Pasir Pumice, Breksi Pumice, Lempung, dan Pasir Tufan;
- Kecamatan Jetis berupa Pasir, Lempung, Breksi Batu Apung, dan Breksi Andesit;
- Kecamatan Banguntapan berupa Batu lempung dan Tanah Urug;
- Kecamatan Pajangan berupa Batu Gamping Berlapis, Pasir, Kerikil berpasir (sirtu), dan Tanah Urug;
- Kecamatan Sedayu berupa Batu Pasir, Batu Gamping, dan Tanah Urug;
- Kecamatan Pandak berupa Batu Gamping, Pasir, Kerikil berpasir, dan Tanah Urug;
- Kecamatan Bambanglipuro berupa Tanah Urug dan Pasir;
- Kecamatan Srandakan berupa Pasir, Kerikil berpasir (Sirtu), Pasir Besi, dan Tanah urug;
- Kecamatan Sanden berupa Tanah Urug, Pasir, dan Pasir Besi.
- Kecamatan Kretek berupa Tanah Urug, Pasir, dan Pasir Besi;
- Kecamatan Pundong berupa Pasir, Lempung, dan Breksi Andesit; dan
- Seluruh kecamatan yang meliputi Wilayah Kerja Eksplorasi ataupun Wilayah Kerja Eksploitasi minyak dan gas bumi.

e. Kawasan peruntukan industri

Kawasan peruntukan industri meliputi:

- Industri menengah dan besar di Desa Argosari, Desa Argorejo, Desa Argodadi, Desa Argomulyo Kecamatan Sedayu dan Desa

Srimulyo, Desa Sitimulyo Kecamatan Piyungan, Industri kecil, dan menengah tersebar di seluruh Kecamatan;

- Industri mikro dan kecil dapat berada di luar kawasan peruntukan industri sepanjang tidak bertentangan sifat dominasi kawasan dan sesuai dengan ketentuan umum peraturan zonasi.
- Pengembangan sentra industri kecil dan menengah yang tersebar di seluruh kecamatan diarahkan menjadi kawasan industri tertentu UMKM

f. Kawasan peruntukan pariwisata

Kawasan peruntukan pariwisata meliputi pariwisata budaya, pariwisata alam, dan pariwisata buatan. dengan sebaran sebagai berikut :

1) Kawasan peruntukan pariwisata budaya terdapat di :

- Kompleks Makam Raja-raja Imogiri di Desa Girirejo Kecamatan Imogiri;
- Kompleks Situs Ambarbinangun di Desa Tirtonirmolo Kecamatan Kasihan;
- Situs Keraton Mataram di Desa Pleret Kecamatan Pleret;
- Padepokan Ki Ageng Mangir di Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan;
- Kawasan Kotagedhe di Desa Jagalan dan Desa Singosaren Kecamatan Banguntapan;
- Gua Selarong di Desa Guwosari Kecamatan Pajangan;
- Goa Jepang di Desa Seloharjo Kecamatan Pundong;
- Desa Budaya Dlingo Kecamatan Dlingo, Desa Seloharjo Kecamatan Pundong, Desa Srigading Kecamatan Sanden, Desa Triwidadi Kecamatan Pajangan, Desa Trimurti Kecamatan Srandakan;
- Padepokan Seni Bagong Kusudiharja di Desa Tamantirto Kecamatan Kasihan;
- Cepuri Parangkusumo di Desa Parangtritis; dan
- Parangendog di Desa Parangtritis;

- 2) Kawasan peruntukan pariwisata alam terdapat di :
 - Kawasan Pantai Parangtritis (Parangtritis, Parangkusumo, Depok);
 - Kawasan Pantai Samas (Pantai Samas, Pandansari, Patehan);
 - Kawasan Pantai Pandansimo (Kuwaru, Pandansimo);
 - Kompleks Gua Cerme di Desa Selopamioro, Kecamatan Imogiri;
 - Goa Jepang di Desa Seloharjo Kecamatan Pundong;
 - Agrowisata Samas di Desa Srigading, Kecamatan Sanden; dan
 - Agrowisata Dlingo di Desa Mangunan, Kecamatan Dlingo.
- 3) Kawasan peruntukan pariwisata buatan di Kabupaten terdapat di :
 - Desa Wisata Kebon Agung di Desa Kebon Agung, Kecamatan Imogiri.
 - Desa Kerajinan Gabusan – Manding – Tembi (GMT) di Kecamatan Bantul
 - dan Kecamatan Sewon;
 - Desa Kerajinan Krebet di Desa Sendangsari Kecamatan Pajangan;
 - Desa Kerajinan Kasongan – Jipangan – Gendeng – Lemahdadi (Kajigelem) di Kecamatan Kasihan;
 - Desa Kerajinan Panjangrejo Kecamatan Pundong;
 - Desa Wisata Serut;
 - Desa Wisata Trimulyo; dan
 - Tempat Rekreasi dan Taman Bermain di Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan.

g. Kawasan peruntukan permukiman

Kawasan peruntukan permukiman terbagi menjadi permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan dengan sebaran sebagai berikut:

- 1) Rencana kawasan permukiman perkotaan direncanakan seluas kurang lebih 5.434 Ha (10,72%) penyebarannya difokuskan di wilayah Kecamatan Sewon, Kecamatan Banguntapan, Kecamatan Kasihan, Kecamatan Pajangan, Kecamatan Bantul, Kecamatan Pleret dan Kecamatan Piyungan;
 - 2) Rencana Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun (Kasiba/Lisiba) Bantul Kota Mandiri di Desa Guwosari, Desa Sendangsari dan Desa Triwidadi Kecamatan Pajangan dan di Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan direncanakan seluas kurang lebih 1.300 Ha;
 - 3) Rencana untuk kawasan permukiman perdesaan direncanakan seluas kurang lebih 5.738 Ha (11,32%) penyebarannya di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten kecuali Kecamatan Banguntapan.
- h. Kawasan peruntukan lainnya.
- Kawasan peruntukan lainnya meliputi : kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan dan kawasan peruntukan fasilitas pelayanan umum lainnya, dengan sebaran sebagai berikut :
- 1) Rencana kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan meliputi :
 - Akademi Angkatan Udara dan Sekolah Penerbangan TNI Angkatan Udara di Kecamatan Banguntapan;
 - Sekolah Polisi Negara di Desa Selopamioro Kecamatan Imogiri;
 - Kompi Brimob Polda Daerah Istimewa Yogyakarta Gondowulung;
 - Polisi Air Udara di Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek;
 - Pos Angkatan Laut di Desa Srigading Kecamatan Sanden; dan
 - Stasiun Radar di Kecamatan Kretek.
 - 2) Rencana pengembangan kawasan fasilitas pelayanan umum lainnya diarahkan sebagai berikut :

- Rencana pengelolaan dan pengembangan fasilitas perdagangan dan jasa yaitu pertumbuhan perdagangan secara linier diarahkan sepanjang jalan arteri sekunder dan kolektor sekunder;
- Rencana pengembangan fasilitas pendidikan, yaitu mengupayakan terlayannya wilayah Kabupaten secara merata dengan fasilitas pendidikan dari tingkat dasar (TK dan SD) sampai dengan SMA, pengembangan kawasan pendidikan tinggi terpadu di Desa Tamantirt Kecamatan Kasihan dan Kecamatan Sewon;
- Rencana pengembangan fasilitas kesehatan;
- Rencana pengelolaan peribadatan;
- Rencana pengembangan fasilitas rekreasi/olah raga yaitu fasilitas olah raga skala Kabupaten berpusat di area Stadion Sultan Agung, dan fasilitas rekreasi dan olahraga diarahkan tersebar di masing-masing;
- Rencana pengembangan fasilitas perkantoran dapat berlokasi pada semua kawasan budidaya kecuali padakawasan pertanian;
- Rencana pengembangan taman pekuburan/pemakaman.

2.1.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Wilayah Kabupaten Bantul merupakan salah satu bagian wilayah yang rawan bencana khususnya gempa bumi karena wilayah ini terletak pada pertemuan lempeng Eurasia dan lempeng Indonesia-Australia. Selain itu, wilayah Kabupaten Bantul juga terletak pada lintasan patahan/sesar Opak yang masih aktif. Oleh karena itu, wilayah Kabupaten Bantul merupakan kawasan rawan bencana gempa bumi tektonik yang potensial tsunami, terutama wilayah bagian selatan.

Bencana gempa tanggal 27 Mei 2006 terjadi hampir di seluruh Kabupaten Bantul. Kawasan rawan bencana di Kabupaten Bantul dapat dilihat pada Tabel 2.7. berikut:

Tabel 2.7. Kawasan Rawan Bencana di Kabupaten Bantul

No.	Jenis Bencana	Lokasi yang berpotensi
1	Tanah longsor	Piyungan, Pundong, Jetis, Dlingo, Sedayu, Pleret, Imogiri
2	Angin kencang	Seluruh wilayah Kabupaten Bantul
3	Kekeringan	Dlingo, Piyungan, Pajangan, Pleret, Imogiri, Pundong
4	Banjir	Imogiri, Pajangan, Pleret, Sewon, Banguntapan, Jetis, Kasihan, Piyungan, Pundong, Kretek, Pandak, Srandakan, Bantul
5	Gempa bumi	Seluruh wilayah Kabupaten Bantul
7	Tsunami	Srandakan, Kretek, Sanden
8	Abrasi/Erosi	Kretek, Imogiri, Banguntapan, Kasihan, Pleret, Sewon, Pajangan, Piyungan
9	Kebakaran	Seluruh wilayah Kabupaten Bantul
10	Banjir Lahar Dingin	Sepanjang aliran sungai Code, Gajahwong, Winongo, dan OpakKalikuning

Sumber : BPBD Kabupaten Bantul, 2019

2.1.1.4. Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Bantul tahun 2014 menurut data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul adalah 913.407 jiwa dan cenderung meningkat mencapai 939.718 jiwa pada tahun 2018. Secara rinci jumlah penduduk Kabupaten Bantul sebagai berikut:

Tabel 2.8. Jumlah Penduduk Kabupaten Bantul menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Srandakan	31,246	31,301	31,244	31,276	31,164
2	Sanden	32,487	32,702	32,494	31,924	31,967
3	Kretek	30,955	31,101	31,082	30,837	30,855
4	Pundong	34,794	35,202	35,484	35,448	35,668
5	Bambanglipuro	40,724	41,165	41,385	41,201	41,621
6	Pandak	51,197	51,307	51,770	51,492	51,781
7	Bantul	62,582	63,161	63,124	62,788	63,669
8	Jetis	56,911	57,573	57,474	57,408	58,206
9	Imogiri	61,737	62,299	62,419	62,531	63,179
10	Dlingo	38,664	39,129	38,666	38,502	39,092
11	Pleret	45,914	46,609	46,663	46,825	47,499
12	Piyungan	49,711	50,517	50,846	51,051	51,692
13	Banguntapan	104,970	107,318	107,548	107,596	110,126
14	Sewon	95,405	96,937	97,420	97,034	98,506

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)				
		2014	2015	2016	2017	2018
15	Kasihan	97,267	95,719	100,330	100,222	102,175
16	Pajangan	33,626	34,264	34,674	34,894	35,465
17	Sedayu	45,217	43,136	46,053	46,152	47,053
Jumlah		913,407	919,440	928,676	927,181	939,718

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul, diolah, 2019.

Jumlah penduduk terbanyak ada di Kecamatan Banguntapan, Kasihan dan Sewon. Hal ini disebabkan karena ketiga kecamatan tersebut berbatasan langsung dengan Kota Yogyakarta yang secara umum merupakan daya tarik bagi penduduk untuk tinggal dilokasi yang dekat dengan pusat kota.

Penyebaran penduduk di Kabupaten Bantul belum merata, hal ini terlihat dari kepadatan penduduk geografis yang menunjukkan kecamatan dengan wilayah yang lebih kecil mempunyai jumlah penduduk lebih banyak daripada kecamatan yang memiliki wilayah yang lebih luas sebagaimana disajikan pada Tabel 2.9.

Tabel 2.9. Kepadatan Penduduk Geografis di Kabupaten Bantul Tahun 2014-2018

No.	Kecamatan	Kepadatan (jiwa/km ²)				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Srandakan	1.705,57	1.708,57	1.705,46	1.707,21	1.701,09
2	Sanden	1.402,72	1.412,00	1.403,02	1.378,41	1.380,27
3	Kretek	1.156,33	1.161,79	1.161,08	1.151,92	1.152,60
4	Pundong	1.469,34	1.486,57	1.498,48	1.496,96	1.506,25
5	Bambanglipuro	1.794,01	1.813,44	1.823,13	1.815,02	1.833,52
6	Pandak	2.106,87	2.111,40	2.130,45	2.119,01	2.130,91
7	Bantul	2.851,12	2.877,49	2.875,81	2.860,50	2.900,64
8	Jetis	2.325,75	2.352,80	2.348,75	2.346,06	2.378,67
9	Imogiri	1.133,00	1.143,31	1.145,51	1.147,57	1.159,46
10	Dlingo	692,04	700,36	692,07	689,14	699,70
11	Pleret	1.998,87	2.029,12	2.031,48	2.038,53	2.067,87
12	Piyungan	1.527,69	1.552,46	1.562,57	1.568,87	1.588,57
13	Banguntapan	3.685,74	3.768,19	3.776,26	3.777,95	3.866,78
14	Sewon	3.512,70	3.569,11	3.586,89	3.572,68	3.626,88
15	Kasihan	3.003,92	2.956,11	3.098,52	3.095,18	3.155,50
16	Pajangan	1.011,31	1.030,50	1.042,83	1.049,44	1.066,62
17	Sedayu	1.315,98	1.255,41	1.340,31	1.343,19	1.369,41
Rata-rata		1.802,12	1.814,03	1.832,25	1.829,30	1.854,04

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul, diolah 2019.

Tahun 2018 kepadatan penduduk geografis tinggi terletak di wilayah Kabupaten Bantul yang berbatasan langsung dengan kota

Yogyakarta yang meliputi Kecamatan Banguntapan (3.866,78 jiwa/km²). Sewon (3.626,88 jiwa/km²). dan Kasihan (3.155,50 jiwa/km²). sedangkan kepadatan penduduk geografis terendah terletak di Kecamatan Dlingo (699,70 jiwa/km²). Apabila dibandingkan dengan tahun 2017 di mana kepadatan penduduk geografis Kabupaten Bantul mencapai 1.829.30 jiwa/km² maka tahun 2018 menjadi lebih padat yang berarti menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang tinggal di wilayah kecamatan tersebut bertambah cukup signifikan.

Tabel 2.10. Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Usia di Kabupaten Bantul Tahun 2014-2018

No.	Kelompok Usia	Jumlah Penduduk (jiwa)				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	0 – 4 tahun	58.147	60.565	60.708	58.920	59.034
2	5 – 9 tahun	68.324	69.841	70.339	70.557	70.171
3	10 – 14 tahun	67.689	67.506	66.261	66.964	69.332
4	15 – 19 tahun	63.216	65.108	66.141	65.710	66.612
5	20 – 24 tahun	64.075	63.581	63.811	64.096	64.063
6	25 – 29 tahun	64.215	63.013	63.577	64.489	65.950
7	30 – 34 tahun	74.802	73.975	71.990	68.746	67.229
8	35 – 39 tahun	72.905	72.719	73.112	74.094	75.432
9	40 – 44 tahun	69.458	69.214	70.090	67.799	70.200
10	45 – 49 tahun	71.034	69.856	69.466	69.025	68.737
11	50 – 54 tahun	62.058	62.829	64.417	63.492	65.721
12	55 – 59 tahun	52.742	55.947	56.973	57.649	59.134
13	60 – 64 tahun	36.411	38.082	41.241	42.972	46.266
14	65 – 69 tahun	25.789	25.689	27.340	28.941	30.145
15	70 – 74 tahun	24.789	23.005	23.402	21.439	21.193
16	> 75 tahun	37.753	38.510	39.808	42.288	40.499
Jumlah		913.407	919.440	928.676	927.181	939.718

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul Semester2, diolah, 2019.

Berdasarkan komposisi penduduk menurut usia pada Tabel 2.1 1, dapat diketahui bahwa kelompok usia sekolah dan usia produktif merupakan kelompok usia dominan sehingga diperlukan adanya kebijakan Pemerintah Kabupaten Bantul terkait pendidikan dan tenaga kerja.

Jumlah penduduk terbesar Kabupaten Bantul pada tahun 2018 adalah kelompok umur produktif (15-64 tahun) sebesar 69,08% dan

penduduk pada kelompok usia muda (0-14 tahun) mengalami penurunan dari tahun sebelumnya (21.19%) menjadi sebesar 22,13%. Sementara proporsi terendah adalah kelompok usia lanjut (di atas 64 tahun) sebesar 9,78%. Jumlah penduduk muda (0-14 tahun) dan jumlah penduduk tua (65 tahun ke atas) disebut jumlah penduduk non-produktif.

Komposisi penduduk produktif cukup tinggi, hampir mencapai 70% dan hal ini sesuai dengan prediksi bahwa tahun 2020-2030 Indonesia mengalami bonus produksi. Bonus demografi ini menyebabkan angka ketergantungan menjadi rendah. Selain itu merupakan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila penduduk produktif merupakan SDM yang berkualitas yang mampu berkontribusi dalam pembangunan daerah. Pemerintah daerah harus mampu memanfaatkan peluang bonus ini dengan kebijakan yang tepat. Terbukanya kesempatan kerja yang produktif dan terserapnya tenaga kerja produktif yang berkualitas didalamnya akan berdampak pada berkurangnya pengangguran dan peningkatan pendapatan.

Tabel 2.11. Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Bantul Tahun 2014-2018

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk (jiwa)				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Laki-laki	458.914	460.075	464.860	462.449	468.135
2	Perempuan	454.493	459.365	463.816	464.732	471.583
Jumlah		913.407	919.440	928.676	927.181	939.718

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul, diolah, 2018.

Komposisi penduduk menurut jenis kelamin diperlukan guna menentukan kebijakan yang berprespektif *gender*. Kebijakan pada komposisi penduduk yang seimbang antara laki-laki dan perempuan sudah seharusnya berbeda dengan persebaran yang didominasi salah satunya. Dengan demikian kebijakan yang diambil lebih efektif.

Data pada tabel 2.11 menunjukkan jumlah penduduk perempuan semakin meningkat dan lebih banyak dari penduduk laki-

laki, oleh sebab itu dalam menentukan suatu kebijakan perlu mempertimbangkan kesetaraan gender. Salah satunya mungkin dapat memberikan peluang lebih besar bagi perempuan untuk dapat turut berperan aktif dalam pemerintahan

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.1.2.1.1. Kemiskinan

Kemiskinan adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non makanan (diukur dari sisi pengeluaran). Kebutuhan dasar makanan merupakan pengeluaran untuk memenuhi konsumsi 2.100 kkal perkapita perhari (52 jenis komoditi), sedang kebutuhan dasar non makanan merupakan kebutuhan minimum perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan dan lainnya (51 jenis komoditi non makanan di perkotaan dan 47 jenis komoditi non makanan di pedesaan).

Tabel 2.12. Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Bantul Tahun 2014-2018

Tahun	Tingkat Kemiskinan	Jumlah Penduduk Miskin	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks Keparahan Kemiskinan	Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bln)
2014	15,89	153.490	2.19	0.48	301.986
2015	16,33	160.150	3.16	0.89	312.514
2016	14,55	142.760	2.02	0.41	332.057
2017	14,07	139.666	2.21	0.56	347.476
2018	13,43	134.835	2.17	0.46	369.480

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, diolah, 2019.

Dari tahun 2014 sampai dengan 2018 angka kemiskinan menunjukkan kecenderungan menurun. Penurunan tingkat kemiskinan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2016 yaitu turun 1,78 dari tahun 2015, apabila dilihat dari indeks kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan tahun 2017 lebih tinggi dari 2016. Hal ini menunjukkan pengeluaran penduduk miskin dan kesenjangan antara penduduk miskin belum mengalami perbaikan kualitas. Namun

demikian pada tahun 2018 terjadi indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan lebih rendah dari tahun 2017 dan juga tingkat kemiskinan turun yang menunjukkan keberhasilan upaya pemerintah dalam mengurangi tingkat kemiskinan meskipun belum sesuai target yang diharapkan.

Upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan perekonomian penduduk berpendapatan menengah ke bawah akan mengurangi kesenjangan ekonomi. Namun peningkatan pemerataan pendapatan tidak hanya bisa dilakukan oleh pemerintah dengan mengalokasikan bantuan untuk masyarakat menengah ke bawah, tetapi dukungan dari masyarakat bergolongan ekonomi tinggi sangat diperlukan. Beberapa program yang tengah digalakkan oleh pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan antara lain:

- a. Membuka peluang pertumbuhan kegiatan-kegiatan ekonomi baru yang berbasis masyarakat seperti dibukanya obyek wisata baru yang berbasis alam dan pedesaan, pengembangan sentra-sentra kerajinan, dan usaha-usaha kuliner baru;
- b. Menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok, hal ini bertujuan menjamin daya beli masyarakat miskin/keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok terutama beras dan kebutuhan pokok utama selain beras;
- c. Mendorong pertumbuhan yang berpihak pada rakyat miskin dengan penyediaan dana bergulir untuk kegiatan produktif skala usaha mikro;
- d. Menyempurnakan dan memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat;
- e. Meningkatkan akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar; dan
- f. Membangun serta menyempurnakan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin.

2.1.2.1.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pertumbuhan perekonomian daerah secara umum dapat dilihat melalui indikator perkembangan PDRB, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.

Tabel 2.13. Persentase PDRB (Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku) Tahun 2016-2018

No.	Lapangan Usaha	PDRB (milyar Rp)	2016 (%)	PDRB (milyar Rp)	2017*) (%)	PDRB (milyar Rp)	2018**) (%)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.995,87	14,33	3.131,89	13,85	3.331,34	13,63
B	Pertambangan dan Penggalian	128,52	0,61	129,08	0,57	133,02	0,54
C	Industri Pengolahan	3.180,27	15,21	3.449,02	15,25	3.721,10	15,22
D	Pengadaan Listrik dan Gas	26,44	0,13	32,30	0,14	35,20	0,14
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	17,04	0,08	17,98	0,08	19,08	0,08
F	Konstruksi	1.943,46	9,29	2.121,98	9,38	2.374,86	9,72
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	1.771,63	8,47	1.945,84	8,61	2.123,78	8,69
H	Transportasi dan Pergudangan	1.001,48	4,7	1.070,70	4,73	1.153,28	4,72
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.439,52	11,67	2.652,69	11,74	2.856,63	11,69
J	Informasi dan Komunikasi	1.530,26	7,32	1.668,38	7,37	1.789,60	7,32
K	Jasa Keuangan	585,22	2,80	626,18	2,77	692,77	2,83
L	Real Estat	1.376,06	6,58	1.486,18	6,57	1.604,53	6,56
M,N	Jasa Perusahaan	100,78	0,48	107,58	0,48	116,05	0,47
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.578,24	7,55	1.756,87	7,76	1.888,56	7,73
P	Jasa Pendidikan	1.437,13	6,87	1.541,56	6,84	1.661,76	6,80
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	387,70	1,85	419,29	1,85	443,27	1,81
R,S,T,U	Jasa lainnya	413,48	1,98	454,17	2,01	498,44	2,04
	PDRB	20.913,09	100	22.611,70	100	24.443,27	100

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2019

*) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

Tabel 2.14. PDRB (Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun Dasar 2010) Tahun 2016-2018

No.	Lapangan Usaha	PDRB (milyar Rp)	2016 (%)	PDRB (milyar Rp)	2017 (*) (%)	PDRB (milyar Rp)	2018 (**) (%)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.982,71	12,11	2.032,34	11,81	2.073,02	11,42
B	Pertambangan dan	102,78	0,63	102,85	0,60	104,46	0,58

No.	Lapangan Usaha	PDRB (milyar Rp)	2016 (%)	PDRB (milyar Rp)	2017 (*) (%)	PDRB (milyar Rp)	2018 (**) (%)
	Penggalian						
C	Industri Pengolahan	2.405,77	14,68	2.558,22	14,86	2.703,16	14,89
D	Pengadaan Listrik dan Gas	27,91	0,17	29,02	0,17	30,55	0,17
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	13,41	0,08	13,83	0,08	14,55	0,08
F	Konstruksi	1.567,47	9,57	1.660,50	9,65	1.780,78	9,81
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	1.403,01	8,56	1.482,80	8,61	1.566,47	8,63
H	Transportasi dan Pergudangan	807,46	4,95	841,69	4,89	888,31	4,89
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.750,67	10,69	1.851,04	10,75	1.973,11	10,87
J	Informasi dan Komunikasi	1.664,68	10,16	1.762,38	10,24	1.872,38	10,32
K	Jasa Keuangan	438,49	2,68	450,88	2,62	479,95	2,64
L	Real Estat	1.119,54	6,84	1.175,16	6,83	1.238,69	6,82
M,N	Jasa Perusahaan	90,91	0,56	94,80	0,55	99,89	0,55
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.125,30	6,87	1.181,30	6,86	1.235,06	6,80
P	Jasa Pendidikan	1.195,00	7,30	1.256,61	7,30	1.329,25	7,32
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	318,58	1,95	334,92	1,95	350,40	1,93
R,S,T,U	Jasa lainnya	363,11	2,22	383,49	2,23	410,87	2,26
	PDRB	16.376,78	100	17.211,82	100	18.150,90	100

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2019

*) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

Dari Tabel 2.13 dapat dilihat bahwa empat kategori lapangan usaha yang memiliki kontribusi terbesar adalah lapangan usaha industri pengolahan; lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan; lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum; dan lapangan usaha konstruksi.

Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Bantul pada tahun 2018 berdasarkan harga konstan 2010 sebesar 5,47% menunjukkan peningkatan jika dibandingkan tahun 2017 sebesar 5,10%. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bantul disajikan pada tabel 2.16 berikut ini:

Tabel 2.15. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bantul Tahun 2014-2018

Kategori	Uraian	2014	2015	2016	2017*	2018**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-2,62	2,12	1,52	2,50	2,00

Kategori	Uraian	2014	2015	2016	2017*	2018**
B	Pertambangan dan Penggalian	1,54	0,61	0,35	0,06	1,57
C	Industri Pengolahan	4,02	2,67	5,35	6,34	5,52
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7,34	3,08	15,10	4,00	4,85
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,49	2,95	2,96	3,18	5,16
F	Konstruksi	5,80	4,05	4,07	5,93	7,24
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,55	6,77	6,64	5,69	5,64
H	Transportasi dan Pergudangan	3,77	3,80	3,85	4,24	5,51
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,73	5,89	6,31	5,73	6,75
J	Informasi dan Komunikasi	7,04	5,65	8,35	5,87	6,18
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	9,53	8,55	4,79	2,83	6,59
L	Real Estate	8,78	6,87	5,82	4,97	5,41
M,N	Jasa Perusahaan	6,59	7,06	4,26	4,27	5,37
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,28	5,26	5,84	4,98	4,55
P	Jasa Pendidikan	7,71	7,80	3,24	5,16	6,08
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,31	7,51	5,20	5,13	4,62
R,S,T,U	Jasa lainnya	6,66	8,41	6,02	5,61	7,14
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		5,04	4,97	5,06	5,10	5,47

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2019

*) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

2.1.2.1.3. PDRB Perkapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut.

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Bantul sejak tahun 2015-2018 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2017 nilai PDRB per kapita tercatat sebesar 22,710 juta. Secara nominal mengalami kenaikan pada tahun 2018 mencapai 24,123 juta.

Tabel 2.16. Perkembangan PDRB Per Kapita (Menurut Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2010) Tahun 2015-2018

No.	Tahun	Harga Berlaku		Harga Konstan	
		Nilai (000 Rp)	Pertumbuhan	Nilai (000 Rp)	Pertumbuhan
1	2015	19.946	7,93	16.089	3,66
2	2016	21.309	6,83	16.674	3,63
3	2017*)	22.710	6,68	17.287	3,68
4	2018**)	24.123	6,22	17.913	3,61

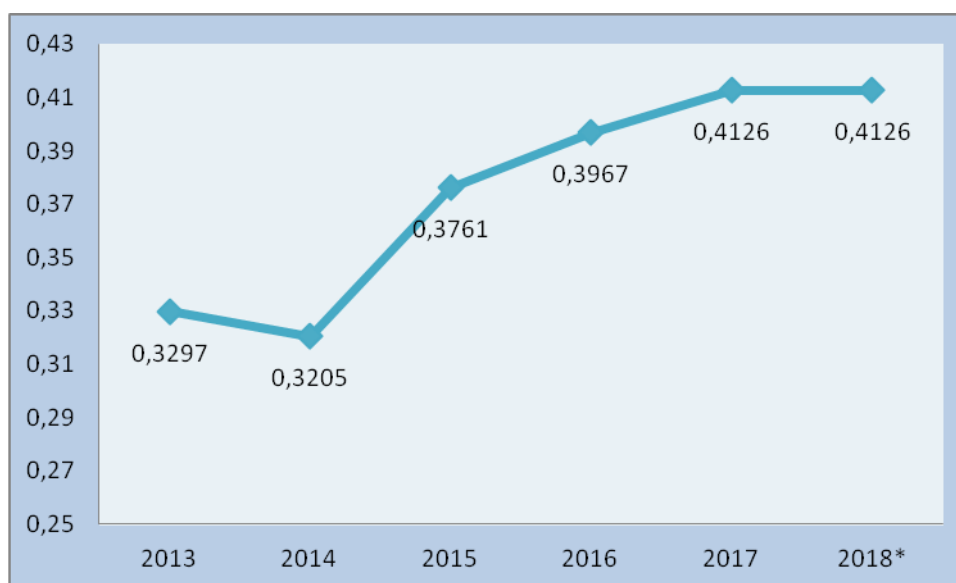
Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2019

*) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

2.1.2.1.4. Koefisien Gini

Koefisien Gini merupakan salah satu indikator untuk mengetahui distribusi dan ketimpangan pendapatan penduduk. Semakin tinggi rasio Koefisien Gini, semakin kurang merata distribusi pendapatan masyarakat. Koefisien Gini Kabupaten Bantul pada empat tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan (Gambar 2.4).



Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2019

*) angka sementara

Gambar 2.4. Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Bantul Tahun 2013-2017

Berdasarkan tabel di atas, Koefisien Gini Kabupaten Bantul pada tahun 2016 sebesar 0,3967, tahun 2017 naik menjadi 0,4126 dan pada tahun 2018 menurut data BPS masih sama dengan tahun 2017 (angka

sementara). Angka ini masih di bawah angka Koefisien Gini DIY tahun 2018 sebesar 0,422 namun lebih tinggi dari angka nasional sebesar 0,384. Nilai tersebut termasuk dalam kategori tinggi, artinya tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat antar kelompok masih tinggi.

2.1.2.1.5. Laju Inflasi

Laju inflasi Kabupaten Bantul mengalami penurunan dari 3,96% pada tahun 2017 menjadi 2,61% pada tahun 2018. Laju inflasi tersebut diukur melalui pemantauan harga yang dilakukan di Kabupaten Bantul pada tahun 2018. Angka tersebut relatif lebih rendah apabila dibandingkan dengan laju inflasi Kota Yogyakarta yaitu 2,96% dan laju inflasi nasional yaitu sebesar 3,13%.

Inflasi di bawah 10% per tahun termasuk ke dalam kriteria inflasi ringan, yang mempunyai dampak positif dalam arti dapat mendorong perekonomian lebih baik (meningkatkan pendapatan dan investasi). Laju inflasi Kabupaten Bantul pada tahun 2018 berada di bawah laju inflasi Kota Yogyakarta dan Nasional. Hal ini menunjukkan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam mengendalikan inflasi melalui Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi (TPID) dan kebijakan-kebijakan yang diambil.

Tabel 2.17. Perkembangan Laju Inflasi Kabupaten Bantul, Kota Yogyakarta, dan Nasional Tahun 2016-2018

No.	Tahun	Laju Inflasi Kab. Bantul	Laju Inflasi Kota Yogyakarta	Laju Inflasi Nasional
1	2016	2,26	2,29	3,02
2	2017	3,96	4,20	3,61
3	2018	2,61	2,66	3,13

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2019

2.1.2.1.6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu indeks komposit yang menggambarkan tingkat pembangunan manusia. IPM mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup, dengan melalui pendekatan tiga

dimensi yaitu kesehatan, pengetahuan dan dimensi hidup layak. Dimensi kesehatan diukur melalui angka harapan hidup, dimensi pengetahuan diukur melalui harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah dan dimensi hidup layak diukur melalui kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran perkapita.

Tabel 2.18. Perkembangan IPM Kabupaten Bantul dan DIY Tahun 2014-2018

No	Tahun	NILAI IPM Kabupaten Bantul	NILAI IPM DIY
1	2014	77,11	76,81
2	2015	77,99	77,59
3	2016	78,42	78,38
4	2017	78,67	78,89
5	2018*	79,45	79,53

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2019

*) angka sementara

Menurut BPS, pada awalnya penghitungan IPM untuk dimensi pengetahuan menggunakan indikator Angka Melek Huruf (AMH) dan Angka Partisipasi Kasar (APK); dan untuk Dimensi Standar Hidup Layak (Pengeluaran) menggunakan indikator Produk Domestik Bruto (PDB) perkapita. Sedangkan untuk dimensi kesehatan dari dulu tetap menggunakan indikator Usia Harapan Hidup saat lahir (UHH). Kini beberapa indikator penghitung IPM telah diganti. Angka Melek Huruf (AMH) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan telah diganti dengan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS) untuk menghitung dimensi pengetahuan. Indikator Produk Domestik Bruto (PDB) perkapita diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) perkapita untuk menghitung dimensi standar hidup layak. Metode agregasinya pun disempurnakan dengan perubahan dari rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik. Pada tingkat provinsi dan

kabupaten/kota, PNB perkapita tidak tersedia datanya sehingga diproksi dengan pengeluaran perkapita disesuaikan, yang menggunakan data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (susenas). Metode baru ini mulai diterapkan di Indonesia pada penghitungan IPM tahun 2014 dengan dilakukan penghitungan mundur dari tahun 2010.

Berdasarkan hasil penghitungan IPM, dapat dilihat bahwa selama lima tahun terakhir nilai IPM Kabupaten Bantul menunjukkan perkembangan yang positif. Nilai IPM terus mengalami peningkatan mulai dari 77,11 pada tahun 2014 hingga mencapai 79,45 pada tahun 2018.

Berdasarkan kategori pengelompokan nilai IPM, IPM Kabupaten Bantul pada tahun 2018 berada pada kategori tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$). Meskipun capaiannya terus meningkat, tetapi nilai IPM Kabupaten Bantul selama lima tahun terakhir belum mampu meningkatkan level capaiannya menjadi sangat tinggi ($\text{IPM} \geq 80$). Harapannya, pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Bantul pada tahun-tahun mendatang mampu memberikan dampak positif terutama yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan dan kualitas penduduk Kabupaten Bantul. Belum mampunya IPM Kabupaten Bantul menembus kategori sangat tinggi bisa disebabkan peningkatan komponen-komponennya yang belum optimal. Lambatnya peningkatan komponen IPM akan terakumulasi pada peningkatan nilai IPM.

2.1.2.1.7. Nilai Tukar Petani (NTP)

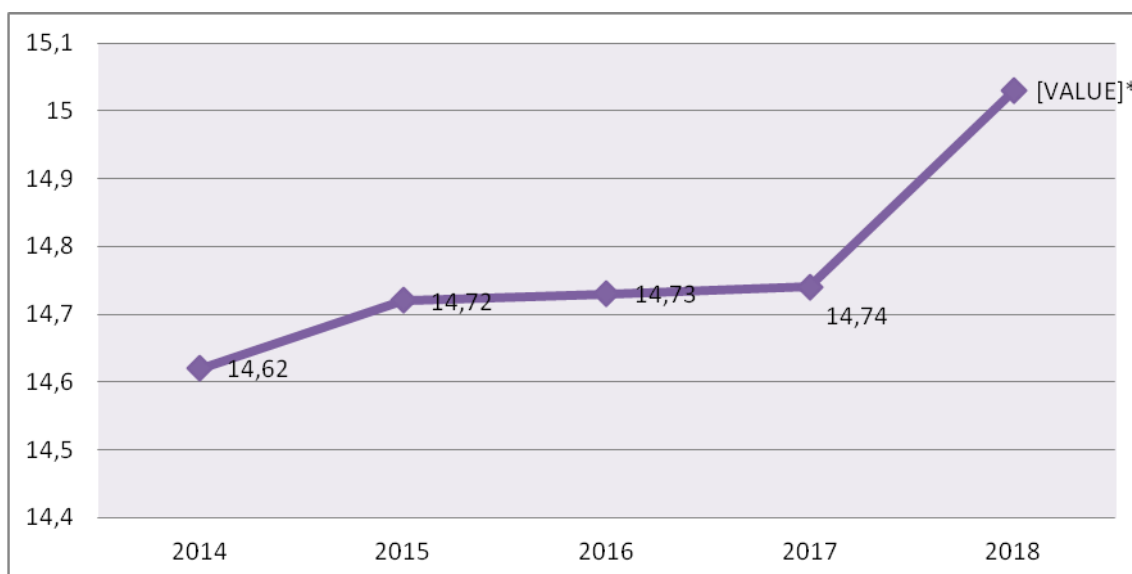
Nilai tukar petani (NTP) merupakan merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani. Penghitungan NTP diperoleh dari perbandingan antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani yang dinyatakan dalam persentase. Semakin tinggi angka NTP berarti semakin kuat tingkat kemampuan daya beli petani yang berarti menunjukkan kesejahteraan petani semakin meningkat. Nilai tukar petani di Kabupaten Bantul mengalami kenaikan dari 97,56 persen

pada 2015 menjadi 103,67 persen pada 2016 tetapi pada tahun 2017 turun menjadi sebesar 101,47. Tahun 2018 NTP mengalami kenaikan indeks menjadi 103,16. Kenaikan indeks terjadi karena kenaikan pada tiga subsektor yaitu hortikultura, tanaman perkebunan dan peternakan.

2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

2.1.2.2.1. Angka Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah merupakan indikator kinerja daerah dalam bidang pendidikan. Angka Harapan Lama Sekolah digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan bidang pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.



Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2019

*Angka Sementara

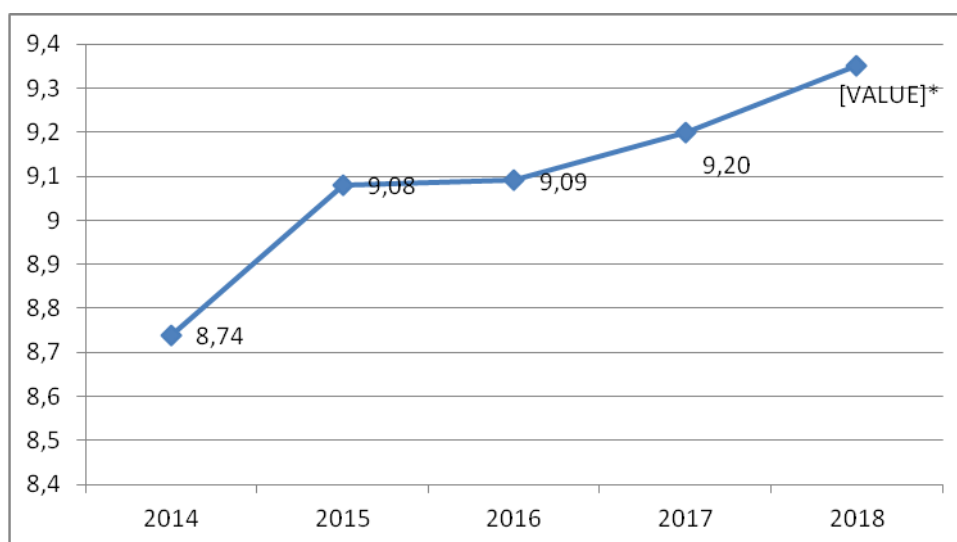
Gambar 2.5. Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Bantul Tahun 2014-2018

Gambar 2.5 diatas menunjukkan perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Bantul dari tahun 2014 sampai dengan 2018 selalu meningkat. Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Bantul pada tahun 2018 sebesar 15,03 tahun meningkat cukup signifikan

disbanding tahun 2017. Hal ini berarti lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu (tujuh tahun ke atas) di masa mendatang adalah selama 15,03 tahun atau setara dengan mengenyam pendidikan sampai perguruan tinggi jenjang Diploma III. Peningkatan Angka Harapan Lama Sekolah ini tidak lepas dari upaya pemerintah untuk mengutamakan program pembangunan di bidang pendidikan.

2.1.2.2.2. Rata-rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bantul dalam kurun waktu empat tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa minat penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi semakin meningkat. Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bantul mengalami peningkatan, dari 8,74 tahun pada tahun 2014 menjadi 9,35 pada tahun 2018. Angka ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk di Kabupaten Bantul bersekolah hanya setingkat SLTP.



Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2019

* Angka Sementara

Gambar 2.6 Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Bantul Tahun 2014-2018

Peningkatan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bantul tidak lepas dari upaya pemerintah dalam menekan angka putus sekolah melalui kebijakan Bantuan Operasional Sekolah.

2.1.2.2.3. Angka Kematian Bayi

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi dilahirkan sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Angka kematian bayi dihitung dengan jumlah kematian bayi usia dibawah satu tahun dalam kurun waktu setahun per 1000 kelahiran hidup pada tahun yang sama.

Pada tahun 2018 jumlah absolut kematian bayi sebesar 99 kasus menurun dibanding tahun 2017 sebesar 108 kasus. Capaian indikator Angka Kematian Bayi (AKB) pada tahun 2018 sebesar 8,28 terjadi penurunan dibanding tahun 2017 sebesar 8,74 per 1.000 kelahiran hidup, lebih rendah dari target 8,75 per 1.000 kelahiran. Pada tahun 2018 terdapat 99 bayi meninggal dari 11.732 kelahiran hidup.



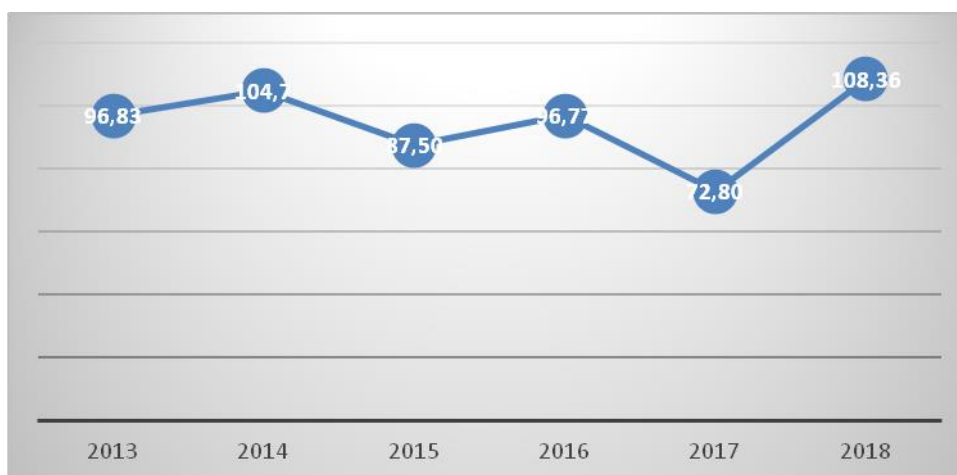
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2019

Gambar 2.7 Angka Kematian Bayi di Kabupaten Bantul Tahun 2014-2018

Upaya yang dilakukan untuk menurunkan AKB antara lain dengan meningkatkan peran serta masyarakat melalui program Desa Bebas 4 Masalah Kesehatan (DB4MK), meningkatkan keterpaduan lintas program yaitu program pencegahan penyakit melalui imunisasi pada bayi dan program perbaikan gizi masyarakat serta dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas sumberdaya di fasilitas pelayanan kesehatan ibu dan anak.

2.1.2.2.4. Angka Kematian Ibu

Selain angka kematian bayi, indikator yang digunakan untuk mengukur derajat kesehatan masyarakat adalah angka kematian ibu (AKI). Capaian angka kematian ibu pada tahun 2018 sebesar 108,36 per 100.000 kelahiran hidup (14 kasus kematian ibu), melampaui target kematian ibu 87,5 per 100.000 kelahiran hidup. Penyebab kematian ibu adalah karena adanya perdarahan sebanyak dua kasus, infeksi dua kasus dan Pre Eklampsia Berat (PEB) satu kasus, serta penyebab lain-lain sebanyak empat kasus (infeksi paru-paru, hipertiroid, dan *unclassified*).



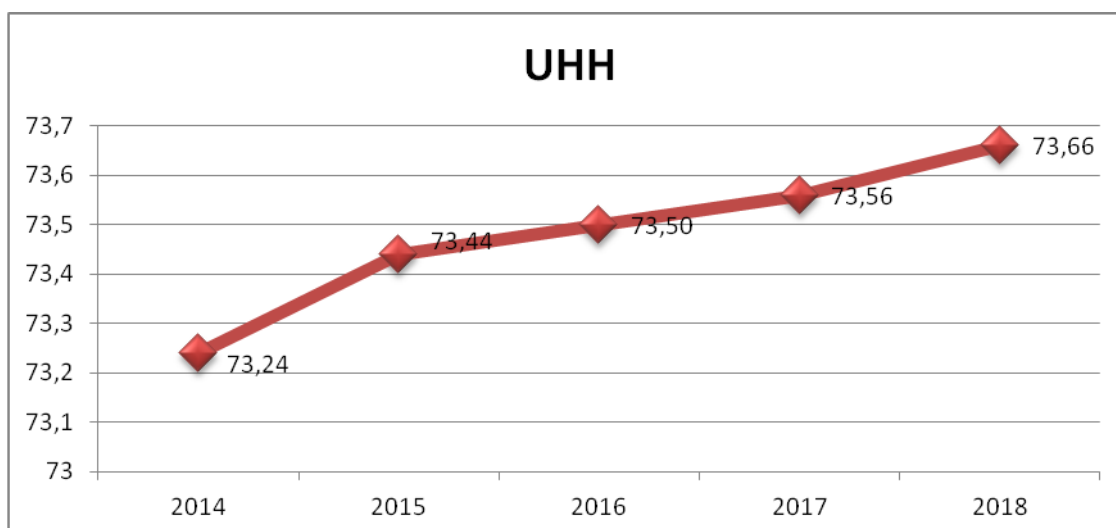
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2019

Gambar 2.8 Angka Kematian Ibu di Kabupaten Bantul Tahun 2014-2018

Upaya mempercepat penurunan kematian ibu memerlukan keterpaduan lintas program, yaitu program perbaikan gizi masyarakat, khususnya pada ibu hamil melalui Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pemulihan bagi ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) ibu hamil, program pencegahan penyakit, program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat melalui penyiapan masyarakat dalam desa siaga, ambulan desa, dan donor darah, partisipasi masyarakat melalui pemberdayaan kader kesehatan untuk pendampingan ibu hamil resiko tinggi dan pengenalan deteksi dini resiko ibu hamil resiko tinggi, peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan serta sumber daya manusia juga melalui Kelompok Pendukung Ibu (KP Ibu) yang sudah diintegrasikan dengan kelas ibu, membentuk jejaring Kesehatan Ibu Bayi Baru Lahir dan Anak (KIBBLA), dan peningkatan Puskesmas mampu Penanganan *Obstetri Neonatal Emergency* Dasar (PONED) serta pelaksanaan Jaminan Persalinan (Jampersal).

2.1.2.2.5. Umur Harapan Hidup

Kebijakan pembangunan kesehatan di Kabupaten Bantul diuraikan dalam berbagai program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Bantul di wujudkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Bupati yaitu Umur Harapan Hidup (UHH).



Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2019

Gambar 2.9 Umur Harapan Hidup di Kabupaten Bantul Tahun 2014-2018

Umur Harapan Hidup Kabupaten Bantul dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Gambar diatas menunjukkan UHH Kabupaten Bantul pada tahun 2018 yaitu 73,66 tahun. Peningkatan UHH ini dipengaruhi oleh multifaktor, antara lain faktor kesehatan yang menjadi salah satu faktor yang berperan penting di dalamnya. Secara berjenjang indikator UHH di dukung oleh Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul yaitu Angka Kematian Ibu; Angka Kematian Bayi; Prevalensi Balita Gizi Buruk; Prevalensi HIV /AIDS dan Angka Kesakitan (Incidence Rate/ IR) DBD.

2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

2.1.2.3.1. Seni Budaya

Pembangunan bidang seni budaya dan olahraga sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan dua sasaran pencapaian pembangunan bidang sosial budaya dan keagamaan yaitu untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab serta mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera.

Seni serta budaya merupakan dua hal yang saling berkaitan, setiap seni harus mengandung kebudayaan yang khas dan setiap kebudayaan pasti memiliki nilai seni yang indah. Seni budaya merupakan suatu karya seni yang sengaja dibuat dengan berlandaskan kepada akal/budi yang dimiliki oleh sekelompok masyarakat, yang digunakan dan diturunkan dari masa ke masa secara berkelanjutan dengan kata lain seni budaya adalah suatu kesimpulan dari ide serta kreasi yang dapat aplikasikan ke bentuk seni, dengan tujuan guna memajukan peradaban serta kebudayaan.

Berikut disajikan data kelompok seni dan budaya Kabupaten Bantul :

Tabel 2.19. Data Kelompok Seni dan Budaya di Kabupaten Bantul

NO	KECAMATAN	JUMLAH
1	Kec. Bambanglipuro	60
2	Kec. Banguntapan	190
3	Kec. Bantul	116
4	Kec. Dlingo	177
5	Kec. Imogiri	109
6	Kec. Jetis	165
7	Kec. Kasihan	199
8	Kec. Kretek	110
9	Kec. Pajangan	147
10	Kec. Pandak	132
11	Kec. Piyungan	146
12	Kec. Pleret	59
13	Kec. Pundong	85
14	Kec. Sanden	83
15	Kec. Sedayu	108
16	Kec. Sewon	170
17	Kec. Srandakan	88
	TOTAL	2147

Sumber: Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul, 2019

Mengingat adanya sekolah seni di Kabupaten Bantul dan berkembangnya seni kreatif maka diperlukan sarana dan prasarana yang memadai dan dapat memberikan fasilitas bagi kelompok seni untuk semakin mengembangkan karyanya. Pemerintah perlu memikirkan pembangunan gedung/sanggar seni/taman budaya yang

dapat memfasilitasi kelompok seniman dan budayawan untuk terus mengapresiasi karya-karyanya.

Selain itu, seni budaya merupakan penunjang sektor pariwisata di Kabupaten Bantul maka perlu dikembangkan wisata budaya yang merupakan salah satu pilar pariwisata sekaligus dapat melestarikan seni dan budaya lokal.

2.1.2.3.2. Olahraga

Pembangunan di bidang pemuda dan olahraga di Kabupaten Bantul dapat dilihat dari semakin banyak jumlah organisasi dan prestasi olahraga yang dicapai oleh Kabupaten Bantul baik tingkat provinsi maupun nasional meskipun jumlah klub dan gedung olahraga yang ada masih terbatas. Melihat kelompok/organisasi olahraga yang semakin berkembang dan munculnya jenis olahraga baru yang dipertandingkan perlu upaya pemerintah dalam mengembangkan potensi sumberdaya manusia olahraga yaitu pelatih, wasit, pembina, klub olahraga dan atlet. Selain itu juga perlu melengkapi sarana dan prasarana olahraga yang dapat dimanfaatkan untuk latihan maupun pertandingan.

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib

2.1.3.1.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

2.1.3.1.1.1. Pendidikan

1) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non formal, dan/atau informal.

Pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal meliputi TK dan RA. Pendidikan anak usia dini jalur pendidikan non formal meliputi KB, TPA, dan satuan PAUD sejenis.

Tabel 2.20 Kondisi Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2018

No.	Nama Lembaga	Jumlah		Jumlah Peserta Didik	Guru		
		Negeri	Swasta		Jumlah	Sertifikasi	%
1.	TK/RA	2	530	16.998		463	
2.	KB	0	487	14.251	1.428	0	0
3.	TPA	0	52	830	108	0	0
4.	SPS	0	248	4.571	740	0	0

Sumber: Dinas Dikpora Kabupaten Bantul, 2019

Tabel 2.20 menunjukkan bahwa jumlah TK Negeri hanya dua di Kabupaten Bantul, hal ini diharapkan menjadi perhatian pemerintah mengingat perkembangan anak yang disebut dengan istilah ‘*Golden Age*’ terjadi pada usia Pendidikan PAUD. Masa ini merupakan fondasi pembentukan karakter anak dan kepribadian serta kemampuan kognitif yang baik. Lembaga PAUD yang dikelola swasta di Kabupaten Bantul cukup banyak sehingga dapat membantu dalam peningkatan Pendidikan PAUD di Kabupaten Bantul. Pada tahun 2018 pemerintah Kabupaten Bantul telah memberikan insentif pada 1.894 pendidik PAUD non formal untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik.

2) Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Wajib belajar sembilan tahun yang bermutu dituntaskan melalui jalur pendidikan dasar jenjang SD dan SMP. Pendidikan SD dan SMP merupakan kewenangan pemerintah Kabupaten, oleh sebab itu pemerintah Kabupaten Bantul berkewajiban untuk menyelenggarakan Pendidikan dasar Sembilan tahun meliputi SD dan SMP. Urusan pendidikan setingkat SMA/MA/SMK sudah beralih menjadi kewenangan Pemerintah Daerah DIY mulai bulan Januari 2017, sebagai realisasi dari ketentuan dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

a. Kondisi Pendidikan Dasar

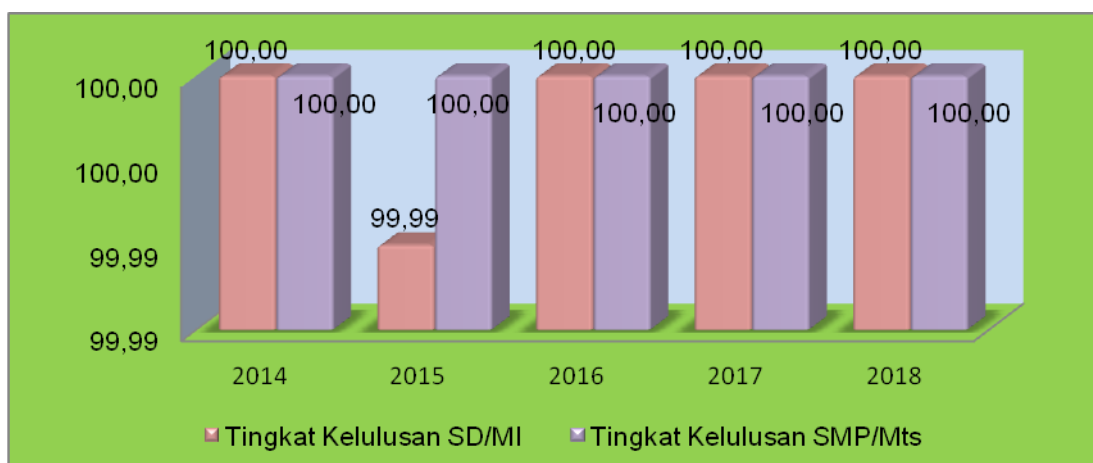
Gambaran kondisi yang mendukung keberhasilan wajib belajar sembilan tahun disajikan pada Tabel 2.22 yang menunjukkan bahwa lembaga pendidikan dan tenaga pendidikan di Kabupaten Bantul dalam rangka penuntasan wajib belajar sembilan tahun secara kuantitas telah cukup memadai. Jumlah guru SD yang telah bersertifikat pendidik profesional adalah 2.507 orang atau 49.37% dari total guru (PNS, guru tetap yayasan, dan GTT SD). Sementara itu, guru SMP yang telah bersertifikat pendidik profesional sejumlah 1.612 orang atau 67.59% dari total guru PNS, GTY, dan GTT. Banyaknya guru yang telah bersertifikat pendidik profesional menunjukkan bahwa profesionalitas kinerja dan kesejahteraan pendidik di Kabupaten Bantul semakin meningkat.

Tabel 2.21 Kondisi Pendidikan Dasar Tahun 2018

No.	Nama Lembaga	Jumlah		Jumlah Siswa	Guru		
		Negeri	Swasta		Jumlah	Sertifikasi	%
1	SD	281	82	76.878	5.078	2.507	49,37
2	MI	3	28	4.065	319	136	42,63
3	SLB	2	16	1.591			
4	SMP	47	42	30.909	2.385	1.612	67,59
5	MTs	10	18	8.622	775	436	56,26

Sumber: Dinas Dikpora Kabupaten Bantul, 2019

b. Tingkat Kelulusan SD dan SMP di Kabupaten Bantul



Sumber: Dinas Dikpora Kabupaten Bantul, 2019

Gambar 2.10 Persentase Kelulusan SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Bantul Tahun 2014-2018

Pada tahun 2014-2018 tingkat kelulusan SD/MI dan SMP/MTS menunjukkan peningkatan dan selama 3 tahun terakhir mencapai 100%, hal ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan dengan memfasilitasi dan memotivasi siswa untuk lulus menunjukkan hasil yang baik.

Tingkat kelulusan jenjang SD/MI dan SMP/MTs tahun 2018 mencapai 100%, sesuai dengan target yang dicanangkan pada tahun 2018. Dalam kaitannya dengan angka putus sekolah, segala upaya telah dilakukan untuk meniadakan anak putus sekolah. Angka putus sekolah pada tahun 2018 untuk jenjang SD/MI sebesar 0,01% dan jenjang SMP/MTs tahun 2018 sebesar 0,02%.

c. Kondisi Pendidikan Non Formal

Penyelenggaraan program pendidikan non formal diselenggarakan dalam rangka mendukung dan melengkapi pendidikan formal. Lembaga pendidikan non formal, jumlah lembaga dan jumlah warga belajar terdapat pada tabel berikut:

Tabel 2.22 Kondisi Lembaga Pendidikan Non Formal Tahun 2018

No.	Nama Lembaga	Jumlah	Jumlah Warga	Jumlah
-----	--------------	--------	--------------	--------

		Lembaga	Belajar	Tutor
1	SKB	1	170	7
2	PKBM	33	2.570	518
3	LKP	62	2.272	182
4	TBM	35	1.768	35
5	Rumpin	2	12	6
6	Homeschooling	2	25	10

Sumber: Dinas Dikpora Kabupaten Bantul, 2019

Keterangan :

- SKB : Sanggar Kegiatan Belajar
 PKBM : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
 LKP : Lembaga Kursus dan Pelatihan;
 TBM : Taman Bacaan Masyarakat;
 Rumpin : Rumah Pintar;

Pelayanan pendidikan bagi masyarakat yang belum mampu menamatkan pendidikan formal (SD, SMP, dan SMA) dilakukan melalui program pendidikan kesetaraan yaitu Kelompok Belajar (Kejar) paket. Kejar paket A setara dengan SD, Kejar paket B setara dengan SMP, dan Kejar paket C setara dengan SMA.

Tabel 2. 23 Kondisi Program Kesetaraan Tahun 2018

No.	Nama Program	Jumlah Warga Belajar		Jumlah
		L	P	
1	Paket A	178	377	555
2	Paket B	203	372	575
3	Paket C	679	761	1.440

Sumber: Dinas Dikpora Kabupaten Bantul, 2019

Hasil Ujian Nasional Program Kesetaraan (UNPK) tahun 2017 baik paket B dan C serta ujian sekolah paket A penentuan kelulusan dilaksanakan oleh lembaga masing-masing. Pada Tahun Ajaran 2017/2018, untuk Kejar Paket B dan Kejar Paket C dilaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Adapun hasil UNBK disajikan pada table berikut ini:

Tabel 2.24 Hasil Ujian Nasional Program Kesetaraan Tahun 2018

Program	Jumlah Peserta	Lulus	Belum lulus	% Kelulusan
Paket A	293	267	26	91,12
Paket B	754	648	106	90,71
Paket C	680	557	123	81,91

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, 2019

d. Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun atau rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan.

Tabel 2. 25 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Bantul Tahun 2014-2018

No	Jenjang Pendidikan	2014	2015	2016	2017	2018
1.	APK SD/MI	93,94	96,06	96,12	98,20	98,45
2.	APK SMP/MTs	94,06	93,82	95,00	99,23	97,83

Sumber : Dinas Dikpora Kabupaten Bantul, 2019

Untuk mengetahui keberhasilan program wajib belajar sembilan tahun, dapat dilihat dari indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Realisasi APK SD/MI tahun 2018 sebesar 98,45%, menunjukkan adanya kenaikan sebesar 0,25% dari capaian tahun 2017 sebesar 98,20%. APK SMP/MTs tahun 2018 sebesar 97,83%.

APM merupakan indikator yang digunakan untuk menentukan tingkat partisipasi murni penduduk usia sekolah. APM adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya terhadap jumlah penduduk di usia yang sama. APM

menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu.

Tabel 2. 26 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Bantul Tahun 2014 – 2018

No	Jenjang Pendidikan	2014	2015	2016	2017	2018
1.	APM SD/SDLB/MI	81,90	84,09	84,10	88,68	89,55
2.	APM SMP/MTs	72,89	67,64	71,09	76,60	77,33

Sumber: Dinas Dikpora Kabupaten Bantul, 2019

Realisasi APM SD/MI pada tahun 2018 adalah 89.55%, dan APM SMP/MTs tahun 2018 adalah 77.33%. Capaian APM seperti di atas bukan berarti bahwa anak usia 7-12 tahun dan anak usia 13-15 tahun banyak yang tidak bersekolah, akan tetapi dimungkinkan dari kelompok umur tersebut bersekolah di luar Kabupaten Bantul dan atau sudah masuk di jenjang sekolah yang lebih tinggi.

2.1.3.1.1.2. Kesehatan

1) Pelayanan Kesehatan

a. Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) per Satuan Balita

Posyandu merupakan wadah peran serta masyarakat untuk menyampaikan dan memperoleh pelayanan kesehatan dasarnya, maka diharapkan pula strategi operasional pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak secara dini dapat dilakukan di setiap posyandu. Pembentukan Posyandu sebaiknya tidak terlalu dekat dengan Puskesmas agar kedekatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat lebih tercapai dan idealnya satu Posyandu melayani 100 Balita.

Tabel 2.27. Rasio Posyandu per 1000 Balita Tahun 2014-2018 Kabupaten Bantul

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah posyandu	1.131	1.137	1.137	1.141	1.141
2	Jumlah balita	60.089	60.565	59.720	58.255	60.087
3	Rasio (per 1000 balita)	18,84	18,77	19,04	19,59	18,99

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2019

Dari Tabel 2.30 dapat diketahui bahwa pada tahun 2018 rasio Posyandu per 1000 Balita sebesar 18,99 berarti dalam 1000 Balita terdapat 19 Posyandu. Hal ini dapat diartikan bahwa satu Posyandu melayani 52 Balita.

b. Ketersediaan Fasilitas

Keberhasilan program pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan dapat diketahui dengan semakin meningkatnya kuantitas dan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah seperti rumah sakit umum, rumah sakit khusus (KIA, bedah), Puskesmas, Puskesmas pembantu, sarana Puskesmas keliling, balai pengobatan dan balai pengobatan-rumah bersalin.

Tabel 2.28. Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Bantul Tahun 2014-2018

No.	Fasilitas Pelayanan Kesehatan Umum	2014 (Unit)	2015 (Unit)	2016 (Unit)	2017 (Unit)	2018 (Unit)
1	Rumah Sakit Umum	10	10	10	11	12
2	Rumah Sakit Bersalin	1	1	0	0	0
3	Rumah Sakit Khusus (Bedah, Paru dan KIA)	3	3	5	5	5
4	Apotek	104	107	123	125	140
5	Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar	3	3	3	5	5
6	Toko Obat	1	4	4	5	6
7	Laboratorium	4	4	4	3	4
8	Optik	12	11	12	12	7
9	Posyandu	1.131	1.137	1.137	1.137	1.141
10	Puskesmas Rawat Inap	16	16	16	16	16
11	Puskesmas Non Rawat Inap	11	11	11	11	11
12	Puskesmas Pembantu	67	67	65	65	67
13	Puskesmas Keliling	27	27	27	27	27
14	Klinik Utama	2	2	2	3	2
15	Klinik Pratama	12	24	47	55	64

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2019

Secara umum fasilitas kesehatan semakin meningkat, dengan demikian diharapkan lebih banyak kemudahan akses masyarakat untuk mendapat pelayanan kesehatan.

Setiap 240.000 penduduk harus tersedia satu unit rumah sakit sebagaimana diatur dalam Kepmen Permukiman dan Prasarana Wilayah nomor 534/KPTS/M/2001. Jumlah penduduk Kabupaten Bantul tahun 2018 sebanyak 939.718, berarti minimal harus ada 4 unit rumah sakit. Sampai tahun 2018 jumlah rumah sakit yang tersedia ada 12 unit, hal ini menunjukkan ketersediaan rumah sakit di Kabupaten Bantul telah mencukupi.

Pada tahun 2018 dibentuk *Public Safety Center* (PSC) 119 Bantul. PSC 119 merupakan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Publik yang selanjutnya disebut SIGAP. SIGAP adalah Optimalisasi penyelenggaraan Public Safety Center (PSC) 119 Dinkes Bantul. PSC 119 sendiri adalah unit penanganan pertama kasus kegawatdaruratan sehari-hari di masyarakat yang diharapkan menjamin respon cepat dan tepat, menyelamatkan nyawa dan mencegah kecacatan korban kegawatdaruratan. PSC 119 dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 19 tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) yang mengamankan Kabupaten/Kota membentuk PSC. PSC 119 Bantul tertuang dalam peraturan Bupati Bantul No. 99 Tahun 2018. Operasional PSC dilakukan oleh call center nomer akses 119. Instansi yang terkait dengan PSC 119 yaitu Rumah Sakit Se Kabupaten Bantul, Puskesmas se Kabupaten Bantul, UPTD Jamkesda, BPBD Bantul, Polres Bantul dan Jasa Raharja. Uji coba operasional dimulai tgl 1 November 2018 dan launching resmi oleh Bupati Bantul dilaksanakan pada tanggal 26 November 2018. Untuk petugas lapangan PSC 119 berjumlah 16 orang terdiri dari : tenaga kesehatan yaitu 6 perawat dan 2 bidan, Operator Call Center 4 Orang (tenaga kesehatan), dan Sopir 4 Orang. Hasil kegiatan PSC 119 selama 2 (dua) bulan beroperasi dari 1 November hingga 31 Desember 2018 telah menangani 15 kejadian home emergency dan 66 kejadian kecelakaan.

Seluruh puskesmas di Kabupaten Bantul sudah berstatus BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) penuh sejak Tanggal 2 Januari 2016. Pelaksanaan BLUD Puskesmas ini dilaksanakan di 27

Puskesmas di kabupaten Bantul, dimana 16 Puskesmas diantaranya dilengkapi dengan pelayanan rawat inap selain pelayanan rawat jalan.

Hasil penilaian akreditasi Puskesmas sebanyak 27 Puskesmas telah terakreditasi, disajikan pada Tabel 2.30.

Tabel 2.29. Penilaian Akreditasi Puskesmas Tahun 2015-2018

No.	Puskesmas	2015	2016	2017	2018	Keterangan
1.	Pajangan		✓			Paripurna
2.	Pleret		✓			Utama
3.	Piyungan		✓			Utama
4.	Banguntapan II		✓			Utama
5.	Srandakan		✓		✓	Madya (Akreditasi Awal) Status belum ditetapkan Komisi Akreditasi (Akreditasi Ulang)
6.	Sanden		✓			Madya
7.	Pundong		✓			Madya
8.	Bantul I		✓			Madya
9.	Imogiri I		✓		✓	Madya (Akreditasi Awal) Status belum ditetapkan Komisi Akreditasi (Akreditasi Ulang)
10.	Bambanglipuro	✓			✓	Madya (Akreditasi Awal) Status belum ditetapkan Komisi Akreditasi (Akreditasi Ulang)
11.	Jetis I		✓		✓	Dasar (Akreditasi Awal) Status belum ditetapkan Komisi Akreditasi (Akreditasi Ulang)
12.	Jetis II	✓			✓	Dasar (Akreditasi Awal) Status belum ditetapkan Komisi Akreditasi (Akreditasi Ulang)
13.	Kasihani I			✓		Utama
14.	Pandak I			✓		Utama
15.	Pandak II			✓		Utama
16.	Kretek			✓		Utama
17.	Bantul II			✓		Utama
18.	Imogiri II			✓		Madya
19.	Dlingo I			✓		Madya
20.	Dlingo II			✓		Utama
21.	Sewon I			✓		Madya
22.	Sewon II			✓		Utama
23.	Sedayu I			✓		Madya
24.	Sedayu II			✓		Madya
25.	Banguntapan I			✓		Utama

26.	Banguntapan III			✓		Madya
27.	Kasihani II			✓		Madya

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2019

Standarisasi fasilitas pelayanan kesehatan rujukan dilakukan melalui penetapan kelas dan Akreditasi rumah sakit milik pemerintah dan swasta. Penetapan kelas dan status akreditasi rumah sakit disajikan pada Tabel 2.30

Tabel 2.30. Kelas Rumah Sakit Tahun 2018

No.	Rumah Sakit	Kelas	Akreditasi
1	RSUD Panembahan Senopati	B-Umum	Akreditasi
2	RSPAU dr. Suradji Hardjolukito	B-Umum	Akreditasi
3	RSU PKU Muhammadiyah	C-Umum	Akreditasi
4	RSU Nur Hidayah	D-Umum	Akreditasi
5	RSU Santa Elizabeth	D-Umum	Akreditasi
6	RSU Permata Husada	D-Umum	-
7	RSU Rahma Husada	D-Umum	Akreditasi
8	RSU Rajawali Citra	D-Umum	Akreditasi
9	RSU Griya Mahardika	C-Umum	Akreditasi
10	RSK Ibu dan Anak Umami Kasanah	C-Khusus KIA	-
11	RSK Bedah Ringroad Selatan	C-Khusus Bedah	Akreditasi
12	RSK Paru Respira	C-Khusus Paru	Akreditasi
13	RSK Ibu dan Anak Adinda	C-Khusus KIA	-
14	RSK Ibu dan Anak Kahyangan	C-Khusus KIA	-
15	RSK Bedah Adelia	C-Khusus Bedah	-

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2019

Dalam rangka pelaksanaan Upaya Kesehatan Masyarakat, semua Puskesmas melaksanakan kegiatan inovasi untuk mempercepat tercapainya tujuan pelayanan UKM di Puskesmas. Adapun kegiatan inovasi yang dilakukan oleh Puskesmas disajikan pada Tabel 2.31.

Tabel 2.31. Kegiatan Inovasi Puskesmas Dalam Rangka Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Tahun 2018

No.	Puskesmas	Inovasi
1	Srandakan	Klinik Sahaja, Caten Terpadu, Kentong lemut, Germasli gadarpa
2	Sanden	Jumantuk (Juru Pemantau Batuk), Simbah Bugar (Skrining Kesimbangan kekuatan Otot hambatan melakukan aktivitas sehari-hari dan kebugaran), Emping Desa (Pendampingan Difabilitas pada sekolah luar biasa)
3	Kretek	Sapu Lidi, Sunda Kelapa, Gadar Wisata
4	Pundong	Laskar Baladewa
5	Bambanglipuro	Pandu bumil ke pantai (Pelayanan terpadu ibu hamil kurang energi protein dan anemia terintegrasi), Geliat Jiwa (Gerakan Bambanglipuro sehat Jiwa), Pandu Semar (Pengelolaan terpadu Diabetes Melitus dan Hipertensi menuju pribadi yang sehat mandiri dan religius)
6	Pandak I	Senam Lansia Mobile, Anjungan Pendaftaran Mandiri
7	Pandak II	Si Pasta Gold (Sistem Pemantauan Status Gigi Dan Mulut Oleh Kader), Pandu Pesat Mobile, Peka Tensi
8	Bantul I	Tenda Tensi (Temukan tanda-tanda hipertensi). Program 1 Jumantik 1 Keluarga
9	Bantul II	Jumilah (Kunjungan Ibu Hamil Wilayah)
10	Jetis I	Geliat Barongan (Gerakan Peduli Sehat), Sindu Asih (Sindet Peduli Kesehatan dan Kebersihan), Kalapeka (Kelas Lansia Peduli Kesehatan), Paguhati (Paguyuban Kuliner Sehat dan Peduli), Kepak Paud (Kelompok Peduli kesehatan anak Paud), Rehat Manis (Remaja Sehat SMA Jetis), Gropyok TB (gerakan Jaring dan Obati TB), Si JUJU (Siswa Jumantik Junior).
11	Jetis II	Duta Bagiku (Peduli Kesehatan balita gizi kurang)
12	Imogiri I	PEKASIGIMAS (Pembentukan Kader Orang Tua Sikat Gigi di sekolah dan di Rumah), Bulaning Simbah (Bulan Skrining Simbah), Gebrak PTM, AKU DI DESA SAJA (Ayo Kuatkan Upaya Desa Siaga Sehat Jiwa)
13	Imogiri II	Jalan Bemo
14	Dlingo I	Wasemar (Whats app Mesem Marem)
15	Dlingo II	Tiwul Gatot (Tingkatkan Kualitas dan gaya hidup Sehat secara total), Emping Jamil (Pendampingan Remaja pada Ibu Hamil)
16	Pleret	Kripek Paru (Kita perangi Penyakit Paru), Jamuku

No.	Puskesmas	Inovasi
		(Sehat dengan jamu), Kabar Purba (Kawasan Bebas Asap Rokok), Pager si Botak (Pekan Gerakan Imunisasi Boster Serentak), Tuman, Badot Tersenyum (Buat anak dan Orang Tua tersenyum,
17	Piyungan	Situs Payak Piyungan (Eliminasi TB), Pinggang Wader Mas (Tentang Jiwa)
18	Banguntapan I	Gerdu Batuk (Gerakan Terpadu bantu penderita Tuberkulosis), Prokesun (Program Promosi Kesehatan Keliling Dusun)
19	Banguntapan II	Sana Sini (Sehatkan anak Sejak Dini), Sapha Lansia (Satu atap Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia)
20	Banguntapan III	Gemar Mbatik
21	Sewon I	Sabar Mas (Sabtu Sehat Bersama Masyarakat)
22	Sewon II	Pemberdayaan Terpadu Kesehatan
23	Kasihani I	Pasangan Peri
24	Kasihani II	Jamah Linsek Viagra (Jumat kunjungan Rumah dan Pelayanan Rujukan lintas sektoral ataupun Penjemputan Via Grhasia), Budiman Dasi Merah (Budidaya Manfaat Daun sirih Mencegah Gusi berdarah), Pepes Katuk (Pemuda Pemudi Sumberan Kenalkan ASI Terbaik Keluarga)
25	Pajangan	Pelangi Batik (Pelayanan gigi untuk balita senyum cantik), Bunga Kertas (Bantu penanganan korban kekerasan rumah tangga), Kleting Kuning (Kelola dan tingkatkan gizi untuk kurangi stunting) Sajam Gurantik (Satu jam dalam seminggu berantas Jentik), Raja ampuh (Rawat gangguan Jiwa sampai Sembuh)
26	Sedayu I	Mama Petik Dusun, Gamet Misteri, Gerak TB dan Anemia
27	Sedayu II	ODAMANTI (Orang Dampingan Pemantau Jentik), MASDA (Germas Muda Sedayu), DOKMANTI (Dokter Kecil Pemantau Jentik), PEMBATIK (Pemuda Pemberantas Jentik), RATU JUM (Rumah Satu Jumentik)

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2019

Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) berbasis komputerisasi telah dilakukan di semua Puskesmas, dilengkapi dengan perangkat keras berupa komputer *server*, komputer *client*, dan jaringan, serta perangkat lunak yang digunakan yaitu sistem *e-Health* ataupun *Integrated Health Information System* (IHIS) di 24 Puskesmas

dan Sistem Informasi Puskesmas (Simpus) di 3 Puskesmas. Beberapa Puskesmas juga mengembangkan Anjungan Pendaftaran Mandiri, sehingga makin mempercepat antri pendaftaran pasien.

Peningkatan SIK di puskesmas dan rumah sakit telah diintegrasikan dengan *Digital Government Services (DGS)* yaitu *Bantul HealthCareDigital Government Services*. *Bantul HealthCare DGS* merupakan pengaplikasian teknologi informasi dan telekomunikasi di sektor publik untuk memudahkan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik dalam rangkaian menuju Kabupaten Pintar / *Smart Regency*. Dengan adanya layanan *Bantul HealthCare DGS* ini, masyarakat dapat mengakses informasi tentang profil kunjungan puskesmas dan rumah sakit, kondisi 10 besar diagnose penyakit berdasarkan kunjungan rawat jalan dan gawat darurat, kondisi penggunaan tempat tidur di rumah sakit, jumlah rujukan, dan ketersediaan golongan darah.

Pada tahun 2018 pelayanan kesehatan penduduk miskin telah dilakukan integrasi peserta Jamkesda ke Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai peserta PBI APBD sebanyak 61.280 jiwa. Jumlah peserta Jamkesda pada tahun 2018 sebanyak 65.000 jiwa. Hal ini membantu penanganan masalah kesehatan yaitu biaya pengobatan bagi masyarakat miskin, rentan miskin dan kriteria tertentu yang belum mempunyai jaminan kesehatan. Kriteria tertentu yang mendapat Jamkesda adalah GTT/PTT, kader kesehatan, kaum rohaniwan Islam, relawan dan orang – orang yang berjasa kepada Pemerintah Kabupaten Bantul di bidang sosial dan kemasyarakatan.

Jaminan Kesehatan meliputi beberapa jenis penyelenggaraan jaminan kesehatan dari berbagai sumber biaya. Jumlah penduduk yang mempunyai jaminan kesehatan sebanyak 884.024 jiwa (94,07%).

Tabel 2.32. Data Kepesertaan Jaminan Kesehatan Tahun 2018

No.	Jenis Kepesertaan Jaminan Kesehatan	Jumlah Peserta (jiwa)	%
1.	Jaminan Kesehatan Nasional		
1.1.	Penerima Bantuan Iur (PBI) APBN	499.511	53.16%
1.2	Penerima Bantuan Iur (PBI) APBD	61.280	6.52%
1.3	Pekerja Penerima Upah (PPU) Pemerintah	84.985	9.04 %
1.4	Pekerja Penerima Upah (PPU) Badan Usaha	114.557	12.19 %
1.5	Bukan Pekerja	35.842	3.81 %
1.6	Mandiri	87.849	9.35 %
	<i>Jumlah penduduk yang terdaftar JKN</i>	884.024	94.07%
	<i>Jumlah penduduk yang belum terdaftar JKN</i>	55.694	5.93 %
	<i>Total penduduk Kab Bantul</i>	939.718	100 %
2.	JAMKESTA (Jamkessus)	5791	0,62
3.	JAMKESDA	65.000 (sebanyak 61.280 sudah diintegrasikan ke JKN)	

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2019

c. Ketersediaan Tenaga Kesehatan

Ketersediaan tenaga kesehatan menunjukkan ketersediaan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan tenaga kesehatan yang disertai dengan peningkatan ketersediaan Sarpras/fasilitas kesehatan tentunya akan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Namun kondisi ini perlu diimbangi dengan regulasi agar tenaga kerja benar-benar kompeten dibidangnya, sehingga meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pelayanan yang dapat berakibat fatal. Regulasi tersebut antara lain dengan menerbitkan aturan bahwa setiap tenaga yang bekerja di sektor kesehatan (dokter, dokter gigi, perawat, bidan, apoteker, nutrisisionis, analis, *radiographer*, fisioterapis dan sanitarian) wajib memiliki surat izin sebelum melakukan pekerjaan sesuai kompetensinya.

Tabel 2.33. Jumlah Tenaga Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Pemerintah Tahun 2014-2018

No.	Jenis Tenaga	2014	2015	2016	2017	2018
1	Dokter Spesialis	39	46	61	65	202
2	Dokter Umum	106	103	127	154	238
3	Dokter Gigi Spesialis	9	8	6	7	8
4	Dokter Gigi	48	54	42	41	44
5	Perawat	563	562	670	703	1.007
6	Perawat Gigi	78	78	87	93	93
7	Bidan	310	327	306	317	403
8	Kefarmasian	68	61	85	92	90
9	Kesehatan Masyarakat	59	52	100	113	37
10	Sanitarian	52	53	58	64	57
11	Gizi	64	62	63	69	77
12	Keterampilan Fisik	23	25	30	36	26
13	Teknis Medis	93	90	152	149	103
14	Tenaga Non Kesehatan	567	563	641	697	203

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2019

Secara khusus, ketersediaan tenaga kesehatan erat kaitannya dengan rasio dokter per jumlah penduduk. Rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada. Menurut standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, idealnya satu dokter melayani 2.500 penduduk.

Tabel 2.34. Jumlah Dokter per 1000 Penduduk Kabupaten Bantul Tahun 2014-2018

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Dokter Umum	106	103	127	154	238
2	Jumlah Dokter Spesialis	39	46	61	65	202
3	Jumlah Penduduk	968.632	919.440	928.676	931.356	939.718
4	Rasio Dokter Umum (per 1000 penduduk)	0,11	0,11	0,14	0,16	0,25
5	Rasio Dokter Spesialis (per 1000 penduduk)	0,040	0,050	0,065	0,070	0,21

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2019

Pada Tahun 2018 rasio dokter per jumlah penduduk mencapai 0,25 per 1000 penduduk atau satu dokter melayani 4.000 penduduk. Hal ini menunjukkan masih kurangnya dokter di Kabupaten Bantul.

Meskipun terdapat peningkatan, namun hal ini masih menunjukkan kurang memadainya jumlah dokter di Kabupaten Bantul.

d. Pelayanan Kesehatan Lansia

Pelayanan kesehatan lansia sesuai standar (SPM) meliputi pemeriksaan tanda vital, tes kolesterol, gula darah dan tes gangguan memori. Selain itu juga memasyarakatkan pentingnya kesehatan preventif pada kelompok usia lanjut dan pemeliharaan kesehatan dengan melakukan olah raga yang teratur serta pentingnya konsumsi makanan bergizi seimbang.

Dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan lansia telah terbentuk Posyandu Lansia sejumlah 937 unit dan telah dilaksanakan skreening pada sejumlah 38.724 orang dari sasaran 45.188 orang (85,7%).

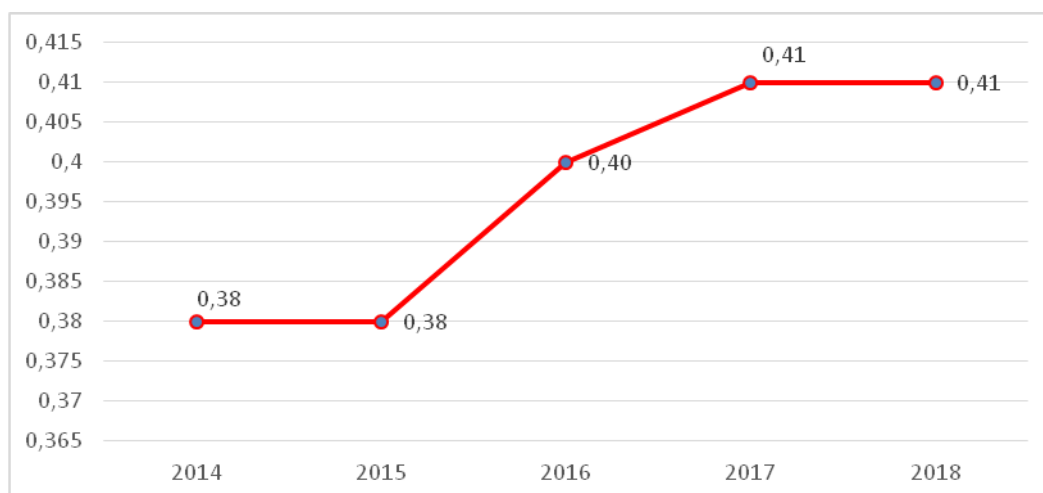
Untuk dukungan layanan kesehatan Lansia, seluruh Puskesmas telah santun Lansia. Tahun 2018 Puskesmas santun Lansia strata II ada tiga Puskesmas, yaitu Puskesmas Kasihan II, Banguntapan II, dan Piyungan.

2) Balita Gizi Buruk

Persentase balita gizi buruk adalah persentase balita dalam kondisi gizi buruk terhadap jumlah balita. Keadaan tubuh anak atau bayi dilihat dari berat badan menurut umur. Secara sederhana, status gizi balita dapat diketahui dengan membandingkan antara berat badan menurut umur maupun menurut panjang badannya dengan rujukan (standar) yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2018 status gizi buruk (BB/U) pada Balita sebesar 0,41% yaitu sebanyak 199 Balita gizi buruk dari 48.908 Balita yang diukur. Capaian ini juga sudah melampaui target DIY sebesar kurang dari 1%. Masih banyaknya kasus gizi buruk disebabkan oleh beberapa hal diantaranya kurangnya asupan, pola asuh yang kurang tepat, lingkungan, penyakit infeksi, penyakit bawaan, riwayat BBLR dan adanya permasalahan sosial di dalam keluarga.

Prevalensi gizi buruk pada Balita disajikan pada grafik berikut ini:



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2019

Gambar 2.11 Prevalensi Gizi Buruk pada Balita di Kabupaten Bantul Tahun 2014-2018

Gizi buruk dapat mengarah pada stunting. Kondisi ini disebabkan oleh tidak tercukupinya asupan gizi anak, bahkan sejak ia masih di dalam kandungan. Stunting adalah kondisi di mana anak mengalami gangguan pertumbuhan sehingga menyebabkan ia lebih pendek ketimbang teman-teman seusianya. Banyak yang tak tahu kalau anak pendek adalah tanda dari adanya masalah pertumbuhan anak. Apalagi, jika stunting dialami oleh anak yang masih di bawah usia 2 tahun. Hal ini harus segera ditangani dengan segera dan tepat. Stunting adalah kejadian yang tak bisa dikembalikan seperti semula jika sudah terjadi. Prevalensi stunting berhasil diturunkan secara signifikan, yaitu pada tahun 2017 sebesar 10,41% menurun pada tahun 2018 menjadi sebesar 9,7%.

3) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Jiwa

a. Pencegahan dan Penanggulangan Demam Berdarah Dengue (DBD)

Angka kesakitan DBD pada tahun 2018 sebesar 19,52 per 100.000 penduduk (182 kasus) lebih rendah dibanding tahun 2017 yaitu 57,98 per 100.000 penduduk (540 kasus). Pada tahun 2018 tidak terdapat

kematian penderita DBD, menurun dibandingkan tahun 2017 di mana terjadi dua kematian.

b. Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit menular Tuberkulosis (TB)

Angka kesembuhan TB tahun 2018 (pasien yang diobati pada tahun 2017) sebesar 80,6% dari target 85%, meningkat dibandingkan tahun 2017 (pasien yang diobati pada tahun 2016) sebesar 73,3%. Selain itu, penemuan kasus BTA positif pada tahun 2018 adalah sebanyak 345 kasus (sampai dengan TW3 dan belum PWS) dari target 594 kasus. Permasalahan yang dihadapi dalam pengendalian TB antara lain adalah masih ada stigma/pengucilan terhadap penderita TB oleh masyarakat yang berakibat penderita enggan atau malu untuk berobat, adanya penderita yang *lost follow up* karena berpindah tempat tanpa bisa terlacak, dan terjadinya resistensi obat pada penderita TB.

c. Pencegahan dan Penanggulangan Leptospirosis

Pada tahun 2018 telah ditemukan kasus leptospirosis sebanyak 98 kasus dengan satu di antaranya meninggal dunia. Angka kesakitan leptospirosis pada tahun 2018 adalah 10,5 per 100.000 penduduk, menurun dibandingkan tahun 2017 yaitu 11,4 per 100.000 penduduk (106 kasus dengan 1 kematian). Upaya-upaya komprehensif dalam rangka pencegahan dan penanggulangan leptospirosis telah dilakukan.

d. Pencegahan dan Penanggulangan HIV-AIDS

Angka prevalensi HIV-AIDS sampai tahun 2018 sebesar 0,19%, terjadi peningkatan dibanding tahun 2017 sebesar 0,09%. Angka ini menunjukkan endemisitas kasus HIV termasuk baik, jauh lebih rendah dibandingkan target sebesar 0,5%. Kasus HIV-AIDS banyak ditemukan pada kelompok umur 20-59 tahun. Akselerasi pengendalian HIV-AIDS dilakukan melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan pada kelompok beresiko rendah (Bumil, penderita TB) dan pada kelompok potensial (umur 15-24 tahun), dengan cara intensifikasi konseling,

penemuan dan pengobatan kasus, peningkatan pengetahuan komprehensif tentang HIV pada kelompok potensial, serta dilakukan pengendalian Pencegahan Penularan Ibu Anak (PPIA) dengan cara konseling dan tes HIV pada semua ibu hamil. Untuk mendukung upaya-upaya tersebut dilakukan penambahan jumlah layanan konseling dan tes HIV di 5 RS swasta di Kabupaten Bantul, sehingga sampai akhir tahun 2018 terdapat 27 Puskesmas layanan dan 8 RS yaitu RSUD Panembahan Senopati, RSPAU Harjolukito, RS Respira, RS PKU, RS Nurhidayah, RS Elizabeth, RS Rajawali Citra dan RS Rahmahusada sebagai layanan KT HIV, enam Puskesmas Layanan Infeksi Menular Seksual (IMS), satu Puskesmas Pelayanan Rumatan Metadon (PTRM), satu Puskesmas Pengobatan Dukungan Perawatan/PDP (Puskesmas Kretek) dan dua RS PDP (RSUD dan RS Hardjolukito).

e. Pengendalian kasus kesehatan jiwa

Pada tahun 2018 terjadi peningkatan jumlah penderita gangguan jiwa berat dengan ditemukannya penderita baru sebanyak 400 orang, kasus lama 4.567 kasus. Untuk gangguan jiwa ringan pada tahun 2018 ditemukan kasus baru sebanyak 787, kasus lama 527. Untuk kejadian bunuh diri di tahun 2018 ada 8 kasus.

5) Kewaspadaan Dini dan Respon terhadap Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Wabah.

Fungsi utama surveilans penyakit adalah sebagai bentuk kewaspadaan dini dan respon terhadap potensial KLB dan wabah. Surveilans yang baik meliputi fungsi pencegahan agar tidak terjadi kasus KLB, fungsi tata laksana untuk menekan potensi penyebaran, angka kesakitan dan angka kematian, serta fungsi manajemen komunikasi resiko dalam hal memberikan informasi yang tepat dan akurat kepada *stakeholder* terkait dan seluruh masyarakat.

Pada tahun 2018 telah terantisipasi 9 (sembilan) kasus kejadian potensial KLB di wilayah Kabupaten Bantul dengan 6 (enam) di

antaranya adalah kasus keracunan makanan. Secara kuantitas, jumlah ini menurun dibandingkan tahun 2017 yaitu 14 kasus.

6) Sanitasi

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), mencakup lima pilar, yaitu Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS), Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS), Pengelolaan Air Minum Rumah Tangga (PAM RT), pengelolaan sampah rumah tangga, dan pengelolaan limbah rumah tangga.

a. Akses Jamban

Pelaksanaan program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga (PIS-PK) telah dilakukan oleh 27 puskesmas di Kabupaten Bantul dengan memotret kondisi kesehatan dari anggota keluarga sekaligus memberikan intervensi dan edukasi kesehatan salah satunya adalah tersedianya akses/jamban sehat untuk keluarga. Penduduk di Kabupaten Bantul sudah semua terlayani akses jamban sehat, namun masih ada yang menggunakan jenis cemplung dan plengsengan.

Selain PIS-PK, Pendataan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat di tatanan rumah tangga, institusi tempat kerja, institusi pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan tempat-tempat umum. Data capaian PHBS tahun 2018 di Kabupaten Bantul pada semua tatanan disajikan pada Tabel 2.35.

Tabel 2.35 Hasil Capaian Tatanan PHBS Tahun 2016 – 2018

No.	Tatanan PHBS	2016	2017	2018
1	Rumah Tangga	41,21%	47,14%	50,27%
2	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	88,31%	83,82%	83,82%
3	Institusi Pendidikan	44,38%	54,77%	54,77%
4	Tempat Kerja	26,15%	39,15%	39,15%
5	Tempat-tempat Umum	63,18%	58,52%	58,52%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2019

b. Pengawasan Kualitas Air

Kegiatan pengawasan kualitas air meliputi pengawasan kualitas air baik secara internal maupun eksternal serta pembinaan DAM dan pengelola air minum pedesaan Yogyakarta. Pengawasan dilakukan terhadap air bersih maupun air minum. Pengawasan dilakukan pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), perusahaan Depot Air Minum (DAM), Pengelola Air Minum Pedesaan (Pamdes), dan sumber air bersih masyarakat (sumur gali, mata air, dan lain-lain). Kegiatan pengawasan eksternal dilakukan dengan pengambilan sampel dan pengujian kualitas air bagi masyarakat dan dunia usaha. Pengawasan kualitas air yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan melalui laboratorium pengawasan kualitas air. Pengawasan kualitas mencakup sampel sejumlah 2.573 sampel, yang terdiri dari sampel air minum yang bersumber dari PDAM adalah lima sampel tiap kecamatan dan jumlah sampel air bersih sebanyak lima sampel tiap desa. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kebutuhan air bersih dan air minum yang berkualitas.

Cakupan air bersih pada tahun 2018 sebesar 100%, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2016 sebesar 98,0%. Hal ini menunjukkan bahwa semua masyarakat Kabupaten Bantul sudah dapat mengakses air bersih, walaupun akses air bersih ini masih mengalami kendala dari segi kualitas, kontinuitas dan kuantitas. Pada beberapa rumah tangga di kecamatan Dlingo, Imogiri, dan Pandak, tidak semua air memenuhi syarat secara kualitas karena terjadi kesulitan mendapatkan air pada musim kemarau.

c. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga

Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dinas Lingkungan Hidup mendorong masyarakat untuk mengelola sampah pada level rumah tangga agar dapat mengurangi sampah yang dikirim ke depo penampungan sampah. Pengelolaan sampah dengan cara pemilahan yaitu memisahkan sampah organik untuk dijadikan kompos dan sampah anorganik disetor ke bank sampah akan membantu menekan jumlah sampah yang dikirim ke TPST. Tahun 2018 sampah yang

dihasilkan rata-rata per hari ada 100 ton. Menurut data rumah pilah sampah (Tabel 2.37) baru mampu memilah sampah sekitar 1,89 ton sampah perhari. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah daerah dalam menyelesaikan persoalan sampah. Pemerintah berupaya memberikan edukasi kepada masyarakat tentang sampah yang bisa diolah menjadi barang yang bermanfaat dan bernilai ekonomis. Untuk mendukung itu diperlukan juga sarana prasarana pendukung yaitu tempat pembuangan sampah dengan sistem 3 R (reuse, reduce, recicle) baik dilevel dusun maupun desa. Selain itu upaya pemberdayaan masyarakat tentang pengelolaan sampah menjadi barang yang bermanfaat harus terus dikembangkan.

Tabel 2.36 Rumah Pilah Sampah di Kabupaten Bantul

No.	Rumah Pilah	Status	Jumlah Sampah (ton/bulan)
1	Karang Taruna, Sidomulyo	Kelompok	0,025
2	KSM Wirogoresik	Kelompok	0,535
3	Abot Tea	Kelompok	1,405
4	Pengambilan Sampah RT.01	Kelompok	3,050
5	PSM Azola	Kelompok	0,088
6	Ringin Mandiri	Kelompok	0,350
7	Pemuda Pemudi RT 02 Bendo	Kelompok	0,033
8	Pemuda Pemudi	Kelompok	0,055
9	Ibu-ibu Tilaman	Kelompok	0,058
10	Tempat Pembuangan Sampah	Kelompok	0,900
11	Gardu Action	Kelompok	1,800
12	Dewi Kamsa	Kelompok	0,155
13	Marem	Kelompok	0,054
14	PSM Ngudi Makmur	Kelompok	2,400
15	PSM Sedyo Makmur	Kelompok	3,200
16	Jujur makmur	Kelompok	0,240
17	Srimulyo@link	Kelompok	0,025
18	Rukun Makmur Sentosa	Kelompok	0,110
19	Sumber Rejeki	Kelompok	0,041
20	Rukun Agawe Santosa	Kelompok	0,355
21	Muntarinah	Kelompok	0,1335
22	Ijah	Kelompok	0,061

No.	Rumah Pilah	Status	Jumlah Sampah (ton/bulan)
23	Sri Uri	Kelompok	0,111
24	Inti	Kelompok	0,0566
25	Yuli	Kelompok	0,129
26	Rohmadi	Kelompok	0,1045
27	Kupas Dongkelan	Kelompok	0,575
28	Karang Taruna Poncosari	Kelompok	0,055
29	Sukirman	Perseorangan	0,105
30	Cabang Aneka Plastik	Perseorangan	2,1
31	Logam Jaya	Perseorangan	1,2
32	Sudarmi	Perseorangan	0,45
33	Limbah Berkah	Perseorangan	0,7
34	Wardoyo	Perseorangan	0,8
35	Berkah Sampah	Perseorangan	0,16
36	Joko Purnomo	Perseorangan	5,6
37	Murtiningsih	Perseorangan	4,0
38	Hengki Surya N	Perseorangan	25,2
39	Sumanto	Perseorangan	0,280
	Jumlah sampah per bulan yang diolah		56,7
	Jumlah sampah per hari yang diolah		1,89

Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul, 2019

2.1.3.1.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1) Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik

Jalan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan. Jalan sebagai prasarana distribusi barang dan jasa merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh sebab itu jalan harus dalam kondisi baik untuk memperlancar transportasi.

Berdasarkan Keputusan Gubernur DIY nomor 118/KEP/2016 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Provinsi, lokasi ruas jalan provinsi di Kabupaten Bantul sepanjang 162,150 km.

Panjang jaringan jalan kabupaten (beraspal) di Bantul sebesar 624,47 km. Pada Tahun 2018 jalan kabupaten dalam kondisi mantap

sepanjang 465,73 km naik dari tahun sebelumnya sepanjang 341,22 km pada Tahun 2017. Pengembangan fungsi jalan dapat meningkatkan aksesibilitas kewilayahan maupun sektoral. Peningkatan jalan kabupaten sebanyak 35 ruas dengan total panjang 22,67 km serta pemeliharaan rutin jalan kabupaten sebanyak 41 ruas dengan panjang 118,56 km yang tersebar di 17 Kecamatan.

Fungsi Jogjakarta Outer Ringroad (JORR) direncanakan sebagai jaringan lintas barang terutama kendaraan dengan tonase besar. Rute JORR sepanjang 110 km dan yang masuk wilayah Kabupaten Bantul sepanjang 47,48 km yaitu ruas Sentolo-Imogiri, Imogiri-Piyungan dan Piyungan-Kalasan.

2) Rasio Jaringan Irigasi

Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi. Secara operasional, jaringan irigasi dibedakan ke dalam tiga kategori, yaitu jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier. Rasio jaringan irigasi adalah perbandingan panjang jaringan irigasi terhadap luas lahan pertanian. Panjang jaringan irigasi meliputi jaringan primer, sekunder dan tersier.

Dalam pengelolaan jaringan irigasi, tolok ukur keberhasilan pengelolaan adalah efisiensi dan efektifitas. Tolok ukur efisiensi dapat diwakili dengan cakupan daerah irigasi (DI) yang terlayani air irigasi sementara tolok ukur efektifitas diwakili oleh capaian saluran irigasi dalam kondisi baik.

Berdasarkan Permen PU dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi bahwa kewenangan Kabupaten Bantul meliputi 118 DI (DI Permukaan:100 dan DI Air Tanah: 18) dengan luas 9.368 Ha.

Target kondisi jaringan irigasi primer dan sekunder yang berfungsi baik tahun 2018 (DI kewenangan Kabupaten Bantul) adalah

81,66% (7.050,3 Ha) dan terealisasi 80,44% (6.943 ha) atau tercapai sebesar 98,51%. Data target dan capaian saluran irigasi dalam kondisi baik selama lima tahun terakhir disajikan pada Tabel 2.37.

Tabel 2.37. Target dan Capaian Saluran Irigasi dalam Kondisi Baik Tahun 2014-2018

TAHUN	SALURAN IRIGASI (PRIMER DAN SEKUNDER) DALAM KONDISI BAIK			
	TARGET (M)	%	CAPAIAN (M)	%
2014	181.523,40	87	184.632,25	88.49
2015	183.521,88	88	186.754,37	89.55
2016	190.422,09	81	193.957,00	82,50
2017	188.071,20	80	188.541,38	80,20
2018	189.247,65	80,5	190.422,09	81,00

Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul, 2019

Luas sawah DI yang menjadi kewenangan Kabupaten Bantul yang terairi dengan baik sebesar 81,16% (7.050,52 ha) dan terealisasi sebesar 80,44% (6.945,19 ha) atau melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 0,72%. Data target dan capaian DI kewenangan Kabupaten Bantul yang terlayani air irigasi selama lima tahun terakhir dari tahun 2014-2018 dapat dilihat pada Tabel 2.38

Tabel 2.38. Target dan Capaian DI yang Terlayani Air Irigasi Tahun 2014-2018

Tahun	Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Bantul Yang Terairi Dengan Baik			
	Rencana (Ha)	%	Realisasi (Ha)	%
2014	7.425,24	86	7.552,16	87.47
2015	7.511,58	87	7.565,97	87.63
2016	6.820,86	79	7.004,00	81.12
2017	6.907,20	80	7.007,35	81,16
2018	7.050,52	81,16	6.945,19	80,44

Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul, 2019

3) Drainase Dalam Kondisi Baik

Drainase merupakan pembuangan air permukaan baik secara gravitasi maupun dengan pompa dengan tujuan untuk mencegah terjadinya genangan, menjaga dan menurunkan permukaan air sehingga genangan air dapat dihindarkan. Kondisi sistem drainase di Kabupaten Bantul masih merupakan drainase gabungan dengan sistem drainase terbuka, dimana pembuangan air limbah dan air hujan serta air kotor disalurkan dalam satu saluran. Sehingga, kondisi drainase yang baik atau tidak tersumbat dapat diwakili oleh ada/tidaknya banjir genangan akibat curah hujan yang tinggi. Semakin luas banjir genangan menunjukkan drainase tidak berfungsi dengan baik.

Tabel 2.39. Data Penanganan Banjir Tahun 2015-2018

No	Tahun	Target		Realisasi		Kinerja (%)
		%	Penanganan Banjir (ha)	%	Penanganan Banjir (ha)	
1	2015	13,52	120,80	13,52	120,80	100
2	2016	13,78	123,13	20,30	181,43	147,71
3	2017	20,56	183,71	24,90	222,49	121,11
4	2018	27,34	244,30	28,84	257,70	105,49

Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul, 2019

Ket.: Luas daerah rawan banjir luapan tahun 2014 adalah 893,56 Ha

4) Tempat Pemakaman Umum

Tempat pemakaman umum tersebar dilingkungan permukiman penduduk, beberapa merupakan makam keluarga. Sampai saat ini belum ada permasalahan di lingkungan perkampungan warga terkait tempat pemakaman, tetapi dengan pesatnya pembangunan perumahan yang berdekatan dengan lokasi perkampungan menimbulkan potensi konflik sosial antara masyarakat sekitar dengan warga perumahan yang mayoritas merupakan penduduk luar daerah. Hal ini perlu disediakan tempat pemakaman umum yang dapat menampung warga perumahan maupun masyarakat umum.

Penyediaan areal pemakaman umum di Kecamatan Imogiri salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan pemakaman khususnya bagi masyarakat yang tinggal di perumahan.

5) Perencanaan Tata Ruang

Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Produk perencanaan tata ruang yang telah dimiliki Kabupaten Bantul sampai dengan tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 2.40

Tabel 2.40. Produk Perencanaan Tata Ruang Kabupaten Bantul

No.	Produk Perencanaan Tata Ruang
1.	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Kabupaten Bantul tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030
2.	Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Sewon 2018-2038
3.	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Kasihan 2018-2038
4.	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perizinan Pemanfaatan Ruang
5.	Dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sejumlah 17 Kecamatan
6.	Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)

Sumber: Bappeda Kabupaten Bantul, 2019

Dari 17 dokumen RDTR yang telah disusun, baru dua buah RDTR yang ditetapkan menjadi peraturan daerah yaitu RDTR dan PZ BWP Sewon dan Kasihan. Hal ini dikarenakan proses penetapan dokumen RDTR menjadi perda harus melalui proses yang panjang dan melibatkan pemerintah provinsi maupun pusat.

Tabel 2.41. Rencana Tata Ruang yang disusun Tahun 2014-2018

Tahun	Rencana tata ruang yang disusun
2014	RDTR dan PZ Kec. Pajangan, Imogiri, Pleret, Pandak, dan Sedayu
2015	RDTR dan PZ Kec. Piyungan, dan Pantai Selatan (Sanden, Kretek, Srandakan)
2016	RDTR dan PZ Kec. Pundong dan Jetis
2017	RDTR dan PZ Kec. Bambanglipuro, Dlingo,
2017	KLHS RTDR Kec. Bambanglipuro, Dlingo
2017	Raperda RDTR dan PZ Piyungan, Pansela, Jetis, Pundong
2017	Desain Citra Kota Bantul, Jalan Jendral Sudirman
2018	RDTR dan PZ Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaan
2018	RTBL Kawasan Srandakan, Kawasan Bantul Kota , Kawasan

Tahun	Rencana tata ruang yang disusun
	Sanden dan RTBL Zona pengembangan Kawasan Parangtritis II
2018	Kajian KLHS RTRW dan review Naskah Akademik RTRW
2018	Masterplan dan DED Gerbang masuk Kabupaten Bantul dan Kawasan Lindung Hargodumilah

Sumber: Bappeda dan Dipertaru Kabupaten Bantul, 2019

6) Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Dalam rangka menyeraskan dan mensinergikan penataan ruang daerah serta menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah, dalam melaksanakan koordinasi penataan ruang, membentuk BKPRD Kab/Kota. Kabupaten Bantul telah membentuk BKPRD dengan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2015 tentang Pembentukan Badan Peraturan Ruang Daerah, Sekretariat, dan Kelompok Kerja Penataan Ruang Daerah. BKPRD Kabupaten Bantul rutin melakukan koordinasi dalam rangka penanganan dan penyelesaian permasalahan pemanfaatan ruang.

Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang di Kabupaten Bantul menunjukkan adanya ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dengan keperuntukannya, seperti terdapat pada tabel berikut:

Tabel 2.42. Tingkat Kesesuaian Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Bantul Tahun 2018

FUNGSI KAWASAN		TINGKAT KESESUAIAN (HA)			JUMLAH (HA)
		SESUAI	BELUM SESUAI	TIDAK SESUAI	
Lindung	Kawasan hutan lindung	432.08	143.75	695.16	1,270.99
	Kawasan resapan air	2,231.23	0	408.50	2,639.73
	Sempadan pantai	187.33	0	67.09	254.42
	Sempadan sungai	1,716.23	0	657.94	2,374.17
	Kawasan cagar budaya	146.48	20.14	109.02	275.64
	Jumlah lindung (Ha)	4.713,36	163.89	1937.71	6,814.96

FUNGSI KAWASAN		TINGKAT KESESUAIAN (HA)			JUMLAH (HA)
		SESUAI	BELUM SESUAI	TIDAK SESUAI	
	% terhadap kawasan lindung	69,16	2,40	28,43	100,00
	% kawasan Kabupaten Bantul	9,42	0,33	3,87	13,62
Budidaya	Kawasan peruntukan permukiman perdesaan	9,643.33	919.58	373.09	10,936.00
	Kawasan peruntukan permukiman perkotaan	6,998.12	5,189.76	7.87	12,195.75
	Kawasan peruntukan hutan rakyat	408.98	386.02	384.51	1,179.51
	Kawasan peruntukan pertanian lahan basah	8,286.30	653.8	1,726.09	10,666.19
	Kawasan peruntukan pertanian lahan kering	3,657.76	2.15	1,125.39	4,785.30
	Kawasan peruntukan industri	1,775.00	0	688.75	2,463.75
	Kawasan peruntukan pariwisata	224.67	758.29	0	982.96
	Jumlah budidaya (Ha)	30,994.15	7,909.60	4,305.70	43,209.45
	% terhadap kawasan lindung	71.73	18.31	9.96	100.00
	% terhadap Kabupaten Bantul	61.96	15.81	8.61	86.38
	Total (Ha)	35.707,51	8.073,49	6.243,41	50.024,41
	% terhadap Kabupaten Bantul	70,45	40,36	19,20	100,00
	Kategori	Tinggi	Sedang	Rendah	

Sumber: Dipertaru Kabupaten Bantul, 2019

Tabel diatas menunjukkan sebagian besar ruang yang ada masih sesuai dengan keperuntukkannya yaitu 70,45%, masuk dalam kategori tinggi, namun masih ada ketidaksesuaian sebesar 19,20%, masuk dalam kategori rendah.

7) Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. RTH terdiri dari RTH publik (taman kota, hutan kota, jalur hijau jalan, sempadan rel kereta api, jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi, sempadan sungai, sempadan pantai, pengamanan sumber air baku/mata air, dan pemakaman) dan RTH

privat (pekarangan rumah tinggal; halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha; dan taman atap bangunan).

Pada tahun 2017, indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) Kabupaten Bantul tercatat sebesar 45,10. Indeks ini menunjukkan bahwa kualitas lingkungan hidup Kabupaten Bantul masih berada dalam status “waspada”. Hal ini terjadi karena adanya penurunan Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara pada tahun 2017 dibandingkan dengan tahun 2016. Tahun 2018 IKLH mencapai 53,36. Yang berarti kualitas udara di Kabupaten Bantul masih baik meskipun ada kontribusi negatif dari penambahan jumlah kendaraan bermotor. Rendahnya kualitas air di Kabupaten Bantul terutama disebabkan oleh semakin tingginya konsentrasi Fecal Coli dan Total Coli di 5 sungai yang mengalir melalui wilayah Kabupaten Bantul (telah melampaui baku mutu). Sedangkan untuk kualitas udara walaupun mengalami penurunan dari tahun sebelumnya tetapi belum melampaui baku mutu. Hal ini antara lain akibat penambahan tutupan vegetasi dan Ruang Terbuka Hijau yang sangat minim belum mampu mengimbangi penambahan sumber emisi gas pencemar udara (industri, transportasi dan kebutuhan energi lainnya) sehingga kualitas udara juga semakin menurun.

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) bertujuan untuk mempertahankan, memelihara, dan meningkatkan luasan RTH yang secara ekologis dapat meningkatkan kualitas air tanah, mencegah banjir, mengurangi polusi udara dan untuk memberikan fungsi sebagai ruang publik, sarana rekreasi dan sebagai *tetenger* (*landmark*) kota. Pemeliharaan RTH dilakukan dengan melakukan pemupukan, penambahan tanaman dan perbaikan pada taman-taman yang sudah ada di wilayah Kabupaten Bantul. Pembuatan Taman Hijau dilakukan dengan pembangunan Taman Kota di Jl. Parangtritis (depan PLN dan samping SD Timbulharjo), Jl. Wakhid Hasyim, Simpang Lima Bejen, serta penataan ulang Taman Kantor DLH Kabupaten Bantul. Tahun 2018 dibangun RTH di simpang empat Ketandan

2.1.3.1.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1) Penduduk Berakses Air Bersih

Upaya untuk meningkatkan akses terhadap air bersih diantaranya dengan menambah jumlah sambungan rumah ke jaringan PDAM dan membangun instalasi Sistem Penyediaan Air Sederhana (SIPAS) melalui program APBD dan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di daerah yang rawan air bersih. Instalasi SIPAS yang terbangun tersebut selanjutnya diserahkan kepada masyarakat setempat untuk dimanfaatkan, dikelola, dan dipelihara. Proporsi jumlah penduduk yang mendapat air bersih disajikan pada Tabel 2.43.

Tabel 2.43. Persentase Penduduk Berakses Air Bersih di Kabupaten Bantul Tahun 2014-2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah penduduk yang mendapatkan akses air bersih	900.828	882.663	910.103	927.181	939.718
2	Jumlah penduduk	968.632	919.44	928.676	927.181	939.718
3	Persentase penduduk berakses air bersih (%)	93	96	98	100	100

Sumber: Dinkes Kabupaten Bantul, 2019

2) Lingkungan Permukiman Kumuh

Kebutuhan rumah yang terus meningkat tiap tahun khususnya di wilayah perkotaan yang jumlah penduduknya relatif banyak dan padat, sempitnya lahan dan mahalannya harga tanah di wilayah perkotaan mendorong munculnya permukiman kumuh. Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh ditetapkan dengan SK Bupati Nomor 220 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 364 Tahun 2014 tentang Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bantul, sebanyak 19 lokasi dengan luas 79,58 Ha.

Tabel 2.44. Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh Kabupaten Bantul

No.	Nama	Luas	Lingkup Administratif
-----	------	------	-----------------------

	Lokasi	(Ha)	Kelurahan/Desa	Kecamatan/Distrik
1	Gandekan	1,27	Bantul	Bantul
2	Deresan	2,76	Ringinharjo	Bantul
3	Mandingan	2,31	Ringinharjo	Bantul
4	Soropaten	0,71	Ringinharjo	Bantul
5	Karangmojo	2,96	Trirenggo	Bantul
6	Kweden	0,91	Trirenggo	Bantul
7	Jaranan	0,34	Banguntapan	Banguntapan
8	Jomblang	3,60	Banguntapan	Banguntapan
9	Blado	15,77	Potorono	Banguntapan
10	Semoyan	1,91	Singosaren	Banguntapan
11	Dladan	2,70	Tamanan	Banguntapan
12	Ngewotan	16,97	Ngestiharjo	Kasihan
13	Gonjen	3,92	Tamantirto	Kasihan
14	Kalipakis	1,11	Tirtonirmolo	Kasihan
15	Salakan	2,45	Bangunharjo	Sewon
16	Glugo	4,37	Panggunharjo	Sewon
17	Cepit	11,71	Pendowoharjo	Sewon
18	Pacetan	2,18	Pendowoharjo	Sewon
19	Pendowo	1,66	Pendowoharjo	Sewon
	Total	79,58		

Sumber: Bappeda Kabupaten Bantul, 2019

Penanganan kumuh dengan gerakan nasional 100-0-100 diantaranya tercapainya pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0%. Tahun 2018 berdasar studi kawasan kumuh terindikasi titik sebaran permukiman kumuh di Banguntapan, Kasihan, dan Sewon, maka perlu upaya pemerintah untuk mengurangi luasan kawasan permukiman kumuh di tiga kecamatan Kabupaten Bantul tersebut.

3) Rumah Layak Huni

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang merupakan kebutuhan dasar manusia. Pemerintah berperan

dalam menyediakan dan memberikan kemudahan dan bantuan perumahan bagi masyarakat untuk dapat menempati rumah layak huni.

Pada tahun 2018, rumah tidak layak huni dapat tertangani 1.281 unit dari dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 959 unit, 172 unit dari dana APBD Kabupaten Bantul dan sebanyak 150 unit dari DAK.

4) Fasilitasi Rumah Bagi MBR

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terjadi perubahan kewenangan terhadap penanganan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yaitu menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sementara kewenangan pemerintah kabupaten antara lain penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana, fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemda, penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan dan permukiman, penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG), dan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 ha.

Kebijakan pembangunan perumahan selain untuk mengurangi jumlah rumah tidak layak huni, juga untuk mengatasi backlog rumah dan mengurangi kawasan kumuh perkotaan. Pada tahun 2018, rumah tidak layak huni dapat tertangani 1.281 unit dari dana BSPS sebanyak 959 unit, 172 unit dari dana APBD Kabupaten Bantul dan sebanyak 150 unit dari DAK.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas kawasan perumahan dan permukiman sederhana sehat, Pemerintah Kabupaten Bantul telah menempuh berbagai upaya antara lain pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) dan bantuan stimulan pembangunan sarana prasarana lingkungan seperti jalan lingkungan, drainase dan jembatan.

Rusunawa telah dibangun di Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY) di wilayah Kecamatan Sewon, Kecamatan Kasihan, dan Kecamatan Banguntapan. Pada tahun 2009 telah dibangun Rusunawa Panggungharjo sebanyak 2 Twin Blok (TB) atau 198 unit. Pada tahun 2011 di Dusun Tambak, Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, sebanyak satu TB atau 96 unit. Pada tahun 2012 di Dusun Pringgolayan, Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan sebanyak dua TB atau 198 unit. Pada tahun 2016 di Tamanan Banguntapan dibangun Rusunawa pekerja sebanyak dua TB. Tahun 2017 Operasional 4 unit rusunawa, yaitu Rusunawa Panggungharjo, Rusunawa Ngestiharjo, Rusunawa Banguntapan, dan Rusunawa Tamanan. Selain itu peningkatan sarana dan prasarana pendukung Rusunawa Banguntapan yaitu pembangunan pos satpam dan landscape. Tahun 2018 masih dilakukan operasional empat unit rusunawa tersebut dan pembangunan tempat parkir rusunawa Panggungharjo dan Tamanan.

Pembangunan Rusunawa dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan kawasan kumuh perkotaan dan menyediakan perumahan yang layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Pembangunan Rusunawa dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan kawasan kumuh perkotaan dan menyediakan perumahan yang layak bagi MBR.

Tabel 2.45. Pembangunan Rusunawa di KPY

No.	Lokasi Rusunawa	Tahun		Kapasitas	
		Pembangunan	Operasional	Twin blok	Unit
1.	Panggungharjo, Sewon	2008	2010	2	198
2.	Tambak, Ngestiharjo, Kasihan	2011	2012	1	96
3.	Pringgolayan, Banguntapan	2012	2013	2	198
4.	Tamanan, Banguntapan (Rusunawa Pekerja)	2015 (Pematangan lahan)	2017 2018	2	190 (66 pekerja keluarga, 104 pekerja lajang)

Sumber: DPUP&KP Kabupaten Bantul, 2019

2.1.3.1.1.5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

1) Kesatuan Bangsa dan Politik

a. Pembinaan Politik Daerah

Pembinaan politik daerah di Kabupaten Bantul juga dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik. Kegiatan ini perlu dilaksanakan mengingat pentingnya pendidikan politik dan berorganisasi bagi masyarakat agar masyarakat sadar dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik di Kabupaten Bantul. Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan kualitas kehidupan sosial politik dan meningkatnya partisipasi politik serta partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan umum.

Data tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu Tahun 2014 sebagai berikut pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.46. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu di Kabupaten Bantul Tahun 2014

No.	Jumlah DPT	Jumlah suara sah	Jumlah tidak sah/ golput	Persentase suara sah
1	716.367	560.727	155.640	78%

Sumber: Kesbangpol Kabupaten Bantul, 2019

Tabel diatas menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu Tahun 2014 yang digambarkan melalui persentase suara sah sebesar 78%, sehingga tampak bahwa suara tidak sah/golput masih relatif tinggi yaitu 22%.

Melihat partisipasi masyarakat dalam pemilu belum optimal maka dalam rangka persiapan Pilkada Kabupaten Bantul tahun 2020 perlu upaya-upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terutama generasi muda sebagai pemilih pemula.

Kegiatan pembinaan politik salahsatunya adalah sosialisasi politik bagi pemilih pemula dan perempuan, forum komunikasi generasi muda, serta sosialisasi pemilih pemula melalui pemilihan OSIS.

Tabel 2.47. Kegiatan Sosialisasi Pemilos

No.	Kegiatan	Sasaran					Narasumber
		2014	2015	2016	2017	2018	
1	Sosialisasi	91 Sekolah	93 Sekolah	93 sekolah	93 sekolah	93 sekolah	- Komisioner KPU - Kakan Kesbangpol
2	TOT	78 Sekolah	65 Sekolah	70 sekolah	70 sekolah	93 sekolah	- KPU - Dikmenof - Pemda
3	Bimtek	78 Sekolah	65 Sekolah	70 Sekolah	-	-	- KPU - Pemda
4	Pelaksanaan Pemilos	75 Sekolah	65 Sekolah	70 Sekolah	-	-	Tim: - Kemenag, - Dikmenof, - Kesbangpol, - KPU
5	Monitoring Evaluasi	75 Sekolah	65 Sekolah	70 sekolah	-	-	Tim: - Kemenag, - Dikmenof, - Kesbangpol, - KPU

Sumber: Kesbangpol Kabupaten Bantul, 2019

b. Rasio Jumlah linmas

Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) merupakan satuan yang memiliki tugas umum pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam upaya menciptakan lingkungan yang kondusif dan demokratis sehingga tercipta kehidupan strata sosial yang interaktif. Rasio jumlah petugas linmas dan jumlah RT di Kabupaten Bantul pada tahun 2018, tercapai 95,3 %, yaitu jumlah Linmas 5.501 dan jumlah RT 5775.

2) Satuan Polisi Pamong Praja

Satpol PP melaksanakan tugas Penegakan Perda melalui operasi Yustisi dan Non Yustisi sebanyak 120 kali pada tahun 2018 dan

melaksanakan patroli wilayah yang dilakukan tiga kali dalam sehari untuk menjaga Kantratribmas. Selain itu juga dilakukan penyuluhan untuk meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban dengan penyuluhan pencegahan praktek prostitusi dan pencegahan miras dan Napza.

3) Pencegahan dini dan Penanggulangan Bencana

Pada tahun 2018, Kabupaten Bantul mengembangkan desa tangguh bencana menjadi kategori tingkat madya yaitu desa Sriharjo, desa Karangtengah, desa Srimartani, dan desa Muntuk. Peningkatan kewaspadaan dini kebencanaan dengan inovasi aplikasi kebencanaan berbasis android.

Tahun 2018 kejadian bencana di Kabupaten Bantul relatif rendah meskipun demikian tetap perlu dilakukan pelatihan untuk menjaga kesiapsiagaan petugas, salah satunya dengan pelatihan pemadam kebakaran dan tanah longsor. Selain itu juga dilakukan penyaluran bantuan bencana kekeringan.

Cakupan pelayanan kebakaran kabupaten dapat dinyatakan dengan perbandingan jumlah luas Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) terhadap jumlah luas potensi kebakaran. Pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Pada tahun 2018 jumlah luas WMK sebesar 176,62 Ha masih sama dengan tahun 2017 sebesar 176,62 Ha. Sementara jumlah luas potensi kebakaran tercatat sebesar 506,85 Ha,

Cakupan pelayanan kebakaran sangat tergantung dengan jumlah mobil pemadam kebakaran yang dimiliki. Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000-5000 liter yang dimiliki pada tahun 2018 adalah delapan unit. Mengingat luasnya WMK dan potensi terjadinya musibah kebakaran di wilayah Kabupaten Bantul ini, maka telah dilakukan upaya menambah tiga unit pos pemadam di Kecamatan Kasihan, Banguntapan dan Imogiri yang sudah dapat beroperasi, tapi kebutuhan sarana prasarana pendukung masih sangat minim

Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) merupakan perbandingan antara jumlah kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu tanggap terhadap jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK.

Tabel 2.48. Tingkat Waktu Tanggap di Kabupaten Bantul Tahun 2014-2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam tingkat waktu tanggap.	40	58	39	93	175
2	Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK	40	62	39	93	175
3	Jumlah total terjadi kebakaran	75	99	48	111	209
4	Jumlah kebakaran di luar jangkauan WMK	35	27	9	18	34
5	Tingkat waktu tanggap	100%	93,5%	100%	100%	100%

Sumber: BPBD Kabupaten Bantul, 2019

2.1.3.1.1.6. Sosial

5) Sarana Sosial (Panti Asuhan, Panti Jompo, dan Panti Rehabilitasi)

Kabupaten Bantul memiliki beberapa sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, dan panti rehabilitasi. Pada tahun 2014 sampai dengan 2017 ada peningkatan jumlah panti.

Tabel 2.49. Sarana Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi di Kabupaten Bantul Tahun 2014-2018

No.	Tahun	Jumlah
-----	-------	--------

No.	Tahun	Jumlah
1	2014	24
2	2015	27
3	2016	27
4	2017	26
5	2018	26

Sumber: Dinsos Kabupaten Bantul, 2019

6) PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial

PMKS yang merupakan seseorang, keluarga, atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan, dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, atau keterasingan dari kondisi atau perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan. PMKS merupakan permasalahan sosial yang tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah saja tetapi masyarakat dan dunia swasta

Tabel 2.50. Jenis PMKS di Kabupaten Bantul Tahun 2014-2018

No.	Jenis PMKS	2014	2014	2015	2016	2018
1	Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	40	72	35	43	29
2	Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	11	5	0	0	14
3	Kelompok Minoritas	0	0	0	0	0
4	Korban Trafficking	0	2	0	0	0
5	Fakir Miskin	112.300	112.300	112.300	112.300	98.604
6	Anak Dengan Kedisabilitas	1.191	996	947	821	625
7	Anak Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan	65	52	55	70	54
8	Pemulung	19	23	99	145	153
Jumlah		138.565	113.655	113.450	113.357	99.425

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bantul, 2019

Pelayanan rehabilitasi bagi PMKS, antara lain meningkatkan mentalitas anak yatim menjadi anak yang lebih mandiri dan berakhlak mulia, meningkatkan keterlibatan lanjut usia potensial dalam usaha kesejahteraan sosial, penyelenggaraan penanganan jenazah terlantar, meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian bagi PMKS anak, mengurangi permasalahan anak putus sekolah dan anak berhadapan dengan hukum melalui pelayanan jamkesus dengan bekerjasama dengan Bapeljamkesus DIY sebanyak 4 kali dengan jumlah target 2.000 orang, senam bugar lansia dengan peserta 1.600 orang di Pantai baru, Poncosari, Srandakan dalam rangka Hari Lanjut Usia Nasional, pemberian fasilitas konsumsi (permakanan) ke 19 panti, perawatan dan pemakaman jenazah terlantar, sosialisasi peduli PMKS di Sewon Srandakan Banguntapan Kasihan dan Pandak. Selain itu dilakukan razia anal gepeng dan psikotik lainnya dengan data sebagai berikut:

Tabel 2.51 Daftar PMKS Terjaring Razia

No	Jenis PMKS	Jumlah
1	Anak Jalanan	21 orang
2	Gelandangan/Pengemis	14 orang
3	Psikotik	1 orang
Total		36 orang

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bantul, 2019

2.1.3.1.2. Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar

2.1.3.1.2.1. Tenaga Kerja

1) Angkatan Kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja merupakan perbandingan jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja dapat digunakan untuk menyatakan jumlah angkatan kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Bantul disajikan pada Tabel 2.53.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul, tingkat partisipasi angkatan kerja di

Kabupaten Bantul cenderung fluktuatif. Pada tahun 2018 tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 73,87%.

Tabel 2.52. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Kabupaten Bantul Tahun 2014-2018

No.	Tahun	Jumlah
1	2014	67,55
2	2015	67,84
3	2016	67,84
4	2017	72,21
5	2018*	73,87

Sumber: Disnakertrans Kabupaten Bantul, 2019

*Angka sementara

2) Pengangguran

Pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mencari pekerjaan mungkin mendapatkan pekerjaan (*discouraged workers*), atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja/mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja

Statistik Ketenagakerjaan Daerah Istimewa Yogyakarta 2017-2018. Pengangguran di Kabupaten Bantul cenderung mengalami peningkatan meskipun dengan laju yang lambat. Hal ini ditunjukkan oleh tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Tabel 2.54. TPT merupakan perbandingan antara jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja. Pada tahun 2015, tingkat pengangguran di Kabupaten Bantul mencapai angka 2,99%, naik menjadi 3,00 pada tahun 2016 dan pada Tahun 2017 meningkat menjadi 3,12%. Menurut data BPS tahun 2018 tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 2,72. Hal ini bukan

berarti pengangguran menjadi turun, perlu dilihat lebih dalam lagi mengingat Kabupaten Bantul sebagian besar merupakan penduduk pedesaan yang lebih banyak bekerja pada sector non formal disamping itu biasanya tidak terlalu selektif memilih lapangan pekerjaan sehingga akan melakukan kegiatan apa saja/tetap bekerja.

Tabel 2.53 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bantul Tahun 2014-2018

No.	Tahun	TPT
1	2014	2,57
2	2015	3,00
3	2016	3,00
4	2017	2,87
5	2018*	2,72

Sumber: Disnakertrans Kabupaten Bantul, 2019

*Angka sementara

Beberapa upaya berupa program kegiatan yang telah dilakukan yaitu: Program Peningkatan kesempatan kerja, penempatan tenaga kerja, transmigrasi umum, perlindungan dan pengembangan ketenagakerjaan, peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, dan perluasan tenaga kerja.

3) Pencari Kerja yang Ditempatkan

Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan adalah persentasi jumlah pencari kerja yang mendaftarkan dan tercatat pada dinas kabupaten/kota yang menangani bidang ketenagakerjaan dan jumlah pencari kerja yang diterima bekerja oleh pemberi kerja dalam hal ini perusahaan yang mendaftarkan lowongan pekerjaannya pada dinas kabupaten/kota. Capaian besaran pencari kerja terdaftar yang

ditempatkan tahun 2014-2018 di Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.54. Besaran Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan di Kabupaten Bantul Tahun 2014-2018

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
Pembilang: Pencari kerja yang ditempatkan	2.316	2.531	2.107	2.650	3.230
Penyebut: Pencari kerja yang terdaftar	4.169	3.291	2.797	4.188	3.772
Besaran pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	55,55%	77%	75,3%	63,27%	85,63%

Sumber: Disnakertrans Kabupaten Bantul, 2019

Besaran pencari kerja terdaftar yang ditempatkan pada tahun 2014 hingga 2017 cenderung fluktuatif. Hal ini karena jumlah pencari kerja yang terdaftar juga mengalami fluktuasi. Pada tahun 2014, besaran pencari kerja yang ditempatkan baru mencapai 55,55% sehingga terdapat *gap expectation* yang cukup besar terhadap target yang ditetapkan pada akhir periode RPJMD. Oleh karena itu, pada tahun 2015 dilakukan intervensi besar pada program peningkatan kesempatan kerja, sehingga pencari kerja yang ditempatkan mencapai 77%, turun sebesar 75,3% di tahun 2016 dan 63,27% di tahun 2017. Tetapi pada tahun 2018 naik menjadi 85,63%.

4) Perlindungan Tenaga Kerja

Pelaksanaan perlindungan tenaga kerja di Kabupaten Bantul, dilakukan melalui program perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan serta program peningkatan norma kerja dan norma

keselamatan dan kesehatan kerja yang dilaksanakan setiap tahun oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul. Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja perlindungan tenaga kerja adalah besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek (kepesertaan BPJS ketenagakerjaan) dan besaran penyelesaian sengketa hubungan industrial. Capaian besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta jamsostek tahun 2014-2018 Kabupaten Bantul ditampilkan pada Tabel 2.55.

Tabel 2.55. Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Jamsostek di Kabupaten Bantul Tahun 2014-2018

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
Pembilang: Jumlah pekerja/buruh peserta program jamsostek	23.654	23.906	25.325	23.753	26.664
Penyebut: Jumlah pekerja/buruh	39.386	40.932	40.484	42.842	48.908
Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek	60,06%	58,40%	62,00%	55,44%	54,73%

Sumber: Disnakertrans Kabupaten Bantul, 2019

Besaran pekerja/buruh di Kabupaten Bantul yang menjadi peserta Jamsostek/kepesertaan BPJS ketenagakerjaan mencapai 54,73%. Mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah bahwa masih banyak pekerja/buruh yang belum masuk Jamsostek.

Besaran penyelesaian sengketa hubungan industrial tahun 2014-2018 Kabupaten Bantul disajikan pada Tabel 2.56 berikut ini.

Tabel 2.56 Besaran Sengketa Hubungan Industrial yang terselesaikan di Kabupaten Bantul Tahun 2014-2018

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
Besaran sengketa yang terselesaikan	95%	95%	97%	97%	95%

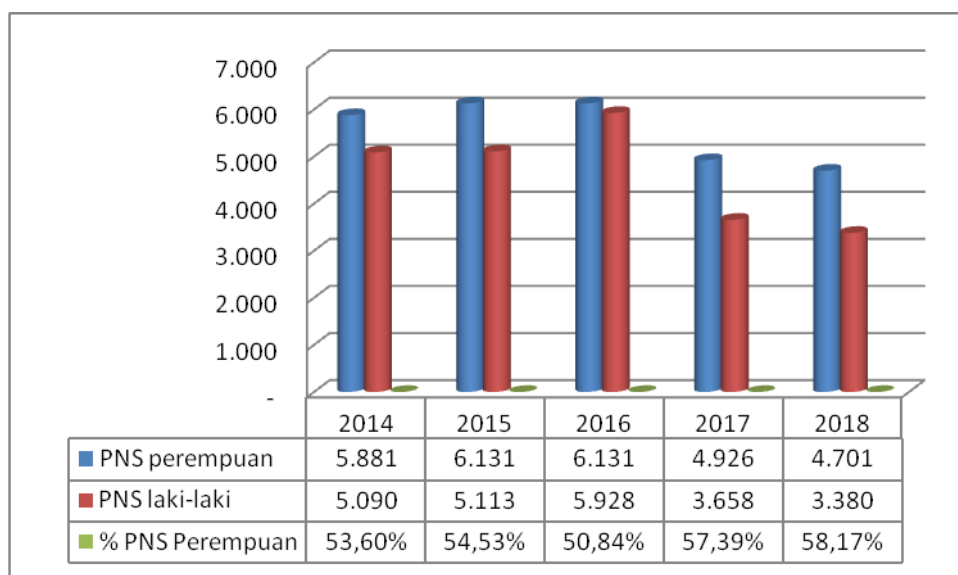
Sumber: Disnakertrans Kabupaten Bantul, 2019

Kasus yang terselesaikan tahun 2017 mencapai 97% dari jumlah kasus yang ada tetapi pada tahun 2018 turun menjadi 95%. Hal ini disebabkan beberapa kasus muncul menjelang akhir tahun dan masih dalam proses penyelesaian.

2.1.3.1.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1) Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga pemerintah terhadap jumlah seluruh pekerja. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah ini diwakili dengan persentase pegawai negeri sipil perempuan yang disajikan pada Gambar. 2.12.



Sumber: BKPP Kabupaten Bantul 2019

Gambar. 2.12. Persentase Partisipasi PNS Perempuan di Lembaga Pemerintahan Kabupaten Bantul

Berdasarkan data pilah PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul menunjukkan bahwa tingkat partisipasi dan pemberdayaan perempuan di lembaga pemerintah semakin meningkat. Jumlah PNS perempuan yang bekerja di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Bantul tersebut sejumlah 278 pegawai menduduki jabatan eselon II-IV pada tahun 2018.

Tabel 2.57. Persentase PNS Perempuan yang Menduduki Jabatan Eselon Di Kabupaten Bantul Tahun 2014-2018

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon II	3	3	3	3	4
2	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon III	37	37	37	37	43
3	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon IV	222	233	223	223	231
4	Jumlah Pekerja perempuan yang menempati jabatan eselon II -IV	262	273	273	263	278
5	Jumlah PNS perempuan	6.059	5.881	6.131	5.928	4.701
6	Persentase PNS perempuan yang menempati jabatan eselon II – IV (4/5)	4.32	4.64	4.45	4.44	5,91

Sumber: BKPP Kabupaten Bantul, 2019

2) Partisipasi Perempuan di Masyarakat

Pemberdayaan Perempuan adalah usaha sistematis dan terencana untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Tujuan dari pemberdayaan perempuan adalah untuk perempuan sendiri untuk menjadi agen perubahan yang aktif dalam melakukan transformasi gender.

Tabel 2.58 Partisipasi Perempuan di Masyarakat Di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2018

No.	Uraian	2016	2017	2018
1	Aktifis P2WKSS	300	300	300

2	Pengurus harian Parpol	75	76	76
3	Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	101	101	101
4	Lembaga Legislatif Daerah	3	3	3
5	Pekerja Sektor Informal	128.958	206.055	206.055

Sumber: Bappeda Kabupaten Bantul, 2019, dari berbagai sumber.

3) Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan mengamanatkan bahwa anak dan perempuan berhak bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia serta berhak mendapatkan rasa aman, bebas dari segala bentuk tindak kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran hak-hak perempuan dan anak, seperti kekerasan fisik (*physical violence*), kekerasan psikis (*psychological violence*), pencabulan (*molestation*), perkosaan (*rape*), pelecehan seksual (*sexual harassment*), eksploitasi (*sexual exploitation*), perdagangan orang (*trafficking*), dan penelantaran (*neglect*).

Kasus KDRT di Kabupaten Bantul belum dapat dipantau secara keseluruhan dikarenakan belum semua korban KDRT mau melaporkan kasusnya ke pihak yang berwenang. Diharapkan dengan adanya pemberian pelayanan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang bersedia melaporkan kasus dan mengalami tindak kekerasan/KDRT akan menjadi solusi yang tepat.

Kasus yang telah ditangani tahun 2018 meningkat menjadi 124 kasus dibandingkan tahun 2017 (111 kasus)

4) **Pernikahan Dini**

UU Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan batas usia pernikahan adalah 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Perempuan yang menikah muda menghadapi akibat buruk terhadap kesehatan mereka sebagai dampak dari melahirkan dini, peningkatan risiko kekerasan dalam rumah tangga, gizi buruk, dan gangguan kesehatan seksual dan reproduksi.

Rumah tangga pasangan pernikahan dini dapat mengalami kondisi yang buruk untuk seluruh indikator sosial dan ekonomi dibandingkan dengan anak yang menunda usia perkawinan, termasuk tingkat pendidikan yang lebih rendah dan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi. Dampak buruk ini juga akan dialami oleh anak-anak mereka dan berlanjut pada generasi yang akan datang. Persentase pernikahan dini di Kabupaten Bantul terdapat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.59 Persentase Pernikahan Dini
di Kabupaten Bantul Tahun 2014-2018

No.	Jumlah pernikahan	2014	2015	2016	2017	2018
1	Usia dini	148	300	95	66	83
2	Semua usia	13.562	10.537	11.528	11.535	12.291
	Persentase pernikahan dini	1,09	2,85	0,82	0,57	0,68

Sumber: Kementerian Agama, Kantor Kabupaten Bantul, 2019

5) **Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan**

Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan merupakan perbandingan antara jumlah angkatan kerja perempuan terhadap jumlah penduduk perempuan usia kerja. Angka tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Bantul menunjukkan persentase angkatan kerja perempuan di Kabupaten Bantul.

Tabel 2.60. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan
Tahun 2014-2018

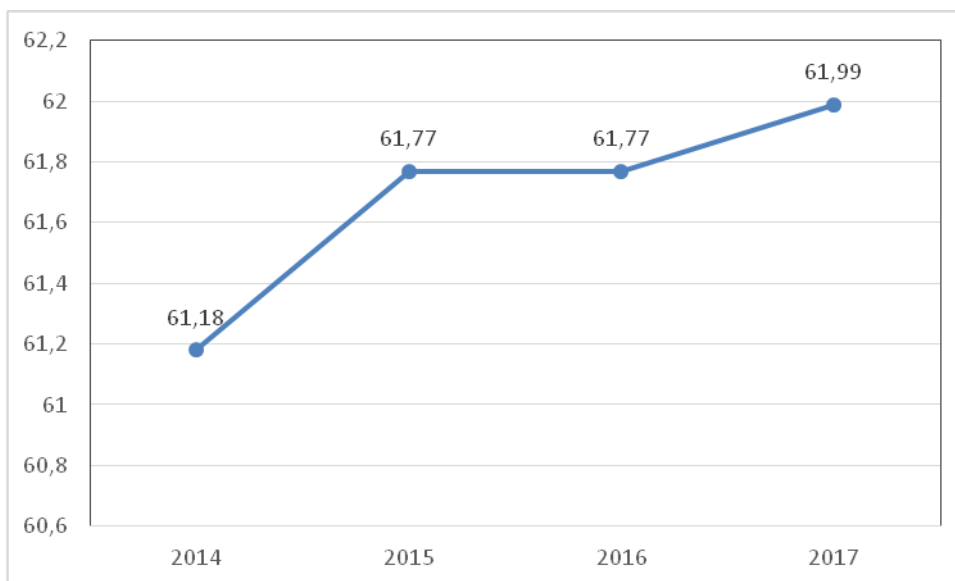
No	Tahun	Angkatan Kerja
1	2014	56,71
2	2015	57,58
3	2016	60,44
4	2017	62,49
5	2018	63,76

Sumber: Sakernas, BPS, 2019

Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Bantul menunjukkan tren kenaikan sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah perempuan di Kabupaten Bantul yang aktif terlibat dalam kegiatan ekonomi. Hal ini menunjukkan kesetaraan gender dimana peran perempuan semakin diakui.

6) Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks komposit yang tersusun dari beberapa variabel yang mencerminkan tingkat keterlibatan wanita dalam proses pengambilan keputusan di bidang politik dan ekonomi. Indeks pemberdayaan gender di Kabupaten Bantul cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 sebesar 61,18 meningkat menjadi 61,99 pada tahun 2017. Hal ini mengindikasikan bahwa pemberdayaan perempuan di Kabupaten Bantul semakin meningkat



Sumber: BPS DIY, Data Strategis DIY berbagai seri, 2019

Gambar 2.13. Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Bantul Tahun 2014-2017

2.1.3.1.2.3. Ketahanan Pangan

1) Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita

Ketersediaan pangan adalah tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan/atau sumber lain. Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya. Ketersediaan pangan dapat dipenuhi dari tiga sumber yaitu (1) produksi dalam negeri; (2) pasokan pangan; (3) pengelolaan cadangan pangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2013 dan Rekomendasi dari Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi XI Tahun 2012, rata-rata kecukupan energi dan protein bagi penduduk Indonesia masing-masing sebesar 2.150 kilo kalori per kapita perhari dan 57 gram per kapita per hari pada tingkat konsumsi.

Ketersediaan pangan dapat dilihat dari ketersediaan energi dan protein. Tahun 2016 tingkat ketersediaan energi sebesar 142,88% dan protein sebesar 77,80%, pada tahun 2016 mengalami penurunan disebabkan oleh penurunan budidaya umbi-umbian dan sayuran karena adanya program nasional untuk swasembada pangan melalui komoditas padi. Ketersediaan protein mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari angka 75,73 Gram/Kap/Hr pada tahun 2017 menjadi 78,36 Gram/Kap/Hr pada tahun 2018. Hal ini didorong oleh peningkatan pada sumber protein nabati. Sedangkan sumber protein dari hewani mengalami penurunan yang disebabkan oleh penurunan jumlah ternak sebagai akibat dari banyaknya ternak yang keluar dari wilayah Bantul, serta ternak yang mati akibat penyakit dan banjir yang disebabkan oleh badai Cempaka. Ketersediaan energi dan protein perkapita di Kabupaten tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 disajikan pada Tabel 2.61.

Tabel 2.61 Ketersediaan Energi dan Protein untuk dikonsumsi
Tahun 2014-2018

No.	Tahun	Energi (Kal/Kap/Hr)	Tingkat Ketersediaan Energi (%)	Protein (Gram/Kap/hr)		
				Nabati	Hewani	Total
1	2014	2.950	131,49	55,41	18,05	73,46
2	2015	3.050	139,28	55,98	18,99	74,97
3	2016	3.072	142,88	54,61	23,20	77,80
4	2017	3.079	139,95	56,93	18,80	75,73
5	2018	2.993	97,18	66,73	11,63	78,36

Sumber: Diperpautkan Kabupaten Bantul, 2019

2) Penguatan Cadangan Pangan

Cadangan pangan merupakan salah satu komponen penting dalam ketersediaan pangan, karena cadangan pangan merupakan sumber pasokan untuk mengisi kesenjangan antara produksi dan

kebutuhan dalam negeri atau daerah dari waktu ke waktu, sehingga diharapkan tidak terjadi lonjakan harga pangan pokok. Cadangan pangan terdiri dari cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat. Cadangan pangan pemerintah terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, yang mencakup pangan tertentu yang bersifat pangan pokok. Cadangan pangan masyarakat adalah cadangan pangan yang dikelola masyarakat atau rumah tangga, termasuk petani, koperasi, pedagang, dan industri rumah tangga.

Penyelenggaraan penguatan cadangan pangan pemerintah daerah dapat dilakukan melalui pengembangan lumbung pangan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Dengan kegiatan tersebut diharapkan masyarakat mampu memberdayakan kelembagaan lumbung pangan yang mandiri.

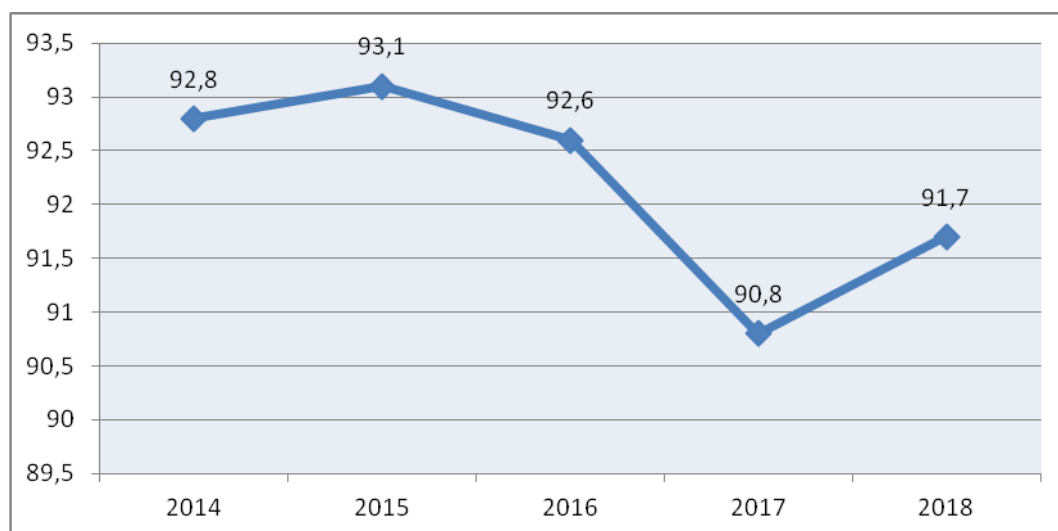
Pada tahun 2017 (270 ton) cadangan pangan Kabupaten Bantul mengalami kenaikan sebesar 3 ton dibanding tahun 2016 (267 ton). Cadangan pangan pada tahun 2017 terdiri dari cadangan pangan pemerintah sebesar 5,04 ton beras dan cadangan pangan masyarakat sebesar 147,11 ton yang disimpan dalam 20 lumbung pangandan 17 Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM).

Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Bantul pada tahun 2018 adalah 5,036 ton beras. data cadangan pangan yang ada di masyarakat lebih sulit diperoleh dan tidak tersedia secara rutin. tahun 2018 ini dilakukan analisis cadangan pangan rumah tangga. Analisis dilakukan di 6 (enam) kecamatan yaitu Kec. Bambanglipuro, Kec. Bantul, Kec. Kasihan, Kec.Imogiri, Kec. Srandakan dan Kec. Pleret. Secara umum hasil analisis cadangan pangan untuk 6 kecamatan (Bambanglipuro, Bantul, Imogiri, Srandakan, Kasihan dan Pleret) adalah sebagai berikut : Jumlah stok cadangan pangan rumah tangga masing- masing di Kec. Bantul 17,29%, Bambanglipuro, 12,20%, Srandakan 9,34%, Kasihan 6,32%, Pleret 5,44% dan Imogiri 5.08%. Sedangkan jumlah rata - rata cadangan pangan rumah tangga di 6 kecamatan tersebut adalah 9,28%.

3) Skor Pola Pangan Harapan

Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama baik secara absolut maupun dari suatu pola ketersediaan atau konsumsi pangan. Acuan untuk menilai tingkat keragaman konsumsi pangan adalah PPH dengan skor 100 sebagai pola yang ideal. Skor PPH semakin mendekati angka 100 menunjukkan bahwa pola konsumsi pangan masyarakat semakin beragam.

Perkembangan skor pola pangan harapan Kabupaten Bantul tahun 2014-2018 disajikan pada Gambar 2.14.



Sumber: Diperpautkan Kabupaten Bantul, 2019

Gambar 2.14. Skor Pola Pangan Harapan di Kabupaten Bantul Tahun 2013-2017

Skor pola pangan harapan di Kabupaten Bantul mengalami peningkatan sejak tahun 2014 hingga tahun 2015, namun menurun sampai tahun 2017. Penurunan skor disebabkan karena kurangnya konsumsi kelompok bahan pangan umbi-umbian, sayur dan buah, minyak dan lemak, buah/biji berminyak dan gula serta kurangnya penerapan pola konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) di masyarakat sehingga penganeekaragamannya kurang.

Upaya peningkatan konsumsi sayur, buah, umbi-umbian, minyak, dan lemak telah dilakukan dengan sosialisasi pola konsumsi B2SA, lomba cipta menu olahan lokal, sekolah lapang, dan gerakan makan B2SA agar skor PPH meningkat. Tahun 2018 Skor PPH mulai meningkat mencapai 91,7

Tabel 2.62. Perkembangan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) di Kabupaten Bantul Tahun 2014-2018

No.	Kelompok Pangan	Skor Pola Pangan Harapan				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Padi-padian	25,0	25,0	25,0	21,7	25,0
2	Umbi-umbian	1,5	1,6	1,5	1,7	1,4
3	Pangan hewani	24,0	24,0	24,0	24	24,0
4	Minyak dan lemak	1,2	1,2	2,8	3,1	1,5
5	Buah/bijiberlemak	1,0	1,0	0,7	0,9	0,6
6	Kacang-kacangan	10,0	10,2	10,0	10,0	10,0
7	Gula	1,1	1,1	1,1	1,4	0,4
8	Sayur dan buah	29,0	29,0	27,5	28,0	28,8
9	Lain-lain	0	0	0	0,0	0,0
	Total	92,8	93,10	92,6	90,8	91,7

Sumber: Diperpautkan Kabupaten Bantul, 2019

4) Penanganan Kerawanan Pangan

Kerawanan pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat, atau rumah tangga, pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologi bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat. Kerawanan pangan dapat terjadi secara berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu (kronis), dan dapat pula terjadi akibat keadaan darurat seperti bencana alam maupun bencana sosial (transien). Kerawanan pangan sangat dipengaruhi oleh daya beli masyarakat yang ditentukan tingkat pendapatannya. Rendahnya tingkat pendapatan memperburuk konsumsi energi dan protein.

Penanganan rawan pangan dilakukan melalui pencegahan kerawanan pangan untuk menghindari terjadinya rawan pangan di suatu wilayah sedini mungkin dan penanggulangan kerawanan pangan pada daerah yang rawan kronis melalui beberapa program.

Keberhasilan penanganan desa rawan pangan dapat dilihat pada Tabel 2.63. Pada tahun 2014 terdapat lima desa rawan pangan dan pada tahun 2018 tinggal dua desa yang dikategorikan desa rawan pangan.

Tabel 2.63. Desa Rawan Pangan di Kabupaten Bantul Tahun 2014-2018

No.	Desa Yang Diindikasikan Rawan Pangan				
	2014	2015	2016	2017	2018
1	Trimurti	Trimurti	Trimurti	Trimurti	Trimurti
2	Jagalan	Girirejo	Girirejo	Guwosari	Guwosari
3	Imogiri	Guwosari	Guwosari		
4	Ngestiharjo				
5	Guwosari				

Sumber: Diperpautkan Kabupaten Bantul, 2019

2.1.3.1.2.4. Pertanian

1) Luas Lahan Bersertifikat

Pensertifikatan tanah pada tahun 2017 dilakukan pada lima bidang tanah pemerintah. Data status tanah di Kabupaten Bantul tahun 2018 disajikan pada Tabel 2.64

Tabel 2.64. Luas Wilayah Kerja dan Kepemilikan HAT di Kabupaten Bantul Tahun 2018

No.	Uraian	Jumlah		Persentase (%)	
		Bidang	Luas (m ²)	Bidang	Luas (m ²)
A	Kabupaten Bantul	634.314	506.850.000	100	100
	Rata-rata		799 m ²		
B	Tanah Terdaftar				
	a) Hak Milik	566.588	327.898.104	89,32	64,69
	b) Hak Guna Bangunan	19.257	7.471.599	3,02	1,47
	c) Hak Pakai	3.386	9.209.935	0,53	1,81
	d) Wakaf	1.690	459.856	0,26	0,09
	e) Hak Lainnya (HPL, Sarusun)	43	804.977	0,006	0,15
	Jumlah	590.964	345.844.471	93,16	68,23
	Rata-rata per sertipikat		585 m ² / stpk		

No.	Uraian	Jumlah		Persentase (%)	
		Bidang	Luas (m ²)	Bidang	Luas (m ²)
C	Tanah belum terdaftar Rata-rata	43.350	161.005.529	6.83	31.76

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, 2019

Tabel diatas menunjukkan sebagian besar tanah telah terdaftar, yaitu 93,16%, meskipun masih ada sebagian kecil bidang tanah yang belum terdaftar yaitu 6,83%.

Tabel 2.65 Permasalahan Tanah di Kabupaten Bantul Tahun 2017 - 2018

No	Lokasi	Jumlah	Masalah	Tahun
1	Desa Selopamiro	2	Tukar guling tanah	2017
2	Desa Argorejo	1	Tukar guling tanah	2017
3	Desa Poncosari	1	Tukar guling tanah	2017
4	Desa Sriharjo	1	Tukar guling tanah	2017
5	Desa Sendangsari	1	Warisan	2017
6	Desa Bangunjiwo	1	Tukar guling tanah	2018
7	Desa Selopamiro	1	Tukar guling tanah	2018

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, 2019

Tabel menunjukkan adanya konflik permasalahan tanah yang terjadi pada warga di 6 (enam) desa di Kabupaten Bantul, dan sebagian besar mengenai tukar guling tanah.

2) **Penyelesaian Izin Lokasi**

Perizinan terkait pemanfaatan ruang berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Bantul yaitu persetujuan prinsip, kesesuaian aspek tata ruang, Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT), perizinan klarifikasi/perizinan lokasi, perizinan mendirikan bangunan, perizinan gangguan, dan perizinan teknis operasional. Perizinan lokasi di peruntukan untuk izin pemanfaatan ruang dengan luasan lahan di atas satu hektar.

Tabel 2.66 Persentase Jumlah Izin Lokasi di Kabupaten Bantul Tahun 2014-2018

Tahun	Jumlah Permohonan Izin Lokasi	Jumlah Izin Lokasi	Persentase (%)
2014	8	7	87,50

2015	14	13	92,85
2016	6	3	50,00
2017	2	2	100,00
2018	6	4	66,67

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul, 2019

2.1.3.1.2.5. Lingkungan hidup

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Pada tahun 2018, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Bantul tercatat sebesar 53,36, angka ini naik 8,26 poin dibandingkan tahun 2017 yaitu sebesar 45,10. Indeks ini menunjukkan bahwa kualitas lingkungan hidup Kabupaten Bantul masih berada dalam status “waspada”. Hal ini terjadi karena adanya penurunan indeks kualitas air dan indeks kualitas udara pada tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2017. Rendahnya kualitas air di Kabupaten Bantul terutama disebabkan oleh semakin tingginya konsentrasi *fecal coli* dan total coli di lima sungai yang mengalir melalui wilayah Kabupaten Bantul (telah melampaui baku mutu). Sementara untuk kualitas udara walaupun mengalami penurunan dari tahun sebelumnya tetapi belum melampaui baku mutu. Hal ini antara lain akibat penambahan tutupan vegetasi dan ruang terbuka hijau yang sangat minim belum mampu mengimbangi penambahan sumber emisi gas pencemar udara (industri, transportasi, dan kebutuhan energi lainnya) sehingga kualitas udara juga semakin menurun.

Dalam rangka peningkatan pelayanan kualitas lingkungan hidup, dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup. UPTD ini melaksanakan urusan pemerintah bidang lingkungan hidup, sub urusan pembinaan dan pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) yaitu pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Fungsi UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup adalah :

- 1) Membantu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 116 Tahun 2016 untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu dalam hal pengujian kualitas lingkungan hidup.
- 2) Sebagai laboratorium rujukan yang dapat melayani dan dimanfaatkan masyarakat, yang hasil pengujiannya dapat diterima baik secara nasional maupun internasional.
- 3) Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan nomor LP 913 IDN pada tanggal 5 Juni 2015, dan telah mempertahankan akreditasi dengan sertifikat akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) yang berlaku sampai tanggal 09 Juni 2019.

2. Penanganan Sampah

Pengelolaan sampah di Kabupaten Bantul dilaksanakan dengan prinsip mengurangi, memanfaatkan, dan mendaur ulang sampah. Pengembangan sistem persampahan terdiri atas pengelolaan cara setempat, pengelolaan cara komunal dan pengolahan sampah mandiri. Pengelolaan sampah pada tempat penampungan sampah sementara ditetapkan tersebar di seluruh kecamatan sesuai dengan tingkat pelayanannya. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah yaitu di desa Sitimulyo Kecamatan Piyungan seluas kurang lebih 12 hektar, yang dikelola dengan *control landfill* untuk sampah residu akhir.

Jika dilihat dari persentase sampah yang ditangani tersebut, sampah yang dapat ditangani relatif masih kecil sehingga sebagian besar sampah yang tidak terlayani, dikelola mandiri oleh masyarakat, antara lain dengan dimanfaatkan untuk pupuk tanaman serta dikelola melalui jejaring sampah dan bank sampah. Pada tahun 2017 terbentuk tiga kelompok pengelola sampah baru, sehingga sampai dengan saat ini terdapat sebanyak 135 kelompok pengelola sampah.

Penanganan pengelolaan air diupayakan dengan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat dan terpusat. Sistem pengolahan air limbah domestik setempat meliputi pembuangan air limbah domestik ke dalam tangki septik individual, tangki septik komunal atau Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) terpusat. Sistem pengolahan air limbah domestik terpusat adalah pembuangan air limbah domestik ke dalam jaringan air limbah terpusat yang disediakan oleh Pemerintah di IPAL Sewon.

3. Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk

Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk adalah jumlah daya tampung tempat pembuangan sampah per 1.000 jumlah penduduk. Jumlah TPS di Kabupaten Bantul mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun dari jumlah tersebut baru tersebar di 16 kecamatan. Untuk Kecamatan Dlingo belum terjangkau oleh TPS. Pengolahan sampah di Kecamatan tersebut masih dilakukan secara mandiri oleh masyarakat.

Tabel 2.67. Rasio Tempat Pembuangan Sampah di Kabupaten Bantul Tahun 2014-2018

URAIAN	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah TPS (unit)	150	165	231	245	275
Jumlah Daya Tampung TPS (m3)	158	173	1.386	1.470	1.650
Jumlah Penduduk (Jiwa)	968.632	919.440	968.632	927.181	939.718
Rasio Daya Tampung TPS per 1000 penduduk (m3/1000 penduduk)	0,163	0,188	1,431	1,585	1,756

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, 2019

Rasio daya tampung TPS per 1000 penduduk di Kabupaten Bantul mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018 jumlah TPS sebesar 275 unit dengan rasio daya tampung TPS per 1000

penduduk 1.650 mengalami peningkatan dibanding tahun 2017 yang sebesar 245 unit dengan rasio 1,585.

Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan yang lokasinya ada di Kabupaten Bantul merupakan tempat pembuangan akhir bagi Kabupaten Bantul, Sleman dan Kota Yogyakarta. Kerjasama pengelolaan sampah antar daerah melalui Sekretariat Bersama Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul (Sekber Kartamantul) dan Pemda DIY. Bentuk kerjasama berupa kontribusi pendanaan operasional pengelolaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan. Kontribusi pendanaan dari masing-masing kabupaten/kota dalam bentuk Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Pemda DIY. Mekanisme ini diberlakukan sejak tahun 2015, di mana pengelolaan TPST Piyungan sepenuhnya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah DIY.

4. Pencemaran Air

Status mutu air adalah tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu tertentu dengan membandingkan baku mutu air yang ditetapkan.

Adanya konsentrat timbal dan koli yang tinggi menunjukkan terjaniya pencemaran. Parameter timbal melebihi baku mutu diindikasikan adanya pencemaran yang berasal dari limbah domestik rumah tangga, industri kecil dan bengkel. Penyebab tingginya kadar timbal di air sumur warga adalah pembuangan baterai bekas dan air aki bekas ke sembarang tempat yang kemudian meresap ke tanah hingga sampai ke air sumur warga. Untuk parameter total koli yang melebihi baku mutu dipengaruhi oleh sanitasi yang kurang baik seperti terikutnya kotoran manusia maupun hewan dalam air tersebut.

Tahun 2018 telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengendalian Pencemaran Air yang mencakup salah satunya penetapan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air. Dalam penerbitan ijin pembuangan air limbah, ijin lingkungan, ijin lokasi dan kebijakan pencemaran air harus berpedoman pada penetapan daya tampung beban pencemaran air.

2.1.3.1.2.6. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

1. Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk

Kartu tanda penduduk (KTP) merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana dan berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.

Cakupan penerbitan kartu tanda penduduk merupakan salah satu indikator SPM yang dilaksanakan Kabupaten Bantul dalam pelayanan dokumen kependudukan dengan penanggungjawab kegiatan berada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul. Cakupan penerbitan KTP adalah cakupan penduduk yang telah memperoleh KTP sesuai dengan standar pelayanan lima hari harus selesai diterbitkan KTP. Perkembangan pencapaian cakupan penerbitan kartu tanda penduduk di Kabupaten Bantul tahun 2013-2017 ditampilkan pada Tabel 2.68.

Tabel 2.68. Cakupan Penerbitan KTP Tahun 2014 - 2018

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah KTP ber-NIK yang diterbitkan	637.841	668.144	677.425	703.660	713.078
2	Jumlah Penduduk Wajib KTP	693.904	687.219	704.074	710.225	714.518
3	Persentase penduduk yang memiliki KTP ber-NIK	99%	97,22%	96,21%	99,07%	99,79%

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul, 2019

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan merupakan era baru di bidang administrasi kependudukan. Tujuan utama dari perubahan undang-undang ini adalah untuk meningkatkan efektifitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, menjamin akurasi data kependudukan dan ketunggalan NIK serta ketunggalan dokumen kependudukan.

Persentase kepemilikan KTP sejak tahun 2014 hingga tahun 2016 terus menurun yang disebabkan oleh kenaikan jumlah penduduk wajib ber KTP tidak sebanding dengan kenaikan penduduk yang mengajukan permohonan KTP. Tahun 2017 mulai naik dan mencapai 99,79% pada tahun 2018.

Adanya penurunan prosentase kepemilikan KTP-el dari tahun 2014 s/d 2016 ini karena masih adanya penduduk warga Bantul yang masih berada diluar negeri (TKI) dan banyaknya anak yang telah berusia 17 tahun dan tidak secara langsung melakukan perekaman KTP-el, selain itu juga adanya akurasi data NIK yang diharapkan bisa menekan angka dobel data, yang secara tidak langsung dapat berakibat jumlah cakupan KTP pada tahun 2016 ini menurun.

Tabel 2.69. Data Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Tahun 2018

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Kepala Keluarga	Kepemilikan Kepala Keluarga	Wajib KTP	Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk
1	Srandakan	31,225	10,838	10,838	24,095	24,065
2	Sanden	31,980	11,376	11,376	25,154	25,122
3	Kretek	30,895	1,099	1,099	24,147	24,108
4	Pundong	35,677	12,416	12,416	27,614	27,563
5	Bambanglipuro	41,587	14,792	14,792	32,266	32,206
6	Pandak	51,785	17,894	17,894	40,082	40,041
7	Pajangan	35,270	11,569	11,569	26,892	26,839

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Kepala Keluarga	Kepemilikan Kepala Keluarga	Wajib KTP	Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk
8	Bantul	63,415	22,158	22,158	48,503	48,402
9	Jetis	57,958	20,120	20,120	44,308	44,225
10	Imogiri	62,986	21,805	21,805	48,100	47,973
11	Dlingo	38,816	13,310	13,310	30,310	30,242
12	Banguntapan	109,197	35,969	35,969	81,813	81,639
13	Pleret	47,351	15,712	15,712	34,937	34,877
14	Piyungan	51,535	17,351	17,351	38,611	38,496
15	Sewon	98,122	32,904	32,904	74,715	74,568
16	Kasihan	101,746	33,883	33,883	77,205	77,033
17	Sedayu	46,863	15,946	15,946	35,766	35,678
Total		936,408	309,142	309,142	714,518	713,077

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul, 2019

2. Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran

Selain cakupan penerbitan KTP, indikator SPM yang juga dilaksanakan Kabupaten Bantul dalam pelayanan dokumen kependudukan adalah cakupan penerbitan akta kelahiran. Akta kelahiran merupakan salah satu dokumen hasil pencatatan sipil yang meregistrasi setiap kelahiran sebagai peristiwa kependudukan. Cakupan penerbitan akta kelahiran adalah cakupan penduduk lahir yang memperoleh akta kelahiran sebagai bentuk registrasi kependudukan sesuai dengan standar pelayanan tujuh hari harus selesai diterbitkan.

Penerbitan akta kelahiran dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melalui serangkaian kegiatan yang meliputi penyebaran informasi publik tentang pelayanan akta kelahiran, registrasi setiap kelahiran dan penerbitan akta kelahiran dari setiap peristiwa kelahiran di tahun bersangkutan. Pencapaian cakupan penerbitan akta kelahiran di Kabupaten Bantul dari tahun 2014 hingga tahun 2018 disajikan pada Tabel 2.70

Tabel 2.70 Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran
di Kabupaten Bantul Tahun 2014-2018

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
--------	------	------	------	------	------

Jumlah penduduk yang lahir dan memperoleh akta kelahiran di tahun N	7.892	10.446	10.127	10.949	10.000
Jumlah kelahiran di tahun N	8.625	11.286	10.516	11.056	10.900
Persentase penerbitan akta kelahiran	91,50	92,56	96,30	99,03	91,74

Sumber: Dispendukcapil Kabupaten Bantul, 2019

2.1.3.1.2.7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1) Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintahan desa atau kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Rata-rata jumlah kelompok binaan LPMD di Kabupaten Bantul tahun 2014-2018 disajikan pada Tabel 2.71.

Tabel 2.71 Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan LPMD
Di Kabupaten Bantul Tahun 2014-2018

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Kelompok Binaan LPMD	313	313	313	933	933
2	Jumlah LPMD	75	75	75	75	75
3	Rata-rata jumlah Kelompok Binaan LPMD	4,17	4,17	4,17	12,44	12,44

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, KB, dan PMD Kabupaten Bantul, 2019

Rata-rata jumlah kelompok binaan LPMD menggambarkan keaktifan masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan daerah melalui LPMD. Rata-rata jumlah kelompok binaan LPMD di Kabupaten Bantul tahun 2018 sebesar 12,44. Hal ini berarti bahwa rata-rata satu LPMD membina sekitar 12-13 kelompok.

2) Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolanya dari, oleh dan untuk masyarakat. Kelompok binaan PKK adalah kelompok-kelompok masyarakat yang berada di bawah tim penggerak PKK desa/kelurahan, yang dapat dibentuk berdasarkan kewilayahan atau kegiatan seperti kelompok dasawisma dan kelompok sejenis. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK menggambarkan keaktifan masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan daerah melalui PKK.

Tabel 2.72. Kelompok Binaan PKK Tahun 2015-2018

No.	Nama Organisasi	Jumlah			
		2015	2016	2017	2018
1	PKK Kecamatan	17	17	17	17
2	Kelompok PKBN	325	325	325	325
3	Kelompok Kadarkum	339	339	339	339
4	Kelompok Pola Asuh	402	402	402	402
5	Kelompok PKK Dusun	933	933	933	933
	Jumlah	2074	2074	2074	2074

Sumber: DPPKBPMMD Kabupaten Bantul, 2019

3) **Pemberian Bantuan Khusus P2MD dan BKK**

Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa khususnya pembangunan sarana umum yang bersifat fisik diberikan bantuan khusus dengan mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Pembangunan Partisipatif Masyarakat Desa dan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas peraturan Bupati Nomor 99 tahun 2017 tentang pedoman BKK kepada Pemerintah Desa. Bantuan Keuangan P2MD tahun 2018 dialokasikan sebesar 5 Milyar dan terealisasi sebesar 4,3 Milyar. Sedangkan untuk Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dialokasikan sebesar 44,35 Milyar dan terealisasi sebesar 40,09 Milyar. Tahun 2018 bantuan khusus diberikan untuk pembangunan sarana umum yang bersifat fisik,

kawasan khusus, pembangunan fisik obyek wisata dan kawasan kuliner.

BKK Khusus pelaksanaan Pilurdes mengacu Peraturan Bupati nomor 80 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan bupati nomor 47 tahun 2018 tentang BKK kepada 30 (tiga puluh) desa untuk pelaksanaan pemilihan lurah desa secara serentak.

Adapun output dari BKK dan P2MD Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.73 Tabel Output BKK dan P2MD

No	Proposal	Anggaran	Output			Outcome
			Kegiatan	Jumlah	Persentase	
1	BKK	Rp40.088.700.000,-	Corblok (Perbaikan Jalan)	411	37%	Peningkatan infrastruktur desa, menstimulasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan
			Bangket, Talud	127	12%	
			Drainase, Irigasi, dll	69	6%	
			Masjid/Rumah Ibadah	145	13%	
			Penerangan Jalan	124	11%	
			TK/PAUD	51	5%	
			Gedung (Pertemuan, Olahraga, Serbaguna)	89	8%	
			Lain-lain (RTLH, Lapangan Voli, Penunjang tempat wisata, Rehab Ponpes)			
2	P2MD	Rp4.295.000000.-	Corblok,(Perbaikan Jalan)	100	51%	
			Bangket Talud	26	13%	
			Drainase, Irigasi dll	11	13%	
			Masjid Rumah Ibadah	14	7%	
			Penerangan Jalan	20	10%	
			TK/PAUD	5	3%	
			Gedung(Pertemuan, olahraga,serba guna)	11	6%	
			Lain-lain (RTLH, Lapangan Voli, Penunjang tempat wisata, Rehab Ponpes)	9	5%	

Sumber: DPPKBPMMD Kabupaten Bantul, 2019

2.1.3.1.2.8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1) Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur Menjadi Peserta KB Aktif

Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur (PUS) menjadi peserta KB aktif adalah jumlah peserta KB aktif (PA) dibandingkan dengan seluruh PUS dalam suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Jumlah peserta PUS pada tahun 2018 naik dibandingkan dengan tahun 2017, tampak pada table berikut ini:

Tabel 2.74 Kesertaan KB Kabupaten Bantul Tahun 2014-2018

No.	Uraian	2014		2015		2016		2017		2018	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1.	PUS	150.105	-	149.683	-	154.202	-	143.861	-	141.317	47
2.	Peserta KB Aktif	119.894	79,87	120.240	80,45	121.764	78,96	109.257	75,95	103.912	73,53
3.	Peserta KB MKJP	40.858	27,22	41.234	34,24	42.308	34,75	37.453	34,28	36.454	35,08
4.	Peserta KB Pria	9.223	6,14	9.306	7,73	9.543	7,84	9.308	8,52	9.651	9,29
5.	Peserta KB Baru	13.414	94,52	13.864	100,95	13.837	100,45	11.801	85,36	17.686	44,42
6.	PUS Unmetneed	9.257	6,34	8.556	5,72	9.058	5,87	12.118	8,42	14.226	10,07

Sumber: DPPKBPMMD Kabupaten Bantul, 2019

2) Cakupan Anggota Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB

Cakupan anggota kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB adalah upaya pembinaan oleh para kader BKB terhadap anggotanya, khususnya yang masih PUS untuk menjaga kelangsungan ber-KB melalui pembinaan kelompok. Bina Keluarga Balita (BKB) adalah kelompok kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, keterampilan, dan sikap ibu serta anggota keluarga lainnya dalam membina tumbuh kembang anak usia dibawah lima tahun (Balita), melalui optimalisasi rangsangan emosional, moral, dan sosial.

Tabel 2.75 Cakupan Anggota BKB ber-KB Tahun 2014-2018 Kabupaten Bantul

Cakupan anggota BKB ber-KB	2014	2015	2016	2017	2018
	86,72	84,56	91,88	94,50	94,37

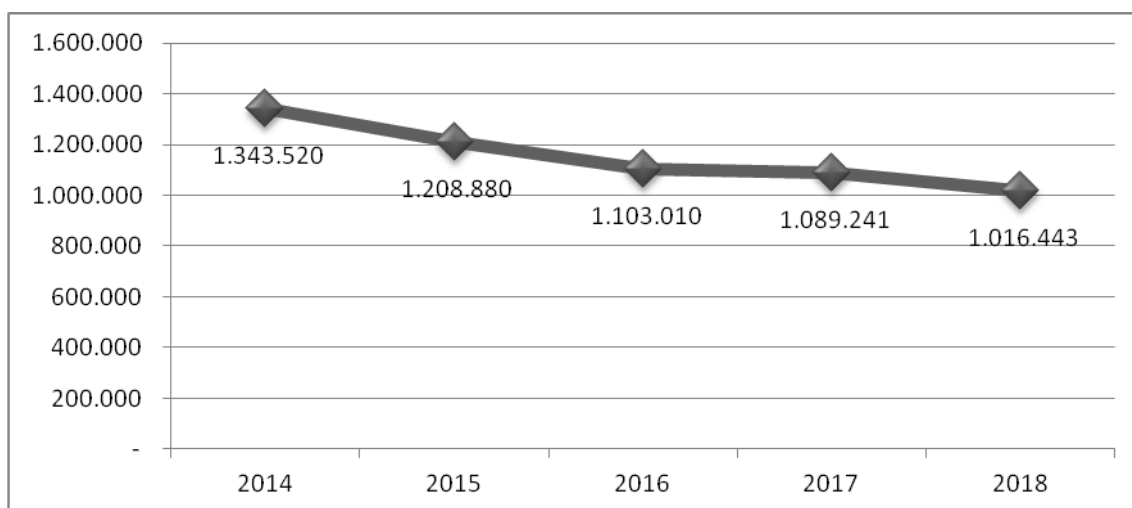
Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan PMD Kabupaten Bantul, 2019

Cakupan anggota BKB ber-KB di Kabupaten Bantul telah mencapai target baik yang ditetapkan nasional. Hal ini menunjukkan keberhasilan program keluarga berencana yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Bantul.

2.1.3.1.2.9. Perhubungan

1) Jumlah Penumpang Angkutan Umum

Angkutan umum yang ada di Kabupaten Bantul berupa armada bis angkutan umum sedangkan armada lain seperti kereta api, kapal laut, dan pesawat udara tidak terdapat di Kabupaten Bantul.



Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul, 2019

Gambar 2.15. Jumlah Penumpang Angkutan Umum di Kabupaten Bantul Tahun 2014-2018

Jumlah penumpang angkutan umum bis di Kabupaten Bantul dari tahun 2014-2018 cenderung mengalami penurunan. Penurunan penggunaan angkutan umum tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain tingkat pertumbuhan kendaraan pribadi tinggi, pelayanan angkutan umum belum memenuhi standar pelayanan,

jumlah angkutan umum berkurang, rute/trayek angkutan umum belum menjangkau wilayah, dan kondisi sarana dan prasarana angkutan umum buruk.

Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya guna meningkatkan penggunaan angkutan umum di masyarakat, antara lain melakukan kajian tentang pemerataan trayek angkutan umum pada pusat-pusat kegiatan yang belum tersentuh oleh angkutan umum, peningkatan kualitas pelayanan angkutan umum, memperbaiki system serta sarana dan prasarana fisik angkutan umum melalui Program peningkatan pelayanan angkutan, kegiatan pengumpulan database pelayanan angkutan, survey angkutan umum dan tradisional, dan survey angkutan barang.

2) Jumlah Ijin Trayek

Ijin trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan/atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek. Jaringan trayek adalah kumpulan trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, kewenangan kabupaten adalah memberikan ijin trayek untuk pedesaan. Ijin trayek di Kabupaten Bantul dikeluarkan oleh Dinas Perijinan dengan rekomendasi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul. Sejak tahun 2012 trayek yang ada di Bantul berjumlah enam trayek yang tersebar di lima kecamatan yaitu: Bantul, Kasihan, Pajangan, Dlinggo, dan Kasihan. Kemudian pada tahun 2014 terdapat ijin trayek baru sebanyak satu trayek yang melayani Imogiri. Sampai

dengan tahun 2018 belum ada penambahan trayek. Jumlah ijin trayek di Kabupaten Bantul i dapat dilihat pada Tabel 2.76

Tabel 2.76. Jumlah Ijin trayek di Kabupaten Bantul Tahun 2012-2018

No.	Tahun	Jumlah ijin trayek	Lokasi
1.	2012	6	Kecamatan Bantul, Kasihan, Pajangan, Dlinggo dan Kasihan
2.	2013	6	Kecamatan Bantul, Kasihan, Pajangan, Dlinggo dan Kasihan
3.	2014	7	Kecamatan Bantul, Kasihan, Pajangan, Dlinggo dan Kasihan, Imogiri
4.	2015	7	Kecamatan Bantul, Kasihan, Pajangan, Dlinggo dan Kasihan, Imogiri
5.	2016	7	Kecamatan Bantul, Kasihan, Pajangan, Dlinggo dan Kasihan, Imogiri
6.	2017	7	Kecamatan Bantul, Kasihan, Pajangan, Dlinggo dan Kasihan, Imogiri
7.	2018	7	Kecamatan Bantul, Kasihan, Pajangan, Dlinggo dan Kasihan, Imogiri

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul, 2019

3) **Jumlah Uji KIR Angkutan Umum**

Uji kir angkutan umum merupakan pengujian setiap angkutan umum yang diimpor, baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Pengujian dimaksud meliputi uji tipe dan uji berkala. Uji tipe merupakan pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan, sedangkan uji berkala merupakan pengujian yang diwajibkan untuk mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.

Tabel 2.77 Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Di Kabupaten Bantul Tahun 2014-2018

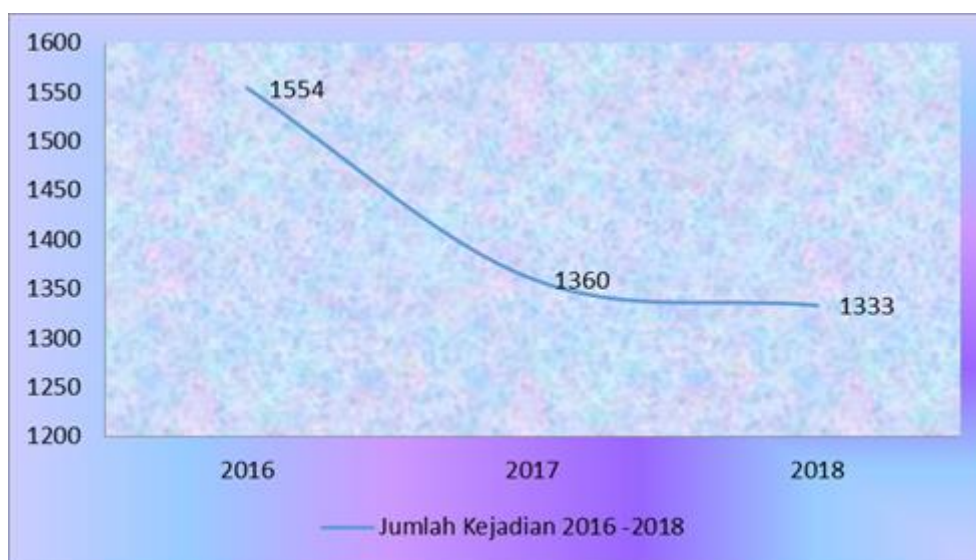
JENIS	Jumlah Uji Kir				
	2014	2015	2016	2017	2018
Uji kir kendaraan umum	15.418	16.870	17.810	18.730	20.923

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul, 2019

Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor di Kabupaten Bantul dilakukan enam bulan sekali oleh tenaga penguji yang memiliki kualifikasi teknis berdasarkan ketetapan oleh Menteri Perhubungan. Jumlah uji kir di Kabupaten Bantul cenderung mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat menyadari pentingnya uji KIR untuk menekan angka kecelakaan khususnya mobil barang atau trayek umum.

4) **Kecelakaan Lalu Lintas**

Jumlah kecelakaan lalu lintas tahun 2018 masih tinggi yaitu sebesar 1.333 kejadian dikarenakan kesadaran masyarakat akan tertib lalu lintas masih rendah.



Sumber: Dinas Perhubungan, Tahun 2019

Gambar 2.16. Jumlah Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2018

5) **Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bus**

Pelabuhan laut diartikan sebagai sebuah fasilitas di ujung samudera, sungai, danau untuk menerima kapal dan memindahkan barang kargo maupun penumpang ke dalamnya. Di Kabupaten Bantul pelabuhan laut dikembangkan dengan mengoptimalkan Kawasan

Pandansimo di Desa Poncosari Kecamatan Srandakan sebagai pangkalan pendaratan ikan dan pendukung wisata pantai.

Pelabuhan udara/bandara bisa diartikan sebagai sebuah fasilitas untuk menerima pesawat dan memindahkan barang kargo maupun penumpang ke dalamnya. Di Kabupaten Bantul tidak terdapat pelabuhan udara/bandara.

Terminal bus dapat diartikan sebagai prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum. Di Kabupaten Bantul terdapat empat terminal dengan kategori C, selain itu terdapat tiga lokasi pemungutan retribusi yaitu TPR Imogiri, TPR Piyungan, TPR Sedayu dan TPR Parangtritis Selama kurun waktu 5 tahun tidak mengalami penambahan atau pengurangan jumlah lokasi terminal.

Sistem transportasi darat (sebagaimana dimaksud dalam Perda Kabupaten Bantul Nomor 4 tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 (Pasal 13 ayat 2) untuk pergerakan lokal maupun regional didukung oleh pengembangan fasilitas angkutan darat di Kabupaten yang meliputi:

- a. terminal penumpang tipe C di Desa Palbapang Kecamatan Bantul;
- b. terminal angkutan barang di Desa Argosari Kecamatan Sedayu;
- c. stasiun penumpang dan stasiun barang serta pergudangan di Stasiun Sedayu;
- d. terminal angkutan barang di Desa Srimulyo Kecamatan Piyungan.

Tahun 2017 pembangunan halte sebanyak lima unit yang terpasang di halte Pasar Barongan, halte SMAN 1 Bantul, halte SMPN 1 Pandak, halte Sapuanging, dan halte Bandung. Tahun 2018 sebanyak lima unit halte terpasang di halte Utara Traffic Light S4 Kasongan, Utara Traffic Light S4 Palbapang, Depan SMP 2 Bantul, dan dua Depan SMU Muhammadiyah Bantul (MUHIBA).

6) Angkutan Darat

Angkutan Darat adalah jenis kegiatan ekonomi berupa pemberian/bisnis jasa angkutan/transportasi barang atau orang di darat, seperti yang dilakukan oleh perusahaan bus, taksi maupun kereta api. Angkutan darat yang terorganisir di Kabupaten Bantul berupa angkutan umum penumpang bus dan minibus.

Jumlah angkutan umum yang beroperasi di Kabupaten Bantul dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Penurunan jumlah pengguna angkutan umum karena saat ini masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi dibanding dengan angkutan umum akibat semakin mudahnya dalam memperoleh kendaraan pribadi (sepeda motor). Penggunaan angkutan umum sebagai sarana transportasi massal dapat mengurangi beban lalu lintas yang semakin padat. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan strategis dari Pemerintah Daerah sehingga masyarakat bersedia beralih menggunakan angkutan umum.

Tabel 2.78 Data Trayek Kendaraan Angkutan Umum Yang Masih Beroperasi di Kabupaten Bantul Tahun 2014-2018

No.	Trayek	Jumlah Armada				
		2014	2015	2016	2017	2018
	Angkudes					
1	Ps.Bantul-Imogiri	10	10	10	0	0
2	Ps.Bantul-Tugu Genthong	3	3	0	0	0
3	Ps.Bantul-Pundong	0	0	0	0	0
4	Ps.Bantul-Kretek	0	0	0	0	0
5	Ps.Imogiri-Dlingo (lewat Munthuk)	0	0	0	0	0
6	Ps.Imogiri-Dlingo (lewat seropan)	4	4	4	0	0
7	Ps.Bantul-Pleret	0	0	0	0	0
8	Ps.Bantul-Krebet	0	0	0	0	0
9	Dlingo-Rejoinangun	0	0	0	0	0
10	Pajangan-Bantul-Pajangan	0	0		0	0
	Jumlah	<u>17</u>	<u>17</u>	<u>14</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Angkutan Perbatasan					
1	Yogya- Parangtritis	29	29	29	29	21
2	Yogya- Samas	7	7	7	7	5
3	Yogya- Sorobayan	8	8	8	8	3
4	Yogya-Srandakan	22	22	6	6	3
5	Dlingo - Terminal Giwangan	16	16	16	16	14
6	Yogyakarta – Petoyan	7	7	7	7	15
7	Trisik - Giwangan		16	16	16	14

No.	Trayek	Jumlah Armada				
		2014	2015	2016	2017	2018
	Jumlah	89	105	89	89	75
	AKDP					
1	Yogya- Panggang GK	22	22	17	18	13
2	Yogya- Parangtritis	26	26	26	26	26
3	Yogya- Samas	15	15	14	14	14
4	Yogya- Pandansimo	13	13	13	13	13
5	Yogya- Wates	21	21	16	16	17
6	Yogya- Ngentakrejo	8	8	8	8	8
	Jumlah	109	105	105	94	91

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul, 2019

2.1.3.1.2.10. Komunikasi dan Informatika

1) Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal

Surat kabar merupakan penerbitan yang berupa lembaran yang berisi berita-berita karangan, iklan yang dicetak dan diterbitkan secara tetap atau periodik dan untuk dijual kepada umum. Lingkup berita dapat menyangkut berita internasional, nasional, maupun berita daerah (lokal). Fungsi dari surat kabar itu sendiri adalah untuk memberikan informasi yang beragam bagi masyarakat luas.

Jumlah surat kabar nasional/lokal adalah banyaknya jenis surat kabar terbitan nasional atau terbitan lokal yang masuk ke daerah. Semakin banyak surat kabar di daerah menunjukkan bahwa semakin besar ketersediaan fasilitas jaringan komunikasi massa berupa mediacetak sebagai pelayanan penunjang dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Jumlah surat kabar nasional/lokal yang masuk ke daerah cukup banyak tetapi hanya beberapa jenis yang dijadikan bahan referensi di Kabupaten Bantul.

Tabel 2.79. Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal Tahun 2014-2018
Kabupaten Bantul

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah jenis surat kabar terbitan nasional	4	4	4	4	4
2	Jumlah jenis surat kabar terbitan lokal	5	5	6	6	6
3	Total jenis surat kabar	9	9	10	10	10

Sumber: Dinas Kominfo Kabupaten Bantul, 2019

Jumlah jenis surat kabar baik terbitan nasional maupun lokal yang masuk ke Kabupaten Bantul cenderung konstan dengan total jenis surat kabar sekitar sembilan jenis. Ketersediaan surat kabar baik nasional/lokal diharapkan semakin meningkat kualitasnya sebagai sarana penunjang dalam peningkatan pelayanan masyarakat akan informasi yang terkait dengan pembangunan daerah.

Pemerintah Kabupaten Bantul juga menerbitkan Buletin Sejada dengan tujuan sebagai sarana komunikasi antara Pemerintah Kabupaten Bantul dengan masyarakat lewat media cetak yang penyebarannya sampai ke tingkat dusun melalui kecamatan. Dalam setiap tahunnya diterbitkan empat kali edisi. *Outcomenya* adalah tersosialisasikannya program kerja dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Bantul dampaknya masyarakat bisa mengetahui dan memahami program kerja dan kegiatan pembangunan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bantul lewat media cetak milik pemerintah ini. Kendala yang dihadapi adalah jumlah cetakannya masih terbatas sehingga belum bisa menjangkau ke tingkat dukuh ataupun RT.

2) Penyiaran Radio/TV

Penyiaran adalah Pancaran melalui ruang angkasa oleh sumber frekuensi dengan sinyal yang mampu diterima di telinga atau didengar dan dilihat oleh publik. Media penyiaran sebagai salah satu bentuk media massa yaitu radio dan televisi. Jumlah penyiaran radio/TV lokal adalah banyaknya penyiaran radio/TV nasional maupun radio/TV lokal yang masuk ke daerah. Semakin banyak jumlah penyiaran radio/TV baik di daerah maupun nasional di daerah maka menggambarkan semakin besar ketersediaan fasilitas jaringan komunikasi massa berupa media elektronik sebagai pelayanan penunjang dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.

Tabel 2.80. Jumlah Penyiaran Radio/TV Tahun 2014-2018
Kabupaten Bantul

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah penyiaran radio lokal	2	2	2	2	2
2	Jumlah penyiaran radio nasional	1	1	1	1	1
3	Jumlah penyiaran TV lokal	4	4	4	4	4
4	Jumlah penyiaran TV nasional	1	1	1	1	1
5	Total penyiaran radio/TV lokal	6	6	6	6	6

Sumber: Dinas Kominfo Kabupaten Bantul, 2019

Jumlah penyiaran radio/TV lokal di Kabupaten Bantul cenderung tetap. Pemerintah Kabupaten Bantul bekerjasama dengan TVRI dalam acara Taman Gabusan, hal ini diharapkan dapat memperluas jangkauan informasi bagi masyarakat. Disamping itu, dengan masuknya penyiaran radio dan TV nasional ke Kabupaten Bantul diharapkan dapat memicu penyiaran radio dan TV lokal untuk meningkatkan kualitas sehingga penyiaran radio dan televisi lokal dapat bersaing dengan penyiaran radio dan televisi nasional.

Dialog interaktif dengan maksud terjalinnya interaksi dan komunikasi antara Pemerintah daerah dengan masyarakat Bantul dalam penyelenggaraan pemerintahan. Adapun media radio yang menjadi mitra dalam kegiatan ini adalah Radio Bantul, Radio Persatuan, dan RRI. Hasil akhirnya adalah tersosialisasikannya program kerja dan kebijakan pemerintah kepada masyarakat sehingga meningkatnya aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Taman Gabusan merupakan siaran langsung di TVRI stasiun Yogyakarta. Siaran ini dilaksanakan sebanyak 40 kali terdiri dari 36 kali di dalam studio dan 4 kali di luar studio selama setahun. Model siaran adalah *talk show* dengan dialog interatif dengan pemirsa di luar studio. Kegiatan ini merupakan interaksi dan komunikasi antara Pemerintah dengan masyarakat Bantul dalam penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Bantul. Tujuan acara ini adalah meningkatkan aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan membangun sinergitas antara Pemerintah Kabupaten Bantul dan masyarakat sebagai prasyarat terwujudnya *good governance* dan sebagai ajang promosi potensi daerah. Sosialisasi cukai

untuk meningkatkan pemanfaatan dana DBH-CHT melalui televisi diantaranya RBTv, Jogja TV, Adi TV dll.

3) Website Milik Pemerintah Daerah

Keberadaan website milik pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan penyebaran informasi penyelenggaraan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bantul memiliki satu website utama dengan alamat <http://www.bantulkab.go.id/>, dengan 33 subdomain yang terdiri dari 32 subdomain untuk SKPD dan 1 subdomain untuk produk hukum Kabupaten Bantul. Subdomain untuk produk hukum Kabupaten Bantul, adalah <http://hukum.bantulkab.go.id/> dan subdomain untuk SKPD sebagaimana disajikan pada Tabel 2.81

Tabel 2.81 Alamat Subdomain Website Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2018

No.	Dinas	Subdomain
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	dikpora.bantulkab.go.id
2	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bantul	sosial.bantulkab.go.id
3	Dinas Pariwisata	pariwisata.bantulkab.go.id
4	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan	diperpautkan.bantulkab.go.id
5	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	pu.bantulkab.go.id
6	Dinas Kesehatan	dinkes.bantulkab.go.id
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	disdukcapil.bantulkab.go.id
8	Dinas Perhubungan	dishub.bantulkab.go.id
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	nakertrans.bantulkab.go.id
10	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	diskukmp.bantulkab.go.id
11	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	dppkbpmd.bantulkab.go.id
12	Dinas Kebudayaan	disbud.bantulkab.go.id
13	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	dptra.bantulkab.go.id
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	diskominfo.bantulkab.go.id
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	dpk.bantulkab.go.id

No.	Dinas	Subdomain
16	Satpol PP	satpolpp.bantulkab.go.id
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	dpmpt.bantulkab.go.id
18	Dinas Lingkungan Hidup	dlh.bantulkab.go.id
19	Dinas Perdagangan	perdagangan.bantulkab.go.id
No.	Badan	Subdomain
1	Bappeda	bappeda.bantulkab.go.id
2	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	bkpp.bantulkab.go.id
3	Badan Keuangan dan Aset Daerah	bkad.bantulkab.go.id
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	bpbd.bantulkab.go.id
5	Inspektorat	inspektorat.bantulkab.go.id
6	Kantor Kesbangpol	kesbangpol.bantulkab.go.id
No	PD	Subdomain
1	Sekretariat Daerah	setda.bantulkab.go.id
2	Sekretariat DPRD	dprd.bantulkab.go.id
3	RSUD Panembahan Senopati	rsudps.bantulkab.go.id
4	Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	ulp.bantulkab.go.id
No.	Kecamatan	Subdomain
1	Kecamatan Bambanglipuro	kec-bambanglipuro.bantulkab.go.id
2	Kecamatan Banguntapan	kec-banguntapan.bantulkab.go.id
3	Kecamatan Bantul	kec-bantul.bantulkab.go.id
4	Kecamatan Dlingo	kec-dlingo.bantulkab.go.id
5	Kecamatan Imogiri	kec-imogiri.bantulkab.go.id
6	Kecamatan Jetis	kec-jetis.bantulkab.go.id
7	Kecamatan Kasihan	kec-kasihan.bantulkab.go.id
8	Kecamatan Kretek	kec-kretek.bantulkab.go.id
9	Kecamatan Pajangan	kec-pajangan.bantulkab.go.id
10	Kecamatan Pandak	kec-pandak.bantulkab.go.id
11	Kecamatan Piyungan	kec-piyungan.bantulkab.go.id
12	Kecamatan Pleret	kec-pleret.bantulkab.go.id
13	Kecamatan Pundong	kec-pundong.bantulkab.go.id
14	Kecamatan Sanden	kec-sanden.bantulkab.go.id
15	Kecamatan Sedayu	kec-sedayu.bantulkab.go.id
16	Kecamatan Sewon	kec-sewon.bantulkab.go.id
17	Kecamatan Srandakan	kec-srandakan.bantulkab.go.id

Sumber: Dinas Kominfo Kabupaten Bantul, 2019

Keberadaan website milik Pemerintah Kabupaten Bantul beserta subdomainnya diharapkan dapat meningkatkan keterbukaan informasi publik di Pemerintah Kabupaten Bantul.

4) Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat (IKM)

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Bantul diperoleh dari rata-rata nilai IKM PD pemberi layanan se-Kabupaten Bantul. IKM di Kabupaten mengalami peningkatan setiap tahun. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap

pemberian layanan di PD Kabupaten Bantul mengalami peningkatan. Hasil penilaian IKM Tahun 2018 dari seluruh PD layanan yang telah menyusun dokumen IKM dengan nilai rata-rata 88,70, nilai terendah 66,50 dan nilai tertinggi 97,06. Indeks kepuasan layanan masyarakat di Kabupaten Bantul tahun 2013-2017 disajikan pada Tabel 2.82.

Tabel 2.82. IKM Tahun 2013-2018 Kabupaten Bantul

No.	Tahun	IKM
1	2013	76,4
2	2014	77,41
3	2015	78,13
4	2016	78,69
5	2017	87,57
6	2018	88,70

Sumber: Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul, 2019

Sesuai dengan Keputusan Menteri PAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, telah ditetapkan nilai persepsi, interval IKM, interval konversi IKM, mutu pelayanan, dan kinerja unit pelayanan sebagaimana disajikan pada Tabel 2.83.

Tabel 2.83 Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 1,75	25,00 – 43,75	D	Tidak Baik
2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Baik
3	2,51 – 3,25	62,53 – 81,25	B	Baik
4	3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	A	Sangat Baik

Sumber: Bagian Organisasi Kabupaten Bantul, 2019

Berdasarkan Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, maka nilai rata-rata IKM Kabupaten Bantul tahun 2017 berada pada interval 81,26-100,00 yaitu memiliki nilai A dengan kinerja unit pelayanan dalam kategori sangat baik.

Untuk IKM kecamatan dari 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Bantul, per semester angkanya menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Dilihat dari standar deviasinya menunjukkan bahwa nilai IKM antar kecamatan cenderung mengalami fluktuasi. Secara umum dapat disimpulkan bahwa kualitas layanan publik ditingkat kecamatan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, meskipun kualitasnya cenderung variatif. Dengan demikian, diperlukan adanya terobosan yang dapat memperkecil tingkat fluktuasi/perbedaan kualitas layanan publik antar kecamatan.

Tabel 2.84. IKM Kecamatan di Kabupaten Bantul Tahun 2014-2018

No	Kecamatan	2014	2015	2016	2017	2018
1	Dlingo	NA	80,94	77,57	95,06	95,18
2	Piyungan	NA	79,26	80,19	93,78	95,64
3	Pleret	NA	80,00	81,85	96,60	96,83
4	Banguntapan	NA	80,05	80,05	80,45	79,76
5	Imogiri	NA	80,02	79,99	89,83	97,15
6	Sewon	NA	75,20	76,93	96,07	95,38
7	Jetis	NA	78,04	79,11	94,70	94,75
8	Pundong	NA	88,16	85,05	96,90	97,09
9	Kretek	NA	80,18	80,75	94,83	96,34
10	Bambanglipuro	NA	78,64	77,83	97,06	97,38
11	Bantul	NA	77,00	77,15	93,18	98,95
12	Kasihan	NA	79,23	81,67	83,69	94,85
13	Sedayu	NA	80,23	79,02	93,10	95,45
14	Pajangan	NA	82,50	81,83	94,16	87,42
15	Pandak	NA	73,24	79,53	82,93	84,57
16	Sanden	NA	79,97	80,24	96,89	95,74
17	Srandakan	NA	81,90	81,63	81,91	86,25
Rata-rata		NA	79,68	80,02	91,83	93,45

Sumber: Bagian Organisasi Kabupaten Bantul, 2019

5) Inovasi Pelayanan Publik

Kompetisi inovasi pelayanan publik (Sinovik) dilaksanakan setiap tahun yang melibatkan semua unsur Perangkat Daerah dan BUMD dengan prinsip minimal satu institusi satu inovasi. Pada Seleksi Sinovik tingkat Nasional tahun 2019, ada 2 Inovasi dari Kabupaten Bantul yang masuk Top 99, yaitu:

1. SIPERKASA (Sistem Penjemuran Karya Santosa) dibidang pertanian dengan inovasi berupa mengatasi masalah pasca panen mendukung ketahanan pangan;
2. Mobil Keliling Pajak Bantul, Pelayanan Pajak Daerah Keliling berupa pelayanan PBB lebih dekat, lebih mudah, lebih murah.

Untuk Sinovik yang telah dilaksanakan pada tahun 2017, ada 10 inovasi terbaik dalam pelayanan publik di Kabupaten Bantul, sedangkan pada tahun 2018 ada 7 inovasi terbaik daerah sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.85.

Tabel 2.85. Top Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2017 dan 2018

Top 10 Pemenang Sinovik Tingkat Kabupaten Bantul Tahun 2017		
No	Nama PD/Unit Kerja	Inovasi
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	SITUPAT, Siji Entuk Papat
2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	KAPERU, KTP Baru Bagi Pengantin Baru
3	Kecamatan Piyungan	Penerbitan IUMK Jemput Bola
4	Kecamatan Bantul	GETARR, Gerakan Tanggap Renovasi Rumah
5	Puskesmas Kasihan 1	KEKEP IBU
6	Puskesmas Jetis 1	GELIAT BARONGAN
7	Puskesmas Pleret	KRIPEK PARU, Obat Mujarab Penanggulangan TBC
8	Puskesmas Bambanglipuro	Paguyuban Tresno Rogo
9	Balai Benih Pertanian	SIPERKASA (Sistem Penjemuran Karya Santosa)
10	PDAM	PDAM Bantul Siap Prima
Top 7 Pemenang Sinovik Tingkat Kabupaten Bantul Tahun 2018		
No	Nama PD/Unit Kerja	Inovasi
1	Dinas Kesehatan	PSC 119 (<i>Public Safety Center</i>) 119
2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	AKSI SIMPATI (Akta Kematian Sehari Jadi)
3	Kecamatan Piyungan	E-lawar (Laporan Aduan Warga)
4	Puskesmas Jetis I	GROPYOK TBC

5	Puskesmas Kasihan II	Jamah Linsek Viagra
6	Puskesmas Pleret	BADOT TERSENYUM (Buatlah Anak dan Orang Tua Tersenyum)
7	Puskesmas Piyungan	Gardu Kelola

Sumber : Bagian Organisasi Kabupaten Bantul, 2019

2.1.3.1.2.11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

1) Koperasi Berbadan Hukum

Pembangunan koperasi di Kabupaten Bantul diarahkan pada pengembangan koperasi menjadi unit usaha yang kuat, maju, dan mandiri serta memiliki daya saing dengan fokus pada revitalisasi koperasi serta fasilitasi koperasi. Adapun sasarannya adalah peningkatan kinerja dan produktifitas usaha koperasi.

Sampai dengan tahun 2018, koperasi berbadan hukum di Kabupaten Bantul mengalami penurunan dikarenakan adanya Peraturan Menteri Koperasi No: 10/PER/KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan dan dikuatkan dengan Surat Keputusan Menteri Koperasi dan UKM No: 244/Dep.1/XII/2016 Tanggal 23 Desember 2016 tentang : Pembubaran Koperasi Tidak Aktif Dalam Rangka Pendataan dan Penataan Koperasi. Di tahun 2016 telah dilaksanakan pembubaran koperasi tidak aktif sebanyak 64 koperasi.

Tabel 2.86 Koperasi Berbadan Hukum Tahun 2014-2018

No.	Kecamatan	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Kasihan	37	38	10	35	28
2	Sewon	60	61	62	51	43
3	Banguntapan	43	44	42	34	25
4	Pundong	11	12	12	6	8
5	Dlingo	16	19	20	19	16
6	Piyungan	22	23	23	21	17
7	Pajangan	10	10	10	9	8
8	Bantul	87	90	92	86	69
9	Srandakan	18	18	18	16	10
10	Pandak	15	17	17	15	13
11	Imogiri	32	30	31	30	24
12	Sanden	24	24	23	22	19
13	Kretek	10	10	10	9	10
14	Sedayu	15	17	18	16	15
15	Jetis	30	31	31	26	17

16	Pleret	22	22	23	17	10	Su mb er:
17	Bambanglipuro	21	22	21	21	15	
Jumlah		473	488	493	433	347	

Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian, 2019

2) Perkembangan UKM

Sasaran pembangunan dalam mengembangkan UKM di Kabupaten Bantul antara lain meningkatnya kinerja, produktivitas usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), meningkatnya akses kelembagaan keuangan dan permodalan pada UMKM/Industri Kecil dan Menengah (IKM), meningkatnya sumber daya manusia (SDM) pengelola koperasi UMKM/IKM, meningkatnya kualitas dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan UKM, serta terwujudnya masyarakat yang berjiwa wirausaha (*entrepreneur*) tinggi dan mampu mengembangkan potensi dan sumber daya yang ada. Upaya yang telah dilakukan antara lain fasilitasi UMKM, pelatihan manajemen ekspor, impor, pelatihan teknologi informasi, kerjasama dengan Kementerian Luar Negeri, serta mengadakan pendataan secara langsung ke eksportir maupun importir. Perkembangan UKM di Kabupaten Bantul menunjukkan hal yang positif bagi peningkatan aktivitas perekonomian. Pada tahun 2018 jumlah UMKM di Kabupaten Bantul mencapai sebanyak 47.143 unit, meningkat 1,65% dibanding tahun 2017.

Tabel 2.87 Pertumbuhan Jumlah UMKM di Kabupaten Bantul Tahun 2014-2018

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Usaha Mikro	27.498	27.672	27.708	27.828	28.384
2.	Usaha Kecil	11.458	11.531	11.544	11.594	11.768
3.	Usaha Menengah	6.874	6.918	6.926	6.956	6.991
	Jumlah	45.830	46.121	46.178	46.378	47.143

Sumber: Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian, 2019

Tabel 2.88 Penyerapan Tenaga Kerja Pada UMKM
di Kabupaten Bantul Tahun 2014-2018

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Usaha Mikro	54.996	55.344	55.416	55.656	56.768
2.	Usaha Kecil	34.374	34.593	34.632	34.782	35.130
3.	Usaha Menengah	6.874	6.918	6.926	6.956	111.856
	Jumlah	199.354	200.625	200.864	201.734	203.754

Sumber: Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian, 2019

Tabel. 2.89 Data Penerbitan IUMK
di Kabupaten Bantul Tahun 2014-2017

No	Tahun	Jumlah
1	2015	4.531
2	2016	4.674
3	2017	2.749
4	2018	4.996
	Jumlah	16.950

Sumber data : Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian, 2019

2.1.3.1.2.12. Penanaman Modal

1) Investasi PMA dan PMDN

Jumlah investor Kabupaten Bantul Tahun 2018 sebanyak 94 terdiri dari 47 investor luar negeri (PMA) dan 47 investor dalam negeri (PMDN). Ditinjau dari jumlah investor secara keseluruhan (PMA dan PMDN), jumlah investor di Kabupaten Bantul pada tahun 2018 meningkat sebesar 33 investor dibandingkan dengan tahun 2017.

Tabel 2.90. Jumlah Investor Berskala Nasional
di Kabupaten Bantul Tahun 2014-2018

No.	Tahun	Jumlah Investor		Jumlah
		PMA	PMDN	
1	2014	27	8	35
2	2015	32	87	119
3	2016	37	5	42
4	2017	46	15	61
5	2018	47	47	94

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul, 2019

Dalam proses pembangunan, investasi memiliki peranan yang sangat penting. Investasi menentukan dinamika dan akselerasi pembangunan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jika proses investasi berlangsung baik maka perekonomian akan tumbuh dengan baik selama proses investasi tersebut menghasilkan output yang efisien.

Tabel 2.91. Nilai Investasi PMA/PMDN di Kabupaten Bantul Tahun 2014-2018

Tahun	Jmlh Proyek PMDN	Jmlh Proyek PMA	Jmlh Proyek PMDN+PMA	Nilai Investasi PMDN	Nilai Investasi PMA (Rp)	Nilai Investasi PMDN+PMA (Rp)	Pertumbuhan Nilai Investasi (Rp)	Pertumbuhan (%)
s.d 2014	9	28	37	543.768.413.437,84	332.212.175.756,00	875.980.589.193,84	130.247.301.772,95	17,47
s.d 2015	90	38	128	557.333.697.000,94	415.919.685.134,00	973.253.382.134,94	97.272.792.941,10	11,10
s.d 2016	5	37	42	564.682.781.966,05	550.714.055.730,00	1.115.396.837.696,05	142.143.455.561,11	14,60
s.d 2017	15	46	61	601.765.581.966,05	655.549.055.730,00	1.257.314.637.596,05	141.917.800.000,00	12,72
s.d 2018	47	47	94	666.256.881.966,05	740.109.755.730,00	1.406.366.637.696,05	149.052.000.000,00	11,85

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul, 2019

Catatan:

- Realisasi investasi pada tahun 2016 adalah realisasi investasi yang tercatat dalam Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang disampaikan melalui situs <https://lkpmonline.bkpm.go.id>
- 2014 , kurs US\$ 1 = Rp11.600 sesuai APBN-P2014
- 2015 , kurs US\$ 1 = Rp12.500 sesuai APBN-P2015
- 2016 , kurs US\$ 1 = Rp13.500 sesuai APBN-P2016
- 2017 , kurs US\$ 1 = Rp13.400 sesuai APBN-P2017
- 2018 , kurs US\$ 1 = Rp13.400 sesuai APBN-2018

Dari Tabel 2.91 dapat dijelaskan bahwa realisasi investasi di Kabupaten Bantul pada tahun 2018 secara keseluruhan mencapai nilai Rp1.406.366.637.696,05 meningkat sebesar Rp149.052.000.000,00 atau 11,85% bila dibandingkan dengan capaian nilai investasi tahun 2017 sebesar Rp1.257.314.637.596,05 (dengan kurs 1 US\$ sama dengan Rp13.400,00). Jika dilihat dari nilai investasi, PMA lebih besar dibanding PMDN. Nilai investasi PMA tahun 2018 sebesar Rp740.109.755.730,00, sementara nilai investasi PMDN sebesar Rp666.256.881.966,05. Hal ini menunjukkan bahwa investor luar negeri sudah mulai tertarik untuk melakukan investasi di Kabupaten Bantul.

2) Daya Serap Tenaga Kerja

Rasio daya serap tenaga kerja merupakan perbandingan antara jumlah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan PMA/PMDN dengan jumlah seluruh PMA/PMDN. Rasio ini mencerminkan daya tampung proyek investasi PMA/PMDN untuk menyerap tenaga kerja di suatu daerah. Semakin besar rasio daya serap tenaga kerja menunjukkan semakin besar daya tampung proyek investasi PMA/PMDN tersebut.

**Tabel 2.92 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja
di Kabupaten Bantul Tahun 2014-2018**

No.	Tahun	Jumlah Investor			Jumlah Tenaga Kerja			Rasio Daya Serap Tenaga Kerja
		PMA	PMDN	Jumlah	PMA	PMDN	Jumlah	
1	2013	29	8	37	8.705	5.863	14.568	196,86
2	2014	28	9	37	8.928	5.986	14.914	179,69
3	2015	38	90	128	8.909	9.355	18.264	123,41
4	2016	37	5	42	10.364	9.366	19.730	469,76
5	2017	46	15	61	13.880	9.880	23.760	389,51
5	2018	47	47	94	15.311	11.610	26.921	286,39

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul, 2019

Rasio daya serap tenaga kerja tahun 2018 mencapai 286,39 artinya satu perusahaan PMA/PMDN mampu menampung sekitar 286 tenaga kerja. Jumlah ini turun bila dibanding rasio daya serap tenaga kerja tahun 2017 yang mencapai 389,51. Dari sisi penyerapan tenaga kerja, mengalami penurunan sebesar 26,47%. Hal ini disebabkan karena adanya pengaruh kemajuan teknologi dimana pemanfaatan tenaga kerja manusia telah digantikan dengan penggunaan alat berteknologi tinggi.

2.1.3.1.2.13. Kepemudaan dan Olahraga

1) Organisasi Pemuda

Kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan khususnya generasi muda yang tergabung dalam organisasi dan komunitas melalui pengembangan potensi pemuda dan peningkatan peran

pemuda dalam pembangunan diantaranya melalui pelatihan bela negara, bakti pemuda dan sosial, expo pemuda, kader anti narkoba dan pemuda pelopor Kegiatan kepemudaan tahun 2018 disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.93. Kegiatan Kepemudaan Tahun 2018

Kegiatan	Wujud Kegiatan
Kegiatan Pengembangan Potensi Pemuda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seleksi Jambore Pemuda Daerah; 2. Lomba Wirausaha Muda Bantul; 3. MTQ Pelajar Kecamatan se-Kabupaten Bantul; 4. MTQ Pelajar Kabupaten; 5. Jambore Pemuda Indonesia; 6. Pembinaan Kafilah & MTQ DIY; 7. Lomba Baris Berbaris; 8. MTQ DIY (ABT); 9. Lomba Mural Pemuda 2018 (ABT).
Kegiatan Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seleksi Pemuda Pelopor Kabupaten; 2. Fact Finding Pemuda Pelopor DIY; 3. Fact Finding Pemuda Pelopor Nasional.
Kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan dan Peningkatan Peran Serta Pemuda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP); 2. Kursus Mahir Dasar Pramuka; 3. Gladian Pimpinan Regu Pramuka; 4. Gladian Pimpinan Satuan Pramuka; 5. Kursus Mahir Lanjut Pramuka; 6. Seleksi Paskibraka Kabupaten Bantul; 7. TOT Pelatih Peleton Inti; 8. Pra Pelatihan Paskibraka; 9. Pendidikan Dasar Pramuka Peduli; 10. Pelatihan Resmi Paskibraka; 11. Paskibra Kecamatan se-Kabupaten Bantul; 12. Lomba Pawai, Karnaval dan Drumband HUT RI; 13. Study Banding Paskibraka; 14. Expo Pemuda; 15. Bela Negara Santri Pondok Pesantren; 16. Pelatihan Santri Tanggap Bencana; 17. Festival Santri & Pondok Pesantren Expo; 18. Diklat Santri & Halaqoh; 19. Pembinaan Kader Anti NAPZA & HIV AIDS; 20. Bhakti Pemuda Kabupaten Bantul (ABT); 21. Jogjakarta Istimewa Scout Camp 2018 (ABT).
Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan Kewirausahaan Pemuda; 2. Seminar & Diskusi Entrepreneur Muda Bantul; 3. Pelatihan Peningkatan Kewirausahaan Produktif (ABT).
Kegiatan Peningkatan Mutu Organisasi dan Tenaga Keolahragaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan Wasit Bola Voli dan Pelatihan Wasit Pencak Silat; 2. Work Shop Tenaga Keolahragaan Sepak Bola.
Kegiatan Pengembangan Olahraga Rekreasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Car Free Day; 2. Olahraga Tradisional; 3. Pemassalan Olahraga.
Kegiatan Pembinaan dan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pekan Olahraga Pelajar Kab. Bantul; 2. Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA); 3. Pekan Olahraga dan Seni Pondok Pesantren Daerah

Kegiatan	Wujud Kegiatan
	Kab. Bantul (POSPEDA); 4. Pekan Paralimpic Pelajar Daerah Kab. Bantul (PEPARPEDA); 5. Pekan Paralimpic Pelajar Daerah Kab. Bantul (PEPARDA) dan Pembinaan NPC; 6. Tri Lomba Juang Tingkat Kabupaten Bantul; 7. Pengiriman Tri Lomba Juang DIY; 8. Pembinaan Atlet Berprestasi; 9. Reward / Bonus Atlet Berprestasi ASIAN GAMES, POPDA, PEPARPEDA, PEPARDA dan POSPEDA; 10. Kompetisi Cabang Olahraga yang berkembang di Masyarakat (Bola Voli, Sepak Bola Putra dan Putri, Basket, Gate Ball, Wood Ball, Korf Ball, Yong Moo Do, Tenis Meja, Tenis Lapangan, Bulutangkis dan Golf).

Sumber : Disdikpora Kabupaten Bantul, 2019

2) Jumlah Organisasi Olahraga

Jumlah organisasi olahraga di Kabupaten Bantul mengalami peningkatan. Peningkatan organisasi olahraga di Kabupaten Bantul tersebut menunjukkan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam memasyarakatkan olahraga. Diantaranya melalui olahraga rekreasi yang dikemas dalam *Car Free Day* dan olahraga tradisional serta kompetisi olahraga (PORDA, PPDA, Pemasalan Olahraga, Pekan Olahraga Pelajar, Pekan Paralimpic Pelajar Daerah (PEPARPEDA)).

3) Ketersediaan Sarpras Olahraga

Tersedianya Sarpras Olahraga antara lain: Stadion Sultan Agung; Sirkuit Sepatu Roda; Lapangan Pacuan Kuda; Lapangan *Tennis In Door*; Lapangan dan Tenis Dwiwindu. Selain itu akan dibangun Arena Panjat Tebing dan Lapangan Panahan.

4) Jumlah Cabang Olahraga

Kabupaten Bantul mempunyai cabang olahraga unggulan antara lain: Cabang olahraga Panahan; Senam; Atletik; Judo; Sepak Takraw; Pencak Silat, Tae Kwon Do, Gulat, Tinju, Tenis Lapangan, dan Tenis Meja.

Cabang olahraga yang berkembang di masyarakat dan diselenggarakan dalam kompetisi olahraga antara lain: Cabang

olahraga Bola voli; Tenis Meja; Tenis Lapangan; Bulutangkis; Futsal; Pencak Silat, Gate Ball, Basket, Korf Ball, Yoong Moo Do, Golf dan Sepak bola putri.

5) Prestasi dalam Bidang Olahraga

Beberapa prestasi keolahragaan telah diraih dalam tahun 2018, diantaranya:

- a. Kompetisi olahraga berjenjang atau Pekan Olahraga (POR) Pelajar kabupaten dengan peserta pelajar SD, SMP dan SMA, mempertandingkan 23 cabang olahraga, kegiatan ini merupakan seleksi yang hasil juaranya berhak mewakili kabupaten Bantul maju PPDA DIY. Pada ajang PPDA DIY Tahun 2018, Kabupaten Bantul mengirimkan atlet dan pendamping yang bertanding di 23 Cabang Olahraga dan Kontingen Kabupaten Bantul berhasil mempertahankan prestasi sebagai **Juara Umum** dengan memperoleh medali 65 emas, 46 perak dan 60 perunggu.

Tabel 2.94. Perolehan Medali pada Pekan Olahraga Pelajar Tahun 2018

No	Kab./Kota	Emas	Perak	Perunggu	Jumlah	Peringkat
1	Kab. Bantul	65	46	60	171	1
2	Kota Yogyakarta	52	34	32	118	2
3	Kab. Sleman	43	61	65	169	3
4	Kab. Kulonprogo	14	21	52	87	5
5	Kab. Gunungkidul	16	28	53	97	4

Sumber: Dinas Dikpora Kabupaten Bantul, 2019

- b. POSPEDA, pada ajang POSPEDA DIY Kabupaten Bantul mengirimkan sebanyak 152 atlet dan 18 official/pendamping dari FKPP Kabupaten Bantul. POSPEDA DIY 2018 mempertandingkan 7 Cabang Olahraga dan 9 cabang seni Kabupaten Bantul hanya

meraih peringkat 2 dari 5 Kabupaten Kota memperoleh medali 16 emas, 20 perak dan 6 perunggu sebagai berikut :PEPARPEDA, menyeleksi tiga cabang olahraga pelajar SLB dan inklusi dan mengirimkan atlet luar biasa ke tingkat DIY sebanyak 40 atlet pada tiga cabang olahraga yaitu atletik, bulutangkis, dan tenis meja, kontingen Kabupaten Bantul kembali meraih **juara umum** dengan perolehan medali tujuh emas, tujuh perak dan empat perunggu.

Tabel 2.95. Perolehan Medali pada POSPEDA Cabang Olahraga Tahun 2018

No	Kab./Kota	Emas	Perak	Perunggu	Jumlah	Peringkat
1	Kota Yogyakarta	13	13	8	34	1
2	Kab. Bantul	10	13	3	26	2
3	Kab. Sleman	10	7	16	33	3
4	Kab. Kulonprogo	0	0	5	5	5
5	Kab. Gunungkidul	6	7	19	32	4

Sumber: Dinas Dikpora Kabupaten Bantul, 2019

Tabel 2.96. Perolehan Medali pada POSPEDA Cabang Seni Tahun 2018

No	Kab./Kota	Emas	Perak	Perunggu	Jumlah	Peringkat
1	Kab. Bantul	6	7	3	16	1
2	Kota Yogyakarta	4	3	2	9	2
3	Kab. Gunungkidul	3	4	6	13	3
4	Kab. Sleman	3	3	6	12	4
5	Kab. Kulonprogo	2	1	1	4	5

Sumber: Dinas Dikpora Kabupaten Bantul, 2019

- c. PEPARPEDA, sub kegiatan ini menyeleksi 3 cabang olahraga pelajar SLB dan inklusi dan mengirimkan atlet luar biasa ke tingkat DIY sebanyak 40 atlet pada 3 cabang olahraga yaitu atletik, bulutangkis, dan tenis meja, kontingen Kabupaten Bantul

kembali meraih **juara umum** dengan perolehan medali 8 emas, 8 perak dan 2 perunggu.

Tabel 2.97. Perolehan Medali pada POSPEDA Cabang Seni Tahun 2018

No	Kab./Kota	Emas	Perak	Perunggu	Jumlah	Peringkat
1	Kab. Bantul	8	8	2	18	1
2	Kota Yogyakarta	3	3	3	9	2
3	Kab. Gunungkidul	2	4	6	12	3
4	Kab. Sleman	2	0	3	5	4
5	Kab. Kulonprogo	1	1	2	4	5

Sumber: Dinas Dikpora Kabupaten Bantul, 2019

2.1.3.1.2.14. Statistik

Urusan statistik di Kabupaten Bantul masih ditangani oleh Pemerintah Pusat melalui Badan Pusat Statistik (BPS) yang bertempat di Bantul. Namun demikian, karena melihat bahwa di segenap kegiatan statistik perlu diadakan keseragaman dan koordinasi, maka Pemerintah Kabupaten Bantul sering bekerjasama dengan BPS melaksanakan beberapa program yang hasilnya dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai bahan penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan. Selain kerjasama dengan BPS, Pemerintah Kabupaten Bantul juga melaksanakan beberapa kegiatan yang berkaitan dengan statistik.

Tahun 2018 dilaksanakan pengumpulan data, melakukan verifikasi dan validasi serta mengolah data Gakin sehingga didapatkan data keluarga Miskin yang ter-update dengan menggunakan data Gakin BDT 2015. Tujuannya antara lain mengumpulkan data keluarga Gakin BDG 2015, melakukan verifikasi data Gakin 2015, mendapatkan data yang ter-update sesuai kondisi tahun 2017, dan menyusun data statistik kemiskinan untuk 75 desa. Tahun 2018 penyusunan buku statistic pertumbuhan ekonomi, Inflasi/Deflasi di Kabupaten Bantul

serta mendeteksi kelompok komoditas yang berpengaruh dalam Inflasi/Deflasi, Indeks Pembangunan Manusia, dan informasi pertumbuhan ekonomi selama periode 2013-2018

2.1.3.1.2.15. Persandian

Kegiatan sandi dalam pendekatan konsep komunikasi sejalan dengan ruang lingkup konsep komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi dimaknai sebagai proses penciptaan dan pertukaran pesan-pesan. Hal ini berarti pesan-pesan senantiasa diciptakan dan dipertukarkan dengan kesadaran untuk dimaknai oleh kedua belah pihak dalam rangkaian yang berlanjut dan dinamis. Pesan-pesan yang diciptakan dan dipertukarkan adalah makna dari simbol atau lambang yang dapat ditangkap panca indera. Simbol dapat berupa kata-kata atau nirkata, lisan atau tertulis. Penciptaan dan penafsiran pesan terjadi melalui *coding* dan *decoding*.

Pada hakekatnya pengelolaan informasi berklasifikasi rahasia dalam konteks persandian, akan berada pada alur mulai dari pembuatan informasi, pemberian label, pengiriman, dan penyimpanan. Untuk naskah dinas berklasifikasi rahasia, kerahasiaannya dilakukan dengan enkripsi. Khusus untuk komunikasi melalui jaringan, perlu ada jaminan terhadap keselamatan pesan melalui e-mail. Untuk informasi yang dihasilkan dan disimpan dalam bentuk arsip digital, maka kerahasiaan dilakukan dengan enkripsi dan keutuhan data dengan *hash function*. Sementara untuk pengiriman informasi digital, maka kerahasiaannya perlu dilakukan dengan cara enkripsi jaringan. Khusus untuk pengiriman dalam bentuk *hardcopy*, maka pengamanan dilakukan terhadap fisik pesan dan personil pembawa pesan.

Persandian dalam penyelenggaraan pengamanan persandian sebagaimana termuat dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2008 tentang Tunjangan Pengamanan Persandian adalah rangkaian kegiatan dan tindakan pencegahan atau penanggulangan yang dilakukan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan

untuk melindungi kelangsungan persandian dari segala hakekat ancaman dan gangguan dalam satu kesatuan sistem persandian negara. Bagi pemerintah daerah, masalah persandian sebagaimana dimuat dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, masuk menjadi salah satu urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

2.1.3.1.2.16. Kebudayaan

Salah satu potensi sebagai penyangga utama wisata di Kabupaten Bantul adalah potensi budaya baik yang berupa warisan budaya benda maupun warisan budaya tak benda. Obyek wisata dengan basis wisata heritage dan obyek wisata cagar budaya. Upaya pelestarian budaya meliputi perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian, nilai tradisi budaya dan warisan budaya.

1) Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

Sebagai bagian dari DIY, Kabupaten Bantul tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan keistimewaan bidang kebudayaan. Pada tahun 2015 penyelenggaraan festival seni dan budaya mencapai 77 *event* dan pada tahun 2018 telah diselenggarakan sebanyak 488 event meliputi diantaranya pentas wayang, kethoprak, jathilan, reog, seni religi, dan hadroh. Peningkatan penyelenggaraan event seni dan budaya ini merupakan wujud dari keseriusan pemerintah daerah untuk melestarikan seni dan budaya agar dapat dinikmati oleh generasi mendatang.

2) Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya

Sarana penyelenggaraan seni dan budaya yang dimiliki Kabupaten Bantul pada tahun 2018 berupa tiga gedung kesenian dan 2.147 grup kesenian meningkat dibanding tahun 2015 yang baru mempunyai 1.952 grup kesenian. Minimnya sarana fisik/gedung kesenian di Kabupaten Bantul perlu mendapat perhatian dari

pemerintah daerah untuk mendukung pengembangan aktivitas grup kesenian yang semakin bertambah.

3) Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan

Kabupaten Bantul sebagai salah satu destinasi wisata penting di DIY, khususnya jenis wisata budaya maka penyelenggaraan urusan kebudayaan diarahkan untuk melestarikan kebudayaan daerah melalui kebijakan yang berlandaskan prinsip perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan aset seni budaya masyarakat, warisan budaya, dan Cagar Budaya (CB) guna menunjang predikat sebagai destinasi wisata budaya.

Tabel 2.98. Data Warisan/Cagar Budaya Kabupaten Bantul

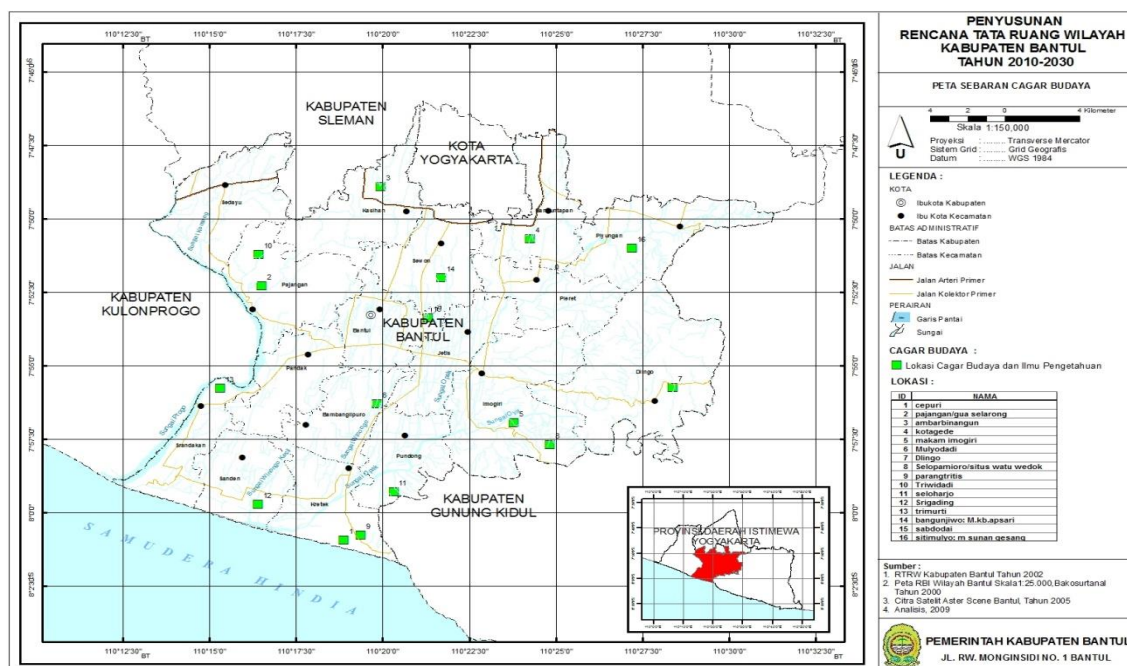
NO	KECAMATAN	JUMLAH
1	Kec. Bambanglipuro	7
2	Kec. Banguntapan	24
3	Kec. Bantul	12
4	Kec. Dlingo	8
5	Kec. Imogiri	18
6	Kec. Jetis	9
7	Kec. Kasihan	15
8	Kec. Kretek	31
9	Kec. Pajangan	16
10	Kec. Pandak	12
11	Kec. Piyungan	13
12	Kec. Pleret	17
13	Kec. Pundong	18
14	Kec. Sanden	7
15	Kec. Sedayu	3
16	Kec. Sewon	6
17	Kec. Srandakan	5
	TOTAL	210

Sumber: Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul, 2019

Pelestarian benda, situs, dan kawasan cagar budaya di Kabupaten Bantul mulai ditingkatkan pada tahun 2014 meliputi:

- Benda bergerak berjumlah 295 buah yang terdiri dari arca, watu gilang, lingga, yoni, dan lain-lain;

- Situs berjumlah 3 buah berupa watu songkamal, watu lindung di Kecamatan Piyungan, dan watu gilang di Kecamatan Pandak;
- Kawasan cagar budaya 4 buah terdiri darimakam raja-raja diImogiri, Keraton Pleret, Kotagede, dan Parangtritis;
- Pengelolaan kawasan budaya yaitu pengelolaan museum, warisan dan cagar budaya serta taman budaya di daerah melalui kegiatan lawatan sejarah ke Museum Wayang Kekayon di Kecamatan Banguntapan, Kompleks Masjid Jami Kotagede, Kompleks Makam Raja Mataram I Kotagede, dan Rumah Budaya Tembi, dan penilaian obyek yang diduga sebagai cagar budaya. Harapan ke depan potensi seni budaya, sejarah dan purbakala daerah dapat terinformasikan, terdokumentasi, dan terlindungi dengan baik.



Sumber: Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul, 2019

Gambar 2.17. Peta Sebaran Cagar Budaya di Kabupaten Bantul

4) Indeks Pembangunan Kebudayaan

Delapan pilar prioritas pembangunan kebudayaan nasional antara lain pelestarian hak berkebudayaan, pembangunan jati diri dan karakter bangsa, penguatan multikulturalisme, pelestarian sejarah dan warisan budaya, pengembangan industry budaya, penguatan diplomasi

budaya, pengembangan SDM dan pranata kebudayaan, dan pengembangan sarana prasarana kebudayaan. Pemerintah pusat telah melakukan pemantapan indikator indeks pembangunan kebudayaan dari pilar-pilar kebudayaan. Penilaian Indeks Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Bantul berdasarkan hasil survey adalah 57,01. Nilai ini masih jauh dibawah nilai DIY yang menduduki peringkat pertama tingkat nasional dengan nilai 80,00. Oleh sebab itu perlu upaya peningkatan pencapaian indeks pembangunan kebudayaan Kabupaten Bantul dengan memperhatikan berbagai aspek dalam delapan pilar prioritas kebudayaan nasional.

2.1.3.1.2.17. Perpustakaan

1) Jumlah Perpustakaan

Gerakan Bantul Literasi di Kabupaten Bantul yang dilaksanakan pada tahun 2018 diharapkan dapat meningkatkan budaya literasi (baca, tulis, ucap) atau gemar membaca, suka menulis dan bisa mengungkapkan perasaan melalui kata kata bagi seluruh masyarakat Bantul, sehingga visi misi Bantul sehat, cerdas dan sejahtera dapat terwujud.

Perpustakaan di Kabupaten Bantul terdiri dari satu perpustakaan daerah dan layanan perpustakaan keliling. Kegiatan peningkatan pelayanan perpustakaan dilakukan dengan pelayanan perpustakaan di Kantor Perpustakaan dan layanan perpustakaan keliling. Layanan perpustakaan keliling mencakup 17 kecamatan dan 75 desa yang ada di Kabupaten Bantul. Pelayanan perpustakaan dilaksanakan pada hari Senin-Kamis dan Jum'at. Untuk Senin – Kamis pelayanan dimulai dari pukul 08.00 – 16.00 dan Jumat dari pukul 08.00 – 14.30 sedangkan untuk hari Sabtu - Minggu dilayani dari pukul 08.00 – 12. 00 WIB, dan pelayanan diliburkan pada saat hari libur nasional dan cuti bersama. Jumlah pengunjung di Perpustakaan rata-rata per hari 200 orang dan sampai akhir tahun total jumlah pengunjung mencapai 60.837 orang. Jangkauan layanan perpustakaan

keliling sebanyak 189 lokasi, pelayanan dilakukan selama 4 hari dalam 1 minggu, 16 hari dalam sebulan pada hari Senin-Kamis dengan rata-rata pengunjung perhari 1.481 orang.

Pelaksanaan perpustakaan keliling setiap hari Senin sampai dengan Kamis, dengan sasaran keliling meliputi perpustakaan sekolah, perpustakaan masjid, perpustakaan pondok pesantren, perpustakaan komunitas masyarakat, perpustakaan desa dan perpustakaan khusus (dinas/instansi). Dari semua unit armada yang ada, sudah menerapkan IT dengan sistem otomasi perpustakaan.

2) Jumlah Pengunjung Perpustakaan

Jumlah pengunjung perpustakaan dapat menggambarkan budaya baca di daerah. Jumlah pengunjung perpustakaan dihitung berdasarkan pengunjung yang mengisi daftar kehadiran atau berdasarkan data yang diperoleh melalui system pendataan pengunjung. Jumlah pengunjung perpustakaan di Kabupaten disajikan pada Tabel 2.99.

Tabel 2.99 Jumlah Pengunjung Perpustakaan
di Kabupaten Bantul Tahun 2014-2018

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Pengunjung Perpustakaan milik Pemerintah Daerah (Pemda)	175.202	218.521	345.368	518.693	732.826

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Bantul, 2019

Jumlah pengunjung perpustakaan di Kabupaten Bantul cenderung mengalami peningkatan. Peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2014 yang mencapai 175.202 orang dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 732.826 pengunjung. Hal ini mengindikasikan bahwa budaya baca di Kabupaten Bantul mengalami peningkatan. Peningkatan pengunjung perpustakaan di Kabupaten Bantul antara lain disebabkan oleh metode layanan dengan menggunakan sistem otomasi, paket dan manual, penambahan lokasi layanan keliling,

sarana prasarana dan fasilitas khususnya layanan perpustakaan yang ada di kantor sudah dilengkapi WIFI, ruangan ber-AC, suasana nyaman serta tersedianya SDM pengelola perpustakaan yang memadai.

3) Koleksi buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah

Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah menunjukkan ketersediaan bahan pustaka dan bacaan yang dapat diakses oleh masyarakat. Jumlah koleksi buku yang tersedia di Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Bantul mengalami peningkatan sejak tahun 2013. Hal ini disebabkan adanya peningkatan kemitraan dengan stakeholder perpustakaan dan adanya variasi koleksi. Koleksi bahan pustaka yang dimiliki oleh Perpustakaan Umum Kabupaten Bantul yang ada saat ini sebanyak 107.360 buku dengan jumlah judul bahan koleksi yang tersedia sebanyak 39.040 judul. Hal ini sudah memenuhi standar perpustakaan tipe A dengan koleksi sebanyak 17.000 judul. Selain itu, juga terdapat koleksi digital melalui *e-book* sebanyak 263 judul, masing-masing judul ada 8 buah, sehingga jumlah sebanyak 2.104 buah. Perkembangan jumlah koleksi bahan pustaka dari 2012-2016 dapat dilihat pada Tabel 2.100.

Tabel 2.100 Jumlah Koleksi Buku/ Bahan Pustaka
di Kabupaten Bantul Tahun 2014-2018

2014		2015		2016		2017		2018		
Judul	Buku	Judul	Buku	Judul	Buku	Judul	Buku	Judul	Buku	e-book
32.871	86.729	35.675	97.289	38.782	102.292	40.300	104.300	39.040	107.360	2.104

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Bantul, 2019

2.1.3.1.2.18. Kearsipan

Sesuai dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, salah satu urusan yang ditangani daerah adalah kearsipan. Urusan kearsipan diarahkan untuk penyelamatan dan pelestarian arsip daerah serta peningkatan kualitas pelayanan dalam bidang kearsipan. Arsip sebagai bukti pelaksanaan kegiatan instansi memiliki fungsi strategis dan

dinamis. Strategis artinya bahwa informasi yang terekam dalam arsip tidak hanya memiliki nilai guna primer yang berguna bagi instansi pencipta sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen, tetapi arsip tentu memiliki nilai guna sekunder yaitu nilai guna kebuktian dan informasional yang berguna untuk lembaga lain, orang, dan masyarakat luas. Nilai guna kebuktian suatu arsip karena terkait dengan keberadaan instansi, benda, tempat, dan orang. Sementara nilai guna informasional suatu arsip karena terkait dengan terjadinya peristiwa, kebijakan pemerintah, dan lain sebagainya.

Di Kabupaten Bantul urusan kearsipan tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang perpustakaan dan kearsipan.

Sampai saat ini di Kabupaten Bantul terdapat jumlah tenaga arsiparis ada 16 orang, jumlah arsip statis ada 2.649 dokumen dan jumlah pengelola kearsipan 154 orang.

Akuisisi dan pengelolaan arsip telah dilakukan pada tahun 2017 fokus pada dua tokoh yaitu tokoh keris (empu keris) mbah Djiwodiharjo dan pelukis ki Joko Pekik. Sedangkan tahun 2018 akuisisi arsip tokoh dalang Ki Timbul Hadiprayitno akuisisi arsip tokoh dalang Ki Timbul Hadiprayitno dan Arsip event tradisional Gerbang Madu Srimulyo Piyungan Dengan akuisisi arsip tersebut diharapkan dapat menambah hasanah arsip.

2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan

2.1.3.2.1. Kelautan dan Perikanan

1) Produksi Perikanan

Pembangunan kelautan dan perikanan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan empat pilar pembangunan, yaitu *pro-poor* (pengentasan kemiskinan), *pro-job* (penyerapan tenaga kerja), *pro-*

growth (pertumbuhan), dan *pro-environment* (pemulihan dan pelestarian lingkungan).

Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, mengamanatkan bahwa pengelolaan perikanan harus dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kebersamaan, kemitraan, kemandirian, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, kelestarian, dan pembangunan yang berkelanjutan.

Sasaran pembangunan kelautan dan perikanan adalah mencapai peningkatan produksi dan produktivitas perikanan dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi ikan, menyediakan bahan baku industri, meningkatkan pendapatan pembudidaya dan nelayan serta memperluas kesempatan berusaha dan kesempatan kerja. Potensi kelautan dan perikanan cukup besar dan masih terbuka peluang untuk pengembangannya.

2) Produksi Perikanan Budidaya

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 25/Permen-Kp/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan Dan Perikanan Tahun 2015-2019, sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan dijabarkan dalam tiga misi yakni kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan. Adapun kondisi yang ingin dicapai adalah: 1) terwujudnya kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan; 2) terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan; dan 3) terwujudnya pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang partisipatif, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.

Tabel 2.101. Produksi Perikanan Budidaya menurut Jenis Ikan Tahun 2014-2018 Kabupaten Bantul

No.	Jenis Ikan	Produksi (Kg)				
		2014	2015	2016	2017	2018*
1	Gurami	2.123.092	2.038.280	1.860.867	2.028.830	2.164.370
2	Nila	2.361.658	2.231.763	1.924.565	2.114.000	2.567.437

3	Lele	7.088.024	6.106.252	6.738.202	7.094.430	7.028.122
4	Bawal	382.730	218.462	258.883	282.250	179.914
5	Patin	40.086	95.597	40.150	29.370	21.421
6	Mas	24.040	24.268	34.018	37.450	37.444
7	Udang Vannamei	925.418	650.602	507.038	440.890	292.292
8	Lain-lain	71.927	-	-	-	-
JUMLAH		13.016.975	11.365.224	11.363.724	12.027.236	12.291.000

Sumber: Diperpautkan Kabupaten Bantul, 2019

*Angka sementara

Pada tahun 2018 produksi perikanan budidaya mengalami kenaikan sebesar 263.780 kg atau 2,19 % dari 12.027.236 kg pada tahun 2017 menjadi 12.291.000 kg pada tahun 2018. Kenaikan ini disebabkan karena introduksi teknologi baru yaitu budidaya ikan hemat lahan dan air (MATLAIR). Dengan lahan yang terbatas dan padat tebar tinggi, mampu meningkatkan produksi perikanan budidaya di Kabupaten Bantul. Data produksi perikanan serta RTP budidaya disajikan pada Tabel 2.102.

Tabel 2.102. Jumlah RTP dan Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2014-2018

No	Uraian	Jumlah				
		2014	2015	2016	2017	2018*
1.	Rumah Tangga Perikanan (RTP) budidaya	5.176	5.176	5.176	5.176	5.176
2.	Produksi perikanan budidaya (kg)	13.016.975	11.365.224	11.363.724	12.027.236	12.291.000

Sumber: Diperpautkan Kabupaten Bantul, 2019

*Angka sementara

Pembangunan kelautan dan perikanan Kabupaten Bantul saat ini perlu mendapatkan perhatian yang khusus terkait dengan perubahan paradigma yang telah digaungkan oleh Gubernur DIY yaitu dengan akan dijadikannya pantai selatan sebagai beranda depan DIY dengan paradigma 'Among Tani Dagang Layar'. Berbagai kebijakan dan upaya telah ditempuh merupakan langkah untuk meningkatkan pembangunan kelautan dan perikanan di Kabupaten Bantul melalui pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

Produksi perikanan budidaya bersifat fluktuatif karena banyak dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Pada kondisi yang sesuai untuk pertumbuhan ikan, maka produktivitasnya menjadi tinggi. terjadinya hujan sepanjang tahun perlu diwaspadai karena dapat menyebabkan kualitas air kolam menurun dan ikan mudah terjangkit penyakit. Hal ini ditindak lanjuti dengan pengambilan sampel sebagai objek uji laboratorium di Fakultas Perikanan UGM guna mengetahui penyebab dan jenis penyakitnya. Dari hasil uji laboratorium menunjukkan bahwa rata-rata penyakit disebabkan oleh jamur dan bakteri serta kualitas air yang tidak baik atau tercemar. Dengan adanya pemantauan penyakit pada ikan bisa dihindari kerugian akibat kematian ikan.

Jenis ikan yang dibudidayakan sebagaimana disajikan pada Tabel 2.101, dapat dilihat bahwa budidaya ikan lele masih mendominasi. Lele paling banyak dibudidayakan karena memiliki umur panen relatif lebih cepat, padat tebaranya lebih banyak, dan lebih tahan terhadap kondisi lingkungan yang kurang baik.

Dukungan Pemerintah Kabupaten Bantul terhadap peningkatan produksi perikanan budidaya yaitu dengan melaksanakan pelatihan perikanan budidaya, pembuatan pakan ikan, sosialisasi wirausaha perikanan budidaya kepada beberapa kelompok perikanan serta para pemuda dan pelajar.

Pengembangan budidaya perikanan juga didukung dengan pengembangan benih ikan melalui empat Balai Benih Ikan (BBI) yang meliputi BBI Barongan, Sanden, Gesikan, dan Krapyak. Beberapa upaya telah dilakukan untuk meningkatkan produksi benih berkualitas, antara lain dengan memberikan bantuan induk gurami, lele, nila, dan sarana perbenihan. Selain itu juga dilaksanakan pembinaan dan pengembangan perikanan serta pemberian bantuan sarana dan prasarana produksi perikanan budidaya baik pembesaran maupun pembenihan ikan. Produksi benih yang dihasilkan pada tahun 2014-2018 disajikan pada Tabel 2.103.

Tabel 2.103. Produksi Benih Ikan dari BBI Tahun 2014-2018

No.	Tahun	Produksi Benih Ikan
1.	2014	1.717.347
2.	2015	2.079.065
3.	2016	2.600.854
4.	2017	3.378.975
5.	2018	3.143.268

Sumber: Diperpautkan Kabupaten Bantul, 2019

Beberapa upaya telah dilakukan untuk meningkatkan produksi benih berkualitas, antara lain dengan memberikan bantuan induk gurami, lele, nila, dan sarana perbenihan. Selain itu melalui pembinaan dan pengembangan perikanan juga telah diberikan sarana dan prasarana produksi perikanan budidaya baik untuk sarana pembesaran maupun pembenihan ikan.

3) Produksi Perikanan Tangkap

Selain perikanan budidaya, di Kabupaten Bantul juga terdapat perikanan tangkap. Produksi perikanan tangkap tahun 2018 sebesar 768,58 ton, mengalami penurunan 116,91 ton atau 15,21 % jika dibandingkan dengan tahun 2017. Produksi perikanan tangkap tahun 2014-2018 disajikan pada Tabel 2.104.

Tabel 2.104. Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2014-2018 Kabupaten Bantul

No.	Uraian	Jumlah (ton)				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Produksi tangkap laut	364,86	391,37	234,30	624,75	473,01
2	Produksi tangkap perairan umum	487,71	349,23	282,20	260,60	295,43
Jumlah		852,67	741,60	516,50	885,35	768,44

Sumber: Diperpautkan Kabupaten Bantul, 2019

Turunnya produksi ini disebabkan sejak bulan Juli hingga September 2018, kondisi gelombang tinggi di ring I 4 mil laut Kabupaten Bantul menyebabkan nelayan tidak bisa melaut dan atau menangkap ikan di laut. Selain itu, pada periode yang sama, debit air

sungai yang berkurang menyebabkan aktivitas penangkapan ikan oleh nelayan perairan umum mengalami penurunan.

2.1.3.2.2. Pariwisata

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor strategis di Kabupaten Bantul. Selain sebagai lokomotif penggerak peningkatan perekonomian masyarakat, sektor ini juga memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Besarnya kontribusi sektor ini sangat tergantung pada jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bantul. Jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bantul. Meningkatnya jumlah wisatawan ke Kabupaten Bantul akan meningkatkan PAD dari sektor pariwisata. Jumlah wisatawan dan PAD sektor pariwisata disajikan pada Tabel 2.105.

Tabel 2.105 Jumlah Kunjungan Wisatawan dan PAD Sektor Pariwisata Tahun 2014-2018

No.	Tahun	Jumlah Wisatawan (Orang)	Jumlah PAD (Rp)
1.	2014	2.298.351	9.767.144.025,00
2.	2015	2.500.114	11.150.632.500,00
3.	2016	2.800.800	12.739.875.250,00
4.	2017	3.405.685	17.090.253.000,00
5.	2018	4.204.422	29.066.376.750,00

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, 2019

Jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bantul pada tahun 2018 mencapai 4.204.422 orang atau meningkat sebesar 23,45% dari tahun 2017. Sedangkan dari sisi kontribusi terhadap PAD 2018 mencapai Rp29.066.376.750,00 atau meningkat sebesar 70% dari perolehan tahun 2017. Peningkatan perolehan tersebut di atas selain didukung oleh keanekaragaman obyek wisata yang meliputi alam, budaya/religius, dan minat khusus/buatan, juga didukung oleh

pengembangan desa-desa wisata sebagai *alternative tourism* di Kabupaten Bantul, sehingga dapat memberikan pilihan-pilihan destinasi wisata bagi wisatawan. Pencapaian jumlah kunjungan wisatawan tersebut di atas merupakan keberhasilan dari pelaksanaan strategi pengembangan pariwisata antara lain melalui peningkatan daya tarik obyek wisata, intensifikasi dan ekstensifikasi promosi pariwisata, peningkatan kemitraan dan jejaring pariwisata serta optimalisasi dan pemberdayaan kapasitas desa-desa wisata.

Kemudian jika dilihat dari sisi jumlah daya tarik wisata dan usaha pariwisata di Kabupaten Bantul menunjukkan perkembangan yang cukup baik, dalam arti terdapat penambahan yang cukup signifikan dalam jumlah daya tarik wisata budaya dan usaha pariwisata dalam bentuk restoran/rumah makan. Namun demikian tetap diperlukan upaya yang lebih komprehensif baik melalui penggalan sumberdaya wisata baru, peningkatan kerjasama pengembangan pariwisata, maupun peningkatan promosi investasi dan kemitraan di bidang pariwisata untuk membangun kepariwisataan Kabupaten Bantul di masa mendatang. Kemitraan di bidang pariwisata yaitu menjalin kerjasama dengan lembaga lain dalam mengembangkan pariwisata. Mitra Pariwisata di Kabupaten Bantul ada 3 asosiasi yang terdiri dari Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI), Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), dan Forkom Desa Wisata/Pokdarwis.

Tabel 2.106 Jumlah Daya Tarik Wisata dan Usaha Pariwisata
Di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2018

No.	Jenis	2016	2017	2018	Satuan	Keterangan
A.	Daya Tarik Wisata					
1	Alam	20	20	25	Unit	Pantai, goa, ekosistem bakau, gumuk pasir
2	Buatan	54	59	59	Unit	Taman rekreasi air, kolam renang, taman wisata agro dan Desa Desa

No.	Jenis	2016	2017	2018	Satuan	Keterangan
						Wisata
B.	Usaha Pariwisata					
1	Hotel bintang	1	1	3	Unit	
2	Hotel non-bintang	94	117	133	Unit	
3	Restoran/rumah makan	199	225	261	Unit	
4	Jasa perjalanan wisata	25	67	67	Unit	
5	Transportasi Wisata	4	5	5	Unit	
6	Jasa hiburan dan rekreasi	22	57	63	Unit	
7	Tempat Penyelenggaraan Pertemuan, Konferensi (MICE)	2	7	16	Unit	

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, 2019

Kunjungan wisata meningkat pada lima hari besar tertentu, yaitu liburan tahun baru 2019 di obyek wisata Pantai Parangtritis; padusan 2018 di obyek wisata Pantai Parangtritis; lebaran 2018 di obyek wisata Pantai Parangtritis, obyek wisata Pantai Samas, obyek wisata Pantai Goa Cemara, obyek wisata Pantai Pandansimo, obyek wisata Pantai Kuwaru, obyek wisata Goa Cerme, dan obyek wisata Goa Selarong; malam satu sura 2018 di obyek wisata Pantai Parangtritis, obyek wisata Pantai Samas, obyek wisata Pantai Goa Cemara, obyek wisata Pantai Pandansimo, dan obyek wisata Pantai Kuwaru; dan malam tahun baru 2019 di obyek wisata Pantai Parangtritis, obyek wisata Pantai Samas, obyek wisata Pantai Goa Cemara, obyek wisata Pantai Pandansimo, dan obyek wisata Pantai Kuwaru.

Tabel 2.107 Desa Wisata di Kabupaten Bantul Tahun 2018

No.	Nama Desa Wisata	Alamat/ website	Potensi Wisata	Jenis Kategori	CP
1	Kaki Langit	Mangunan, Dlingo	Alam Perbukitan Aneka Kerajinan Kuliner tiwul dll.	berkembang	Purwoharsono 081804117711
2	Goa Gajah	Lemahbang Mangunan Dlingo	Goa Gajah	embrio	Sugimin 087839879069
3	Cempluk	Cempluk, mangunan, Dlingo	Wisata budaya& kerajinan	embrio	Suhardi 087739697151
4	Songgo Langit	Skorame, Mangunan, Dlingo	Wisata budaya& kerajinan	embrio	Lagimin 087839983308

No.	Nama Desa Wisata	Alamat/ website	Potensi Wisata	Jenis Kategori	CP
5	Banyu Nibo	Rejosari, Terong, Dlingo	Pertanian terasering Tracking Gunung api purba Air terjun	embrio	Sagiyo 081804254475 Aris 08522843669 Sukamdan 087838391333
6	Karangasem	Karangasem Munthuk	Kerajinan Bambu, alam	embrio	Karyadi 083867161718
7	Karang Tengah	Karang Tengah, Imogiri Kasiutri.com	Budidaya Ulat Sutera & Batik Pewarna alami	maju	Pargiyanto 08128003052 Sogiyanto 085867224945
8	Kebon Agung	Desa Kebon Agung, Imogiri Kebonagungimogiri.blogspot.com	Wisata Pendidikan Pertanian	maju	Bachroni 081328732113 Dalbiya 081392525751
9	Candran	Desa Kebon Agung, Imogiri Kebonagungimogiri.blogspot.com	Museum Tani Gejog lesung Nini thowog	maju	Kristyo Bintoro 085100865311 Ponijo 085643752225
10	Wukirsari	Desa Wukirsari Imogiri Desawukirsari.com	Batik Tulis Pewarna Alami	maju	Nur Ahmadi 08175475794 Agus B 0274 6557238
11	Pujungrejo	Desa Wukirsari Imogiri	Kerajinan Kulit Seni tari	embrio	Sujiono 08179108397
12	Imogiri	Desa Imogiri, Imogiri	Wisata Budaya	embrio	Surojo 087838842188
13	Wunut	Desa Sriharjo, Imogiri	Alam Budaya	embrio	Sugiyanto 087838421730
14	Krebet	Desa Sendang Sari, Pajangan Krebet.com	Kerajinan Batik Kayu	maju	Kemiskidi 0816685954, Yulianto 0818270657
15	Mangir, Ki Ageng Wonoboyo	Desa Sendangsari Pajangan	Wisata Sejarah mataram islam Reog Campursari Kuliner Gudeg manggar	embrio	Irwan Purnomo 085729810210 Muh. Irwan 08157955413
16	Guwosari Slarong	Desa Guwosari, Pajangan Guwosaricraft.com	Cagar Budaya & Kerajinan kayu Goa selarong	berkembang	Dahono 0817464977 Jumino 0274 9111498
17	Kampung Santan	Desa Guwosari, Pajangan Guwosaricraft.com	Kerajinan Tempurung Kuliner ingkung	berkembang	Zukron 086647545570 Nur taufik 085643454575
18	Kalak Ijo	Desa Guwasari, Pajangan	Kuliner ingkung, budaya	embrio	Haryanto 081227077577 Sareh 0815100204545
19	Tembi	Desa Timbulharjo, Sewon	Aneka Kerajinan	maju	Dawud Subroto 081392133205

No.	Nama Desa Wisata	Alamat/ website	Potensi Wisata	Jenis Kategori	CP
		Tembivillage.wordpress.com			
20	Kajigelem	Desa Bangunjiwo, Kasihan	wisata budaya pembuatan gerabah	berkembang	H. Suburjo Hartono, SE 0274 7475423
21	Jipangan	Jipangan, Bangunjiwo, Kasihan	Seni Budaya & kerajinan	berkembang	Darmawan 085640423376 Siyam 81328431269
22	Manding	Desa Sabdodadi, Bantul	Sentra Kerajinan Kulit	maju	Jumakir (0274) 6662191 Siti Fatimah 0274 8336586
23	Jagalan	Desa Jagalan, Banguntapan	Cagar Budaya	embrio	Bambang Winardi 085868269754
24	Kalibuntung	Desa Srihardono, Pundong Desawisatakalibuntung.com	out bond pendidikan	berkembang	Eko 081568444252 Kholis 087839098211
25	Kampung Surocolo	Desa Seloharjo, Pundong	Seni Budaya, gua jepang	embrio	Rutijo 081804271322
26	Panjangrejo	Desa Panjangrejo, Pundong	Kerajinan Gerabah	berkembang	Suparjo 081802637571
27	Puton	Desa Trimulyo, Jetis	Alam dan perikanan	berkembang	Soraya Isfandiary 081328570018
28	Trimulyo	Desa Trimulyo, Jetis	Cagar Budaya & batik sekar nitik	embrio	Emam Darmawan 081804077645
29	Kiringan	Desa Candan, Jetis	Jamu Herbal	embrio	Sudiyatmi 08179426696
30	Mangrove	Tirtoharjo Kretek	Alam, penanaman mangrove	embrio	Dwi Ratmanto 085100294460
31	Laguna Depok	Depok Parangtritis	Outbond, Kuliner sea food	embrio	Tanto 08193177723
32	Mulyodadi	Desa Mulyodadi Bambanglipuro	Kuliner, senibudaya	embrio	Sigid 081328512189
33	Lopati	Desa Trimurti, Srandakan	Kuliner	berkembang	Pairin 081392883667
34	Gilangharjo	Desa Gilangharjo Pandak	Wisata Alam Pendidikan	embrio	supriyanto 081903714747
35	Pandansari	Desa Gadingsari, Srandakan	Wisata Pantai & Buah Naga	embrio	Rohjiyanto 081804275277
36	Goa Cemara	Desa Gadingsari, Srandakan	Wisata Pantai, outbond	berkembang	Wahadi 081804197658
37	Kergan	Desa Tirtomulyo, Kretek	Wisata Pendidikan Perikanan	embrio	Sunarto
38	Ngringingan	Desa Palbapang, Bantul	Wisata Museum	embrio	Windu Hadi Kuntoro 085842856438

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, 2019

2.1.3.2.3. Pertanian

Sektor pertanian merupakan salah satu prioritas pembangunan Kabupaten Bantul. Sektor ini memiliki peran penting terhadap perekonomian Kabupaten Bantul, karena merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB.

Tujuan pembangunan pertanian sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019, adalah meningkatkan ketersediaan dan diversifikasi untuk mewujudkan kedaulatan pangan, meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pangan dan pertanian, meningkatkan ketersediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani, serta meningkatkan kualitas kinerja aparatur pemerintah bidang pertanian yang amanah dan profesional.

Dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan, Pemerintah Kabupaten Bantul telah melaksanakan pembangunan pertanian dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada, yaitu pemanfaatan teknologi pertanian, SDM pertanian dan sarana produksi. Lahan pertanian di Kabupaten Bantul sesuai untuk budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.

1) Produksi Tanaman Pangan

Pada tahun 2018 terjadi penurunan produksi padi sebesar 8.37% atau turun sebesar 2137 ton dibandingkan tahun 2017. Penurunan produksi padi tahun 2018 ini disebabkan penurunan produktivitas sebesar 1.04 %. Produksi jagung pada tahun 2018 adalah 26.086 ton sedangkan tahun 2017 adalah 24.222 sehingga bisa dikatakan produksi jagung mengalami kenaikan yaitu sebesar 7,15 % atau naik sebesar 1864 ton dibandingkan tahun 2017. Walaupun begitu, terjadi penurunan produktivitas yang disebabkan karena kekurangan air terutama masa pertumbuhan biji yang berakibat pada berkurangnya ukuran tongkol.

Pada tahun 2018 produksi kacang tanah mengalami kenaikan sebesar 14.39 % atau 512 ton dibandingkan tahun 2017. Kenaikan produksi, sebanding dengan kenaikan luas panen yaitu sebesar 17.83 % atau 282.1 ha.

Produksi kedelai, pada tahun 2018 ini juga mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2017. Kenaikan produksi kedelai mencapai 29,23 % atau 558 ton. Kenaikan ini sebanding juga dengan kenaikan luas panen sebesar 20,15 %. Selain itu, produktivitas kedelai juga mengalami peningkatan sebesar 11,87 % di tahun 2018.

Tabel 2.108. Perkembangan Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi Sawah, Padi Ladang, Jagung, Kacang Tanah dan Kedelai Tahun 2014-2018

No	Komoditas	Uraian	Tahun					Ket.
			2014	2015	2016	2017	2018*	
1	Padi Ladang	Luas Panen	30	120,00	65	45	197	ha
		Produktivitas (GKG)	45,25	57,08	35,54	35,75	45,56	ku/ha
		Produksi (GKG)	136	685,00	231	176	898	ton
		Produksi beras	86	433,92	145,99	110	575	ton
2	Padi Sawah	Luas Panen	30.160	29.642	30.009	29981	31182,3	ha
		Produktivitas (GKG)	63,90	67,18	61,05	60,85	60,06	ku/ha
		Produksi (GKG)	192.711	199.141,00	183.211	182427	187285	ton
		Produksi beras	121.793	125.857,11	116.421,35	114454,7	119899,857	ton
3	Jagung	Luas Panen	3.826	4.312,00	3.647	3283	3565,1	ha
		Produktivitas	22.671	67,10	25.394	73,78	73,17	ku/ha
		Produksi (pipilan kering)	59,26	28.933,00	69,63	24222	26086	ton
4	Kedelai	Luas Panen	1.562	1.660,00	980,4	969	1213,6	ha
		Produktivitas	2.501	16,77	1.262	13,67	15,52	ku/ha
		Produksi (wose kering)	16,01	2.784,00	12,87	1325	1883	ton
5	Kacang Tanah	Luas Panen	3.106	3.390	2501,5	2195	2586,4	ha
		Produktivitas	13,5	17,75	3.448	16,20	15,73	ku/ha
		Produksi	4.192	6061	13,78	3556	4068	ton

Sumber: Dispersipat Kabupaten Bantul, 2019

*Angka sangat sementara

2) Produksi Tanaman Hortikultura

Tanaman hortikultura terdiri dari tanaman sayuran dan buah-buahan. Tanaman sayuran yang banyak ditanam di Kabupaten Bantul antara lain bawang merah, cabai merah, dan pisang.

Tabel 2.109. Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Bawang Merah, Cabai Merah, dan Pisang Tahun 2014-2018

No.	Bawang Merah	2014	2015	2016	2017	2018*	Ket
1	Luas Panen	833	584	765	830	835	Ha
2	Produksi	8.616,4	4.501,9	7.859,40	7910,2	7979,8	Ton
3	Produktivitas	10,34	7,71	10,29	9,53	9,61	ton/ha
No.	Cabai Merah						ket
1	Luas Panen	189	469	116	366	402	Ha
2	Produksi	420,40	1.825,30	409,25	1497,6	7979,8	Ton
3	Produktivitas	2,22	3,89	3,52	4,09	4,79	Ton/ha
No.	Pisang						ket
1	Tanaman	161.900	391.409	376.235	228.310	228.310	pohon
2	Produksi	4.704	6.262,55	6.095	6095,9	5902,90	ton
3	Produktivitas	0,29	0,16	0,162	0,267	0,267	ton/pohon

Sumber: Disperpautkan Kabupaten Bantul, 2019

*Angka sangat sementara

Bawang merah mengalami peningkatan produksi sebesar 0,87% atau 69,6 ton. Kenaikan produksi ini terjadi karena terdapat peningkatan produktifitas sebesar 0,8%.

Produksi cabai merah mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu 14,54% dari 1.497,6 ton pada tahun 2017 menjadi 1.752,6 ton pada tahun 2018. Peningkatan ini disebabkan karena bantuan benih dan pupuk serta penerapan sisten tanam yang tepat

Produksi pisang mengalami penurunan yang disebabkan oleh cuaca yang tidak mendukung produksi. Pada tahun 2018 bulan kering lebih panjang dari bulan basah sehingga pohon pisang kekurangan air dan akibatnya mengganggu pertumbuhan dan pemasakan buah pohon pisang

3) Produksi Tanaman Perkebunan

Komoditas perkebunan yang menjadi andalan di Kabupaten Bantul antara lain: tembakau, mete, tebu dan kelapa. Pada tahun 2018

produksi tembakau mengalami penurunan sebesar 5% atau 151 ku, dengan penurunan produktivitas sebesar 0,14 ku/ha dibanding tahun 2017.

Produksi maupun produktivitas mete pada tahun 2018 mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2017. Produksi mete menurun sebesar 51,45 ku dikarenakan luas panen mengalami penurunan sebesar 1,3 ha.

Tabel 2.110 Produktivitas Komoditas Perkebunan Tahun 2014-2018
Kabupaten Bantul

No.	Komoditas	Uraian	Tahun					Ket.
			2014	2015	2016	2017	2018*	
1	Tembakau	Luas Panen	219	478,60	172,00	316,00	305,00	ha
		Produksi	2.068,5	4.740,20	1.023,50	3.044	2.893,00	ku (rajang kering)
		Produktivitas	9,45	9,91	5,95	9,63	9,49	ku/ha (rajang kering)
3	Mete	Luas Panen	474	252,40	112,70	119,80	118,50	ha
		Produksi	6,56	174,95	34,29	134,40	82,95	ku (glondong krg)
		Produktivitas	0,01	0,69	0,30	0,76	0,70	ku/ha (glondong krg)
4	Tebu	Luas Panen	1.425,93	1333,66	1.174,32	1.207,69	1.022,89	ha
		Produksi	47.349,8	50.392,65	41.021,95	29.186,75	38.430,00	ku (hablur)
		Produktivitas	33,21	37,79	34,93	26,76	37,57	ku/ha (hablur)
5	Kelapa	Luas Panen	7.026,01	7.039,65	7.064,07	10.464,73	7.050,03	ha
		Produksi	88.925,89	89.456,53	91.342,50	112.677	103.931,80	ku (kopra)
		Produktivitas	12,66	12,71	12,93	15,87	14,74	ku/ha (kopra)

Sumber: Disperpautkan Kabupaten Bantul, 2019

*Angka sangat sementara

Produksi tebu tahun 2018 meningkat 24,05% atau 9.243,25 ku dibanding tahun 2017. Hal ini disebabkan cuaca kemarau yang lebih panjang dimana tanaman tebu membutuhkan sinar matahari selama masa tumbuh dan pemasakannya selain itu adanya dukungan program

rawat ratoon yang intensif yaitu pemeliharaan tanaman tebu keprasan yang meningkatkan rendemen tebu. Produksi kelapa juga mengalami penurunan sebanyak 8.745,2 ku. Hal ini disebabkan turunnya luas panen sebesar 3.414,7 ha.

4) Produksi Komoditas Peternakan

Produksi komoditas peternakan daging terdiri dari daging sapi, kuda, kambing/domba, ayam, dan itik. Produksi telur terdiri dari telur ayam buras, ayam ras petelur, dan itik, sedangkan produksi susu berasal dari sapi perah seperti terlihat pada Tabel 2.111.

Tabel 2.111. Produksi Komoditas Peternakan Tahun 2014-2018
Kabupaten Bantul

No.	Komoditas	2014	2015	2016	2017	2018
1	Daging (kg)	12.911.302	14.142.366	14.742.551	14.751.000	14.855.725
2	Telur (kg)	7.045.296	7.572.329	8.072.166	7.184.368	7.329.945
3	Susu (kg)	252.780	304.662	365.127	184.777	102.484

Sumber: Diperpautkan Kabupaten Bantul, 2019

Pada tahun 2018 terjadi kenaikan produksi daging sebanyak 104.725 kg dibanding produksi daging pada tahun 2017. Kenaikan produksi daging tersebut dipengaruhi oleh kenaikan kebutuhan daging di wilayah Kabupaten Bantul.

Produksi susu dan telur mengalami penurunan masing-masing sebesar 11,64% dan 51,24%. Penurunan produksi telur dipengaruhi oleh turunnya populasi ayam buras, ayam ras petelur dan itik. Sedangkan penurunan produksi susu dipengaruhi oleh penurunan populasi sapi perah.

Salah satu cakupan pertanian dalam arti luas adalah peternakan. Peternakan di Kabupaten Bantul memiliki potensi yang cukup besar meliputi ternak besar, ternak kecil, dan unggas.

Tabel 2.112. Populasi Ternak Besar Tahun 2016-2018

No.	Jenis ternak	2016	2017*	2018	Ket.
1	Sapi Potong	56.799	56.139	58.895	Ekor
2	Sapi Perah	284	80	72	Ekor
3	Kerbau	544	248	206	Ekor
4	Kuda	1.977	1.258	1564	Ekor

Sumber: Diperpautkan Kabupaten Bantul, 2019

Populasi sapi potong tahun 2018 mengalami kenaikan 0,035% atau sebanyak 1.991 ekor dibanding tahun 2017. Sapi perah juga mengalami penurunan populasi sebanyak 10%. Peningkatan jumlah populasi sapi potong tidak terlepas dari keberhasilan program UPSUS SIWAB (upaya khusus sapi indukan wajib bunting) yang ada di tahun 2017.

Populasi ternak kecil di Kabupaten Bantul didominasi oleh ternak kambing. Pada tahun 2018 juga terjadi peningkatan populasi ternak kecil. Data populasi ternak kecil disajikan pada Tabel 2.113.

Tabel 2.113. Populasi Ternak Kecil Tahun 2016-2018

No.	Jenis ternak	2016	2017	2018	Ket.
1	Babi	5.329	3.544	5.024	Ekor
2	Kambing	108.199	87.195	94.332	Ekor
3	Domba	83.790	74.955	77.197	Ekor

Sumber: Diperpautkan Kabupaten Bantul, 2019

Sementara untuk populasi ternak unggas didominasi oleh ayam ras pedaging. Pada tahun 2018 terjadi kenaikan populasi unggas sebagaimana terlihat pada Tabel 2.114.

Tabel 2.114. Populasi Ternak Unggas Tahun 2016-2018

No.	Unggas	2016	2017	2018	Ket.
1	Ayam buras	1.019.461	792.862	829.916	Ekor
2	Ayam ras petelur	821.587	712.307	759.199	Ekor
3	Ayam ras pedaging	1.068.221	841.103	1.093.222	Ekor
4	Itik	222.265	163.528	184.978	Ekor

Sumber: Diperpautkan Kabupaten Bantul, 2019

Pada tahun 2018 terjadi kenaikan produksi daging dan telur dari tahun 2017. Kenaikan produksi daging tersebut dipengaruhi oleh kenaikan kebutuhan daging di wilayah Kabupaten Bantul

5) Penanganan Penyakit Ternak

Penanganan kasus penyakit ternak tahun 2018 oleh UPT Puskesmas sebanyak 10.374 kasus meningkat dari tahun 2017 sebesar 6.669 kasus, dari penanganan kasus tersebut dapat diketahui bahwa di Kabupaten Bantul terdapat tiga kasus penyakit terbanyak yang secara berurutan disebabkan oleh cacing (Helminthosis), Avitaminosis, dan Scabies

UPT Rumah Pemotongan Hewan (RPH) merupakan Unit pelayanan masyarakat dalam menyediakan daging yang aman, sehat, utuh dan halal. Pada tahun 2018, UPT RPH mampu memberikan pelayanan pemotongan dengan jumlah pemotongan sebanyak 2.824 ekor.

2.1.3.2.4. Kehutanan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, urusan kehutanan sudah bukan merupakan wewenang pemerintah daerah kabupaten lagi, tetapi ditarik ke pemerintah daerah provinsi. Kewenangan kab/kota dalam urusan kehutanan berupa pelaksanaan pengelolaan taman hutan raya (TAHURA) kab/kota. Kabupaten Bantul tidak memiliki TAHURA sehingga urusan kehutanan tidak dilaksanakan di kabupaten Bantul.

2.1.3.2.5. Energi dan Sumber Daya Mineral

Kewenangan urusan ESDM oleh Kabupaten ini sangat terbatas, khususnya terkait Sumber Daya Energi dan kebutuhan energi secara umum. Dalam upaya menggali potensi sumber daya mineral di Kabupaten Bantul belum dapat untuk mencukupi kebutuhan masyarakat Bantul. Upaya yang telah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan energi adalah dengan melakukan kajian. Kajian Geothermal di Parang Wedang, Kretek menunjukkan bahwa energi panas bumi di Parangwedang belum dapat dijadikan alternatif energi dikarenakan standar panas minimal energi panas bumi seharusnya 90°C

sedangkan panas bumi di Parangwedang adalah 40°C. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan beberapa kajian sebagai langkah awal ketercukupan kebutuhan energi di Kabupaten Bantul.

2.1.3.2.6. Perdagangan

1) Pasar Tradisional

Potensi perdagangan di Kabupaten Bantul diprioritaskan pada pengembangan pasar tradisional. Terhitung sejak disahkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, maka pasar tradisional telah berubah penyebutannya menjadi Pasar Rakyat, dengan tetap memperhatikan kekhususan pasar rakyat terkait aspek lokasi yang bersifat tetap berupa toko/kios/los dan bentuk lainnya serta menjadi tempat jual beli dengan proses tawar menawar.

Sebagai bagian dalam urat nadi perekonomian nasional, peran pasar rakyat/tradisional sangatlah signifikan untuk menjalankan berbagai fungsinya, antara lain: memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah; meningkatkan kesempatan kerja; menyediakan sarana berjualan, terutama bagi pelaku usaha UMKM; menjadi referensi harga bahan pokok yang mendasari perhitungan tingkat inflasi dan indikator kestabilan harga; meningkatkan PAD; dan sebagai salah satu sarana pelestarian budaya setempat. Sampai dengan akhir tahun 2018 di Kabupaten Bantul terdapat 26 pasar yang kondisinya sudah baik dan cukup baik, data tersebut disajikan pada Tabel 2.115.

Selain itu, Pasar Imogiri lolos mendapatkan sertifikat pasar ber SNI dari Badan Standarisasi Nasional. Standarisasi tersebut tertuang dalam SNI 8152:2015, dimana SNI tersebut mengatur tentang persyaratan umum, teknis, dan pengelolaan yang harus dipenuhi oleh pasar rakyat.

Tabel 2.115. Data Kondisi Pasar Tahun 2018 Di Kabupaten Bantul

No.	Nama Pasar	Luas Tanah (m2)	Kepemilikan	Jumlah Pedagang Kios + Los + Arah
1	Pasar Bantul	23.714	Pemda	1.753
2	Pasar Niten	32.635	Kas Desa	894
3	Pasar Imogiri	4.832.000	Kas Desa	1.587
4	Pasar Piyungan	23.500	Pemda	1.092
5	Pasar Sorobayan	18.000	Kas Desa	363
6	Pasar Pijenan	15.000	Pemda	239
7	Pasar Sungapan	967	SG	134
8	Pasar Semampir	2.890	SG	353
9	Pasar Celep	1.409	SG	206
10	Pasar Jodog	7.350	Pemda	281
11	Pasar Angruksari	20.035	Kas desa	581
12	Pasar Gatak	3.587	Pemda	215
13	Pasar Barongan	10.345	Kas desa	305
14	Pasar Dlingo	45.000	Pemda	242
15	Pasar Pleret	6.150	SG	688
16	Pasar Ngipik	5.000	Pemda	165
17	Pasar Panasas	4.235	Kas desa	248
18	Pasar Klithikan Niten	4.000	Kas desa	163
19	Pasar Seni Gabusan	45.000	Kas desa	58
20	Pasar Hewan Imogiri	8.000	Kas desa	-
21	Pasar Hewan Pandak	1.888	Kas desa	23
22	Pasar Janten	1.000	pemda	52
23	Pasar Jragan	573	SG	69
24	Pasar Koripan	532	SG	68
25	Pasar Grogol	819	SG	27
26	Pasar Bendosari	2.050	SG	19

Sumber: Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul, 2019

2) Ekspor Bersih Perdagangan

Pembangunan perdagangan di Kabupaten Bantul juga diarahkan pada peningkatan perdagangan internasional melalui pengembangan kegiatan ekspor. Perdagangan internasional Kabupaten Bantul menyumbang nilai tambah yang cukup besar bagi perekonomian Bantul. Hal ini dibuktikan dengan menggeliatnya kegiatan ekspor ke luar negeri. Pada tahun 2018, kegiatan ekspor di Kabupaten Bantul mengalami peningkatan baik dari segi nilai, volume maupun macam komoditas. Hal ini disebabkan antara lain melalui upaya pembukaan peluang pasar negara tujuan baru, peningkatan daya saing produk dan intensifikasi promosi melalui keikutsertaan Pemerintah Kabupaten

Bantul secara berkala dalam berbagai kegiatan pameran dagang. Perkembangan nilai ekspor di Kabupaten Bantul tahun 2014-2018 disajikan pada Tabel 2.116.

Tabel 2.116. Perkembangan Ekspor
di Kabupaten Bantul Tahun 2014-2018

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Volume Ekspor (kg)	7.689.301,62	7.871.678,60	9.642.793.219,00	10.168.084,05	15.828.755,06
2	Nilai Ekspor (US\$)	59.771.562,69	66.626.177,34	73.971.386.116,80	79.200.365,59	206.555.464,00
3	Jumlah Negara	43	43	42	44	45
4	Macam Komoditi	35	36	36	36	43

Sumber: Dinas Perdagangan, data diolah, 2019

Kondisi kinerja nilai ekspor pada tahun 2018 adalah sebesar 206.555.464 US\$, mengalami kenaikan dibanding tahun 2017. Peningkatan ekspor didukung oleh komoditi ekspor unggulan seperti tekstil, furniture, dan handycraft, sedangkan negara tujuan ekspor utama adalah Australia, USA, Jepang, Perancis, Hongkong, Rusia, Italia, dan Singapura.

Tahun 2018, kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB tahun 2014-2018 disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.117. Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan
di Kabupaten Bantul Tahun 2014-2018
(dalam juta rupiah)

No	Tahun	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
1.	2014	1,473,263
2.	2015	1,585,613
3.	2016	1,770,132
4.	2017	2,034,326
5.	2018	2,105,430

Sumber: Dinas Perdagangan, 2019

2.1.3.2.7. Perindustrian

Sektor industri pengolahan merupakan penyumbang kontribusi terbesar kedua terhadap perekonomian Kabupaten Bantul setelah sektor pertanian. Kegiatan pembangunan industri di Kabupaten Bantul diarahkan pada peningkatan aktivitas dan daya saing industri kecil menengah. Lokasi dan jenis industri yang tersebar di Kabupaten Bantul cukup bervariasi. Jenis industri yang ada meliputi industri logam mesin, industri kimia, aneka industri, industri hasil pertanian, dan kehutanan. Pertumbuhan Industri di Kabupaten Bantul tahun 2015-2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.118. Pertumbuhan Industri

No	Sektor Industri	2015		2016		2017		2018	
		Jumlah Unit Usaha	Tenaga Kerja	Jumlah Unit Usaha	Tenaga Kerja	Jumlah Unit Usaha	Tenaga Kerja	Jumlah Unit Usaha	Tenaga Kerja
1.	Pangan	8.290	27.480	8.754	29.019	9.095	29.783	9.320	30.785
2.	Sandang dan Kulit	854	6.719	902	7.095	921	7.449	1.085	8.175
3.	Kerajinan Umum	7.143	24.772	7.543	26.159	7.912	28.623	8.240	30.074
4.	Kimia dan Bahan Bangunan	3.101	28.246	3.275	29.828	3.286	29.991	3.301	30.057
5.	Logam dan Jasa	1.035	2.900	1.093	3.062	1.096	3.162	1.143	3.373
Jumlah		20.423	90.117	21.567	95.164	22.310	99.008	23.089	102.464

Sumber data : Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian 2019

Sektor industri merupakan salah satu sektor utama pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bantul khususnya Industri Kecil Menengah (IKM). Industri kecil dan Menengah (IKM) memegang peranan penting bagi perekonomian Indonesia, karena sektor ini dapat mengatasi permasalahan pemerataan dalam distribusi pendapatan antar wilayah. Selain itu IKM terbukti mampu bertahan dan terus berkembang di tengah krisis, karena pada umumnya sektor ini masih memanfaatkan sumberdaya lokal, baik itu untuk sumberdaya

manusia, modal, bahan baku, hingga peralatan, artinya sebagian besar kebutuhan IKM tidak mengandalkan barang impor.

Potensi IKM di Kabupaten Bantul sebanyak 75 sentra lokasi IKM dengan jumlah pengrajin 22.645 IKM, tenaga kerja 99.920 orang, dan mampu memberikan kontribusi PDRB sebesar 15,17%. Adapun laju pertumbuhan industri di Kabupaten Bantul sebesar 3,47 %.

Ada 16 sub sektor yang termasuk industri kreatif yaitu aplikasi pengembangan game; arsitektur; desain interior; desain komunikasi visual; desain produk; fesyen; film, animasi dan video, fotografi; kriya; kuliner; musik; penerbitan; periklanan; seni pertunjukan; seni rupa; televisi dan radio. Cakupan Industri Kreatif di Kabupaten Bantul pada tahun 2018 sebesar 42,90% meningkat dari tahun 2017 sebesar 41,11%.

Upaya untuk meningkatkan peran sektor perindustrian, Kabupaten Bantul telah mengembangkan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) potensial di wilayah Kecamatan Piyungan, Sedayu dan Pajangan. Upaya ini telah dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, baik Perangkat Daerah, Asosiasi Industri maupun stakeholder lain untuk mendapatkan hasil yang optimal. Berdasarkan penilaian pada tahun 2018 program KPI masih memerlukan strategi, program dan kegiatan yang lebih efektif dengan dukungan penuh seluruh pemangku kepentingan agar menjadi kawasan industri yang ideal.

Menurut Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF) Ada 16 Sub sektor yang termasuk industri kreatif yaitu : aplikasi pengembangan game; arsitektur; desain interior; desain komunikasi visual; desain produk; fesyen; film, animasi dan video, fotografi; kriya; kuliner; musik; penerbitan; periklanan; seni pertunjukan; seni rupa; televisi dan radio. Apabila sub sektor industri kreatif tersebut dapat dikembangkan melalui Program Produk Andalan Setempat (PAS) yang menjadi kebijakan prioritas kabupaten, pelaku usaha IKM pasti akan berkembang sesuai kebutuhan pasar.

Adapun Capaian Cakupan Industri Kreatif di Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut :

Tabel 2.119. Cakupan Industri Kreatif di Kabupaten Bantul

No.	Tahun	Capaian Cakupan Industri Kreatif
1.	2016	39,50 %
2.	2017	41,11%
3.	2018	42.90%

Sumber data: Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian, 2019

2.1.3.2.8. Transmigrasi

Penyelenggaraan urusan Transmigrasi sebagai suatu pendekatan untuk mencapai tujuan kesejahteraan, pemerataan pembangunan daerah, serta perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Pelaksanaan transmigrasi di Kabupaten Bantul sampai saat ini masih tergantung pada kuota dari Pemerintah Pusat. Perkembangan yang terjadi sekarang justru semakin menurunnya kuota/jatah transmigran dari tahun ke tahun. Hal ini berbanding terbalik dengan jumlah animo, minat, serta pendaftar calon transmigran yang cukup besar. Penempatan transmigran dari tahun 2014-2018 ditampilkan pada Tabel berikut:

Tabel 2.120. Jumlah Transmigran Kabupaten Bantul Tahun 2014-2018

Tahun	Jumlah (KK)	Jumlah Jiwa
2014	23	73
2015	40	131
2016	50	150
2017	12	38
2018	28	94

Sumber: Disnakertrans Kabupaten Bantul, 2019

Jumlah KK transmigran pada tahun 2018 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2017. Dalam kurun waktu 2014-2018,

jumlah KK transmigran tertinggi pada tahun 2016 sebanyak 50 KK dan 150 jiwa.

2.1.3.3. Fokus Penunjang Urusan Pemerintahan

2.1.3.3.1. Sekretariat Daerah

Fungsi perumusan kebijakan merupakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah. Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif. Setda Kabupaten Bantul terdiri atas 10 Bagian.

2.1.3.3.2. Sekretariat DPRD

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan perwakilan yang telah diberi mandat oleh rakyat dalam urusan pemerintahan. DPRD merupakan mitra Kepala Daerah yang berkedudukan sama tetapi mempunyai fungsi yang berbeda. Dalam melaksanakan fungsinya DPRD di bantu oleh Sekretariat DPRD. Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD dalam melaksanakan hak, tugas dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

2.1.3.3.3. Inspektorat

Salah satu fungsi penunjang pemerintahan adalah pengawasan. Fungsi ini lebih dititikberatkan pada tindakan konsultatif dan preventif agar pelaksanaan pembangunan daerah berada di jalur yang benar.

Kebijakan pengawasan Pemerintah Kabupaten Bantul merupakan salah satu bentuk dan tekad untuk mendukung cita-cita reformasi yaitu untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang

bersih dan berwibawa sebagai konsekuensi untuk menciptakan kabupaten yang baik, efektif, efisien, dan bebas dari KKN. Kebijakan tersebut diambil oleh manajemen (instansi atau pejabat yang mempunyai kewenangan mengambil keputusan di bidang pengawasan) dan dijadikan sebagai pedoman bagi seluruh anggota organisasi APIP dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasannya.

Inspektorat Kabupaten Bantul sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran dan fungsi melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintahan yang diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007. Inspektorat provinsi dan kabupaten/kota mempunyai fungsi sebagai perencanaan program pengawasan; perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan; pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian pengawasan.

Auditor adalah pelaksana pengawasan yang mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan pengawasan intern pada instansi pemerintah dan memberikan rekomendasi berdasarkan temuan-temuan pemeriksaan yang disajikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Manfaat pengawasan internal melalui pemeriksaan auditor tidak hanya berupa banyaknya temuan yang dilaporkan, namun juga berupa efektivitas tindak lanjut oleh auditor. Pengawasan internal akan menjadi sia-sia tanpa tindakan perbaikan dalam penyelesaian tindak lanjut sehingga tujuan pengawasan tidak tercapai, yakni peningkatan kinerja bagi organisasi dan akan menimbulkan ketidakpercayaan publik.

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) dalam lingkup pemerintah daerah di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2009 tentang

Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 89 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Tuntutan kepatuhan terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan auditor atau APIP di Indonesia dalam peraturan tersebut di atas, secara hukum mengisyaratkan kewajiban untuk penyelesaiannya. Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari suatu rangkaian pengawasan yang meliputi: perencanaan pengawasan, proses pengawasan, laporan hasil pengawasan sampai dengan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2016 tentang Formasi dan hasil Analisis Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, pada tahun 2018 masih terdapat kekurangan tenaga Aparatur Pengawasan sejumlah 38 personil. Kondisi jumlah tenaga Aparatur Pengawasan dan rincian kebutuhannya terdapat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.121 Kondisi Jumlah Aparatur Pengawasan di Kabupaten Bantul Tahun 2018

No	Jenis Jabatan	Jumlah	Kebutuhan	Kekurangan
1	Struktural			
	Inspektur	1	1	
	Sekretaris	1	1	
	Inspektur Pembantu	4	4	
	Kasubag	3	3	
2	Fungsional Tertentu			
	Auditor	21	36	15
	P2UPD	6	20	14
	Auditor Kepegawaian	-	4	4
3	Fungsional Umum	14	19	5
	Jumlah	50	88	38

Sumber: Inspektorat Kabupaten Bantul 2019

Berdasarkan hasil Audit Kinerja BPK terhadap Inspektorat Kabupaten Bantul tahun 2013 yang mendasarkan jumlah perhitungan formasi pada Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-971/K/SU/2005 tentang Pedoman Perhitungan Formasi Auditor pada Aparat Pengawas Internal Pemerintah, maka jumlah total auditor Inspektorat Kabupaten Bantul adalah 94 personil sedangkan kondisi saat ini berjumlah 21 personil sehingga ada kekurangan 73 personil. Terkait dengan kompetensi tenaga fungsional Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul telah melakukan pemetaan kompetensi terhadap pejabat fungsional yang ada. Kebutuhan kompetensi yang di butuhkan berdasarkan sasaran audit sejumlah 24 kompetensi yang harus didukung dengan 3 jenis diklat fungsional dan 21 jenis diklat substantif. Untuk 3 jenis diklat fungsional (JFT Pertama, JFT Muda, JFA Madya) 27 personil pejabat fungsional telah mengikuti semua, sedangkan untuk 21 jenis diklat substantif belum merata diikuti oleh pejabat fungsional dan dilakukan secara bertahap.

2.1.3.3.4. Perencanaan

Penyusunan rencana pembangunan Kabupaten Bantul didasarkan pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya diturunkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dalam hal perencanaan, ketersediaan dan akurasi data tetap menjadi perhatian, di samping itu sejumlah studi dilakukan untuk menjadi pedoman arah pembangunan ke depan. Untuk sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan maka koordinasi dengan pemerintah DIY dan Pusat juga dilaksanakan.

Tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang semakin berkualitas dan kompetitif baik dalam aspek pelayanan publik dan akuntabilitas berbasis kinerja dan transparan memberi dampak terhadap penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang baik dan tepat dengan melibatkan seluruh *stakeholder* pembangunan secara

komprehensif. Pengintegrasian perencanaan daerah dengan pengelolaan keuangan sampai dengan monev dan evaluasi kinerja dalam penerapan *E-Government* menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas tersebut.

2.1.3.3.5. Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan mengingat perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah, timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud merupakan sub-sistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan daerah tersebut bertumpu pada upaya peningkatan efisiensi, efektifitas, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan publik baik dari sisi pendapatan maupun belanja.

Selain kedua undang-undang tersebut, terdapat peraturan perundang-undangan lain yang menjadi acuan pengelolaan keuangan daerah, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintahan Daerah.

Sumber-sumber keuangan yang menjadi pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan/dana transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dana perimbangan/dana transfer merupakan sumber pendapatan daerah yang bersumber dari transfer dana dari pemerintah atasan (APBN dan APBD DIY) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, bagi hasil pajak daerah, dan bantuan keuangan. Dana perimbangan/dana transfer selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah. Ketiga komponen dana perimbangan ini merupakan bagian dari transfer ke daerah dari Pemerintah Pusat serta merupakan satu kesatuan yang utuh.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan selain untuk mempercepat realisasi visi dan misi daerah juga untuk mengatasi berbagai permasalahan pokok seperti penanganan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja, perbaikan mutu pelayanan publik utamanya pelayanan dasar, peningkatan produktivitas sektor dominan yang mempengaruhi PDRB, dan perluasan daya saing investasi.

Untuk mewujudkan kebijakan tersebut perlu didukung kebijakan penajaman APBD yang sesuai visi dan misi daerah melalui efektifitas

dan efisiensi belanja daerah dan upaya peningkatan pendapatan daerah yang tetap mendukung iklim investasi daerah serta adanya komitmen seluruh elemen pengelola keuangan daerah, sehingga tercipta pengelolaan keuangan yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Beberapa upaya strategis untuk mendukung terwujudnya *good governance* dalam pengelolaan keuangan dan barang daerah yang profesional, terbuka, dan bertanggung jawab, ditempuh dengan:

1. Mempedomani kebijakan pemerintah dalam pengelolaan keuangan dan barang daerah;
2. Mengupayakan aplikasi sistem informasi pengelolaan keuangan dan barang daerah yang terintegrasi dengan menjalin kerjasama dengan Perwakilan BPKP Pemda DIY untuk mengadakan asistensi penerapan manajemen pengelolaan keuangan dan barang daerah yang transparan dan akuntabel melalui implementasi aplikasi Sepaka@t dan Simda BMD;
3. Menjalinkan kerjasama dengan perwakilan BPKP Pemda DIY untuk asistensi penerapan manajemen pengelolaan keuangan daerah melalui pendampingan atau *coaching clinic* penyusunan neraca SKPD dan pengelolaan keuangan BLUD Puskesmas;
4. Mengikuti Diklat teknis dan *workshop* mengenai pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah, perkembangan peraturan pengelolaan keuangan dan barang daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun lembaga keuangan lainnya;
5. Mengupayakan adanya informasi sedini mungkin dari pemerintah pusat agar prediksi pendapatan daerah, khususnya dana perimbangan, dalam APBD semakin realistis;
6. Melaksanakan sistem informasi pengelolaan pajak daerah yang terintegrasi melalui Simpada;

7. Meningkatkan koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penghasil dalam upaya tercapainya target pendapatan asli daerah yang diampu oleh masing-masing SKPD penghasil dan mengevaluasi atas kinerja pendapatan asli daerah;
8. Meningkatkan koordinasi antar SKPD untuk memonitor dan melaporkan pengelolaan keuangan dan barang daerah yang menjadi tanggung-jawabnya;
9. Penyebarluasan informasi pendapatan, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan aset daerah melalui media masa, media *online*, *leaflet*, dan lain-lain;
10. Menambah dan merevisi *Standard Operating Procedure* (SOP) pajak daerah, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan aset daerah berdasarkan peraturan yang berlaku;
11. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas melalui pembentukan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD);
12. Melaksanakan tata kelola keuangan berbasis akrual agar dapat menyajikan laporan keuangan lebih transparan dan akuntabel.

2.1.3.3.6. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah kepegawaian dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul dengan kedudukan sebagai pendukung atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Kepegawaian serta perumusan kebijakan teknis kepegawaian.

Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2016. Badan

Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan sebagai salah satu organisasi perangkat daerah, dipimpin oleh kepala badan, yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretaris dan kepala bidang.

Pegawai Negeri Sipil di Wilayah Kabupaten Bantul terdiri dari Pegawai Otonomi Daerah dan Pegawai Vertikal. Pegawai Otonomi Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 berjumlah 8.403 orang terdiri dari 3.353 laki-laki dan 5.048 perempuan. Jumlah ini menurun dibandingkan tahun 2017 ada 8.584 orang pegawai terdiri dari 3.658 orang laki-laki dan 4.926 orang perempuan. Hal tersebut disebabkan banyak pegawai yang pensiun. Jumlah Pegawai Otonomi Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017-2018 menurut golongan, disajikan pada Tabel 2.122.

Tabel 2.122 Kondisi Jumlah Pegawai
di Kabupaten Bantul Tahun 2017-2018

No	Golongan	2017	2018
1.	Golongan I	108	97
2.	Golongan II	1.170	1.180
3.	Golongan III	3.754	4.332
4.	Golongan IV	4.463	2.894

Sumber : Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, 2019

2.1.3.3.7. Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan pengembangan atau Litbang adalah kegiatan penelitian dan pengembangan yang memiliki kepentingan komersial dalam kaitannya dengan riset ilmiah murni dan pengembangan aplikatif di bidang teknologi. Litbang ini memegang peranan penting dan menjadi indikator kemajuan dari suatu organisasi.

Aktivitas Litbang biasanya dilakukan oleh suatu unit, lembaga, atau pusat khusus yang dimiliki oleh sebuah organisasi, perusahaan, perguruan tinggi, atau lembaga negara. Dalam konteks bisnis,

"penelitian dan pengembangan" biasanya merujuk pada aktivitas yang berorientasi ke masa yang akan datang dan untuk jangka panjang, baik dalam bidang ilmu maupun dalam bidang teknologi. Metode yang dipakai dalam kegiatan Litbang biasanya menggunakan teknik riset ilmiah yang standar tanpa mengharapkan hasil yang pasti (bentuk riset ilmiah murni) atau untuk mendapatkan prakiraan hasil yang mempunyai nilai komersial dalam waktu dekat. Bentuk riset (penelitian) yang murni biasanya dihasilkan oleh lembaga penelitian seperti Batan, LIPI, Lapan, dan lain-lain. Sementara bentuk pengembangan dari hasil riset yang bersifat praktis bisa dilakukan oleh BPPT dan Pusat Litbang yang ada di masing-masing departemen pemerintah maupun perusahaan.

Di Kabupaten Bantul, fungsi penunjang penelitian dan pengembangan mencakup berbagai macam program yang memiliki ciri adanya unsur peningkatan dan berorientasi ke masa depan. Peningkatan yang dimaksud bukan hanya dari sisi perangkat keras saja tetapi terutama sekali yang bersifat peningkatan kemampuan, pemberdayaan, dan pembinaan bagi sumber daya manusia.

Peningkatan daya saing antar daerah merupakan agenda yang sangat penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, inovasi dalam pembangunan yang berjalan secara komprehensif serta terjadinya kolaborasi antar aktor pembangunan merupakan faktor kunci peningkatan daya saing.

Pemerintah Kabupaten Bantul senantiasa memotivasi dan mendorong aparat pemerintah, masyarakat, swasta, dan seluruh *stakeholders* untuk bersama-sama mengembangkan kreativitas dan inovasi serta lebih memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek). Inovasi sebagai cara untuk menerapkan Iptek yang telah ada disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan diupayakan selalu menjadi *mindset* semua elemen, sedangkan Sistem Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat SIDA adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga Litbang, lembaga

pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah.

Dalam melaksanakan pengembangan inovasi daerah, Pemerintah Kabupaten Bantul senantiasa menjalin kerjasama dengan daerah lain, pemerintah propinsi maupun pemerintah pusat, swasta, perguruan tinggi, lembaga riset, dan masyarakat, dengan senantiasa mengacu pada kondisi kultural/budaya Bantul agar terjadi kolaborasi/sinergitas sehingga menjadi sebuah sistem inovasi daerah yang saling terkait dan berkelanjutan.

Tahun 2018 merupakan tahun ketiga *Roadmap* SIDA diarahkan untuk sinergitas pengembangan tanaman pewarna alami batik tulis; pelatihan penanaman, penanganan pasca panen, pembuatan pasta pewarna; pendampingan pelatihan; budidaya tanaman pewarna batik alami; dan sosialisasi penggunaan pewarna batik alami.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah melibatkan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta dalam mengawali pengembangan indigofera sebagai tanaman pewarna batik alami, dan memberi pendampingan berupa *workshop* terkait (a) budidaya tanaman pewarna alami batik (tanaman indigofera) dan (b) proses pembuatan pasta pewarna batik hingga proses pewarnaan batik menggunakan pasta indigofera.

Selain Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Bantul menjalin kerjasama dengan Balai Besar Kerajinan dan Batik Kementerian Perindustrian RI. Kerja sama ini tentang pengembangan industri dan kerajinan batik di Kabupaten Bantul dengan ruang lingkup penelitian dan pengembangan teknologi di bidang kerajinan batik, penerapan hasil penelitian dan pengembangan dan rekayasa teknologi, pengembangan desain produk kerajinan dan batik, pelatihan teknis, penyediaan instruktur dan tenaga ahli, pemberian informasi dan layanan konsultasi, supervisi untuk mengembangkan IKM kerajinan dan batik di Kabupaten Bantul.

Kementerian Desa saat ini sedang giat membentuk Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) di tingkat kecamatan dan Kementerian Ristek

Dikti telah mencanangkan 1000 desa inovasi di tahun 2014. Di Kabupaten Bantul telah dibentuk Posyantek di 13 kecamatan yaitu: Bantul, Srandakan, Sanden, Pundong, Bambanglipuro, Pandak, Imogiri, Dlingo, Pleret, Banguntapan, Sewon, Kasihan, dan Sedayu. Selain itu, telah dilakukan kegiatan sosialisasi desa inovasi dan inovasi desa di 17 kecamatan.

Pengabdian kepada masyarakat memberi manfaat kepada pemerintah daerah dan masyarakat antara lain: a) mendapatkan bantuan pemikiran dan tenaga dalam pemecahan masalah pembangunan daerah/lokasi, b) dikenalkannya pola pikir dalam merencanakan, merumuskan, melaksanakan berbagai program pembangunan, khususnya di pedesaan, c) tumbuhnya dorongan potensi dan inovasi di kalangan anggota masyarakat setempat dalam upaya pemenuhan kebutuhan lewat pemanfaatan ilmu dan pengetahuan. Terkait pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi (bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat), telah dilaksanakan di Kabupaten Bantul, sepaert terdapat pada tabel 2.123

Tabel 2.123. Jumlah Penelitian/Survey dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2018

No.	Uraian	2016	2017	2018
1	Penelitian/Validitas/Survey oleh:			
	- Perguruan Tinggi	4.381	3.463	3.310
	- Lembaga Survey	142	39	16
2	Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat:			
	- Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktek Kerja Lapangan (PKL)	258	281	318
	Jumlah	4.781	3.783	3.644

Sumber: Bappeda Kabupaten Bantul, 2019

2.1.3.3.8. Penunjang Pemerintahan Umum

Fungsi penunjang pemerintahan umum merupakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh kecamatan. Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang

berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat adalah pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diangkat oleh Bupati.

Camat mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di Kecamatan;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan;
9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Camat dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan.

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

2.1.4.1.1. Kemampuan Ekonomi Daerah

2.1.4.1.1.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita

Pola pengeluaran konsumsi rumah tangga dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Selain itu, pola pengeluaran dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, dimana semakin rendah

persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran maka semakin baik tingkat perekonomian penduduk. Pada kondisi pendapatan terbatas, pemenuhan kebutuhan makanan akan menjadi prioritas utama, sehingga pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah akan terlihat bahwa sebagian besar pendapatannya digunakan untuk membeli makanan.

Persentase pengeluaran konsumsi rumah tangga di Kabupaten Bantul dikelompokkan menjadi pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, persentase pengeluaran untuk kelompok non makanan cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2016, persentase pengeluaran non makanan penduduk Bantul lebih dominan dibandingkan pengeluaran makanan. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat perekonomian penduduk di Kabupaten Bantul semakin baik.

Tabel 2.124 Persentase Pengeluaran Konsumsi
di Kabupaten Bantul Tahun 2012-2016

No.	Jenis Pengeluaran Konsumsi	2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)	2015 (%)	2016 (%)	2017 (%)
1	Non Makanan	55.05	53.31	52.80	55.85	58.44	56.94
2	Makanan	44,95	46,69	47,20	44,15	41,56	43,06

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2019

2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

2.1.4.2.1. Penyediaan Air Minum

Penyediaan dan Pengelolaan Air minum dilaksanakan bekerjasama dengan PDAM Kabupaten Bantul bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Bantul. Dalam rangka penanganan di lokasi rawan kekeringan dan belum terjangkau jaringan PDAM, selama lima tahun terakhir telah dibangun Hidran Umum (HU), pembangunan Sistem Instalasi Perpipa-an Air Sederhana (SIPAS). Selain itu, untuk mendukung kawasan siap bangun/lingkungan siap bangun (Kasiba/Lisiba) Bantul Kota Mandiri dibangun Sistem Pengolahan Air Minum (SPAM) di IKK Pajangan. Sumber air minum sebagian besar

berasal dari air tanah, baik air tanah dangkal yang berupa sumur gali maupun sumur dalam dan PDAM. Sebagian besar penduduk menggunakan sumur gali, mencapai lebih dari 77,57% dan hanya sebagian kecil menggunakan air dari PDAM yang bersumber dari sumur dalam (lebih kurang 22,43%). Upaya Pemerintah Kabupaten Bantul untuk meningkatkan akses terhadap air bersih diantaranya dengan menambah jumlah sambungan rumah ke jaringan PDAM dan membangun instalasi Sistem Penyediaan Air Sederhana (SIPAS) melalui program APBD dan Pamsimas (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) di daerah yang rawan air bersih. Instalasi SIPAS yang terbangun tersebut selanjutnya diserahkan kepada masyarakat setempat untuk dimanfaatkan, dikelola, dan dipelihara.

Cakupan air bersih pada tahun 2018 menurut data Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul sebesar 100. Hal ini menunjukkan bahwa semua masyarakat Kabupaten Bantul sudah dapat mengakses air bersih, walaupun akses air bersih ini masih mengalami kendala dari segi kualitas, kontinuitas dan kuantitas. Pada beberapa rumah tangga di kecamatan Dlingo, Imogiri, dan Pandak, tidak semua air memenuhi syarat secara kualitas karena terjadi kesulitan mendapatkan air pada musim kemarau.

2.1.4.2.2. Penyediaan Komunikasi

E-Government merupakan salah satu pengungkit dalam mendukung terwujudnya program reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Bantul. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bantul memposisikan urusan komunikasi dan informatika sebagai komponen terpenting untuk menuju pemerintahan berbasis elektronik atau teknologi informasi dan komunikasi. Di samping itu, kebijakan ini ditempuh sebagai tindak lanjut dari Peraturan Gubernur DIY Nomor 42 Tahun 2006 tentang *Blueprint Jogja Cyber Province* dan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*. Membangun **Bantul Smart City** merupakan cita-cita dan tujuan pembangunan bidang teknologi

informasi dan komunikasi dalam rangka mewujudkan *e-Government* atau pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Pemerintah Kabupaten Bantul telah menentukan kebijakan bahwa *e-Government* merupakan salah satu pengungkit percepatan reformasi birokrasi. Pengembangan *e-Government* menitik beratkan pada layanan unggulan *Digital Government Services* (DGS). Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bantul tidak dapat lepas dari tuntutan kebutuhan vital sarana dan prasarana teknologi informasi. Oleh karena itu mutlak bagi pemerintah Kabupaten Bantul, agar mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara prima dengan kemampuan memanfaatkan sarana dan prasarana teknologi informasi tersebut di berbagai lini.

Penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan disebut juga *e-government (e-gov)* dan *online government* dan telah berjalan di Kabupaten Bantul. *E-government* telah diaplikasikan didukung dengan sarana dan prasarana pengembangan jaringan internet yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi internal pemerintahan, menyampaikan pelayanan publik, atau proses pemerintahan yang demokratis. Keuntungan dari *e-government* adalah peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik. Selain penyajian informasi dan aplikasi *e-gov* melalui *website*, Pemerintah Kabupaten Bantul juga sudah menerapkan 66 sistem informasi dan 51 aplikasi baik yang bersifat *intranet*, *desktop*, maupun *online* (Tabel 2.125).

Tabel 2.125. Aplikasi Sistem Informasi Tahun 2017-2018

No.	Tahun	Nama aplikasi
1	2017	SIM elapor
2	2017	SIM simbarang-nakertrans
3	2017	SIM simbarang-setwan
4	2017	Sistem pendaftaran online kendaraan
5	2017	SIM Wistlerblower

No.	Tahun	Nama aplikasi
6	2017	SIM Zona Integritas
7	2017	SIM simbarangdlh
8	2017	SIM smscenter
9	2017	SIM tanahdesa
10	2017	SIM tanahkasultanan
11	2017	Sistem Informasi Desa (75 Desa)
12	2017	SIM Aset
13	2017	SIM Menara Telekomunikasi
14	2017	SIM rsudps
15	2017	SIM Perencanaan Pembangunan
16	2017	SIM Integrasi Data Kependudukan dan Kepesertaan Jaminan Kesehatan
17	2017	SIM Penanggulangan Kemiskinan
18	2017	SIM Pengendalian Pembangunan
19	2017	SIM Monografi desa
20	2017	SIM Pelaporan Administrasi Kesehatan Masyarakat
21	2017	SIM Perizinan
22	2017	Aplikasi Pengembangan Sekolah Adiwiyata
23	2017	Aplikasi agenda kegiatan DPRD
24	2017	Aplikasi dppkbpmd
25	2017	Aplikasi dprd
26	2017	Aplikasi dwp
27	2017	Aplikasi jdih-dprd
28	2017	Aplikasi Jejaring Pengelola Sampah Mandiri AMOR
29	2017	Aplikasi jrd
30	2017	Aplikasi kesiswaan
31	2017	Aplikasi layananinspektorat
32	2017	Aplikasi paten
33	2017	Aplikasi pbb
34	2017	Aplikasi perizinan-bappeda
35	2017	Aplikasi persuratan-bappeda
36	2017	Aplikasi perundanganri
37	2017	Aplikasi pkk
38	2017	Aplikasi pnpm-pmd
39	2017	Aplikasi potensiwisata
40	2017	Aplikasi ppid
41	2017	Aplikasi ppkd
42	2017	Aplikasi ppns
43	2017	Aplikasi profilidkp
44	2017	Aplikasi profilkoperasi
45	2017	Aplikasi puskesmas-pleret
46	2017	Aplikasi rkas
47	2017	Aplikasi sarpras-sd
48	2017	Aplikasi setda
49	2017	Aplikasi sik
50	2017	Aplikasi simpamong
51	2017	Aplikasi simpangindagkop
52	2017	Aplikasi simpegnaker
53	2017	Aplikasi simpel
54	2017	Aplikasi sinak
55	2017	Aplikasi sipleret
56	2017	Aplikasi siukm
57	2017	Aplikasi ulp-pbj
58	2017	Aplikasi umum
59	2017	Aplikasi warintek

No.	Tahun	Nama aplikasi
60	2017	Aplikasi pencaker
61	2017	Aplikasi simperkes
62	2017	Aplikasi mpm
63	2017	Aplikasi pbdtd
64	2017	Aplikasi dpmpt
65	2017	Aplikasi e-investment
66	2017	Aplikasi lkpm-dpmpt
67	2017	Aplikasi Kearsipan
68	2017	Aplikasi SPSE
69	2017	Aplikasi Pelayanan Terpadu
70	2017	Aplikasi Pelayanan Terpadu
71	2017	Aplikasi Pengadaan Barang Secara Elektronik
72	2017	Aplikasi Sistem Pengelolaan Presensi
73	2018	Aplikasi E-Retribusi
74	2018	Aplikasi Kampung KB
75	2018	Aplikasi Pengembangan E-Lapor
76	2018	Aplikasi TIK
77	2018	Aplikasi Autentifikasi

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bantul, 2019

Beberapa sarana komunikasi dan informasi antara pemerintah dan masyarakat Kabupaten Bantul berbasis ilmu pengetahuan teknologi adalah pemanfaatan media telematika, seperti penggunaan aplikasi sistem informasi, SMS center, website daerah yaitu www.bantulkab.go.id, bantulbiz.com, bantulcraft.com, informasi SKPD melalui subdomain SKPD, Warung Informasi dan Teknologi (Warintek), fasilitas akses jaringan internet dan intranet SKPD dan telecenter.

Tabel 2.126. Media Komunikasi Pemerintah dan Masyarakat

No.	Media	2018
1	SMS Center	Januari sd Desember: 252 SMS
2	Siaran Taman Gabusan TVRI Yogyakarta	36x siaran di studio dan 4x siaran di luar studio
3	Website daerah (www.bantulkab.go.id)	54 sub domain dengan 275.022 pengunjung
4	Dialog Interaktif Radio Bantul FM	24 siaran
5	Jurnal Riset Daerah	Penerbitan 3 edisi reguler (bulan April, Agustus, dan Desember) dan Edisi Khusus tahun 2017 bekerjasama dengan Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta

Sumber: Bappeda Kabupaten Bantul, 2019 (data diolah)

Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk masyarakat. Salah satu peran dan

fungsi KIM adalah sebagai partner jaringan informasi dari pemerintah ke masyarakat, sehingga nantinya dapat tercipta masyarakat yang peduli informasi. Jumlah KIM yang saat ini terdaftar di Diskominfo ada 19KIM.

Meluasnya infrastruktur jaringan internet dan intranet SKPD Pemerintah Kabupaten Bantul dengan pembangunan jaringan fiber optic sepanjang 43,955 km yang tersebar di seluruh PD Pemerintah Kabupaten Bantul, kecamatan, dan pemerintah tingkat desa serta Puskesmas.

2.1.4.2.3. Partisipasi Lembaga Swasta melalui CSR

Tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah bentuk tanggung jawab organisasi atau perusahaan terhadap masyarakat yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Di Kabupaten Bantul, CSR telah memberikan sumbangan yang tidak ternilai dan telah terbukti memberikan andil dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BUMN, lembaga keuangan non BUMN, instansi kesehatan, instansi pendidikan, dan perusahaan umum yang ada di Kabupaten Bantul telah banyak mengalokasikan dana CSR untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mengapresiasi dan mendokumentasikan bantuan dana CSR tersebut, setiap tahun Pemerintah Kabupaten Bantul setiap tahun menerbitkan buku CSR Membangun Bantul. Pada tahun 2018 tercatat ada 49 instansi/lembaga dan perusahaan yang memberikan dana CSR kepada masyarakat Bantul, sebagaimana terdapat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.127 Pemanfaatan CSR di Kabupaten Bantul Tahun 2018

No.	Perusahaan	Bidang Kegiatan
-----	------------	-----------------

No.	Perusahaan	Bidang Kegiatan
1	PT Pertamina TBBM Rewulu	UMKM dan Ekonomi Kreatif
2	PT. Pertamina	Kesehatan, Lingkungan Hidup, Pendidikan, Sosial, UMKM dan Ekonomi Kreatif
3	PT Bank Tabungan Negara	UMKM dan Ekonomi Kreatif
4	PT PLN (Persero)	Lingkungan Hidup
5	PT Telkom Indonesia	UMKM dan Ekonomi Kreatif
6	PT Bank Negara Indonesia Tbk	UMKM dan Ekonomi Kreatif
7	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Pendidikan, UMKM dan Ekonomi Kreatif
8	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	Lingkungan Hidup, UMKM dan Ekonomi Kreatif
9	PT Bank BPD DIY Cabang Bantul	Lingkungan Hidup, Pendidikan, Sosial, UMKM dan Ekonomi Kreatif
10	PT Bank Syariah Mandiri Baranch Bantul	Kesehatan, Sosial, UMKM dan Ekonomi Kreatif
11	Bank Woori Saudara	Pendidikan, Sosial
12	KSPPS BMT Artha Amanah Sanden	Kesehatan, Pendidikan, Sosial
13	PT BPR Kurnia Sewon	Sosial
14	KSPPS Tamzis Bina Utama	Kesehatan, Pendidikan, Sosial
15	KSPPS BMT Ad Da'wah	Sosial
16	PD BPR Bank Bantul	Kesehatan, Lingkungan Hidup
17	Bank Danamon	UMKM dan Ekonomi Kreatif
18	PT Bank Central Asia Tbk	UMKM dan Ekonomi Kreatif
19	Tamziz Baituttamwil	UMKM dan Ekonomi Kreatif
21	RSU PKU Muhammadiyah Bantul	Kesehatan, Pendidikan, Sosial, UMKM dan Ekonomi Kreatif
22	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	Pendidikan, Sosial
23	Coca Cola Foundation Indonesia	Pendidikan
24	PT Unilever	Kesehatan, Lingkungan Hidup, UMKM dan Ekonomi Kreatif
25	Santika Premier Hotel	UMKM dan Ekonomi Kreatif
26	Mercure Accor Hotel	UMKM dan Ekonomi Kreatif
27	Mutiara Hotel	UMKM dan Ekonomi Kreatif
28	101 Hotel	UMKM dan Ekonomi Kreatif
29	Yogyakarta Plaza Hotel	UMKM dan Ekonomi Kreatif
30	Burza Hotel	UMKM dan Ekonomi Kreatif
31	PT Almi Furniture Perdana	Pendidikan, Sosial
32	PT Adi Satria Abadi (ASA)	Sosial
33	PT Bangun Jaya Mandiri	Sosial
34	PT Cahaya Mulia Persada Nusa	Lingkungan Hidup, Sosial
35	PT Indokor Bangun Desa	Sosial
36	PT Komitrando Emporio	Pendidikan
37	PT Lio Collection	Sosial
38	CV Prima Alam Sejahtera	Lingkungan Hidup, Sosial
39	PT Tirta Investama	Sosial
40	PT Yogyakarta Tembakau Indonesia	Lingkungan Hidup, Pendidikan, Sosial
41	PT Madubaru	Lingkungan Hidup, Sosial, UMKM dan Ekonomi Kreatif
42	PT IGP Internasional Bantul	Pendidikan, Sosial, UMKM dan Ekonomi Kreatif
43	Pusat Kemasan UKM	UMKM dan Ekonomi Kreatif

No.	Perusahaan	Bidang Kegiatan
44	CV Arya Nurega	Lingkungan Hidup
45	CV Bunga Padi	Lingkungan Hidup
46	PT Aneka Dharma Persada	Lingkungan Hidup
47	PT Nindya Karya (Persero)	Lingkungan Hidup
48	Pusat Kemasan UKM	UMKM dan Ekonomi Kreatif
49	CV Arya Nurega	Lingkungan Hidup

Sumber: Bappeda Kabupaten Bantul, 2019

2.1.4.3.

Fokus Iklim Berinvestasi

2.1.4.3.1. Angka Kriminalitas

Dalam mendukung terciptanya iklim berinvestasi di Kabupaten Bantul maka pemerintah daerah bersama dengan instansi vertikal (kepolisian dan kejaksaan) harus berupaya meningkatkan keamanan yang kondusif di masyarakat, menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat, serta menanggulangi kriminalitas sehingga kuantitas dan kualitas kriminalitas dapat diminimalisir. Angka kriminalitas yang tertangani merupakan indikator yang berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat, semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat.

Tabel 2.128. Angka Kriminalitas di Kabupaten Bantul Tahun 2014-2018

No.	Jenis Kriminal	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah kasus Narkoba	90	21	45	46	78
2	Jumlah kasus Pembunuhan	3	3	4	0	2
3	Jumlah Kejahatan Seksual	5	19	4	29	15
4	Jumlah kasus Penganiayaan	44	53	81	135	81
5	Jumlah kasus Pencurian	387	410	345	395	281
6	Jumlah kasus Penipuan	33	143	88	76	94
7	Jumlah kasus Pemalsuan uang	0	0	0	2	0
8	Total Jumlah Tindak Kriminal Tertangani Selama 1 Tahun	562	649	567	683	551
9	Jumlah Penduduk	913.407	919.440	928.676	927.181	939.718
10	Angka Kriminalitas	0,062	0,071	0,061	0,074	0,055 *

Sumber: Satpol PP Kabupaten Bantul, 2019

*)angka sementara

Tabel 2.128 menunjukkan bahwa pada tahun 2018 angka kriminalitas di Kabupaten Bantul mengalami penurunan jika

dibandingkan tahun 2017. penurunan angka kriminalitas ini di sebabkan peningkatan penanganan dan pencegahan tindak kejahatan oleh aparat penegak hukum dan pemerintah serta partisipasi masyarakat dalam meminimalisir tindak kriminal.

2.1.4.3.2. Jumlah Demonstrasi

Salah satu yang harus dikendalikan dalam mendukung iklim investasi yang kondusif adalah demonstrasi/unjukrasa. Demonstrasi atau unjuk rasa adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang dihadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut.

Tabel 2.129. Jumlah Demonstrasi di Kabupaten Bantul
Tahun 2014-2018

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Bidang Politik	14	1	6	3	-
2	Ekonomi	3	6	2	5	-
3	Kasus pemogokan kerja	1	20	2	-	-
	Jumlah Demonstrasi/Unjuk Rasa	18	27	10	8	3

Sumber: Polres Kabupaten Bantul, 2016 dan Satuan Pol PP Kabupaten Bantul, 2019

2.1.4.3.3. Kemudahan Perijinan

Pelayanan publik yang memuaskan masyarakat adalah tujuan akhir dari digalakkannya reformasi birokrasi. Sejalan dengan hal itu, Pemerintah Kabupaten Bantul terus berupaya meningkat kualitas berbagai jenis pelayanan publik, termasuk pelayanan di bidang perizinan.

Investasi yang akan masuk ke suatu daerah bergantung kepada daya saing investasi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Pembentukan daya saing investasi, berlangsung secara terus-menerus

dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya kemudahan perijinan. Kemudahan perijinan adalah proses pengurusan perijinan yang terkait dengan persoalan investasi relatif sangat mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama.

Bagi Kabupaten Bantul upaya untuk memberikan pelayanan yang baik dalam proses perijinan terus ditingkatkan terutama sekali melalui reformasi di bidang perijinan. Pemerintah Kabupaten Bantul telah membentuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu yang menangani pengelolaan perijinan secara terpadu agar terjadi peningkatan pelayanan perizinan dengan prosedur yang mudah, murah, cepat, berkualitas, dan akurat.

Tabel 2.130. Jenis Pelayanan Ijin dan Non Ijin Kabupaten Bantul

No.	Nama Perijinan	Jumlah Jenis Perijinan
1	Perijinan dasar	4
2	Perijinan perdagangan dan industri	13
3	Perijinan usaha dan jasa konstruksi	3
4	Tanda Daftar Usaha Pariwisata	13
5	Perijinan angkutan	3
6	Perijinan bidang kesehatan	54
7	Perijinan bursa kerja luar negeri	1
8	Perijinan Penjualan Minuman Beralkohol	2
9	Perijinan Usaha Perikanan	5
10	Usaha Bidang Kominfo	1

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul, 2019

Dengan adanya penyederhanaan pelayanan dan efisiensi waktu, proses penyelesaian ijin dapat diselesaikan paling lama 12 hari jika syarat administrasi dan teknisnya lengkap, jelas, dan benar. Di samping itu, di Kabupaten Bantul pengurusan ijin dapat dilaksanakan secara paralel (sekali mengajukan untuk beberapa jenis ijin dalam obyek ijin yang sama). Secara terperinci pelayanan perizinan disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.131. Lama Proses Perijinan Kabupaten Bantul
Tahun 2018

No.	Uraian	Lama Mengurus (Hari)	Jumlah Persyaratan (Dokumen)	Biaya Resmi (Rata-Rata Maks Rp)
1	SIUP	3	10	Tidak dipungut
2	TDP	3	5	Tidak dipungut
3	IUI	5	10	Tidak dipungut
4	TDI	5	8	Tidak dipungut
5	IMB	6	13	Sesuai Rumus Perhitungan Retribusi IMB

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul, 2019

Tabel diatas menunjukkan bahwa pelayanan perijinan tidak dipungut biaya kecuali Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dihitung sesuai Rumus Perhitungan Retribusi IMB.

Tabel 2.132. Rekapitulasi Perizinan di Kabupaten Bantul
Tahun 2015-2018

No.	Jenis Izin	2015	2016	2017	2018
1	Permohonan izin	6.930	6.807	6.165	5.664
2	Izin diterbitkan	5.940	6.021	5.986	5.502
3	Izin ditolak	151	165	177	148
4	Izin dalam proses	839	621	2	14

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul, 2019

Pemerintah Kabupaten Bantul mampu menyelesaikan pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan pelayanan perijinan dengan baik dan memuaskan melalui berbagai sarana baik datang langsung (disediakan loket khusus pengaduan), telepon, SMS, *e-mail*, maupun melalui *website* yang terintegrasi dalam SIM perizinan. Pengaduan yang masuk ditangani sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus penanganan pengaduan. Terkait ijin bangunan (IMB), data dari Dinas Perijinan dapat dilihat pada Tabel 2.133.

Tabel 2.133. Penetapan IMB per Satuan Bangunan Menurut Kecamatan Di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2018

No.	Kecamatan	2016	2017	2018
1	Kasih	600	387	701
2	Banguntapan	573	380	270
3	Sewon	303	159	174
4	Pleret	141	122	26
5	Bantul	97	58	106
6	Sedayu	87	283	141
7	Pajangan	34	38	116
8	Piyungan	27	41	49
9	Jetis	19	64	41
10	Bambang Lipuro	18	23	19
11	Srandakan	12	4	9
12	Pandak	9	12	16
13	Imogiri	8	15	11
14	Kretek	6	9	8
15	Dlingo	4	2	12
16	Pundong	3	6	6
17	Sanden	3	7	13
Jumlah		1.944	1.610	1.718

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul, 2019

2.1.4.3.4. Peraturan Daerah yang Mendukung Iklim Usaha

Peraturan Daerah merupakan sebuah instrumen kebijakan daerah yang sifatnya formal, melalui perda inilah dapat diindikasikan adanya insentif maupun disinsentif sebuah kebijakan di daerah terhadap aktivitas perekonomian. Perda yang mendukung iklim usaha dibatasi yaitu perda terkait dengan perijizinan, perda terkait dengan lalu lintas barang dan jasa, serta perda terkait dengan ketenagakerjaan.

Tabel 2.134. Perda yang Mendukung Iklim Usaha/Investasi Kabupaten Bantul

Jenis Perda
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung; 2. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perizinan Usaha Bidang Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perizinan Usaha Bidang Perindustrian dan Perdagangan; 3. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi; 4. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Bantul; 5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembinaan Jasa Kontruksi; 6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perumahan; 7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan dan Perizinan di Bidang Kesehatan; 8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik; 9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata; 10. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015-2025; 11. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi; 12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021; 13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing; 14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Retribusi Jasa Usaha; 15. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perizinan Pemanfaatan Ruang; 16. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi; 17. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelayanan Tera/Tera Ulang; 18. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian wilayah Perkotaan Sewon Tahun 2018-2038; dan 19. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian wilayah Perkotaan Kasihan Tahun 2018-2038.

Sumber: Bagian Hukum Kabupaten Bantul, 2017

2.1.4.3.5. Desa Berstatus Mandiri

Selain status desa perdesaan dan perkotaan, ada status desa berdasarkan perkembangan kemajuan desa, mengingat desa

Kabupaten Bantul memiliki karakteristik yang berbeda-beda baik dari segi luas wilayah, kondisi ekonomi, politik, sosial budaya, dll. Hal ini penting karena pembangunan perdesaan merupakan salah satu amanat Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 86, yang salah satu ayatnya menyebutkan "Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi desa dan pembangunan kawasan perdesaan". Selain itu juga mendukung salah satu Nawacita pemerintah, yaitu "Pembangunan Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan".

Ada dua status desa berdasarkan perkembangan kemajuan desa, yaitu Indeks Pembangunan Desa (IPD) dan Indeks Desa Membangun (IDM) yang merupakan hasil analisis dari basis data yang sama yaitu hasil pendataan Potensi Desa (Podes) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2014. Berdasarkan hasil pendataan Podes pada tahun 2008, diketahui masih terdapat 16 desa dengan status "**desa tertinggal**". Namun, berdasarkan tolok ukur IPD maupun IDM yang berbasis Podes Tahun 2014, tidak terdapat lagi desa di Kabupaten Bantul dengan status '**desa tertinggal**'. Hasil analisis terhadap status desa di Kabupaten Bantul menurut IPD maupun IDM, disajikan pada Tabel 2.135 berikut ini:

Tabel 2.135 Status Desa di Kabupaten Bantul Menurut Indeks Pembangunan Desa (IPD) dan Indeks Desa Membangun (IDM)

No.	Kecamatan	DESA	IDM	KLASIFIKASI	IPD	KLASIFIKASI
1	Srandakan	Poncosari	0.7641	Maju	77.86	Mandiri
		Trimurti	0.7658	Maju	78.47	Mandiri
2	Sanden	Srigading	0.7032	Berkembang	78.61	Mandiri
		Gadingsari	0.8038	Maju	75.36	Mandiri
		Gadingharjo	0.6977	Berkembang	64.79	Berkembang
		Murtigading	0.7678	Maju	74.39	Berkembang
3	Kretek	Tirtoharjo	0.7032	Berkembang	67.6	Berkembang
		Donotirto	0.8308	Mandiri	83.07	Mandiri
		Parangtritis	0.8511	Mandiri	82.64	Mandiri
		Tirtosari	0.676	Berkembang	68.86	Berkembang

No.	Kecamatan	DESA	IDM	KLASIFIKASI	IPD	KLASIFIKASI
		Tirtomulyo	0.800	Maju	75.71	Mandiri
4	Pundong	Seloharjo	0.7638	Maju	68.22	Berkembang
		Srihardono	0.8156	Mandiri	77.92	Mandiri
		Panjangrejo	0.7877	Maju	69.67	Berkembang
5	Bambanglipuro	Sumbermulyo	0.842	Mandiri	82.04	Mandiri
		Sidomulyo	0.7969	Maju	75.84	Mandiri
		Mulyodadi	0.7155	Maju	76.77	Mandiri
6	Pandak	Caturharjo	0.7452	Maju	73.63	Berkembang
		Wijirejo	0.7677	Maju	77.24	Mandiri
		Triharjo	0.7648	Maju	72.01	Berkembang
		Gilangharjo	0.8072	Maju	79.13	Mandiri
7	Pajangan	Guwosari	0.792	Maju	73.34	Berkembang
		Triwidadi	0.7198	Maju	68.76	Berkembang
		Sendangsari	0.7299	Maju	67.68	Berkembang
8	Bantul	Sabdodadi	0.7476	Maju	74.99	Berkembang
		Palbapang	0.801	Maju	80.52	Mandiri
		Ringinharjo	0.7427	Maju	74.2	Berkembang
		Bantul	0.8059	Maju	83.4	Mandiri
		Trirenggo	0.7702	Maju	72.87	Berkembang
9	Jetis	Patalan	0.7757	Maju	78.12	Mandiri
		Trimulyo	0.7935	Maju	77.23	Mandiri
		Canden	0.7661	Maju	71.77	Berkembang
		Sumberagung	0.7874	Maju	76.03	Mandiri
10	Imogiri	Selopamioro	0.7159	Maju	73.66	Berkembang
		Kebonagung	0.7282	Maju	71.86	Berkembang
		Sriharjo	0.7097	Maju	69.82	Berkembang
		Karangtalun	0.7729	Maju	73.03	Berkembang
		Karengtengah	0.6930	Berkembang	63.50	Berkembang
		Imogiri	0.7364	Maju	80.05	Mandiri
		Wukirsari	0.7643	Maju	78.38	Mandiri
		Girirejo	0.7261	Maju	64.28	Berkembang
11	Dlingo	Mangunan	0.7113	Maju	72.38	Berkembang
		Dlingo	0.6644	Berkembang	69.32	Berkembang
		Muntuk	0.7061	Berkembang	71.24	Berkembang
		Temuwuh	0.7471	Maju	73.21	Berkembang
		Jatimulyo	0.6366	Berkembang	64.91	Berkembang
		Terong	0.7318	Maju	77.16	Mandiri
12	Banguntapan	Tamanan	0.8371	Mandiri	79.05	Mandiri
		Baturetno	0.8339	Mandiri	82.35	Mandiri
		Jagalan	0.6481	Berkembang	64.98	Berkembang
		Banguntapan	0.8649	Mandiri	89.02	Mandiri
		Singosaren	0.7519	Maju	73.32	Berkembang
		Wirokerten	0.8181	Mandiri	78.66	Mandiri

No.	Kecamatan	DESA	IDM	KLASIFIKASI	IPD	KLASIFIKASI
		Jambidan	0.7240	Maju	69.30	Berkembang
		Potorono	0.8293	Mandiri	82.12	Mandiri
13	Pleret	Bawuran	0.6486	Berkembang	64.68	Berkembang
		Wonokromo	0.7954	Maju	78.26	Mandiri
		Wonolelo	0.6405	Berkembang	64.94	Berkembang
		Segoroyoso	0.7155	Maju	76.20	Mandiri
		Pleret	0.8271	Mandiri	80.81	Mandiri
14	Piyungan	Sitimulyo	0.7713	Maju	81.77	Mandiri
		Srimulyo	0.8053	Maju	79.20	Mandiri
		Srimartani	0.7377	Maju	75.02	Mandiri
15	Sewon	Pendowoharjo	0.8271	Mandiri	79.72	Mandiri
		Bangunharjo	0.8588	Mandiri	84.70	Mandiri
		Timbulharjo	0.8369	Mandiri	80.75	Mandiri
		Panggunharjo	0.8141	Maju	82.29	Mandiri
16	Kasihan	Tamantirto	0.7135	Maju	70.54	Berkembang
		Tirtonirmolo	0.7604	Maju	81.42	Mandiri
		Ngestiharjo	0.8264	Mandiri	82.03	Mandiri
		Bangunjiwo	0.7259	Maju	70.15	Berkembang
17	Sedayu	Argodadi	0.6739	Berkembang	66.13	Berkembang
		Argosari	0.7574	Maju	75.57	Mandiri
		Argomulyo	0.8641	Mandiri	75.35	Mandiri
		Argorejo	0.7710	Maju	79.96	Mandiri

Sumber: Bappeda Kabupaten Bantul, 2019

Berdasarkan Tabel 2.126 analisis status desa di Kabupaten Bantul menurut IPD, dapat disimpulkan:

1. Tidak ada satupun desa di Kabupaten Bantul yang mendapat status tertinggal;
2. Jumlah desa yang berstatus 'Mandiri' sebanyak 41 desa dan 'Berkembang' sejumlah 34 desa;
3. Berdasarkan *ranking* IPD, tiga desa dengan skor tertinggi adalah Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan (89,02); Desa Bangunharjo, Kecamatan Sewon (84,70); dan Desa Bantul, Kecamatan Bantul (83,40). Adapun desa dengan nilai terendah adalah Desa Karangtengah, Kecamatan Imogiri (63,50); Desa Girirejo, Kecamatan Imogiri (64,28); dan Desa Bawuran, Kecamatan Pleret (64,68).

Sementara berdasarkan analisis menurut IDM, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tidak ada satupun desa di Kab. Bantul yang mendapat status tertinggal;
2. Menurut IDM, terdapat sejumlah 15 desa dengan kriteria 'Mandiri', 48 'Maju' dan sisanya 12 'Berkembang';
3. Menurut *ranking* IDM, tiga desa dengan skor tertinggi adalah Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan (0,8649); Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu (0,8641); dan Desa Bangunharjo, Kecamatan Sewon(0, 8588). Adapun desa dengan nilai terendah adalah Desa Jatimulyo, Kecamatan Dlingo (0,6366); Desa Wonolelo, Kecamatan Pleret (0,6405); dan Desa Bawuran, Kecamatan Pleret (0,6486).

2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

2.1.4.4.1. Kualitas Tenaga Kerja

Kualitas tenaga kerja dapat dilihat dari kualitas SDM yang mengenyam pendidikan tinggi dan mempunyai keahlian serta menguasai teknologi yang dibutuhkan di dunia kerja.

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Hal ini dapat disadari oleh karena manusia sebagai subyek dan obyek dalam pembangunan. Mengingat hal tersebut, maka pembangunan SDM diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional. Disamping itu juga mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional. Kualitas sumberdaya manusia juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah.

2.1.4.4.2. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan menunjukkan besar beban tanggungan kelompok usia produktif atas penduduk usia non produktif. Kelompok usia produktif adalah penduduk yang berada pada kelompok umur 15-64 tahun, yang dianggap dapat bekerja dan berkontribusi secara ekonomi maupun sosial. Kelompok non produktif adalah penduduk yang berada pada kelompok umur 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas, yang dianggap belum mampu atau sudah tidak mampu bekerja sehingga tidak berkontribusi secara ekonomi maupun sosial.

Semakin besar rasio ketergantungan berarti semakin besar beban tanggungan bagi kelompok produktif. Angka ketergantungan dianggap rendah apabila kurang dari 30, sedang apabila antara 30-40 dan tinggi apabila lebih dari 40.

Semakin rendah angka ketergantungan, mengindikasikan semakin baik kondisi perekonomian karena semakin rendah kelompok non produktif yang ditanggung secara ekonomi oleh kelompok produktif. Tanggungan dapat berbentuk jaminan sosial, bantuan pensiun dan fasilitas lain yang diperoleh kelompok non produktif.

Rasio ketergantungan di Kabupaten Bantul pada tahun 2018 sebesar 44,72. Hal ini menunjukkan bahwa 100 orang penduduk usia produktif di Kabupaten Bantul harus menanggung 45 orang penduduk yang non produktif. Meski rasio ketergantungan tahun 2018 turun jika dibandingkan tahun 2017 (46,69) tetapi masih termasuk kategori tinggi. Oleh sebab itu untuk mengurangi rasio ketergantungan diharapkan pemerintah dapat meningkatkan pelayanan kesehatan dan pemberdayaan bagi lansia sehingga selain sehat dan kuat juga dapat lebih produktif.

Tabel 2.136. Rasio Ketergantungan Tahun 2014 – 2018
Kabupaten Bantul

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah penduduk usia < 15 tahun	194.160	197.912	206.905	196.441	198.537
2	Jumlah penduduk usia > 64 tahun	88.331	86.776	93.398	92.668	91.837
3	Jumlah penduduk usia tidak produktif (1+2)	282.491	284.688	300.303	289.109	290.374

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
4	Jumlah penduduk usia 15 – 64 tahun	566.701	634.752	619.143	638.072	649.344
5	Rasio ketergantungan (3/4)	49.84	44,85	48,5	46,69	44,72

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul Semester2, 2019.

2.1.5. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Salah satu indikator yang menunjukkan kondisi pelayanan dasar masyarakat adalah capaian SPM. SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal sebagaimana tertuang dalam ketentuan umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah. Pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan PP nomor 2 Tahun 2018 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang mengamanatkan bahwa urusan wajib dasar sebagai dasar penyusunan SPM ada enam bidang meliputi:

1. Bidang Pendidikan;
2. Bidang Kesehatan;
3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. Bidang Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
6. Bidang Sosial.

Materi muatan SPM meliputi:

- a. Jenis pelayanan dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal.

Jenis pelayanan dasar berbeda-beda pada masing-masing jenis SPM (pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan sosial).

Setiap jenis pelayanan dasar memiliki mutu pelayanan dasar yang ditetapkan oleh kementrian teknis.

b. Mutu pelayanan dasar

Mutu pelayanan dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam pelayanan dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.

Mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar ditetapkan dalam standar teknis yang diatur dalam Peraturan Menteri Terkait.

c. Penerima layanan dasar

Penerima pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar adalah warga negara yang berhak memperoleh pelayanan dasar secara minimal sesuai dengan jenis dan mutu pelayanan dasarnya.

2.1.5.1. Pendidikan

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan standar nasional pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan (Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan).

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, maka menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk memenuhi SPM bidang pendidikan.

Capaian SPM bidang pendidikan tahun 2018 Kabupaten Bantul sebagai berikut:

Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Kabupaten Bantul.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar Bidang Urusan Pendidikan Kabupaten Bantul sebagai berikut :

- a. Pendidikan anak usia dini
- b. Pendidikan dasar
- c. Pendidikan kesetaraan

2. Target Pencapaian SPM Kabupaten Bantul Tahun 2018 adalah penyusunan baseline data penerima layanan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan sebagai berikut :

a. Pendidikan anak usia dini

1) Penerima layanan adalah Warga Negara usia 5 tahun s/d 6 tahun.

2) Indikator Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD

3) Baseline data

- | | |
|---|---------------------|
| a) | Jumlah warga negara |
| usia 5-6 th | : 28.224 |
| b) | Jumlah warga negara |
| usia 5-6 th yang sudah berpartisipasi pendidikan paud | : 21.128 |
| c) | Jumlah warga negara |
| usia 5-6 th yang belum berpartisipasi pendidikan paud | : 508 |

b. Pendidikan dasar

1) Penerima layanan adalah Warga Negara usia 7 tahun s/d 15 tahun.

2) Indikator Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs).

3) Baseline data

- a) Jumlah warga negara usia 7-15 th : 124.495
 - b) Jumlah warga negara usia 7-15 th yang sudah berpartisipasi pendidikan dasar : 110.871
 - c) Jumlah warga negara usia 7-15 th yang belum berpartisipasi pendidikan dasar : 5.688
 - c. Pendidikan kesetaraan
 - 1) Penerima layanan adalah Warga Negara usia 7 tahun s/d 18 tahun.
 - 2) Indikator Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.
 - 3) Baseline data
 - a) Jumlah warga negara usia 7-18 tahun : 165.749
 - b) Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang sudah berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan : 1.424
 - c) Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang belum berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan : 43.902
 - d. Data penerima Program Indonesia Pintar Tahun 2018 sebagai berikut :
 - 1) Program Indonesia Pintar (PIP) Sekolah Dasar : 38.984 siswa
 - 2) Program Indonesia Pintar (PIP) Sekolah Menengah Pertama : 15.509 siswa

3. Alokasi Anggaran

Tabel. 2.137. program dan kegiatan SPM Bidang Pendidikan

NO	BIDANG SPM	JENIS LAYANAN	INDIKATOR	TARGET LAYANAN	BATAS WAKTU CAPAIAN	TAHUN 2018			
						PROGRAM PENDUKUNG	KEGIATAN PENDUKUNG	ANGGARAN KEGIATAN (Rp)	SUMBER (APBD/APBN)
1	Pendidikan	a. Pendidikan anak usia dini	a. Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	Setiap Tahun	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini	104,716,000	APBD
							Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	394,125,000	APBD
							Pengadaan sarana dan prasarana KBM PAUD	1,807,239,000	APBD
							Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	361,185,000	APBD
		b. Pendidikan dasar	b. Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	100%	Setiap Tahun	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Penyelenggaraan Pendidikan Dasar SMP	18,532,760,000	APBD
							Penyelenggaraan UNAS/UASBN Pendidikan Dasar	987,250,000	APBD
							Perijinan SD dan SMP Baru	21,000,000	APBD

	Pengembangan Pendidikan Dasar SMP	43,585,000	APBD
	Pembangunan, rehab sarana dan prasarana bangunan pendidikan Dasar	5,370,750,000	APBD
	Pengembangan kompetensi siswa pendidikan dasar	703,746,300	APBD
	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar	53,250,000	APBD
	Pengembangan Kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Dasar SD	338,525,000	APBD
	Pengembangan pendidikan dasar berbasis hak-hak anak dan kearifan lokal	147,000,000	APBD
	Pengembangan Pendidikan Dasar SD	1,205,570,000	APBD
	Pembangunan, rehab sarana dan prasarana bangunan pendidikan SD	5,358,373,000	APBD
	Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan SD	3,366,344,000	APBN

		Pengembangan kompetensi siswa pendidikan SD	2,174,232,500	APBD
		penyelenggaraan pendidikan dasar SD/MI	27,534,189,000	APBD
		Monitoring, evaluasi dan pelaporan siswa	4,850,000	APBD
		Pengembangan Kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan SMP	145,500,000	APBD
		Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan SMP	2,638,860,000	APBN
		Monitoring dan evaluasi dan Pelaporan BOS	72,700,000	APBD
	Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Evaluasi standar pelayanan minimal	175,605,000	APBD
		Peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan	47,681,205,000	APBD
		Pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan	234,600,000	APBD
	Program Manajemen Pelayanan	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	471,200,000	APBD

Pendidikan						
		Penyusunan kalender pendidikan dan penerimaan peserta didik baru (PPDB)		438,000,000	APBD	
		Pembinaan dan operasional dewan pendidikan		76,650,000	APBD	
		Penanaman iman, taqwa, dan akhlak mulia		46,675,000	APBD	
		Peningkatan pelayanan pendidikan inklusi		30,150,000	APBD	
		PROGRAM PENINGKATAN NILAI AKADEMIK				
		Penambahan Pelajaran		2,777,125,000	APBD	
		Peningkatan Metode Pengajaran		930,850,000	APBD	
		Peningkatan Peran Orangtua		25,200,000	APBD	
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				
		Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur		835,857,500	APBD	
c	Pendidikan kesetaraan	c	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum	100%	Setiap Tahun	PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL
		Penyelenggaraan pendidikan non formal		874,170,000	APBD	

menyelesaikan
pendidikan dasar dan
atau menengah yang
perpartisipasi dalam
pendidikan
kesetaraan

Pengembangan Pendidikan non formal	487,645,000	APBD
Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Paket A dan B	224,055,000	APBD
Penyelenggaraan Paket C setara SMU	380,005,000	APBD

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul, 2018

SPM Pendidikan dirancang sebagai tahapan awal untuk mencapai SNP dan standar lainnya. Hasil pendataan dari SPM tentang analisis gap/kesenjangan serta perhitungan kebutuhan investasi tingkat kabupaten selanjutnya digunakan sebagai dasar perumusan kebijakan pemenuhan SPM Dikdas oleh tim SPM Dikdas. Namun hal ini belum optimal karena menjelang akhir tahun 2018 UPT PPD kecamatan sudah ditiadakan

2.1.5.2. Kesehatan

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan maka menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk memenuhi SPM bidang kesehatan.

Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten Bantul.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar Bidang Urusan Pendidikan Kabupaten Bantul terdiri atas :

- a. Pelayanan kesehatan ibu hamil
- b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin
- c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
- d. Pelayanan kesehatan balita
- e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
- f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif
- g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
- h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
- i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus
- j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
- k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis
- l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*human*

immunodeficiency virus), yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/ preventif.

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target Pencapaian SPM Kabupaten Bantul Tahun 2018 adalah penyusunan baseline data penerima layanan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan sebagai berikut :

a. Pelayanan kesehatan ibu hamil

- 1) Penerima layanan adalah ibu hamil.
- 2) Indikator jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 3) Capaian SPM Tahun 2018 adalah 97.99 % dengan sasaran 13.748 dan capaian 13.472.
- 4) Baseline data target sasaran Tahun 2019 adalah 14.270

b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin

- 1) Penerima layanan adalah ibu bersalin.
- 2) Indikator jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 3) Capaian SPM Tahun 2018 adalah 99.78 % dengan sasaran 13.009 dan capaian 12.981.
- 4) Baseline data target sasaran Tahun 2019 adalah 12.375

c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir

- 1) Penerima layanan adalah bayi baru lahir.
- 2) Indikator jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 3) Capaian SPM Tahun 2018 adalah 93.10 % dengan sasaran 12.470 dan capaian 11.610.
- 4) Baseline data target sasaran Tahun 2019 adalah 12.355

d. Pelayanan kesehatan balita

- 1) Penerima layanan adalah balita (0-59 bulan).
- 2) Indikator jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 3) Capaian SPM Tahun 2018 adalah 91.88 % dengan sasaran 55.037 dan capaian 50.568.

- 4) Baseline data target sasaran Tahun 2019 adalah 59.730
- e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
 - 1) Penerima layanan adalah anak pada usia pendidikan dasar.
 - 2) Indikator jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan.
 - 3) Capaian SPM Tahun 2018 adalah 100 % dengan sasaran 27.117 dan capaian 27.117.
 - 4) Baseline data target sasaran Tahun 2019 adalah 26.762.
- f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif
 - 1) Penerima layanan adalah Warga Negara usia 15 s/d 59 tahun.
 - 2) Indikator Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan.
 - 3) Capaian SPM Tahun 2018 adalah 34.75 % dengan sasaran 198.166 dan capaian 68.858.
 - 4) Baseline data target sasaran Tahun 2019 adalah 198.166.
- g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
 - 1) Penerima layanan adalah Warga Negara usia 60 tahun ke atas.
 - 2) Indikator Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan.
 - 3) Capaian SPM Tahun 2018 adalah 85.01 % dengan sasaran 45.189 dan capaian 38.416.
 - 4) Baseline data target sasaran Tahun 2019 adalah 45.189.
- h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
 - 1) Penerima layanan adalah penderita hipertensi.
 - 2) Indikator Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan.
 - 3) Capaian SPM Tahun 2018 adalah 97.88 % dengan sasaran 37.560 dan capaian 36.762.
 - 4) Baseline data target sasaran Tahun 2019 adalah 37.560.
- i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus
 - 1) Penerima layanan adalah penderita diabetes mellitus.

- 2) Indikator Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan.
 - 3) Capaian SPM Tahun 2018 adalah 290.46 % dengan sasaran 5.042 dan capaian 14.645.
 - 4) Baseline data target sasaran Tahun 2019 adalah 5.042.
- j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
- 1) Penerima layanan adalah Orang dengan gangguan jiwa berat.
 - 2) Indikator Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan.
 - 3) Capaian SPM Tahun 2018 adalah 79.46 % dengan sasaran 4.358 dan capaian 3.463.
 - 4) Baseline data target sasaran Tahun 2019 adalah 4.358.
- k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis.
- 1) Penerima layanan adalah Orang dengan tuberculosis.
 - 2) Indikator Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan.
 - 3) Capaian SPM Tahun 2018 adalah 90.47 % dengan sasaran 811 dan capaian 797.
 - 4) Baseline data target sasaran Tahun 2019 adalah 881.
- l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*), yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/ preventif.
- 1) Penerima layanan adalah Orang berisiko terinfeksi HIV.
 - 2) Indikator Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) yang mendapatkan layanan kesehatan.
 - 3) Capaian SPM Tahun 2018 adalah 81.08 % dengan sasaran 11.834 dan capaian 9.595.
 - 4) Baseline data target sasaran Tahun 2019 adalah 11.834.

3. Alokasi Anggaran

Tabel 2.138. program dan kegiatan SPM Bidang Kesehatan.

NO	BIDANG SPM	JENIS LAYANAN	INDIKATOR	TARGET LAYANAN	BATAS WAKTU CAPAIAN	TAHUN 2018			
						PROGRAM PENDUKUNG	KEGIATAN PENDUKUNG	ANGGARAN KEGIATAN (Rp)	SUMBER (APBD/APBN)
2.	Kesehatan	a Pelayanan Kesehatan Ibu hamil	a Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	setiap tahun	Pelayanan Kesehatan ibu	1. Peningkatan kapasitas program KIA	27,345,000	APBD
							2. Bimtek Program KIA	7,350,000	APBD
							3. Evaluasi Program KIA	3,800,000	APBD
							4. AMP ibu	12,200,000	APBD
							5. Diseminasi AMP	4,175,000	APBD
							6. Rapat Koordinasi	8,400,000	APBD
							7. Bimtek Masyarakat (deteksi dini tanda bahaya)	16,800,000	APBD
							9. Workshsop KIA	6,475,000	APBD
							10. Pembentukan Tim AMP (HONOR TIM AMP)	4,560,000	APBD
							11. Peningkatan Pemantauan PWS-KIA (honor pegawai kontrak puskesmas)	20,400,000	APBD

b	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	b	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	setiap tahun	Pelayanan Kesehatan ibu	1. Drilling KIA	28,695,000	APBD
							2. Jampersal	2,100,405,000	DAK non fisik
c	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	c	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	setiap tahun	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1. AMP bayi	9,815,000	APBD
							2. Refreshing manajemen komplikasi bayi dan balita	3,052,500	APBD
d	Pelayanan kesehatan balita	d	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	setiap tahun	Pelayanan kesehatan balita	1. Peningkatan kapasitas petugas MTBS	8,325,000	APBD
							2. Peningkatan kapasitas petugas SDIDTK bagi guru PAUD dan TK	14,807,500	APBD
							3. Pemberdayaan masyarakat (pendampingan asuh balita)	35,557,500	BOK
							4. Evaluasi Pemberdayaan masyarakat (pendampingan asuh balita)	24,097,500	BOK
							5. Pelatihan Aplikasi Data KIA	20,450,000	BOK

						6. Monev Pelaksanaan PISPK bagi bidan	8,280,000	BOK
Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	setiap tahun	Pelayanan kesehatan lansia		1. Honor Tim bugar lansia	465,000	APBD
						2. Skrining	102,755,000	APBD
						3. Rakor	7,350,000	APBD
						4. Pra skrining dan evaluasi	2,600,000	APBD
						5. Workshop	7,810,000	APBD
				UKS		6. Sosialisasi Sekolah Model Germas	10,800,000	APBD
						7. Pelatihan sekolah model Germas	51,000,000	APBD
						8. Bimtek sekolah model germas	21,600,000	APBD
						9. evaluasi KKR	27,183,000	APBD
						10.rakor UKS	7,350,000	APBD
						11. akselerasi uks	7,000,000	APBD
						12. workshop penjangkaran dengan lintas sektor	3,765,000	APBD

f	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	f	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun	Program Penyakit Tidak Menular dan Keswa	Deteksi Dini PJPD pada populasi beresiko	25,790,000	APBD II
							Pelatihan Kader Posbindu	34,250,000	
							Sosialisasi program PTM	10,500,000	
							Refreッシング kader PTM	14,175,000	
							Peningkatan Kapasitas petugas dalam pelaksanaan PTM dan Keswa	21,500,000	
							Validasi data PTM	13,000,000	
							ATK program	1,674,500	
							Honor pelaksanaan kegiatan	4,560,000	
							Honor tim pengadaan	3,500,000	
							Belanja Barang BMHP	340,369,195	
							Penggandaan	28,394,000	
							Perjalanan dinas	5,000,000	

							Materi Posbindu	350,000	
							Penyuluhan PTM	190,000,000	
	h	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	h	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun	Program Penyakit Tidak Menular dan Keswa	Seminar Hipertensi	APBD II
								11,550,000	
							Update knowledge PTM keswa	10,935,000	
	i	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	i	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun	Program Penyakit Tidak Menular dan Keswa	Peningkatan Kapasitas Program PTM	APBD II
								12,700,000	
							Pelatihan surveillance PTM	5,185,000	
							Validasi data surveillance	4,725,000	
	j	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	j	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100%	Setiap Tahun	Program Penyakit Tidak Menular dan Keswa	Validasi data keswa	APBD II
								7,925,000	
							Refressing Kader Keswa	14,175,000	
							Workshop CMHN	6,014,500	

k	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	k	Jumlah Warga Negara terduga tuberculosi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun	Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Validasi Data TB,Bimbingan Teknis Kader TB,Sarasehan TB,Evaluasi Gerduda TB,Pelatihan TB DOTS,Pelatihan Analisis TB,Active selective case finding,revitalisasi gerduda TB,Belanja BHP pendukung TB, honor tim pembina gerduda TB	211,780,000	APBD
1	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	1	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun	Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Survei Populasi resiko tinggi HIV, belanja media promosi HIV, Validasi data TB, pertemuan linsek dan lintas program, pertemuan kelompok resiko tinggi HIV, pertemuan POKJA KPA, rapat koordinasi KPA, rapat persiapan pelatihan, pelatihan KT HIV, sosialisasi HIV pada kelompok resiko rendah, pertemuan penasun, pertemuan Harm reduction, sosialisasi HIV dan PMTS di SKPD	111,830,000	APBD

Mobile clinics for HIV testing and STI service, Annually meeting of CoC/SUFA at district level, supervision to clinics by district for data collection and reporting, office running cost	15,420,512.00	Global Fund
---	---------------	-------------

2.1.5.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/Prt/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat maka menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk memenuhi SPM bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar Bidang Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul terdiri atas :

- a. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
- b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target Pencapaian SPM Kabupaten Bantul Tahun 2018 adalah penyusunan baseline data penerima layanan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum sebagai berikut :

a. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari

- 1) Penerima layanan adalah Setiap Warga Negara mendapatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari sesuai standar.
- 2) Indikator Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok sehari-hari.

3) Baseline data

a)	Jumlah Warga Negara
	:936.408 (data kependudukan 2018 semester 1)

b)	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari :
	927181

c)	Jumlah Warga Negara yang belum memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari :
	9.227

b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

1) Penerima layanan adalah Setiap Warga Negara mendapatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari sesuai standar.

2) Indikator Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari.

3) Baseline data

a) Jumlah Warga Negara
:936.408 (data
kependudukan 2018 semester 1)

b) Jumlah Warga Negara yang
memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari
: 928677

c) Jumlah Warga Negara yang
belum memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari
: 7.731

3. Alokasi Anggaran

Tabel 2.139. program dan kegiatan SPM Bidang Pekerjaan Umum.

NO	BIDANG SPM	JENIS LAYANAN	INDIKATOR	TARGET LAYANAN	BATAS WAKTU CAPAIAN	TAHUN 2018			
						PROGRAM PENDUKUNG	KEGIATAN PENDUKUNG	ANGGARAN KEGIATAN (Rp)	SUMBER (APBD/APBN)
3	Pekerjaan Umum	a Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	a Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	Setiap Tahun	Program penyediaan dan pengelolaan air bak		133.750.000	
						Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau, dan sumber daya air lainnya		1.358.825.000	
						Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah		4.772.000.000	
		b Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah	a Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik			Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah		8.181.040.000	

2.1.5.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/Prt/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat maka menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk memenuhi SPM bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Bantul.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar Bidang Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Bantul terdiri atas :

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota
- b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota;

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target Pencapaian SPM Kabupaten Bantul Tahun 2018 adalah penyusunan baseline data penerima layanan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat sebagai berikut :

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota
 - 1) Penerima layanan adalah Korban bencana kabupaten/ kota yang memiliki rumah yang terdampak bencana.
 - 2) Indikator Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni.
 - 3) Baseline data sasaran : 50 (pembangunan rumah layak huni bagi korban bencana Badai Cempaka pada Tahun Anggaran 2019)
- b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota;

- 1) Penerima layanan adalah Masyarakat yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota.
- 2) Indikator : Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni.
- 3) Baseline data sasaran : 0

3. Alokasi Anggaran

Tabel 2.140. program dan kegiatan SPM Bidang Perumahan Rakyat.

NO	BIDANG SPM	JENIS LAYANAN	INDIKATOR	TARGET LAYANAN	BATAS WAKTU CAPAIAN	TAHUN 2018			
						PROGRAM PENDUKUNG	KEGIATAN PENDUKUNG	ANGGARAN KEGIATAN (Rp)	SUMBER (APBD/APBN)
4	Perumahan rakyat dan Kawasan Pemukiman	a Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	a Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	Setiap Tahun	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Bencana	Relokasi Korban Bencana Alam	254,561,500	APBD kab
							Penyiapan Lahan untuk Relokasi Bencana Alam	507,650,000	APBD kab
		b Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Pemda Kabupaten/Kota	b Jumlah Kepala Keluarga yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	Setiap Tahun				

2.1.5.5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota maka menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk memenuhi SPM bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.

Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Manusia Kabupaten Bantul.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Manusia Bantul terdiri atas :

- a. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum.
- b. Pelayanan informasi rawan bencana.
- c. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
- d. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
- e. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target Pencapaian SPM Kabupaten Bantul Tahun 2018 adalah penyusunan baseline data penerima layanan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Manusia sebagai berikut :

- a. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum.
 - 1) Penerima layanan adalah Warga Negara yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakkan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah kabupaten/ kota dan peraturan kepala kabupaten/ kota.
 - 2) Indikator : Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara.

- 3) Baseline data sasaran : 0 (Nol dengan asumsi tidak ada penegakan peraturan daerah yang mengakibatkan dampak bagi masyarakat).

b. Pelayanan informasi rawan bencana.

- 1) Penerima layanan adalah Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana.
- 2) Indikator : Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana.

3) Baseline data sasaran.

- a) Jumlah Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana (usia diatas >6 Tahun) : 836.085 (*data kependudukan usia > 6 tahun 2018 semester 1*)
- b) Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana : 836.085
- c) Jumlah Warga Negara yang belum memperoleh layanan informasi rawan bencana : 0

c. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.

- 1) Penerima layanan adalah Jumlah Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana.
- 2) Indikator : Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.

3) Baseline data sasaran.

- a) Jumlah Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana (usia diatas >6 Tahun) : 836.085 (*data kependudukan usia > 6 tahun 2018 semester 1*)
- b) Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana : 836.085

- c) Jumlah Warga Negara yang belum memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana : 0
- d. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
 - 1) Penerima layanan adalah Jumlah Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana.
 - 2) Indikator : Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
 - 3) Baseline data sasaran.
 - a) Jumlah Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana : 15
 - b) Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana : 15
 - c) Jumlah Warga Negara yang belum memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana : 0
- e. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.
 - 1) Penerima layanan adalah Jumlah Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana.
 - 2) Indikator : Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
 - 3) Baseline data sasaran.
 - a) Jumlah Warga Negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran: 124
 - b) Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran : 124
 - c) Jumlah Warga Negara yang belum memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran : 0

3. Alokasi Anggaran

Tabel 2.141. program dan kegiatan SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

NO	BIDANG SPM	JENIS LAYANAN	INDIKATOR	TARGET LAYANAN	BATAS WAKTU CAPAIAN	TAHUN 2018					
						PROGRAM PENDUKUNG	KEGIATAN PENDUKUNG	ANGGARAN KEGIATAN (Rp)	SUMBER (APBD/APBN)		
5	Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	a	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	a	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	100%	Setiap Tahun	-	-	-	-
		b	Pelayanan informasi rawan bencana	b	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	Setiap Tahun	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Sosialisasi mitigasi penanggulangan bencana alam & Sosial	1,443,925,000	APBD kab
									Pengembangan budaya sadar bencana	22,582,500	APBD kab
									Pengembangan Sistem Informasi Kebencanaan	255,500,000	APBD kab
									Pembuatan Dokumen Penanggulangan Bencana	571,125,000	APBD kab

c	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	c	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	Setiap Tahun	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Peningkatan ketrampilan dan kualitas penanggulangan bencana alam	84.8610.000	APBD kab
							Pemantauan dan penyebaran informasi potensi bencana alam	70.000.000	APBD kab
							Pengembangan desa siaga bencana	87,800,000	APBD kab
							Gladi posko dan gladi lapang	307,200,000	APBD kab
							Penguatan FPRB	57,000,000	APBD kab
							Pembentukan Sekolah Siaga Bencana	105,990,000	APBD kab
							Pembentukan Desa Tangguh Bencana	290,000,000	APBD kab
							Pengembangan Sekolah Siaga Bencana	48,305,000	APBD kab
d	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban	d	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan	100%	Setiap Tahun	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	pemantauan dan penyaluran bantuan bencana alam	162,343,200	APBD kab

	bencana		evakuasi korban bencana						
							Penyelenggaraan posko pengendalian bencana	34,950,000	APBD kab
							Penguatan kapasitas satgas BPBD	150,000,000	APBD kab
e	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	e	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%	Setiap Tahun	Program Peningkatan Kesiapsiagaan, Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Pencegahan, Pelaksanaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran	60,756,000	APBD kab
							Pendidikan dan Pelatihan Bahaya Kebakaran	146,000,000	APBD kab

2.1.5.6. Sosial

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota maka menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk memenuhi SPM bidang sosial.

Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Kabupaten Bantul.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar Bidang Urusan Sosial terdiri atas :

- a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti.
- b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti.
- c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti.
- d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti.
- e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota.

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target Pencapaian SPM Kabupaten Bantul Tahun 2018 adalah penyusunan baseline data penerima layanan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial sebagai berikut :

- a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti.
 - 1) Penerima layanan adalah penyandang disabilitas terlantar di luar panti.
 - 2) Indikator : Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti.
 - 3) Baseline data sasaran Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang belum memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti di Kabupaten Bantul adalah 6.770.
- b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti.
 - 1) Penerima layanan adalah Anak terlantar di luar panti.

- 2) Indikator : Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti.
 - 3) Baseline data sasaran Jumlah anak telantar yang belum memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti di Kabupaten Bantul adalah 1.862.
- c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti.
- 1) Penerima layanan adalah Orang tua lanjut usia terlantar di luar panti.
 - 2) Indikator : Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti.
 - 3) Baseline data sasaran Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang belum memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti di Kabupaten Bantul adalah 8.971.
- d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti.
- 1) Penerima layanan Gelandangan dan pengemis.
 - 2) Indikator : Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti.
 - 3) Baseline data sasaran Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang belum memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti di Kabupaten Bantul adalah 77.
- e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota.
- 1) Penerima layanan adalah korban bencana kabupaten/ kota.
 - 2) Indikator : Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial.
 - 3) Baseline data sasaran Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang belum memperoleh perlindungan dan jaminan sosial di Kabupaten Bantul adalah 300 paket.

3. Alokasi Anggaran

Tabel 2.142. Terlampir dalam program dan kegiatan SPM Bidang Sosial.

NO	BIDANG SPM	JENIS LAYANAN	INDIKATOR	TARGET LAYANAN	BATAS WAKTU CAPAIAN	TAHUN 2018		ANGGARAN KEGIATAN (Rp)	SUMBER (APBD/ APBN)
						PROGRAM PENDUKUNG	KEGIATAN PENDUKUNG		
6	Sosial	a Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	a Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Setiap Tahun	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	504,085,000	APBD
							Peningkatan kualitas KAMPANYE SOSIAL, pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	399,500,000	APBD
							Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	728,900,000	APBD
		b Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	b Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Setiap Tahun	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	504,085,000	APBD
							Peningkatan kualitas KAMPANYE SOSIAL, pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi	399,500,000	APBD

							kesejahteraan sosial bagi PMKS		
							Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	728,900,000	APBD
c	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlanter di luar panti	c	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlanter yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Setiap Tahun	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	504,085,000	APBD
							Peningkatan kualitas KAMPANYE SOSIAL, pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	399,500,000	APBD
							Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	728,900,000	APBD
d	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	d	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%	Setiap Tahun	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	504,085,000	APBD
							Peningkatan kualitas KAMPANYE SOSIAL, pelayanan, sarana dan	399,500,000	APBD

							prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS		
							Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	728,900,000	APBD
e	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/ kota	e	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	Setiap Tahun	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan Bantuan Sosial	Pendampingan, Pemantauan dan penyaluran bantuan	342,394,750	APBD

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2018 dan Realisasi RPJMD Tahun 2016-2021

Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah merupakan bagian dari siklus manajemen pembangunan yang memiliki posisi strategis. Evaluasi dilakukan dengan maksud untuk dapat mengetahui bagaimana pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan rencana pembangunan di masa yang akan datang. Pelaksanaan program/kegiatan pada tahun 2018 bermuara pada sasaran pembangunan yang diharapkan yang dapat dikonfirmasi melalui capaian indikator (tolok ukur) kinerja yang telah ditetapkan. Berikut adalah capaian dari sasaran pembangunan selama tahun 2018 yang diukur dari pencapaian indikator sasaran yang juga merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bupati Bantul.

Tabel 2.143. Target dan Capaian IKU Bupati Bantul Tahun 2018

No	Sasaran Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	2017		2018	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas	Indonesia Governance Index (IGI)	Klasifikasi (nilai)	65	75	70	79,6
2	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	Umur Harapan Hidup	tahun	73.28	73.47	73.30	73.66
3	Terwujudnya akses dan mutu pendidikan yang berkualitas	Angka Harapan Lama Sekolah	tahun	15.2	14.74	15.4	15.03
4	Turunnya jumlah masyarakat kurang mampu	Angka Kemiskinan	persen	13.66	14.07	12.13	13,43
5	Terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas	Pertumbuhan ekonomi	persen	5,30	5,10	5.40	5.47
		Pemerataan Pendapatan	angka	0,3121	0,41	0,3093	0,4126
6	Terwujudnya	Pertumbuhan	persen	6	21.59	7	7,79

No	Sasaran Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	2017		2018	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi
	destinasi pariwisata yang berdaya saing dan unggul	jumlah kunjungan wisatawan					
7	Terciptanya industri kreatif yang berkualitas	Cakupan Industri Kreatif	persen	30	41,11	35	42,90
8	Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat	Pertumbuhan produksi tanaman pangan	persen	0,1010	0,1133	0,1015	0,13085
		Pertumbuhan produksi tanaman hortikultura	persen	1,025	7,94	1,05	0,85
		Pertumbuhan produksi daging (sapi, kambing, domba, kuda, unggas)	persen	0,6	20,52	0,7	0,71
		Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan	persen	0,15	0,17	0,2	0,24
9	Terpenuhinya kebutuhan perikanan masyarakat	Pertumbuhan produksi perikanan	persen	1,3	5,92	1,35	1,14
10	Terpenuhinya sarana prasarana publik dan prasarana dasar masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur	angka	72	71,57	74	74,36
11	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	angka	45	45,1	50	53,36
12	Terciptanya kesadaran masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana	Desa Tangguh Bencana	persen	22,66	29,33	25,34	37,33
13	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	persen	81	70,24	70,35	70,45
14	Terwujudnya ketentraman dan	Angka Kriminalitas	persen	0,038	0,074	0,035	0,055

No	Sasaran Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	2017		2018	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi
	ketertiban masyarakat						
15	Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan	angka	50	57,01	60	68,40

Capaian kinerja 2018 sebagian besar telah memenuhi target yang ditetapkan. Dari 19 indikator sasaran Pemda, beberapa indikator yang masih di bawah target yaitu:

- a. Angka Harapan Lama Sekolah
- b. Angka Kemiskinan
- c. Pemerataan Pendapatan
- d. Pertumbuhan produksi tanaman hortikultura
- e. Pertumbuhan produksi perikanan
- f. Angka Kriminalitas

Kinerja tahun 2018 apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD, telah melebihi separuh dari target tahun 2021. Rerata persentase capaian kinerja kumulatif sampai dengan tahun 2018 apabila dibandingkan dengan target 2021 sebesar 83,35%. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun 2018 terhadap target akhir RPJMD disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.144 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran s.d Tahun 2018
terhadap target Akhir RPJMD

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2018	Target Akhir RPJMD 2016 - 2021	Capaian s.d Tahun 2018 terhadap Target Akhir RPJMD
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas	Indonesia Governance Index (IGI)	Klasifikasi (nilai)	79,6	8,5 (Sangat Baik)	93,65
2	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	Umur Harapan Hidup	tahun	73.66	73,70	99,95
3	Terwujudnya akses dan mutu pendidikan yang berkualitas	Angka Harapan Lama Sekolah	tahun	15,03	15,54	96,72
4	Turunnya Jumlah Masyarakat Kurang Mampu	Angka Kemiskinan	persen	13,43	8,32	38,59
5	Terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas	Pertumbuhan ekonomi	persen	5,47	5,60	97,68
		Pemerataan Pendapatan	angka	0,41*	0,37	89,19
6	Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing dan unggul	Pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan	persen	13	24	54,17
7	Terciptanya industri kreatif yang berkualitas	Cakupan Industri Kreatif	persen	42,90	50	85,80
8	Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat	Pertumbuhan produksi tanaman pangan	persen	0,13085	0,1030	127,04
		Pertumbuhan produksi tanaman hortikultura	persen	0,85	1,125	75,56
		Pertumbuhan produksi daging	persen	0,71	1	71,00

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2018	Target Akhir RPJMD 2016 - 2021	Capaian s.d Tahun 2018 terhadap Target Akhir RPJMD
		(sapi, kambing, domba, kuda, unggas)				
		Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan	persen	0,24	0,35	68,57
9	Terpenuhinya kebutuhan perikanan masyarakat	Pertumbuhan produksi perikanan	persen	1,14	1,5	76,00
10	Terpenuhinya sarana prasarana publik dan prasarana dasar masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur	angka	74,36	80	92,95
11	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	angka	53,36	72	74,11
12	Terciptanya kesadaran masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana	Desa Tangguh Bencana	persen	37,33	52	71,79
13	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	persen	70,45	80,0	88,06
14	Terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Angka Kriminalitas	persen	0,055	0,060	91,67
15	Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan	angka	68,40	75	91,2
Rerata persentase capaian kinerja kumulatif						83,35

Sumber : Bappeda Kabupaten Bantul, Data terolah tahun 2019

Capaian sasaran pembangunan pada tahun 2018 didukung oleh kinerja Perangkat Daerah. Capaian sasaran Perangkat Daerah selama tahun 2018 yang diukur dari pencapaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah, terdapat pada tabel berikut :

Tabel 2.145 Capaian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2018

SASARAN DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN 2018	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	TARGET TAHUN 2018	CAPAIAN TAHUN 2018	PERANGKAT DAERAH
1. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas	Indeks Tata Kelola Pemerintahan (Indonesia Governance Index/IGI)	Klasifikasi	70 (Baik)	Nilai Maturitas SPIP	angka	2,5 (Level 3)	3,2 (Level 3)	Inspektorat
				Persentase pemenuhan kompetensi Aparatur	persen	90	89,03	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
				Nilai Evaluasi Kinerja SKPD	angka	72	83,45	SETDA
				Indeks Kepuasan Masyarakat	angka	81	88,7	SETDA
				Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	angka	3,5 (sangat tinggi)	3,24	SETDA
				Persentase SKPD yang menyelenggarakan kearsipan sesuai standar dengan nilai baik	persen	46	46,3	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				Nilai Indeks Kepuasan Aparatur	angka	81,50	82,44	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

SASARAN DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN 2018	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	TARGET TAHUN 2018	CAPAIAN TAHUN 2018	PERANGKAT DAERAH
				Percepatan Layanan Perizinan dan Non Perizinan Tepat Waktu	persen	79	83,87	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	angka	79	83,29	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	angka	85	90	Kecamatan
				Persentase SKPD yang menerapkan Layanan Unggulan Digital Government Services (DGS)	persen	75	77,7	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Index kualitas layanan informasi publik	persen	77	75,33	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Rata-rata Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	persen	87	97,83	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

SASARAN DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN 2018	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	TARGET TAHUN 2018	CAPAIAN TAHUN 2018	PERANGKAT DAERAH
				Persentase Instansi yang Memanfaatkan Data Penduduk Disdukcapil	persen	80	85	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Indeks Kepuasan Masyarakat	angka	80,25	88,69	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Persentase Penegakan Perda	persen	63	66,35	Satpol PP
				Persentase pemilih yang berpartisipasi	persen	-	-	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
				Prosentase Raperda yang disetujui bersama	persen	80	70	Setwan
				Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	angka	83 (A)	81,39	SETDA
				Persentase rata-rata capaian sasaran daerah	persen	94,5	87,63	Bappeda
				Persentase rata-rata Pencapaian Target Kinerja Program PD	persen	90,4	87,63	Bappeda

SASARAN DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN 2018	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	TARGET TAHUN 2018	CAPAIAN TAHUN 2018	PERANGKAT DAERAH
				Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	persen	90		Kecamatan
				Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	persen	85		Kecamatan
				Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	persen	85	85	Kecamatan
				Persentase Belanja Pegawai	persen	49	42,51	SETDA
				Opini Pemeriksaan BPK	Predikat	1 (WTP)	1 (WTP)	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
				Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	persen	23	21,47	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
				Persentase PAD terhadap Belanja Daerah	persen	18	22,31	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
2. Terwujudnya derajat	Umur Harapan Hidup	Tahun	73,3	AKI per 100.000 kelahiran hidup	angka	85	108,36	Dinas Kesehatan

SASARAN DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN 2018	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	TARGET TAHUN 2018	CAPAIAN TAHUN 2018	PERANGKAT DAERAH
kesehatan masyarakat yang tinggi				AKB per 1000 kelahiran hidup	angka	8,2	8,28	Dinas Kesehatan
				Net Death Rate (permil)	angka	16,8	22,62	RSUD PS
				Total Fertility Rate (TFR)	%	-	-	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa
				Prevalensi Balita Gizi Buruk	persen	0,40	0,41	Dinas Kesehatan
				Ketersediaan Energi	kcal/kapita/hari	3.085	3.121	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan Dan Perikanan
				Ketersediaan Protein	gr/kapita/hari	72,4	87,36	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan Dan Perikanan
				Skor Pola Pangan Harapan	angka	93,4	91,7	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan Dan Perikanan
				Angka Kesakitan/Inside nce Rate (IR) DBD	angka	130	19,52	Dinas Kesehatan
				Prevalensi penderita HIV	persen	<0,5	0,19	Dinas Kesehatan

SASARAN DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN 2018	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	TARGET TAHUN 2018	CAPAIAN TAHUN 2018	PERANGKAT DAERAH
				Persentase prestasi olahraga tingkat propinsi (PPDA/Pekan Olah Raga Pelajar) yang diikuti	persen	27	34,21	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
3. Terwujudnya akses dan mutu pendidikan yang berkualitas	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,4	APK SD	angka	96,2	98,45	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
				APK SMP	angka	95,2	97,83	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
				APM SD	angka	84,45	89,55	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
				APM SMP	angka	67,9	77,33	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
				Angka Melanjutkan ke SMP	angka	100	109,61	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
				Angka Melanjutkan ke SLTA	angka	100	108,54	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
				Angka Rata-Rata Lama Sekolah	angka	8,89	9,35	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
				Peringkat rata-rata nilai USM SD/MI	Angka (SD)	Ranking III DIY	Ranking IV DIY	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

SASARAN DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN 2018	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	TARGET TAHUN 2018	CAPAIAN TAHUN 2018	PERANGKAT DAERAH
				Peringkat rata-rata nilai UN SMP/MTs	Angka (SMP)	Ranking II DIY	Ranking III DIY	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
				Jumlah Prestasi Non Akademik Tk Nasional	Buah	5	8	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
				Persentase kelulusan SD	persen	100	100	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
				Persentase kelulusan SMP	persen	100	100	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
				Angka putus sekolah SD	angka	0,02	0,01	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
				Angka putus sekolah SMP	angka	0,02	0,02	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
				APK PAUD	angka	98,8	107,11	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
				Persentase Peningkatan Pemustaka yang berkunjung ke Perpustakaan	persen	30	41	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
4. Turunnya Jumlah Masyarakat Kurang Mampu	Angka kemiskinan	Persen	12,13	Angka Pengangguran	angka	2,2	2,72	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				Nilai Tukar Petani	angka	101,6	103,16	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan

SASARAN DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN 2018	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	TARGET TAHUN 2018	CAPAIAN TAHUN 2018	PERANGKAT DAERAH
								Dan Perikanan
				Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	persen	12,75	7,29	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Indeks Desa Membangun	Jumlah Desa Mandiri	20	22	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5. Terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,4	Pertumbuhan Ekspor	persen	7	13,96	Dinas Perdagangan
				Jumlah Pasar Tipe A	unit	1	1	Dinas Perdagangan
				Pertumbuhan PDRB Sub Kategori Perdagangan	persen	4,76	6,02	Dinas Perdagangan
				Pertumbuhan Investasi	persen	8,08	11,85	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian
				Percepatan Belanja Pemerintah	persen	65	66,7	Badan Keuangan dan Aset Daerah

SASARAN DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN 2018	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	TARGET TAHUN 2018	CAPAIAN TAHUN 2018	PERANGKAT DAERAH
	Pemerataan Pendapatan	Angka	0,3093	Upah Minimum Kabupaten	Rupiah	1.527.150	1.649.800	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian
				Jumlah Usaha Mikro yang Naik Kelas	unit	180	183	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian
				Peningkatan tingkat Kesehatan Koperasi	unit	10	10	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian
				Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Kelas Kelompok Tani	Kelompok	31	69	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan Dan Perikanan
6. Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing dan unggul	Pertumbuhan jumlah kunjungan wisata	Persen	7	Jumlah Kunjungan Wisatawan	orang	3.644.083	4.204.422	Dinas Pariwisata
				Lama Tinggal Wisatawan	hari	1,9	1,9	Dinas Pariwisata
7. Terciptanya industri kreatif yang berkualitas	Cakupan industri kreatif	Persen	35	Pertumbuhan industri	persen	1,7	3,47	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian

SASARAN DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN 2018	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	TARGET TAHUN 2018	CAPAIAN TAHUN 2018	PERANGKAT DAERAH
8. Terpenuhi-nya kebutuhan pangan masyarakat	Pertumbuhan produksi tanaman pangan	Persen	0,1015	Produksi Tanaman Pangan (padi, jagung, kedelai)	ton	231.560,21	216.152	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
	Pertumbuhan produksi tanaman hortikultura	Persen	1,05	Produksi Tanaman Hortikultura (bawang merah, cabai merah, pisang)	ton	6.553,93	15.635	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
	Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan	Persen	0,20	Produksi tanaman Perkebunan (tembakau, tebu, kelapa)	ton	14.524,09	14.526	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
	Pertumbuhan produksi daging (sapi, kambing, domba, kuda, unggas)	Persen	0,7	Peningkatan Produksi daging (sapi, kambing, domba, kuda, unggas)	ton	14.398,44	14.855,73	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
9. Terpenuhi-nya kebutuhan perikanan masyarakat	Pertumbuhan produksi perikanan	Persen	1,35	Peningkatan Produksi Perikanan	ton	13.022	13.059	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
10. Terpenuhi-nya sarana-prasarana publik dan prasarana	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan	Klasifikasi	74	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap	persen	74,58	74,58	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman

SASARAN DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN 2018	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	TARGET TAHUN 2018	CAPAIAN TAHUN 2018	PERANGKAT DAERAH
dasar masyarakat	Infrastruktur			Persentase Gedung Pemerintah Kondisi Baik	persen	82	84	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Persentase kecukupan air irigasi	persen	81,66	80,44	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Persentase Kawasan kumuh perkotaan yang tertangani	persen	80	92,06	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Persentase penurunan kecelakaan lalu lintas	persen	1,83	1,99	Dinas Perhubungan
11. Terwujudnya lingkungan hidup yang kualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	50	Indeks Kualitas Air (IKA)	angka	40	34,67	Dinas Lingkungan Hidup
				Indeks Kualitas Udara (IKUd)	angka	65	85,66	Dinas Lingkungan Hidup
				Indeks Tutupan Lahan	angka	40,21	43,15	Dinas Lingkungan Hidup
				Volume sampah yang tertangani	ribu m ³	440	440	Dinas Lingkungan Hidup
12. Terciptanya	Desa Tangguh	Desa	25,34	Persentase	persen	98	100	Badan

SASARAN DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN 2018	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	TARGET TAHUN 2018	CAPAIAN TAHUN 2018	PERANGKAT DAERAH
kesadaran masyarakat dalam kesiap-siagaan bencana	Bencana			kecepatan Reaksi Tanggap Darurat Bencana yang memenuhi respon time 15 menit				Penanggulangan Bencana Daerah
				Persentase Sekolah Siaga Bencana	persen	3,7	4,25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Persentase Relokasi Warga	persen	45,46	36,36	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Persentase penanganan banjir	persen	27,34	28,84	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
13. Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Presentase kesesuaian pemanfaatan ruang	Persen	70,35	Persentase dokumen tata ruang yang sudah diperdakan	dokumen	2	2	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
				Persentase cakupan pengendalian tata ruang	persen	72	72	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
14. Terwujudnya ketentraman dan ketertiban	Angka Kriminalitas	Persen	0,035	Jumlah intoleransi di masyarakat	kasus	0	0	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri

SASARAN DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN 2018	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	TARGET TAHUN 2018	CAPAIAN TAHUN 2018	PERANGKAT DAERAH
masyarakat				Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3	persen	100	100	Sat Pol PP
				Rasio kekerasan Perempuan dan Anak	Rasio	0,38	0,73	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Jumlah Pemuda Pelopor	orang	4	5	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
15. Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Angka	60	Cakupan Perlindungan Warisan Budaya	persen	21	100,23	Dinas Kebudayaan
				Jumlah Desa Budaya	Desa	14	-	Dinas Kebudayaan

Evaluasi kinerja sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pada Lampiran E.60 terdapat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 146. Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2018

Sasaran Pembangunan Tahunan Kabupaten

1. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								III		IV						
1	4	5		8		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				2.670.744.000		2.335.860.500		1.220.749.597		1.854.088.459	0	1.854.088.459	79,37%		BAPPEDA
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkanbran				1.030.949.000		851.410.500		565.753.347		760.273.934	0	760.273.934	89,30%		BAPPEDA
		pembayaran rekening internet		12		12		9		12		12	0	100,00%		BAPPEDA
		pembayaran rekening telepon		12		12		9		12		12	0	100,00%		BAPPEDA
		langganan surat kabar		12		12		9		12		12	0	100,00%		BAPPEDA
		Honorarium pegawai kontrak		204		204		119		187		187	0	91,67%		BAPPEDA
		materai dan cek		2		2		1		2		2	0	100,00%		BAPPEDA
		pembayaran honor pengelola keuangan, barang, kepegawalan		12		12		9		12		12	0	100,00%		BAPPEDA
		pengadaan alat listrik		3		3		2		3		3	0	100,00%		BAPPEDA
		cinderamata		1		1		1		1		1	0	100,00%		BAPPEDA
		penyediaan alat dan bahan pembersih		4		4		4		4		4	0	100,00%		BAPPEDA
		barang celakan		6		6		5		6		6	0	100,00%		BAPPEDA
		pakaian dinas		17		17		17		17		17	0	100,00%		BAPPEDA
		jasa tenaga harian lepas		20		20		10		20		20	0	100,00%		BAPPEDA
		jumlah pengiriman surat/dokumen		10		10		4		3		3	0	30,00%		BAPPEDA
		jaminan kesehatan		204		204		6		204		204	0	100,00%		BAPPEDA
		penggandaan		1		1		1		1		1	0	100,00%		BAPPEDA
		belanja ATK		12		12		9		12		12	0	100,00%		BAPPEDA
		publikasi/sosialisasi		2		2		2		2		2	0	100,00%		BAPPEDA

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								III		IV						
1	4	5		8		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		alat rumah tangga		1		1		1		1		1	0	100,00%		BAPPEDA
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi				1.639.795.000		1.484.450.000		654.996.250		1.093.814.525	0	1.093.814.525	73,68%		BAPPEDA
		jamuan makan minum kegiatan		400		400		90		395		395	0	98,75%		BAPPEDA
		perjalanan dinas luar daerah		551		495		124		435		435	0	87,88%		BAPPEDA
		jamuan rapat		1613		1613		955		1555		1555	0	96,40%		BAPPEDA
		perjalanan dinas dalam daerah		1254		1210		290		755		755	0	62,40%		BAPPEDA
		jamuan tamu		1100		1100		350		984		984	0	89,45%		BAPPEDA
		sewa tempat		3		3		1		3		3	0	100,00%		BAPPEDA
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai AKIP		82	22.507.649.296	82,00	31.283.255.296		20.344.595.417	81,46	27.939.167.054	81,46	27.939.167.054	99,34%	89,31%	BKAD
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran				20.551.985.821							0	0			BKAD
		Pengadaan perangkai/materai	Lembar	1374		1374	29.219.926.821	573	19.103.367.585	970	25.959.675.387	970	25.959.675.387	70,60%	88,84%	BKAD
		Pengadaan buku cek	Buku	30		30		19		30		30	0	100,00%		BKAD
		Jumlah pengiriman Surat	Bulan	12		12		9		12		12	0	100,00%		BKAD
		Jumlah paket jasa listrik dan penerangan jalan umum	Bulan	8		12		9		12		12	0	100,00%		BKAD
		Macam barang cetakan	Macam	4		4		2		4		4	0	100,00%		BKAD
		Jumlah paket jasa telepon	bulan	12		12		9		12		12	0	100,00%		BKAD
		Perpanjangan STNK kendaraan dinas	Bulan	12		12		9		12		12	0	100,00%		BKAD
		Balik Nama Kendaraan Hibah dari KPK	Unit	3		0		0		0		0	0			BKAD
		Jumlah alat kebersihan kantor	Bulan	12		12		9		12		12	0	100,00%		BKAD
		Jumlah paket alat tulis kantor	bulan	12		12		9		12		12	0	100,00%		BKAD
		Jumlah paket komponen instalasi listrik	paket	4		4		2		4		4	0	100,00%		BKAD
		Langganan surat kabar	bulan	12		12		9		12		12	0	100,00%		BKAD
		Buku peraturan perundang-undangan	buku	2		2		0		2		2	0	100,00%		BKAD
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi				1.432.477.875							0	0			BKAD
		Makan dan minum untuk rakor dan tamu (dus)	dus	2520		2520	1.540.142.875	1360	897.284.132	1490	1.456.760.807	1490	1.456.760.807	59,13%	94,59%	BKAD
		Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah	kali	11272		12000		7850		10250		10250	0	85,42%		BKAD
		Jumlah perjalanan dinas ke dalam daerah	kali	407		1530		170		590		590	0	38,56%		BKAD

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								III		IV						
1	4	5		8		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkanbran	Pembayaran honorarium dan premi BPJS	ob	324	523.185.600	324	523.185.600	190	343.943.700	324	522.730.860	324	522.730.860	100,00%	99,91%	BKAD
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai AKIP	nilai	85	4.340.554.500	85	4.171.555.400	133	955.039.478	35	982.400.302	35	982.400.302	41,18%	23,55%	BPBD
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkanbran				717.392.500						0		0			BPBD
		Honor pengelola keuangan dan barang	bulan	12		12	542.943.400	3	105.424.328	3	155.108.073	3	155.108.073	25,00%	28,57%	BPBD
		Jumlah pembayaran listrik, air dan telpon	bulan	12		12		3		3		3	0	25,00%		BPBD
		jumlah kebutuhan ATK, alat kebersihan, logistik, penggandaan, cetakan	bulan	12		12		3		3		3	0	25,00%		BPBD
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi				297.866.000						0		0			BPBD
		Belanja Perjalanan Dinas	ok	100		100	303.316.000	35	104.115.150	23	58.384.149	23	58.384.149	23,00%	19,25%	BPBD
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat, tamu dan operasional	ok	300		300		86								BPBD
	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkanbran	jumlah pembayaran honor tenaga kontrak	bln	12	3.325.296.000	3	3.325.296.000	3	745.500.000	3	768.908.080	3	768.908.080	100,00%	23,12%	BPBD
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Nilai AKIP			1.797.674.235	81	1.809.122.235		935.500.297	81	1.517.301.770	80,72	1.517.301.770	99,65%	83,87%	BKPP
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkanbran				282.335.135						0					BKPP
		Jumlah pembayaran asuransi		33		33	303.283.135	21	183.472.997	30	265.483.770	30	265.483.770	90,91%	87,54%	BKPP
		Jumlah alat tulis kanbr		52		52		52		60		60		115,38%		BKPP
		Jumlah pembayaran pajak surat-surat kendaraan dines		15		16		12		15		15		93,75%		BKPP
		Jumlah pembayaran honor non PNS		33		33		24		33		33		100,00%		BKPP
		Jumlah peralatan kebersihan kanbr		14		15		14		22		22		146,67%		BKPP
		Jumlah barang cetakan		8		9		8		10		10		111,11%		BKPP
		Jumlah buku peraturan dan perundang-undangan		15		15		11		16		16		106,67%		BKPP
		Jumlah penyediaan benda pos		1775		1775		1099		1580		1580		89,01%		BKPP

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								III		IV						
1	4	5		8		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Jumlah pembayaran honor adm pengebla keuangan PD		120		120		90		120		120		100,00%		BKPP
		Jumlah Penggandaan		257320		100230		29393		61144		61144		61,00%		BKPP
		Jumlah pembayaran jasa telekomunikasi		12		12		9		12		12		100,00%		BKPP
		Jumlah barang bacaan/koran		12		12		9		12		12		100,00%		
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi				1.515.339.100							0				BKPP
		Jumlah penyelenggaraan rapat dan penerimaan tamu		1100		1360	1.505.839.100	948	752.027.300	1204	1.251.818.000	1204	1.251.818.000	88,53%	83,13%	BKPP
		Jumlah perjalanan dinas luar daerah		582		856		527		698		698	0	81,54%		BKPP
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah		856		324		240		337		337	0	104,01%		BKPP
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Nilai AKIP			1.087.783.900		1.086.131.900				1.056.102.006		1.056.102.006		97,24%	DINAS KEBUDAYAAN
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Tersedianya jasa, peralatan dan perlengkapan penunjang operasional kantor			560.624.000		550.422.000		428.847.000		531.577.686		531.577.686		96,58%	DINAS KEBUDAYAAN
		Jumlah pembayaran Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa	OK	220	5.600.000		-									DINAS KEBUDAYAAN
		Jumlah Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan dan Barang	Bulan	1	10.000.000	12	28.200.000									DINAS KEBUDAYAAN
		Jumlah Pembayaran Pegawai Tidak Tetap	Bulan	1	30.000.000	12	153.600.000									DINAS KEBUDAYAAN
		Jumlah Alat Tulis Kantor	Bulan	12	4.800.000	12	28.731.000									DINAS KEBUDAYAAN
		Jumlah Perangko, Materai dan Benda Pos	Lembar	1	600.000	1330	7.200.000									DINAS KEBUDAYAAN
		Jumlah Alat Kebersihan dan bahan pembersih	Bulan	5	7.750.000	12	4.800.000									DINAS KEBUDAYAAN
		Jumlah Bahan Baku Bangunan	Paket	18	1.350.000	1	10.000.000									DINAS KEBUDAYAAN
		Jumlah pembayaran Tagihan telepon	Bulan	84	4.032.000	12	10.800.000									DINAS KEBUDAYAAN
		Jumlah Tagihan air	Bulan	1	2.440.000	0	-									DINAS KEBUDAYAAN
		Jumlah Tagihan listrik	Bulan	4	9.344.000	12	1.240.000									DINAS KEBUDAYAAN
		Jumlah Langganan Surat Kabar	Bulan	49124	9.837.000	12	2.760.000									DINAS KEBUDAYAAN
		Jumlah Belanja Faksimil/Internet	Bulan	1330	7.200.000	0	-									DINAS KEBUDAYAAN
		Jumlah Belanja Publikasi	Kali	24500	245.000.000	12	2.440.000									DINAS KEBUDAYAAN
		Jumlah Pembayaran PBB	Kali	12	840.000	1	600.000									DINAS KEBUDAYAAN

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								III		IV						
1	4	5		8		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Jumlah premi asuransi	Bulan	12	6.000.000	0	-									DINAS KEBUDAYAAN
		Jumlah BBM/Gas dan pelumas	Liter	6	3.600.000	24500	244.600.000									DINAS KEBUDAYAAN
		Jumlah Pajak kendaraan	Unit	44	1.320.000	5	4.400.000									DINAS KEBUDAYAAN
		Jumlah barang cetakan	Macam	12	10.800.000	7	9.344.000									DINAS KEBUDAYAAN
		Jumlah Penggandaan	Lembar	12	2.760.000	49124	9.837.000									DINAS KEBUDAYAAN
		Jumlah sewa angkutan darat	Unit	12	28.731.000	6	3.600.000									DINAS KEBUDAYAAN
		Jumlah makan minum kegiatan	OM	5	4.400.000	44	5.600.000									DINAS KEBUDAYAAN
		Jumlah pemeliharaan instalasi	LS	84	134.400.000	1	20.000.000									DINAS KEBUDAYAAN
		Jumlah pembayaran honor harian lepas	OH	108	29.820.000	18	1.350.000									DINAS KEBUDAYAAN
		Jasa Petugas Lapangan	OH			44	1.320.000									DINAS KEBUDAYAAN
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Terselenggara rapat, koordinasi dan konsultasi			527.159.900		535.709.900				524.524.320		524.524.320		97,91%	DINAS KEBUDAYAAN
		Penyelenggaraan rapat	6000 om	6000	27.500.000	950	20.700.000	848	20.481.600						0,00%	DINAS KEBUDAYAAN
		Penerimaan Tamu				250	10.800.000									DINAS KEBUDAYAAN
		Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah	324 kl	324	22.399.900	324	26.949.900	128	15.852.000						0,00%	DINAS KEBUDAYAAN
		Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	54 kl	54	477.260.000	95	477.260.000	83	437.890.720						0,00%	DINAS KEBUDAYAAN
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.729.410.500		1.849.410.500		1.234.835.380		1.836.845.897	0	1.836.845.897		99,32%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran				375.926.500		495.926.500		301.987.230		489.761.997	0	489.761.997		98,76%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
		Jumlah materai	Lembar													DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
		Jumlah perangko	Lembar													DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
		Jumlah pengiriman surat	kali													DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
		Jumlah paket jasa telpon	paket													DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
		Belanja STNK	unit													DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
		Jumlah Honor Pengelola Keuangan (12 Orang 12 bulan)	ob (orang.bulan)													DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
		Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Tahun							1	14.999.900					DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
		Jumlah paket ATK	Tahun							1	1.397.814.500					DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								III		IV						
1	4	5		8		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Jumlah paket Barang Cetak	Tahun							1	1.069.376.320					DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
		Jumlah Penggadaan	Tahun													DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
		Jumlah Belanja Listrik dan Elektronika	Tahun							1	11.990.000					DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
		Jumlah paket Surat Kabar/Majalah	paket													DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
		Belanja STNK	Blin													DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
		Belanja Pembelian Bendera														DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Om							220	7.700.000					DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
		Belanja Makanan dan Minuman Lembur	Om							600	15.000.000					DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi				568.684.000		568.684.000		438.184.150		568.663.900		568.663.900		100,00%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
		Jumlah paket makanan dan Minuman untuk rapat	Om							950	16.625.000					DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
		Jumlah paket makanan dan Minuman untuk Tamu	Om							1300	31.374.900					DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
		Jumlah paket perjalanan keluar daerah	Ok							1080	90.230.000					DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
		Jumlah paket perjalanan kedalam daerah	Ok							359	430.434.000					DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkanbran				784.800.000		784.800.000		494.664.000		778.420.000		778.420.000		99,19%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
		Honorarium Pegawai Honorir / Tidak Tetap	Orang Bulan							11	778.420.000					DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pengelolaan keuangan, barang dan informasi kesehatan			3.905.867.400		3.905.867.400	9	744.925.835	9	1.554.019.389	9	1.554.019.389		39,79%	DINAS KESEHATAN
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkanbran	- Terlaksananya pengelolaan keuangan dan barang sesuai ketentuan, - Terciptanya lingkungan kantor Jamkesda dan Puskyg bersih dan nyaman, - Terpenuhinya makanan pasien ranap di Puskesmas		12	1.945.125.000	12	1.945.125.000	3	416.100.735	3	651.569.539	3	651.569.539	25,00%	33,50%	DINAS KESEHATAN
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	- Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat, terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah.		12	1.040.642.400	12	1.040.642.400	3	186.825.100	3	553.149.850	3	553.149.850	25,00%	53,15%	DINAS KESEHATAN

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								III		IV						
1	4	5		8		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkanbran	- Terperuhinya kebutuhan lahan pelayanan kesehatan di Pusk., Tercipltanya lingkungan kantor dinas, lab.,Jamkesda dan Pusk yang arran dan kondusif, Terperuhinya keb. transportasi di Puskesmas.		12	920.100.000	12	920.100.000	3	142.000.000	3	349.300.000	3	349.300.000	25,00%	37,96%	DINAS KESEHATAN
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Mencapai Nilai AKIP		90	1.248.364.900	82	1.248.364.900			81,33	1.197.760.031	81,33	1.197.760.031	99,18%	95,95%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkanbran	Kelancaran Tugass pokok fungsi Kantor		100%	544.590.900	0,88	544.590.900			0,9	464.284.295	0,9	464.284.295	102,27%	85,25%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Kelancaran Tugass pokok fungsi Kantor		80%	703.774.000	0,88	703.774.000			0,97	733.475.736	0,97	733.475.736	110,23%	104,22%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Penyediaan jasa pengelola pelayanan perkanbran	Kelancaran Tugass pokok fungsi Kantor				1										
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	capaian nilai AKIP	Nilai			82	1.685.300.084		733.522.348		1.532.009.681		1.532.009.681	0,00%	90,90%	DINAS KOPERASI UKMP
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkanbran				140.509.084		146.109.084		79.560.626		137.118.118		137.118.118		93,85%	DINAS KOPERASI UKMP
		jumlah bulan langganan surat kabar	buah	12		12		9		12		12		100,00%		DINAS KOPERASI UKMP
		jumlah ATK	jenis	37		37		37		37		37		100,00%		DINAS KOPERASI UKMP
		terperuhinya jasa administrasi keuangan	ob	144		144		108		144		144		100,00%		DINAS KOPERASI UKMP
		jumlah bulan pembayaran listrik	bulan	12		12		9		12		12		100,00%		DINAS KOPERASI UKMP
		jumlah STNK	buah	12		12		9		20		20		166,67%		DINAS KOPERASI UKMP
		jumlah alat listrik dan elektronika	jenis	8		8		8		8		8		100,00%		DINAS KOPERASI UKMP
		jumlah peranko dan benda pos lainnya	lembar	342		642		230		642		642		100,00%		DINAS KOPERASI UKMP
		jumlah jenis cetak dokumen	jenis	5		5		2		5		5		100,00%		DINAS KOPERASI UKMP
		jumlah penggandaan dokumen	lembar	75000		94291		57000		87971		87971		93,30%		DINAS KOPERASI UKMP
		jumlah cetak profil	ex									0				DINAS KOPERASI UKMP
		terbayarnya rek telpon		12		12		9		12		12		100,00%		DINAS KOPERASI UKMP
		tersedianya peralatan kebersihan dan pembersih		25		25		20		25		25		100,00%		DINAS KOPERASI UKMP
		terisinya tabung gas		12		12		9		11		11		91,67%		DINAS KOPERASI UKMP
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi				1.092.551.000		1.539.191.000		653.961.722		1.394.891.563	0	1.394.891.563		90,62%	DINAS KOPERASI UKMP

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								III		IV						
1	4	5		8		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	paket	646		592		133		592		592		100,00%		DINAS KOPERASI UKMP
		terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	ls	1077		1715		800		1715		1715		100,00%		DINAS KOPERASI UKMP
		perjalanan dinas ke luar negeri	ls			1				1						DINAS KOPERASI UKMP
		jumlah makan minum rapat	orang	1013		1250		850		1250		1250		100,00%		DINAS KOPERASI UKMP
		jumlah makan minum tamu	orang	1050		1150		225		1150		1150	0	100,00%		DINAS KOPERASI UKMP
	Penyedia jasa pengelola Pelayanan Perkanbran															DINAS KOPERASI UKMP
		tersedianya gas, air galon dan peralatan kebersihan	jenis													DINAS KOPERASI UKMP
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Nilai AKIP	82			82	6.819.238.450		4.612.745.989	82	6.426.394.581	82	6.426.394.581	100,00%	94,24%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkanbran				6.378.631.250							0				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Pembelanjaan Listrik dan Telepon Kantor	12			12	6.175.630.450	9	4.188.245.591	12	5.832.077.857	12	5.832.077.857	100,00%	94,44%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Pembayaran Upah Pungut Masyarakat	12			12		9		12		12		100,00%		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Pembelanjaan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	12			12		9		12		12		100,00%		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Pembayaran Honor Tim Pengelola Keuangan dan Barang	132			132		99		132		132		100,00%		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Pembelanjaan Pemeliharaan Peralatan	1			1		0,75		1		1		100,00%		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Pembelanjaan Alat Tulis Kantor	12			12		9		12		12		100,00%		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Pembelanjaan Pemeliharaan Taman	1			1		0,7		1		1		100,00%		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Pembayaran Uang Lembur PNS	1200			1569		1136		1569		1569		100,00%		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Pembelanjaan Cetak dan Penggandaan	12			12		9		12		12		100,00%		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Pembelanjaan Peralatan Listrik dan Elektronik	12			12		9		12		12		100,00%		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Pembayaran Honor Pegawai Honorir	3125			2867		2039		2818		2818		98,29%		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Pembelanjaan Materi	1525			1525		821		821		821		53,84%		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi				590.000.000							0				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Pembelanjaan Makanan dan Minuman untuk Rapat Koordinasi	3300			3300	643.608.000	1704	424.500.398	1704	594.316.724	1704	594.316.724	51,64%	92,34%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								III		IV						
1	4	5		8		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pembelanjaan Makanan dan minuman untuk jamuan tamu	1000			400		170		170		170		42,50%		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Pembelanjaan Perjalanan Dinas Luar Daerah	1 th			1		0,75		1		1		100,00%		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Pembelanjaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2900			2700		1447		1447		1447		53,59%		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Nilai AKIP	Angka	80%	3.250.219.200	82	2.921.936.200		2.111.461.925	82	2.832.943.693	82	2.832.943.693	100,00%	96,95%	DINAS PARIWISATA
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	bulan	12	591.045.200	12	511.020.200	9 bulan	430.451.482	12	482.479.690	12	482.479.690	100,00%	94,41%	DINAS PARIWISATA
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah rakor dan konsultasi dalam dan luar daerah	bulan	12	1.081.174.000	12	970.216.000	9 bulan	549.526.443	12	910.724.003	12	910.724.003	100,00%	93,87%	DINAS PARIWISATA
	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkanbran	Jumlah jasa pelayanan perkanbran	ob	972	1.578.000.000	972	1.440.700.000	759 ob	1.131.484.000	972	1.439.740.000	972	1.439.740.000	100,00%	99,93%	DINAS PARIWISATA
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	persen	100	1.082.350.150	100	1.091.049.650		704.748.426	100	1.050.492.279	100	1.050.492.279	100,00%	96,28%	DINAS PENANAMAN MODAL PT
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Jumlah orang/pengelola administrasi keuangan)/bulan yang terbayar honornya	ob	120	157.051.800	120	157.058.800	90 ob	93.986.761	120	139.005.316	120	139.005.316	100,00%	88,51%	DINAS PENANAMAN MODAL PT
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah orang/hari yang melaksanakan rapat dan perjalanan dinas	oh	1500	627.814.750	1500	640.439.750	1080 oh	410.370.054	1428	630.675.347	1428	630.675.347	95,20%	98,48%	DINAS PENANAMAN MODAL PT
	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkanbran	Jumlah orang(pengelola pelayanan perkanbran)/bulan yang terbayar honor dan premi kesehatannya	ob	143	297.483.600	143	293.551.100	117 ob	200.391.611	143	280.811.616	143	280.811.616	100,00%	95,66%	DINAS PENANAMAN MODAL PT
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian nilai AKIP	persen	82	3.016.123.012	82	3.147.911.335		1.558.283.820	80,83	2.556.585.517	80,83	2.556.585.517	98,57%	81,22%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA & OLAH RAGA
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran				2.005.851.757		2.137.040.080		975.169.382		1.624.607.961	0	1.624.607.961		76,02%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA & OLAH RAGA
		jumlah sewa lahan	paket	2		21				18		18	0	85,71%		DINAS PENDIDIKAN PEMUDA & OLAH RAGA
		jumlah rekening	bulan	12		12		9		12		12	0	100,00%		DINAS PENDIDIKAN PEMUDA & OLAH RAGA
		jumlah kendaraan	unit	97		97				80		80	0	82,47%		DINAS PENDIDIKAN PEMUDA & OLAH RAGA
		jumlah pengelola keuangan dan BMD	orang	69		69				69		69	0	100,00%		DINAS PENDIDIKAN PEMUDA & OLAH RAGA
		jumlah bahan dan peralatan	paket	18		18		14		18		18	0	100,00%		DINAS PENDIDIKAN PEMUDA & OLAH RAGA
		jumlah jasa servis	paket	18		18		14		18		18	0	100,00%		DINAS PENDIDIKAN PEMUDA & OLAH RAGA

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								III		IV						
1	4	5		8		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		jumlah materai dan benda pos	paket	18		18		12		18		18	0	100,00%		DINAS PENDIDIKAN PEMUDA & OLAH RAGA
		jumlah ATK	buah	1900		1860		1400		1860		1860	0	100,00%		DINAS PENDIDIKAN PEMUDA & OLAH RAGA
		jumlah barang cetakan	paket	18		18		14		18		18	0	100,00%		DINAS PENDIDIKAN PEMUDA & OLAH RAGA
		jumlah komponen instalasi listrik	paket	18		18		14		18		18	0	100,00%		DINAS PENDIDIKAN PEMUDA & OLAH RAGA
		jumlah bendera, plakat, piagam dan cinderamata	paket	18		18		14		18		18	0	100,00%		DINAS PENDIDIKAN PEMUDA & OLAH RAGA
		jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan	paket	18		18		14		18		18	0	100,00%		DINAS PENDIDIKAN PEMUDA & OLAH RAGA
		jumlah jasa kebersihan kantor	paket	12		12		9		12		12	0	100,00%		DINAS PENDIDIKAN PEMUDA & OLAH RAGA
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi				477.975.755		477.975.755		213.064.438		407.877.556	0	407.877.556		85,33%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
		jumlah paket makan minum untuk Kegiatan Dinas dan UPT	orang	15320		12340		11490		12150		12150	0	98,46%		DINAS PENDIDIKAN PEMUDA & OLAH RAGA
		jumlah perjalanan dinas luar daerah untuk dinas dan upt	orang	130		90		90		90		90	0	100,00%		DINAS PENDIDIKAN PEMUDA & OLAH RAGA
		jumlah biaya perjalanan dines dalam daerah untuk dinas dan upt	orang	345		275		168		230		230	0	83,64%		DINAS PENDIDIKAN PEMUDA & OLAH RAGA
	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	jumlah jasa pelayanan kambr dan stadion (29 orang)	bulan	12	532.295.500	12	532.895.500	9	370.050.000	12	524.100.000	12	524.100.000	100,00%	98,35%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA & OLAH RAGA
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Nilai Akip	Persen	82%	2.076.921.300	82	2.119.309.550		1.565.356.656	82	2.104.221.430	82	2.104.221.430	100,00%	99,29%	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KB PMD
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Tersedianya bahan logistik kantor	Persen	100	1.054.893.400	100	1.054.893.400	70	741.950.104	100	1.041.322.736	100	1.041.322.736	100,00%	98,71%	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KB PMD
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah makan minum rakor dan konsultasi	Persen	100	940.627.900	100	953.016.150	82	764.206.552	100	952.293.694	100	952.293.694	100,00%	99,92%	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KB PMD
	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Honor tenaga keamanan	ob	44	81.400.000	44	111.400.000	32	59.200.000	44	110.605.000	44	110.605.000	100,00%	99,29%	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KB PMD
												0	0			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian nilai AKIP	Nilai		1.121.249.400	80	1.066.279.500		531.926.270	81,62	899.313.903	81,62	899.313.903	102,03%	84,34%	DINAS PERTANAHAN TATA RUANG
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Jumlah Jenis ATK	Jenis ATK	24	423.265.400	24	397.745.500	24	225.136.638	24	314.574.494	24	314.574.494	100,00%	79,09%	DINAS PERTANAHAN TATA RUANG
		Jenis alat listrik dan elektronik	Jenis	20		20		19		20		20	0	100,00%		DINAS PERTANAHAN TATA RUANG
		Jumlah belanja materai	Lembar	850		850		667		868		868	0	102,12%		DINAS PERTANAHAN TATA RUANG
		Jenis peralatan kebersihan	Jenis	24		24		24		24		24	0	100,00%		DINAS PERTANAHAN TATA RUANG
		Jumlah pengisian tabung gas	Kali	15		15		9		14		14	0	93,33%		DINAS PERTANAHAN TATA RUANG
		Jumlah bulan pembayaran telepon	Bulan	12		12		9		12		12	0	100,00%		DINAS PERTANAHAN TATA RUANG

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								III		IV						
1	4	5		8		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Jumlah bulan pembayaran air	Bulan	12		12		9		12		12	0	100,00%		DINAS PERTANAHAN TATA RUANG
		Jumlah bulan pembayaran jasa listrik	Bulan	12		12		9		12		12	0	100,00%		DINAS PERTANAHAN TATA RUANG
		Jumlah eksemplar pembayaran surat kabar	Eksemplar	24		24		18		24		24	0	100,00%		DINAS PERTANAHAN TATA RUANG
		Jumlah bulan pembayaran jasa internet	Bulan	12		12		9		12		12	0	100,00%		DINAS PERTANAHAN TATA RUANG
		Jumlah barang cetakan	Rim	100		100		36		49		49	0	49,00%		DINAS PERTANAHAN TATA RUANG
		Jumlah belanja pengadaan	Kegiatan	25		25		16		25		25	0	100,00%		DINAS PERTANAHAN TATA RUANG
		Jumlah Penggandaan	Lembar			356825				353293						DINAS PERTANAHAN TATA RUANG
		Sampah terangkut	Kali	12		12		9		12		12	0	100,00%		DINAS PERTANAHAN TATA RUANG
		Partisipasi pameran dan karnaval	Kali	3		3		2		3		3	0	100,00%		DINAS PERTANAHAN TATA RUANG
		Spanduk, papan nama	Unit	30		30		10		26		26	0	86,67%		DINAS PERTANAHAN TATA RUANG
		Konsumsi Rapat	Dos	200		200		261		681		681	0	340,50%		DINAS PERTANAHAN TATA RUANG
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Tersedianya makan dan minum rapat	Dos	400	450.184.000	400	450.184.000	309	152.539.632	384	372.789.409	384	372.789.409	96,00%	82,81%	DINAS PERTANAHAN TATA RUANG
		Tercapainya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	OP	199		169		21		52		52	0	30,77%		DINAS PERTANAHAN TATA RUANG
		Tercapainya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	OP	643		643		38		321		321	0	49,92%		DINAS PERTANAHAN TATA RUANG
	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Belanja pegawai honor non PNS	OB	72	247.800.000	66	218.350.000	47	154.250.000	72	211.950.000	72	211.950.000	109,09%	97,07%	DINAS PERTANAHAN TATA RUANG
		Honorarium pegawai kontrak ahli	OB	24		22		20		24		24	0	109,09%		DINAS PERTANAHAN TATA RUANG
		Honorarium tenaga operator komputer	OB	12		11		8		12		12	0	109,09%		DINAS PERTANAHAN TATA RUANG
		Honorarium pegawai kontrak (Resepsionis)	OB	12		11		8		12		12	0	109,09%		DINAS PERTANAHAN TATA RUANG
		Honorarium Arsiparis	OB	12		11		8		12		12	0	109,09%		DINAS PERTANAHAN TATA RUANG
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Nilai AKIP	Angka	82	2.175.964.000	82	2.087.473.000		1.472.066.328	80,79	2.066.363.177	80,79	2.066.363.177	98,52%	98,99%	SATPOL PP
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih	jenis	10	126.738.000	10	130.131.000	8	72.500.660	10	116.257.210	10	116.257.210	100,00%	89,34%	SATPOL PP
		Jumlah materai	lembar	1750		1750		1105		1750		1750	0	100,00%		SATPOL PP
		Jumlah honor pengelola keuangan dan barang	Ob	120		120		90		120		120	0	100,00%		SATPOL PP
		Jumlah ATK	jenis	15		15		12		15		15	0	100,00%		SATPOL PP
		Jumlah Penggandaan	unit	42		160000		58959		155250		155250	0	97,03%		SATPOL PP
		Jumlah barang cetakan	jenis	7		7		6		7		7	0	100,00%		SATPOL PP
		Jumlah pajak kendaraan dinas	unit	42		42		19		42		42	0	100,00%		SATPOL PP

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								III		IV						
1	4	5		8		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Jumlah langganan surat kabar	bulan	12		12		9		12		12	0	100,00%		SATPOL PP
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Op	480	177.780.000	480	240.380.000	388	130.713.100	435	235.209.455	435	235.209.455	90,63%	97,85%	SATPOL PP
		Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	Op	40		40		33		40		40	0	100,00%		SATPOL PP
		Jumlah makan minum rapat	Om	2700		2700		1339		2275		2275	0	84,26%		SATPOL PP
	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Jumlah premi asuransi ketenagakerjaan dan kesehatan tenaga pramubhakti	Ob	1077	1.871.446.000	1077	1.716.962.000	741	1.268.852.568	1073	1.714.896.512	1073	1.714.896.512	99,63%	99,88%	SATPOL PP
		Jumlah honorarium Tenaga Pramubhakti	Ob	948		948		688		948		948	0	100,00%		SATPOL PP
		Jumlah honorarium Tenaga Kebersihan	Ob	12		12		9		12		12	0	100,00%		SATPOL PP
		Jumlah premi asuransi ketenagakerjaan dan kesehatan tenaga kebersihan	Ob	12		12		9		12		12	0	100,00%		SATPOL PP
												0	0			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Nilai AKIP			6.389.715.712	82	5.528.787.627			81,21	5.528.787.627	81,21	5.528.787.627	99,04%	100,00%	DINAS PERDAGANGAN
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran				509.500.000		474.884.107		276.036.838		474.884.107	0	474.884.107		100,00%	DINAS PERDAGANGAN
		Jumlah Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	2455 oh	13000		13000		13000		13000		13000	0	100,00%		DINAS PERDAGANGAN
		Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor	15 jenis	45		25		45		25		25	0	100,00%		DINAS PERDAGANGAN
		Jumlah Surat Kabar/ Majalah	270 lembar	1080		1080		1080		1080		1080	0	100,00%		DINAS PERDAGANGAN
		Jumlah Bulan Pembayaran Telepon	3 bulan	12		12		12		12		12	0	100,00%		DINAS PERDAGANGAN
		Jumlah Penyediaan Bendera/ Umbul2/Rumba	0 paket	1		1		1		1		1	0	100,00%		DINAS PERDAGANGAN
		Jumlah Jenis Alat Listrik dan Elektronika	5 jenis	10		15		10		15		15	0	100,00%		DINAS PERDAGANGAN
		Jumlah Tambah Daya Listrik	0 unit	2		3		2		3		3	0	100,00%		DINAS PERDAGANGAN
		Jumlah Jenis Barang Cetakan	15 jenis	30		26		30		26		26	0	100,00%		DINAS PERDAGANGAN
		Jumlah Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya	424 lembar	1700		1700		1700		1700		1700	0	100,00%		DINAS PERDAGANGAN
		Jumlah Penggandaan	19280 lembar	105000		110840		1E+05		110840		110840	0	100,00%		DINAS PERDAGANGAN
		Jumlah Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih	15 jenis	25		30		25		30		30	0	100,00%		DINAS PERDAGANGAN
		Jumlah Pemasangan Instalasi Telepon, Instalasi listrik dan instalasi air	0 unit	3		1		3		1		1	0	100,00%		DINAS PERDAGANGAN

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								III		IV						
1	4	5		8		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Jumlah Penyediaan Tas	74 unit	74		110		74		110		110	0	100,00%		DINAS PERDAGANGAN
		Jumlah Honor Pengelola Keuangan dan Barang	75 ob	300		312		300		312		312	0	100,00%		DINAS PERDAGANGAN
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi				981.360.100		1.012.748.955		506.424.100		1.012.748.955	0	1.012.748.955		100,00%	DINAS PERDAGANGAN
		Jumlah peserta kegiatan	825 orang	3247		3247		3247		3247		3247	0	100,00%		DINAS PERDAGANGAN
		Jumlah peserta rapat	455 orang	969		969		969		969		969	0	100,00%		DINAS PERDAGANGAN
		Jumlah peserta sosialisasi terkait perdagangan	150 orang	150		150		150		150		150	0	100,00%		DINAS PERDAGANGAN
		Jumlah pelaksana Perjalanan Dinas Dalam Daerah	65 op	1337		1337		1337		1337		1337	0	100,00%		DINAS PERDAGANGAN
		Jumlah pelaksana Perjalanan Dinas Luar Daerah	30 op	200		210		200		210		210	0	100,00%		DINAS PERDAGANGAN
	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkanbran				4.898.855.612		4.041.154.565		2.695.014.031		4.041.154.565	0	4.041.154.565		100,00%	DINAS PERDAGANGAN
		Jumlah pembayaran asuransi kesehatan bagi Tenaga Kontrak/PHL/Non PNS	0 ob	2520		0		2520		0		0	0			DINAS PERDAGANGAN
		Jumlah Pembayaran tenaga kontrak/ PHL/ Non PNS	495 ob	2520		2160		2520		2160		2160	0	100,00%		DINAS PERDAGANGAN
		Jumlah pembayaran sewa tanah untuk pasar (pasar imogiri 1, imogiri 2, imogiri 3, niten, ps hewan imogiri, angkrusari, piyungan, SRG Pendowoharjo, SRG Tirtonirmolo, PSG, pasar unggas bantu	8 Pasar/ Tahun	12		12		12		12		12	0	100,00%		DINAS PERDAGANGAN
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian nilai AKIP		0	403.828.800	863	468.828.800	559	315.091.351	822	429.285.559	822	429.285.559	95,25%	91,57%	KESBANGPOL
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkanbran	Jumlah materi, paket jasa telepon dan air pdam, jumlah STNK, paket jasa administrasi keuangan, paket kebersihan kantor, paket peralatan kerja, paket akk, paket celakan dan penggandaan, alat listrik dan elektronika, pakaet bacaan		0	120.423.800	12	185.423.800	9	83.742.851	12	161.478.225	12	161.478.225	100,00%	87,09%	KESBANGPOL
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah makanan dan minuman, perjalanan dinas dalam dan luar daerah			245.125.000	839	245.125.000	541	208.848.500	798	233.307.334	798	233.307.334	95,11%	95,18%	KESBANGPOL

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								III		IV						
								8		8b (APBDP 2018)		11		12		
1	4	5		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkanbran	Jumlah honor petugas kebersihan dan kpetugas keamanan			38.280.000	12	38.280.000	9	22.500.000	12	34.500.000	12	34.500.000	100,00%	90,13%	KESBANGPOL
												0	0			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Nilai AKIP		75	663.106.100	75	711.716.100	218.407.222		688.463.580		0	688.463.580		96,73%	INSPEKTORAT
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkanbran			100	356.056.100	100	404.666.100	75	90.926.364		383.514.122	0	383.514.122		94,77%	INSPEKTORAT
		Jumlah Jasa Premi Asuransi		12		12		8		12		12		100,00%		INSPEKTORAT
		Jumlah Jasa Telepon		10		10		8		10		10		100,00%		INSPEKTORAT
		Jumlah Macam Alat Kebersihan		10		10		2		10		10		100,00%		INSPEKTORAT
		Jumlah Materai		2000		2000		1000		2000		2000		100,00%		INSPEKTORAT
		Jumlah Belanja Modal Laptop		4		4		4		4		4		100,00%		INSPEKTORAT
		Jumlah Penggandaan		110000		110000		46000		110000		110000		100,00%		INSPEKTORAT
		Jumlah Barang Cetakan		10		10		7		10		10		100,00%		INSPEKTORAT
		Jumlah Jasa Kebersihan Kantor dan Keamanan Kantor		12		12		8		12		12		100,00%		INSPEKTORAT
		Jumlah jasa pengelolaan kearsipan		3500		3500		0		3500		3500		100,00%		INSPEKTORAT
		Jumlah Alat Tulis Kantor		21		21		8		21		21		100,00%		INSPEKTORAT
		Jumlah Jasa Pengelolaan Keuangan		12		12		8		12		12		100,00%		INSPEKTORAT
		Jumlah Jasa Listrik		10		10		8		10		10		100,00%		INSPEKTORAT
		Jumlah Jasa PDAM		10		10		8		10		10		100,00%		INSPEKTORAT
		Jumlah Jasa Pemeliharaan Alat Kantor		10		10		8		10		10		100,00%		INSPEKTORAT
		Jumlah Pakaian Olah Raga		52		52		52		52		52		100,00%		INSPEKTORAT
		Jumlah Belanja Modal Scanner		1		1		1		1		1		100,00%		INSPEKTORAT
		Jumlah Jasa Pajak Kendaraan		25		25		5		25		25		100,00%		INSPEKTORAT
		Jumlah Eksemplar Surat Kabar		5		5		5		5		5		100,00%		INSPEKTORAT
		Jumlah AC				1				1		1		100,00%		INSPEKTORAT
		Jumlah Penghancur Kertas				2				2		2		100,00%		INSPEKTORAT
		Jumlah PC				1				1		1		100,00%		INSPEKTORAT
		Jumlah Printer				4				4		4		100,00%		INSPEKTORAT
		Jumlah Harddisk Eksternal				6				6		6		100,00%		INSPEKTORAT
		Jumlah Voice Recorder				1				1		1		100,00%		INSPEKTORAT
		Jumlah Pesawat Telepon				1				1		1		100,00%		INSPEKTORAT

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								III		IV						
1	4	5		8		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Jumlah Faksimile				1				1		1		100,00%		INSPEKTORAT
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi			100	307.050.000	100	307.050.000	75	127.480.858		304.949.458	0	304.949.458	0,00%	99,32%	INSPEKTORAT
		Jumlah Rapat		1750		1750		725		1750		1750		100,00%		INSPEKTORAT
		Jumlah Penerimaan Tamu		300		300		75		300		300		100,00%		INSPEKTORAT
		Jumlah Sidak Forpi		10		10		1		10		10		100,00%		INSPEKTORAT
		Jumlah Perjalanan Dalam Daerah		10		10		3		10		10		100,00%		INSPEKTORAT
		Jumlah Perjalanan Dinas Luar Forpi		1		1		1		1		1		100,00%		INSPEKTORAT
		Jumlah Perjalanan Luar Daerah		8		8		8		8		8		100,00%		INSPEKTORAT
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian nilai AKIP		82	3.582.732.396	82	3.464.449.296		2.372.741.730	82	3.313.959.631	82	3.313.959.631	100,00%	95,66%	DINAS PERTANIAN PKP
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkanbran	Jumlah penyediaan materi, perangkat, dan benda pos	lembar	2300	462.850.518	2300	466.850.518	1360	245.230.259	2300	385.335.289	2300	385.335.289	100,00%	82,54%	DINAS PERTANIAN PKP
		Jumlah paket penyediaan alat listrik, telepon dan internet	paket	12		12		9		12		12		100,00%		DINAS PERTANIAN PKP
		Jumlah jenis penyediaan ATK	jenis	67		67		67		67		67		100,00%		DINAS PERTANIAN PKP
		Jumlah belanja Cetak leaflet, nota, kuitansi, dll	lembar	7250		7250		15950		15950		15950		220,00%		DINAS PERTANIAN PKP
		Jumlah paket jasa operasional administrasi keuangan, kearsipan, kepegawaian, dan perencanaan program /kegiatan	paket	12		12		9		12		12		100,00%		DINAS PERTANIAN PKP
		Jumlah jenis pengadaan peralatan listrik dan elektronika	jenis	23		23		23		23		23		100,00%		DINAS PERTANIAN PKP
		Jumlah jenis pengadaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	jenis	47		47		47		47		47		100,00%		DINAS PERTANIAN PKP
		Jumlah paket penyediaan surat kabar	paket	12		12		9		12		12		100,00%		DINAS PERTANIAN PKP
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	op	100	678.680.000	100	686.180.000	68	362.942.121	100	641.134.667	100	641.134.667	100,00%	93,44%	DINAS PERTANIAN PKP
		Jumlah penyediaan konsumsi tamu	orang	1000		1000		366		500		500		50,00%		DINAS PERTANIAN PKP
		Jumlah penyediaan konsumsi kegiatan	orang	1000		1000		968		1500		1500		150,00%		DINAS PERTANIAN PKP
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	op	1585		1585		941		1585		1585		100,00%		DINAS PERTANIAN PKP
		Jumlah perjalanan dinas luar negeri	op	2		2		3		4		4		200,00%		DINAS PERTANIAN PKP
		Jumlah penyediaan konsumsi rapat	orang	1412		1412		966		1412		1412		100,00%		DINAS PERTANIAN PKP

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								III		IV						
1	4	5		8		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkanbran	Jumlah penyediaan operasional tenaga non PNS	ob	835	2.441.201.878	835	2.311.418.778	545	1.764.569.350	545	2.287.489.675	545	2.287.489.675	65,27%	98,96%	DINAS PERTANIAN PKP
		Jumlah paket penyediaan biaya sewa tematlahan pertanian	paket	4		4		3		4		4		100,00%		DINAS PERTANIAN PKP
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian nilai Akip			1.180.106.000	82	1.157.145.000		725.043.084		1.111.918.165	0	1.111.918.165		96,09%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkanbran		900 lembar	900	300.360.000	900	306.899.000	558	147.484.831	900	285.521.837	900	285.521.837	100,00%	93,03%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		1980 ok	1980	375.190.000	1960	388.790.000	1045	273.100.408	1690	383.629.303	1690	383.629.303	86,22%	98,67%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkanbran		264 CH	264	504.556.000	264	461.456.000	180	304.457.845	264	442.767.025	264	442.767.025	100,00%	95,95%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai AKIP	Angka	82	1.219.483.700	82	1.260.773.700		695.251.660	80,31	1.000.417.746	80,31	1.000.417.746	97,94%	79,35%	DINAS PU PKP
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkanbran	Jumlah ATK	paket		403.564.700	12	417.254.700	9	244.111.934	12	359.174.626	12	359.174.626	100,00%	86,08%	DINAS PU PKP
		Jumlah barang cetak	paket			12		9		12		12	0	100,00%		DINAS PU PKP
		jumlah pembayaran SKH	kali			12		9		12		12	0	100,00%		DINAS PU PKP
		Jumlah Pajak Kendaraan Bermotor	unit			52		16		52		52	0	100,00%		DINAS PU PKP
		Jumlah Pembayaran Listrik	kali			12		9		12		12	0	100,00%		DINAS PU PKP
		Jumlah uji kendaraan (KIR)	unit			6		0		0		0	0	0,00%		DINAS PU PKP
		Jumlah Pembayaran Telepon	kali			24		18		24		24	0	100,00%		DINAS PU PKP
		Jumlah Pembayaran Internet	kali			12		9		12		12	0	100,00%		DINAS PU PKP
		Jumlah bahan pembersih	paket			12		9		12		12	0	100,00%		DINAS PU PKP
		Jumlah Pengisian Tabung Gas	kali			12		2		4		4	0	33,33%		DINAS PU PKP
		Jumlah Meterai	buah			1950		500		2000		2000	0	102,56%		DINAS PU PKP
		Jumlah Penggandaan	paket			12		9		12		12	0	100,00%		DINAS PU PKP
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah	oh		642.650.000	475	670.250.000	331	355.373.226	511	486.454.120	511	486.454.120	107,58%	72,58%	DINAS PU PKP
		Jumlah makan/minum rapat	om			2857		2062		2889		2889	0	101,12%		DINAS PU PKP
		Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	om			110		59		87		87	0	79,09%		DINAS PU PKP
	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkanbran	Honorarium Pegawai Honorer (sekretariat)	ob		173.269.000	48	173.269.000	32	95.766.500	46	154.789.000	46	154.789.000	95,83%	89,33%	DINAS PU PKP
		Honorarium pengelola keuangan dan barang	ob			216		108		216		216	0	100,00%		DINAS PU PKP

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								III		IV						
1	4	5		8		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Perkantoran			1.146.111.265	78	1.141.511.265		829.201.246	78	1.105.948.993	78	1.105.948.993	100,00%	96,88%	DINAS SOSIAL P3A
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantrbran	Administrasi perkantoran		12	165.730.795	12	173.638.795	9	99.153.832	12	162.887.443	12	162.887.443	100,00%	93,81%	DINAS SOSIAL P3A
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Rapat koordinasi dan SPPD		1075	844.455.470	1075	841.947.470	340	651.647.414	1075	835.261.550	1075	835.261.550	100,00%	99,21%	DINAS SOSIAL P3A
	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantrbran	Honor petugas keamanan		44	135.925.000	44	125.925.000	36	78.400.000	44	107.800.000	44	107.800.000	100,00%	85,61%	DINAS SOSIAL P3A
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	NILAI	82	1.327.524.090	82	1.327.524.090			82	1.226.394.943	82	1.226.394.943	100,00%	92,38%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANS MIGRASI
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantrbran	Jumlah waktu penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan	bulan	12	277.011.850	12	277.011.850			12	253.970.487	12	253.970.487	100,00%	91,68%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANS MIGRASI
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	persentase penyediaan makan dan minum rapat, koordinasi dan konstasi	bulan	12	986.438.000	12	986.438.000			12	911.529.736	12	911.529.736	100,00%	92,41%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANS MIGRASI
	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantrbran	Jumlah bulan honor jasa pengebla pelayanan perkantrbran	orang bulan	36	64.074.240	36	64.074.240			36	60.894.720	36	60.894.720	100,00%	95,04%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANS MIGRASI
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			100	3.387.201.000	100	3.161.152.300		1.456.491.752	93,33	2.336.650.791	93,33	2.336.650.791	93,33%	73,92%	SETWAN
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantrbran			100	539.040.000	100	454.415.000		229.325.564	95	359.822.343	95	359.822.343	95,00%	79,18%	SETWAN
	Belanja Alat Tulis Kantr	Jumlah paket Alat Tulis Kantr	paket	1	101.250.000	1	101.250.000	1	46.425.100	0,95	81.358.750	0,95	81.358.750	95,00%	80,35%	SETWAN
	Belanja Alat Listrik dan Elektronika	Jumlah Alat Listrik dan Elektronika	paket	1	18.000.000	1	18.000.000	1	7.782.200	0,95	17.870.200	0,95	17.870.200	95,00%	99,28%	SETWAN
	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	Jumlah Perangko, Material dan Benda Pos	lembar	3100	13.650.000	5000	22.650.000	2200	9.300.000	3300	15.300.000	3300	15.300.000	66,00%	67,55%	SETWAN
	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	paket	2	32.615.000	2	32.615.000	1	18.494.900	0,92	27.417.750	0,92	27.417.750	46,00%	84,06%	SETWAN
	Belanja Pembelan Bendera	Jumlah Bendera	paket	1	20.000.000	1	20.000.000	1	11.130.000	0,92	11.130.000	0,92	11.130.000	92,00%	55,65%	SETWAN
	Belanja Cinderamata	Jumlah Cinderamata	buah	240	36.000.000	240	36.000.000	200	21.750.000	240	31.900.000	240	31.900.000	100,00%	88,61%	SETWAN
	Belanja Telepon	Jumlah pembayaran Telepon	bulan	12	19.800.000	12	14.400.000	9	6.469.069	12	8.047.123	12	8.047.123	100,00%	55,88%	SETWAN
	Belanja Air	Jumlah pembayaran Air	bulan	12	12.000.000	12	10.200.000	9	5.650.500	12	8.357.400	12	8.357.400	100,00%	81,94%	SETWAN
	Belanja Surat Kabar/Majalah	Jumlah Surat Kabar/Majalah	eksemplar	21924	110.700.000	21924	72.375.000	16000	43.926.000	21924	66.638.000	21924	66.638.000	100,00%	92,07%	SETWAN
	Belanja STNK	Jumlah perpanjangan STNK	unit	35	32.525.000	35	36.925.000	21	15.354.800	35	24.821.000	35	24.821.000	100,00%	67,22%	SETWAN
	Belanja Cetak	Jumlah paket Cetak	lembar	1	15.000.000	1	15.000.000	1	10.621.500	0,92	13.361.500	0,92	13.361.500	92,00%	89,08%	SETWAN
	Belanja Penggandaan	Jumlah lembar Penggandaan	lembar	750000	112.500.000	400000	60.000.000	1E+05	26.976.495	277714	46.525.620	277714	46.525.620	69,43%	77,54%	SETWAN

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									III		IV						
1	4		5		8		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya (Buku perundang-undangan)	Jumlah Modal Aset Tetap Lainnya	paket	1	15.000.000	1	15.000.000	1	5.445.000	1	7.095.000	1	7.095.000	100,00%	47,30%	SETWAN
													0	0			SETWAN
		Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi			100	1.660.346.000	100	1.566.082.300		549.634.310	90	947.920.110	90	947.920.110	90,00%	60,53%	SETWAN
		Belanja Makan dan Minum Rapat	Jumlah Makan dan Minum Rapat	om	5750	102.500.000	4000	70.000.000	2415	30.020.000	3000	37.895.000	3000	37.895.000	75,00%	54,14%	SETWAN
		Belanja Makan dan Minum Tamu	Jumlah Makan dan Minum Tamu	om	12500	247.500.000	10500	202.500.000	5895	92.125.000	7395	144.006.000	7395	144.006.000	70,43%	71,11%	SETWAN
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah	oj	300	26.250.000	300	26.250.000	25	5.927.000	33	18.997.000	33	18.997.000	11,00%	72,37%	SETWAN
		Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	oj	225	1.284.096.000	225	1.267.332.300	119	421.562.310	183	747.022.110	183	747.022.110	81,33%	58,94%	SETWAN
													0	0			SETWAN
		Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran			100	1.187.815.000	100	1.140.655.000		677.531.878	95	1.028.908.338	95	1.028.908.338	95,00%	90,20%	SETWAN
		Uang Lembur	Jumlah realisasi Lembur	ok	576	8.640.000	576	8.640.000	91	1.697.000	91	1.697.000	91	1.697.000	15,80%	19,64%	SETWAN
		Belanja Uji Kesehatan	Jumlah Uji Kesehatan	org	43	49.500.000	45	49.500.000	5	3.605.000	5	3.605.000	5	3.605.000	11,11%	7,28%	SETWAN
		Belanja Premi Asuransi Kesehatan	Jumlah pembayaran Premi Asuransi Kesehatan	ob	420	65.100.000	420	22.950.000	386	12.039.340	420	19.012.370	420	19.012.370	100,00%	82,84%	SETWAN
		Belanja Makan dan Minum Lembur	Jumlah Makan dan Minum Lembur	om	576	14.400.000	576	14.400.000	91	2.397.500	91	2.397.500	91	2.397.500	15,80%	16,65%	SETWAN
		Belanja Pakaian Kerja Pelayanan	Jumlah Pakaian Kerja Pelayanan	stel	43	25.200.000	43	20.190.000	43	-	43	20.190.000	43	20.190.000	100,00%	100,00%	SETWAN
		Jasa Narasumber/Moderabr/ Tenaga Ahli	Jumlah Jasa Narasumber/ Moderabr/ Tenaga Ahli	ob	96	276.000.000	96	276.000.000	64	164.000.000	96	246.000.000	96	246.000.000	100,00%	89,13%	SETWAN
		Belanja Jasa Perekutan P. Outsourcing	Belanja Jasa Perekutan P. Outsourcing	ob	516	748.975.000	516	748.975.000	5	493.793.038	514	736.006.468	514	736.006.468	99,61%	98,27%	SETWAN
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Perkantoran	angka	80	1.754.703.900	64166	1.671.253.900	0	1.091.691.828	64166	1.557.341.665	64166	1.557.341.665	100,00%	93,18%	DINAS PERHUBUNGAN
		Program Jasa Peralatan dan Perlengkapan Perkanbrn			62794	249.923.900	62794	244.973.900	0	122.588.191	62794	177.079.040	62794	177.079.040	100,00%	72,28%	DINAS PERHUBUNGAN
			Jumlah belanja asuransi	Kali	36		36			-	36		36	0	100,00%		DINAS PERHUBUNGAN
			Jumlah bulan pembayaran telepon	bulan	12		12			6.363.767	12		12	0	100,00%		DINAS PERHUBUNGAN
			Jumlah Belanja STNK	kendaraan	29		29			8.701.000	29		29	0	100,00%		DINAS PERHUBUNGAN
			Jumlah barang cetakaan	macam	13		13			19.695.000	13		13	0	100,00%		DINAS PERHUBUNGAN
			Jumlah lembar penggandaan	lembar	60000		60000			7.937.800	60000		60000	0	100,00%		DINAS PERHUBUNGAN
			Jumlah jenis alat tulis kantor	jenis	35		35			13.650.500	35		35	0	100,00%		DINAS PERHUBUNGAN
			Jumlah belanja surat kabar	eksemplar	1440		1440			2.301.000	1440		1440	0	100,00%		DINAS PERHUBUNGAN
			Jumlah Kendaraan yang KIR	kendaraan	18		18			488.400	18		18	0	100,00%		DINAS PERHUBUNGAN
			Jumlah jenis alat Kebersihan	jenis	15		15			4.721.766	15		15	0	100,00%		DINAS PERHUBUNGAN
			Jumlah bulan pembayaran listrik	bulan	12		12			16.455.458	12		12	0	100,00%		DINAS PERHUBUNGAN

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									III		IV						
1	4		5		8		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Jumlah tabung pemadam Kebakaran	tabung	1		1		478.500	1		1	0	100,00%		DINAS PERHUBUNGAN	
			Jumlah jenis alat listrik dan elektronik	jenis	15		15		2.550.000	15		15	0	100,00%		DINAS PERHUBUNGAN	
			Jumlah benda pos	lembar	1000		1000		1.350.000	1000		1000	0	100,00%		DINAS PERHUBUNGAN	
			Jumlah pembayaran honor petugas jasa administrasi keuangan	ob	168		168		37.895.000	168		168	0	100,00%		DINAS PERHUBUNGAN	
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Jumlah Dokumen Bermaterai	Lembar	500		500		106.784.281	500		500	0	100,00%		DINAS PERHUBUNGAN		
		Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	0		0			0		0	0			DINAS PERHUBUNGAN		
		Waktu penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	0		0			0		0	0			DINAS PERHUBUNGAN		
		Jumlah dan jenis kendaraan dinas/ operasional yang dgn jasa pemeliharaan dan perizinan									0	0			DINAS PERHUBUNGAN		
		R2	unit	0		0			0		0	0			DINAS PERHUBUNGAN		
		R4	unit	0		0			0		0	0			DINAS PERHUBUNGAN		
		R lebih dari 4	unit	0		0			0		0	0			DINAS PERHUBUNGAN		
		Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan	Bulan	0		0			0		0	0			DINAS PERHUBUNGAN		
		Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	Bulan	0		0			0		0	0			DINAS PERHUBUNGAN		
		Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan	macam	0		0			0		0	0			DINAS PERHUBUNGAN		
		Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan									0	0			DINAS PERHUBUNGAN		
		Kartu Kendali	Bk	0		0			0		0	0			DINAS PERHUBUNGAN		
		Lembar Disposisi	Bk	0		0			0		0	0			DINAS PERHUBUNGAN		
		Amplop Kop	Bok	0		0			0		0	0			DINAS PERHUBUNGAN		
		Karcis tepi jalan umum	Bk	0		0			0		0	0			DINAS PERHUBUNGAN		
		Karcis terminal	Bk	0		0			0		0	0			DINAS PERHUBUNGAN		
		Poster Keselamatan	Lbr	0		0			0		0	0			DINAS PERHUBUNGAN		
		ID Card Juru Parkir	Lbr	0		0			0		0	0			DINAS PERHUBUNGAN		
		Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	macam	0		0			0		0	0			DINAS PERHUBUNGAN		
		tabung gas	buah	0		0			0		0	0			DINAS PERHUBUNGAN		
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi	Jumlah Makan dan Minum	om	800		800	374.920.000	220.487.737	800	355.340.725	800	355.340.725	100,00%	94,78%	DINAS PERHUBUNGAN		

No	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								III		IV						
1	4	5		8		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	dan Konsultasi				337.920.000											
		Jumlah perjalanan dinas	kali	551		551				551		551	0	100,00%		DINAS PERHUBUNGAN
	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkanbran	Jumlah pembayaran honor tenaga teknis pendukung	ob	572	1.166.860.000	572	1.051.360.000		748.615.900	572	1.024.921.900	572	1.024.921.900	100,00%	97,49%	DINAS PERHUBUNGAN
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan aministrasi perkantoran	Nilai	100	364.440.000	80,97	404.420.000			80,97	388.237.085	80,97	388.237.085	100,00%	96,00%	BAG AD PEMBANGUNAN
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkanbran	Jumlah meterai	lembar	600	76.940.000	600	80.680.000	400	35.731.740	600	75.829.187	600	75.829.187	100,00%	93,99%	BAG AD PEMBANGUNAN
		Jumlah perizinan kendaraan	unit kendaraan	7		7		5		7		7		100,00%		BAG AD PEMBANGUNAN
		Jumlah pembayaran honorarium pengebla keuangan	orang bulan (ob)	72		72		54		72		72		100,00%		BAG AD PEMBANGUNAN
		Jumlah pembelian peralatan listrik dan elektronika	Jenis	10		10		9		10		10		100,00%		BAG AD PEMBANGUNAN
		Jumlah pembayaran langganan surat kabar	kali	12		12		9		12		12		100,00%		BAG AD PEMBANGUNAN
		Jumlah pembelian ATK	jenis	30		30		20		30		30		100,00%		BAG AD PEMBANGUNAN
		Jumlah cetak	jenis cetakan	6		6		6		6		6		100,00%		BAG AD PEMBANGUNAN
		Jumlah penggandaan	lembar	26250		26250		15000		26250		26250		100,00%		BAG AD PEMBANGUNAN
		Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin	Jenis	15		15		12		15		15		100,00%		BAG AD PEMBANGUNAN
		Jumlah pembelian peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Jenis	30		30		20		30		30		100,00%		BAG AD PEMBANGUNAN
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Jamuan Rapat koordinasi	Orang makan	1100	287.500.000	1100	323.740.000	900	220.723.036	1100	312.407.898	1100	312.407.898	100,00%	96,50%	BAG AD PEMBANGUNAN
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	orang jalan	110		140		80		140		140		100,00%		BAG AD PEMBANGUNAN
		Jumlah perjalanan dinas luar daerah	ls	1		1		1		1		1		100,00%		BAG AD PEMBANGUNAN
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran			313.146.000		313.146.000								0,00%	BAG. AD KESRA
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkanbran	Jumlah kegiatan administrasi perkanbran bagian kesra			93.044.250											BAG. AD KESRA
		- Tersedianya ATK	Tahun				8.000.000	1	2.614.600		7.904.600		7.904.600		98,81%	BAG. AD KESRA
		- Tersedianya penggandaan	Tahun				1.463.250	1	616.625		1.433.000		1.433.000		97,93%	BAG. AD KESRA
		- Tersedianya komponen instalansi listrik	Tahun				3.000.000	1	437.000		1.152.000		1.152.000		38,40%	BAG. AD KESRA
		- Honorarium panitia pelaksana kegiatan	Orang				15.480.000	3	6.420.000		12.750.000		12.750.000		82,36%	BAG. AD KESRA
		- Tersedianya materi dan benda pos	Buah				4.500.000	500	2.550.000		4.500.000		4.500.000		100,0%	BAG. AD KESRA

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								III		IV						
1	4	5		8		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		- Tersedianya surat kabar/majalah	SKH			1.800.000		14	1.040.000		1.560.000		1.560.000		86,67%	BAG. AD KESRA
		- Honor pegawai kontrak	Tahun			3.600.000		1	21.000.000		33.000.000		33.000.000		916,67%	BAG. AD KESRA
		- Belanja Cetak	Tahun			2.401.000		0			2.235.000		2.235.000		93,09%	BAG. AD KESRA
		- Pajak kendaraan bermotor	Tahun			3.000.000		0			2.015.600		2.015.600		67,19%	BAG. AD KESRA
		- Jasa harian lepas	Tahun			16.200.000		1	9.450.000		14.850.000		14.850.000		91,67%	BAG. AD KESRA
		- Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Tahun			1.200.000		1	579.000		1.200.000		1.200.000		100,0%	BAG. AD KESRA
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah kegiatan administrasi perkantroran bagian kesra	Unit		220.101.750				135.195.959							BAG. AD KESRA
		^.. Belanja makanan dan minuman rapat				7.400.000					6.800.000		6.800.000		91,89%	BAG. AD KESRA
		- Belanja makanan dan minuman tamu				2.100.000					1.780.000		1.780.000		84,76%	BAG. AD KESRA
		- Belanja perjalanan dinas dalam daerah				36.000.000					26.900.000		26.900.000		74,72%	BAG. AD KESRA
		- Belanja perjalanan dinas luar daerah				174.601.750					173.226.259		173.226.259		99,21%	BAG. AD KESRA
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				366.435.000		411.056.400		330.263.350				404.416.400		98,38%	BAG AD PEMERINTAHAN
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	%		38.332.000	100	38.332.000	70	23.167.250	100	32.030.300	100	32.030.300	100,00%	83,56%	BAG AD PEMERINTAHAN
		Jumlah perpanjangan STNK kendaraan dinas	unit			4		3			4					BAG AD PEMERINTAHAN
		Jumlah penggandaan	lembar			27000		14285			27000					BAG AD PEMERINTAHAN
		Jumlah ATK	paket			4		3			4					BAG AD PEMERINTAHAN
		Jumlah peralatan terpelihara	unit			16		11			16					BAG AD PEMERINTAHAN
		Jumlah honorarium pengelola keuangan dan barang	ob			72		45			72					BAG AD PEMERINTAHAN
		Jumlah meterai dan benda pos	lembar			185		175			185					BAG AD PEMERINTAHAN
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah makan dan minum rapat	om		328.103.000	350	372.724.400	300	307.096.100	350	372.386.100	350	372.386.100	100,00%	99,91%	BAG AD PEMERINTAHAN
		Jumlah perjalanan dinas luar daerah	op			77		77			77		0	100,00%		BAG AD PEMERINTAHAN
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	op			500		232			500					BAG AD PEMERINTAHAN
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	persen		523.360.000		540.250.000		398.723.291		526.315.741	0	526.315.741		97,42%	BAG HUKUM
	1. Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran				83.875.000		81.315.000		51.834.750		71.962.250	0	71.962.250		88,50%	BAG HUKUM
		Jumlah meterai	buah	800	3.000.000	600	2.000.000	320	1.552.500	475	1.987.500	475	1.987.500	79,17%	99,38%	BAG HUKUM

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								III		IV						
1	4	5		8		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		cetak	jenis	3	9.020.000	3	9.020.000	3	4.500.000	3	9.000.000	3	9.000.000	100,00%	99,78%	BAG HUKUM
		penggandaan	lembar	122140	18.321.000	122140	18.321.000	48000	9.781.950	62400	12.461.450	62400	12.461.450	51,09%	68,02%	BAG HUKUM
		peralih kebersihan	jenis	8	2.000.000	8	2.000.000	7	1.050.100	8	1.982.100	8	1.982.100	100,00%	99,11%	BAG HUKUM
		Jumlah perpanjangan STNK	unit	5	2.000.000	5	2.000.000	3	1.848.600	4	1.848.600	4	1.848.600	80,00%	92,43%	BAG HUKUM
		Jumlah honor pengelola keuangan dan barang	orang bulan	960	12.480.000	96	12.480.000	50	7.920.000	84	10.560.000	84	10.560.000	87,50%	84,62%	BAG HUKUM
		jumlah ATK	jenis	10	22.954.000	10	22.954.000	9	13.226.600	10	21.582.600	10	21.582.600	100,00%	94,03%	BAG HUKUM
		jumlah bahan bacaan	bln	12		12	2.340.000	8	1.755.000	12	2.340.000	12	2.340.000	100,00%	100,00%	BAG HUKUM
		buku peraturan perundang-undangan	buku	14	14.100.000	14	10.200.000	14	10.200.000	14	10.200.000	14	10.200.000	100,00%	100,00%	BAG HUKUM
	2. Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi				439.485.000		458.935.000		346.888.541		454.353.491	0	454.353.491		99,00%	BAG HUKUM
		jumlah tamu	org/mkn	450	7.500.000	300	6.000.000	195	3.725.000	280	5.575.000	280	5.575.000	93,33%	92,92%	BAG HUKUM
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	oranghari	95	43.125.000	350	33.125.000	283	17.775.000	350	28.975.000	350	28.975.000	100,00%	87,47%	BAG HUKUM
		Jumlah perjalanan dinas luar daerah	oranghari	450	388.860.000	101	419.810.000	68	325.388.541	87	419.803.491	87	419.803.491	86,14%	100,00%	BAG HUKUM
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran			482.039.600		473.039.600		289.823.150		458.586.700	0	458.586.700		96,94%	BAG HUMPRO
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantbran				96.015.600				54.696.750			0	0			BAG HUMPRO
	- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa				850.000	3	850.000	3	850.000	3	850.000	3	850.000	100,00%	100,00%	BAG HUMPRO
	- Honor Pengelolaan Keuangan	Jumlah pembayarantenaga pengeble keuangan	ob		9.960.000	84	9.960.000	42	4.650.000	83	9.330.000	83	9.330.000	98,81%	93,67%	BAG HUMPRO
	- Belanja ATK				11.005.600		11.005.600	11	6.000.000		11.005.200	0	11.005.200		100,0%	BAG HUMPRO
	Belanja Perangko dan meterai	Jumlah Materai 675	lembar		3.000.000	675	3.000.000	195	780.000	665	2.940.000	665	2.940.000	98,52%	98,00%	BAG HUMPRO
	- Belanja Peralatan Dan kebersihan	Jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih	paket		10.000.000	1	1.000.000	1	250.000	1	1.000.000	1	1.000.000	100,00%	100,00%	BAG HUMPRO
	- Belanja Cinderamata/plakat	Jumlah Cinderamata 65	buah		13.000.000	65	13.000.000	65	13.000.000	65	13.000.000	65	13.000.000	100,00%	100,0%	BAG HUMPRO
	- Belanja Alat Perlengkapan	Jumlah tas cinderamata	65 buah		1.300.000	65	1.300.000	65	1.300.000	65	1.300.000	65	1.300.000	100,00%	100,0%	BAG HUMPRO
	- Belanja Surat Kabar dan Majalah	Jumlah majalah 11	skh		12.520.000	11	12.520.000	11	8.396.000	11	12.520.000	11	12.520.000	100,00%	100,00%	BAG HUMPRO
	- Belanja Surat Tanda Kendaraan bermolbr	Jumlah perpanjanganSTNK	5		2.000.000	5	2.000.000	3	236.500	4	1.093.500	4	1.093.500	80,00%	54,68%	BAG HUMPRO
	- Belanja Belanja cetak	Jumlah stop map			19.000.000	1	19.000.000	1	9.750.000	1	19.000.000	1	19.000.000	100,00%	100,0%	BAG HUMPRO
	- Belanja Penggandaan	Jumlah dokumen 33.600	lembar		5.880.000	33600	5.880.000	10700	1.884.250	30300	5.371.500	30300	5.371.500	90,18%	91,35%	BAG HUMPRO
	- Belanja Piala Bupati	Jumlah piala 70	70 buah		16.500.000	70	16.500.000	38	7.600.000	58	14.100.000	58	14.100.000	82,86%	85,45%	BAG HUMPRO
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi				386.024.000				235.126.400			0	0			BAG HUMPRO
	- Belanja Makan dan minum rapat	Jumlah makanan untuk rapat 625	porsti		7.000.000	625	7.000.000	320	3.575.000	386	5.975.000	386	5.975.000	61,76%	85,36%	BAG HUMPRO

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								III		IV						
1	4	5		8		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Jumlah orang kali perjalanan 160	ok		9.250.000	5	250.000	5	250.000	5	250.000	5	250.000	100,00%	100,00%	BAG HUMPRO
	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	Jumlah orang kali perjalanan 162	ok		369.774.000	65	369.774.000	38	231.301.400	61	360.851.500	61	360.851.500	93,86%	97,59%	BAG HUMPRO
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				478.710.000		486.985.000		280.630.210		485.543.054	0	485.543.054		99,70%	BAG LPBJ
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran				218.520.000		211.720.000		140.247.155		210.526.555	0	210.526.555		99,44%	BAG LPBJ
		Honor tenaga kontrak pembayaran premi Asuransi Ketenagakerjaan	ob	12	139.100.000	81	130.600.000	8	84.169.316	81	130.443.747	81	130.443.747	100,00%	99,88%	BAG LPBJ
		Jumlah Pengisian Tabung Gas	kKli	8	1.200.000	8	1.200.000	5	750.000	8	1.060.000	8	1.060.000	100,00%	88,33%	BAG LPBJ
		Jumlah Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor	unit kendaraan	8	3.500.000	8	3.079.500	8	3.079.500	8	3.079.500	8	3.079.500	100,00%	100,00%	BAG LPBJ
		Jumlah Belanja Surat kabar/Majalah	Kali	12	2.520.000	12	2.460.000	9	1.845.000	12	2.460.000	12	2.460.000	100,00%	100,00%	BAG LPBJ
		Jumlah pembelian materai	Lembar	605	2.490.000	430	1.740.000	320	1.290.000	435	1.740.000	435	1.740.000	101,16%	100,00%	BAG LPBJ
		Jumlah Belanja Alat listrik dan elektronika	Kali	4	2.000.000	4	2.500.000	4	1.883.200	4	2.498.200	4	2.498.200	100,00%	99,93%	BAG LPBJ
		Jumlah Belanja Cetak	Jenis	6	2.500.000	6	3.500.000	3	2.500.000	5	3.500.000	5	3.500.000	83,33%	100,0%	BAG LPBJ
		Jumlah Pemeliharaan Genset	Kali	2	4.960.000	2	4.960.000	1	1.150.000	2	4.950.000	2	4.950.000	100,00%	99,80%	BAG LPBJ
		Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Kali	12	8.540.000	12	9.150.000	9	6.440.000	12	9.150.000	12	9.150.000	100,00%	100,00%	BAG LPBJ
		Jumlah Penerima Honor Pengelola keuangan dan Barang	Ob	96	17.760.000	96	17.760.000	72	13.095.000	96	17.085.000	96	17.085.000	100,00%	96,20%	BAG LPBJ
		Jumlah Belanja Bahan makan dan minum	Kali	12	6.000.000	12	6.000.000	9	4.350.000	12	6.000.000	12	6.000.000	100,00%	100,00%	BAG LPBJ
		Jumlah Belanja Peralatan kebersihan dan bahan Pembersih	Kali	12	2.750.000	12	3.000.000	8	2.069.400	12	2.999.400	12	2.999.400	100,00%	99,98%	BAG LPBJ
		Jumlah Belanja ATK	Kali	12	10.000.000	12	11.140.000	9	7.510.000	12	11.140.000	12	11.140.000	100,00%	100,0%	BAG LPBJ
		Jumlah Belanja Kawat/fax /internet/TV Kabel	Kali	12	12.000.000	12	10.600.000	9	7.710.739	12	10.390.208	12	10.390.208	100,00%	98,02%	BAG LPBJ
		Jumlah Belanja Penggandaan	Kali	12	3.200.000	12	4.030.000	9	2.405.000	12	4.030.500	12	4.030.500	100,00%	100,01%	BAG LPBJ
												0	0			
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi				260.190.000		275.265.000		140.383.055		275.016.499	0	275.016.499		99,91%	BAG LPBJ
		Jumlah jamuan rapat koordinasi	om	2350	40.000.000		39.800.000	1153	23.315.000		39.795.000	0	39.795.000		99,99%	BAG LPBJ
		Jumlah perjalanan dinas luar daerah	Kali	40	211.190.000		225.265.000	26	110.178.055		225.031.499	0	225.031.499		99,90%	BAG LPBJ
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	Kali	162	9.000.000		9.200.000	96	6.890.000		9.190.000	0	9.190.000		99,89%	BAG LPBJ
												0	0			

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								III		IV						
1	4	5		8		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase ketersediaan jasa administrasi perkantoran			329.722.500		1.706.094.100		867.728.087		1.415.644.710	0	1.415.644.710		82,98%	BAG PEM DES
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran				85.722.500		369.441.600		265.651.998		355.360.698	0	355.360.698		96,19%	BAG PEM DES
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi				244.000.000	84	84.813.100	84	63.428.100	84	84.813.100	84	84.813.100	100,00%	100,00%	BAG PEM DES
						1207	284.628.500	1000	202.223.898	1205	270.547.598	1205	270.547.598	99,83%	95,05%	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	376.920.570		518.895.570	19	95.860.800		-	0	0		0,00%	BAG ORGANISASI
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Jumlah materi yang tersedia	lembar	480	107.240.000	480	144.740.000	112	11.895.500	480	133.203.600	480	133.203.600	100,00%	92,03%	BAG ORGANISASI
		Jumlah materi 6000	lembar									0	0			BAG ORGANISASI
		Jumlah materi 3000	lembar									0	0			BAG ORGANISASI
		Jumlah pembayaran pajak kendaraan dinas	kendaraan	6		6		1		6		6	0	100,00%		BAG ORGANISASI
		Jumlah pemberian honorarium pengelola keuangan	orang bulan	72		72		18		72		72	0	100,00%		BAG ORGANISASI
		Jumlah paket pembelian peralatan kebersihan kantor	paket	4		4		1		4		4	0	100,00%		BAG ORGANISASI
		Jumlah paket pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	kali									0	0			BAG ORGANISASI
		- Pemeliharaan Komputer / laptop	kali	26		26		9		26		26	0	100,00%		BAG ORGANISASI
		- Pemeliharaan printer	paket	12		12		3		12		12	0	100,00%		BAG ORGANISASI
		- Pemeliharaan AC	paket	4		14		0		14		14	0	100,00%		BAG ORGANISASI
		Jumlah paket pembelian alat tulis kantor	paket	12		12		3		12		12	0	100,00%		BAG ORGANISASI
		Jumlah penggandaan dokumen	lembar	56000		56000		15250		56000		56000	0	100,00%		BAG ORGANISASI
		Jumlah paket cetak dokumen	rim	4		4		1		4		4	0	100,00%		BAG ORGANISASI
		Jumlah pemeliharaan aplikasi dan database	Paket	2		2		0		2		2	0	100,00%		BAG ORGANISASI
		Belanja Pengadaan Jasa Konsultansi	Aplikasi									0	0			BAG ORGANISASI
		Jumlah peralatan yang diadakan	buah	16				0				0	0			BAG ORGANISASI
		Jumlah aplikasi ID Card										0	0			BAG ORGANISASI
		Jumlah Sound System	buah									0	0			BAG ORGANISASI
		Jumlah Meja Kantor	buah									0	0			BAG ORGANISASI

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Kinerja RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								III		IV						
1	4	5		8		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Laci Meja	buah	10		10				10		10	0	100,00%		BAG ORGANISASI
		Jumlah Komputer/Notebook	buah	1		1				1		1	0	100,00%		BAG ORGANISASI
		Almari Arsip	buah	5		5				5		5	0	100,00%		BAG ORGANISASI
		Jumlah Printer ID Card	buah									0	0			BAG ORGANISASI
		Layar monitor TV	buah									0	0			BAG ORGANISASI
		Printer										0	0			BAG ORGANISASI
		Komputer / Laptop										0	0			BAG ORGANISASI
		Kamera Digital										0	0			BAG ORGANISASI
		Mesin Presensi				5				5		5	0	100,00%		BAG ORGANISASI
		LCD Proyektor										0	0			BAG ORGANISASI
		Jumlah surat kabar harian	bulan	24		24		6		24		24	0	100,00%		BAG ORGANISASI
												0	0			BAG ORGANISASI
	Penyediaan rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi	Jumlah penyediaan jamuan makan / minum rapat dan tamu	buah	1100	269.680.570	374.155.570		83.965.300		368.440.398		0	368.440.398		98,47%	BAG ORGANISASI
		Jumlah penyediaan snack dan minum	buah									0	0			BAG ORGANISASI
		Jumlah penyediaan makan dan minum	buah									0	0			BAG ORGANISASI
		Makan Minum Rapat	buah	500		500		100		500		500	0	100,00%		BAG ORGANISASI
		Makan Minum Tamu	buah	600		600		205		600		600	0	100,00%		BAG ORGANISASI
		Jumlah perjalanan dinas luar daerah	orang kali	50		73		17		73		73	0	100,00%		BAG ORGANISASI
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	kali	175		175		39		175		175	0	100,00%		BAG ORGANISASI
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			4.473.174.925		5.079.968.405		3.073.191.671		4.621.252.994		0	4.621.252.994		90,97%	BAG UMUM
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran			1.613.555.050		1.627.348.530		1.009.974.333		1.299.762.901		0	1.299.762.901		79,87%	BAG UMUM
		Jumlah pembayaran honor tenaga harian lepas 19 orang (cleaning service, juru masak rumah jabatan)	orang bulan	228	408.058.650	252	388.058.650	191	308.484.300	252	371.097.450	252	371.097.450	100,00%	95,63%	BAG UMUM
		Jumlah belanja sewa sound system	unit	30	43.600.000	40	58.600.000	27	36.800.000	36	51.400.000	36	51.400.000	90,00%	87,71%	BAG UMUM
		Jumlah belanja sewa meja kursi	Unit	32000	75.000.000	32000	85.000.000	25610	49.067.500	26087	62.549.500	26087	62.549.500	81,52%	73,59%	BAG UMUM
		Jumlah benda pos, materai, dan buku cek giro	lembar	4357	17.475.000	4357	17.475.000	2644	7.536.000	3168	14.311.000	3168	14.311.000	72,71%	81,89%	BAG UMUM
		Jumlah surat kabar	SKH	7	42.000.000	7	42.000.000	7	24.481.000	7	33.783.000	7	33.783.000	100,00%	80,44%	BAG UMUM
		Jumlah tas konsumsi Hari Jadi	paket	1	8.000.000	1	8.000.000	800	7.965.000	1	7.965.000	1	7.965.000	100,00%	99,56%	BAG UMUM
		Jumlah pembayaran honor juru masak rumah dinas	orang bulan	12	18.542.400	12	18.542.400	9	12.217.200	12	18.325.800	12	18.325.800	100,00%	98,83%	BAG UMUM

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								III		IV						
1	4	5		8		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Jumlah belanja jasa pengelolaan sampah	kali	12	4.200.000	12	4.200.000	9	1.400.000	12	2.100.000	12	2.100.000	100,00%	50,00%	BAG UMUM
		Jumlah paket cinderamata dan karangan bunga	paket	96	92.500.000	96	92.500.000	82	57.654.400	98	79.364.400	98	79.364.400	102,08%	85,80%	BAG UMUM
		Jumlah perpanjangan STNK kendaraan dinas	STNK	65	49.450.000	68	199.450.000	38	23.207.800	49	41.413.600	49	41.413.600	72,06%	20,76%	BAG UMUM
		Jumlah belanja publikasi	kali	12	5.000.000	12	5.000.000	9	3.700.000	9	3.700.000	9	3.700.000	75,00%	74,00%	BAG UMUM
		Jumlah pembayaran honor PBJ	paket	1	875.000	1	875.000	0	-	1	875.000	1	875.000	100,00%	100,00%	BAG UMUM
		Jumlah belanja sewa sarana mobilitas darat	unit kendaraan	15	25.000.000	25	55.000.000	16	21.900.000	19	24.900.000	19	24.900.000	76,00%	45,27%	BAG UMUM
		Jumlah belanja jaminan pemeliharaan kesehatan	orang bulan	180	12.834.000	60	2.834.000	32	1.099.560	34	1.649.340	34	1.649.340	56,67%	58,20%	BAG UMUM
		Jumlah belanja sewa tenda/panggung dll	unit	300	100.000.000	345	115.000.000	221	89.780.000	302	110.230.000	302	110.230.000	87,54%	95,85%	BAG UMUM
		Jumlah belanja dekorasi	kali	4	10.000.000	4	10.000.000	2	875.000	2	875.000	2	875.000	50,00%	8,75%	BAG UMUM
		Jumlah belanja sewa lahan parkir	tempat	1	17.500.000	1	13.500.000	1	13.500.000	1	13.500.000	1	13.500.000	100,00%	100,00%	BAG UMUM
		Jumlah pembayaran honor pengelola keuangan, barang, dan kepegawaian	Orang bulan	180	43.920.000	168	43.920.000	135	27.694.050	144	36.744.000	144	36.744.000	85,71%	83,66%	BAG UMUM
		Jumlah ATK	jenis	75	64.000.000	75	45.000.000	75	40.935.950	75	44.869.850	75	44.869.850	100,00%	99,71%	BAG UMUM
		Jumlah cetak	macam /form	16	25.000.000	16	25.000.000	10	18.366.000	16	24.999.000	16	24.999.000	100,00%	100,00%	BAG UMUM
		Jumlah pembayaran telepon	kali	12	72.000.000	12	7.457.514	9	545.468	12	5.505.063	12	5.505.063	100,00%	73,82%	BAG UMUM
		Jumlah buku pengetahuan umum dan perundang-undangan	jenis	2	2.000.000	1	750.000	1	-	1	435.000	1	435.000	100,00%	58,00%	BAG UMUM
		Jumlah pembayaran air	kali	12	162.000.000	12	85.000.000	7	46.742.700	12	79.759.000	12	79.759.000	100,00%	93,83%	BAG UMUM
		Jumlah penyediaan alat listrik kantor	jenis	50	65.000.000	50	65.000.000	43	46.625.800	50	62.367.900	50	62.367.900	100,00%	95,95%	BAG UMUM
		Jumlah belanja sewa genset	unit	15	40.000.000	10	25.000.000	12	12.200.000	8	13.600.000	8	13.600.000	80,00%	54,40%	BAG UMUM
		Jumlah paket bahan dan peralatan kebersihan, kontrak kebersihan kamar mandi	paket	16	109.000.000	16	109.000.000	16	84.201.660	16	95.413.910	16	95.413.910	100,00%	87,54%	BAG UMUM
		Jumlah pembayaran listrik	kali	12	60.000.000	12	36.442.000	9	18.286.754	12	33.795.397	12	33.795.397	100,00%	92,74%	BAG UMUM
		Jumlah pengisian gas LPG	tabung	120	12.100.000	120	12.100.000	46	9.057.000	78	11.743.000	78	11.743.000	65,00%	97,05%	BAG UMUM
		Jumlah penggandaan	lembar	190000	28.500.000	190000	28.500.000	1E+05	17.707.225	29183	24.512.725	29183	24.512.725	15,36%	86,01%	BAG UMUM
		Jumlah jasa tambah daya listrik	jenis	3	43.637.516	1	27.943.966	3	27.943.966	1	27.943.966	1	27.943.966	100,00%	100,00%	BAG UMUM
		Jumlah pajak radio santel	kali			40	200.000			7	35.000	7	35.000	17,50%	17,50%	BAG UMUM
		Jumlah pajak radio santel	objek									0	0			BAG UMUM
		Jumlah Rak arsip	unit									0	0			BAG UMUM
		Jumlah makan minum kegiatan penataan arsip										0	0			BAG UMUM

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								III		IV						
1	4	5		8		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi						3.222.703.375		1.913.549.263		3.100.065.188	0	3.100.065.188		96,19%	BAG UMUM
		Jumlah pembayaran honor PBJ makan minum open house	paket			1	1.292.500	0	-	1	1.100.000	1	1.100.000	100,00%	85,11%	BAG UMUM
		Jumlah perjalanan dinas luar negeri	Orang Jalan			13	348.000.000	0	-	8	335.739.950	8	335.739.950	61,54%	96,48%	BAG UMUM
		Jumlah makan minum rapat	dos			4470	79.350.000	3125	51.207.000	4407	77.882.000	4407	77.882.000	98,59%	98,15%	BAG UMUM
		Jumlah makan minum harian pimpinan	porsti			1764	320.000.000	1205	214.238.900	1650	306.210.850	1650	306.210.850	93,54%	95,69%	BAG UMUM
		Jumlah makan minum tamu	porsti			59042	1.259.164.200	4027	824.219.660	47058	1.256.018.410	47058	1.256.018.410	79,70%	99,75%	BAG UMUM
		Jumlah perjalanan dinas luar daerah	orang jalan			165	1.168.316.675	82	801.898.703	151	1.103.374.978	151	1.103.374.978	91,52%	94,44%	BAG UMUM
		Jumlah makan minum pelaksanaan kegiatan	dos			904	39.080.000	528	20.760.000	526	17.214.000	526	17.214.000	58,19%	44,05%	BAG UMUM
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	orang jalan			104	7.500.000	20	1.225.000	33	2.525.000	33	2.525.000	31,73%	33,67%	BAG UMUM
		Jumlah perjalanan dinas luar daerah & luar negeri	Oj									0	0			BAG UMUM
		Jumlah honorjuru masak RD Bupati	Ob									0	0			BAG UMUM
		Jumlah Konsumsi Hari Jadi	paket									0	0			BAG UMUM
		Jumlah pembayaran jaminan Kesehatan Juru Masak	Ob									0	0			BAG UMUM
		Jumlah pembayaran honor Juru Masak KDH	Ob									0	0			BAG UMUM
	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantran						229.916.500		149.668.075		221.424.905	0	221.424.905		96,31%	BAG UMUM
		Jumlah pembayaran honor PTT penjaga keamanan	orang bulan			144	224.816.148	159	147.606.400	132	218.355.300	132	218.355.300	91,67%	97,13%	BAG UMUM
		Jumlah pembayaran iuran keamanan	kali			12		9		12		12	0	100,00%		BAG UMUM
		Jumlah pembayaran honor narasumber	orang bulan			12	1.200.000	0	-	0	-	0	0	0,00%	0,00%	BAG UMUM
		Jumlah pembayaran asuransi	orang bulan			60	3.900.352		2.061.675	60	3.069.605	60	3.069.605	100,00%	78,70%	BAG UMUM
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						241.758.000		192.433.650		241.758.000	81,25	291.462.879	101,56%	99,07%	KEC BAMBANGLIPURO
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantran	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantran					163.108.000		163.834.150		163.108.000	60	3.069.605	100,00%	78,70%	KEC BAMBANGLIPURO
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi						78.650.000		28.599.500		78.650.000	60	3.069.605	100,00%	78,70%	KEC BAMBANGLIPURO
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persen		282.193.000	80	294.193.000	81,25	216.192.234	81,25	291.462.879	81,25	291.462.879	101,56%	99,07%	KEC BANGUNTAPAN
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantran		paket	12	165.693.000	12	155.893.000	9	118.929.734	12	154.863.579	12	154.863.579	100,00%	99,34%	KEC BANGUNTAPAN

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								III		IV						
1	4	5		8		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Honor Pengelola Keu, Barang & Kepegawaian	ob	84	14.040.000	84	14.040.000	63	10.530.000	84	14.040.000	84	14.040.000	100,00%	100,00%	KEC BANGUNTAPAN
		Jumlah ATK	paket	12	12.000.000	12	12.000.000	9	9.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000	100,00%	100,0%	KEC BANGUNTAPAN
		Jumlah alat listrik dan elektronika	paket	12	2.400.000	12	2.400.000	9	1.800.000	12	2.400.000	12	2.400.000	100,00%	100,00%	KEC BANGUNTAPAN
		Jumlah Materai	lembar	700	3.450.000	700	3.450.000	550	2.610.000	700	3.450.000	700	3.450.000	100,00%	100,0%	KEC BANGUNTAPAN
		Jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih	paket	12	2.308.000	12	2.308.000	9	1.654.000	12	2.308.000	12	2.308.000	100,00%	100,00%	KEC BANGUNTAPAN
		Pembayaran telepon	bulan	12	7.800.000	12	2.900.000	9	1.763.602	12	2.118.035	12	2.118.035	100,00%	73,04%	KEC BANGUNTAPAN
		Pembayaran listrik	bulan	12	10.200.000	12	8.700.000	9	6.267.132	12	8.683.044	12	8.683.044	100,00%	99,81%	KEC BANGUNTAPAN
		Langganan surat kabar	bulan	12	1.620.000	12	1.620.000	9	1.080.000	12	1.440.000	12	1.440.000	100,00%	88,89%	KEC BANGUNTAPAN
		Pajak STNK	unit	6	1.500.000	6	1.500.000	5	1.250.000	6	1.449.500	6	1.449.500	100,00%	96,63%	KEC BANGUNTAPAN
		Penggunaan administrasi perkanbrn	lembar	48000	7.200.000	48000	7.200.000	36000	5.400.000	48000	7.200.000	48000	7.200.000	100,00%	100,00%	KEC BANGUNTAPAN
		Rapat pengelolaan keuangan, barang dan kepegawaian	om	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0			KEC BANGUNTAPAN
		Jumlah pengadaan seragam olahraga dan pakaian adat jawa	stel	50	14.375.000	50	14.375.000	50	14.375.000	50	14.375.000	50	14.375.000	100,00%	100,00%	KEC BANGUNTAPAN
		Honor petugas harian lepas	ob	12	88.800.000	58	85.400.000	43	63.200.000	58	85.400.000	58	85.400.000	100,00%	100,00%	KEC BANGUNTAPAN
												0	0			KEC BANGUNTAPAN
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		paket	12	116.500.000	12	138.300.000	9	97.262.500	12	136.599.300	12	136.599.300	100,00%	98,77%	KEC BANGUNTAPAN
		Jumlah makan minum rapat	om	1900	66.500.000	2180	76.300.000	1450	49.762.500	2135	74.612.500	2135	74.612.500	97,94%	97,79%	KEC BANGUNTAPAN
		Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah	op	4	40.000.000	4	52.000.000	4	40.000.000	4	51.986.800	4	51.986.800	100,00%	99,97%	KEC BANGUNTAPAN
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	op	200	10.000.000	200	10.000.000	150	7.500.000	200	10.000.000	200	10.000.000	100,00%	100,00%	KEC BANGUNTAPAN
	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkanbrn	Honor petugas keamanan kanbr	ob	0	-	0	-	0	-			0	0			KEC BANGUNTAPAN
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					1	334.371.000	0,685	219.415.736	0,96	322.410.922	0,96	322.410.922	96,00%	96,42%	KEC BANTUL
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkanbrn					1	334.371.000	12	-	1						KEC BANTUL
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Nilai AKIP	Angka	80	300.081.600	80	312.431.600				311.356.801	0	311.356.801	0,00%	99,66%	KEC DLINGO
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkanbrn				180.081.600		172.161.600				171.086.801	0	171.086.801		99,38%	KEC DLINGO
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi				120.000.000		140.270.000				140.270.000	0	140.270.000		100,00%	KEC DLINGO
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian nilai AKIP			315.862.500		315.862.500				311.685.808	0	311.685.808		98,68%	KEC JETIS
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkanbrn				197.362.500		197.362.500		130.580.204		193.185.808	0	193.185.808		97,88%	KEC JETIS
	Jumlah Pembayaran Rekening	bulan	12				27.600.000	9	17.336.804		23.999.908	0	23.999.908		86,96%	KEC JETIS

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								III		IV						
1	4	5		8		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Listrik,Telp,Air			27.600.000											
		Pembelian ATK	Paket	12	13.777.000		13.777.000	9	9.975.000		13.777.000	0	13.777.000		100,0%	KEC JETIS
		Jumlah Belanja Perbaikan Perlengkapan Kantor	bulan	12	5.800.000		5.800.000	9	5.010.000		5.800.000	0	5.800.000		100,00%	KEC JETIS
		Jumlah Pembayaran Pajak Kendaraan	buah	6	2.200.000		2.200.000	5	1.496.400		1.647.400	0	1.647.400		74,88%	KEC JETIS
		Jumlah Pembayaran Surat Kabar	kali	12	3.000.000		3.000.000	9	2.232.000		2.976.000	0	2.976.000		99,20%	KEC JETIS
		Jumlah Honor Pengelola Keuangan	ob	96	21.660.000		21.660.000	72	12.180.000		21.660.000	0	21.660.000		100,00%	KEC JETIS
		Juman Belanja Peranko,Materai dan Benda Pos lainnya	lembar	900	4.998.000		4.998.000	700	3.700.000		4.998.000	0	4.998.000		100,00%	KEC JETIS
		Jumlah Pembelian Pahan Pembersih	paket	4	8.000.000		8.000.000	9	5.600.000		8.000.000	0	8.000.000		100,00%	KEC JETIS
		Jumlah Belanja Pegawai Honoror/ Tidak Tetap	ob	22	35.000.000		35.000.000	16	23.250.000		35.000.000	0	35.000.000		100,00%	KEC JETIS
		Jumlah Belanja Honorarium Pegawai Kontrak	ob	22	37.400.000		37.400.000	16	27.200.000		37.400.000	0	37.400.000		100,00%	KEC JETIS
		Jumlah Belanja Cetak/Penggunaan	lembar	29385	15.877.500		15.877.500	20210	9.050.000		15.877.500	0	15.877.500		100,00%	KEC JETIS
		Jumlah Belanja alat-alat listrik dan elektronika (Lampu pijar, Bateray Kering)		2	10.650.000		10.650.000	2	5.000.000		10.650.000	0	10.650.000		100,00%	KEC JETIS
		Jumlah Belanja Jasa tambah daya	0		-		-		-		-	0	0			KEC JETIS
		Jumlah Belanja Snek dan Minum Tamu	ob	4	11.400.000		11.400.000	9	8.550.000		11.400.000	0	11.400.000		100,00%	KEC JETIS
		Jumlah Belanja Pakaian DH	Paket		-		-					0	0			KEC JETIS
		Jumlah Belanja Pakaian Batik Tradisional	Paket		-		-					0	0			KEC JETIS
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi				118.500.000		118.500.000		84.799.400		118.500.000	0	118.500.000		100,00%	KEC JETIS
		Jumlah Belanja Snek Minum Rapat	om	1280	37.000.000		37.000.000	850	25.400.000		37.000.000	0	37.000.000		100,00%	KEC JETIS
		Jumlah Belanja Makanan dan Minum Rapat	om	650	22.500.000		22.500.000	460	16.850.000		22.500.000	0	22.500.000		100,00%	KEC JETIS
		Jumlah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	ok	16	2.000.000		2.000.000	10	1.165.000		2.000.000	0	2.000.000		100,00%	KEC JETIS
		Jumlah Belanja Perjalanan Dinas luar daerah	kali	6	57.000.000		57.000.000	4	41.384.400		57.000.000	0	57.000.000		100,00%	KEC JETIS
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Nilai AKIP			468.524.500	0	491.852.500		320.136.772		490.708.345	0	490.708.345		99,77%	KEC SEDAYU
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran				160.024.500		152.352.500		112.620.372		151.299.945	0	151.299.945		99,31%	KEC SEDAYU
		jumlah paket jasa listrik telepon	bulan	12	39.000.000	12	32.600.000	9	22.996.372	12	31.547.445	12	31.547.445	100,00%	96,77%	KEC SEDAYU
		Jumlah bulan honor tm Pengelola keuangan	bulan	12	13.680.000	12	13.680.000	9	10.260.000	12	13.680.000	12	13.680.000	100,00%	100,00%	KEC SEDAYU
		Jumlah Belanja Alat Tulis kantor	bulan	12	18.244.500	12	18.244.500	9	14.000.000	12	18.244.500	12	18.244.500	100,00%	100,00%	KEC SEDAYU
		Jumlah belanja barang cetak dan penggandaan	bulan	12	19.500.000	12	21.500.000	9	15.000.000	12	21.500.000	12	21.500.000	100,00%	100,00%	KEC SEDAYU

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								III		IV						
1	4	5		8		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Jumlah belanja abt listrik dan elektronika	bulan	12	8.000.000	12	8.000.000	9	6.000.000	12	8.000.000	12	8.000.000	100,00%	100,00%	KEC SEDAYU
		belanja baham Bacaan dan peraturan perundang-undangan	bulan	12	3.600.000	12	2.328.000	27	1.818.000	12	2.328.000	12	2.328.000	100,00%	100,00%	KEC SEDAYU
		jumlah jasa petugas kebersihan kanbr	bulan	12	36.000.000	12	36.000.000	9	27.000.000	12	36.000.000	12	36.000.000	100,00%	100,00%	KEC SEDAYU
		Belanja alat dan bahan kebersihan	bulan	12	6.000.000	12	6.000.000	9	4.500.000	12	6.000.000	12	6.000.000	100,00%	100,00%	KEC SEDAYU
		jumlah pemeliharaan perlengkapan kanbr	bulan	12	15.000.000	12	13.000.000	9	10.046.000	12	13.000.000	12	13.000.000	100,00%	100,00%	KEC SEDAYU
		Belanja jasa pengelolaan sampah	bulan	12	1.000.000	12	1.000.000	2	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000	100,00%	100,00%	KEC SEDAYU
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi				308.500.000		339.500.000		207.516.400		339.408.400	0	339.408.400		99,97%	KEC SEDAYU
		Jumlah rapat koordinasi	om		142.500.000	8500	158.100.000		98.100.000	8500	158.100.000	8500	158.100.000	100,0%	100,0%	KEC SEDAYU
		jumlah rapat kegiatan	om		68.000.000	3100	68.000.000		62.850.000	3100	68.000.000	3100	68.000.000	100,0%	100,0%	KEC SEDAYU
		Jumlah perjalanan dinas luar daerah	kali	6	68.000.000	6	80.000.000	4	22.500.000	6	79.908.400	6	79.908.400	100,00%	99,89%	KEC SEDAYU
		Rapat Kordinasi Kedalam Daerah	op	420		420	33.400.000	315	24.066.400	420	33.400.000	420	33.400.000	100,00%	100,00%	KEC SEDAYU
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Nilai Akip	Nilai	77	192.230.975		192.230.975		132.552.791		193.516.302	0	193.516.302		100,67%	KECSRANDAKAN
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkanbrn											0	0			KEC SRANDAKAN
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kanbr	Jenis	10	6.000.000	10	6.000.000	6	2.900.000	10	6.000.000	10	6.000.000	100,00%	100,00%	KEC SRANDAKAN
		Honor pengelola keuangan, barang dan kepegawaian	bulan	12	11.460.000	12	11.460.000	9	8.420.000	12	11.460.000	12	11.460.000	100,00%	100,00%	KEC SRANDAKAN
		Honor tenaga kebersihan dan penjaga malam	bulan	12	27.600.000	12	27.600.000	9	20.700.000	12	27.600.000	12	27.600.000	100,00%	100,00%	KEC SRANDAKAN
		Honor pegawai kontrak	ob	24	40.800.000	24	40.800.000	16	27.200.000	24	40.800.000	24	40.800.000	100,00%	100,0%	KEC SRANDAKAN
		Belanja ATK	ls	1	15.375.525	1	15.375.525	1	11.528.500	1	15.375.500	1	15.375.500	100,00%	100,0%	KEC SRANDAKAN
		terpenuhinya materai	lembar	1200	5.100.000	1200	5.100.000	900	3.825.000	1200	5.100.000	1200	5.100.000	100,00%	100,0%	KEC SRANDAKAN
		Pembayaran rekening listrik	bulan	12	16.524.000	12	16.524.000	9	10.406.237	12	14.824.403	12	14.824.403	100,00%	89,71%	KEC SRANDAKAN
		Pembayaran rekening telepon	bulan	12	3.036.000	12	3.036.000	9	2.025.954	12	2.310.024	12	2.310.024	100,00%	76,09%	KEC SRANDAKAN
		Pembayaran rekening koran	bulan	12	2.200.000	12	2.200.000	9	1.190.000	12	1.565.000	12	1.565.000	100,00%	71,14%	KEC SRANDAKAN
		Pembayaran pajak kendaraan bermotor	kendaraan	6	3.000.000	6	3.000.000	2	1.424.600	6	1.908.100	6	1.908.100	100,00%	63,60%	KEC SRANDAKAN
		penggandaan/foto copy		36514	6.389.950	36514	6.389.950	27360	4.788.000	36514	10.545.775	36514	10.545.775	100,00%	165,04	KEC SRANDAKAN
		Pembelian peralatan dan bahan kebersihan kantor			-		-				1.282.000	0	1.282.000			KEC SRANDAKAN
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan konsultasi															KEC SRANDAKAN
		Belanja makan minum rapat	om	763		763	21.745.500	570	16.244.500	763	21.745.500	763	21.745.500	100,00%	100,00%	KEC SRANDAKAN

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								III		IV						
1	4	5		8		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					21.745.500											
		jumlah perjalanan dinas luar daerah	op	3	33.000.000	3	33.000.000	3	21.900.000	3	33.000.000	3	33.000.000	100,00%	100,00%	KEC SRANDAKAN
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Nilai AKIP			2.533.555.000		349.288.899		182.451.205		349.288.899	0	349.288.899		100,00%	KEC KRETEK
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkanbran		bulan	1	170.333.000	12	254.266.899	1	125.566.939	12	254.266.899	12	254.266.899	100,00%	100,00%	KEC KRETEK
		Honor Petugas Pengelola Keuangan, Barang dan Kepegawaian	ob			22				22		22	0	100,00%		KEC KRETEK
		Honor pegawai kontrak	ls			1				1		1	0	100,00%		KEC KRETEK
		Jumlah Pengadaan ATK	ls			1				1		1	0	100,00%		KEC KRETEK
		Jumlah Pengadaan Alat Listrik	buah			425				425		425	0	100,00%		KEC KRETEK
		Jumlah Materi	ls			1				1		1	0	100,00%		KEC KRETEK
		Jumlah Pengadaan Alat Kebersihan dan bahan pembersih	ls			1				1		1	0	100,00%		KEC KRETEK
		Belanja peralatan dan bahan pembersih	bulan			12				12		12	0	100,00%		KEC KRETEK
		Jumlah Pembayaran Rekening Telpon	bulan			13				13		13	0	100,00%		KEC KRETEK
		Jumlah Pembayaran Rekening Listrik	ls			1				1		1	0	100,00%		KEC KRETEK
		Jumlah langganan Surat Kabar dan Majalah	ls			1				1		1	0	100,00%		KEC KRETEK
		Pajak Kendaraan Dinas	lembar			101840				101840		101840	0	100,00%		KEC KRETEK
		Jumlah cetak	ls			1				1		1	0	100,00%		KEC KRETEK
		Jumlah Penggandaan	ob			22				22		22	0	100,00%		KEC KRETEK
		jumlah pembayaran premi asuransi kesehatan dan kelenagakerjaan	om			1815				1815		1815	0	100,00%		KEC KRETEK
		Jumlah makan minum Rakor	unit			6				6		6	0	100,00%		KEC KRETEK
		jumlah pengadaan peralatan kanbr										0	0			KEC KRETEK
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah perjalanan dinas dalam dan luar daerah	ls	1	34.000.000	1	46.000.000	1	28.534.266	1	46.000.000	1	46.000.000	100,00%	100,00%	KEC KRETEK
	Penyediaan Jasa Pengelolaan Pelayanan Perkanbran	jumlah honorer kontrak	kali	1	49.022.000	3	49.022.000	1	28.350.000	3	49.022.000	3	49.022.000	100,00%	100,00%	KEC KRETEK
		Jumlah pelaksanaan sosialisasi IUMK										0	0			KEC KRETEK
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						329.319.658	52,73	173.642.307	94,8307	312.296.268	94,8307	312.296.268		94,83%	KEC PAJANGAN
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkanbran						186.349.658	69,86	130.178.907	95,1442	177.300.868	95,1442	177.300.868		95,14%	KEC PAJANGAN
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi						142.970.000	30,4	43.463.400	94,4222	134.995.400	94,4222	134.995.400		94,42%	KEC PAJANGAN

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								III		IV						
1	4	5		8		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Nilai AKIP			287.161.350		299.226.350	67,05	87.032.789	0	82.847.605	0	82.847.605		27,69%	KEC PIYUNGAN
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran		persen	100	186.711.350	100	179.661.350	22,82	42.601.389		47.158.605	0	47.158.605	0,00%	26,25%	KEC PIYUNGAN
		Honor Pengelola Kau, Barang & Kepegawaian	ob	84	11.640.000	84	11.640.000					0	0	0,00%	0,00%	KEC PIYUNGAN
		Jumlah ATK	jenis	20	21.491.350	20	21.491.350					0	0	0,00%	0,00%	KEC PIYUNGAN
		Jumlah alat listrik dan elektronika	jenis	10	6.000.000	10	6.000.000					0	0	0,00%	0,00%	KEC PIYUNGAN
		Jumlah Materai	lembar	1075	4.650.000	1075	4.650.000					0	0	0,00%	0,00%	KEC PIYUNGAN
		Jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih	jenis	12	6.000.000	12	6.000.000					0	0	0,00%	0,00%	KEC PIYUNGAN
		Pembayaran telepon	bulan	12	4.600.000	12	6.600.000					0	0	0,00%	0,00%	KEC PIYUNGAN
		Pembayaran Air	bulan	12	2.400.000	12	2.400.000					0	0	0,00%	0,00%	KEC PIYUNGAN
		Pembayaran listrik	bulan	12	30.000.000	12	27.000.000					0	0	0,00%	0,00%	KEC PIYUNGAN
		Langganan surat kabar	bulan	12	4.200.000	12	4.200.000					0	0	0,00%	0,00%	KEC PIYUNGAN
		Pembayaran Tambah Daya Listrik	unit	2	8.000.000	2	8.000.000					0	0	0,00%	0,00%	KEC PIYUNGAN
		Pajak STNK	unit	7	2.680.000	7	2.680.000					0	0	0,00%	0,00%	KEC PIYUNGAN
		Cetak	kali	5	1.250.000	5	1.250.000					0	0	0,00%	0,00%	KEC PIYUNGAN
		Penggandaan administrasi perkanbroran	lembar	50000	10.000.000	50000	10.000.000					0	0	0,00%	0,00%	KEC PIYUNGAN
		Honor petugas harian lepas	ob	48	73.800.000	44	67.750.000					0	0	0,00%	0,00%	KEC PIYUNGAN
												0	0			KEC PIYUNGAN
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		persen	100	100.450.000	100	119.565.000	44,23	44.431.400		35.689.000	0	35.689.000	0,00%	29,85%	KEC PIYUNGAN
		Jumlah makan minum rapat	dos	985	34.450.000	985	34.450.000					0	0	0,00%	0,00%	KEC PIYUNGAN
		Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah	op	6	45.000.000	21	64.115.000					0	0	0,00%	0,00%	KEC PIYUNGAN
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	op	366	21.000.000	366	21.000.000					0	0	0,00%	0,00%	KEC PIYUNGAN
	Penyediaan Jasa pengelola pelayanan Perkanbroran											0	0			KEC PIYUNGAN
		Uang lembur PNS										0	0			KEC PIYUNGAN
		Cetak										0	0			KEC PIYUNGAN
		Makan dan Minum Rapat										0	0			KEC PIYUNGAN
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)			216.981.000		216.981.000		138.231.067		228.258.891	0	228.258.891		105,20%	KEC PUNDONG

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								III		IV						
1	4	5		8		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	Jumlah belanja meterai, jasa telepon, jasa listrik, atk, honor tenaga administrasi keuangan, penjaga malam, petugas kebersihan, dan honor petugas administrasi, bahan dan alat kebersihan kantor, paket kelengkapan komputer, cetak dan penggandaan, komponen listrik, surat kabar		12	148.731.000	12	148.731.000	9	86.955.367	12	148.914.191	12	148.914.191	100,00%	100,12%	KEC PUNDONG
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah rapat, perjalanan dinas dalam dan luar daerah		12	68.250.000	12	68.250.000	9	51.275.700	12	79.344.700	12	79.344.700	100,00%	116,26%	KEC PUNDONG
	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkanbran											0	0			KEC PUNDONG
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						285.590.000		139.533.013		284.038.055	0	284.038.055		99,46%	KEC SANDEN
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkanbran						98.290.000	60,36	59.331.213	100	93.556.395	100	93.556.395		95,18%	KEC SANDEN
		Honor Pengelola Keuangan dan barang										0	0			KEC SANDEN
		Belanja ATK										0	0			KEC SANDEN
		Terpenuhinya kebutuhan komponen listrik										0	0			KEC SANDEN
		Terpenuhinya meterai										0	0			KEC SANDEN
		Honor petugas kebersihan										0	0			KEC SANDEN
		Belanja BBM/Gas										0	0			KEC SANDEN
		Pembayaran rekening listrik										0	0			KEC SANDEN
		Pembayaran rekening telepon										0	0			KEC SANDEN
		Pembayaran pajak kendaraan dinas										0	0			KEC SANDEN
		Terpenuhi kebutuhan barang cetakan										0	0			KEC SANDEN
		Tersedia barang Penggandaan										0	0			KEC SANDEN
		Pembayaran rekening koran										0	0			KEC SANDEN
		Pembelian peralatan dan bahan kebersihan lingkungan										0	0			KEC SANDEN
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi						128.500.000	62,41	80.201.800	100	128.491.800	100	128.491.800		99,99%	KEC SANDEN
		Belanja Makan minum rapat										0	0			KEC SANDEN
		Jumlah perjalanan dinas keluar daerah										0	0			KEC SANDEN
		Jumlah Perjalanan dinas dalam daerah										0	0			KEC SANDEN

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								III		IV						
1	4	5		8		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkanbran	Bimtek Pelayanan masyarakat					62.000.000			100	61.989.860	100	61.989.860		99,98%	KEC SANDEN
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Nilai Akip		0,95	275.565.000	1	287.565.000	0,649	178.901.241	1	272.243.551	1	272.243.551	100,00%	94,67%	KEC KASIHAN
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Pengadaan Alat Tulis Kantor	Jenis	12		12	173.680.000		111.427.941	12	158.411.951	12	158.411.951	100,00%	91,21%	KEC KASIHAN
		Jumlah langganan Surat Kabar, Koran Dan Tabloid	Bulan	12		12				12		12		100,00%		KEC KASIHAN
		Jumlah pengadaan Jasa Tambah Daya Listrik	Kali	1		1				1		1		100,00%		KEC KASIHAN
		Jumlah Jasa Publikasi	Kali	1		1				1		1		100,00%		KEC KASIHAN
		Honor Petugas PPK, Barang, Kepegawaian, Kontrak Tenaga Kebersihan, Tenaga Bantuan Kecamatan, dan petugas jaga malam	Bulan	12		12				12		12		100,00%		KEC KASIHAN
		Jumlah pengadaan Peralatan Listrik	Kali	1		1				1		1		100,00%		KEC KASIHAN
		Jumlah Pembayaran Rekening Telpn dan Listrik	Bulan	12		12				12		12		100,00%		KEC KASIHAN
		Jumlah Materai	Lembar	1200		1200				1200		1200		100,00%		KEC KASIHAN
		Jumlah Penggandaan	Lembar	100000		100000				100000		100000		100,00%		KEC KASIHAN
		Jumlah Belanja Cetak banner dan kartu lebaran	Kali	12		12				12		12		100,00%		KEC KASIHAN
		Jumlah pengadaan Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	Kali	12		12				12		12		100,00%		KEC KASIHAN
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah makan dan minum pelaksanaan kegiatan	OK	1500	101.885.000	1500	113.885.000	0,662	67.473.300	1500	113.831.600	1500	113.831.600	100,00%	99,95%	KEC KASIHAN
		Jumlah SPPD Luar Daerah	OP	2		2				2		2	0	100,00%		KEC KASIHAN
		Jumlah Makan Dan Minum Rapat	OK	1388		1388				1388		1388	0	100,00%		KEC KASIHAN
		Jumlah SPPD Dalam Daerah	OP	177		177				177		177	0	100,00%		KEC KASIHAN
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan Administrasi perkantoran	Persen	1	313.050.000							0	0			KEC SEWON
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Jumlah pembelian materai	Lembar	350	215.250.000							0	0			KEC SEWON
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah pembelian snack makan minum rapat	dos	1350	97.800.000							0	0			KEC SEWON
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran			237.041.200		254.041.200		113.966.927		241.215.289	0	241.215.289		94,95%	KEC PLERET

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								III		IV						
1	4	5		8		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkanbran	Honor Petugas Pengelola Keuangan dan Kepegawaian, Barang, Lancarnya arus listrik 1 Tahun, materai dan benda pos			153.741.200	132	153.741.200	99	86.160.127	132	143.338.989	132	143.338.989	100,00%	93,23%	KEC PLERET
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Rakor dan Kegiatan monitbring		800	83.300.000	800	100.300.000	402	27.806.800		97.876.300	0	97.876.300	0,00%	97,58%	KEC PLERET
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran			190.482.000		226.482.000	18	133.524.397		213.877.386	0	213.877.386		94,43%	KEC PANDAK
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran		kali	12	129.982.000	12	129.982.000	9	86.551.097	12	121.710.086	12	121.710.086	100,00%	93,64%	KEC PANDAK
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		kali	12	60.500.000	12	96.500.000	9	46.973.300	12	92.167.300	12	92.167.300	100,00%	95,51%	KEC PANDAK
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Nilai AKIP	77	39631	235.500.000	39632	246.600.000	32458	176.645.423	39632	242.224.810	39632	242.224.810	100,00%	98,23%	KEC IMOIGIRI
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkanbran			38504	166.000.000	38504	160.050.000	31986	114.219.023	38504	155.906.910	38504	155.906.910	100,00%	97,41%	KEC IMOIGIRI
		Honor Petugas Jaga Malam Kantor	OB	24		24		18		24		24	0	100,00%		KEC IMOIGIRI
		Jumlah Pengadaan Alat Listrik	jenis	10		10		10		10		10	0	100,00%		KEC IMOIGIRI
		pajak Kendaraan Dinas	unit	6		6		5		6		6	0	100,00%		KEC IMOIGIRI
		Honor Petugas Kebersihan dan Perawatan Taman	OB	12		12		9		12		12	0	100,00%		KEC IMOIGIRI
		Jumlah pengadaan ATK	jenis	10		10		10		10		10	0	100,00%		KEC IMOIGIRI
		Jumlah Penyediaan Jasa Cetak	kali	12		12		9		12		12	0	100,00%		KEC IMOIGIRI
		Jumlah Pembayaran Rekening Telpn dan Listrik	bulan	12		12		9		12		12	0	100,00%		KEC IMOIGIRI
		Jumlah Pengadaan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	jenis	10		10		10		10		10	0	100,00%		KEC IMOIGIRI
		Jumlah Langganan Surat Kabar dan Majalah	bulan	12		12		9		12		12	0	100,00%		KEC IMOIGIRI
		Jumlah Penggandaan	lembar	37400		37400		31150		37400		37400	0	100,00%		KEC IMOIGIRI
		Honor Petugas PPK, Barang dan Kepegawaian	OB	96		96		72		96		96	0	100,00%		KEC IMOIGIRI
		Jumlah Materai	lembar	900		900		675		900		900	0	100,00%		KEC IMOIGIRI
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi			1127	69.500.000	1128	86.550.000	472	62.426.400	1128	86.317.900	1128	86.317.900	100,00%	99,73%	KEC IMOIGIRI
		Jumlah Study Banding Luar Daerah	kegiatan	7		8		7		8		8	0	100,00%		KEC IMOIGIRI

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								III		IV						
1	4	5		8		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Jumlah Pelaksanaan Rakor	om	1000		1000		350		1000		1000	0	100,00%		KEC IMOIRI
		Jumlah Konsultasi dan Koordinasi Dalam Daerah	ok	120		120		115		120		120	0	100,00%		KEC IMOIRI

	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				1.513.650.000		1.847.603.500					0	0		0,00%	BAPPEDA
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah teralis, gordyn		25	50.000.000	25		25	40.490.000	25	40.490.000	25	40.490.000	100,00%		BAPPEDA
	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor				250.000.000		447.200.000		230.039.300		443.559.300	0	443.559.300	99,19%		BAPPEDA
		Rehabilitasi 1 ruang bidang		1		1		1		1		1	0	100,00%		BAPPEDA
		Pemeliharaan gedung kantor		1		1		1		1		1	0	100,00%		BAPPEDA
	Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Roda Empat		1	425.000.000		661.138.500	1	411.013.500		619.554.500	0	619.554.500	93,71%		BAPPEDA
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan				418.450.000		418.450.000		273.610.000		281.110.000	0	281.110.000	67,18%		BAPPEDA
		Layar presentasi		1		1		1		1		1		100,00%		BAPPEDA
		sound portable		1		1		1		1		1		100,00%		BAPPEDA
		CCTV		4		4		4		4		4		100,00%		BAPPEDA
		TV Monitor		2		2		2		2		2		100,00%		BAPPEDA
		Personal komputer/PC		2		2		2		2		2		100,00%		BAPPEDA
		laptop		1		1		1		1		1		100,00%		BAPPEDA
		Pengadaan genset		1		1		1		1		1		100,00%		BAPPEDA
		Printer		4		4		4		4		4		100,00%		BAPPEDA
		Pengadaan karpet		1		1		1		1		1		100,00%		BAPPEDA
		LCD		1		1		1		1		1		100,00%		BAPPEDA
		Mesin antrian		1		1		0		1		1		100,00%		BAPPEDA
		scanner/pemindai		1		1		1		1		1		100,00%		BAPPEDA
		rumah genset		1		1		1		1		1		100,00%		BAPPEDA
		Pengadaan AC		4		4		4		4		4		100,00%		BAPPEDA
		Layar presentasi		1		1		1		1		1		100,00%		BAPPEDA
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional				320.200.000		245.200.000		118.931.967		168.841.566	0	168.841.566	68,86%		BAPPEDA
		pajak kendaraan dinas		25		25		5		25		25		100,00%		
		bahan bakar minyak		12		12		9		12		12		100,00%		
		Suku cadang kendaraan dinas		25		25		25		25		25		100,00%		
		Pemeliharaan kendaraan dinas/servis		25		25		10		25		25		100,00%		
		Pengecatan Kendaraan Dinas		1		0		0		0		0				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								III		IV						
1	4	5		8		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Pemeliharaan komputer, printer, AC, fax		8	50.000.000	8	35.000.000		20.433.000	8	25.013.000	8	25013000	100,00%	71,47%	BAPPEDA
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	%	98	2.721.222.865		8.036.204.365		2.276.061.772		7.127.657.799	0	7.127.657.799		88,69%	BKAD
	Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional	Pengadaan kendaraan dinas roda 2 dan roda 4	unit	13	1.546.965.000	46	6.336.981.500	13	1.442.000.864	46	5.602.920.114	46	5.602.920.114	100,00%	88,42%	BKAD
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Pengadaan mebeleur dan peralatan dan perlengkapan kantr	unit	249	774.027.865	439	1.271.427.865	271	619.417.000	439	1.176.752.000	439	1.176.752.000	100,00%	92,55%	BKAD
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan kendaraan dinas dan mendukung operasional kedinasan	bulan	12	269.550.000	12	297.115.000	9	164.283.908	12	275.185.935	12	275.185.935	100,00%	92,62%	BKAD
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Perbaikan mebeleur yang rusak	unit	10	130.680.000	10	130.680.000	0	50.360.000	10	72.799.750	10	72.799.750	100,00%	55,71%	BKAD
		Perbaikan peralatan dan perlengkapan kantr yang rusak	Unit	22		22		7		17		17	0	77,27%		BKAD
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	cakupan sarana dan prasarana	persen	100	4.251.400.000	100	4.588.502.900	10	359.595.131	9	3.032.544.468	9	3.032.544.468	9,00%	66,09%	BPBD
	Pembangunan gedung kantr	Pembangunan Pos Damkar	lokasi	3	452.625.000	3	635.250.000	0	-		178.697.000	0	178.697.000	0,00%	28,13%	BPBD
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan	unit	5	622.900.000	5	1.008.183.400	4	244.441.200		565.224.400	0	565.224.400	0,00%	56,06%	BPBD
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantr	Jumlah Pemeliharaan dan rehap gedung/kantr	Bln	12	90.000.000	12	90.000.000	3	15.133.600	3	27.637.000	3	27.637.000	25,00%	30,71%	BPBD
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Belanja Rehabilitasi Kendaraan : pemeliharaan mobil dinas	unit	3	2.754.875.000	3	2.609.569.500	0	78.590.331	3	2.189.605.068	3	2.189.605.068	100,00%	83,91%	BPBD
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah bulan pemeliharaan peraltan dan perlengkapan kantr	Bln	12	331.000.000	12	245.500.000	3	21.430.000	3	71.381.000	3	71.381.000	25,00%	29,08%	BPBD
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur		90	579.354.000	90	929.540.250		496.403.060	88	858.216.244	88	858.216.244	97,78%	92,33%	BKPP
	Pengadaan Pakaian Seragam beserta Perlengkapannya	Jumlah seragam yang didistribui		0	-			0	-			0	0			BKPP
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah pengadaan dan perlengkapan kantr		41	330.708.000	67	624.164.250	41	326.010.000	67	592.769.000	67	592.769.000	100,00%	94,97%	BKPP
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah servis kendaraan dinas roda 2		12	188.086.000	12	234.796.000	11	124.195.860	12	196.312.744	12	196.312.744	100,00%	83,61%	BKPP
		Jumlah servis kendaraan dinas roda 4		3		5		4		5		5	0	100,00%		BKPP
		Jumlah pembelian BBM dan pelumas kendaraan dinas roda 4 dan roda 2		13800		15900		12180		15956		15956	0	100,36%		BKPP
		Jumlah pembelian sukucadang kendaraan dinas roda 4 dan 2		15		17		15		17		17	0	100,00%		BKPP

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								III		IV						
1	4	5		8		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Jumlah pemeliharaan kendaraan		1		3		1		3		3	0	100,00%		BKPP
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor		12	60.560.000	12	70.580.000	12	46.197.200	12	69.134.500	12	69.134.500	100,00%	97,95%	BKPP
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur			678.700.000		770.727.000		137.965.200		730.276.355	0	730.276.355		94,75%	DINAS KEBUDAYAAN
	Pembangunan gedung kantor	Tersedianya sarana pendukung gedung / kantor					179.027.000	4	92.000.000		179.027.000	0	179.027.000		100,00%	
		Canopi, gazebo dan sarana parkir	Unit	3	92.000.000	4		0	-							DINAS KEBUDAYAAN
		Alat bantu keamanan (Teralis)	Unit			1								0,00%		
		DED Gedung Tempat Latihan dan Gamelan	Dok			1								0,00%		
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Jumlah gesung terpelihara		1	8.000.000	1	8.000.000		5.408.200		7.408.200	0	7.408.200		92,60%	DINAS KEBUDAYAAN
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan terpelihara	Unit	5	60.000.000	5	50.000.000		32.605.000		43.588.000	0	43.588.000		87,18%	DINAS KEBUDAYAAN
		Jumlah jasa service	Unit			5										
		Jumlah penggantian suku cadang	Unit			5										
		Jumlah pengecatan	Unit			2										
		Jumlah belanja accesories	Unit			2										
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Peralatan dan perlengkapan terpelihara	2 jenis	2	50.000.000	2	25.000.000	2	7.952.000		12.889.400		12.889.400		51,56%	DINAS KEBUDAYAAN
	Pengadaan peralatan dan perlengkapan	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor		12	468.700.000		508.700.000				487.363.755		487.363.755		95,81%	DINAS KEBUDAYAAN
		Jumlah Bahan/Bibit Tanaman	Jenis			2										DINAS KEBUDAYAAN
		Jumlah Trol	Unit			1										DINAS KEBUDAYAAN
		Jumlah Meubel	Unit			174										DINAS KEBUDAYAAN
		Jumlah AC	Unit			7										DINAS KEBUDAYAAN
		Jumlah Alat Dapur	Buah			21										DINAS KEBUDAYAAN
		Jumlah Peralatan Home Use	Unit			6										DINAS KEBUDAYAAN
		Jumlah Alat Pemadam Kebakaran	Unit			3										DINAS KEBUDAYAAN
		Jumlah PC	Unit			8										DINAS KEBUDAYAAN
		Jumlah Printer	Unit			4										DINAS KEBUDAYAAN
		Laptop	Unit			2										DINAS KEBUDAYAAN
		Jumlah Peralatan Studio Video Film (Projector dan Mic)	Unit			2										DINAS KEBUDAYAAN
		Jumlah Peralatan Studio Video Film (Camera)	Unit			1										DINAS KEBUDAYAAN
		Jumlah Mesin Fax	Unit			1										DINAS KEBUDAYAAN
		Jumlah CCTV	Unit			2										DINAS KEBUDAYAAN

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								III		IV						
1	4	5		8		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	persen			98	1.634.785.000				2.465.550.000	0	2.465.550.000		150,82%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan						1.745.350.000		1.042.052.048		1.649.301.548	0	1.649.301.548		94,50%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
		Pengadaan Mesin Antrian	unit							1	88.850.000	1	88.850.000			DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
		Pengadaan Meubeler/Kursi rapat, rak arsip, tenda	Buah							18	86.700.048	18	86.700.048			DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
		Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	unit							1	2.500.000	1	2.500.000			DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
		Pengadaan Personel Komputer / laptop	Unit							5	150.450.000	5	150.450.000			DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
		Pengadaan Server	Unit							1	198.750.000	1	198.750.000			DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
		Pengadaan Printer/UPS/alat perekaman	Unit							2	1.113.061.500	2	1.113.061.500			DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
		Pengadaan Televisi	Unit							1	8.990.000	1	8.990.000			DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor						82.000.000		39.815.156		81.874.156	0	81.874.156		99,85%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
		Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bnagunan	Tahun							1	81.874.156	1	81.874.156			DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional						305.900.000		242.443.085		304.839.725	0	304.839.725		99,65%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
		Belanja Jasa Servis	Unit							26	5.896.000	26	5.896.000			DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
		Belanja Penggantian Suku Cadang	Unit							26	19.011.154	26	19.011.154			DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
		Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	Tahun							1	269.995.071	1	269.995.071			DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
		Belanja Rehab Mobil Dinas	Tahun							1	9.937.500	1	9.937.500			DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan						80.000.000		54.243.000		79.985.875	0	79.985.875		99,98%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
		Belanja Pemeliharaan Peralatan	Tahun							1	79.985.875	1	79.985.875			
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur					2.193.042.500	7	285.124.000	11	1.378.329.999	11	1.378.329.999		62,85%	DINAS KESEHATAN
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	- Terpeliharanya gedung kantor				5	936.700.000	1	127.649.000	5	730.668.001	5	730.668.001	100,00%	78,00%	DINAS KESEHATAN
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	- Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional dengan baik				12	241.050.000	3	3.000.000	3	188.999.000	3	188.999.000	25,00%	78,41%	DINAS KESEHATAN
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor				12	1.015.292.500	3	154.475.000	3	458.662.998	3	458.662.998	25,00%	45,18%	DINAS KESEHATAN
												0	0			
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Mencapai Nilai AKIP		90%	714.755.000	90%	714.755.000			97%	742.916.006	97%	742.916.006	107,78%	103,94%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Kelancaran Tugass pokok fungsi Kantor		90	500.950.000	0,89	500.950.000			0,975	538.088.697	0,975	538.088.697	109,55%	107,41%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kelancaran Tugass pokok fungsi Kantor	unit	12	213.805.000	0,92	213.805.000			0,96	204.827.309	0,96	204.827.309	104,36%	95,80%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	Kelancaran Tugass pokok fungsi Kantor		0		0						0	0			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
												0	0			

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								III		IV						
1	4	5		8		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	persentase	96	236.641.000	96	537.090.811		186.455.500	96	523.462.590	96	523.462.590	100,00%	97,46%	DINAS KOPERASI UKMP
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor				10.000.000		93.225.000		9.925.000		92.725.000	0	92.725.000		99,46%	DINAS KOPERASI UKMP
		AC standing 1, AC split 9 unit, komputer 7 unit, lap top 5 unit, printer 8 unit, UPS 4 unit, CCTV 5 unit, interior ruang rapat, interior ruang kerja, teralis, rolling display lobby pemda	unit													DINAS KOPERASI UKMP
		filing kabinet				6				6						DINAS KOPERASI UKMP
		jumlah komputer		1		2		1		2		2	0	100,00%		DINAS KOPERASI UKMP
		jumlah printer		1		2		1		2		2	0	100,00%		DINAS KOPERASI UKMP
		printer khusus cetak sertifikat				1				1						DINAS KOPERASI UKMP
		laptop				1				1						DINAS KOPERASI UKMP
		LCD				3				3						DINAS KOPERASI UKMP
		Kamera				1				1						DINAS KOPERASI UKMP
		handphone				3				3						DINAS KOPERASI UKMP
	Pengadaan peralatan gedung kantor				97.250.000		260.483.821		90.510.000		258.187.000	0	258.187.000		99,12%	DINAS KOPERASI UKMP
		terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor	paket													
		gordyn		65		65		65		65		65	0	100,00%		DINAS KOPERASI UKMP
		mebelair		70		72		70		70		70	0	97,22%		DINAS KOPERASI UKMP
		gedung & garasi	unit			1				1						
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor				24.991.000		34.991.990		11.623.500		34.852.590	0	34.852.590		99,60%	DINAS KOPERASI UKMP
		pemeliharaan rutin/gedung kantor	kantor	2		2		2		2		2	0	100,00%		DINAS KOPERASI UKMP
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional				89.398.000		128.750.000		64.410.000		118.093.500	0	118.093.500		91,72%	DINAS KOPERASI UKMP
		jumlah pengadaan suku cadang	unit	21		21		14		19		19	0	90,48%		DINAS KOPERASI UKMP
		terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	unit	21		21		14		19		19	0	90,48%		DINAS KOPERASI UKMP
		tersedianya BBM	liter	8081		9062,5		5875		9062		9062	0	99,99%		DINAS KOPERASI UKMP
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan				15.002.000		19.640.000		9.987.000		19.604.500	0	19.604.500		99,82%	DINAS KOPERASI UKMP
		pemeliharaan AC, Mesin ketik, genset, komputer, lep top, note book, printer, LCD, wireless, mike, televisi, dll.	buah													

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								III		IV						
1	4	5		8		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		jumlah peralatan kantor terpelihara		10				10		10		10	0			DINAS KOPERASI UKMP
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	persen	98	1.673.176.536	98	2.759.675.413		407.319.664	92	2.547.140.162	92	2.547.140.162	93,88%	92,30%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA & OLAH RAGA
	Pengadaan barang bercorak kesenian	jumlah gamelan	set	4	286.787.500	5	286.787.500	0		5	204.500.000	5	204.500.000	100,00%	71,31%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA & OLAH RAGA
	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	jumlah gedung	gedung	2	666.244.040	2	716.244.040	1	35.011.000	2	686.567.631	2	686.567.631	100,00%	95,86%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA & OLAH RAGA
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	jumlah perlengkapan	paket	22	180.625.000	22	1.004.920.870	22	166.177.625	22	970.544.625	22	970.544.625	100,00%	96,58%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA & OLAH RAGA
		jumlah alat transportasi	unit			2				2						
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	jumlah gedung	paket	6	265.000.000	8	457.275.007	3	49.711.100	8	434.527.250	8	434.527.250	100,00%	95,03%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA & OLAH RAGA
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan (6 mobil, 91 sepeda motor)	unit	97	274.519.996	97	294.447.996	32	156.419.939	95	251.000.656	95	251.000.656	97,94%	85,24%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA & OLAH RAGA
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	jumlah paket pemeliharaan perangkat perkantoran	tahun									0	0			DINAS PENDIDIKAN PEMUDA & OLAH RAGA
												0	0			
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana	persentase		850.157.000	100	953.157.000		689.391.654	100	895.006.254	100	895.006.254	100,00%	93,90%	DINAS PERTANAHAN TATA RUANG
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Unit	12	45.727.000	4	65.727.000	9	36.777.500	4	64.245.000	4	64.245.000	100,00%	97,75%	DINAS PERTANAHAN TATA RUANG
		Terpeliharanya pagar kantor	Unit	12		1		9		1		1	0	100,00%		DINAS PERTANAHAN TATA RUANG
		Terpeliharanya halaman	Unit			1				1						
		Terpeliharanya tempat parkir	Unit			2				2						
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Suku cadang dan jasa service dan pajak kendaraan	Kendaraan Dinas	19	170.480.000	17	170.480.000	12	115.898.371	17	162.110.471	17	162.110.471	100,00%	95,09%	DINAS PERTANAHAN TATA RUANG
		Belanja BBM	Liter			13000				13937						
	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya Peralatan Kantor	Tahun	12	40.000.000	1	40.000.000	8	24.140.000	1	36.760.000	1	36.760.000	100,00%	91,90%	DINAS PERTANAHAN TATA RUANG
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Pengadaan filing kabinet	Unit	1	593.950.000	1	676.950.000	1	512.575.783	1	631.890.783	1	631.890.783	100,00%	93,34%	DINAS PERTANAHAN TATA RUANG
		Pengadaan tong sampah	Unit	3		3		3		3		3	0	100,00%		DINAS PERTANAHAN TATA RUANG
		Pengadaan laptop	Unit	2		5		2		5		5	0	100,00%		DINAS PERTANAHAN TATA RUANG
		Pengadaan printer	Unit	3		3		3		3		3	0	100,00%		DINAS PERTANAHAN TATA RUANG
		Pengadaan printer A3	Unit	3		3		3		3		3	0	100,00%		DINAS PERTANAHAN TATA RUANG
		Pengadaan monitor LED	Unit	2		2		1		2		2	0	100,00%		DINAS PERTANAHAN TATA RUANG
		Pengadaan Modem	Unit	1		1		1		1		1	0	100,00%		DINAS PERTANAHAN TATA RUANG
		Pengadaan Genset	Unit	1		1		1		1		1	0	100,00%		DINAS PERTANAHAN TATA RUANG

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								III		IV						
1	4	5		8		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pengadaan perlengkapan komputer	Jenis	1		1		0		1		1	0	100,00%		DINAS PERTANAHAN TATA RUANG
		Pengadaan alat potong rumput	Unit	1		1		1		1		1	0	100,00%		DINAS PERTANAHAN TATA RUANG
		Pengadaan Aset Tetap Renovasi	Unit	1		1		1		1		1	0	100,00%		DINAS PERTANAHAN TATA RUANG
		Pengadaan kamera	Unit	1		1		1		1		1	0	100,00%		DINAS PERTANAHAN TATA RUANG
		Pengadaan LCD Proyektor	Unit	1		1		1		1		1	0	100,00%		DINAS PERTANAHAN TATA RUANG
		Pengadaan AC	Unit	4		4		4		4		4	0	100,00%		DINAS PERTANAHAN TATA RUANG
		Pengadaan GPS	Unit	1		1		1		1		1	0	100,00%		DINAS PERTANAHAN TATA RUANG
		Pegadaan Sound System	Unit			3				3						
	Pembangunan Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor															DINAS PERTANAHAN TATA RUANG
	Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional															DINAS PERTANAHAN TATA RUANG
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana	Persentase	93	1.232.133.000	93	1.238.020.000		977.262.308	93	1.212.621.366	93	1.212.621.366	100,00%	97,95%	SATPOL PP
	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	Jumlah rehabilitasi gedung kanbr	Unit	1	177.300.000	1	151.150.000	1	148.700.000	1	151.150.000	1	151.150.000	100,00%	100,00%	SATPOL PP
	Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional	Unit	4	569.708.000	4	516.745.000	4	511.495.000	4	511.495.000	4	511.495.000	100,00%	98,98%	SATPOL PP
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan	Jenis	19	167.125.000	19	167.125.000	17	135.895.510	19	160.909.010	19	160.909.010	100,00%	96,28%	SATPOL PP
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	Unit	1	50.000.000	1	50.000.000	0	-	1	50.000.000	1	50.000.000	100,00%	100,00%	SATPOL PP
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pembiayaan suku cadang kendaraan dinas/operasional	Unit	42	235.000.000	42	320.000.000	38	169.315.498	42	319.060.216	42	319.060.216	100,00%	99,71%	SATPOL PP
		Jumlah pembiayaan bmn kendaraan dinas/operasional	Liter	18750		18750		14050		1870		1870	0	9,97%		SATPOL PP
		Jumlah service kendaraan dinas/operasional	Unit	42		42		34		42		42	0	100,00%		SATPOL PP
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Unit	15	33.000.000	15	33.000.000	12	11.856.300	14	20.007.140	14	20.007.140	93,33%	60,63%	SATPOL PP
												0	0			
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur			2.193.042.500		2.193.042.500	7	285.124.000	11	1.378.329.999	11	1.378.329.999		62,85%	DINAS KESEHATAN
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	- Terpeliharanya gedung kantor		5	936.700.000	5	936.700.000	1	127.649.000	5	730.668.001	5	730.668.001	100,00%	78,00%	DINAS KESEHATAN
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	- Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional dengan baik		12	241.050.000	12	241.050.000	3	3.000.000	3	188.999.000	3	188.999.000	25,00%	78,41%	DINAS KESEHATAN
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor		12	1.015.292.500	12	1.015.292.500	3	154.475.000	3	458.662.998	3	458.662.998	25,00%	45,18%	DINAS KESEHATAN

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				III		IV		11		12		13		X=13/8 X 100%		
1	4	5		8		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur		98	994.150.000	98	1.262.526.758			98	1.262.526.758	98	1.262.526.758	100,00%	100,00%	DINAS PERDAGANGAN
	Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional				53.585.000		53.585.000	2	52.710.000		53.585.000	0	53.585.000		100,00%	DINAS PERDAGANGAN
		Jumlah Penyediaan Kendaraan bermotor roda tiga	0 unit	2		2				2		2	0	100,00%		DINAS PERDAGANGAN
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan				321.650.000		569.048.900		281.725.900		569.048.900	0	569.048.900		100,00%	DINAS PERDAGANGAN
		Jumlah penyediaan perlengkapan kantor (gerobak sampah, pompa air, rak arsip, AC, kulkas, kipas angin, dispenser, speaker, soundsystem	85 unit	95		95		95		95		95	0	100,00%		DINAS PERDAGANGAN
		Jumlah penyediaan peralatan kantor (komputer dan kelengkapannya, laptop, printer, handycam, kamera, GPS, CCTV)	16 unit	23		23		23		23		23	0	100,00%		DINAS PERDAGANGAN
		Jumlah penyediaan display barang	0 unit	1		1		1		1		1	0	100,00%		DINAS PERDAGANGAN
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor				257.875.000		256.183.150		261.380.750		256.183.150	0	256.183.150		100,00%	DINAS PERDAGANGAN
		Jumlah ruang rapat/ ruang kerja yang direhab	0 paket	1		1		1		1		1	0	100,00%		DINAS PERDAGANGAN
		Jumlah gedung kantor terpelihara	0 unit	1		1		1		1		1	0	100,00%		DINAS PERDAGANGAN
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional				338.952.308		338.952.308		210.179.427		338.952.308	0	338.952.308		100,00%	DINAS PERDAGANGAN
		Jumlah kendaraan dinas terpelihara	5 unit	38		38		38		38		38	0	100,00%		DINAS PERDAGANGAN
		Tersedianya BBM operasional	5300 liter	21547		21547		21547		21547		21547	0	100,00%		DINAS PERDAGANGAN
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan				44.757.400		44.757.400		22.935.000		44.757.400	0	44.757.400		100,00%	DINAS PERDAGANGAN
		Jumlah peralatan, mesin dan perlengkapan kantor terpelihara	10 unit	45		40		45		40		40	0	100,00%		DINAS PERDAGANGAN
												0	0			
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pemenuhan sarana & prasarana aparatur	persen		58.350.000	7	58.350.000	7	32.708.137	7	47.681.987	7	47.681.987	100,00%	81,72%	KESBANGPOL
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan gedung	unit	1	7.500.000	1	7.500.000	1	5.714.000	1	5.714.000	1	5.714.000	100,00%	76,19%	KESBANGPOL
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah paket pemeliharaan kendaraan dinas	bulan	6	50.850.000	6	50.850.000	6	26.994.137	6	41.967.987	6	41.967.987	100,00%	82,53%	KESBANGPOL
												0	0			
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur		0,03	189.600.000	0,03	217.100.000		56.786.150		216.900.677	0	216.900.677		99,91%	INSPEKTORAT
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			100	25.600.000	100	50.600.000	100	3.975.500		50.517.500	0	50.517.500		99,84%	INSPEKTORAT
		Jumlah Pemeliharaan Gedung		10		10		8		10		10	0	100,00%		INSPEKTORAT
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional			100	164.000.000	100	166.500.000	75	52.810.650		166.383.177	0	166.383.177	0,00%	99,93%	INSPEKTORAT

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								III		IV						
1	4	5		8		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		10		10		8		10		10		100,00%		INSPEKTORAT
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentasi Pemenuhan Sarana dan Prasaran Aparatur			3.482.529.500	98	3.738.087.500		1.686.839.867	98	3.467.745.772	98	3.467.745.772	100,00%	92,77%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	Pembangunan			1.481.050.000	1	1.531.050.000	0,5	600.776.053	1	1.478.602.177	1	1.478.602.177	100,00%	96,57%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Pembangunan Pagar Masuk Komplek Pemda II				1		1		1		1		100,00%		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Pembangunan Ruang Tabung Gas				1		1		1		1		100,00%		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Pembangunan Pagar dan Corblok				1				1		1		100,00%		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan				449.174.500							0				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4				1	632.912.500	1	94.830.080	1	544.413.080	1	544.413.080	100,00%	86,02%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Pengadaan Desk Microphone				11		11		11		11		100,00%		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Pengadaan alat pembersih mobil				1		1		1		1		100,00%		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Pengadaan Komputer/PC				4		1		4		4		100,00%		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Pengadaan Televisi				1		4		1		1		100,00%		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Pengadaan Perahu				1		1		1		1		100,00%		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Pengadaan Laptop				2		0		2		2		100,00%		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Pengadaan Printer				3		2		3		3		100,00%		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Kursi Tunggu				3		3		3		3		100,00%		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		ChanSaw				1				1		1		100,00%		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Etalase				4				4		4		100,00%		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Lemari rak				4				4		4		100,00%		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Almari kayu				4				4		4		100,00%		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Kursi tamu				2				2		2		100,00%		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Motor roda 3 siram				1				1		1		100,00%		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Mesin potong rumput				3				3		3		100,00%		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Filling cabinet				4				0		0				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Genset				1						0				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Pemeliharaan Kantor dan Laboratrium Lingkungan			125.000.000	2	125.000.000	2	124.922.000	2	124.922.000	2	124.922.000	100,00%	99,94%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional			1.427.305.000	12	1.449.125.000	9	866.311.734	12	1.319.808.515	12	1.319.808.515	100,00%	91,08%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			100	2.105.890.000	100	1.433.370.000	525.998.708	92,5	1.073.449.261	92,5	1.073.449.261	92,50%	74,89%	SETWAN	
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan			100	684.175.000	100	581.715.000	255.892.500	98	565.444.500	98	565.444.500	98,00%	97,20%	SETWAN	
	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	Jumlah Mebelair	buah	18	202.875.000	30	193.875.000	0	-	30	188.150.000	30	188.150.000	100,00%	97,05%	SETWAN

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								III		IV						
1	4	5		8		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Belanja Modal Alat Pendingin	Jumlah Alat Pendingin	unit	0	74.875.000	7	74.875.000	18	-	7	71.810.000	7	71.810.000	100,00%	95,91%	SETWAN
	Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer	Jumlah Personal Komputer	unit	20	77.675.000	20	79.815.000	20	66.367.500	20	75.977.500	20	75.977.500	100,00%	95,19%	SETWAN
	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	Jumlah Kursi Rapat Pejabat	unit	80	322.750.000	80	187.550.000	80	184.800.000	80	185.825.000	80	185.825.000	100,00%	99,08%	SETWAN
	Belanja Modal Pengadaan Alat Studio	Jumlah Alat Studio	buah	3	6.000.000	3	4.725.000	3	4.725.000	3	4.725.000	3	4.725.000	100,00%	100,00%	SETWAN
	Software	Jumlah aplikasi	aplikasi			2	40.875.000			2	38.957.000	2	38.957.000	100,00%	95,31%	SETWAN
												0	0			SETWAN
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor			100	419.365.000	100	181.465.000		36.806.700	92	144.097.500	92	144.097.500	92,00%	79,41%	SETWAN
	Belanja Bahan/Bibit Tamanan	Jumlah Bahan/Bibit Tamanan	paket	0,6	8.000.000	1	8.000.000	1	3.516.000	0,9	7.441.000	0,9	7.441.000	90,00%	93,01%	SETWAN
	Belanja Bahan Pupuk	Jumlah Bahan Pupuk	paket	0,5	3.600.000	1	3.600.000	1		0,5	1.650.000	0,5	1.650.000	50,00%	45,83%	SETWAN
	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Jumlah Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	paket	0,6	407.765.000	1	85.365.000	1	33.290.700	0,7	59.172.500	0,7	59.172.500	70,00%	69,32%	SETWAN
	Belanja makan dan minum rapat	Jumlah makan dan minum	om	1	1.750.000	1	1.750.000			0	-	0	0	0,00%	0,00%	SETWAN
	Bangunan Gedung Kantor	Jumlah rehab bangunan gedung	paket	2	82.750.000	2	82.750.000			1	75.834.000	1	75.834.000	50,00%	91,64%	SETWAN
												0	0			SETWAN
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional			100	820.800.000	100	560.400.000		202.587.008	90	320.538.761	90	320.538.761	90,00%	57,20%	SETWAN
	Belanja Jasa Service	Jumlah Jasa Service	bulan	12	41.200.000	12	26.600.000	9	9.874.510	12	14.429.510	12	14.429.510	100,00%	54,25%	SETWAN
	Belanja Penggantian Suku Cadang	Jumlah Penggantian Suku Cadang	bulan	12	95.600.000	12	69.000.000	9	24.825.225	12	35.245.225	12	35.245.225	100,00%	51,08%	SETWAN
	Belanja Bahan Bakar Minyak/gasoli	Jumlah Bahan Bakar Minyak/gasoli	liter	48662	468.000.000	48662	355.800.000	13929	154.567.273	23654	199.501.773	23654	199.501.773	48,61%	56,07%	SETWAN
	Belanja Rehab Mobil Dinas	Jumlah Rehab Mobil Dinas	unit	2	30.000.000	2	20.000.000	0	-	0	-	0	0	0,00%	0,00%	SETWAN
	Belanja Pengecatan Kendaraan	Jumlah Pengecatan Kendaraan	unit	12	36.000.000	12	27.000.000	6	12.600.000	7	18.150.000	7	18.150.000	58,33%	67,22%	SETWAN
	Belanja Pengisian Freon	Jumlah Pengisian Freon	bulan	12	12.000.000	12	6.000.000	7	720.000	8	995.000	8	995.000	66,67%	16,58%	SETWAN
	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	Jumlah Sewa Sarana Mobilitas Darat	kali	29	138.000.000	29	56.000.000	0	-	0	-	0	0	0,00%	0,00%	SETWAN
												0	0			SETWAN
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan			100	181.550.000	100	109.790.000		30.312.500	90	43.368.500	90	43.368.500	90,00%	39,50%	SETWAN
	Belanja BBM/Solar	Jumlah BBM/Solar	galon	1516	12.150.000	686	8.040.000	80	1.124.000	80	2.124.000	80	2.124.000	11,66%	26,42%	SETWAN
	Belanja Pengisian tabung APAR	Jumlah Pengisian tabung APAR	buah	18	5.400.000	10	3.000.000	10	2.775.000	10	2.775.000	10	2.775.000	100,00%	92,50%	SETWAN
	Belanja Pengisian Freon	Jumlah Pengisian Freon	buah	166	41.500.000	75	18.750.000	6	1.500.000	8	2.000.000	8	2.000.000	10,67%	10,67%	SETWAN
	Belanja Pemeliharaan Peralatan Mesin	Jumlah Pemeliharaan Peralatan Mesin	bulan	12	57.500.000	12	30.000.000	9	9.834.500	12	14.111.500	12	14.111.500	100,00%	47,04%	SETWAN
	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	bulan	12	45.000.000	12	30.000.000	9	8.421.000	12	15.700.000	12	15.700.000	100,00%	52,33%	SETWAN
	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi	Jumlah Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi	bulan	12	20.000.000	12	20.000.000	9	6.658.000	12	6.658.000	12	6.658.000	100,00%	33,29%	SETWAN
	Program Peningkatan Sarana dan	Cakupan Sarana Prasarana	persen	149	930.424.610	149	849.249.610	18	469.894.731	149	667.853.931	149	667.853.931	100,00%	78,64%	DINAS PERHUBUNGAN

No	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				III		IV										
1	4	5		8		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Prasarana Aparatur	Aparatur														
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Kendaraan bermotor Jumlah pemeliharaan gedung kantor	bulan	12	150.000.000	12	48.825.000		13.364.500	12	44.014.500	12	44.014.500	100,00%	90,15%	DINAS PERHUBUNGAN
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan yang dipelihara	kendaraan	29	400.000.000	29	400.000.000		188.763.081	29	308.466.281	29	308.466.281	100,00%	77,12%	DINAS PERHUBUNGAN
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	Unit	71	120.574.610	71	140.574.610		57.476.650	71	83.166.650	71	83.166.650	100,00%	59,16%	DINAS PERHUBUNGAN
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan	kendaraan	13	259.850.000	13	259.850.000		210.290.500	13	232.206.500	13	232.206.500	100,00%	89,36%	DINAS PERHUBUNGAN
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	%	98	291.234.750	98	449.207.850		226.188.820	98	401.946.071	98	401.946.071	100,00%	89,48%	DINAS PERTANIAN PKP
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah pengadaan tempat sampah	unit	30	45.284.750	30	173.284.750	30	42.720.750	30	143.000.750	30	143.000.750	100,00%	82,52%	DINAS PERTANIAN PKP
		Jumlah pengadaan pompa	unit	2		2		2		2		2		100,00%		DINAS PERTANIAN PKP
		Jumlah pengadaan mesin pemotong rumput	unit	2		2		2		2		2		100,00%		DINAS PERTANIAN PKP
		Jumlah pengadaan mesin bor	unit	1		1		1		1		1		100,00%		DINAS PERTANIAN PKP
		Jumlah pengadaan HT	unit	6		6		6		6		6		100,00%		DINAS PERTANIAN PKP
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Jumlah paket pemeliharaan gedung kantor	paket	12	35.000.000	12	55.000.000	9	34.280.775	12	54.182.775	12	54.182.775	100,00%	98,51%	DINAS PERTANIAN PKP
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah paket penyediaan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	paket	12	190.950.000	12	190.950.000	9	132.076.295	12	174.951.546	12	174.951.546	100,00%	91,62%	DINAS PERTANIAN PKP
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah paket pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	paket	12	20.000.000	12	29.973.100	9	17.111.000	12	29.811.000	12	29.811.000	100,00%	99,46%	DINAS PERTANIAN PKP
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pemenuhan sapras aparatur	Persen	0,98	2.089.017.500	0,98	2.126.172.500		925.996.845	0,98	2.080.380.170	0,98	2.080.380.170	100,00%	97,85%	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
	Pembangunan gedung kantor	Tersedianya balai penyuluhan KB	Gedung	2	1.135.000.000	2	1.165.000.000	0	287.752.795	2	1.124.588.975	2	1.124.588.975	100,00%	96,53%	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Unit	31	166.285.000	31	222.885.000	31	165.720.000	31	218.718.000	31	218.718.000	100,00%	98,13%	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	Persen	100	80.000.000	100	46.000.000	20	8.740.000	100	46.000.000	100	46.000.000	100,00%	100,00%	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah service kendaraan dinas	Persen	30	647.920.000	30	655.075.000	21	445.952.050	30	653.860.695	30	653.860.695	100,00%	99,81%	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Unit	110	59.812.500	60	37.212.500	60	17.832.000	60	37.212.500	60	37.212.500	100,00%	100,00%	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana			1.053.085.000		1.181.516.000		776.963.400		1.144.601.700	0	1.144.601.700		96,88%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor		1 Paket	1	339.725.000	1	421.545.000	1	186.748.500	1	401.995.300	1	401.995.300	100,00%	95,36%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan		19 macam	19	401.900.000	19	440.500.000	19	391.200.500	19	429.700.500	19	429.700.500	100,00%	97,55%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								III		IV						
1	4	5		8		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		23606 liter	23606	271.460.000	23606	289.471.000	15815	180.003.000	23606	283.032.500	23606	283.032.500	100,00%	97,78%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan		12 bulan	12	40.000.000	12	30.000.000	9	19.011.400	12	29.873.400	12	29.873.400	100,00%	99,58%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase cakupan sarana dan prasarana aparatur	100 persen	100	437.650.000	100	536.900.000		278.410.812	100	510.289.753	100	510.289.753	100,00%	95,04%	DINAS PENANAMAN MODAL PT
	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	4 unit	4 unit	4	80.490.000	4	96.365.000	3 unit	54.312.800	4	90.756.400	4	90.756.400	100,00%	94,18%	DINAS PENANAMAN MODAL PT
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah pembelian peralatan dan perlengkapan kantor	8 unit	8	78.150.000	9	161.525.000	7 unit	76.800.000	9	158.777.500	9	158.777.500	100,00%	98,30%	DINAS PENANAMAN MODAL PT
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	12 bulan	12	27.500.000	12	27.500.000	9 bulan	11.039.000	12	27.449.184	12	27.449.184	100,00%	99,82%	DINAS PENANAMAN MODAL PT
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan dinas yang terpelihara	10 unit	10	233.510.000	10	233.510.000	8 unit	129.238.558	10	215.312.997	10	215.312.997	100,00%	92,21%	DINAS PENANAMAN MODAL PT
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	12 bulan	12	18.000.000	12	18.000.000	9 bulan	7.020.454	12	17.993.672	12	17.993.672	100,00%	99,96%	DINAS PENANAMAN MODAL PT
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	%	98	2.862.820.000	0,98	4.818.202.020	-	1.585.047.214	0,98	3.148.179.872	0,98	3.148.179.872	100,00%	65,34%	DINAS PU PKP
	Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor (Truck)	unit		1.144.000.000	2	2.523.100.000	1	385.000.000	1	1.115.121.040	1	1.115.121.040	50,00%	44,20%	DINAS PU PKP
		Jumlah Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	unit			1		0		1		1		100,00%		DINAS PU PKP
		Jumlah Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	unit			1		0		1		1		100,00%		DINAS PU PKP
		Jumlah Pengadaan Electric Generating Set	unit			1		0		1		1		100,00%		DINAS PU PKP
		Jumlah Pengadaan Compacting Equipment	unit			1		1		1		1		100,00%		DINAS PU PKP
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Perlengkapan Kantor (printer, PC, mebelair dll)	unit		467.670.000	85	1.058.952.020	81	416.175.500	85	985.131.500	85	985.131.500	100,00%	93,03%	DINAS PU PKP
		Jumlah motor roda tiga	unit			2				2		2		100,00%		
		Jumlah Alat Listrik Dan Elektronik	jenis			10		8		10		10		100,00%		
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Jumlah upah tenaga harian lepas	oh		350.480.000	1705	350.480.000	876	207.040.000	1116	260.540.000	1116	260.540.000	65,45%	74,34%	DINAS PU PKP
		Jumlah sarpras tempat kerja	lokasi			6		6		6		6		100,00%		
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	liter		794.670.000	73550	779.670.000	57768	509.206.714	71520	697.357.332	71520	697.357.332	97,24%	89,44%	DINAS PU PKP
		Jumlah Penggantian Suku Cadang kendaraan	kendaraan			44		25		44		44		100,00%		
		jumlah Service kendaraan	kendaraan			44		25		44		44		100,00%		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								III		IV						
1	4	5		8		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	unit		106.000.000	63	106.000.000	48	67.625.000	63	90.030.000	63	90.030.000	100,00%	84,93%	DINAS PU PKP
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				1.258.990.200	90	1.339.480.200		516.006.891	90	1.309.012.665	90	1.309.012.665	100,00%	97,73%	DINAS SOSIAL P3A
	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Rehabilitasi gedung UPT PPT KKPA& BNKK			726.700.000	1	726.700.000	0,18	124.969.091	1	711.977.665	1	711.977.665	100,00%	97,97%	DINAS SOSIAL P3A
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Peralatan kantor	12		254.390.200	12	315.849.700	8	182.770.800	11	300.841.500	11	300.841.500	91,67%	95,25%	DINAS SOSIAL P3A
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	pemeliharaan gedung	2		45.000.000	2	57.525.000	1	38.625.000	2	56.950.000	2	56.950.000	100,00%	99,00%	DINAS SOSIAL P3A
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	pemeliharaan kend dinas & BBM	12		230.200.000	12	236.705.500	8	168.212.000	12	236.543.500	12	236.543.500	100,00%	99,93%	DINAS SOSIAL P3A
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	pemeliharaan mebel			2.700.000	4	2.700.000	2	1.430.000	4	2.700.000	4	2.700.000	100,00%	100,00%	
												0	0			
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	PERSEN	98	617.872.800	98	655.072.800			98	650.536.891	98	650.536.891	100,00%	99,31%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan	unit	5	250.000.000	11	287.200.000			11	283.033.000	11	283.033.000	100,00%	98,55%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Jumlah waktu pemeliharaan rumah dan gedung kantor	gedung	12	105.000.000	4	105.000.000			4	104.641.000	4	104.641.000	100,00%	99,66%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah waktu pemeliharaan kendaraan dinas	unit	12	250.000.000	12	250.000.000			12	249.990.091	12	249.990.091	100,00%	100,00%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah waktu pemeliharaan peralatan kantor	unit	12	12.872.800	12	12.872.800			12	12.872.800	12	12.872.800	100,00%	100,00%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
												0	0			
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	0,95	0,95	819.100.000	98	1.186.475.000		272.993.783	98	1.015.365.183	98	1.015.365.183	100,00%	85,58%	DINAS PARIWISATA
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	7 paket	7	374.250.000	8	614.550.000	6 paket	88.820.500	8	582.326.500	8	582.326.500	100,00%	94,76%	DINAS PARIWISATA
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	12 kali	12	62.500.000	12	194.575.000	10 kali	24.873.650	12	175.173.050	12	175.173.050	100,00%	90,03%	DINAS PARIWISATA
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah terpeliharanya dan operasionalnya kendaraan dinas	12 bulan	12	382.350.000	12	377.350.000	9 bulan	159.299.633	12	257.865.633	12	257.865.633	100,00%	68,34%	DINAS PARIWISATA
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Pemeliharaan peralatan										0	0			
												0	0			
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persen	95	156.145.000	95	149.229.500			95	146.563.285	95	146.563.285	100,00%	98,21%	BAG AD PEMBANGUNAN
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah pengadaan perlengkapan kantor	Paket	5	85.425.000	5	78.509.500	5	78.509.500	5	79.509.500	5	79.509.500	100,00%	101,27%	BAG AD PEMBANGUNAN

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								III		IV						
1	4	5		8		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan yang dipelihara	Kendaraan	7	70.720.000	7	70.720.000	6	38.481.452	7	67.053.785	7	67.053.785	100,00%	94,82%	BAG AD PEMBANGUNAN
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			218.840.000		218.840.000					0	0		0,00%	BAG. AD KESRA
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Cakupan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Unit		82.300.000		82.300.000		38.790.848		77.199.146	0	77.199.146		93,80%	BAG. AD KESRA
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah kegiatan perkanbrn bagian administrasi Kesra	Unit		126.540.000		126.540.000		105.107.940		105.107.940	0	105.107.940		83,06%	BAG. AD KESRA
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah kegiatan perkanbrn bagian administrasi Kesra	Kali		10.000.000		10.000.000		3.326.400		6.138.400	0	6.138.400		61,38%	BAG. AD KESRA
												0	0			
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				170.935.000		176.302.000		134.925.530		173.155.455	0	173.155.455		98,22%	BAG AD PEMERINTAHAN
	Pengadaan mebeleur	Jumlah pengadaan mebeleur	paket		34.175.000	1	59.507.000	1	31.423.582	1	58.633.507	1	58.633.507	100,00%	98,53%	BAG AD PEMERINTAHAN
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah waktu servis dan penyediaan suku cadang	bulan		68.960.000	12	45.596.000	9	36.835.948	12	44.455.948	12	44.455.948	100,00%	97,50%	BAG AD PEMERINTAHAN
		Jumlah kendaraan terpelihara	unit			4		5		4		4	0	100,00%		BAG AD PEMERINTAHAN
		Jumlah BBM	liter			4435		2706		4434		4434	0	99,98%		BAG AD PEMERINTAHAN
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah pengadaan alat kantor	Paket		67.800.000	1	71.200.000	1	66.666.000	1	70.066.000	1	70.066.000	100,00%	98,41%	BAG AD PEMERINTAHAN
		Jumlah pengadaan peralatan studio visual	Paket			1		1		1		1	0	100,00%		BAG AD PEMERINTAHAN
		Jumlah pengadaan alat pendingin	Unit			1		1		1		1	0	100,00%		BAG AD PEMERINTAHAN
		Jumlah pengadaan personal komputer	Paket			1		1		1		1	0	100,00%		BAG AD PEMERINTAHAN
												0	0			
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				40.875.000		46.935.000		26.195.975		41.233.900	0	41.233.900		87,85%	BAG HUKUM
	1. Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional						41.435.000		22.739.975		37.193.900	0	37.193.900		89,76%	BAG HUKUM
		Jumlah servis kend'raan	unit	5	33.875.000	5	4.750.000	2	1.969.000	4	3.334.000	4	3.334.000	80,00%	70,19%	BAG HUKUM
		Jumlah pembelian suku cadang	unit	3750	3.750.000	5	3.560.000	2	1.819.500	4	3.404.500	4	3.404.500	80,00%	95,63%	BAG HUKUM
		Jumlah pembelian BBM	lir	5	2.000.000	4000	33.125.000	1626	18.951.475	3896	30.455.400	3896	30.455.400	97,40%	91,94%	BAG HUKUM
					28.125.000							0	0			BAG HUKUM
	2. Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan				7.000.000		7.000.000		3.456.000		4.040.000	0	4.040.000		57,71%	BAG HUKUM
		Jumlah waktu pemeliharaan peralatan kantor	bln	12	7.000.000	12	5.500.000	50	3.456.000	10	4.040.000	10	4.040.000	83,33%	73,45%	BAG HUKUM
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				75.750.000		84.750.000		46.811.600		78.011.301	0	78.011.301		92,05%	BAG. HUM PRO
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan				8.750.000	1	8.750.000			1	8.068.600	1	8.068.600	100,00%	92,21%	BAG. HUM PRO

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								III		IV						
1	4	5		8		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	- Pengadaan Handy Talki	Jumlah Handy talki	1 unit		8.750.000			5	8.068.600			0	0			BAG. HUM PRO
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan				6.000.000				-			0	0			BAG. HUM PRO
	- Belanja Perbaikan komputer dan printer	Jumlah komputer yg diperbaiki 6	Unit		6.000.000			3	3.155.000			0	0			BAG. HUM PRO
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/operasional				61.000.000							0	0			BAG. HUM PRO
	-Belanja BBMgas	Jumlah BBM	LS		50.000.000	5500	59.000.000	3064	30.643.000	5500	58.970.200	5500	58.970.200	100,00%	99,95%	BAG. HUM PRO
	-Belanja Jasa servis	Jumlah kendaraan 5	unit		6.000.000	5	5.000.000	1	1.415.000	5	4.981.750	5	4.981.750	100,00%	99,64%	BAG. HUM PRO
	-Belanja Suku Cadang	Jumlah kendaraan 5	unit			5	6.000.000	4	3.530.000	5	5.990.751	5	5.990.751	100,00%	99,85%	BAG. HUM PRO
												0	0			
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Nilai Akip	angka									0	0			RSUD PS
	Pembangunan/ Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor											0	0			RSUD PS
												0	0			
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				316.050.000		332.750.000		299.467.348		330.737.113	0	330.737.113		99,40%	BAG LPBJ
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung	Kali	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	100,00%	100,00%	BAG LPBJ
												0	0			BAG LPBJ
	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	Pembuatan garasi, penataan interior dan lanncape taman	Paket	3	151.700.000	3	151.700.000	3	150.826.000	3	150.826.000	3	150.826.000	100,00%	99,42%	BAG LPBJ
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan				101.650.000		111.550.000		99.957.000		110.657.000	0	110.657.000		99,20%	BAG LPBJ
		Pengadaan filing cabinet		2	6.800.000	2	6.800.000	2	6.800.000	2	6.800.000	2	6.800.000	100,00%	100,00%	BAG LPBJ
		Pengadaan pemotong kertas		1	1.000.000	1	200.000	1	200.000	1	200.000	1	200.000	100,00%	100,00%	BAG LPBJ
		Pengadaan TV LED		2	16.000.000	3	23.500.000	2	15.997.000	3	23.497.000	3	23.497.000	100,00%	99,99%	BAG LPBJ
		Pengadaan almari arsip		1	13.000.000	1	13.000.000	1	12.900.000	1	12.900.000	1	12.900.000	100,00%	99,23%	BAG LPBJ
		Pengadaan printer		4	24.150.000	4	25.000.000	4	24.615.000	4	24.615.000	4	24.615.000	100,00%	98,46%	BAG LPBJ
		Pengadaan CCTV		1	5.000.000	1	5.000.000	1	4.910.000	1	4.910.000	1	4.910.000	100,00%	98,20%	BAG LPBJ
		Pengadaan Kuilkas		1	3.000.000	2	6.200.000	1	2.975.000	2	6.175.000	2	6.175.000	100,00%	99,60%	BAG LPBJ
		Pengadaan UPS		5	5.000.000	5	5.000.000	5	4.925.000	5	4.925.000	5	4.925.000	100,00%	98,50%	BAG LPBJ
		Pengadaan Komputer 2 unit dan Note book 1 unit		3	26.850.000	3	26.850.000	3	26.635.000	3	26.635.000	3	26.635.000	100,00%	99,20%	BAG LPBJ
												0	0			
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional				52.700.000		59.500.000		38.684.348		59.254.113	0	59.254.113		99,59%	BAG LPBJ
		Belanja suku cadang kendaraan dinas	Kali	8	5.000.000	8	5.000.000	6	3.336.000	8	5.000.000	8	5.000.000	100,00%	100,00%	BAG LPBJ

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								III		IV						
1	4	5		8		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Belanja bahan bakar minyak/gas	Kali	12	45.000.000	12	51.800.000	9	33.192.948	12	51.563.713	12	51.563.713	100,00%	99,54%	BAG LPBJ
		Belanja servis kendaraan dinas	Unit kendaraan	8	2.700.000	8	2.700.000	6	2.155.400	8	2.690.400	8	2.690.400	100,00%	99,64%	BAG LPBJ
												0	0			
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia dan terpelihara			68.000.000		68.000.000		46.041.389		64.603.837	0	64.603.837		95,01%	BAG PEM DES
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan				15.000.000	1	15.000.000	1	14.875.000	1	14.875.000	1	14.875.000	100,00%	99,17%	BAG PEM DES
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional				53.000.000	5	53.000.000	5	31.166.389	4	49.728.837	4	49.728.837	80,00%	93,83%	BAG PEM DES
												0	0			
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	62.000.000		73.000.000	24,99	14.064.000	100	-	100	0		0,00%	BAG ORGANISASI
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Prosentase pelaksanaan pemeliharaan rutin dan penyediaan BBM kendaraan dinas	%	100	62.000.000		73.000.000	24,99	14.064.000	100	73.000.000	100	73.000.000		100,00%	BAG ORGANISASI
		Jumlah service kendaraan bermotor	kali									0	0			BAG ORGANISASI
		Service kendaraan Roda 4	Mobil/kali	8		8		3		8		8	0	100,00%		BAG ORGANISASI
		Service kendaraan Roda 2	Motor/kali	12		12		4		12		12	0	100,00%		BAG ORGANISASI
		Penggantian suku cadang kendaraan roda 4	Mobil/kali	8		8		0		8		8	0	100,00%		BAG ORGANISASI
		Penggantian suku cadang kendaraan roda 2	Motor/kali	12		12		7		12		12	0	100,00%		BAG ORGANISASI
		Jumlah penyediaan BBM	liter	4800		4800		998		4800		4800	0	100,00%		BAG ORGANISASI
		Jumlah Pengantian AC mobil	set	1		1		0		1		1	0	100,00%		BAG ORGANISASI
		Jumlah pengecatan mobil dinas	unit			1				1		1	0	100,00%		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				4.643.581.000		4.747.067.270		2.153.107.766		3.368.490.320	0	3.368.490.320		70,96%	BAG UMUM
	Pengadaan barang bercorak kesenian				3.300.000		3.300.000		-		3.200.000	0	3.200.000		96,97%	BAG UMUM
		Jumlah lukisan/foto/hiasan dinding	Paket	1	3.300.000	1	3.300.000	0	-	1	3.200.000	1	3.200.000	100,00%	96,97%	BAG UMUM
	Pengadaan Pakaian Seragam beserta Perlengkapannya				302.125.000		292.973.500		159.458.500		255.499.500	0	255.499.500		87,21%	BAG UMUM
		Jumlah pakaian dinas KDH/VKDH	Polong	50	100.000.000	50	100.000.000	21	16.760.000	35	69.166.000	35	69.166.000	70,00%	69,17%	BAG UMUM
		Jumlah pembayaran honor Pejabat PBJ	Paket	1	875.000	1	875.000	0	-	1	875.000	1	875.000	100,00%	100,00%	BAG UMUM
		Jumlah kain batik tradisional Hari Jadi	Paket	1	189.000.000	1	183.000.000	1	133.600.000	1	176.360.000	1	176.360.000	100,00%	96,37%	BAG UMUM
		Jumlah pakaian tradisional untuk seksi konsumsi Hari Jadi	Paket	1		1		1		1		1	0	100,00%		BAG UMUM
		Jumlah pakaian batik tradisional KDH/VKDH	Polong	100		100		85		110		110	0	110,00%		BAG UMUM

No	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								III		IV						
1	4	5		8		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Jumlah pakaian kerja lapangan bagi PHL	Paket	1	12.250.000	1	9.098.500	1	9.098.500	1	9.098.500	1	9.098.500	100,00%	100,00%	BAG UMUM
												0	0			BAG UMUM
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan				2.047.150.000		2.037.940.000		670.312.000		1.008.609.500	0	1.008.609.500		49,49%	BAG UMUM
		Jumlah belanja alat kantor	Paket (jenis)	7	34.500.000	7	34.500.000		18.935.000	7	25.915.000	7	25.915.000	100,00%	75,12%	BAG UMUM
		Jumlah belanja bendera,dll	Paket	1	24.650.000	7	21.300.000		4.925.000	7	18.375.000	7	18.375.000	100,00%	86,27%	BAG UMUM
		Jumlah pengadaan bangunan gedung kantor	Paket	2	100.000.000	2	100.000.000		98.687.000	2	98.687.000	2	98.687.000	100,00%	98,69%	BAG UMUM
		Jumlah paket pemasangan instalasi genset	paket	1	119.875.000	1	119.875.000		-	1	112.392.500	1	112.392.500	100,00%	93,76%	BAG UMUM
		Jumlah paket pengadaan personal komputer	Paket	1	44.000.000	1	44.000.000		43.648.000	1	43.648.000	1	43.648.000	100,00%	99,20%	BAG UMUM
		Jumlah pengadaan bangunan rambu tidak bersuara (papan nama)	Paket	1	10.000.000	1	10.000.000		3.935.000	1	5.415.000	1	5.415.000	100,00%	54,15%	BAG UMUM
		Jumlah alat pendingin	paket	1	20.000.000	1	19.140.000		19.140.000	1	19.140.000	1	19.140.000	100,00%	100,00%	BAG UMUM
		Jumlah pengadaan alat komunikasi sosial	paket	1	917.725.000	2	917.725.000		24.420.000	1	24.420.000	1	24.420.000	50,00%	2,66%	BAG UMUM
		Jumlah pembelian alat dapur (tabung gas,kompas gas, dll)	jenis	6	13.500.000	7	73.500.000		9.950.000	7	67.205.000	7	67.205.000	100,00%	91,44%	BAG UMUM
		Jumlah belanja pompa air	Paket (jenis)	3	34.000.000	3	34.000.000		33.044.000	3	33.044.000	3	33.044.000	100,00%	97,19%	BAG UMUM
		Jumlah belanja jasa bongkar (inst. genset)	paket	1	79.000.000	1	79.000.000		-	1	78.615.000	1	78.615.000	100,00%	99,51%	BAG UMUM
		Jumlah pembelian alat rumah tangga (home use)	Jenis	13	165.000.000	11	154.000.000		46.625.000	10	77.789.000	10	77.789.000	90,91%	50,51%	BAG UMUM
		Jumlah pengadaan alat bantu keamanan	Paket	2	434.900.000	4	380.900.000		352.455.000	4	375.292.000	4	375.292.000	100,00%	98,53%	BAG UMUM
		Jumlah belanja bibit tanaman	kali	3	50.000.000	3	50.000.000		14.548.000	5	28.672.000	5	28.672.000	166,67%	57,34%	BAG UMUM
		Jumlah honorarium PBJ			-		-					0	0			BAG UMUM
		Jumlah mesin pemotong rumput dan gunting			-		-					0	0			BAG UMUM
		Jumlah kursi lipat			-		-					0	0			BAG UMUM
		Jumlah tenda			-		-					0	0			BAG UMUM
		Jumlah genset			-		-					0	0			BAG UMUM
		Jumlah pengadaan filter air			-		-					0	0			BAG UMUM
		Jumlah mebelair KDH/WKDH			-		-					0	0			BAG UMUM
		Jumlah peralatan studio			-		-					0	0			BAG UMUM
		Jumlah paket gedung pengadaan instalasi			-		-					0	0			BAG UMUM
		Jumlah paket pengadaan jaringan(gedung)			-		-					0	0			BAG UMUM
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor				916.125.000		1.041.022.570		480.791.070		906.206.070	0	906.206.070		87,05%	BAG UMUM
		Jumlah belanja penggandaan	kali	4	2.750.000	4	2.750.000	1	-	0	-	0	0	0,00%	0,00%	BAG UMUM

No	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								III		IV						
1	4	5		8		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Jumlah belanja sewa rumah jabatan/rumah dinas	Objek	1	100.000.000	1	40.588.000	1	50.458.000	1	40.588.000	1	40.588.000	100,00%	100,00%	BAG UMUM
		Jumlah pembayaran pajak PBB	Objek	2	50.000.000	2	49.339.570	2	49.339.570	2	49.339.570	2	49.339.570	100,00%	100,00%	BAG UMUM
		Jumlah pembelian ATK	kali	3	2.500.000	3	2.500.000	2	1.650.000	2	1.650.000	2	1.650.000	66,67%	66,00%	BAG UMUM
		Jumlah pembayaran honor Tim PBJ	Paket	1	875.000	1	875.000	0	-	1	875.000	1	875.000	100,00%	100,00%	BAG UMUM
		Jumlah pemeliharaan gedung dan bangunan	Jenis	10	760.000.000	10	745.000.000	7	379.343.500	10	615.198.500	10	615.198.500	100,00%	82,58%	BAG UMUM
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah appraisal	objek		1.071.256.000	1	10.000.000			1	9.900.000	1	9.900.000	100,00%	99,00%	BAG UMUM
		Jumlah pengadaan bangunan gedung kantor	unit			1	190.000.000			1	188.685.000	1	188.685.000	100,00%	99,31%	BAG UMUM
							1.068.706.200		694.951.546		940.860.100	0	940.860.100		88,04%	BAG UMUM
		Jumlah belanja servis kendaraan dinas	kendaraan	45	315.000.000	45	256.876.200	34	196.479.685	45	212.315.273	45	212.315.273	100,00%	82,65%	BAG UMUM
		Jumlah belanja pengecatan kendaraan dinas	kendaraan	10	40.000.000	10	28.830.000	8	11.805.000	11	14.672.000	11	14.672.000	110,00%	50,89%	BAG UMUM
		Jumlah belanja aksesoris kendaraan dinas	Kendaraan	10	40.000.000	10	35.000.000	8	23.079.500	15	28.264.500	15	28.264.500	150,00%	80,76%	BAG UMUM
		Jumlah belanja BBM dan pelumas	liter	54700	505.000.000	56250	585.000.000	48346	379.259.648	53610	562.905.715	53610	562.905.715	95,31%	96,22%	BAG UMUM
		Jumlah pengisian freon	kendaraan	15	15.000.000	8	8.000.000	8	2.185.000	13	2.835.000	13	2.835.000	162,50%	35,44%	BAG UMUM
		Jumlah belanja penggantian suku cadang kendaraan	kendaraan	45	145.000.000	45	155.000.000	38	82.142.713	45	119.867.612	45	119.867.612	100,00%	77,33%	BAG UMUM
		Jumlah pembayaran uang lembur	Orang bulan	840	11.256.000	-	-	0	-		-	0	0			BAG UMUM
												0	0			BAG UMUM
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan				303.625.000		303.125.000		147.594.650		254.115.150	0	254.115.150		83,83%	BAG UMUM
		Jumlah pembayaran honor PBJ	Paket	1	875.000	1	875.000	0	-	1	875.000	1	875.000	100,00%	100,00%	BAG UMUM
		Jumlah belanja pulsa smsgateway	kali	1	3.500.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	100,00%	100,00%	BAG UMUM
		Jumlahbelanja pemeliharaan peralatan dan mesin	macam	8	299.250.000	18	299.250.000	13	144.594.650	17	250.240.150	17	250.240.150	94,44%	83,62%	BAG UMUM
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						212.250.000		163.647.000		212.250.000	0	212.250.000		100,00%	KEC BAMBANGLIPIURO
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan					49.000.000		39.786.000		49.000.000	0	49.000.000		100,00%	KEC BAMBANGLIPIURO
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor						48.000.000		45.588.500		48.000.000	0	48.000.000		100,00%	KEC BAMBANGLIPIURO
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional						95.250.000		66.021.250		95.250.000	0	95.250.000		100,00%	KEC BAMBANGLIPIURO
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan						20.000.000		12.251.250		20.000.000	0	20.000.000		100,00%	KEC BAMBANGLIPIURO

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								III		IV						
1	4	5		8		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan sarana dan prasarana aparatur	Persen		220.700.000	98	220.700.000	98	195.980.000	100	220.530.000	100	220.530.000	102,04%	99,92%	KEC BANGUNTAPAN
	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	Pembangunan garasi	unit	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0			KEC BANGUNTAPAN
		Bahan bangunan	paket	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0			KEC BANGUNTAPAN
		Tenaga harian lepas	ls	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0			KEC BANGUNTAPAN
												0	0			KEC BANGUNTAPAN
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan		unit	12	97.500.000	12	97.500.000	12	97.330.000	12	97.330.000	12	97.330.000	100,00%	99,83%	KEC BANGUNTAPAN
		Filing Kabinet	unit	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0			KEC BANGUNTAPAN
		Rak Kaca	unit	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0			KEC BANGUNTAPAN
		Kursi putar	unit	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0			KEC BANGUNTAPAN
		Kursi Lipat	unit	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0			KEC BANGUNTAPAN
		Kipas Angin	unit	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0			KEC BANGUNTAPAN
		Laptp	unit	2	18.000.000	2	18.000.000	2	17.990.000	2	17.990.000	2	17.990.000	100,00%	99,94%	KEC BANGUNTAPAN
		LCD Proyektor	unit	1	8.000.000	1	8.000.000	1	7.840.000	1	7.840.000	1	7.840.000	100,00%	98,00%	KEC BANGUNTAPAN
		Kamera	unit	1	9.000.000	1	9.000.000	1	9.000.000	1	9.000.000	1	9.000.000	100,00%	100,00%	KEC BANGUNTAPAN
		Radio RIG	unit	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	100,00%	100,00%	KEC BANGUNTAPAN
		Wireless	unit	1	16.000.000	1	16.000.000	1	16.000.000	1	16.000.000	1	16.000.000	100,00%	100,00%	KEC BANGUNTAPAN
		Running Teks	unit	1	13.500.000	1	13.500.000	1	13.500.000	1	13.500.000	1	13.500.000	100,00%	100,00%	KEC BANGUNTAPAN
		Meja Rapat	unit	4	13.000.000	4	13.000.000	4	13.000.000	4	13.000.000	4	13.000.000	100,00%	100,00%	KEC BANGUNTAPAN
		Meja Kursi tamu	unit	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	100,00%	100,00%	KEC BANGUNTAPAN
												0	0			KEC BANGUNTAPAN
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Pemeliharaan rumah dinas dan gedung kantor	unit	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	100,00%	100,00%	KEC BANGUNTAPAN
		Bahan bangunan	paket	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	100,00%	100,00%	KEC BANGUNTAPAN
		Tenaga harian lepas	ls	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	100,00%	100,00%	KEC BANGUNTAPAN
												0	0			KEC BANGUNTAPAN
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		Unit	6	97.200.000	6	97.200.000	6	74.150.000	6	97.200.000	6	97.200.000	100,00%	100,00%	KEC BANGUNTAPAN
		Servis	unit	6	2.000.000	6	2.000.000	5	1.500.000	6	2.000.000	6	2.000.000	100,00%	100,00%	KEC BANGUNTAPAN
		Suku Cadang	unit	6	6.000.000	6	6.000.000	5	4.500.000	6	6.000.000	6	6.000.000	100,00%	100,00%	KEC BANGUNTAPAN
		BBM/Pelumas	unit	6	84.200.000	6	84.200.000	6	63.150.000	6	84.200.000	6	84.200.000	100,00%	100,00%	KEC BANGUNTAPAN
		Pengecatan mobil dinas	unit	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	100,00%	100,00%	KEC BANGUNTAPAN

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								III		IV						
1	4	5		8		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												0	0			KEC BANGUNTAPAN
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Pemeliharaan peralatan kantor	paket	12	6.000.000	12	6.000.000	9	4.500.000	12	6.000.000	12	6.000.000	100,00%	100,00%	KEC BANGUNTAPAN
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			1	162.950.000	1	162.950.000		-	1	322.410.922	1	322.410.922	100,00%	197,86%	KEC BANTUL
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan			1	41.216.000	1	41.216.000	0,994	41.016.000	1	41.016.000	1	41.016.000	100,00%	99,51%	KEC BANTUL
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran		1	39.400.000	1	39.400.000	0,985	39.400.000	1	39.400.000	1	39.400.000	100,00%	100,00%	KEC BANTUL
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional			1	70.500.000	1	70.500.000	0,68	47.940.525	1	70.500.000	1	70.500.000	100,00%	100,00%	KEC BANTUL
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan			1	11.834.000	1	11.834.000	0,691	7.610.000	1	11.834.000	1	11.834.000	100,00%	100,00%	KEC BANTUL
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	95	182.280.000	95	183.480.000				183.480.000	0	183.480.000	0,00%	100,00%	KEC DLINGO
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah unit pengadaan peralatan perlengkapan kantor	unit	8	48.000.000	8	48.000.000				48.000.000	0	48.000.000	0,00%	100,00%	KEC DLINGO
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Jumlah paket pemeliharaan rumah dan gedung kantor	unit	1	22.500.000	1	22.500.000				22.500.000	0	22.500.000	0,00%	100,00%	KEC DLINGO
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah paket pemeliharaan kendaraan dinas (BBM, servis dan suku cadang)	unit	7	102.180.000	7	103.380.000				103.380.000	0	103.380.000	0,00%	100,00%	KEC DLINGO
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah paket pemeliharaan dan perlengkapan kantor	paket	4	9.600.000	4	9.600.000				9.600.000	0	9.600.000	0,00%	100,00%	KEC DLINGO
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur			184.300.000		184.300.000		146.612.000		183.255.500	0	183.255.500		99,43%	KEC JETIS
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				84.100.000		84.100.000	1	68.400.000		84.100.000	0	84.100.000		100,00%	KEC JETIS
		Jumlah Belanja Lemari Arsip	ls	1	9.000.000		900.000	1	9.000.000		9.000.000	0	9.000.000		100,00 %	KEC JETIS
		Jumlah Belanja Teralis	unit	12	12.400.000		12.400.000	12	12.400.000		12.400.000	0	12.400.000		100,00%	KEC JETIS
		Jumlah Belanja Komputer	unit	1	7.000.000		70.000.000	1	7.000.000		7.000.000	0	7.000.000		10,00%	KEC JETIS
		Jumlah Belanja Printer	unit	3	6.000.000		6.000.000	3	6.000.000		6.000.000	0	6.000.000		100,00%	KEC JETIS
		Jumlah Belanja Laptop	unit	1	8.000.000		8.000.000	1	8.000.000		8.000.000	0	8.000.000		100,00%	KEC JETIS
		Jumlah Belanja Papan Runningtext	unit	2	12.000.000		12.000.000	2	12.000.000		12.000.000	0	12.000.000		100,00%	KEC JETIS
		Jumlah Belanja AC	unit	3	19.500.000		19.500.000	2	14.000.000		19.500.000	0	19.500.000		100,00%	KEC JETIS
		Jumlah belanja kursi rapat		20	10.200.000		10.200.000				10.200.000	0	10.200.000		100,00%	KEC JETIS
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor				30.000.000		30.000.000	100	30.000.000		30.000.000	0	30.000.000		100,00%	KEC JETIS

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								III		IV						
1	4	5		8		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Jumlah Paket pemeliharaan Gedung dan Kantor	unit	1	30.000.000		30.000.000	1	30.000.000		30.000.000	0	30.000.000		100,00%	KEC JETIS
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional				70.200.000		70.200.000		48.212.000		69.155.500	0	69.155.500		98,51%	KEC JETIS
		Jumlah Paket Pemeliharaan Kendaraan Dinas (BBM,Servis dan Suku Cadang)	bulan	9	70.200.000		70.000.000	9	48.212.000		69.155.500	0	69.155.500		98,79%	KEC JETIS
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Capaian Pemenuhan sarana prasarana aparatur	90		122.000.000		122.000.000		101.188.750		122.000.000	0	122.000.000		100,00%	KEC KRETEK
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Jumlah Rumah dan Gedung Kantor terpelihara	kali	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	100,00%	100,00%	KEC KRETEK
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas	kali	1	84.000.000	1	84.000.000	1	65.185.750	1	84.000.000	1	84.000.000	100,00%	100,00%	KEC KRETEK
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin	kali	1	8.000.000	1	8.000.000	1	6.003.000	1	8.000.000	1	8.000.000	100,00%	100,00%	KEC KRETEK
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					203.479.842	53,36	108.584.942	97,3706	198.129.442	97,3706	198.129.442		97,37%	KEC PAJANGAN	
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan					57.967.342	72,4	41.967.342	100	57.967.342	100	57.967.342		100,00%	KEC PAJANGAN	
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor					50.000.000	15,06	7.530.000	100	50.000.000	100	50.000.000		100,00%	KEC PAJANGAN	
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional					83.512.500	65,42	54.632.600	93,5933	78.162.100	93,5933	78.162.100		93,59%	KEC PAJANGAN	
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan					12.000.000	37,13	4.455.000	100	12.000.000	100	12.000.000		100,00%	KEC PAJANGAN	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur	persen	100	125.095.000	100	138.030.000	102,1	30.942.000	0	37.846.000	0	138.030.000	0,00%	100,00%	KEC PIYUNGAN
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan		persen	100	16.500.000	100	29.435.000	0	-		13.000.000	0	29.435.000	0,00%	100,00%	KEC PIYUNGAN
		Jumlah Pengadaan Almari Arsip	unit	2	6.500.000	2	6.435.000					0	0	0,00%	0,00%	KEC PIYUNGAN
		Jumlah Pengadaan personal Computer	unit	1	7.000.000	1	7.000.000					0	0	0,00%	0,00%	KEC PIYUNGAN
		Jumlah Pengadaan printer	unit	1	3.000.000	2	6.000.000					0	0	0,00%	0,00%	KEC PIYUNGAN
		Jumlah pengadaan meja kursi pimpinan	unit	1		1	10.000.000					0	0	0,00%	0,00%	KEC PIYUNGAN
																KEC PIYUNGAN
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor		persen	100	15.175.000	100	15.175.000	46,62	7.075.000		-	0	15.175.000	0,00%	100,00%	KEC PIYUNGAN
		Jumlah belanja bahan bangunan	ls	2	11.425.000	2	11.425.000					0	0	0,00%	0,00%	KEC PIYUNGAN
		Jasa Tenaga Harian Lepas	oh	2	3.750.000	2	3.750.000					0	0	0,00%	0,00%	KEC PIYUNGAN
												0	0			KEC PIYUNGAN
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		persen	100	81.420.000	100	81.420.000	24,79	20.187.000		22.926.000	0	81.420.000	0,00%	100,00%	KEC PIYUNGAN

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								III		IV						
1	4	5		8		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Servis	unit	7	3.040.000	7	3.040.000					0	0	0,00%	0,00%	KEC PIYUNGAN
		Suku Cadang	unit	7	7.300.000	7	7.300.000					0	0	0,00%	0,00%	KEC PIYUNGAN
		BBM/Pelumas	ltr	7483	71.080.000	7483	71.080.000					0	0	0,00%	0,00%	KEC PIYUNGAN
												0	0			KEC PIYUNGAN
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan		persen	100	12.000.000	100	12.000.000	30,67	3.680.000		1.920.000	0	12.000.000	0,00%	100,00%	KEC PIYUNGAN
		Pemeliharaan peralatan kantor	kali									0	0			KEC PIYUNGAN
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur			201.166.400		201.166.400		145.044.000		194.886.500	0	194.886.500		96,88%	KEC PUNDONG
	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Alat/perlengkapan rumah jabatan/dinas		1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	100,00%	100,00%	KEC PUNDONG
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor		10	66.486.400	10	66.486.400	10	63.900.000	10	64.380.000	10	64.380.000	100,00%	96,83%	KEC PUNDONG
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor		1	31.500.000	1	31.500.000	1	22.719.500	1	31.500.000	1	31.500.000	100,00%	100,00%	KEC PUNDONG
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	BBM, service, suku cadang, minyak pelumas, freon, ac, pajak kendaraan		4	92.680.000	4	92.680.000	4	54.849.500	4	88.506.500	4	88.506.500	100,00%	95,50%	KEC PUNDONG
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah pemeliharaan alat kantor		12	9.500.000	12	9.500.000	9	2.575.000	12	9.500.000	12	9.500.000	100,00%	100,00%	KEC PUNDONG
					9.500.000											
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				303.505.000		303.505.000					0	0		0,00%	KECSANDEN
	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	Jumlah Gedung yang direhab Dan Taman			109.300.000		109.300.000	100	98.500.000	100	109.300.000	100	109.300.000		100,00%	KEC SANDEN
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Belanja Peralatan Kantor			103.000.000		103.000.000	66,97	68.975.000	100	94.874.000	100	94.874.000		92,11%	KEC SANDEN
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional				93.005.000		93.005.000	72,8	67.705.000	100	93.005.000	100	93.005.000		100,00%	KEC SANDEN
		Belanja Suku Cadang dan Servis										0	0			KEC SANDEN
		Belanja BBM										0	0			KEC SANDEN
		Penggantian Pelumas Kendaraan										0	0			KEC SANDEN
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Peralatan yang dipelihara			17.000.000		17.000.000	85,18	14.480.000	100	17.000.000	100	17.000.000		100,00%	KEC SANDEN
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	cakupan sarana dana prasarana aparatur	Persen	98	230.026.158		330.026.158		137.744.440		221.216.440	0	221.216.440		67,03%	KECSRANDAKAN
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				100.000.000		100.000.000					0	0		0,00%	KEC SRANDAKAN
		BBM	liter	7200	72.000.000	7200	72.000.000	5400	54.000.000	7200	72.000.000	7200	72.000.000	100,00%	100,00%	KEC SRANDAKAN
		Suku cadang	unit	6	13.440.000	6	13.440.000	3	9.417.000	6	13.394.000	6	13.394.000	100,00%	99,66%	KEC SRANDAKAN
		Service	unit	6	14.560.000	6	14.560.000	6	5.728.700	6	8.215.700	6	8.215.700	100,00%	56,43%	KEC SRANDAKAN

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								III		IV						
1	4	5		8		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan yang terpelihara	kali	4	20.000.000	4	20.000.000	3	12.500.000	4	20.000.000	4	20.000.000	100,00%	100,00%	KEC SRANDAKAN
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Belanja peralatan dan perlengkapan kantor	paket	5	74.526.158	5	74.526.158	4	24.234.740	5	73.984.740	5	73.984.740	100,00%	99,27%	KEC SRANDAKAN
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	jumlah gedung yang dipelihara	kali	2	35.500.000	2	35.500.000	2	31.864.000	2	33.622.000	2	33.622.000	100,00%	94,71%	KEC SRANDAKAN
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur		0,95	227.730.000	1	233.905.000	0,706	160.692.841	1	231.896.341	1	231.896.341	100,00%	99,14%	KEC KASIHAN
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan modal Sound System	Paket	1	55.000.000	1	93.917.000	0,955	52.497.741	1	93.727.741	1	93.727.741	100,00%	99,80%	KEC KASIHAN
		Jumlah pengadaan Modal Pengadaan TV	Unit	1		1				1		1	0	100,00%		KEC KASIHAN
		Jumlah Pengadaan Modal Pengadaan Mesin Antrian	Paket	1		1				1		1	0	100,00%		KEC KASIHAN
						0						0	0			KEC KASIHAN
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung dan bangunan	Gedung	2	36.730.000	2	23.988.000	0,652	23.958.000	2	23.958.000	2	23.958.000	100,00%	99,87%	KEC KASIHAN
						0						0	0			KEC KASIHAN
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas	Dokumen	7	96.000.000	7	96.000.000	0,75	72.026.600	7	94.210.600	7	94.210.600	100,00%	98,14%	KEC KASIHAN
		BBM Operasional Kendaraan Dinas dan Operasional tidak langsung pegawai	Liter	7900		7900				7900		7900	0	100,00%		KEC KASIHAN
		Jumlah Service Kendaraan Dinas	Unit	7		7				7		7	0	100,00%		KEC KASIHAN
		Jumlah penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas	Unit	7		7				7		7	0	100,00%		KEC KASIHAN
	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Service Peralatan Kantor		4	40.000.000	4	20.000.000	0,305	12.210.500	4	20.000.000	4	20.000.000	100,00%	100,00%	KEC KASIHAN
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	persen	1	304.795.000							0	0			KEC SEWON
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah jenis peralatan yang dibeli	Unit	16	134.025.000							0	0			KEC SEWON
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Jumlah bagrunanyang dipelihara	Unit	2	90.350.000							0	0			KEC SEWON
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas di pelihara	unit	6	65.420.000							0	0			KEC SEWON
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah pembiayaan pemeliharaan perlengkapan kantor	persen	1	15.000.000							0	0			KEC SEWON
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Penggunaan Sarana & Prasarana Aparatur			229.815.000		214.815.000		103.530.000		212.816.000	0	212.816.000		99,07%	KEC PLERET
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Peratalen dan perlengkapan kantor		15	112.846.000	15	95.346.000		51.500.000		94.000.000	0	94.000.000	0,00%	98,59%	KEC PLERET
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan gedung kantor		1	22.519.000	1	22.519.000	1	6.157.000		22.454.000	0	22.454.000	0,00%	99,71%	KEC PLERET
	Pemeliharaan Kendaraan	Jumlah Pemeliharaan		4		4	87.450.000	3	42.618.000		86.862.000	0	86.862.000	0,00%	99,33%	KEC PLERET

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								III		IV						
1	4	5		8		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Dinas/Operasional	Kendaraan Dinas			87.450.000											
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Pemeliharaan perabitan dan perlengkapan		4	7.000.000	4	9.500.000	3	3.255.000		9.500.000	0	9.500.000	0,00%	100,00%	KEC FLERET
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				182.800.000		170.400.000	33	118.914.500		141.609.500	0	141.609.500		83,10%	KEC PANDAK
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		unit		30.000.000	4	30.000.000	4	22.073.500	4	22.073.500	4	22.073.500	100,00%	73,58%	KEC PANDAK
	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor		unit	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	100,00%	100,00%	KEC PANDAK
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan		unit	20	53.500.000	20	37.500.000	15	29.550.000	15	29.550.000	15	29.550.000	75,00%	78,80%	KEC PANDAK
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		unit	5	73.300.000	5	73.300.000	5	44.381.000	5	63.406.000	5	63.406.000	100,00%	86,50%	KEC PANDAK
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan		kali	12	6.000.000	12	9.600.000	8	2.910.000	12	6.580.000	12	6.580.000	100,00%	68,54%	KEC PANDAK
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur			127.500.000		128.597.000		95.647.450		128.477.000	0	128.477.000		99,91%	KECSEDAYU
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan				16.500.000		16.052.400	2	16.052.400	2	16.052.400	2	16.052.400		100,00%	KEC SEDAYU
		jumlah mebelair			-		-				-	0	0			KEC SEDAYU
		jumlah ac			-		-				-	0	0			KEC SEDAYU
		jumlah komputer			-		-				-	0	0			KEC SEDAYU
		jumlah laptop			-		-				-	0	0			KEC SEDAYU
		jumlah printer			-		-				-	0	0			KEC SEDAYU
		jumlah CCTV			-		-				-	0	0			KEC SEDAYU
		jumlah paket tambah daya	1	15.000.000	1	14.552.400	1	14.552.400	1	14.552.400	1	14.552.400	100,00%	100,00%	KEC SEDAYU	
		Alat potng rumput	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	100,00%	100,00%	KEC SEDAYU	
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor				34.000.000		37.000.000		26.772.000		36.880.000	0	36.880.000		99,68%	KEC SEDAYU
		Jumlah paket pemeliharaan rumah dan gedung kantor	2	19.000.000	2	22.000.000	2	26.772.000	2	21.880.000	2	21.880.000	100,00%	99,45%	KEC SEDAYU	
		Jumlah Paket Gambar 3D	1	15.000.000	2	15.000.000			2	15.000.000	2	15.000.000	100,00%	100,00%	KEC SEDAYU	
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional				77.000.000		75.544.600		52.823.050		75.544.600	0	75.544.600		100,00%	KEC SEDAYU
		jumlah belanja BBM	12	54.000.000	7	58.444.600	7	40.500.000	7	58.444.600	7	58.444.600	100,00%	100,00%	KEC SEDAYU	
		jumlah paket jasa servis	7	10.000.000	7	7.000.000	7	5.051.250	7	7.000.000	7	7.000.000	100,00%	100,00%	KEC SEDAYU	
		jumlah paket belanja Suku cadang	7	11.000.000	7	9.000.000	7	6.200.500	7	9.000.000	7	9.000.000	100,00%	100,00%	KEC SEDAYU	
		Jumlah Paket Belanja STNK	7	2.000.000	7	1.100.000	6	1.071.300	7	1.100.000	7	1.100.000	100,00%	100,00%	KEC SEDAYU	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								III		IV						
1	4	5		8		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	0,98	58	180.000.000	58	180.900.000	55	134.325.000	58	180.900.000	58	180.900.000	100,00%	100,00%	KEC IMOIGIRI
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan			13	32.000.000	13	50.350.000	13	26.950.000	13	50.350.000	13	50.350.000	100,00%	100,00%	KEC IMOIGIRI
						4		1		4						
						1		11		1						
		Rak Buku	unit	1		1		1		1		1	0	100,00%		KEC IMOIGIRI
		Alat Perlengkapan PATEN	item	11		11		11		11		11	0	100,00%		KEC IMOIGIRI
		Sounsystem lengkap	set	1		1		1		1		1	0	100,00%		KEC IMOIGIRI
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kanbr	Pemeliharaan Rutin Rumah dan Gedung kanbr	Unit	6	60.000.000	6	40.000.000	6	40.000.000	6	40.000.000	6	40.000.000	100,00%	100,00%	KEC IMOIGIRI
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional			24	75.000.000	24	77.550.000	21	57.375.000	24	77.550.000	24	77.550.000	100,00%	100,00%	KEC IMOIGIRI
		BBM	bulan	12		12		9		12		12	0	100,00%		KEC IMOIGIRI
		Gant Suku Cadang Kendaraan Dinas	unit	6		6		6		6		6	0	100,00%		KEC IMOIGIRI
		Service Kendaraan Dinas	unit	6		6		6		6		6	0	100,00%		KEC IMOIGIRI
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah peralatan dan perlengkapan kanbr yang dipelihara	unit	15	13.000.000	15	13.000.000	15	10.000.000	15	13.000.000	15	13.000.000	100,00%	100,00%	KEC IMOIGIRI
												0	0			
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				433.000.000		261.900.000		137.414.000		188.514.000	0	188.514.000		71,98%	BAPPEDA
	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur				433.000.000		261.900.000		137.414.000		188.514.000	0	188.514.000		71,98%	BAPPEDA
		Dokumen Manajemen Mutu		1		1		1		1		1	0	100,00%		BAPPEDA
		Pengiriman Bimbingan teknis /Kursus		24		6		1		5		5	0	83,33%		BAPPEDA
		Jumlah pelatihan/bimtek		4		2		1		2		2	0	100,00%		BAPPEDA
		Peningkatan kapasitas sumberdaya		1		1		1		1		1	0	100,00%		BAPPEDA
												0	0			BAPPEDA
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	%	100	18.687.500		18.687.500		-		3.650.000	0	3.650.000		19,53%	BKAD
	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	Pengiriman peserta bimbingan teknis	kali	2	18.687.500	2	18.687.500	0	-	1	3.650.000	1	3.650.000	50,00%	19,53%	BKAD
		Pengiriman peserta sosialisasi	kali	2		2		0		0		0	0	0,00%		BKAD
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Persen	100	205.500.000	100	212.950.000	1	140.500.000	0	66.430.000	0	66.430.000	0,00%	31,20%	BPBD
	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	jumlah bimtek dan peningkatan kapasitas aparatur	bimtek	1	205.500.000	1	212.950.000	1	140.500.000		66.430.000	0	66.430.000	0,00%	31,20%	BPBD

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								III		IV						
1	4	5		8		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Presentase pemenuhan kebutuhan ASN dalam jabatan		17	4.893.003.000		4.880.400.000		3.086.569.375		4.176.591.325	0	4.176.591.325		85,58%	BKPP
		Presentase aparatur yang memperoleh dokumen kompetensi		9		9	4.880.400.000		3.080.869.375	9,1	4.170.441.325	9,1	4.170.441.325	101,11%	85,45%	BKPP
	Ujian dinas dan penyesuaian ijasah	Jumlah PNS yang mengikuti ujian dinas dan ujian penyesuaian ijasah		45	31.662.500	38	31.662.500	38	5.700.000	38	6.150.000	38	6.150.000	100,00%	19,42%	BKPP
	Uji Kompetensi dan psikologi	Jumlah PNS yang mengikuti uji kompetensi dan psikologi bagi PNS		337	498.100.000	337	498.100.000	385	473.740.000	397	474.140.000	397	474.140.000	117,80%	95,19%	BKPP
	Pendidikan dan Pelatihan PNS	Jumlah analisis diklat dan jumlah PNS yang mengikuti diklat struktural		76	3.602.747.000	76	3.301.723.000	76	2.285.512.775	76	2.989.980.675	76	2.989.980.675	100,00%	90,56%	BKPP
		Jumlah analisis diklat dan jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis fungsional		1231		1231		366		985		985	0	80,02%		BKPP
		Jumlah dokumen kebutuhan diklat		1		1		0		0		0	0	0,00%		BKPP
		Jumlah analisis diklat dan jumlah PNS yang mengikuti diklat prajabatan		54		54		54		54		54	0	100,00%		BKPP
	Penyelenggaraan Pendidikan PNS	Jumlah PNS yang mengikuti Tugas Belajar		7	124.900.000	7	124.900.000	7	72.100.000	8	108.280.000	8	108.280.000	114,29%	86,69%	BKPP
		Jumlah PNS yang mengajukan ijin belajar		100		100		33		102		102	0	102,00%		BKPP
	Perencanaan dan Pengadaan Calon ASN	Jumlah seleksi Non PNS		2400	635.593.500	2400	924.014.500	2400	249.516.600	2400	598.040.650	2400	598.040.650	100,00%	64,72%	BKPP
		Jumlah formasi jabatan		2000		2000		2643		2643		2643	0	132,15%		BKPP
		Jumlah peserta seleksi ASN		2650		2650		0		3912		3912	0	147,62%		BKPP
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Sumber Daya Aparatur			48.000.000		15.000.000	0	-			0	0	0,00%		DINAS KEBUDAYAAN
	Pengembangan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Jumlah ASN mengikuti Bimtek/diklat	orang	15	48.000.000	3	15.000.000				7.740.000	0	7.740.000	0,00%	51,60%	DINAS KEBUDAYAAN
												0	0			
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan kompetensi pejabat fungsional dan SDM Kesehatan					225.300.000	13	88.674.500	0	29.998.500	0	29.998.500		13,31%	DINAS KESEHATAN
	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	Belanja Pegawai					225.300.000	13	88.674.500	0	29.998.500	0	29.998.500		13,31%	DINAS KESEHATAN
		Honorarium Tim Pembina Teladan	12 OB			12	6.900.000									DINAS KESEHATAN
		Belanja Barang dan Jasa														DINAS KESEHATAN
		Monev Program RPL	1 kl			1	5.130.000									DINAS KESEHATAN
		Diklat Pelayanan Prima	1 pkt			1	70.000.000									DINAS KESEHATAN

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								III		IV						
1	4	5		8		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Sosialisasi Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan	1 kl			1	6.270.000	1	6.270.000							DINAS KESEHATAN
		Rapat Koordinasi Pengadaan Sarana dan Prasarana Dinas Kesehatan	3 kl			3	2.460.000									DINAS KESEHATAN
		Rapat Koordinasi Program RPL Angkatan 2	1 kl			1	940.000									DINAS KESEHATAN
		Bimtek Peningkatan Kompetensi SDM Kesehatan	2 kl			1	7.360.000	2	7.360.000							DINAS KESEHATAN
		Persiapan Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat DIY di Puskesmas	5 kl			5	2.625.000									DINAS KESEHATAN
		Workshop Analisis Kebutuhan Diklat	1 kl			1	5.200.000	1	4.450.000							DINAS KESEHATAN
		Sosialisasi tentang kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana	1 kl			1	3.255.000									DINAS KESEHATAN
		Bimtek Penyusunan DUPAK bagi Jablung	2 kl			2	7.460.000									DINAS KESEHATAN
		Workshop Penyusunan Kebutuhan SDMK	1 kl			1	5.947.500									DINAS KESEHATAN
		Rapat koordinasi pengelolaan SDM Kesehatan	2 kl			2	2.100.000									DINAS KESEHATAN
		Pelaksanaan Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan	1 kl			1	3.955.000	1	3.955.000							DINAS KESEHATAN
		Diklat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional	1 pkt			1	49.000.000	1	49.000.000							DINAS KESEHATAN
		Rapat Persiapan Bimtek untuk Jabatan Fungsional	1 kl			1	875.000									DINAS KESEHATAN
		Bimtek Peningkatan Kompetensi Jablung	3 kl			3	9.570.000	3	9.570.000							DINAS KESEHATAN
		Workshop Penggunaan Software Pemetaan Distribusi SDMK Berbasis Website dalam rangka Penyediaan Data Dasar dan Analisa Situasi	1 kl			1	5.105.000	1	5.105.000							DINAS KESEHATAN
		FGD Sumber Daya Kesehatan	5 kl			5	4.830.000	2	2.065.000							DINAS KESEHATAN
		Evaluasi Penilaian Angka Kredit untuk Pejabat Fungsional	2 kl			2	2.406.500									DINAS KESEHATAN
		Penilaian Tenaga Kesehatan Tahun 2018	1 kl			1	12.068.500									DINAS KESEHATAN
		Evaluasi Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan	2 kl			2	2.480.000									DINAS KESEHATAN
		Rapat Persiapan Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Kabupaten	3 kl			3	2.526.000									DINAS KESEHATAN

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								III		IV						
1	4	5		8		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		ATK Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan	2 pkt			2	1.836.500	1	899.500							DINAS KESEHATAN
		Uang Pembinaan untuk Tenaga Kesehatan Teladan	1 pkt			1	5.000.000									DINAS KESEHATAN
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			100	141.000.000	100	150.000.000		104.550.000	100	146.550.000	100	146.550.000	100,00%	97,70%	SETWAN
	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur			36	141.000.000	36	150.000.000		104.550.000	36	146.550.000	36	146.550.000	100,00%	97,70%	SETWAN
	Belanja Kursus-kursus singkat/Bimtek	Jumlah Kursus-kursus singkat/Bimtek	org	36	141.000.000	38	150.000.000	28	104.550.000	38	146.550.000	38	146.550.000	100,00%	97,70%	SETWAN
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur	persen	205	286.170.000	205	268.316.000	0	156.750.000	205	156.750.000	205	156.750.000	100,00%	58,42%	DINAS PERHUBUNGAN
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Per-Undang-Undangan	Jumlah peserta diklat bimtek, sosialisasi	Orang	205	286.170.000	205	268.316.000		156.750.000	205	156.750.000	205	156.750.000	100,00%	58,42%	DINAS PERHUBUNGAN
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	persen	85	99.767.850	85	165.602.850		87.855.000	85	154.200.000	85	154.200.000	100,00%	93,11%	DINAS KOPERASI UKMP
	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur				99.767.850		165.602.850		87.855.000		154.200.000		154.200.000		93,11%	DINAS KOPERASI UKMP
		terlaksananya pendidikan, pelatihan, sosialisasi, bimtek, dan peningkatan kapasitas aparatur	kegiatan													DINAS KOPERASI UKMP
		terlaksananya senam karyawan	kali	22		22		14		22		22	0	100,00%		DINAS KOPERASI UKMP
		terlaksananya pembinaan ASN	kali	2		2		2		2		2	0	100,00%		DINAS KOPERASI UKMP
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	100 persen	100	921.619.150	100	1.026.305.150		543.890.100	100	953.476.150	100	953.476.150	100,00%	92,90%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	jumlah kegiatan peningkatan kapasitas	5 paket	5	921.619.150	6	1.026.305.150	3	543.890.100	6	953.476.150	6	953.476.150	100,00%	92,90%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
												0	0			
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				59.800.000	100	59.800.000		54.050.000	100	47.550.000	100	47.550.000	100,00%	79,52%	DINAS PERTANAHAN TATA RUANG
	Pengembangan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Terlaksananya Bimtek	55 ok	55	59.800.000	55	59.800.000	55	54.050.000	55	47.550.000	55	47.550.000	100,00%	79,52%	DINAS PERTANAHAN TATA RUANG

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								III		IV						
1	4	5		8		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												0	0			
												0	0			
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase	100	182.250.000	100	189.895.000		98.238.750	100	156.715.000	100	156.715.000	100,00%	82,53%	SATPOL PP
	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	Jumlah pelaksanaan kesampaian	Kali	48	182.250.000	48	189.895.000	41	89.165.000	46	156.715.000	46	156.715.000	95,83%	82,53%	SATPOL PP
		Jumlah pelaksanaan korsik	kali	48		48		15		34		34		70,83%		SATPOL PP
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan kompetensi pejabat fungsional dan SDM Kesehatan			225.300.000		225.300.000	13	88.674.500	0	29.998.500		118.673.000		52,67%	DINAS KESEHATAN
	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	Belanja Pegawai			6.900.000	12 OB	6.900.000								0,00%	DINAS KESEHATAN
		Honorarium Tim Pembina Teladan		12 OB	6.900.000							0				DINAS KESEHATAN
		Belanja Barang dan Jasa				1 kl	5.130.000					0			0,00%	DINAS KESEHATAN
		Monev Program RPL	1 kl			1 pkt	70.000.000					0			0,00%	DINAS KESEHATAN
					5.130.000											
		Diklat Pelayanan Prima	1 pkt			1 kl	6.270.000	1	6.270.000			0			0,00%	DINAS KESEHATAN
		Sosialisasi Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan	1 kl		70.000.000	3 kl	2.460.000					0			0,00%	DINAS KESEHATAN
		Rapat Koordinasi Pengadaan Sarana dan Prasarana Dinas Kesehatan	3 kl		6.270.000	1 kl	940.000					0			0,00%	DINAS KESEHATAN
					2.460.000											
		Rapat Koordinasi Program RPL Angkatan 2	1 kl			2 kl	7.360.000	2	7.360.000			0			0,00%	DINAS KESEHATAN
					940.000											
		Bimtek Peningkatan Kompetensi SDM Kesehatan	2 kl		7.360.000	5 kl	2.625.000					0			0,00%	DINAS KESEHATAN
		Persiapan Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat DIY di Puskesmas	5 kl		2.625.000	1 kl	5.200.000	1	4.450.000			0			0,00%	DINAS KESEHATAN
		Workshop Analisis Kebutuhan Diklat	1 kl		5.200.000	1 kl	3.255.000					0			0,00%	DINAS KESEHATAN
		Sosialisasi tentang kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana	1 kl		3.255.000	2 kl	7.460.000					0			0,00%	DINAS KESEHATAN
		Bimtek Penyusunan DUPAK bagi Jabtung	2 kl		7.460.000	1 kl	5.947.500					0			0,00%	DINAS KESEHATAN
		Workshop Penyusunan Kebutuhan SDMK	1 kl		5.947.500	2 kl	2.100.000					0			0,00%	DINAS KESEHATAN
		Rapat koordinasi pengelolaan SDM Kesehatan	2 kl		2.100.000	1 kl	3.955.000	1	3.955.000			0			0,00%	DINAS KESEHATAN
		Pelaksanaan Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan	1 kl		3.955.000	1 pkt	49.000.000	1	49.000.000			0			0,00%	DINAS KESEHATAN
		Diklat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional	1 pkt		49.000.000	1 kl	875.000					0			0,00%	DINAS KESEHATAN

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								III		IV						
1	4	5		8		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Rapat Persiapan Bimtek untuk Jabatan Fungsional	1 kl	875.000	3 kl	9.570.000	3	9.570.000				0			0,00%	DINAS KESEHATAN
		Bimtek Peningkatan Kompetensi Jablung	3 kl	9.570.000	1 kl	5.105.000	1	5.105.000				0			0,00%	DINAS KESEHATAN
		Workshop Penggunaan Software Pemetaan Distribusi SDMK Berbasis Website dalam rangka Penyediaan Data Dasar dan Analisa Situasi	1 kl	5.105.000	5 kl	4.830.000	2	2.065.000				0			0,00%	DINAS KESEHATAN
		FGD Sumber Daya Kesehatan	5 kl	4.830.000	2 kl	2.406.500						0			0,00%	DINAS KESEHATAN
		Evaluasi Penilaian Angka Kredit untuk Pejabat Fungsional	2 kl	2.406.500	1 kl	12.068.500						0			0,00%	DINAS KESEHATAN
		Penilaian Tenaga Kesehatan Tahun 2018	1 kl	12.068.500	2 kl	2.480.000						0			0,00%	DINAS KESEHATAN
		Evaluasi Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan	2 kl	2.480.000	3 kl	2.526.000						0			0,00%	DINAS KESEHATAN
		Rapat Persiapan Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan TingkatKabupaten	3 kl	2.526.000	2 pkt	1.836.500	1	899.500				0			0,00%	DINAS KESEHATAN
		ATK Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan	2 pkt	1.836.500	1 pkt	5.000.000						0			0,00%	DINAS KESEHATAN
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	persen	100	100.875.000	100	174.525.000			100	174.525.000	100	174.525.000	100,00%	100,00%	DINAS PERDAGANGAN
	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur				100.875.000				49.500.000							DINAS PERDAGANGAN
		peserta diklat kapasitas Sumber Daya Aparatur	orang	85		85	174.525.000	85		85	174.525.000	85	174.525.000	100,00%	100,00%	DINAS PERDAGANGAN
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		0,03	157.480.000	0,03	227.480.000		44.183.000		207.240.200		207.240.200	0,00%	91,10%	INSPEKTORAT
	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur			100	157.480.000	100	227.480.000	75	44.183.000		207.240.200		207.240.200	0,00%	91,10%	INSPEKTORAT
		Jumlah Senam		24		24		8		24		24	0	100,00%		INSPEKTORAT
		Jumlah Diklat JFA/Diklat Subentif		16		16		17		16		16	0	100,00%		INSPEKTORAT
		Jumlah PKS		12		12		6		12		12	0	100,00%		INSPEKTORAT
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	%	100	37.500.000	100	37.500.000		16.650.000	100	34.900.000	100	34.900.000	100,00%	93,07%	DINAS PERTANIAN PKP

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								III		IV							
1	4	5		8		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	Jumlah pelatihan peningkatan kapasitas bagi aparatur	kali	5	37.500.000	5	37.500.000	4	16.650.000	5	34.900.000	5	34.900.000	100,00%	93,07%	DINAS PERTANIAN RKP	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumberdaya			130.000.000		102.500.000		81.322.300		99.322.300		99.322.300		96,90%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur		165 orang	165	130.000.000	165	102.500.000	165	81.322.300	165	99.322.300	165	99.322.300	100,00%	96,90%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidang nya	persen	100	97.749.950	100	97.749.950	100 persen	94.749.800	100	94.749.800	100	94.749.800	100,00%	96,93%	DINAS PENANAMAN MODAL PT	
	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	Jumlah pelaksanaan Bimtek Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	kegiatan	1	97.749.950	1	97.749.950	1 kegiatan	94.749.800	1	94.749.800	1	94.749.800	100,00%	96,93%	DINAS PENANAMAN MODAL PT	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur			64.000.000	87	64.000.000		64.000.000	87	64.000.000	87	64.000.000	100,00%	100,00%	DINAS SOSIAL P3A	
	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	Pelatihan aparatur		1	64.000.000	1	64.000.000	1	64.000.000	1	64.000.000	1	64.000.000	100,00%	100,00%	DINAS SOSIAL P3A	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persen	100	5.417.000	100	5.417.000		5.103.500	100	5.417.000	100	5.417.000	100,00%	100,00%	KECAMATAN SRANDAKAN	
	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	jumlah ASN dan pamong yang mengikuti Bimtek	kali	2	5.417.000	12	5.417.000	9	5.103.500	12	5.417.000	12	5.417.000	100,00%	100,00%	KECAMATAN SRANDAKAN	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		kali		10.875.000	22	10.875.000	14	8.325.000	22	10.875.000	22	10.875.000	100,00%	100,00%	KEC PANDAK	
	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur		kali	22	10.875.000			14	8.325.000	22	10.875.000	22	10.875.000			KEC PANDAK	
	Program peningkatan disiplin aparatur		cakupan peningkatan disiplin aparatur	persen	100	259.800.000	100	259.800.000	1	-	1	195.221.400	1	195.221.400	1,00%	75,14%	BPBD
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Peningkatan Disiplin Aparatur	jumlah pakaian seragam bagi TRC, PBK, SAR	paket	6	259.800.000	6	259.800.000	1	-	1	195.221.400	1	195.221.400	16,67%	75,14%	BPBD
	Program peningkatan disiplin aparatur		Cakupan pembinaan disiplin aparatur	persen	1062	226.650.000	1062	226.650.000	0	151.760.926	1062	151.760.926	1062	151.760.926	100,00%	66,96%	DINAS PERHUBUNGAN

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								III		IV						
1	4	5		8		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah pengadaan pakaian kerja lapangan	buah	1062	226.650.000	1062	226.650.000		151.760.926	1062	151.760.926	1062	151.760.926	100,00%	66,96%	DINAS PERHUBUNGAN
	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase pelanggaran disiplin pegawai	Persentase	0	89.375.000	0	72.020.000		72.020.000		72.020.000	0	72.020.000		100,00%	SATPOL PP
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah pengadaan seragam	stel	177	89.375.000	177	72.020.000	177	72.020.000	177	72.020.000	177	72.020.000	100,00%	100,00%	SATPOL PP
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				20.000.000		20.000.000		9.577.700		11.696.900	0	11.696.900		58,48%	BAPPEDA
	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan				20.000.000		20.000.000		9.577.700		11.696.900		11.696.900		58,48%	BAPPEDA
		Dokumen LKPJ 2017 PD		1		1		1		1		1		100,00%		BAPPEDA
		Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		2		2		1		2		2		100,00%		BAPPEDA
		Dokumen LPPD PD		1		1		1		1		1		100,00%		BAPPEDA
		Laporan kinerja		1		1		1		1		1		100,00%		BAPPEDA
		Dokumen Capaian Renja per Triwulan		4		4		3		4		4		100,00%		BAPPEDA
												0				
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja		80	156.215.800		216.215.800		4.822.000		172.146.800	0	172.146.800		79,62%	BKAD
	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	laporan	1	26.775.000	1	26.775.000	0	-	1	-	1		100,00%	0,00%	BKAD
	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi keuangan daerah	Media informasi yang disediakan	macam	4	104.290.000	4	154.290.000	3	900.000	4	149.128.000	4	149.128.000	100,00%	96,65%	BKAD
	Penyaluran belanja PPKD	Tersalurnya belanja tidak langsung PPKD	%	100	14.400.800	100	14.400.800	63	-	87,62	8.650.800	87,62	8.650.800	87,62%	60,07%	BKAD
		Tersalurnya pengeluaran pembiayaan daerah	%	100		100		75		93,25		93,25	0	93,25%		BKAD
	Penyusunan standar operasional dan prosedur	Tersusunnya SOP BKAD	SK	1	5.550.000	1	5.550.000	0	-	0	450.000	0	450.000		8,11%	BKAD
	Pendataan dan pengelolaan arsip	Terkelolanya arsip BKAD	bulan	12	5.200.000	12	15.200.000	9	3.922.000	12	13.918.000	12	13.918.000	100,00%	91,57%	BKAD
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase capaian kinerja dan keuangan	Persen	11	54.175.500	11	53.413.000	1	29.755.000	0	-	1	29.755.000	9,09%	55,71%	BPBD
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	jumlah dokumen laporan capaian kinerja	dok	5	10.130.000	5	10.130.000	0	-			0	0	0,00%	0,00%	BPBD
	Perencanaan dan Koordinasi Program Kegiatan	jumlah dokumen perencanaan	dok	5	13.238.000	5	13.238.000	0	-			0	0	0,00%	0,00%	BPBD
	Penyusunan Profil SKPD	jumlah dokumen profil skpd	dok	1		1	30.045.000	1	29.755.000					0,00%	0,00%	BPBD

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								III		IV						
1	4	5		8		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					30.807.500											
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja		78	10.950.000	78	10.950.000	8.654.975	86,62	10.389.975	86,62	10.389.975	111,05%	94,89%	BKPP	
	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Jumlah laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan		5	10.950.000	5	10.950.000	4	8.654.975	5	10.389.975	5	10.389.975	100,00%	94,89%	BKPP
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			100	68.980.000	100	58.880.000	42.214.300	98	56.826.000	98	56.826.000	98,00%	96,51%	SETWAN	
	Perencanaan dan Koordinasi Program Kegiatan				-						0	0			SETWAN	
	Penyusunan LAKIP				-						0	0			SETWAN	
	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan			100	68.980.000	100	58.880.000	42.214.300	98	56.826.000	98	56.826.000	98,00%	96,51%	SETWAN	
	Honor Pengelola Keuangan dan Barang	Jumlah Pengelola Keuangan dan Barang	ob	132	50.760.000	132	50.760.000	99	37.722.000	100	50.331.000	100	50.331.000	75,76%	99,15%	SETWAN
	Uang Lembur	Jumlah Lembur	ok	190	2.850.000	0	-	0	-	0	-	0	0			SETWAN
	Belanja Alat Tulis Kantor	Jumlah paket Alat Tulis Kantor	ls	4	1.620.000	4	1.620.000	2	842.300	100	1.620.000	100	1.620.000	2500,00%	100,00%	SETWAN
	Belanja Makan dan minum rapat	Jumlah Makan dan minum rapat	om	360	9.000.000	260	6.500.000	214	3.650.000	75	4.875.000	75	4.875.000	28,85%	75,00%	SETWAN
	Belanja Makan dan minum lembur	Jumlah Makan dan minum lembur	om	190	4.750.000	0	-	0	-	0	-	0	0			
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	angka	10	25.000.000	10	25.000.000	0	6.322.500	10	22.266.500	10	22.266.500	100,00%	89,07%	DINAS PERHUBUNGAN
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan	10	25.000.000	10	25.000.000	6.322.500	10	22.266.500	10	22.266.500	100,00%	89,07%	DINAS PERHUBUNGAN	
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				165.000.000		160.625.000	45.428.000		141.121.500	0	141.121.500		87,86%	DINAS KEBUDAYAAN	
	Penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal	Jumlah SOP yang disusun	4 SOP	4	40.000.000	4	40.000.000	8	35.868.000		36.681.000	0	36.681.000		91,70%	DINAS KEBUDAYAAN
	Pemutakhiran Data	Jumlah Register Kelompok seni dan Dokumen Survey Index Pembangunan Kebudayaan	500 1dok	501	75.000.000	350 1	70.625.000	212	1.375.000		60.183.000	0	60.183.000		85,21%	DINAS KEBUDAYAAN
	Penyusunan Profil SKPD	Jumlah buku profil kebudayaan	480	480	25.000.000	387	25.000.000	0	-		21.132.500	0	21.132.500		84,53%	DINAS KEBUDAYAAN
	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Jumlah laporan kinerja	40	40	25.000.000	40	25.000.000	18	8.185.000		23.125.000	0	23.125.000		92,50%	DINAS KEBUDAYAAN
	Program peningkatan pengembangan	Nilai Evaluasi kinerja					306.167.625	0	68.143.775	0	148.810.900	0	148.810.900		48,60%	DINAS KESEHATAN

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								III		IV						
1	4	5		8		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan															
	Penyusunan sistem manajemen mutu					155.900.000		50.068.850		97.133.000	0	97.133.000		62,30%		DINAS KESEHATAN
		- Terlaksananya Pendampingan Implementasi SMM ISO 9001:2015			10	62.710.000		2.324.350	1	51.993.000	1	51.993.000		10,00%	82,91%	DINAS KESEHATAN
		- Terlaksananya Audit Eksternal Surveilans			1	93.190.000		47.744.500	1	45.140.000	1	45.140.000		100,00%	48,44%	DINAS KESEHATAN
	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Dokumen Disrict Health Account (DHA), Laporan Kinerja, LPPD, dan LKPJ, Profil Kesehatan, Renja Dinkes				150.267.625		18.074.925		51.677.900	0	51.677.900			34,39%	DINAS KESEHATAN
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai Evaluasi Kinerja	Angka		80	147.615.500					0	0		0,00%		DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan					158.650.000		123.395.000		158.125.000	0	158.125.000		99,67%		DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
		Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa	Ok							9	2.550.000	9	2.550.000			DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
		Uang Lembur PNS	Ok							280	3.850.000	280	3.850.000			DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
		Belanja Jasa Serivikasi/Jasa Survalent	Paket							1	24.900.000	1	24.900.000			DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
		Belanja Cetak	Tahun							1	2.000.000	1	2.000.000			DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Om							1800	25.650.000	1800	25.650.000			DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
		Belanja Makanan dan Minuman Lembur	Om							280	5.600.000	280	5.600.000			DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
		Belanja Jasa Konsultasi SMM	Paket							1	47.575.000	1	47.575.000			DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
		Belanja Jasa Aplikasi	Paket							1	44.000.000	1	44.000.000			DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Mencapai Nilai AKIP	Nilai Evaluasi Kinerja	1	39.040.000	75	39.040.000			34.626.750	0	34.626.750		88,70%		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Akuntabilitas laporan SKPD	Nilai Evaluasi Kinerja	1	39.040.000	75	39.040.000			34.626.750	0	34.626.750		88,70%		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	80 persen	80	689.384.100	80	733.109.100		282.907.550	77,01	591.382.550	77,01	591.382.550	96,26%	80,67%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	jumlah dokumen	5 dokumen	5	53.350.100	7	97.075.100	4	39.150.050	7	85.150.050	7	85.150.050	100,00%	87,72%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	jumlah laporan keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan Dikpora, UPT PP Kecamatan dan sekolah	18 dokumen	18	636.034.000	18	636.034.000	9	243.757.500	18	506.232.500	18	506.232.500	100,00%	79,59%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								III		IV						
1	4	5		8		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	capaian nilai evaluasi kerja	nilai	80	163.688.416	80	116.849.312		47.507.144		106.525.360		106.525.360		91,16%	DINAS KOPERASI UKMP
	Perencanaan dan Koordinasi Program Kegiatan				163.688.416		116.849.312		47.507.144		106.525.360		106.525.360		91,16%	DINAS KOPERASI UKMP
		jumlah dokumen perencanaan	dokumen	2												
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Cakupan Nilai Evaluasi Kinerja	nilai		147.470.000	80	147.470.000		124.775.000		136.996.000		136.996.000		92,90%	DINAS PERTANAHAN TATA RUANG
	Penyusunan laporan keuangan, barang, kepegawaian, dan ketatausahaan	Laporan Keuangan	Dokumen	12	100.070.000	12	100.070.000	9	78.395.000	12	91.216.000	12	91.216.000	100,00%	91,15%	DINAS PERTANAHAN TATA RUANG
		Tersusunnya Laporan Barang	Dokumen			12				12						DINAS PERTANAHAN TATA RUANG
		Tersusunnya Dokumen SMM	Dokumen			1				1						DINAS PERTANAHAN TATA RUANG
	Permutakhiran Data	Belanja konsultasi SMM	Unit	1	47.400.000	1	47.400.000	1	46.380.000	1	45.780.000	1	45.780.000	100,00%	96,58%	DINAS PERTANAHAN TATA RUANG
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Capaian nilai evaluasi kinerja	73		17.300.000	73	17.300.000			73	15.968.875	73	15.968.875	100,00%	92,31%	SATPOL PP
	Perencanaan dan Koordinasi Program Kegiatan	Dokumen perencanaan	Dok	3	7.300.000	3	7.300.000	2	2.980.000	3	6.970.000	3	6.970.000	100,00%	95,48%	SATPOL PP
	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Dokumen laporan	Dok	4	10.000.000	4	10.000.000	4	6.093.750	4	8.998.875	4	8.998.875	100,00%	89,99%	SATPOL PP
												0	0			
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai Evaluasi kinerja			306.167.625		306.167.625	0	68.143.775	0	148.810.900	0	148.810.900		48,60%	DINAS KESEHATAN
	Penyusunan sistem manajemen mutu				155.900.000		155.900.000		50.068.850		97.133.000	0	97.133.000		62,30%	DINAS KESEHATAN
		- Terlaksananya Pendampingan Implementasi SMM ISO 9001:2015		10	62.710.000	10	62.710.000	4	2.324.350	1	51.993.000	1	51.993.000	10,00%	82,91%	DINAS KESEHATAN
		- Terlaksananya Audit Eksternal Surveilans		1	93.190.000	1	93.190.000	0	47.744.500	1	45.140.000	1	45.140.000	100,00%	48,44%	DINAS KESEHATAN
	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Dokumen District Health Account (DHA), Laporan Kinerja, LPPD, dan LKPJ, Profil Kesehatan, Renja Dinkes			150.267.625		150.267.625		18.074.925		51.677.900		51.677.900		34,39%	DINAS KESEHATAN
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Capaian nilai evaluasi kinerja		80	178.750.000	80	200.092.500			76,39	200.092.500	76,39	200.092.500	95,49%	100,00%	DINAS PERDAGANGAN
	Penyusunan sistem manajemen mutu				100.000.000	8	124.596.500		8.501.500		124.596.500		124.596.500	0,00%	100,00%	DINAS PERDAGANGAN

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								III		IV						
1	4	5		8		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Jumlah pendampingan implementasi SMM	1 kali	8		8		8		8		8		100,00%		DINAS PERDAGANGAN
	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan				78.750.000		75.496.000		48.483.500		75.496.000		75.496.000		100,00%	DINAS PERDAGANGAN
		Jumlah peserta FGD Perencanaan	60 orang	60		60		60		60		60		100,00%		DINAS PERDAGANGAN
		Jumlah peserta FGD Monev	0 orang	30		30		30		30		30		100,00%		DINAS PERDAGANGAN
		Jumlah dokumen perencanaan/ evaluasi yang dihasilkan	5 dokumen	12		12		12		12		12		100,00%		DINAS PERDAGANGAN
	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Cakupan laporan yang PD										0	0			KESBANGPOL
	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan PD										0	0			KESBANGPOL
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				16.500.000	80	16.500.000		4.245.000	80	14.620.000	80	14.620.000	100,00%	88,61%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Jumlah bahan percontohan tas 3R			16.500.000		16.500.000	0	4.245.000	100	14.620.000	100	14.620.000		88,61%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja (Renja, CALK, LPPD, LKPJ, LKj				4		4		4		4		100,00%		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Capaian nilai evaluasi kinerja	Persen	80	51.425.000	80	51.425.000		7.825.000	80	50.080.000	80	50.080.000	100,00%	97,38%	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Jumlah capaian laporan kinerja	Dokumen	8	51.425.000	8	51.425.000	6	7.825.000	8	50.080.000	8	50.080.000	100,00%	97,38%	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja			15.000.000		15.000.000		5.505.000		14.905.000	0	14.905.000		99,37%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	Perencanaan dan Koordinasi Program Kegiatan		5 dokumen	5	15.000.000	5	15.000.000	5	5.505.000	5	14.905.000	5	14.905.000	100,00%	99,37%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Presentase cakupan peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja			126.190.000		126.190.000		38.484.100		120.964.100	0	120.964.100		95,86%	DINAS PENANAMAN MODAL PT
	Penyusunan sistem manajemen mutu	1 sertifikat	1 sertifikat	1	113.500.000	1	113.500.000	0	27.812.500	1	108.517.500	1	108.517.500	100,00%	95,61%	DINAS PENANAMAN MODAL PT

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								III		IV						
1	4	5		8		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Perencanaan dan Koordinasi Program Kegiatan	Jumlah pelaksanaan koordinasi program dan kegiatan	4 kali	4	5.190.000	4	5.190.000	3 kali	3.965.000	12	5.115.000	12	5.115.000	300,00%	98,55%	DINAS PENANAMAN MODAL PT
	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Jumlah laporan kinerja perangkat daerah	12 dokumen	12	7.500.000	12	7.500.000	9 dokum en	6.706.600	12	7.331.600	12	7.331.600	100,00%	97,75%	DINAS PENANAMAN MODAL PT
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	Angka	80	65.000.000	80	65.000.000	78,67	43.405.000	75,97	51.855.500	75,97	51.855.500	94,96%	79,78%	DINAS PU PKP
	Perencanaan dan Koordinasi Program Kegiatan	Honorarium Panitia Kegiatan	ok		15.000.000	13	15.000.000	0	6.702.000	0	7.202.000	0	7.202.000	0,00%	48,01%	DINAS PU PKP
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan	dokumen		50.000.000	5		4		5		5	0	100,00%		DINAS PU PKP
	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Tersusunnya dokumen laporan	dokumen			6	50.000.000	4	36.703.000	6	44.653.500					
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya Administrasi Pelaporan			8.161.100		8.161.100		6.786.850		8.161.100	0	8.161.100		100,00%	DINAS SOSIAL P3A
	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Tersusunnya LAKip, LPPD, CALK, LKPJ		6	8.161.100	6	8.161.100	5	6.786.850	6	8.161.100	6	8.161.100	100,00%	100,00%	DINAS SOSIAL P3A
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat Ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	NILAI	80	15.375.000	80	15.375.000			80	14.674.900	80	14.674.900	100,00%	95,45%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	dokumen	20	15.375.000	20	15.375.000			20	14.674.900	20	14.674.900	100,00%	95,45%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	0,8	0,8	5.250.000		3.300.000					0	0		0,00%	DINAS PARIWISATA
	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Jumlah pembuatan laporan	5 dokumen	5	5.250.000	5	3.300.000					0	0	0,00%	0,00%	DINAS PARIWISATA
												0	0			
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				92.835.000		92.555.250		78.877.250		84.261.950	0	84.261.950		91,04%	BAG UMUM
	Peningkatan Kemampuan SDM Pelayanan Administrasi Umum				75.875.000		75.595.250		74.720.250		74.720.250	0	74.720.250		98,84%	BAG UMUM
		Jumlah pembayaran honor tim PBJ	Paket	1	875.000	1	875.000	0	-	0	-	0	0	0,00%	0,00%	BAG UMUM
		Jumlah penyelenggaraan pelatihan/bimtek	kali	1	75.000.000	1	74.720.250	1	74.720.250	1	74.720.250	1	74.720.250	100,00%	100,00%	BAG UMUM

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								III		IV						
1	4	5		8		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan				16.960.000		16.960.000		4.157.000		9.541.700	0	9.541.700		56,26%	BAG UMUM
		Jumlah belanja ATK	Kali	4	1.610.000	4	1.610.000	3	1.045.000	4	1.543.200	4	1.543.200	100,00%	95,85%	BAG UMUM
		Jumlah belanja penggandaan	Lembar	16500	2.900.000	16500	2.900.000	7218	1.242.000	14755	2.728.500	14755	2.728.500	89,42%	94,09%	BAG UMUM
		Jumlah belanja makan minum lembur	Dus	132	3.300.000	132	3.300.000	0	-	49	1.175.000	49	1.175.000	37,12%	35,61%	BAG UMUM
		Jumlah pembayaran uang lembur	Oj	330	4.425.000	330	4.425.000	0	-	0	-	0	0	0,00%	0,00%	BAG UMUM
		Jumlah belanja makan minum rapat	dus	270	4.725.000	270	4.725.000	140	1.870.000	220	4.095.000	220	4.095.000	81,48%	86,67%	BAG UMUM
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	OJ									0	0			
		Jumlah perjalanan dinas luar daerah	oj													
		Jumlah aplikasi keuangan	aplikasi													
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan						6.500.000				6.500.000	0	6.500.000		100,00%	KEC BAMBANGLI PURO
	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan					6.500.000		3.250.000		6.500.000	0	6.500.000		100,00%	KEC BAMBANGLI PURO
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Capaian nilai evaluasi kinerja	Angka		7.600.000	80	7.600.000	94	5.700.000		7.600.000	0	7.600.000	0,00%	100,00%	KEC. BANGUNTAPAN
	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Laporan RKA, DPA, Renja, AKIP, CALK, LKj, Laporan Barang	dokumen	7	7.600.000	7	7.600.000	6	5.700.000	7	7.600.000	7	7.600.000	100,00%	100,00%	KEC. BANGUNTAPAN
		Penggandaan	lembar	4000	600.000	4000	600.000	3000	450.000	4000	600.000	4000	600.000	100,00%	100,00%	KEC. BANGUNTAPAN
		Makan minum rapat	om	200	7.000.000	200	7.000.000	150	5.250.000	200	7.000.000	200	7.000.000	100,00%	100,00%	KEC. BANGUNTAPAN
												0	0			
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	Angka	76	12.425.000	76	12.425.000				12.425.000	0	12.425.000	0,00%	100,00%	KEC DLINGO
	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Jumlah laporan capaian kinerja	dokumen	36	12.425.000	36	12.425.000				12.425.000	0	12.425.000	0,00%	100,00%	KEC DLINGO
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Capaian nilai evaluasi kinerja			6.000.000		60.000.000		4.650.000		6.000.000	0	6.000.000		10,00%	KEC JETIS
	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	Dokumen	4	6.000.000		60.000.000	3	4.650.000		6.000.000	0	6.000.000		10,00%	KEC JETIS

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								III		IV						
1	4	5		8		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	77		10.000.000		10.000.000		7.375.000		10.000.000	0	10.000.000		100,00%	KEC KRETEK
	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Jumlah laporan Kinerja Fisik dan Keuangan, barang dan Kepegawaian	Dokumen	1	10.000.000	4	10.000.000	1	7.375.000	4	10.000.000	4	10.000.000	100,00%	100,00%	KEC KRETEK
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					100	4.800.000	71,25	3.420.000	100	4.800.000	100	4.800.000	100,00%	100,00%	KEC PAJANGAN
	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan					100	4.800.000	71,25	3.420.000	100	4.800.000	100	4.800.000	100,00%	100,00%	KEC PAJANGAN
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	persen	100	5.850.000	100	5.850.000	35,04	2.050.000	0	875.000	0	5.850.000	0,00%	100,00%	KEC. PIYUNGAN
	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan		persen	100	5.850.000	100	5.850.000	35,04	2.050.000		875.000	0	0	0,00%	0,00%	KEC. PIYUNGAN
		Jumlah Makan minum rapat koordinasi	kali	4		4						0	0	0,00%		KEC. PIYUNGAN
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja			1.000.000		1.000.000		-	0	1.000.000	0	1.000.000		100,00%	KEC PUNDONG
	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Jumlah koordinasi dalam rangka penyusunan laporan kinerja, keuangan, dan barang		1	1.000.000	1	1.000.000		-	1	1.000.000	1	1.000.000	100,00%	100,00%	KEC PUNDONG
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				6.000.000		6.000.000			100	5.399.860	100	5.399.860		90,00%	KEC SANDEN
	Penyusunan laporan keuangan, barang, kepegawaian, dan ketatausahaan	Jumlah laporan			6.000.000		6.000.000			100	5.399.860	100	5.399.860		90,00%	KEC SANDEN
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Cakupan Nilai Evaluasi Kinerja			2.040.000		2.040.000		1.380.000		2.040.000	0	2.040.000		100,00%	KEC SEDAYU
	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	jumlah dokumen	laporan	4	2.040.000	42	2.040.000	3	1.380.000	42	2.040.000	42	2.040.000	100,00%	100,00%	KEC SEDAYU
												0	0			
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan	capaian evaluasi kinerja	Nilai	76	5.500.000		5.500.000		4.220.000		5.500.000	0	5.500.000		100,00%	KEC SRANDAKAN
	Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	jumlah laporan	bulan	12	5.500.000	12	5.500.000	9	4.220.000		5.500.000	0	5.500.000	0,00%	100,00%	KEC SRANDAKAN

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								III		IV						
1	4	5		8		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Cakupan Nilai Evaluasi Kinerja Aparatur			5.900.000		5.900.000		2.441.500		5.900.000	0	5.900.000		100,00%	EKC PLERET
	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Jumlah Dokumen Laporan		4	5.900.000	4	5.900.000	3	2.441.500	4	5.900.000	4	5.900.000	100,00%	100,00%	EKC PLERET
												0	0			
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				5.210.000		2.210.000	2	880.000		1.135.000	0	1.135.000		51,36%	KEC PANDAK
	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan			4	5.210.000	4	2.210.000	2	880.000	4	1.135.000	4	1.135.000	100,00%	51,36%	KEC PANDAK
												0	0			
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Capaian nilai evaluasi kinerja	76	8	5.000.000	8	5.000.000	7	3.753.000	8	5.000.000	8	5.000.000	100,00%	100,00%	KEC IMOIGIRI
	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Jumlah Laporan Keuangan, Barang dan Kepegawaian (Renja, RKA, DPA, DPPA, Renstra, SPJ, Laporan Neraca, Aset dan Persediaan, LKJ dan Laporan Keuangan)	Dokumen	8	5.000.000	8	5.000.000	7	3.753.000	8	5.000.000	8	5.000.000	100,00%	100,00%	KEC IMOIGIRI
												0	0			
	Program pengembangan data/informasi				366.510.000		315.510.000		271.985.500		284.860.500	0	284.860.500		90,29%	BAPPEDA
	Penyusunan dan pengelolaan data daerah				157.220.000		157.220.000		131.080.500		142.030.500	0	142.030.500		90,34%	BAPPEDA
		buku profil daerah		1		1		1		1		1	0	100,00%		BAPPEDA
		aplikasi pengelolaan data potensi daerah		1		1		1		1		1	0	100,00%		BAPPEDA
		data buku SIPD		1		1		1		1		1	0	100,00%		BAPPEDA
		aplikasi pengelolaan produk unggulan daerah		1		1		1		1		1	0	100,00%		BAPPEDA
	Penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)				209.290.000		158.290.000		140.905.000		142.830.000	0	142.830.000		90,23%	BAPPEDA
		SIM e-LKPJ		1		0		0		0		0	0			
		Dokumen LKPJ tahun 2017		1		1		1		1		1	0	100,00%		
	Program Kerjasama Pembangunan				126.150.000		123.750.000		102.405.000		119.265.000	0	119.265.000		96,38%	BAPPEDA
	Penelitian dan Pengembangan Kerjasama Daerah				126.150.000		123.750.000		102.405.000		119.265.000	0	119.265.000		96,38%	BAPPEDA
		Dokumen studi		1		1		1		1		1	0	100,00%		BAPPEDA
		Pelayanan perijinan penelitian, KKN dan PKL		3000		3000		2875		3034		3034	0	101,13%		BAPPEDA
		Pemberian penghargaan CSR		57		57		57		57		57	0	100,00%		BAPPEDA

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								III		IV						
1	4	5		8		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Koordinasi, fasilitasi dan monev pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan perguruan tinggi		12		12		9		12		12	0	100,00%		BAPPEDA
	Program perencanaan pembangunan daerah				2.324.349.500		2.197.729.500		1.304.505.153		2.140.208.303	0	2.140.208.303		97,38%	BAPPEDA
	Perencanaan penganggaran				1.189.300.000		1.004.300.000		566.158.000		991.312.700	0	991.312.700		98,71%	BAPPEDA
		Jumlah Dokumen RKPD		2		2		2		2		2	0	100,00%		BAPPEDA
		Tersedianya Jasa Konsultansi Perencanaan Perorangan		60		60		45		60		60	0	100,00%		BAPPEDA
		Terlaksananya Konsiyering Perencanaan		1		1		1		1		1	0	100,00%		BAPPEDA
		Jumlah Dokumen KUA PPAS		2		2		2		2		2	0	100,00%		BAPPEDA
	Perencanaan pembangunan sektoral				279.050.000		428.950.000		237.058.175		419.631.975	0	419.631.975		97,83%	BAPPEDA
		Jumlah peserta Bimtek Penyusunan Renstra		60		60		60		60		60	0	100,00%		BAPPEDA
		Jumlah peserta FGD Integrasi Perencanaan Sektoral dan Wilayah		30		30		30		30		30	0	100,00%		BAPPEDA
		Jumlah peserta deseminasi SIM Terintegrasi		60		60		60		60		60	0	100,00%		BAPPEDA
		Jumlah peserta FGD Bantul Sehat		30		30		30		30		30	0	100,00%		BAPPEDA
		Jumlah peserta FGD Bantul Cerdas		30		30		30		30		30	0	100,00%		BAPPEDA
		Jumlah peserta Bimtek E-Proposal		60		60		45		60		60	0	100,00%		BAPPEDA
		Jumlah Peserta FGD Bantul Sejahtera		30		30		30		30		30	0	100,00%		BAPPEDA
		Jumlah peserta Bimtek Penyusunan Renja		60		60		60		60		60	0	100,00%		BAPPEDA
		Tersusunnya Renstra PD sesuai dengan RPJMD		54		54		0		54		54	0	100,00%		BAPPEDA
		Tersusunnya Renja PD Sesuai dengan RKPD		54		54		0		54		54	0	100,00%		BAPPEDA
	Perencanaan pembangunan kewilayahan				855.999.500		764.479.500		501.288.978		729.263.628	0	729.263.628		95,39%	BAPPEDA
		Tersosialisasinya Perda RPJMD 2016-2021		1		1		0		1		1	0	100,00%		
		Terpeliharanya Sistem Informasi		1		1		1		1		1	0	100,00%		
		Dokumen Perubahan RPJMD 2016-2021		1		1		1		1		1	0	100,00%		
		Terlaksananya Studi Kebutuhan Air Bersih di Kawasan Industri Piyungan		1		1		1		1		1	0	100,00%		
		Tersosialisasinya Permendagri Nomor 86 Tahun 2017		1		1		1		1		1	0	100,00%		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								III		IV						
1	4	5		8		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Tersusunnya RKPD 2019		1		1		1		1		1	0	100,00%		
	Program perencanaan pembangunan ekonomi				803.430.000		753.430.000		446.404.000		712.567.000	0	712.567.000		94,58%	BAPPEDA
	Perencanaan pembangunan dunia usaha dan industri				539.430.000		524.430.000		246.002.000		489.395.000	0	489.395.000		93,32%	BAPPEDA
		Masterplan OB Ki Ageng Mangir Sendangsari		3		3		3		3		3	0	100,00%		
		Dokumen studi Evaluasi Pelaksanaan PAS		3		3		3		3		3	0	100,00%		
		Masterplan OB Watu Goyang, Cempluk, Mangunan		3		3		3		3		3	0	100,00%		
		Masterplan OB Lemah Rubuh Kedungmiri Selopamiro		3		3		3		3		3	0	100,00%		
		Workshop PEL		2		2		2		2		2	0	100,00%		
		Masterplan Watu Mabur Mangunan		3		3		2		3		3	0	100,00%		
	Peningkatan pengelolaan irigasi (WISMP)				264.000.000		229.000.000		200.402.000		223.172.000	0	223.172.000		97,46%	BAPPEDA
		Dokumen Hasil Kajian Pengembangan Irigasi Partisipatif		3		3		3		3		3	0	100,00%		
		Pelatihan dan Penyusunan PSETK		10		10		8		10		10	0	100,00%		
	Program perencanaan sosial dan budaya				1.132.739.500		1.132.739.500		593.925.100		1.064.416.550	0	1.064.416.550		93,97%	BAPPEDA
	Perencanaan pembangunan pemerintahan				359.550.000		359.550.000		178.174.750		318.755.000	0	318.755.000		88,65%	BAPPEDA
		Dokumen RAD PPK		1		1		1		1		1	0	100,00%		BAPPEDA
		Dokumen Indonesia Governance Index (IGI)		1		1		0		1		1	0	100,00%		BAPPEDA
		Grand Design Pembangunan Kependudukan		1		1		1		1		1	0	100,00%		BAPPEDA
		Laporan kegiatan bidang perencanaan pembangunan pemerintahan		1		1		0		1		1	0	100,00%		BAPPEDA
	Perencanaan pembangunan pemberdayaan masyarakat				498.220.000		498.220.000		264.314.850		493.836.550	0	493.836.550		99,12%	BAPPEDA
		jumlah laporan kajian pengembangan kelembagaan PAS dan KLA/gender		1		1		1		1		1	0	100,00%		BAPPEDA
		jumlah laporan strategi penanggulangan kemiskinan daerah (SPKD)		1		1		1		1		1	0	100,00%		BAPPEDA
		jumlah laporan pembangunan pemberdayaan masyarakat		1		1		0		1		1	0	100,00%		BAPPEDA
		Jumlah laporan program penanggulangan kemiskinan daerah		1		1		0		1		1	0	100,00%		BAPPEDA
	Perencanaan pembangunan kesejahteraan rakyat				274.969.500		274.969.500		151.435.500		251.825.000	0	251.825.000		91,58%	BAPPEDA

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								III		IV						
1	4	5		8		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Tersusunnya Laporan Pencapaian TPB/SDG's		1		1		1		1		1	0	100,00%		BAPPEDA
		Tersusunnya RAD Germas		1		1		1		1		1	0	100,00%		BAPPEDA
		Tersusunnya Dokumen Laporan Kabupaten Sehat		1		1		1		1		1	0	100,00%		BAPPEDA
		Tersusunnya Dokumen Laporan Subbid Kesra		1		1		0		1		1	0	100,00%		BAPPEDA
		Tersusunnya Dokumen Evaluasi RAD Pangan Gizi		1		1		0		1		1	0	100,00%		BAPPEDA
		Tersusunnya RAD Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDG's		1		1		1		1		1	0	100,00%		BAPPEDA
	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam				767.400.000		1.267.400.000		431.183.000		1.249.526.500	0	1.249.526.500		98,59%	BAPPEDA
	Perencanaan pembangunan tata ruang dan pengembangan wilayah				767.400.000		1.267.400.000		431.183.000		1.249.526.500	0	1.249.526.500		98,59%	BAPPEDA
		Penyusunan data dasar perencanaan ekonomi & sarpras		3		3		3		3		3	0	100,00%		BAPPEDA
		Penyusunan masterplan pengembangan Kawasan Sunan Geseng Piyungan		3		3		3		3		3	0	100,00%		BAPPEDA
		Penyusunan masterplan peremplan Jalan Parangtritis (ringroad)		3		3		3		3		3	0	100,00%		BAPPEDA
		Studi penyusunan pendataan kawasan kumuh di KPY		3		3		3		3		3	0	100,00%		BAPPEDA
		Perumusan Kebijakan Insentif Disinsentif LPPB		3		3		3		3		3	0	100,00%		BAPPEDA
		Studi kebutuhan sanitasi & air limbah di wilayah APY		3		3		3		3		3	0	100,00%		BAPPEDA
		Penyusunan masterplan penataan pedestrian desa wisata kasongan		3		3		3		3		3	0	100,00%		BAPPEDA
		Penyusunan masterplan pengembangan pariwisata pantai selatan		3		3		2		3		3	0	100,00%		BAPPEDA
		Monev kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW		3		3		1		3		3	0	100,00%		BAPPEDA
		Penyusunan Masterplan Kawasan Kali Opak Singosaren, Wukirsari Imogiri				3				3		3	0	100,00%		BAPPEDA
		Penyusunan Masterplan Kawasan Sesar Opak Bukit Mengger Trimulyo, Kecamatan Jets				3				3		3	0	100,00%		BAPPEDA
		Penyusunan Masterplan Kawasan Taman Glugut Wonokromo Pleret				3				3		3	0	100,00%		BAPPEDA
		Penyusunan Masterplan Kawasan Islamic Center Kab. Bantul				3				3		3	0	100,00%		BAPPEDA
		Penyusunan Masterplan Kawasan Desa Wisata Bukit Bucu Srimartani, Piyungan				3				3		3	0	100,00%		BAPPEDA
		Penyusunan Masterplan Kawasan Bantaran Kali Gawe Srimartani, Piyungan				3				3		3	0	100,00%		BAPPEDA

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								III		IV						
1	4	5		8		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyusunan Masterplan Kawasan Gunung Wangi Srimulyo Piyungan				3				3		3	0	100,00%		BAPPEDA
	Program Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah				193.120.000		211.170.000		87.315.500		179.164.500	0	179.164.500		84,84%	BAPPEDA
	Pengendalian, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah				167.455.000		185.505.000		75.865.500		162.429.500	0	162.429.500		87,56%	BAPPEDA
		Laporan Pelaksanaan DAK		5		5		3		5		5	0	100,00%		BAPPEDA
		Monev Program/ Kegiatan		1		1		1		1		1	0	100,00%		BAPPEDA
		Dokumen Evaluasi Hasil RKPD		2		2		1		2		2	0	100,00%		BAPPEDA
		Dokumen Evaluasi Hasil RPJMD		1		1		1		1		1	0	100,00%		BAPPEDA
		Bimtek ROPK		1		1		1		1		1	0	100,00%		BAPPEDA
		Rakor Pengendalian		1		1		1		1		1	0	100,00%		BAPPEDA
		bimtek SEPAKAT				1				1						
	Pengendalian Kebijakan Penyusunan dan Pelaksanaan RKPD				25.665.000		25.665.000		11.450.000		16.735.000	0	16.735.000		65,21%	BAPPEDA
		Dokumen pengendalian pelaksanaan RKPD 2019		1		1		0		1		1	0	100,00%		BAPPEDA
		Dokumen pengendalian kebijakan penyusunan RKPD 2019		1		1		1		1		1	0	100,00%		BAPPEDA
	Program Penguatan Sistem Inovasi Daerah				212.900.000		192.900.000		117.055.000		187.000.000	0	187.000.000		96,94%	BAPPEDA
	Pengembangan sistem inovasi daerah				212.900.000		192.900.000		117.055.000		187.000.000	0	187.000.000		96,94%	BAPPEDA
		Partisipasi Lomba IPTEK		1		1		0		1		1	0	100,00%		BAPPEDA
		Penerbitan Jurnal Riset Daerah (JRD)		4		4		3		4		4	0	100,00%		BAPPEDA
		Penghargaan JRD		5		5		0		5		5	0	100,00%		BAPPEDA
		Implementasi Roadmap Sistem Inovasi Daerah		2		2		1		2		2	0	100,00%		BAPPEDA
	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah			100	20.988.685.000	100	20.919.230.000		9.894.289.772	94	15.629.688.559	94	15.629.688.559	94,00%	74,71%	SETWAN
	Pembahasan rancangan peraturan daerah			100	4.462.259.000	100	4.462.259.000		1.716.528.788	95	3.225.864.669	95	3.225.864.669	95,00%	72,29%	SETWAN
	Belanja Dekorasi	Jumlah Dekorasi	kali	16	7.200.000	16	7.200.000	2	700.000	2	1.100.000	2	1.100.000	12,50%	15,28%	SETWAN
	Belanja Makan dan minum rapat	Jumlah Makan dan minum rapat	om	5346	137.555.000	5346	137.555.000	2052	37.650.000	3832	69.675.000	3832	69.675.000	71,68%	50,65%	SETWAN
	Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah	Jumlah Perjalanan Dinas dalam daerah	oj	408	63.800.000	408	63.800.000	20	1.900.000	20	3.200.000	20	3.200.000	4,90%	5,02%	SETWAN
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	oj	474	4.174.504.000	474	4.174.504.000	280	1.671.318.788	474	3.145.469.669	474	3.145.469.669	100,00%	75,35%	SETWAN
	Honor Narasumber/ Moderator/ Tenaga Ahli	Jumlah Narasumber/ Moderator/ Tenaga Ahli	jpl	80	31.200.000	80	31.200.000	7	1.450.000	12	2.250.000	12	2.250.000	15,00%	7,21%	SETWAN

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				III		IV										
1	4	5		8		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Honor Peserta Seminar/simposium	Jumlah Peserta Seminar/simposium	ok	1600	48.000.000	1600	48.000.000	117	3.510.000	182	4.170.000	182	4.170.000	11,38%	8,69%	SETWAN
												0	0			SETWAN
	Rapat-rapat paripurna			100	53.920.000	100	53.200.000		29.277.500	90	29.277.500	90	29.277.500	90,00%	55,03%	SETWAN
	Uang Lembur	Jumlah Lembur	ok	18	270.000	0	-	0	-	0	-	0	0			SETWAN
	Belanja Dekorasi	Jumlah Dekorasi	kali	4	4.000.000	4	4.000.000	3	2.400.000	3	2.400.000	3	2.400.000	75,00%	60,00%	SETWAN
	Belanja Makan dan minum rapat	Jumlah Makan dan minum rapat	om	260	9.100.000	260	9.100.000	95	2.362.500	95	2.362.500	95	2.362.500	36,54%	25,96%	SETWAN
	Belanja Makan dan minum tamu	Jumlah Makan dan minum tamu	om	800	36.000.000	800	36.000.000	555	24.265.000	555	24.265.000	555	24.265.000	69,38%	67,40%	SETWAN
	Belanja Makan dan minum lembur	Jumlah Makan dan minum lembur	om	18	450.000	0	-	0	-	0	-	0	0			SETWAN
	Jasa Narasumber/Moderabr/ Tenaga Ahli	Jumlah Narasumber/ Moderator/ Tenaga Ahli	jpl	14	4.100.000	14	4.100.000	1	250.000	1	250.000	1	250.000	7,14%	6,10%	SETWAN
												0	0			SETWAN
	Reses			100	858.150.000	100	844.550.000		494.354.380	100	746.543.620	100	746.543.620	100,00%	88,40%	SETWAN
	Belanja Lembur PNS	Jumlah Lembur PNS	ok	180	1.350.000	0	-	0	-	0	-	0	0			SETWAN
	Belanja ATK	Jumlah Paket ATK	paket	135	13.500.000	135	3.500.000	135	1.756.500	135	3.385.300	135	3.385.300	100,00%	96,72%	SETWAN
	Belanja Dekorasi	Jumlah Dekorasi	kali	135	48.600.000	135	48.600.000	90	32.284.500	135	48.064.500	135	48.064.500	100,00%	98,90%	SETWAN
	Belanja Sewa Ruang rapat/pertemuan	Jumlah Sewa Ruang rapat/pertemuan	ok	135	67.500.000	135	67.500.000	59	28.000.000	135	43.000.000	135	43.000.000	100,00%	63,70%	SETWAN
	Belanja Sewa Meja Kursi	Jumlah Sewa Meja Kursi	ok	14850	35.100.000	14850	35.100.000	8500	21.550.000	13500	32.350.000	13500	32.350.000	90,91%	92,17%	SETWAN
	Belanja Sewa Sound System	Jumlah Sewa Sound System	ok	135	40.500.000	135	40.500.000	90	26.700.000	135	40.200.000	135	40.200.000	100,00%	99,26%	SETWAN
	Belanja Makan dan Minum Rapat	Jumlah Makan dan Minum Rapat	om	180	3.150.000	180	3.150.000	118	1.872.500	180	1.872.500	180	1.872.500	100,00%	59,44%	SETWAN
	Belanja Makan dan Minum Tamu	Jumlah Makan dan Minum Tamu	om	13500	615.450.000	13500	615.450.000	9900	359.940.880	13500	547.921.320	13500	547.921.320	100,00%	89,03%	SETWAN
	Belanja Makan dan minum lembur	Jumlah Makan dan minum lembur	ok	180	2.250.000	0	-	0	-	0	-	0	0			SETWAN
	Belanja Perjalanan dinas dalam daerah	Jumlah Perjalanan dinas dalam daerah	oj	315	30.750.000	630	30.750.000	182	22.250.000	630	29.750.000	630	29.750.000	100,00%	96,75%	SETWAN
												0	0			SETWAN
	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD			100	3.625.203.000	100	3.772.483.000		1.932.085.757	90	2.992.067.940	90	2.992.067.940	90,00%	79,31%	SETWAN
	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	oj	600	93.125.000	600	46.875.000	70	22.540.000	99	44.240.000	99	44.240.000	16,50%	94,38%	SETWAN
	Belanja perjalanan dinas luar daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	oj	490	3.122.078.000	490	3.118.108.000	64	1.594.545.757	431	2.367.327.940	431	2.367.327.940	87,96%	75,92%	SETWAN
	Belanja Kursus singkat/pelatihan	Jumlah Kursus singkat/pelatihan	org	90	410.000.000	90	607.500.000	391	315.000.000	86	580.500.000	86	580.500.000	95,56%	95,56%	SETWAN
												0	0			SETWAN
	Pembahasan kebijakan dan kegiatan alat kelengkapan DPRD			100	6.860.149.000	100	6.732.679.000		3.168.614.507	90	4.992.047.757	90	4.992.047.757	90,00%	74,15%	SETWAN

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								III		IV						
1	4	5		8		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Uang Lembur	Jumlah Lembur	ok	288	4.320.000	0	-	0	-	0	-	0	0			SETWAN
	Belanja Dekorasi	Jumlah Dekorasi	kali	4	2.000.000	4	2.000.000	0	-	0	-	0	0	0,00%	0,00%	SETWAN
	Belanja Makan dan minum rapat	Jumlah Makan dan minum rapat	om	20974	363.350.000	20974	363.350.000	9832	177.203.250	19347	341.555.750	19347	341.555.750	92,24%	94,00%	SETWAN
	Belanja Makan dan minum lembur	Jumlah Makan dan minum lembur	om	288	7.200.000	0	-	0	-	0	-	0	0			SETWAN
	Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah	Jumlah Perjalanan Dinas dalam daerah	oj	1378	196.000.000	1378	80.050.000	41	5.550.000	53	9.225.000	53	9.225.000	3,85%	11,52%	SETWAN
	Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah	Jumlah Perjalanan Dinas dalam daerah	oj	711	6.287.279.000	711	6.287.279.000	359	2.985.861.257	587	4.641.267.007	587	4.641.267.007	82,56%	73,82%	SETWAN
												0	0			SETWAN
	Pengadaan pakaian dinas anggota DPRD beserta perlengkapannya			100	283.500.000	100	275.425.000		51.540.000	98	241.142.500	98	241.142.500	98,00%	87,55%	SETWAN
	Belanja Pembelian Bendera, Papan nama	Jumlah Pembelian Bendera, Papan nama	ok	0	1.750.000	0	-	0	-	0	-	0	0			SETWAN
	Belanja Analisa Laborabrium	Jumlah Analisa Laborabrium	kali	45	15.000.000	2	5.500.000	45	2.040.000	1	2.040.000	1	2.040.000	50,00%	37,09%	SETWAN
	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	Jumlah Pakaian Sipil Harian (PSH)	stel	0	79.200.000	90	79.200.000	0	-	90	70.290.000	90	70.290.000	100,00%	88,75%	SETWAN
	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	Jumlah Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	stel	0	49.500.000	45	49.500.000	0	-	45	48.262.500	45	48.262.500	100,00%	97,50%	SETWAN
	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	Jumlah Pakaian Dinas Harian (PDH)	stel	0	39.600.000	45	39.600.000	0	-	45	30.937.500	45	30.937.500	100,00%	78,13%	SETWAN
	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	Jumah Pakaian Sipil Resmi (PSR)	stel	0	44.550.000	45	44.550.000	0	-	45	38.362.500	45	38.362.500	100,00%	86,11%	SETWAN
	Belanja Pakaian Dinas PAW	Jumlah Pakaian Dinas PAW	stel	0	4.400.000	4	4.400.000	0	-	0	-	0	0	0,00%	0,00%	SETWAN
	Belanja Pakaian Adat Daerah	Jumlah Pakaian Adat Daerah	stel	0	49.500.000	45	49.500.000	0	49.500.000	45	49.500.000	45	49.500.000	100,00%	100,00%	SETWAN
	Honor tim pengadaan	Jumlah kegiatan	keg			2	3.175.000			2	1.750.000	2	1.750.000	100,00%	55,12%	SETWAN
												0	0			SETWAN
	Pengembangan Informasi Pembangunan Daerah			100	730.210.000	100	653.870.000		164.400.000	98	641.785.000	98	641.785.000	98,00%	98,15%	SETWAN
	Belanja Publikasi	Jumlah Publikasi	keg	45	674.000.000	45	595.260.000	20	122.950.000	45	592.810.000	45	592.810.000	100,00%	99,59%	SETWAN
	Belanja Pakaian Kerja Pelayanan	Jumlah Pakaian Kerja Pelayanan	stel	55	16.250.000	65	16.250.000	65	16.250.000	65	16.250.000	65	16.250.000	100,00%	100,00%	SETWAN
	Belanja Pakaian Dinas Protokol	Jumlah Pakaian Dinas Protokol	stel	50	20.900.000	19	19.800.000	19	19.800.000	19	19.800.000	19	19.800.000	100,00%	100,00%	SETWAN
	Honor Narasumber, Moderator, Tenaga Ahli	Jumlah Narasumber, Moderator, Tenaga Ahli	org	132	12.100.000	55	12.100.000	15	1.500.000	15	5.525.000	15	5.525.000	27,27%	45,66%	SETWAN
	Honor Peserta Seminar/Simposium	JumlahPeserta Seminar/Simposium	org	65	3.000.000	50	3.000.000	0	-	0	-	0	0	0,00%	0,00%	SETWAN
	Belanja Jasa Transportasi	Jumlah Jasa Transportasi	org	132	3.960.000	132	3.960.000	132	3.900.000	132	3.900.000	132	3.900.000	100,00%	98,48%	SETWAN
	Panitia pengadaan	Jumlah kegiatan	keg			12	3.500.000			12	3.500.000	12	3.500.000	100,00%	100,00%	SETWAN
								0				0	0			SETWAN
	Kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan			100	4.042.544.000	100	3.952.544.000	0	2.316.702.840	90	2.606.393.573	90	2.606.393.573	90,00%	65,94%	SETWAN
	Belanja Dekorasi	Jumlah Dekorasi	kali	17	7.650.000	17	5.400.000	4	650.000	4	1.450.000	4	1.450.000	23,53%	26,85%	SETWAN

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								III		IV						
1	4	5		8		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Belanja Makan dan minum rapat	Jumlah Makan dan minum rapat	om	5745	132.850.000	5745	132.850.000	3485	37.665.000	4085	65.890.000	4085	65.890.000	71,11%	49,60%	SETWAN
	Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah	Jumlah Perjalanan Dinas dalam daerah	oj	494	88.400.000	494	23.900.000	9	1.250.000	9	1.250.000	9	1.250.000	1,82%	5,23%	SETWAN
	Belanja Perjalanan Dinas luar daerah	Jumlah Perjalanan Dinas luar daerah	oj	475	3.722.594.000	475	3.722.594.000	375	2.273.547.840	375	2.526.673.573	375	2.526.673.573	78,95%	67,87%	SETWAN
	Belanja Honor tenaga ahli/narasumber	Jumlah tenaga ahli/narasumber	ok	120	54.000.000	120	37.800.000	10	2.600.000	10	4.950.000	10	4.950.000	8,33%	13,10%	SETWAN
	Honor peserta seminar	Jumlah peserta seminar	ok	1235	37.050.000	1235	30.000.000	190	990.000	190	6.180.000	190	6.180.000	15,38%	20,60%	SETWAN
												0	0			SETWAN
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			100	72.750.000	100	198.620.000	0	20.786.000	95	154.566.000	95	154.566.000	95,00%	77,82%	SETWAN
	Belanja ATK	Jumlah ATK	paket	4	4.000.000	14	14.000.000	3	1.926.000	13	12.926.000	13	12.926.000	92,86%	92,33%	SETWAN
	Belanja Dekorasi	Jumlah Dekorasi	kali	4	1.800.000	14	5.400.000	3	800.000	13	4.940.000	13	4.940.000	92,86%	91,48%	SETWAN
	Belanja Makan dan minum rapat	Jumlah Makan dan minum rapat	om	1000	17.500.000	3400	59.500.000	60	7.000.000	2400	49.350.000	2400	49.350.000	70,59%	82,94%	SETWAN
	Belanja Perjalanan dinas dalam daerah	Jumlah Perjalanan dinas dalam daerah	oj	87	14.700.000	140	10.250.000	0	-	49	2.500.000	49	2.500.000	35,00%	24,39%	SETWAN
	Jasa Narasumber/tenaga ahli	Jumlah Narasumber/tenaga ahli	oj	45	16.750.000	85	24.750.000	45	4.400.000	59	24.100.000	59	24.100.000	69,41%	97,37%	SETWAN
	Honor peserta seminar	Jumlahpeserta seminar	ok	600	18.000.000	1700	73.000.000	56	6.660.000	1091	60.750.000	1091	60.750.000	64,18%	83,22%	SETWAN
	Belanja penggandaan	Jumlah penggandaan	lbr			3000	600.000			0	-	0	0	0,00%	0,00%	SETWAN
	Sewa ruang rapat	Jumlah sewa ruang rapat	keg			10	5.000.000			0	-	0	0	0,00%	0,00%	SETWAN
	Sewa meja kursi	Jumlah sewa meja kursi	bh			1320	3.120.000			0	-	0	0	0,00%	0,00%	SETWAN
	Sewa sound system	Jumlah sewa sound system	unit			10	3.000.000			0	-	0	0	0,00%	0,00%	SETWAN
	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Opini Pemeriksaan BPK	Angka	1	6.767.989.885	1	7.764.499.738		3.439.432.691		6.938.678.141	0	6.938.678.141	0,00%	89,36%	BKAD
		Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	23								0	0			BKAD
		Persentase PAD terhadap Belanja Daerah	%	18								0	0			BKAD
		Percepatan penyerapan belanja Pemerintah	%	65								0	0			BKAD
		Ketepatan waktu penyusunan RAPBD/RPABD Kabupaten Bantul	1 = Tepat Waktu, 2 = Tidak Tepat Waktu	1								0	0			BKAD
		Perumusan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD	Perbup	2								0	0			BKAD
		Berkurangnya jumlah permohonan revisi DPA dan melebihi standar	%	5								0	0			BKAD

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								III		IV						
1	4	5		8		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Ketepatan waktu Laporan Pertanggungjawaban tentang Pelaksanaan APBD ditetapkan	1 = Tepat Waktu 2 = Tidak Tepat Waktu	1								0	0			BKAD
		Persentase penerapan akrual basis oleh SKPD dengan benar	%	80								0	0			BKAD
		Akurasi data BMD Kab. Bantul Tahun n-1	%	80								0	0			BKAD
		Pertumbuhan pendapatan pajak dan retribusi daerah	%	10								0	0			BKAD
		Tercapainya pendapatan asli daerah	%	100								0	0			BKAD
		Cakupan pencapaian penyerapan belanja SKPD sesuai target	%	30								0	0			BKAD
	Penyusunan analisa standar belanja	Modul Analisa Standar Belanja (ASB)	Modul	1	48.500.000	0	-	0	-		-	0	0			BKAD
	Penyusunan standar satuan harga	Peraturan Bupati tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Kabupaten Bantul	Perbup	1	86.250.000	3	136.250.000	0	884.500	3	121.614.500	3	121.614.500	100,00%	89,26%	BKAD
	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	APBD yang disusun pada satu tahun	APBD	1	112.660.000	1	112.660.000	0	875.000	1	106.285.000	1	106.285.000	100,00%	94,34%	BKAD
	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	APBD yang disusun pada satu tahun	APBD	1	97.925.000	1	97.925.000	0	180.000	1	90.730.000	1	90.730.000	100,00%	92,65%	BKAD
	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	APBD yang disusun pada satu tahun	APBD	1	54.035.000	1	54.035.000	0	3.000.000	1	46.930.000	1	46.930.000	100,00%	86,85%	BKAD
	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	APBD yang disusun pada satu tahun	APBD	1	51.625.000	1	51.625.000	0	830.000	1	43.915.000	1	43.915.000	100,00%	85,07%	BKAD
	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (dokumen)	Raperda	1	118.350.000	1	124.350.000	1	97.325.500	1	113.275.500	1	113.275.500	100,00%	91,09%	BKAD
	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (dokumen)	Raperbup	1	55.800.000	1	55.800.000	1	55.650.000	1	55.650.000	1	55.650.000	100,00%	99,73%	BKAD
	Peningkatan manajemen investasi daerah	Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bantul dan Bank Umum sebagai tempat Penempatan Uang Daerah	dokumen	11	11.210.000	11	11.210.000	11	5.450.000	11	11.175.000	11	11.175.000	100,00%	99,69%	BKAD
	Pencermatan dan penerbitan DPA SKPD	DPA/DPPA SKPD yang diterbitkan dalam 1 tahun	Dokumen	114	11.200.000	114	11.200.000	114	530.000	114	530.000	114	530.000	100,00%	4,73%	BKAD
	Penyusunan anggaran kas	Anggaran kas Kabupaten Bantul	kali	2	2.040.000	2	2.040.000	1	-	2	-	2	0	100,00%	0,00%	BKAD
	Penerbitan SPD	SPD yang diterbitkan dalam satu tahun	SPD	570	1.320.000	570	1.320.000	441	-	497	-	497	0	87,19%	0,00%	BKAD

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								III		IV						
1	4	5		8		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penerbitan SP2D	SP2D yang diterbitkan dalam 1 (satu) tahun	SP2D	8956	15.470.000	12000	15.470.000	4422	5.725.000	12000	15.145.000	12000	15.145.000	100,00%	97,90%	BKAD
		Surat Keputusan Bupati Bantul tentang penunjukan PA, KPA, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerima pada PD di lingkungan Pemerintah Daerah	SK	1		1		0		1		1	0	100,00%		BKAD
		Surat Keputusan Bupati Bantul tentang besaran Uang Persediaan PD	SK	1		1		1		1		1	0	100,00%		BKAD
		Evaluasi Penyerapan belanja daerah	laporan	4		4		3		4		4	0	100,00%		BKAD
		Berita acara hasil rekonsiliasi belanja PD dengan data belanja BKAD	Berita Acara	216		216		162		216		216	0	100,00%		BKAD
		Laporan DTH dan RTH	laporan	12		12		9		12		12	0	100,00%		BKAD
	TPTGR	Laporan Tim Majelis Kerugian Daerah	dokumen	2	17.875.000	2	14.375.000	2	3.400.000	2	14.375.000	2	14.375.000	100,00%	100,00%	BKAD
		Rekonsiliasi penerimaan TGR	kali	4		4		4		4		4	0	100,00%		BKAD
	Penyusunan neraca dinas / instansi	Neraca bulanan PD	Neraca	673	42.400.000	673	32.400.000	505	2.915.000	673	11.108.500	673	11.108.500	100,00%	34,29%	BKAD
	Penyusunan SPT Tahunan	SPT masa tahun 2017	laporan	1	52.240.000	1	49.310.000	1	48.610.000	1	48.610.000	1	48.610.000	100,00%	98,58%	BKAD
		Form 1721 A2	Lembar	8469		9022		9022		9022		9022	0	100,00%		BKAD
	Penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD	Perat. Bupati tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Bantul	Perbup	1	6.250.000	1	6.250.000	0	-	1	440.000	1	440.000	100,00%	7,04%	BKAD
	Operasional pajak daerah	Penelitian lapangan BPHTB	OP	3000	774.875.000	3000	667.488.600	1866	511.382.500	3000	638.487.500	3000	638.487.500	100,00%	95,66%	BKAD
		Pemantuan pajak	OK	2700		2700		2025		2250		2250	0	83,33%		BKAD
		Sosialisasi validasi sehari	kali	5		6		5		6		6	0	100,00%		BKAD
		Jasa konsultasi pengembangan SISMOP	aplikasi	1		1		1		1		1	0	100,00%		BKAD
		Komputer dan printer	unit	7		7		7		7		7	0	100,00%		BKAD
		Apliasi SIM Mobile apps	aplikasi	1		1		1		1		1	0	100,00%		BKAD
		Seragam petugas validasi sehari	op	18		18		18		18		18	0	100,00%		BKAD
		Sosialisasi pajak daerah siaran radio	kali	1		1		1		1		1	0	100,00%		BKAD
		Spanduk/leaflet pajak daerah	lembar	17		17		17		17		17	0	100,00%		BKAD
	Penyusunan laporan semesteran	Laporan semester I dan prognosis semester II	laporan	1	4.500.000	1	4.500.000	1	2.450.000	1	2.450.000	1	2.450.000	100,00%	54,44%	BKAD
	Intensifikasi PPh OP (PPH Pasal 21)	Pelaksanaan intensifikasi PPh OP	kali	5	51.295.200	5	51.295.200	4	48.525.000	5	48.525.000	5	48.525.000	100,00%	94,60%	BKAD
	Pengendalian pelaksanaan pengelbaan keuangan daerah	Surat jin revisi DPA dan melebihi standar yang diterbitkan dalam satu tahun	surat	160	7.756.000	160	7.756.000	96	3.994.000	112	5.897.500	112	5.897.500	70,00%	76,04%	BKAD

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								III		IV						
1	4	5		8		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengendalian PAD	Pelatihan petugas pemungut pajak daerah dan koordinasi pemungutan target	kali	3	34.900.000	2	34.900.000	0	1.900.000	2	16.925.000	2	16.925.000	100,00%	48,50%	BKAD
	Optimalisasi pendapatan daerah	Laporan hasil pencocokan data PAD dengan PD penghasil dan Pencapaian target PAD dalam satu tahun	laporan	12	12.701.700	12	12.701.700	7	1.825.000	12	12.329.700	12	12.329.700	100,00%	97,07%	BKAD
	Pelayanan pajak daerah	Jumlah pemeliharaan aplikasi	kali	1	316.875.000	1	327.859.000	1	176.829.000	1	306.749.000	1	306.749.000	100,00%	93,56%	BKAD
		Jumlah sosialisasi pajak daerah	kali	7		7		7		7		7	0	100,00%		BKAD
		Jumlah aplikasi BPHTB online	kali	1		1		1		1		1	0	100,00%		BKAD
		Jumlah cetak blanko	kali	25		25		18		25		25	0	100,00%		BKAD
		Jumlah rapat koordinasi pelayanan pajak	kali	30		30		9		10		10	0	33,33%		BKAD
	Verifikasi Piutang Pajak Daerah	Rekon data piutang pajak daerah dengan desa dan dukuh	Kecamatan	3	22.355.000	3	22.355.000	0	1.200.000	3	1.200.000	3	1.200.000	100,00%	5,37%	BKAD
	Pendataan dan penetapan wajib pajak	Wajib pajak baru selain PBB P2 dan BPHTB dalam satu tahun	WP	80	23.987.500	80	23.987.500	120	4.300.000	270	10.154.500	270	10.154.500	337,50%	42,33%	BKAD
	Intensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	Stimulan PBB untuk dukuh, lurah	kali	1	2.117.846.600	1	3.056.233.000	0	380.970.050	1	2.625.596.550	1	2.625.596.550	100,00%	85,91%	BKAD
		Publikasi pajak daerah	kali	1		1		0		1		1	0	100,00%		BKAD
		Gathering bersama wajib pajak	kali	1		1		0		1		1	0	100,00%		BKAD
		Penggandaan		50000								0	0			BKAD
		Jasa konsultasi aplikasi PAD	kali	1		1		1		1		1	0	100,00%		BKAD
		Pameran Bantul Expo	kali	1		1		1		1		1	0	100,00%		BKAD
		Penghargaan wajib pajak	kali	1		1		1		1		1	0	100,00%		BKAD
		Tenda mobil operasional pajak daerah	unit	2		2		2		2		2	0	100,00%		BKAD
		Jasa konsultasi sms broadcast PBB	kali	1		1		1		1		1	0	100,00%		BKAD
		Cetak leaflet pajak daerah, tagihan pajak daerah, undangan gathering	kali	1		1		1		1		1	0	100,00%		BKAD
		Pengadaan kelengkapan mobil pajak	unit			21				21						
		Studi potensi pajak daerah	dokumen			1				0						
		Publikasi media cetak dan elektronik	macam			9				9						
		Sosialisasi LAPak Bantul	Kecamatan			10				10						
	Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan	Sosialisasi PBB P2	kali	17	1.723.541.000	17	1.777.616.000	17	1.589.003.600	17	1.713.314.850	17	1.713.314.850	100,00%	96,38%	BKAD
		Penyerahan simbolis SPPT PBB	kali	1		1		1		1		1	0	100,00%		BKAD
		Monitoring penyampaian SPPT PBB	kali	20		20		20		20		20	0	100,00%		BKAD

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								III		IV						
1	4	5		8		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Jumlah SPPT yang tersampaikan kepada wajib pajak	Lembar	650000		650000		7E+05		650000		650000	0	100,00%		BKAD
		Jumlah publikasi pajak daerah melalui videotron dan balihoo	kali	2		2		0		0		0	0	0,00%		BKAD
	Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	Pelaksanaan sosialisasi di bidang cukai	kali	6	310.459.885	6	309.590.738	6	282.288.150	6	282.288.150	6	282.288.150	100,00%	91,18%	BKAD
	Penyempurnaan/Penyesuaian Kebijakan Akuntansi	Rancangan peraturan bupati tentang standar akuntansi pemerintah	Raperbup	1	12.275.000	1	12.275.000	1	-	1	485.000	1	485.000	100,00%	3,95%	BKAD
	Regulasi Peraturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Rancangan peraturan bupati yang disusun dalam satu tahun	Raperbup	11	8.211.000	11	8.211.000	7	925.000	11	4.348.000	11	4.348.000	100,00%	52,95%	BKAD
	Pemeliharaan Basis Data PBB P2	Pendataan PBB P2	desa	3	330.225.000	3	302.625.000	5	140.917.500	5	276.460.500	5	276.460.500	166,67%	91,35%	BKAD
	Pengelolaan Belanja ASN	Tercetaknya daftar gaji bulanan (termasuk gaji bulan ke-13 dan THR)	Daftar Gaji	1708	5.090.000	1708	5.090.000	1342	5.065.000	1708	5.065.000	1708	5.065.000	100,00%	99,51%	BKAD
		Tersusunnya rencana anggaran belanja gaji dan tunjangan per PD	dokumen	3		3		2		3		3	0	100,00%		BKAD
		Rekonsiliasi belanja gaji dan tunjangan	BA	138		46		46		46		46	0	100,00%		BKAD
		Pemotongan dan penyetoran PFK	dokumen	144		144		108		144		144	0	100,00%		BKAD
		Pelaporan PPh pasal 21 (gaji dan tunjangan)	dokumen	12		12		9		12		12	0	100,00%		BKAD
		Rekonsiliasi jumlah PNS dengan PT Taspen (PESERO) untuk jumlah PNS, iuran wajib 8%, JKK dan JKM	Berita Acara	12		12		6		12		12	0	100,00%		BKAD
		Rekonsiliasi iuran wajib 2% dengan BPJS Kesehatan	Berita Acara	2		2		2		2		2	0	100,00%		BKAD
		SKPP	Dokumen			550				550						
	Rekonsiliasi data laporan	Berita acara rekonsiliasi	Berita Acara	12	140.091.000	12	120.526.000	9	6.034.091	12	75.484.591	12	75.484.591	100,00%	62,63%	BKAD
	Pengelolaan Dana Transfer dan Dana Desa	Laporan Konfirmasi Dana Transfer dan Laporan Konfirmasi Rekapitulasi Tahunan	laporan	5	17.100.000	5	7.100.000	4	5.093.800	5	6.803.800	5	6.803.800	100,00%	95,83%	BKAD
	Pembinaan pengelola keuangan SKPD	Pembinaan penatubshaan pengeblaan keuangan SKPD	kali	4	68.755.000	4	236.170.000	3	51.355.000	4	226.330.000	4	226.330.000	100,00%	95,83%	BKAD
		Launching TNT Retribusi	kali			1				1		1	0	100,00%		BKAD
		Sosialisasi TNT pengeluaran dan penerimaan daerah	kali			17				17		17	0	100,00%		BKAD
		Draft perbup TNT	Dokumen			6				6		6	0	100,00%		BKAD

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								III		IV						
1	4	5		8		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Program Pengelolaan Barang Daerah	Akurasi data BMD Kabupaten Bantul Tahun n-1	%	80	862.589.030		880.089.030		297.054.250		686.959.250	0	686.959.250		78,06%	BKAD
	Peningkatan SDM aparatur Pemda	Terlaksananya forum komunikasi pengurus barang	kali	2	42.732.690	2	60.232.690	2	13.997.000	2	35.719.000	2	35.719.000	100,00%	59,30%	BKAD
	Simbada	Unit kerja dan PD yang melakukan entry data BMD berdasarkan KIR/KIB dengan SIMDA BMD	unit kerja	430	247.845.000	430	247.845.000	430	68.183.750	430	185.803.750	430	185.803.750	100,00%	74,97%	BKAD
	Penyusunan perencanaan dan pelaporan pengelolaan barang	Dokumen perencanaan atas pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah	dokumen	6	27.215.000	6	27.215.000	2	7.021.000	11	12.817.000	11	12.817.000	183,33%	47,10%	BKAD
	Penataan aset	Surat Keputusan Bupati (SK) diterbitkan	SK Bupati	2	37.366.000	2	34.366.000	0	4.872.500	2	13.627.500	2	13.627.500	100,00%	39,65%	BKAD
	Penghapusan barang daerah	Penerbitan Surat Keputusan Bupati Bantul tentang Penjualan dan Hibah BMD yang sudah tidak efisien	SK	20	107.130.000	20	107.130.000	7	43.645.500	19	63.446.000	19	63.446.000	95,00%	59,22%	BKAD
	Verifikasi dan inventarisasi barang milik daerah	Laporan BMD dalam KIB	Laporan	6	165.950.000	6	165.950.000	6	149.895.500	6	160.950.500	6	160.950.500	100,00%	96,99%	BKAD
	Verifikasi hasil pengadaan barang milik daerah	Laporan hasil pengadaan BMD dan hibah dari pihak ke 3 dari seluruh PD tahun n-1	Laporan	1	7.780.000	1	-	1	-	1	-	1	0	100,00%		BKAD
	Evaluasi dan rekonsiliasi barang milik daerah	Berita Acara Rekonsiliasi dengan PD setiap triwulan	Berita Acara	240	10.000.000	240	10.000.000	110	7.279.000	220	8.779.000	220	8.779.000	91,67%	87,79%	BKAD
	Pengamanan dokumen pemilikan barang milik daerah	Dokumen kepemilikan BMD yang tersimpan	dokumen	1992	4.000.000	1992	4.000.000	650	965.000	1674	965.000	1674	965.000	84,04%	24,13%	BKAD
	Penyusunan regulasi pengelolaan BMD	Rancangan peraturan bupati tentang persediaan barang milik daerah	Raperbup	1	23.737.340	1	34.517.340	1	1.195.000	1	20.664.000	1	20.664.000	100,00%	59,87%	BKAD
	Penyusunan Buku Kerja dan Kalender	Buku kerja, buku agenda, kalender dan kalender meja	Jenis	4	188.833.000	4	188.833.000	0	-	4	184.187.500	4	184.187.500	100,00%	97,54%	BKAD

	Program Pengelolaan Kepegawaian Pindah/Purna Tugas PNS	Prosentase penempatan ASN dalam jabatan	86	86	582.468.200		764.068.200		237.088.200		633.299.650	0	633.299.650		82,89%	BKPP
	Pengelolaan Kepangkatan dan Pensiun PNS	Jumlah PNS yang memenuhi syarat kenaikan pangkat dan pensiun	1600	1600	44.310.700	1600	39.310.700	1314	17.268.500	2033	35.858.600	2033	35.858.600	127,06%	91,22%	BKPP
	Pengelolaan Mutasi Jabatan Fungsional	Jumlah PNS jabatan fungsional yang ditempatkan sesuai formasi	335	335	35.482.500	335	21.482.500	408	11.858.700	470	18.098.600	470	18.098.600	140,30%	84,25%	BKPP
	Pengelolaan Mutasi Jabatan Administrasi dan JPT	Jumlah PNS jabatan administrasi dan JPT yang ditempatkan sesuai formasi	1000	1000	502.675.000	645	703.275.000	546	207.961.000	655	579.342.450	655	579.342.450	101,56%	82,38%	BKPP
												0	0			

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								III		IV						
1	4	5		8		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Prosentase Pembangunan Pusat Data (warehouse), Prosentase Pengembangan Infrastruktur TIK, Prosentase Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi.		70%	14.068.633.200	72%	14.068.633.200				13.595.793.599	0	13.595.793.599	0,00%	96,64%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
						50										
	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	informasi Berkembangnya Komunikasi, Informasi dan Media massa		80%	5.145.833.800	0,9	5.145.833.800			0,92	4.745.779.610	0,92	4.745.779.610	1,84%		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	informasi Berkembangnya Komunikasi, Informasi dan Media massa		90%	5.406.975.000	0,9	5.406.975.000			0,99	5.371.773.270	0,99	5.371.773.270	110,00%	104,39%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Pengkajian dan pengembangan sistem informasi	informasi Berkembangnya Komunikasi, Informasi dan Media massa		90%	2.826.149.400	0,9	2.826.149.400			0,92	2.900.456.104	0,92	2.900.456.104	102,22%	53,64%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi	informasi Berkembangnya Komunikasi, Informasi dan Media massa		90%	193.200.000	0,8	193.200.000			0,93	181.260.000	0,93	181.260.000	103,33%	6,41%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Pengendalian Sistem Keamanan Informasi	informasi Berkembangnya Komunikasi, Informasi dan Media massa		90%	496.475.000	0,8	496.475.000			0,8	396.524.615	0,8	396.524.615	100,00%	205,24%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Prosentase Pemberdayaan KIM dan PPID		65	1.218.773.200	65	1.218.773.200				1.004.830.200	0	1.004.830.200	0,00%	82,45%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Peningkatan Penyelenggaraan Informasi Publik		1	143.450.000	1	143.450.000			1	99.481.200	1	99.481.200	100,00%	69,35%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Pemberdayaan KID dan PPID	Terlaksananya Kegiatan PPID		1	286.373.200	1	286.373.200			1	191.341.200	1	191.341.200	100,00%	66,82%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	terlaksananya Kegiatan Kelompok Informasi Masyarakat, Pertunjukan Rakyat di Kecamatan		1	788.950.000	1	788.950.000			1	714.007.800	1	714.007.800	100,00%	90,50%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
												0	0			
	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Prosentase SDM ang memiliki Pengetahuan dan Keterampilan Berbasis TI	%	0,7	78.062.500	0,475	78.062.500				74.430.000	0	74.430.000	0,00%	95,35%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Pelathan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	Pelathan Aparatur Pemerintah di bidang Teknologi dan Informasi	orang	238	78.062.500	238	78.062.500			238	74.430.000	238	74.430.000	100,00%	95,35%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
												0	0			
	Program kerjasama informasi dengan mas media	Prosentase Pelayanan Informasi Publik Melalui Media massa		75%	2.193.493.200	67	2.193.493.200			0,7	1.877.223.100	0,7	1.877.223.100	1,04%	85,58%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								III		IV						
1	4	5		8		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Penerbitan Buletin sajada, Peliputan Dinamika Pembangunan, Siaran pers, Dialog interaktif, siaran publikasi di televisi, Pembuatan video profil, advertorial, Sosialisasi cukai, Sosialisasi Perundang Undangan.	mass media	9	1.966.613.000	9	1.966.613.000			9	1.655.696.100	9	1.655.696.100	100,00%	84,19%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Pemeliharaan dan Penyebarluasan Informasi Melalui website dan SMS center, Radio dan Televisi	mass media	5	226.880.200	400	226.880.200			500	221.527.000	500	221.527.000	125,00%	97,64%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Program Penegakan Perda	Cakupan Pelanggaran Perda yang ditindak	100		242.085.000	100	345.085.000		179.225.000	100	334.225.000	100	334.225.000	100,00%	96,85%	SATPOL PP
	Operasi Penegakan Perda	Operasi Yustisi dan Non Yustisi	Kali	120	160.235.000	120	160.235.000	94	117.450.000	120	151.825.000	120	151.825.000	100,00%	94,75%	SATPOL PP
	Pengkajian Pengawasan dan Pengendalian	Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan miras dan narkoba	Ok	160	81.850.000	160	81.850.000	160	61.775.000	160	81.575.000	160	81.575.000	100,00%	99,66%	SATPOL PP
		Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi	Ok	120		120		120		120		120	0	100,00%		SATPOL PP
		Workshop pengembangan kapasitas PPNS dan tranitib	Ok	160		160		133		160		160	0	100,00%		SATPOL PP
		Pengkajian Perda	Ok	240		240		145		240		240	0	100,00%		SATPOL PP
												0	0			
	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Cakupan pelanggaran kantrantibmas yang ditindaklanjuti	100		486.380.000	100	436.380.000		191.190.000	100	433.680.000	100	433.680.000	100,00%	99,38%	SATPOL PP
	Operasi pengamanan dan Patroli Wilayah	Operasi Pengamanan dan patroli wilayah	Kali	924	486.380.000	924	436.380.000	778	191.190.000	924	433.680.000	924	433.680.000	100,00%	99,38%	SATPOL PP
												0	0			
	Program pendidikan politik masyarakat	Prosentase jumlah pemilih yang berpartisipasi			275.335.000		832.215.000	21	201.277.775			0	0		0,00%	KESBANGPOL
	Forkom Ormas, Orsos, dan LSM	Jumlah SKT dan workshop			68.050.000			8	50.950.000			0	0			KESBANGPOL
	Pendidikan politik di masyarakat	Terlaksananya pendidikan demokrasi bagi pemilih pemula			207.285.000			13	150.327.775			0	0			KESBANGPOL
												0	0			
												0	0			
	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase Jumlah PD yang SPIP Baik		0,2	2.580.354.900	0,2	2.371.744.900		486.184.800	0,2	1.982.439.750	0,2	1.982.439.750	100,00%	83,59%	INSPEKTORAT
		Persentase Jumlah Temuan Eksternal dan Internal yang ditindaklanjuti		0,905		0,905				0,905		0,905	0	100,00%		INSPEKTORAT

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								III		IV						
1	4	5		8		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Persentase Jumlah Kasus Pengaduan Yang ditindaklanjuti		1		1				1		1	0	100,00%		INSPEKTORAT
		Nilai PMPRB Online		62		62				62		62	0	100,00%		INSPEKTORAT
	Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala			100	1.282.434.000	100	981.534.000	75	240.583.250		779.148.450	0	779.148.450	0,00%	79,38%	INSPEKTORAT
		Jumlah Laporan Inventarisasi Tindak Lanjut		12		12				12		12	0	100,00%		INSPEKTORAT
		Jumlah Laporan Pengawasan Secara Berkala		104		104				104		104	0	100,00%		INSPEKTORAT
		Jumlah Laporan Penilaian Risiko		12		12				12		12	0	100,00%		INSPEKTORAT
	Penanganan kasus/pengaduan masyarakat dan pemeriksaan khusus			100	437.982.000	100	437.982.000	75	54.609.750	100	305.004.900	100	305.004.900	100,00%	69,64%	INSPEKTORAT
		Jumlah Laporan Pemeriksaan kasus dan khusus		98		98				98		98	0	100,00%		INSPEKTORAT
	Pelaksanaan Pendampingan SPIP di Kab. Bantul			100	83.980.000	100	83.980.000	70,75	17.550.000	100	62.750.000	100	62.750.000	100,00%	74,72%	INSPEKTORAT
		Jumlah Sosialisasi SPIP		4		4		2		4		4	0	100,00%		INSPEKTORAT
		Jumlah Laporan Salgas SPIP		2		2		0		2		2	0	100,00%		INSPEKTORAT
		Jumlah Laporan Pendampingan SPIP		8		8		8		8		8	0	100,00%		INSPEKTORAT
	Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMRB) Online			100	775.958.900	100	868.248.900	76,33	173.441.800	100	835.536.400	100	835.536.400	100,00%	96,23%	INSPEKTORAT
		Jumlah Laporan Forpi		12		12		3		12		12	0	100,00%		INSPEKTORAT
		Jumlah Laporan Pendampingan Penyelenggaraan Pembangunan Daerah		4		4		1		4		4	0	100,00%		INSPEKTORAT
		Jumlah Laporan Seminar Forpi		1		1		1		1		1	0	100,00%		INSPEKTORAT
		Jumlah Laporan Saber Pungli		4		4		3		4		4	0	100,00%		INSPEKTORAT
		Jumlah Laporan Sosialisasi Pencegahan KKN		29		29		27		29		29	0	100,00%		INSPEKTORAT
	Program Penegakan Perda dan Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)					4300	695.360.000	3400	116.999.950	4320	688.823.950	4320	688.823.950	100,47%	99,06%	DINAS SOSIAL P3A
	Penyuluhan pencegahan peredaran /penggunaan miras dan narkoba serta berkembangnya praktek prostitusi	Sosialisasi P4GN, Penyuluhan NAPZA, Diklat Forlanza		4300	144.785.000							0	0			DINAS SOSIAL P3A
						4300	695.360.000	3400	116.999.950	4320	688.823.950	4320	688.823.950	100,47%	99,06%	
	Program pemberdayaan masyarakat	Cakupan pelayanan TP-PKK dalam pemberdayaan masyarakat	Persen	0,6818	276.750.000	68%	276.750.000		180.101.000	68%	275.150.000	68%	275.150.000	100,00%	99,42%	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Jumlah sub kegiatan Pembinaan Organisasi perempuan	Kegiatan	39	276.750.000	39	276.750.000	32	180.101.000		275.150.000	0	275.150.000	0,00%	99,42%	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								III		IV						
1	4	5		8		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Program pemberdayaan masyarakat	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan				49.000.000		48.600.000		49.000.000	0	49.000.000		100,00%	Kecamatan Sedayu	
	Penyelenggaraan lomba desa	Jumlah kegiatan	kali			1	9.500.000	1	9.500.000	1	9.500.000	1	9.500.000	100,00%	100,00%	Kecamatan Sedayu
	Musrenbang tingkat kecamatan	Jumlah kegiatan	kali			1	11.850.000	1	11.850.000	1	11.850.000	1	11.850.000	100,00%	100,00%	Kecamatan Sedayu
	Bantul Ekspo dan karnaval	jumlah kegiatan	kali			1	9.600.000	1	9.600.000	1	9.600.000	1	9.600.000	100,00%	100,00%	Kecamatan Sedayu
	Pemberdayaan lembaga desa	Jumlah kegiatan	kali			4	18.050.000	8	17.650.000	4	18.050.000	4	18.050.000	100,00%	100,00%	Kecamatan Sedayu
	Program pemberdayaan masyarakat	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	persen	85	32.000.000	85	32.000.000		19.337.500	85	32.000.000	85	32.000.000	100,00%	100,00%	KEC KRETEK
	Pemberdayaan lembaga desa	jumlah koordinasi pembinaan kepada lembaga desa	kali	1	10.000.000	1	10.000.000	1	7.700.000	1	10.000.000	1	10.000.000	100,00%	100,00%	KEC KRETEK
	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	jumlah koordinasi PKK tk kecamatan	kali	12	12.000.000	12	12.000.000	9	5.637.500	12	12.000.000	12	12.000.000	100,00%	100,00%	KEC KRETEK
	Pemberdayaan petani pemakai air	jumlah koordinasi P3A di kecamatan	kali	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	100,00%	100,00%	KEC KRETEK
	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	jumlah penyelenggaraan workshop penyebarluasan informasi bencana alam	kali	1	4.000.000	1	4.000.000	1	-	1	4.000.000	1	4.000.000	100,00%	100,00%	KEC KRETEK
	Program pemberdayaan masyarakat	Cakupan pemberdayaan lembaga desa			36.325.000		36.325.000		14.850.000	0	35.750.000	0	35.750.000		98,42%	KEC PUNDONG
	Pemberdayaan lembaga desa	Jumlah rakor LRMD, PAUD, Posyandu, Karang Taruna		4	11.250.000	4	11.250.000	3	5.425.000	4	10.775.000	4	10.775.000	100,00%	95,78%	KEC PUNDONG
	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Jumlah PKK		4	9.000.000	4	9.000.000	3	1.750.000	4	9.000.000	4	9.000.000	100,00%	100,00%	KEC PUNDONG
	Pemberdayaan petani pemakai air	Jumlah penyuluhan petani		2	6.300.000	2	6.300.000	2	4.325.000	2	6.225.000	2	6.225.000	100,00%	98,81%	KEC PUNDONG
	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	Jumlah rakor Informasi potensi bencana, pelajar sadar wisata		4	9.775.000	4	9.775.000	2	3.350.000	4	9.750.000	4	9.750.000	100,00%	99,74%	KEC PUNDONG
	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Jumlah PD dan Desa dengan pengelolaan sistem administrasi kearsipan tertata baik			131.328.000	40	109.903.000		94.049.000		109.874.000	0	109.874.000	0,00%	99,97%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	Pengklasifikasian data	Jumlah pelaksanaan penilaian dan penyusutan arsip : 2 Kali	2 kali	2	25.903.000	2	19.278.000	2	18.749.000	2	19.274.000	2	19.274.000	100,00%	99,98%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	Kajian sistem administrasi kearsipan	Jumlah peraturan kearsipan : 2 Dokumen	2 dokumen	2	8.700.000	2	3.500.000	1	3.500.000	2	3.500.000	2	3.500.000	100,00%	100,00%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	Pengawasan Kearsipan	Jumlah PD/Desa : 40 PD/Desa	40 PD/Desa	40	96.725.000	40	87.125.000	40	71.800.000	40	87.100.000	40	87.100.000	100,00%	99,97%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								III		IV						
1	4	5		8		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Cakupan arsip statis yang diakuisisi			715.860.000	20	1.071.235.000		544.004.005		1.048.035.005	0	1.048.035.005	0,00%	97,83%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	Jumlah alat penyimpanan arsip : 3 Unit	3 unit	3	55.300.000	3	47.675.000	3	47.655.000	3	47.655.000	3	47.655.000	100,00%	99,96%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	Pendataan dan penaban dokumen/arsip daerah	Jumlah arsip daerah yang diolah : 2500 Berkas	2500 berkas	2500	323.455.000	2500	606.855.000	2500	199.729.500	2500	586.563.500	2500	586.563.500	100,00%	96,66%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	Akuisisi dan Pengelolaan Arsip	Jumlah arsip yang diakuisisi : 1 Daftar arsip	1 daftar arsip	1	337.105.000	1	416.705.000	1	296.619.505	1	413.816.505	1	413.816.505	100,00%	99,31%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	00															
	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	Indeks kepuasan pelayanan pengguna			195.900.000	81	189.500.000		122.899.000		173.718.000	0	173.718.000	0,00%	91,67%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip	Jumlah dokumen naskah sumber arsip : 1 Dokumen	1 dokumen	1	34.250.000	1	34.250.000	0	1.625.000	1	34.044.000	1	34.044.000	100,00%	99,40%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	Pengembangan Sistem Informasi Kearsipan Statis	Jumlah layanan jaringan informasi kearsipan : 2 Aplikasi	2 aplikasi	2	98.900.000	2	92.775.000	2	82.575.000	2	92.575.000	2	92.575.000	100,00%	99,78%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	Peningkatan Pelayanan Kearsipan	Jumlah peserta bimtek dan workshop : 100 Orang	100 orang	100	62.750.000		62.475.000	100	38.699.000	100	47.099.000	100	47.099.000		75,39%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	00															
	Program Peningkatan Pengelolaan Perijinan	Cakupan Peningkatan Pengelolaan Perizinan			806.586.000		806.586.000		575.691.620		791.762.620	0	791.762.620		98,16%	DINAS PENANAMAN MODAL PT
	Sosialisasi pengelolaan perijinan	Jumlah pelaksanaan sosialisasi	10 kali	10	238.870.000	10	238.870.000	10 kali	220.127.200	10	233.727.200	10	233.727.200	100,00%	97,85%	DINAS PENANAMAN MODAL PT
	Operasional pelayanan perijinan	Jumlah barang keluar pelayanan perizinan	7 jenis	7	53.150.000	7	53.150.000	6 jenis	33.564.000	7	53.104.000	7	53.104.000	100,00%	99,91%	DINAS PENANAMAN MODAL PT
	Pendataan dan penetapan perijinan	Jumlah izin yang ditetapkan dalam satu tahun	6000 izin	6000	110.375.000	6000	110.375.000	4460 izin	77.427.500	5399	109.059.500	5399	109.059.500	89,98%	98,81%	DINAS PENANAMAN MODAL PT
	Penyelesaian pengaduan dan wasdal perijinan	Jumlah Persentase penanganan pengaduan yang tertangani	1	100	13.913.000	100	13.913.000	87,5 persen	7.242.000	100	13.868.000	100	13.868.000	100,00%	99,68%	DINAS PENANAMAN MODAL PT
	Pengkajian peraturan daerah tentang perizinan	Jumlah kajian perda tentang perizinan dan PM	2 perda	2	75.130.000	2	75.130.000	1 perda	46.042.000	2	71.229.000	2	71.229.000	100,00%	94,81%	DINAS PENANAMAN MODAL PT
	Pengelolaan perijinan online	Jumlah paket pengelolaan perizinan online	1 paket	1	186.325.000	1	186.325.000	0	87.431.920	1	184.151.920	1	184.151.920	100,00%	98,83%	DINAS PENANAMAN MODAL PT
	Survei kepuasan masyarakat	Jumlah pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat	2 kali	2	6.525.000	2	6.525.000	1 kali	4.478.000	2	6.525.000	2	6.525.000	100,00%	100,00%	DINAS PENANAMAN MODAL PT
	Penyampaian informasi perijinan melalui pameran bantul ekspo	Jumlah pelaksanaan pameran bantul ekspo	1 kali	1	29.070.000	1	29.070.000	1 kali	27.420.000	1	27.820.000	1	27.820.000	100,00%	95,70%	DINAS PENANAMAN MODAL PT
	Lokakarya penanganan pengaduan	Jumlah pelaksanaan loka karya Penanganan Pengaduan	1 kali	1	23.084.000	1	23.084.000	1 kali	22.334.000	1	22.334.000	1	22.334.000	100,00%	96,75%	DINAS PENANAMAN MODAL PT
	Pengawasan dan Pengendalian Perijinan	Jumlah pengawasan dan pengendalian terhadap proses pelayanan izin terbit	420 izin	420	46.084.000	200	46.084.000	318 izin	25.765.000	200	46.084.000	200	46.084.000	100,00%	100,00%	DINAS PENANAMAN MODAL PT
	Lokakarya Pengawasan dan Pengendalian Perizinan	Jumlah pelaksanaan loka karya Pengawasan dan Pengendalian Perizinan	1 kali	1	24.060.000	1	24.060.000	1 kali	23.860.000	1	23.860.000	1	23.860.000	100,00%	99,17%	
												0	0			

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								III		IV						
1	4	5		8		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Program peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	Prosentase pengendalian pembangunan SKPD	persen	90	244.575.250	2E+08	195.925.250				183.228.850	0	183.228.850	0,00%	93,52%	BAG AD PEMBANGUNAN
	Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan APBD	Jumlah laporan pengendalian kegiatan APBD	Laporan	12	49.500.000	12	53.800.000	9	37.394.900	12	47.864.200	12	47.864.200	100,00%	88,97%	BAG AD PEMBANGUNAN
		Jumlah Peresmian Kegiatan Fisik	Kali	1		1		1		1		1	0	100,00%		BAG AD PEMBANGUNAN
	Sistem Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Sosialisasi Jasa Kontruksi	Kali	1	49.075.250	1	30.575.250	1	30.549.650	1	30.549.650	1	30.549.650	100,00%	99,92%	BAG AD PEMBANGUNAN
	Analisis Kebijakan Pembangunan	Jumlah dokumen pedoman pelaksanaan pembangunan	Kali	1	80.000.000	1	53.050.000	0	3.390.000	1	50.240.000	1	50.240.000	100,00%	94,70%	BAG AD PEMBANGUNAN
	Pelaporan Pembangunan	Jumlah dokumen Laporan pembangunan	Laporan	1	66.000.000	1	58.500.000	1	39.495.100	1	54.575.000	BAG AD PEMBANGUNAN				
		Jumlah Pameran Pembangunan yg diikuti	Pameran			1		1		1		1	54.575.000	100,00%	93,29%	BAG AD PEMBANGUNAN
	Program Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai pelaporan kinerja	angka	12	774.832.500	12	849.482.000			11,51	843.109.870	11,51	843.109.870	95,92%	99,25%	BAG AD PEMBANGUNAN
	Penguatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bantul dan Sekretariat Daerah yang disusun	dokumen	2	774.832.500	2	849.482.000	2	674.115.370	2	843.109.870	2	843.109.870	100,00%	99,25%	BAG AD PEMBANGUNAN
		Jumlah pendampingan penguatan akuntabilitas kinerja	kali	3		3		2		3		3	0	100,00%		BAG AD PEMBANGUNAN
		Jumlah dokumen renstra Sekretariat dan renja PD	dokumen	2		2		2		2		2	0	100,00%		BAG AD PEMBANGUNAN
		Jumlah dokumen RKT Kabupaten dan Sekretariat	dokumen	2		2		2		2		2	0	100,00%		BAG AD PEMBANGUNAN
		Jumlah dokumen PK Kabupaten dan Sekretariat	dokumen	2		2		2		2		2	0	100,00%		BAG AD PEMBANGUNAN
		Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundangan	orang	70		70		70		70		70	0	100,00%		BAG AD PEMBANGUNAN
		Jumlah paket pengadaan hadiah penilaian kinerja PD	paket	3		4		3		4		4	0	100,00%		BAG AD PEMBANGUNAN
	Program Pengembangan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Prosentase Perumusan Kebijakan Kesejahteran Rakyat yang ditindaklanjuti			293.840.000		293.840.000		205.410.600		263.827.400	0	263.827.400		89,79%	BAG. AD KESRA
	Perumusan Kebijakan Kependudukan dan Ketenagakerjaan	Jumlah dokumen perumusan kebijakan kependudukan dan ketenagakerjaan	Dokumen		62.390.000		62.390.000	1	58.375.000		61.800.000	0	61.800.000		99,05%	BAG. AD KESRA
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Kependudukan dan Ketenagakerjaan	Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Kependudukan dan Ketenagakerjaan	Kali		14.850.000		20.070.000	1	1.534.200		13.477.600	0	13.477.600		67,15%	BAG. AD KESRA

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								III		IV						
1	4	5		8		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Perumusan Kebijakan Pengembangan Sosial Kemasyarakatan	Jumlah dokumen perumusan Kebijakan Pengembangan Sosial Kemasyarakatan	Dokumen		42.250.000		42.250.000	1	19.635.000		42.085.000	0	42.085.000		99,61%	BAG. AD KESRA
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Pengembangan Sosial Kemasyarakatan	Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Pengembangan Sosial Kemasyarakatan	Kali		14.250.000		14.250.000	1	883.900		14.132.300	0	14.132.300		99,17%	BAG. AD KESRA
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Masyarakat	Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Masyarakat	Kali		20.070.000		20.070.000	10	2.450.000		4.800.000	0	4.800.000		23,92%	BAG. AD KESRA
	Kajian Bantuan Sosial bagi Warga Miskin	Jumlah dokumen Kajian Bantuan Sosial bagi Warga Miskin	Dokumen		62.390.000		62.390.000	1	59.740.000		61.940.000	0	61.940.000		99,28%	BAG. AD KESRA
	Perumusan Kebijakan Pengembangan Pendidikan dan Kesehatan	Jumlah dokumen Kebijakan Pengembangan Pendidikan dan Kesehatan	Dokumen		62.390.000		62.390.000	1	59.942.500		61.142.500	0	61.142.500		98,00%	BAG. AD KESRA
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Pengembangan Pendidikan dan Kesehatan	Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Pengembangan Pendidikan dan Kesehatan	Kali		15.250.000		15.250.000	1	2.850.000		4.450.000	0	4.450.000		29,18%	BAG. AD KESRA
												0	0			
	Program Pembinaan Pemerintahan Umum				303.030.000		277.980.000		214.526.000		271.790.050	0	271.790.050		97,77%	BAG AD PEMERINTAHAN
	Monitoring Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Daerah	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dengan pejabat pemerintahan daerah di Kabupaten Bantul	kali		303.030.000	17	277.980.000	12	214.526.000	17	271.790.050	17	271.790.050	100,00%	97,77%	BAG AD PEMERINTAHAN
		Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) dalam penanganan permasalahan pemerintahan umum dan daerah	kali			12		9		12		12	0	100,00%		BAG AD PEMERINTAHAN
		Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan monitoring di tingkat kecamatan	kali			4		3		4		4	0	100,00%		BAG AD PEMERINTAHAN
		Persentase penanganan pengaduan terhadap pelayanan publik	%			100		70		100		100	0	100,00%		BAG AD PEMERINTAHAN
		Jumlah Pembayaran iuran APKASI	kali			1		1		1		1	0	100,00%		BAG AD PEMERINTAHAN
	Program pembinaan pemerintahan umum kecamatan	Cakupan pelayanan masyarakat			203.975.000		203.975.000		195.975.000		203.975.000	0	203.975.000		100,00%	KEC JETIS
	Sosialisasi sistem pendaftaran tanah	Jumlah Sosialisasi	ok	4	12.000.000		12.000.000	3	12.000.000		12.000.000	0	12.000.000		100,00%	KEC JETIS
	Pengendalian keamanan lingkungan	Jumlah Pelaksanaan Pemantauan Hari-hari Besar	kali	5	3.000.000		3.000.000	3	2.100.000		3.000.000	0	3.000.000		100,00%	KEC JETIS

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								III		IV						
1	4	5		8		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi	ok	3	17.200.000		17.200.000	2	14.900.000		17.200.000	0	17.200.000		100,00%	KEC JETIS
	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jumlah Pelaksanaan Upacara	kali	2	103.475.000		103.475.000	2	103.475.000		103.475.000	0	103.475.000		100,00%	KEC JETIS
	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber- sumber pendapatan daerah	Jumlah rapat koordinasi dan monev kesadaran pajak bumi bangunan	kali	4	11.250.000		11.250.000	3	11.250.000		11.250.000	0	11.250.000		100,00%	KEC JETIS
	Fasilitasi dan pengendalian pengelolaan keuangan desa	Jumlah rapat koordinasi pendampingan alokasi dana desa dan monev	kali	4	11.300.000		11.300.000	3	8.600.000		11.300.000	0	11.300.000		100,00%	KEC JETIS
	rapat koordinasi unsur Muspika	Jumlah rapat koordinasi muspika	kali	12	31.250.000		31.250.000	9	29.150.000		31.250.000	0	31.250.000		100,00%	KEC JETIS
	Musrenbang Tingkat Kecamatan	Jumlah pelaksanaan musrenbang	kali	1	14.500.000		14.500.000	1	14.500.000		14.500.000	0	14.500.000		100,00%	KEC JETIS
	Program pembinaan pemerintahan umum kecamatan	Prosentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan umum di tingkat kecamatan	100 persen	100	251.590.000	100	251.587.500		230.152.500	100	251.587.500	100	251.587.500	100,00%	100,00%	KEC KRETEK
	Penyusunan Profil Desa, Monografi kecamatan	Tersusunnya profil desa dan kecamatan	kali	2	6.000.000	2	6.000.000	2	3.087.500	2	6.000.000	2	6.000.000	100,00%	100,00%	KEC KRETEK
	Pengendalian keamanan lingkungan	Terlaksananya Pemantauan wilayah kecamatan	desa	5	5.000.000	5	5.000.000	5	3.012.500	5	5.000.000	5	5.000.000	100,00%	100,00%	KEC KRETEK
	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	jumlah pembinaan pengelolaan lingkungan hidup	kali	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	100,00%	100,00%	KEC KRETEK
	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Jumlah kegiatan pendataan dan penataan kearsipan kecamatan	kali	1	7.600.000	1	7.600.000	1	6.340.000	1	7.600.000	1	7.600.000	100,00%	100,00%	KEC KRETEK
	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar	Jumlah Pemantauan UN SD, SMP, SMA	kegiatan	1	6.500.000	1	6.500.000	1	6.500.000	1	6.500.000	1	6.500.000	100,00%	100,00%	KEC KRETEK
	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jumlah Pelaksanaan upacara hari besar nasional	tahun	10	114.910.000	1	114.910.000	10	114.410.000	1	114.910.000	1	114.910.000	100,00%	100,00%	KEC KRETEK
	Peningkatan pemberdayaan keagamaan	Jumlah pelaksanaan pertemuan antar umat beragama dan antar agama	kali	4	8.080.000	4	8.080.000	4	7.025.000	4	8.080.000	4	8.080.000	100,00%	100,00%	KEC KRETEK
	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber- sumber pendapatan daerah	jumlah sosialisasi target PBB	tahun	1	10.000.000	1	10.000.000	1	7.617.500	1	10.000.000	1	10.000.000	100,00%	100,00%	KEC KRETEK
	Fasilitasi dan pengendalian pengelolaan keuangan desa	Jumlah pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah desa	Tahun	1	11.500.000	1	11.500.000	1	6.830.000	1	11.500.000	1	11.500.000	100,00%	100,00%	KEC KRETEK
	rapat koordinasi unsur Muspika	Jumlah Pelaksanaan forum komunikasi kecamatan	kali	4	72.000.000	4	71.997.500	4	67.080.000	4	71.997.500	4	71.997.500	100,00%	100,00%	KEC KRETEK
	Pelaksanaan Rakorpem desa	Jumlah koordinasi dengan desa	desa	5	5.000.000	5	5.000.000	5	3.250.000	5	5.000.000	5	5.000.000	100,00%	100,00%	KEC KRETEK

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								III		IV						
1	4	5		8		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Program pembinaan pemerintahan umum kecamatan	Cakupan pelayanan pemerintahan umum			223.525.000		223.525.000		152.104.900	0	202.759.900	0	202.759.900		90,71%	KEC PUNDONG
	Penyusunan Profil Desa, Monografi kecamatan	Jumlah buku profil desa dan monografi kecamatan		2	1.600.000	2	1.600.000	1	700.000	2	1.600.000	2	1.600.000	100,00%	100,00%	KEC PUNDONG
	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	Jumlah pembinaan lingkungan hidup		3	13.800.000	3	13.800.000	2	8.875.000	3	13.800.000	3	13.800.000	100,00%	100,00%	KEC PUNDONG
	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Pelaksanaan upacara kemerdekaan, upacara hari besar nasional, PMS, PKT, FKDM, FKUB, FPK, lomba gerak jalan		12	181.375.000	12	181.375.000	9	125.955.000	12	160.635.000	12	160.635.000	100,00%	88,57%	KEC PUNDONG
	Peningkatan pemberdayaan keagamaan	Pengiriman peserta lomba MTQ		1	1.950.000	1	1.950.000	0	-	1	1.950.000	1	1.950.000	100,00%	100,00%	KEC PUNDONG
	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Jumlah sosialisasi dan evaluasi PBB		2	1.750.000	2	1.750.000	0	-	2	1.750.000	2	1.750.000	100,00%	100,00%	KEC PUNDONG
	Fasilitasi dan pengendalian pengelblaan keuangan desa	Jumlah pendampingan pengelblaan keuangan APBDes		4	2.100.000	4	2.100.000	3	1.575.000	4	2.075.000	4	2.075.000	100,00%	98,81%	KEC PUNDONG
	rapat koordinasi unsur Muspika	Jumlah koordinasi unsur muspika		5	6.550.000	5	6.550.000	3	2.100.000	5	6.550.000	5	6.550.000	100,00%	100,00%	KEC PUNDONG
	Pelaksanaan Rakorpem desa	Jumlah koordinasi desa		1	1.750.000	1	1.750.000	1	1.750.000	1	1.750.000	1	1.750.000	100,00%	100,00%	KEC PUNDONG
	Musrenbang Tingkat Kecamatan	Jumlah musrenbang dan evaluasi usulan program		2	12.650.000	2	12.650.000	3	11.149.900	2	12.649.900	2	12.649.900	100,00%	100,00%	KEC PUNDONG
	Program pembinaan pemerintahan umum kecamatan	Cakupan pelayanan pemerintahan umum kecamatan			124.375.000		115.350.000		113.850.000		115.350.000	0	115.350.000		100,00%	KEC SEDAYU
	Penyusunan Profil Desa, Monografi kecamatan	Jumlah kegiatan	dokumen	3	2.750.000	3	2.750.000	2	1.250.000	3	2.750.000	3	2.750.000	100,00%	100,00%	KEC SEDAYU
	Pengendalian keamanan lingkungan	Jumlah kegiatan	kali	4	16.100.000	4	12.075.000	3	12.075.000	4	12.075.000	4	12.075.000	100,00%	100,00%	KEC SEDAYU
	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jumlah kegiatan	kali	12	74.675.000	12	74.675.000	2	74.675.000	12	74.675.000	12	74.675.000	100,00%	100,00%	KEC SEDAYU
	Peningkatan pemberdayaan keagamaan	Jumlah kegiatan	kali	2	16.600.000	2	11.600.000	5	11.600.000	2	11.600.000	2	11.600.000	100,00%	100,00%	KEC SEDAYU
	Fasilitasi dan pengendalian pengelblaan keuangan desa	Jumlah kegiatan	kali	2	7.050.000	4	7.050.000	2	7.050.000	4	7.050.000	4	7.050.000	100,00%	100,00%	KEC SEDAYU
	rapat koordinasi unsur Muspika	Jumlah kegiatan	kali	3	7.200.000	4	7.200.000	2	7.200.000	4	7.200.000	4	7.200.000	100,00%	100,00%	KEC SEDAYU
												0	0			
	Program Pembinaan Pemerintah Umum Kecamatan	Cakupan Pemerintah Umum Kecamatan	Persen	100	322.969.475	100	322.969.475		283.971.950		315.876.125	0	315.876.125	0,00%	97,80%	KEC SRANDAKAN
	Sosialisasi sistem pendaftaran tanah	Jumlah peserta sosialisasi	kali	4	3.987.500	4	3.987.500	2	3.115.000		3.882.500	0	3.882.500	0,00%	97,37%	KEC SRANDAKAN
	Penyusunan Profil Desa, Monografi Kecamatan	Jumlah peserta sosialisasi	dokumen	2	12.499.925	2	12.499.925	1	9.998.625		12.497.425	0	12.497.425	0,00%	99,98%	KEC SRANDAKAN
	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah peserta sosialisasi	kali	4	3.999.975	4	3.999.975	3	2.973.975		3.919.475	0	3.919.475	0,00%	97,99%	KEC SRANDAKAN

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								III		IV						
1	4	5		8		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	Jumlah sosialisasi	kali	4	6.699.950	4	6.699.950	3	3.937.500		6.612.450	0	6.612.450	0,00%	98,69%	KEC SRANDAKAN
	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar	Makan minum rakor dan monitoring	kali	3	6.250.000	3	6.250.000	3	4.185.725		6.250.000	0	6.250.000	0,00%	100,00%	KEC SRANDAKAN
	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	upacara hari besar tiap tanggal 17	kali	12	92.000.000	12	92.000.000	7	90.600.000		92.000.000	0	92.000.000	0,00%	100,00%	KEC SRANDAKAN
	Peningkatan pemberdayaan keagamaan	makan minum rakor	kali	12	58.695.400	12	58.695.400	15	55.095.900		58.695.400	0	58.695.400	0,00%	100,00%	KEC SRANDAKAN
	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Rakor PBB	kali	4	6.989.750	4	6.989.750	4	6.989.750		6.989.750	0	6.989.750	0,00%	100,00%	KEC SRANDAKAN
	Facilitasi dan pengendalian pengelaaan keuangan desa	Jumlah peserta sosialisasi	kali	6	9.998.750	6	9.998.750	5	7.837.250		9.698.750	0	9.698.750	0,00%	97,00%	KEC SRANDAKAN
	Rapat koordinasi unsur Muspika	rakor dan honor muspika	triwulan	4	24.910.000	4	24.910.000	3	24.760.000		24.760.000	0	24.760.000	0,00%	99,40%	KEC SRANDAKAN
	Pelaksanaan Rakorper desa	jumlah rakor	kali	3	6.000.500	3	6.000.500	2	4.177.000		6.000.500	0	6.000.500	0,00%	100,00%	KEC SRANDAKAN
	Musrenbang tingkat Kecamatan	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	kali	1	14.600.000	1	14.600.000	1	10.600.000		10.600.000	0	10.600.000	0,00%	72,60%	KEC SRANDAKAN
	Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan	Cakupan pembinaan sosial kemasyarakatan										0	0			KEC SRANDAKAN
	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT PMKS lainnya	jumlah koordinasi		3	12.474.975	3	12.474.975	3	12.474.975		12.474.975	0	12.474.975	0,00%	100,00%	KEC SRANDAKAN
	Pembinaan organisasi kepemudaan	jumlah koordinasi		3	9.999.850	3	9.999.850	3	7.548.850		9.999.850	0	9.999.850	0,00%	100,00%	KEC SRANDAKAN
	Facilitas Penyelenggaraan festival budaya daerah	rakor dan festival budaya		6	20.749.900	6	20.749.900	5	18.524.900		20.749.900	0	20.749.900	0,00%	100,00%	KEC SRANDAKAN
	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	jumlah pelaksanaan SKJ		11	16.500.000	11	16.500.000	8	11.509.000		15.724.900	0	15.724.900	0,00%	95,30%	KEC SRANDAKAN
	Penyuluhan pemberantasan penyakit masyarakat	jumlah rakor		3	9.116.750	3	9.116.750	2	5.929.750		8.806.500	0	8.806.500	0,00%	96,60%	KEC SRANDAKAN
	Facilitasi kelancaran pelaksanaan demokrasi	rakor dan monitoring		1	2.500.000	1	2.500.000		-		2.500.000	0	2.500.000	0,00%	100,00%	KEC SRANDAKAN
	Penyelenggaraan lomba desa	jumlah lomba desa		1	4.996.250	1	4.996.250	1	3.713.750		3.713.750	0	3.713.750	0,00%	74,33%	KEC SRANDAKAN
	Program pembinaan pemerintahan umum kecamatan				161.692.500		161.692.500	322	127.902.500		148.895.000	0	148.895.000		92,09%	KEC PANDAK
	Sosialisasi sistem pendaftaran tanah			4	4.560.000	4	4.560.000	2	2.422.500	4	4.560.000	4	4.560.000	100,00%	100,00%	KEC PANDAK
	Pengendalian keamanan lingkungan			12	2.000.000	12	2.000.000	9	800.000	12	1.200.000	12	1.200.000	100,00%	60,00%	KEC PANDAK
	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar			3	6.500.000	3	6.500.000	3	5.700.000	3	5.700.000	3	5.700.000	100,00%	87,69%	KEC PANDAK
	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa			16	114.425.000	16	114.425.000	13	97.727.500	16	103.227.500	16	103.227.500	100,00%	90,21%	KEC PANDAK
	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah			2	5.300.000	2	5.300.000	2	3.250.000	2	5.300.000	2	5.300.000	100,00%	100,00%	KEC PANDAK
	Facilitasi dan pengendalian pengelaaan keuangan desa			500	14.250.000	500	14.250.000	290	8.265.000	500	14.250.000	500	14.250.000	100,00%	100,00%	KEC PANDAK
	rapat koordinasi unsur Muspika			4	3.420.000	4	3.420.000			4	3.420.000	4	3.420.000	100,00%	100,00%	KEC PANDAK
	Pelaksanaan Rakorper desa			4	3.000.000	4	3.000.000	2	1.500.000	4	3.000.000	4	3.000.000	100,00%	100,00%	KEC PANDAK

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								III		IV						
1	4	5		8		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Musrenbang Tingkat Kecamatan			1	8.237.500	1	8.237.500	1	8.237.500	1	8.237.500	1	8.237.500	100,00%	100,00%	KEC PANDAK
	Program pemerintahan umum kecamatan	Cakupan pelayanan pemerintahan umum	0,9	864	236.100.000	864	236.100.000	673	210.325.000	864	236.100.000	864	236.100.000	100,00%	100,00%	KEC IMOIRI
	Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	kali	1	14.000.000	1	14.000.000	1	14.000.000	1	14.000.000	1	14.000.000	100,00%	100,00%	KEC IMOIRI
	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah Patroli Keamanan Lingkungan	kali	12	6.000.000	12	6.000.000	9	4.250.000	12	6.000.000	12	6.000.000	100,00%	100,00%	KEC IMOIRI
	Pendampingan dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Pendampingan dan Monitoring Pengelolaan Dana Desa	ok	180	4.000.000	180	4.000.000	135	3.000.000	180	4.000.000	180	4.000.000	100,00%	100,00%	KEC IMOIRI
	Rapat Koordinasi Muspika	Jumlah Rakord Muspika dan Pembinaan Ketahanan Keluarga	ok	305	36.000.000	305	36.000.000	255	34.750.000	305	36.000.000	305	36.000.000	100,00%	100,00%	KEC IMOIRI
	Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa			88	110.000.000	88	110.000.000	86	106.000.000	88	110.000.000	88	110.000.000	100,00%	100,00%	KEC IMOIRI
		Jumlah Upacara Hari Besar dan Rutin	kegiatan	8		8		6		8		8	0	100,00%		KEC IMOIRI
		Jumlah Pengadaan Pakaian Paskibraka	stel	80		80		80		80		80	0	100,00%		KEC IMOIRI
	Penyusunan Profil Desa, Monografi Kecamatan	Monografi Kecamatan	Dokumen	2	2.000.000	2	2.000.000	1	1.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	100,00%	100,00%	KEC IMOIRI
	Peningkatan Pemberdayaan Keagamaan	Jumlah Pembinaan Keagamaan	jenis	6	45.700.000	6	45.700.000	6	33.175.000	6	45.700.000	6	45.700.000	100,00%	100,00%	KEC IMOIRI
	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	Jumlah Peserta Sosialisasi PBB	ok	40	1.400.000	40	1.400.000	40	1.400.000	40	1.400.000	40	1.400.000	100,00%	100,00%	KEC IMOIRI
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup	Jumlah Rakord dan Pembinaan Pengelolaan Sampah	ok	190	15.000.000	190	15.000.000	120	11.250.000	190	15.000.000	190	15.000.000	100,00%	100,00%	KEC IMOIRI
	Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah	Jumlah Pembinaan Penataan Dokumen / Arsip	ok	40	2.000.000	40	2.000.000	20	1.500.000	40	2.000.000	40	2.000.000	100,00%	100,00%	KEC IMOIRI
	Program Penyusunan Kebijakan Kerjasama Daerah				117.385.000		119.385.000		80.081.000		107.060.850	0	107.060.850		89,68%	BAG AD PEMERINTAHAN
	Kajian Kebijakan Pengembangan Investasi dan Kerjasama	Jumlah dokumen kajian	dokumen		53.950.000	1	53.950.000	1	52.911.000	1	52.911.000	1	52.911.000	100,00%	98,07%	BAG AD PEMERINTAHAN
	Pengembangan Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lembaga	Persentase penyelesaian kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama	%		63.435.000	100	65.435.000	70	27.170.000	100	54.149.850	100	54.149.850	100,00%	82,75%	BAG AD PEMERINTAHAN
												0	0			
	Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah				385.725.000		343.225.000		289.257.400		310.017.400	0	310.017.400		90,32%	BAG AD PEMERINTAHAN
	Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Penyelenggaraan Otonomi Daerah berdasarkan peraturan yang berlaku	dokumen		385.725.000	1	343.225.000	1	289.257.400	1	310.017.400	1	310.017.400	100,00%	90,32%	BAG AD PEMERINTAHAN
	Bimbingan teknis Implementasi Peraturan	Pelaksanaan bimbk / kali	kali			1		1		1		1	0	100,00%		BAG AD PEMERINTAHAN

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								III		IV						
1	4	5		8		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyusunan database,peta batas daerah,toponimi dan gesetir	Database peta batas daerah,toponimi dan gesetir	kali			1		1		1		1	0	100,00%		BAG AD PEMERINTAHAN
	Pengolahan,updating dan analisis data dan statistik daerah	Buku rekapitulasi dan monografi kecamatan dan monografi kab/Kota	buah			27		27		27		27	0	100,00%		BAG AD PEMERINTAHAN
	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	buku			3		1		3		3	0	100,00%		BAG AD PEMERINTAHAN
	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah raperda yang disusun	raperda		744.245.000		751.295.000		405.508.350		676.434.900	0	676.434.900		90,04%	BAG HUKUM
	1. Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan				293.960.000		293.960.000		133.585.400		275.803.200	0	275.803.200		93,82%	BAG HUKUM
		Terlaksananya kajian produk hukum daerah	raperda	20		1		19		1		1	0	100,00%		BAG HUKUM
		Terlaksananya publikasi raperda	kali	8		4		6		4		4	0	100,00%		BAG HUKUM
		Jumlah pelaksanaan publik hearing				6				6						
		Terlaksananya proses legialasi raperda menjadi perda				20				23						
	2. Publikasi peraturan perundang-undangan				136.875.000		136.875.000		111.068.000		128.383.000	0	128.383.000		93,80%	BAG HUKUM
		Jumlah penerbitan LD/TLD,	buku	200		200		175		175		175	0	87,50%		BAG HUKUM
		Sosialisasi dan publikasi Per UU an	kali	4		4		3		4		4	0	100,00%		BAG HUKUM
		Pemeliharaan Aplikasi JDH,	paket	1		1		1		1		1	0	100,00%		BAG HUKUM
		Pendokumentasian produk hukum daerah				500				778						
	3.Pemberian bantuan hukum				142.200.000		160.250.000		72.553.850		138.464.050	0	138.464.050		86,41%	BAG HUKUM
		Jumlah penanganan permasalahan hukum,	perkara	5		5		5		4		4	0	80,00%		BAG HUKUM
		Jumlah pendampingan konsultasi hukum	kasus	20		20		20		24		24	0	120,00%		BAG HUKUM
		Jumlah peserta RANHAM	orang	50				50		50		50	0			BAG HUKUM
	4. Pengawasan produk hukum pemerintah desa				26.100.000		26.100.000		20.496.100		24.648.600	0	24.648.600		94,44%	BAG HUKUM
		Jumlah pembinaan produk hukum desa	kali	100		2		2		2		2	0	100,00%		BAG HUKUM

No	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								III		IV						
1	4	5		8		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	5. Penyuluhan Hukum				65.650.000		65.650.000		36.776.400		53.301.400	0	53.301.400		81,19%	BAG HUKUM
		Jumlah kelompok Kadarkum	kelompok	4		4		4		44		44	0	1100,00%		BAG HUKUM
		Jumlah penyuluhan hukum	orang	150		50		1		50		50	0	100,00%		BAG HUKUM
	6. Pembinaan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum						22.200.000		8.399.850		18.254.850	0	18.254.850		82,23%	BAG HUKUM
		Terlaksananya pembinaan JDH kepada petugas DJI pada SKPD, Kecamatan dan Desa			22.200.000	2		1		2		2	0	100,00%		BAG HUKUM
	7. Penyusunan Produk Hukum Daerah		kali	2			46.260.000		22.628.750		37.579.800	0	37.579.800		81,24%	BAG HUKUM
		Jumlah peraturan bupati yang diterbitkan			57.260.000	100		95		146		146	0	146,00%		BAG HUKUM
		Jumlah keputusan bupati yang diterbitkan	buah	200		400		360		609		609	0	152,25%		BAG HUKUM
			buah	500								0	0			BAG HUKUM
	Program Peningkatan Kualitas Kehumasan dan Keprotokolan				534.613.000		569.613.000		363.896.000			0	0		0,00%	BAG. HUMPRO
	Penerimaan Kunjungan Kerja				37.300.000				32.800.000			0	0			BAG. HUMPRO
	-Honor Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah personil personil pengadaan	ok		800.000	3	800.000	3	800.000	3	800.000	3	800.000	100,00%	100,00%	BAG. HUMPRO
	-Belanja ATK	Jumlah Alat tulis kantor	paket		1.500.000	1	1.550.000			1	1.550.000	1	1.550.000	100,00%	100,00%	BAG. HUMPRO
	-Belanja Cenderamata/plakat	Jumlah Cenderamata	buah		20.000.000	210	42.000.000	100	20.000.000	210	42.000.000	210	42.000.000	100,00%	100,00%	BAG. HUMPRO
	-Belanja Alat-alat / perlengkapan	Jumlah tas cenderamata	buah		2.000.000	100	2.000.000	100	2.000.000	200	2.000.000	200	2.000.000	200,00%	100,00%	BAG. HUMPRO
	- Belanja cetak	Jumlah barang cetakan	paket		10.000.000	2000	10.000.000	2000	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	5,00%	100,00%	BAG. HUMPRO
	- Belanja Penggandaan	Jumlah dokumen 33.600	lembar		3.000.000	33600	3.000.000			33600	3.000.000	33600	3.000.000	100,00%	100,00%	BAG. HUMPRO
	Pendampingan Ketugasan Bupati, dan Wakil Bupati				85.740.000				43.925.000			0	0			BAG. HUMPRO
	-Honor Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah personil personil pengadaan	ok		1.250.000	3	1.250.000			3	1.250.000	3	1.250.000	100,00%	100,00%	BAG. HUMPRO
	-Honorarium Tenaga Kontrak	Jumlah tenaga kontrak	ob		74.800.000	44	74.800.000	32	40.400.000	1	65.200.000	1	65.200.000	2,27%	87,17%	BAG. HUMPRO

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								III		IV						
1	4	5		8		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	- Belanja ATK	Jumlah ATK	paket		3.790.000	1	2.290.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	100,00%	87,34%	BAG. HUMPRO
	- Belanja cetak	Jumlah barang cetakan	paket		4.400.000	1100	4.400.000	250	1.000.000	1100	4.400.000	1100	4.400.000	100,00%	100,00%	BAG. HUMPRO
	- Belanja Penggandaan	Jumlah dokumen	lembar			8000	1.500.000	3000	525.000	7450	525.000	7450	525.000	93,13%	35,00%	BAG. HUMPRO
	Peningkatan Kemampuan Keprobokolan				31.000.000				24.177.500			0	0			BAG. HUMPRO
	Sosialisasi Undang-undang Keprobokolan	jumlah frekwensi sosialisasi	kali		31.000.000	1	24.750.000	1	24.177.500	1	24.177.500	1	24.177.500	100,00%	97,69%	BAG. HUMPRO
	Upacara Hari-Hari Besar Nasional dan Hari Jadi Kabupaten				240.273.000	9	236.073.000	7	212.025.000	9	229.472.200	9	229.472.200	100,00%	97,20%	BAG. HUMPRO
	Pengelolaan Informasi Media Massa				140.300.000				50.968.500			0	0			BAG. HUMPRO
	-Belanja ATK	Jumlah ATK	PAKET		7.380.000	1	7.380.000	1	5.500.000	1	7.379.500	1	7.379.500	100,00%	99,99%	BAG. HUMPRO
	-Belanja Transportasi	Jumlah personil wartawan	kali		44.000.000	720	46.400.000	540	32.400.000	720	45.600.000	720	45.600.000	100,00%	98,28%	BAG. HUMPRO
	-Belanja Dokumentasi											0	0			BAG. HUMPRO
	-Belanja Publikasi	Jumlah publikasi	kali		60.000.000	12	85.000.000			12	85.000.000	12	85.000.000	100,00%	100,00%	BAG. HUMPRO
	- Belanja cetak	Jumlah barang cetakan	paket		345.000	1	345.000					0	0	0,00%	0,00%	BAG. HUMPRO
	- Belanja Penggandaan dan penjiidlan	Jumlah dokumen	paket		9.300.000	40036	9.300.000	15820	2.793.500	35436	8.491.000	35436	8.491.000	88,51%	91,30%	BAG. HUMPRO
	-Belanja Makan dan minum kegiatan	Jumlah makan yg tersedia	dos		7.000.000	200	7.000.000	195	3.900.000	195	6.900.000	195	6.900.000	97,50%	98,57%	BAG. HUMPRO
	-Belanja Pakaian olahraga	Jumlah pakaian olahraga	buah		4.375.000	35	4.375.000	35	4.375.000	35	4.375.000	35	4.375.000	100,00%	100,00%	BAG. HUMPRO
	-Belanja Narasumber/moderatr	Jumlah jam mengajar	jpl		7.900.000	12	5.400.000		2.000.000	10	5.000.000	10	5.000.000	83,33%	92,59%	BAG. HUMPRO
	Program Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah				906.290.000		931.315.000		606.508.250		869.488.000	0	869.488.000		93,36%	BAG. LPBJ
	Identifikasi dan Pelaporan Kebutuhan Pengadan Barang dan Jasa				32.000.000		25.000.000		7.750.000		25.000.000	0	25.000.000		100,00%	BAG. LPBJ
		Dokumen identifikasi kebutuhan barang dan jasa		3	32.000.000	3	25.000.000	0	7.750.000	3	25.000.000	3	25.000.000	100,00%	100,00%	BAG. LPBJ
												0	0			BAG. LPBJ
	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah				784.290.000		816.315.000		534.335.500		756.293.000	0	756.293.000		92,65%	BAG. LPBJ

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								III		IV						
1	4	5		8		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Bimtek, forkom dan FGD		5	99.340.000	6	71.022.500	5	59.646.500	6	70.846.500	6	70.846.500	100,00%	99,75%	BAG. LPBJ
		Memfasilitasi usulan pemilihan penyedia barang dan jasa		200	684.950.000	200	745.292.500	234	474.689.000	236	685.446.500	236	685.446.500	118,00%	91,97%	BAG. LPBJ
												0	0			BAG. LPBJ
	Pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik				90.000.000				64.422.750		88.195.000	0	88.195.000			BAG. LPBJ
		Pengumuman RUP Diklat dan Forkom		3	22.000.000	3	22.000.000	1	8.920.000	3	20.625.000	3	20.625.000	100,00%	93,75%	BAG. LPBJ
		Memfasilitasi usulan pemilihan penyedia barang dan jasa		200	68.000.000	200	68.000.000	234	55.502.750	236	67.570.000	236	67.570.000	118,00%	99,37%	BAG. LPBJ
												0	0			
	Program Penyelenggaraan dan Pembinaan Pemerintah Desa	Persentase penyusunan peraturan Penundang-undangan Desa (RKPDdes dan APBDes) tepat waktu			1.316.297.500		1.268.652.500		556.034.700		995.680.175	0	995.680.175		78,48%	BAG PEM DES
	Pemberdayaan Lembaga Desa	Jumlah workshop lupoksi LKD dan BPD			172.620.000	1	172.620.000	1	99.608.000	1	137.148.375	1	137.148.375	100,00%	79,45%	BAG PEM DES
	Update Data Monografi Desa	Jumlah Monografi Desa melalui SIM Monografi Desa			110.000.000	75	101.275.000	75	96.875.000	75	101.150.000	75	101.150.000	100,00%	99,88%	BAG PEM DES
	Pendampingan Manajemen Pemerintah Desa	Jmlh Pelatihan bagi Lurah Baru, BPD , Pendampingan Permasalahan pemerintahan desa dan rakorpemdes			236.927.500	630	236.927.500	425	107.763.000	630	183.889.100	630	183.889.100	100,00%	77,61%	BAG PEM DES
	Pengisian Lowongan bagi Lurah dan Pamong Desa	Jumlah pengisian lekosongan jabatan Lurah dan Pamong Desa			160.000.000	75	160.000.000	75	21.375.000	75	130.650.000	75	130.650.000	100,00%	81,66%	BAG PEM DES
	Evaluasi Pelayanan Pemerintah Desa	Jumlah monitoring evaluasi pelayanan pemerintahan desa			96.975.000	75	96.975.000		2.126.800	2	2.126.800	2	2.126.800	2,67%	2,19%	BAG PEM DES
	Pedampingan Administrasi Desa	Jumlah pendampingan dan workshop administrasi desa			180.775.000	9	171.175.000		23.400.000	9	169.650.000	9	169.650.000	100,00%	99,11%	BAG PEM DES
	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Sistem Informasi Desa	Jumlah Monev dan Pelaporan SID			25.000.000	1	16.075.000	1	16.075.000	1	16.075.000	1	16.075.000	100,00%	100,00%	BAG PEM DES
	Penyusunan Regulasi tentang Pemerintah Desa	Jumlah Perda dan Perbup kelembagaan desa			46.000.000	1	46.000.000	1	24.528.500	1	43.853.500	1	43.853.500	100,00%	95,33%	BAG PEM DES
	Pengendalian Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah rakor dan sosialisasi alokasi pendapatan transfer desa			268.000.000	92	247.605.000	300	146.798.500	92	194.275.000	92	194.275.000	100,00%	78,46%	BAG PEM DES
	Pengalokasian Pendapatan Transfer Desa	Jumlah rakor, Monev, Pelatihan			20.000.000	4	20.000.000	4	17.484.900	4	16.862.400	4	16.862.400	100,00%	84,31%	BAG PEM DES

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								III		IV						
1	4	5		8		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												0	0			
	Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintahan	Capaian kinerja aparatur/pegawai		100	182.159.000		174.259.000		26.768.785			0	0		0,00%	BAG ORGANISASI
	Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan Pendayagunaan Aparatur Negara	Jumlah dokumen perencanaan teknis pelaksanaan kegiatan	dokumen	1	75.009.000	1	67.159.000	0	6.858.800	1	63.638.800	1	63.638.800	100,00%	94,76%	BAG ORGANISASI
		Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi	kali	22		22		7		22		22	0	100,00%		BAG ORGANISASI
		Jumlah Workshop / FGD	kali	1		2		1		2		2	0	100,00%		BAG ORGANISASI
		Jumlah Dokumen Evaluasi Kebijakan Pendayagunaan Aparatur Daerah	dokumen	1		4				4		4	0	100,00%		BAG ORGANISASI
		Jumlah penyeboran iuran Forgedasi	kali	2		2		0		2		2	0	100,00%		BAG ORGANISASI
		Pemeliharaan Aplikasi	buah	1		1				1		1	0	100,00%		BAG ORGANISASI
		jumlah SK tim teknis pelaksana kegiatan	dokumen			1				1		1	0	100,00%		
	Penyusunan dan Evaluasi Analisis Jabatan Pemerintah Kabupaten	Jumlah dokumen Hasil Evaluasi Analisis Jabatan	dokumen	1	42.200.000	4	42.200.000	0	4.500.000	4	36.249.700	4	36.249.700	100,00%	85,90%	BAG ORGANISASI
		Jumlah SK Tim Teknis Pelaksana Kegiatan	dokumen	10		1				1		1	0	100,00%		BAG ORGANISASI
		Jumlah Pelaksanaan Workshop/FGD bersama SKPD	kali	4		4		1		4		4	0	100,00%		BAG ORGANISASI
		Dokumen hasil anjab	dokumen			1				1		1	0	100,00%		BAG ORGANISASI
		Pelaksanaan penyusunan dan Evaluasi Analisis Jabatan	kali			10				10		10	0	100,00%		BAG ORGANISASI
	Penyusunan dan Evaluasi Analisis Beban Kerja Organisasi Perangkat Daerah	Dokumen hasil Evaluasi Beban Kerja	dokumen	1	49.950.000	4	49.950.000	0	4.500.000	4	36.249.700	4	36.249.700	100,00%	72,57%	BAG ORGANISASI
		Tersusun SK Tim Teknis pelaksana kegiatan	dokumen	6		1				1		1	0	100,00%		BAG ORGANISASI
		Rapat koordinasi penyusunan dan evaluasi analisis beban kerja	kali	6		6		1		4		4	0	66,67%		BAG ORGANISASI
		Dokumen analisis beban kerja	dokumen			1				1		1	0	100,00%		BAG ORGANISASI
		Jumlah Pelaksanaan Workshop/FGD bersama SKPD	kali			6				10		10	0	166,67%		BAG ORGANISASI
	Penyediaan Kartu Identitas Pegawai	Jumlah ID Card yang dicetak	buah	1500	15.000.000	15000	15.000.000	436	7.874.985	15000	14.965.000	15000	14.965.000	100,00%	99,77%	BAG ORGANISASI
	Pengadaan mesin/kartu absensi	Dokumen rencana teknis pelaksana kegiatan	dokumen	0	-	1				1		1	0	100,00%		BAG ORGANISASI
		Dokumen evaluasi capain kinerja pelaksanaan kegiatan	dokumen			1				1		1	0	100,00%		BAG ORGANISASI

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								III		IV						
1	4	5		8		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Kelembagaan	Right Sizing/kesesuaian dg indikator potensi/beban kerja yang ada dalam Peraturan Pemerintah tentang Kelembagaan	%	100	138.785.500		143.510.500		20.090.000		-	0	0		0,00%	BAG ORGANISASI
	Penyusunan dan Evaluasi Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kelembagaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen hasil penyusunan SOTK	dokumen	1	80.481.000	1	80.481.000		13.990.000	1	75.015.500	1	75.015.500	100,00%	93,21%	BAG ORGANISASI
		Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi Tim Teknis	kali	25		25		7		25		25	0	100,00%		BAG ORGANISASI
		Jumlah pelaksanaan FGD / Workshop	kali	4		4				4		4	0	100,00%		BAG ORGANISASI
		Dokumen evaluasi capaian pelaksanaan kegiatan	dokumen			1				1						
		SK tim teknis pelaksanaan kegiatan	dokumen			1				1						
	Pelaksanaan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen hasil evaluasi sistem pengukuran kinerja	dokumen	1	47.304.500	1	47.304.500		-	1	29.054.500	1	29.054.500	100,00%	61,42%	BAG ORGANISASI
		SK tim teknis pelaksanaan kegiatan	dokumen	8		1				1		1	0	100,00%		BAG ORGANISASI
		Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi Tim Teknis	kali	3		8				8		8	0	100,00%		BAG ORGANISASI
		Dokumen hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan	dokumen			1				1						
		Jumlah pelaksanaan FGD / Workshop	kali			3				3						
	Penyusunan dan Evaluasi Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rincian tugas instansi	dokumen	1	31.000.000	1	31.000.000		6.100.000	1	30.475.000	1	30.475.000	100,00%	98,31%	BAG ORGANISASI
		SK tim teknis pelaksanaan kegiatan	dokumen	20		1				1		1	0	100,00%		BAG ORGANISASI
		Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi Tim Teknis	kali	2		20		7		20		20	0	100,00%		BAG ORGANISASI
		Jumlah pelaksanaan FGD / Workshop	kali			2				2						
		Dokumen hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan	dokumen			4				4						
												0	0			
	Program Peningkatan Sistem Manajemen dan Prosedure Birokrasi Pemerintah	Persentase jumlah SOP yang disusun di bagi jumlah SOP yang seharusnya disusun	%	60	477.043.200		336.376.200		58.236.500		-	0	0		0,00%	BAG ORGANISASI

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								III		IV						
1	4	5		8		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pendampingan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Bagi Unit Pelayanan Publik (UPP)	Dokumen hasil penyusun IPM	Dokumen	2	44.209.000	1	44.209.000		7.050.000	1	42.334.000	1	42.334.000	100,00%	95,76%	BAG ORGANISASI
		Dokumen SK tim pelaksana kegiatan	Dokumen	3		1				1		1	0	100,00%		BAG ORGANISASI
		Dokumen hasil evaluasi proses capaian pelaksana kegiatan	dokumen	5		4				4		4	0	100,00%		BAG ORGANISASI
		Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi Tim Teknis	kali			3		1		3		3	0	100,00%		BAG ORGANISASI
		Jumlah pelaksanaan FGD / Workshop	kali			5				5		5	0	100,00%		BAG ORGANISASI
	Pengukuran Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	Dokumen hasil Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Dokumen	2	44.947.000	2	44.947.000	1	16.449.000		41.932.000	0	41.932.000	0,00%	93,29%	BAG ORGANISASI
		Dokumen SK tim pelaksana kegiatan	Dokumen	4		1						0	0	0,00%		BAG ORGANISASI
		Dokumen hasil evaluasi proses capaian pelaksana kegiatan	dokumen	3		4						0	0	0,00%		BAG ORGANISASI
		Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi Tim Teknis	kali			4		1				0	0	0,00%		BAG ORGANISASI
		Jumlah pelaksanaan FGD / Workshop	kali			3						0	0	0,00%		BAG ORGANISASI
	Evaluasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM)	Jumlah Workshop Evaluasi Pencapaian SPM	kali	3	40.610.200	3	40.610.200	1	5.750.000	3	39.709.900	3	39.709.900	100,00%	97,78%	BAG ORGANISASI
		Dokumen SK tim pelaksana kegiatan	Dokumen	15		1				1		1	0	100,00%		BAG ORGANISASI
		Dokumen hasil evaluasi proses capaian pelaksana kegiatan	dokumen	12		4				4		4	0	100,00%		BAG ORGANISASI
		Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi Tim Teknis	kali			15				15		15	0	100,00%		BAG ORGANISASI
		Jumlah dokumen laporan SPM	buah			6				6		6	0	100,00%		BAG ORGANISASI
	Pendampingan dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Terpadu dan Unit Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Terpadu dan Unit Pelayanan Publik	Dokumen	1	251.427.000	1	121.010.000		18.800.000	1	103.750.000	1	103.750.000	100,00%	85,74%	BAG ORGANISASI
		Dokumen SK tim pelaksana kegiatan	Dokumen	6		1				1		1	0	100,00%		BAG ORGANISASI
		Dokumen hasil evaluasi proses capaian pelaksana kegiatan	dokumen	8		4				4		4	0	100,00%		BAG ORGANISASI
		Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi Tim Teknis	kali	1		6				6		6	0	100,00%		BAG ORGANISASI
		Jumlah pelaksanaan FGD / Workshop	kali			8				8		8	0	100,00%		BAG ORGANISASI
		Pelaksanaan Pameran Inovasi	kali			1				1		1	0	100,00%		BAG ORGANISASI
	Pelaksanaan dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah FGD / workshop evaluasi pelaksanaan RB	kali	3	42.050.000	3	42.050.000	2	7.735.000	3	38.000.000	3	38.000.000	100,00%	90,37%	BAG ORGANISASI

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								III		IV						
								8		8b (APBDP 2018)		11		12		
1	4	5		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Dokumen SK tim pelaksana kegiatan	Dokumen	3		1				1		1	0	100,00%		BAG ORGANISASI
		Dokumen hasil evaluasi proses capaian pelaksana kegiatan	dokumen	1		4				4		4	0	100,00%		BAG ORGANISASI
		Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi Tim Teknis	kali			3				3		3	0	100,00%		BAG ORGANISASI
		Dokumen Hasil Evaluasi RB	dokumen			1				1		1	0	100,00%		BAG ORGANISASI
	Penyusunan dan Evaluasi Standard Operating Prosedur dan Ketatalaksanaan	Jumlah sosialisasi / workshop movev SOP	kali	5	53.800.000	5	53.800.000	3	2.452.500	5	37.099.500	5	37.099.500	100,00%	68,96%	BAG ORGANISASI
		Dokumen SK tim pelaksana kegiatan	Dokumen	6		1				1		1	0	100,00%		BAG ORGANISASI
		Evaluasi capaian kinerja kegiatan	dokumen	1		4				4		4	0	100,00%		BAG ORGANISASI
		Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi Tim Teknis	kali			6				6		6	0	100,00%		BAG ORGANISASI
		Jumlah Dokumen Evaluasi Standar Operating Prosedur dan Ketatalaksanaan	buah			1		0		1		1	0	100,00%		BAG ORGANISASI
	Pelayanan terpadu di kecamatan (PATEN)	Jumlah worshop movev PATEN	kali									0	0			BAG ORGANISASI
		Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi Tim Teknis	kali									0	0			BAG ORGANISASI
	Pengembangan PTSP	Jumlah FGD PTSP	kali									0	0			BAG ORGANISASI
		Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi Tim Teknis	kali									0	0			BAG ORGANISASI
	Penilaian unit pelayanan publik	Jumlah pelaksanaan penilaian UPP	kali									0	0			BAG ORGANISASI
		Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi Tim Teknis	kali									0	0			BAG ORGANISASI
	Program peningkatan pelayanan masyarakat						12.000.000				12.000.000	0	12.000.000		100,00%	KEC BAMBANGLI PURO

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								III		IV						
1	4	5		8		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan					4.500.000		4.500.000		4.500.000	0	4.500.000		100,00%	KEC BAMBANGLIPURO
	Peningkatan pelayanan masyarakat						7.500.000		7.500.000		7.500.000	0	7.500.000		100,00%	KEC BAMBANGLIPURO
	Program peningkatan pelayanan masyarakat	IKM	Angka		49.050.000	85	64.050.000	85	39.912.500	87,14	64.050.000	87,14	64.050.000	102,52%	100,00%	KEC BANGUNTAPAN
	Peningkatan pelayanan masyarakat	Sosialisasi pelayanan masyarakat	kali	12	49.050.000	8	64.050.000	6	39.912.500	8	64.050.000	8	64.050.000	100,00%	100,00%	KEC BANGUNTAPAN
		Dekorasi	paket	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0			KEC BANGUNTAPAN
		Sewa mobilitas darat	unit	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0			KEC BANGUNTAPAN
		Penggunaan	lembar	3000	450.000	6000	900.000	2250	337.500	6000	900.000	6000	900.000	100,00%	100,00%	KEC BANGUNTAPAN
		Makan minum rapat	om	165	5.775.000	850	29.750.000	495	17.325.000	850	29.750.000	850	29.750.000	100,00%	100,00%	KEC BANGUNTAPAN
		Makan minum pelaks keg	om	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0			KEC BANGUNTAPAN
		Makan minum tamu	om	200	1.000.000	200	1.000.000	0	-	200	1.000.000	200	1.000.000	100,00%	100,00%	KEC BANGUNTAPAN
		Publikasi	kali	2	15.500.000	2	15.500.000	2	15.500.000	2	15.500.000	2	15.500.000	100,00%	100,00%	KEC BANGUNTAPAN
		Jasa Narasumber	jpl	36	9.000.000	46	11.500.000	27	6.750.000	46	11.500.000	46	11.500.000	100,00%	100,00%	KEC BANGUNTAPAN
			org			190	5.400.000			190	5.400.000	190	5.400.000	100,00%	100,00%	
	Program peningkatan pelayanan masyarakat					1	16.000.000	1	15.300.000	1	16.000.000	1	16.000.000	100,00%	100,00%	KEC BANTUL
	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan					1	3.500.000	1	3.500.000	1	3.500.000	1	3.500.000	100,00%	100,00%	KEC BANTUL
	Peningkatan pelayanan masyarakat					1	12.500.000	0,944	11.800.000	1	12.500.000	1	12.500.000	100,00%	100,00%	KEC BANTUL
	Program peningkatan pelayanan masyarakat		Angka	85	22.400.000	85	22.050.000				22.050.000	0	22.050.000	0,00%	100,00%	KEC DLINGO
	Peningkatan pelayanan masyarakat	Jumlah rapat,sosialisasi	kali	2	22.400.000	2	22.050.000				22.050.000	0	22.050.000	0,00%	100,00%	KEC DLINGO
	Program peningkatan pelayanan masyarakat	Cakupan pelayanan masyarakat			30.300.000		30.300.000		27.450.000		30.300.000	0	30.300.000		100,00%	KEC JETIS
	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Jumlah Rapat Koordinasi	kali	12	12.800.000		12.000.000	3	11.450.000		12.800.000	0	12.800.000		106,67%	KEC JETIS

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								III		IV						
1	4	5		8		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Peningkatan pelayanan masyarakat	Jumlah Rapat Koordinasi	kali	4	17.500.000		17.500.000	3	16.000.000		17.500.000	0	17.500.000		100,00%	KEC JETIS
	Program peningkatan pelayanan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85 persen		36.500.000	85	36.500.000		35.250.000	85	36.500.000	85	36.500.000	100,00%	100,00%	KEC KRETEK
	Terlaksananya sosialisasi pelayanan bidang kependudukan	Terlaksananya sosialisasi pelayanan bidang kependudukan	kali	1	11.000.000	1	11.000.000	1	11.000.000	1	11.000.000	1	11.000.000	100,00%	100,00%	KEC KRETEK
	Terpenuhinya fasilitas pelayanan masyarakat	Terpenuhinya fasilitas pelayanan masyarakat	kali	1	25.500.000	1	25.500.000	1	24.250.000	1	25.500.000	1	25.500.000	100,00%	100,00%	KEC KRETEK
	Program peningkatan pelayanan masyarakat						6.890.000	91,65	6.315.000	100	6.890.000	100	6.890.000		100,00%	KEC PAJANGAN
	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan						1.890.000	100	1.890.000	100	1.890.000	100	1.890.000		100,00%	KEC PAJANGAN
	Peningkatan pelayanan masyarakat						5.000.000	88,5	4.425.000	100	5.000.000	100	5.000.000		100,00%	KEC PAJANGAN
	Program peningkatan pelayanan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	persen	100	21.450.000	100	21.450.000	51,67	5.775.000	0	2.972.500	0	21.444.000	0,00%	99,97%	KEC PIYUNGAN
	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan		persen	100	14.950.000	100	14.950.000	28,6	4.275.000		945.000	0	14.950.000	0,00%	100,00%	KEC PIYUNGAN
		Jumlah Publikasi potensi wilayah	kali	1	7.500.000	1	7.500.000					0	0	0,00%	0,00%	KEC PIYUNGAN
		Cetak pelayanan	kali	4	1.200.000	4	1.200.000					0	0	0,00%	0,00%	KEC PIYUNGAN
		Jumlah Makan Minum Rapat	dos	150	5.250.000	150	5.250.000					0	0	0,00%	0,00%	KEC PIYUNGAN
		Jumlah Makan Minum Kegiatan	kali	1	1.000.000	1	1.000.000					0	0	0,00%	0,00%	KEC PIYUNGAN
												0	0			KEC PIYUNGAN
	Peningkatan pelayanan masyarakat		persen	100	6.500.000	100	6.500.000	23,08	1.500.000		2.027.500	0	6.494.000	0,00%	99,91%	KEC PIYUNGAN
		Sewa Hosting dan domain	kali	1	500.000	1	500.000					0	0	0,00%	0,00%	KEC PIYUNGAN
		Jumlah Iklan Layanan Masyarakat	kali	3	1.500.000	3	1.500.000					0	0	0,00%	0,00%	KEC PIYUNGAN
		jumlah Cetak pelayanan	kali	5	2.000.000	5	2.000.000					0	0	0,00%	0,00%	KEC PIYUNGAN

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								III		IV						
1	4	5		8		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Jumlah Makan minum kegiatan	dos	250	2.500.000	250	2.500.000					0	0	0,00%	0,00%	KEC PIYUNGAN
	Program peningkatan pelayanan masyarakat	Cakupan pelayanan masyarakat			25.300.000		25.300.000		16.903.400	0	32.800.000	0	32.800.000		129,64%	KEC PUNDOG
	Peningkatan pelayanan masyarakat	Jumlah PATEN dan IJMK		12	25.300.000	12	25.300.000	9	16.903.400	12	32.800.000	12	32.800.000	100,00%	129,64%	KEC PUNDONG
	Program peningkatan pelayanan masyarakat	Jumlah Peserta Bimtek					15.975.000	66,35	10.600.000	100	15.974.930	100	15.974.930		100,00%	KECSANDEN
	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan						15.975.000	66,35	10.600.000	100	15.974.930	100	15.974.930		100,00%	KEC SANDEN
	Program peningkatan pelayanan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat			51.900.000		48.500.000		35.150.000		48.500.000	0	48.500.000		100,00%	KECSEDAYU
	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Jumlah kegiatan	kali	2	1.300.000	4	1.300.000	1	650.000	4	1.300.000	4	1.300.000	100,00%	100,00%	KEC SEDAYU
	Peningkatan pelayanan masyarakat	Jumlah kegiatan	kali	2	50.600.000	4	9.800.000	2	7.300.000	4	9.800.000	4	9.800.000	100,00%	100,00%	KEC SEDAYU
		Jumlah bulan honorarium tenaga kontak	orang bulan	22		22	37.400.000	8	27.200.000	22	37.400.000	22	37.400.000	100,00%	100,00%	KEC SEDAYU
												0	0			
	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	100	6.500.000							0	0			KECSRANDAKAN
	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah peserta sosialisasi	kali	12	6.500.000							0	0			KEC SRANDAKAN
												0	0			
	Program peningkatan pelayanan masyarakat	Nilai IKM	Kali	0,95	31.460.000	1	31.460.000	0,545	17.135.000	1	30.819.000	1	30.819.000	100,00%	97,96%	KEC KASHIHAN
	Peningkatan pelayanan masyarakat	Jumlah orang lembur pelayanan di hari Sabtu	OK	572	31.460.000	572	31.460.000	0,545	17.135.000	572	30.819.000	572	30.819.000	100,00%	97,96%	KEC KASHIHAN
												0	0			
	Program peningkatan pelayanan masyarakat				32.560.000							0	0			KECSEWON
	Peningkatan pelayanan masyarakat	Cakupan peningkatan pelayanan masyarakat	persen	1	32.560.000							0	0			KEC SEWON
												0	0			
	Program peningkatan pelayanan masyarakat	Cakupan Pelayanan Masyarakat			18.525.000		18.525.000		10.253.600		18.524.700	0	18.524.700		100,00%	KEC PLERET

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								III		IV						
1	4	5		8		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Jumlah Dokumen Pelayanan Masyarakat		12	18.525.000	12	18.525.000	9	10.253.600	12	18.524.700	12	18.524.700	100,00%	100,00%	KEC PLERET
	Program peningkatan pelayanan masyarakat				37.765.000		37.765.000	9	13.297.500		33.585.000	0	33.585.000		88,93%	KEC PANDAK
	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan			12	23.650.000	12	23.650.000	9	13.297.500	12	20.710.000	12	20.710.000	100,00%	87,57%	KEC PANDAK
	Peningkatan pelayanan masyarakat			12	14.115.000	12	14.115.000			12	12.875.000	12	12.875.000	100,00%	91,22%	KEC PANDAK
	Program peningkatan pelayanan masyarakat	Cakupan Pelayanan masyarakat	0,82	162	49.900.000	162	49.900.000	153	44.675.000	162	49.900.000	162	49.900.000	100,00%	100,00%	KEC IMOIRI
	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Jumlah Rakor Kependudukan	ok	40	1.400.000	40	1.400.000	40	1.400.000	40	1.400.000	40	1.400.000	100,00%	100,00%	KEC IMOIRI
	Peningkatan pelayanan masyarakat			122	48.500.000	122	48.500.000	113	43.275.000	122	48.500.000	122	48.500.000	100,00%	100,00%	KEC IMOIRI
		Jumlah rakord, Monitoring dan Sosialisasi IUMK	kali	4		4		4		4		4	0	100,00%		KEC IMOIRI
		Jumlah Studi Banding PATEN	kali	1		1		1		1		1	0	100,00%		KEC IMOIRI
		Jumlah Jasa Narasumber (Kesehatan, PATEN, IUMK)	ok	8		8		6		8		8	0	100,00%		KEC IMOIRI
		Jumlah Pengadaan Snack dan Minum Pengunjung PATEN	bulan	11		11		9		11		11	0	100,00%		KEC IMOIRI
		Jumlah Penyuluhan /Pembinaan Kesehatan Masyarakat	kali	4		4		3		4		4	0	100,00%		KEC IMOIRI
		Jumlah Rakord PSN	kali	11		11		8		11		11	0	100,00%		KEC IMOIRI
		Jumlah kaos Seragam PSN	potong	80		80		80		80		80	0	100,00%		KEC IMOIRI
		Jumlah Rakord dan Sosialisasi PATEN	kali	3		3		2		3		3	0	100,00%		KEC IMOIRI
	Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan						194.490.000				194.490.000	0	194.490.000		100,00%	KEC BAMBANGLI PURO

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								III		IV								
1	4	5		8		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya					35.590.000				35.590.000			0	35.590.000		100,00%	KEC BAMBANGLIPURO
	Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini						5.000.000				5.000.000			0	5.000.000		100,00%	KEC BAMBANGLIPURO
	Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan						14.050.000				2.000.000			0	14.050.000		100,00%	KEC BAMBANGLIPURO
	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan						28.150.000				28.150.000			0	28.150.000		100,00%	KEC BAMBANGLIPURO
	Pembinaan organisasi kepemudaan						3.000.000				3.000.000			0	3.000.000		100,00%	KEC BAMBANGLIPURO
	Fasilitas penyelenggaraan festival budaya daerah						12.000.000				12.000.000			0	12.000.000		100,00%	KEC BAMBANGLIPURO
	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi						60.000.000				55.450.000			0	60.000.000		100,00%	KEC BAMBANGLIPURO
	Penyuluhan pemberantasan penyakit masyarakat						3.900.000				3.900.000			0	3.900.000		100,00%	KEC BAMBANGLIPURO
	Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba						5.000.000				5.000.000			0	5.000.000		100,00%	KEC BAMBANGLIPURO
	Fasilitas kelancaran pelaksanaan demokrasi						12.000.000				12.000.000			0	12.000.000		100,00%	KEC BAMBANGLIPURO
	Penyelenggaraan Lomba Desa						3.000.000				3.000.000			0	3.000.000		100,00%	KEC BAMBANGLIPURO
	Bantul Ekspo dan Karnaval						8.800.000				8.800.000			0	8.800.000		100,00%	KEC BAMBANGLIPURO
	Pengelolaan Kesehatan Masyarakat						4.000.000				4.000.000			0	4.000.000		100,00%	KEC BAMBANGLIPURO
														0	0			
	Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan	Cakupan pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan	Persen			118.655.000	90	118.655.000	90	104.255.000	100	118.655.000	100	118.655.000	111,11%	100,00%	KEC BANGUNTAPAN	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								III		IV						
1	4	5		8		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya	Pembinaan TKPK dan pelatihan Gakin	kali	8	47.680.000	8	47.680.000	8	42.005.000	8	47.680.000	8	47.680.000	100,00%	100,00%	KEC BANGUNTAPAN
		Penggandaan	lembar	2000	300.000	2000	300.000	1500	225.000	2000	300.000	2000	300.000	100,00%	100,00%	KEC BANGUNTAPAN
		Makan minum rapat	om	200	7.000.000	200	7.000.000	150	5.250.000	200	7.000.000	200	7.000.000	100,00%	100,00%	KEC BANGUNTAPAN
		Makan minum pelaks keg	om	768	26.880.000	768	26.880.000	658	23.030.000	768	26.880.000	768	26.880.000	100,00%	100,00%	KEC BANGUNTAPAN
		Jasa Narasumber	jpl	18	4.500.000	18	4.500.000	18	4.500.000	18	4.500.000	18	4.500.000	100,00%	100,00%	KEC BANGUNTAPAN
		Transport Peserta	org	300	9.000.000	300	9.000.000	300	9.000.000	300	9.000.000	300	9.000.000	100,00%	100,00%	KEC BANGUNTAPAN
												0	0			KEC BANGUNTAPAN
	Pembinaan organisasi kepemudaan	Pembinaan Karang Taruna	kali	8	16.875.000	8	16.875.000	7	15.300.000	8	16.875.000	8	16.875.000	100,00%	100,00%	KEC BANGUNTAPAN
		Penggandaan	lembar	1400	210.000	1400	210.000	1400	210.000	1400	210.000	1400	210.000	100,00%	100,00%	KEC BANGUNTAPAN
		Dekorasi	paket	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0			KEC BANGUNTAPAN
		Sewa mobilitas darat	unit	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0			KEC BANGUNTAPAN
		Makan minum rapat	om	180	6.300.000	180	6.300.000	135	4.725.000	180	6.300.000	180	6.300.000	100,00%	100,00%	KEC BANGUNTAPAN
		Makan minum pelaks keg	om	129	4.515.000	129	4.515.000	129	4.515.000	129	4.515.000	129	4.515.000	100,00%	100,00%	KEC BANGUNTAPAN
		Pakaian kaos/training	stel	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0			KEC BANGUNTAPAN
		Pakaian seragam paskibra	stel	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0			KEC BANGUNTAPAN
		Jasa Narasumber	jpl	9	2.250.000	9	2.250.000	9	2.250.000	9	2.250.000	9	2.250.000	100,00%	100,00%	KEC BANGUNTAPAN
		Transport Peserta	org	120	3.600.000	120	3.600.000	120	3.600.000	120	3.600.000	120	3.600.000	100,00%	100,00%	KEC BANGUNTAPAN
												0	0			KEC BANGUNTAPAN
	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	SKJ bersama muspika dan pamong desa	kali	11	54.100.000	11	54.100.000	9	46.950.000	11	54.100.000	11	54.100.000	100,00%	100,00%	KEC BANGUNTAPAN
		Hadiah	paket	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0			KEC BANGUNTAPAN
		Doorprize	paket	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0			KEC BANGUNTAPAN
		Sewa Tenda	unit	1	4.000.000	8	4.000.000	8	4.000.000	8	4.000.000	8	4.000.000	100,00%	100,00%	KEC BANGUNTAPAN
		Sewa Sound System	unit	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	100,00%	100,00%	KEC BANGUNTAPAN
		Sewa Panggung	unit	1	3.500.000	1	3.500.000	1	3.500.000	1	3.500.000	1	3.500.000	100,00%	100,00%	KEC BANGUNTAPAN
		Makan minum rapat	om	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0			KEC BANGUNTAPAN
		Makan minum pelaks keg	om	2020	43.300.000	2020	43.300.000	1710	36.450.000	2020	43.300.000	2020	43.300.000	100,00%	100,00%	KEC BANGUNTAPAN
		Jasa Narasumber/Instruktur	org	12	1.800.000	12	1.800.000	10	1.500.000	12	1.800.000	12	1.800.000	100,00%	100,00%	KEC BANGUNTAPAN

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								III		IV						
1	4	5		8		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					1.800.000											
	Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan	Cakupan Pembinaan sosial kemasyarakatan	Persen	81	99.495.000	81	99.495.000				99.495.000	0	99.495.000	0,00%	100,00%	KEC DLINGO
	Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah rapat koordinasi/gebyar paud kecamatan	kali	1	5.950.000	1	5.950.000				5.950.000	0	5.950.000	0,00%	100,00%	KEC DLINGO
	Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan	Jumlah rapat dan pembinaan	kali	2	19.950.000	2	19.950.000				19.950.000	0	19.950.000	0,00%	100,00%	KEC DLINGO
	Fasilitas penyelenggaraan festival budaya daerah	Jumlah kegiatan Gebyar budaya daerah	kali	1	34.875.000	1	34.875.000				34.875.000	0	34.875.000	0,00%	100,00%	KEC DLINGO
	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	Jumlah senam Rutin dan rakor OR	kali	22	21.500.000	22	21.500.000				21.500.000	0	21.500.000	0,00%	100,00%	KEC DLINGO
	Penyuluhan pemberantasan penyakit masyarakat	Jumlah rakor Pemberantasan Penyakit Masyarakat	kali	2	5.600.000	2	5.600.000				5.600.000	0	5.600.000	0,00%	100,00%	KEC DLINGO
	Fasilitas kelancaran pelaksanaan demokrasi	Jumlah rakor dan pemantauan Pemilihan pamong desa pamong	kali	2	5.600.000	2	5.600.000				5.600.000	0	5.600.000	0,00%	100,00%	KEC DLINGO
	Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak	Jumlah rakor perlindungan perempuan dan anak	kali	2	6.020.000	2	6.020.000				6.020.000	0	6.020.000	0,00%	100,00%	KEC DLINGO
	Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan	Cakupan pelayanan sosial kemasyarakatan			79.950.000		79.950.000	27	63.950.000	0	79.950.000	0	79.950.000		100,00%	KEC JETIS
	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya	Jumlah Rapat koordinasi	bulan	12	11.800.000		11.800.000	9	8.800.000		11.800.000	0	11.800.000		100,00%	KEC JETIS
	Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan	Jumlah Rapat koordinasi	bulan	12	23.500.000		235.000.000	9	14.450.000		23.500.000	0	23.500.000		10,00%	KEC JETIS
	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Jumlah Pelaksanaan Pelatihan	kali	1	10.000.000		10.000.000	1	10.000.000		10.000.000	0	10.000.000		100,00%	KEC JETIS
	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	Jumlah Pelaksanaan SKJ bersama	bulan	5	23.750.000		23.750.000	4	19.800.000		23.750.000	0	23.750.000		100,00%	KEC JETIS

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								III		IV						
1	4	5		8		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyuluhan pemberantasan penyakit masyarakat	Jumlah Sosialisasi Pekat	kali	4	10.900.000		1.090.000	4	10.900.000		10.900.000	0	10.900.000		1000,00 %	KEC JETIS
	Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan	Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan	100persen	100	144.100.000	100	144.075.000		114.010.000	100	144.075.000	100	144.075.000	100,00%	100,00%	KEC KRETEK
	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya	jumlah kordinasi pengentasan kemiskinan	kali	1	8.000.000	1	8.000.000	1	5.462.500	1	8.000.000	1	8.000.000	100,00%	100,00%	KEC KRETEK
	Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini	JUmlah koordinasi dan fasilitasi PAUD dan TK	kali	4	8.000.000	4	8.000.000	4	1.950.000	4	8.000.000	4	8.000.000	100,00%	100,00%	KEC KRETEK
	Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan	Jumlah Koordinasi kerukuran masyarakat beragama	kali	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	100,00%	100,00%	KEC KRETEK
	Pembinaan organisasi kepemudaan	jumlah kegiatan koordinasi dan fasilitasi kepemudaan	kali	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	100,00%	100,00%	KEC KRETEK
	Fasilitas penyelenggaraan festival budaya daerah	Jumlah penyelenggaraan Pembinaan Seniman dan Budayawan	kali	1	29.000.000	1	29.000.000	1	29.000.000	1	29.000.000	1	29.000.000	100,00%	100,00%	KEC KRETEK
	Pembinaan manajemen organisasi olahraga	Jumlah penyelenggaraan Pembinaan manajemen olahraga	kali	1	9.000.000	1	9.000.000	1	4.200.000	1	9.000.000	1	9.000.000	100,00%	100,00%	KEC KRETEK
	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	jumlah peyelenggaraan senam SKJ k Kecamatan	kali	1	62.000.000	1	61.975.000	1	49.937.500	1	61.975.000	1	61.975.000	100,00%	100,00%	KEC KRETEK
	Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	Jumlah Sosialisasi pencegahan penyalahgunaan Narkoba	kali	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	100,00%	100,00%	KEC KRETEK
	Fasilitasi kelancaran pelaksanaan demokrasi	Jumlah peleksanaan pemilihan lurah/pamong desa	desa	5	9.100.000	5	9.100.000	5	4.460.000	5	9.100.000	5	9.100.000	100,00%	100,00%	KEC KRETEK
	Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan						213.150.000	80,71	172.025.000	89,9015	191.625.000	89,9015	191.625.000		89,90%	KEC PAJANGAN

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								III		IV						
1	4	5		8		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan					5.100.000	0	-	91,1765	4.650.000	91,1765	4.650.000		91,18%	KEC PAJANGAN	
	Pembinaan organisasi kepemudaan					158.825.000	98,1	155.800.000	98,0954	155.800.000	98,0954	155.800.000		98,10%	KEC PAJANGAN	
	Fasilitas penyelenggaraan festival budaya daerah					19.950.000	33,08	6.600.000	56,6416	11.300.000	56,6416	11.300.000		56,64%	KEC PAJANGAN	
	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi					25.525.000	23,02	5.875.000	63,1734	16.125.000	63,1734	16.125.000		63,17%	KEC PAJANGAN	
	Penyelenggaraan Lomba Desa					3.750.000	100	3.750.000	100	3.750.000	100	3.750.000		100,00%	KEC PAJANGAN	
	Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan	Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	persen	100	120.900.000	100	107.900.000	294,5	64.375.000	0	10.950.000	0	105.350.000	0,00%	97,64%	KEC PIYUNGAN
	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya		persen	100	7.000.000	100	7.000.000	37,5	2.625.000	-	0	7.000.000	0,00%	100,00%	KEC PIYUNGAN	
		Jumlah Makan minum rapat	dos	200	7.000.000	200	7.000.000					0	0	0,00%	0,00%	KEC PIYUNGAN
												0	0			KEC PIYUNGAN
	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan		persen	100	11.700.000	100	11.700.000	49,15	5.750.000		-	0	11.700.000	0,00%	100,00%	KEC PIYUNGAN
		Cetak	keg	1	200.000	1	200.000					0	0	0,00%	0,00%	KEC PIYUNGAN
		Jumlah Makan minum rapat	dos	100	3.500.000	100	3.500.000					0	0	0,00%	0,00%	KEC PIYUNGAN
		Jumlah Makan minum kegiatan	dos	100	3.500.000	100	3.500.000					0	0	0,00%	0,00%	KEC PIYUNGAN
		Jasa nara Sumber	jpl	4	1.800.000	4	1.800.000					0	0	0,00%	0,00%	KEC PIYUNGAN
		Jasa Peserta	ok	90	2.700.000	90	2.700.000					0	0	0,00%	0,00%	KEC PIYUNGAN
												0	0			KEC PIYUNGAN
	Fasilitas penyelenggaraan festival budaya daerah		persen	100	23.500.000	100	23.500.000	55,74	13.100.000		1.375.000	0	20.950.000	0,00%	89,15%	KEC PIYUNGAN
		Penggandaan	lembar	1000	200.000	1000	200.000					0	0	0,00%	0,00%	KEC PIYUNGAN
		Sewa kendaraan	unit	4	4.000.000	4	4.000.000					0	0	0,00%	0,00%	KEC PIYUNGAN
		Sewa pakaian adat/tradisional	keg	1	4.500.000	1	4.500.000					0	0	0,00%	0,00%	KEC PIYUNGAN

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								III		IV						
1	4	5		8		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Makan minum rapat	dos	100	3.500.000	100	3.500.000					0	0	0,00%	0,00%	KEC PIYUNGAN
		Makan minum kegiatan	dos	300	10.500.000	300	10.500.000					0	0	0,00%	0,00%	KEC PIYUNGAN
		Jasa Tenaga Harian Lepas	oh	8	800.000	8	800.000					0	0	0,00%	0,00%	KEC PIYUNGAN
												0	0			KEC PIYUNGAN
	Pembinaan manajemen organisasi olahraga		persen	100	5.550.000	100	5.550.000	68,92	3.825.000		-	0	5.550.000	0,00%	100,00%	KEC PIYUNGAN
		Sewa kendaraan	unit	2	1.000.000	2	1.000.000					0	0	0,00%	0,00%	KEC PIYUNGAN
		Makan minum pelaksanaan kegiatan	ok	130	4.550.000	130	4.550.000					0	0	0,00%	0,00%	KEC PIYUNGAN
												0	0			KEC PIYUNGAN
	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi		persen	100	62.650.000	100	49.650.000	58,18	36.450.000		6.950.000	0	49.650.000	0,00%	100,00%	KEC PIYUNGAN
		Honor pendamping kegiatan	oh	50	1.300.000	50	1.300.000					0	0	0,00%	0,00%	KEC PIYUNGAN
		Dekorasi	keg	1	500.000	1	500.000					0	0	0,00%	0,00%	KEC PIYUNGAN
		Cetak	keg	1	250.000	1	250.000					0	0	0,00%	0,00%	KEC PIYUNGAN
		Sewa kendaraan	unit	2	1.000.000	0	-					0	0			KEC PIYUNGAN
		Sewa meja kursi	unit	100	250.000	100	250.000					0	0	0,00%	0,00%	KEC PIYUNGAN
		sewa tenda	unit	4	3.200.000	4	3.200.000					0	0	0,00%	0,00%	KEC PIYUNGAN
		sewa sound system	unit	5	3.500.000	5	3.500.000					0	0	0,00%	0,00%	KEC PIYUNGAN
		Makan Minum Rapat	dos	135	4.800.000	135	4.800.000					0	0	0,00%	0,00%	KEC PIYUNGAN
		Makan Minum Kegiatan	dos	1500	35.950.000	1400	23.950.000					0	0	0,00%	0,00%	KEC PIYUNGAN
		pengadaan kaos Olah raga	potong	100	7.500.000	100	7.500.000					0	0	0,00%	0,00%	KEC PIYUNGAN
		Jasa Instruktur SKj	jpl	6	2.400.000	6	2.400.000					0	0	0,00%	0,00%	KEC PIYUNGAN
		Jasa kesenian	keg	1	2.000.000	1	2.000.000					0	0	0,00%	0,00%	KEC PIYUNGAN
												0	0			KEC PIYUNGAN
	Penyuluhan pemberantasan penyakit masyarakat		persen	100	10.500.000	100	10.500.000	25	2.625.000		2.625.000	0	10.500.000	0,00%	100,00%	KEC PIYUNGAN
		Makan Minum Rapat	dos	300	10.500.000	300	10.500.000					0	0	0,00%	0,00%	KEC PIYUNGAN
	Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan	Cakupan pelayanan sosial kemasyarakatan			128.490.000		128.490.000		76.555.000	0	115.695.000	0	115.695.000		90,04%	KEC PUNDONG
	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan RMKS lainnya	Jumlah pembinaan TKPK		2	6.825.000	2	6.825.000	2	3.325.000	2	6.475.000	2	6.475.000	100,00%	94,87%	KEC PUNDONG

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								III		IV						
1	4	5		8		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Jumlah pelatihan kewirausahaan		3	7.825.000	3	7.825.000	2	3.700.000	3	7.820.000	3	7.820.000	100,00%	99,94%	KEC PUNDONG
	Fasilitas penyelenggaraan festival budaya daerah	Jumlah pelaksanaan lomba mocopat dan panembromo, pentas seni 17 an, dan hari jadi Bantul		3	29.625.000	3	29.625.000	2	10.775.000	3	28.175.000	3	28.175.000	100,00%	95,11%	KEC PUNDONG
	Pembinaan manajemen organisasi olahraga	Jumlah pengiriman peserta lomba olahraga		4	8.000.000	4	8.000.000	3	6.075.000	4	7.850.000	4	7.850.000	100,00%	98,13%	KEC PUNDONG
	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	Jumlah SKJ rutin dan gerak jalan bersama muspika		12	55.990.000	12	55.990.000	9	38.590.000	12	45.190.000	12	45.190.000	100,00%	80,71%	KEC PUNDONG
	Bantul Ekspo dan Karnaval	Keikutsertaan Bantul Expo		1	7.800.000	1	7.800.000	1	7.800.000	1	7.800.000	1	7.800.000	100,00%	100,00%	KEC PUNDONG
	Pengelolaan Kesehatan Masyarakat	Pelaksanaan Pola Hidup Sehat, Bumi Rist, PSN, dan lomba UKS		10	12.425.000	10	12.425.000	7	6.290.000	10	12.385.000	10	12.385.000	100,00%	99,68%	KEC PUNDONG
	Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan						120.250.000		90.455.000		120.219.930	0	120.219.930		99,97%	KEC SANDEN
	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya	Jumlah Peserta Bimtek TPK dan TKPK					10.000.000	59,3	5.930.000	100	9.995.000	100	9.995.000		99,95%	KEC SANDEN
	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Pembinaan Kewirausahaan					20.000.000	93,75	18.750.000	100	20.000.000	100	20.000.000		100,00%	KEC SANDEN
	Fasilitas penyelenggaraan festival budaya daerah	Pentas budaya					45.000.000	84,96	38.230.000	100	44.979.930	100	44.979.930		99,96%	KEC SANDEN
	Pembinaan manajemen organisasi olahraga	Jumlah Pembinaan Kelompok Olahraga					15.000.000	87,3	13.095.000	100	14.995.000	100	14.995.000		99,97%	KEC SANDEN
	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	SKJ dan Car free days					15.250.000	81,64	12.450.000	100	15.250.000	100	15.250.000		100,00%	KEC SANDEN
	Penyuluhan pemberantasan penyakit masyarakat	Bebas miras dan narkoba					15.000.000	13,33	2.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000		100,00%	KEC SANDEN
		Penyelenggaraan Rakor														
	Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan	Cakupan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan			59.550.000		59.550.000		55.025.000		59.550.000	0	59.550.000		100,00%	KEC SEDAYU
	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya	Jumlah kegiatan	kali	4	13.050.000	4	13.050.000	3	9.525.000	4	13.050.000	4	13.050.000	100,00%	100,00%	KEC SEDAYU
	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	Jumlah kegiatan	kali	6	46.500.000	4	46.500.000	1	45.500.000	4	46.500.000	4	46.500.000	100,00%	100,00%	KEC SEDAYU
												0	0			
	Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan	Cakupan pembinaan sosial kemasyarakatan	Persen	90	76.337.725							0	0			KEC SRANDAKAN

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								III		IV						
1	4	5		8		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT PMKS lainnya	jumlah koordinasi	kali	3	12.474.975							0	0			KEC SRANDAKAN
	Pembinaan organisasi kepemudaan	jumlah koordinasi	kali	3	9.999.850							0	0			KEC SRANDAKAN
	Fasilitas Penyelenggaraan festival budaya daerah	rakor dan festival budaya	kali	6	20.749.900							0	0			KEC SRANDAKAN
	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	jumlah pelaksanaan SKJ	kali	11	16.500.000							0	0			KEC SRANDAKAN
	Penyuluhan pemberantasan penyakit masyarakat	jumlah rakor	kali	3	9.116.750							0	0			KEC SRANDAKAN
	Fasilitasi kelancaran pelaksanaan demokrasi	rakor dan monitoring	kali	1	2.500.000							0	0			KEC SRANDAKAN
	Penyelenggaraan lomba desa	jumlah lomba desa	kali	1	4.996.250							0	0			KEC SRANDAKAN
	Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan	Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan		0,95	138.297.500	1724	133.447.500	0,823	113.820.000	1724	132.433.500	1724	132.433.500	100,00%	99,24%	KEC KASIHAN
	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya	Jumlah rakor/sosialisasi peningkatan (capacity building) petugas sosial	Kali	2	8.930.000	2	8.930.000	0,653	5.827.500	2	8.930.000	2	8.930.000	100,00%	100,00%	KEC KASIHAN
		Jumlah petugas/pendamping sosial	Orang	100		100				100		100	0			KEC KASIHAN
	Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan	Jumlah kegiatan keimanan dan ketaqwaan	Kali	2	27.925.000	2	27.925.000	0,444	12.400.000	2	27.911.000	2	27.911.000	100,00%	99,95%	KEC KASIHAN
		Jumlah peserta kegiatan keimanan dan ketaqwaan	OK	300		300				300		300	0	100,00%		KEC KASIHAN
	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Jumlah fasilitasi pengurusan jin IUMK	Kali	3	7.600.000	3	7.600.000	1	7.600.000	3	7.600.000	3	7.600.000	100,00%	100,00%	KEC KASIHAN
		Jumlah peserta fasilitasi pengurusan jin IUMK kewirausahaan	Kali	100		100				100		100	0	100,00%		KEC KASIHAN
	Fasilitas penyelenggaraan festival budaya daerah	Jumlah peserta festival budaya dari kecamatan	Orang	82	14.010.000	82	14.010.000	1	14.010.000	82	14.010.000	82	14.010.000	100,00%	100,00%	KEC KASIHAN
		Jumlah peserta festival budaya dari desa desa	Orang	128		128				128		128	0	100,00%		KEC KASIHAN
	Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	Jumlah peserta fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba	Orang	100	9.700.000	100	4.850.000	0,5	4.850.000	100	4.850.000	100	4.850.000	100,00%	100,00%	KEC KASIHAN
		Jumlah fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba	Kali	2		2				2		2	0	100,00%		KEC KASIHAN
	Penyelenggaraan Lomba Desa	Jumlah pendampingan kegiatan Lomba Desa	Kali	2	10.250.000	2	10.250.000	1	10.250.000	2	10.250.000	2	10.250.000	100,00%	100,00%	KEC KASIHAN
		Jumlah Rakor Persiapan Lomba Desa	Kali	1		1				1		1	0	100,00%		KEC KASIHAN
	Bantul Ekspo dan Karnaval	Jumlah rakor persiapan keikutsertaan Bantul Ekspo	Kali	1	20.462.500	1	20.462.500	1	20.462.500	1	20.462.500	1	20.462.500	100,00%	100,00%	KEC KASIHAN
		Jumlah keikutsertaan dalam kegiatan Bantul Ekspo	Kali	1		1				1		1	0	100,00%		KEC KASIHAN
	Pengelolaan Kesehatan Masyarakat	Jumlah peserta senam masal	Orang	1000	39.420.000	1000	39.420.000	0,975	38.420.000	1000	38.420.000	1000	38.420.000	100,00%	97,46%	KEC KASIHAN
		Jumlah rakor kegiatan senam masal	Kali	2		2				2		2	0	100,00%		KEC KASIHAN
	Program pembinaan sosial				150.825.000							0	0			KEC SEWON

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								III		IV						
1	4	5		8		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	kemasyarakatan kecamatan															
	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya	Jumlah rakor TKPK	OK	300	5.250.000							0	0			KEC SEWON
	Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah rakor GOPTK	kali	150	2.625.000							0	0			KEC SEWON
	Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan	Jumlah pengiriman lomba	kali	3	10.500.000							0	0			KEC SEWON
	Pembinaan organisasi kepemudaan	Jumlah undangan sosialisasi Napza	OK	160	10.200.000							0	0			KEC SEWON
	Fasilitas penyelangaran festival budaya daerah	Jumlah gelar seni dan budaya	kali	6	28.525.000							0	0			KEC SEWON
	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	Jumlah senam yang dilaksanakan	kali	12	70.000.000							0	0			KEC SEWON
	Fasilitasi kelancaran pelaksanaan demokrasi	Nihil	Nihil	-	-							0	0			KEC SEWON
	Penyelenggaraan Lomba Desa	Jumlah makan minum pelaksanaan kegiatan	OK	225	6.125.000							0	0			KEC SEWON
	Bantul Ekspo dan Karnaval	Jumlah pameran yang diikuti	kali	1	11.650.000							0	0			KEC SEWON
	Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi	Jumlah undangan sosialisai UMK	Orang	50	5.950.000							0	0			KEC SEWON
	Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan	Cakupan pelayanan sosial kemasyarakatan			126.394.000		131.394.000		37.623.600		104.279.000	0	104.279.000		79,36%	KEC PLERET
	Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Rakor dan Pembinaan GOPTK		115	7.125.000	115	7.125.000	20	1.400.100		6.675.000	0	6.675.000	0,00%	93,68%	KEC PLERET
	Pembinaan organisasi kepemudaan	Jumlah Rakor Organisasi Kepemudaan		100	12.825.000	100	12.825.000		-		12.825.000	0	12.825.000	0,00%	100,00%	KEC PLERET
	Fasilitas penyelangaran festival budaya daerah	Jumlah Gelar Seni Budaya		6	30.000.000	6	30.000.000		10.400.000		13.400.000	0	13.400.000	0,00%	44,67%	KEC PLERET
	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	Jumlah Senam Kesegaran Jasmeni		6	53.529.000	6	58.529.000	6	20.536.000		51.829.000	0	51.829.000	0,00%	88,55%	KEC PLERET
	Pengelolaan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Koordinasi Pemantauan Jentik/PSN		235	22.915.000	235	22.915.000	194	5.287.500		19.550.000	0	19.550.000	0,00%	85,32%	KEC PLERET
	Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan				101.474.500		101.474.500	448	54.757.500		85.924.500	0	85.924.500		84,68%	KEC PANDAK
	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya		om	820	16.400.000	820	16.400.000	425	8.500.000	650	13.000.000	650	13.000.000	79,27%	79,27%	KEC PANDAK
	Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini				-							0	0			KEC PANDAK
	Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan		kali	12	39.444.500	12	39.444.500	9	19.627.500	12	31.412.500	12	31.412.500	100,00%	79,64%	KEC PANDAK
	Pembinaan organisasi kepemudaan		kali	4	17.950.000	4	17.950.000	3	8.525.000	4	17.450.000	4	17.450.000	100,00%	97,21%	KEC PANDAK
	Fasilitas penyelangaran festival budaya daerah		kali	12	12.150.000	12	12.150.000	9	7.730.000	12	9.212.000	12	9.212.000	100,00%	75,82%	KEC PANDAK
	Fasilitasi Pencegahan		kali	3	15.530.000	3	15.530.000	2	10.375.000	3	14.850.000	3	14.850.000	100,00%	95,62%	KEC PANDAK

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								III		IV						
1	4	5		8		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyalahgunaan Narkoba				15.530.000											
	Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan	Cakupan pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan	0,9	1379	76.800.000	1379	76.800.000	997	68.350.000	1379	76.800.000	1379	76.800.000	100,00%	100,00%	KEC IMOIRI
	Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah rakord dan Pembinaan Himpaudi dan Forum PAUD	ok	600	10.000.000	600	10.000.000	350	6.000.000	600	10.000.000	600	10.000.000	100,00%	100,00%	KEC IMOIRI
	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Jumlah Rakord dan Pembinaan UMKM	ok	120	9.000.000	120	9.000.000	120	9.000.000	120	9.000.000	120	9.000.000	100,00%	100,00%	KEC IMOIRI
	Pembinaan organisasi kepemudaan	Jumlah Rakord dan Pembinaan Karang Taruna, Pramuka, PSM dan Fonaba	ok	275	8.000.000	275	8.000.000	144	5.750.000	275	8.000.000	275	8.000.000	100,00%	100,00%	KEC IMOIRI
	Fasilitas penyelenggaraan festival budaya daerah	Jumlah Gelar Budaya Daerah	kegiatan	4	23.000.000	4	23.000.000	4	22.100.000	4	23.000.000	4	23.000.000	100,00%	100,00%	KEC IMOIRI
	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	Jumlah Pelaksanaan Olahraga	ok	232	13.300.000	232	13.300.000	232	13.300.000	232	13.300.000	232	13.300.000	100,00%	100,00%	KEC IMOIRI
	Penyuluhan pemberantasan penyakit masyarakat	Jumlah Rakord dan Pembinaan PMKS	ok	75	5.000.000	75	5.000.000	75	5.000.000	75	5.000.000	75	5.000.000	100,00%	100,00%	KEC IMOIRI
	Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	Jumlah Rakord dan Penjangkauan Narkoba terhadap siswa di sekolah	ok	70	4.500.000	70	4.500.000	70	4.500.000	70	4.500.000	70	4.500.000	100,00%	100,00%	KEC IMOIRI
	Fasilitasi kelancaran pelaksanaan demokrasi	Jumlah Pelaksanaan Pemilihan Lurah dan Pamong Desa	kali	3	4.000.000	3	4.000.000	2	2.700.000	3	4.000.000	3	4.000.000	100,00%	100,00%	KEC IMOIRI
	Program Pemerintahan Umum Kecamatan				146.277.000		146.277.000				146.277.000	0	146.277.000		100,00%	KEC BAMBANGLIPIURO
	Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan				12.467.000		12.467.000		12.467.000		12.467.000	0	12.467.000		100,00%	KEC BAMBANGLIPIURO
	Sosialisasi Sistem Pendaftaran Tanah				4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000	0	4.000.000		100,00%	KEC BAMBANGLIPIURO
	Pengendalian Keamanan Lingkungan				3.300.000		3.300.000		3.300.000		3.300.000	0	3.300.000		100,00%	KEC BAMBANGLIPIURO
	Penyebarluasan dan Sosialisasi Informasi Pendidikan				4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000	0	4.000.000		100,00%	KEC BAMBANGLIPIURO
	Pendampingan dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Desa				5.010.000		5.010.000		3.945.000		5.010.000	0	5.010.000		100,00%	KEC BAMBANGLIPIURO
	Rapat Koordinasi Muspika				33.000.000		33.000.000		24.912.500		33.000.000	0	33.000.000		100,00%	KEC BAMBANGLIPIURO
	Rakorpem Desa				4.500.000		4.500.000		4.500.000		4.500.000	0	4.500.000		100,00%	KEC BAMBANGLIPIURO

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								III		IV						
1	4	5		8		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa				60.000.000		60.000.000		59.631.075		60.000.000	0	60.000.000		100,00%	KEC BAMBANGLIPIURO
	Penyusunan Profil Desa, Monografi Kecamatan				4.000.000		4.000.000		2.000.000		4.000.000	0	4.000.000		100,00%	KEC BAMBANGLIPIURO
	Peningkatan Pemberdayaan Keagamaan				6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000	0	6.000.000		100,00%	KEC BAMBANGLIPIURO
	Intensifikasi dan Eksistensi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah				3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	0	3.000.000		100,00%	KEC BAMBANGLIPIURO
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup				4.000.000		4.000.000		2.000.000		4.000.000	0	4.000.000		100,00%	KEC BAMBANGLIPIURO
	Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah				3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	0	3.000.000		100,00%	KEC BAMBANGLIPIURO
	Program Pemerintahan Umum Kecamatan	Cakupan pemerintahan umum kecamatan	Persen		252.160.000	90	267.160.000	90	222.653.750	100	266.360.000	100	266.360.000	111,11%	99,70%	KEC BANGUNTAPAN
	Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	Musrenbang tingkat Kecamatan	kali	1	21.250.000	1	21.250.000	1	21.250.000	1	21.250.000	1	21.250.000	100,00%	100,00%	KEC BANGUNTAPAN
		Dekorasi	paket	1	400.000	1	400.000	1	400.000	1	400.000	1	400.000	100,00%	100,00%	KEC BANGUNTAPAN
		Penggandaan	lembar	5000	750.000	5000	750.000	5000	750.000	5000	750.000	5000	750.000	100,00%	100,00%	KEC BANGUNTAPAN
		Sewa meja kursi	unit	200	600.000	200	600.000	200	600.000	200	600.000	200	600.000	100,00%	100,00%	KEC BANGUNTAPAN
		Sewa tenda	unit	1	2.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000	100,00%	100,00%	KEC BANGUNTAPAN
		Makan minum rapat	om	500	17.500.000	500	17.500.000	500	17.500.000	500	17.500.000	500	17.500.000	100,00%	100,00%	KEC BANGUNTAPAN
												0	0			KEC BANGUNTAPAN
	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Sosialisasi bidang tranlib	kali	12	67.300.000	12	82.300.000	9	50.475.000	12	82.300.000	12	82.300.000	100,00%	100,00%	KEC BANGUNTAPAN
		Penggandaan	lembar	2000	300.000	5000	750.000	1500	225.000	5000	750.000	5000	750.000	100,00%	100,00%	KEC BANGUNTAPAN
		Makan minum rapat	om	200	7.000.000	200	7.000.000	150	5.250.000	200	7.000.000	200	7.000.000	100,00%	100,00%	KEC BANGUNTAPAN
		Makan minum pelaks keg	om	1200	42.000.000	1390	48.650.000	900	31.500.000	1390	48.650.000	1390	48.650.000	100,00%	100,00%	KEC BANGUNTAPAN
		Jasa Narasumber	jpl	72	18.000.000	82	20.500.000	54	13.500.000	82	20.500.000	82	20.500.000	100,00%	100,00%	KEC BANGUNTAPAN
			org			190	5.400.000			190	5.400.000	190	5.400.000	100,00%	100,00%	KEC BANGUNTAPAN
	Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa	Upacara peringatan hari besar nasional dan pembinaan paskibra kec		8	138.225.000							0	0			KEC BANGUNTAPAN
		Honorarium tim pengadaan barang dan jasa	kali	2	650.000	8	138.225.000	7	131.793.750	8	137.425.000	8	137.425.000	100,00%	99,42%	KEC BANGUNTAPAN
		Cetak	ob	100	700.000	2	650.000	2	650.000	2	650.000	2	650.000	100,00%	100,00%	KEC BANGUNTAPAN
		Penggandaan	lembar	3500	525.000	100	700.000	100	700.000	100	700.000	100	700.000	100,00%	100,00%	KEC BANGUNTAPAN
		Sewa mobilitas darat	lembar	1	2.000.000	3500	525.000	2625	393.750	3500	525.000	3500	525.000	100,00%	100,00%	KEC BANGUNTAPAN
		Makan minum rapat	unit	400	14.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000	100,00%	100,00%	KEC BANGUNTAPAN

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								III		IV						
1	4	5		8		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Makan minum pelaks keg	om	4000	53.750.000	400	14.000.000	300	10.500.000	400	14.000.000	400	14.000.000	100,00%	100,00%	KEC BANGUNTAPAN
		Pakaian kaos/training	om	105	21.000.000	4000	53.750.000	3500	51.750.000	4000	53.750.000	4000	53.750.000	100,00%	100,00%	KEC BANGUNTAPAN
		Pakaian seragam paskibra	stel	80	45.600.000	105	21.000.000	105	21.000.000	105	21.000.000	105	21.000.000	100,00%	100,00%	KEC BANGUNTAPAN
			stel			80	45.600.000	80	44.800.000	80	44.800.000	80	44.800.000	100,00%	98,25%	KEC BANGUNTAPAN
	Penyusunan Profil Desa, Monografi Kecamatan	Jumlah Profil Desa dan Monografi Kecamatan		2	5.125.000							0	0			KEC BANGUNTAPAN
		Penggunaan	dokumen	1500	225.000	2	5.125.000	1	2.562.500	2	5.125.000	2	5.125.000	100,00%	100,00%	KEC BANGUNTAPAN
		Makan minum rapat	lembar	140	4.900.000	1500	225.000	750	112.500	1500	225.000	1500	225.000	100,00%	100,00%	KEC BANGUNTAPAN
			om			140	4.900.000	70	2.450.000	140	4.900.000	140	4.900.000	100,00%	100,00%	KEC BANGUNTAPAN
	Peningkatan Pemberdayaan Keagamaan	Pendampingan FKUB, FKDM, FPK, PKS		4	20.260.000							0	0			KEC BANGUNTAPAN
		Penggunaan	kali	5000	750.000	4	20.260.000	3	16.572.500	4	20.260.000	4	20.260.000	100,00%	100,00%	KEC BANGUNTAPAN
		Makan minum rapat	lembar	400	14.000.000	5000	750.000	3750	562.500	5000	750.000	5000	750.000	100,00%	100,00%	KEC BANGUNTAPAN
		Makan minum pelaks keg	om	66	2.310.000	400	14.000.000	300	10.500.000	400	14.000.000	400	14.000.000	100,00%	100,00%	KEC BANGUNTAPAN
		Jasa Narasumber	om	6	1.400.000	66	2.310.000	66	2.310.000	66	2.310.000	66	2.310.000	100,00%	100,00%	KEC BANGUNTAPAN
		Jasa Moderator	jpl	0	-	6	1.400.000	6	1.400.000	6	1.400.000	6	1.400.000	100,00%	100,00%	KEC BANGUNTAPAN
		Transport Peserta	org	60	1.800.000	0	-	0	-	0	-	0	0			KEC BANGUNTAPAN
						60	1.800.000	60	1.800.000	60	1.800.000	60	1.800.000	100,00%	100,00%	
	Program Pemerintahan Umum Kecamatan	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	Persen	90	135.510.000	90	134.310.000				134.310.000	0	134.310.000	0,00%	100,00%	KEC DLINGO
	Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	Jumlah pelaksanaan kegiatan MUSRENBANG Kecamatan	kali	1	13.100.000	1	13.100.000				13.100.000	0	13.100.000	0,00%	100,00%	KEC DLINGO
	Pendampingan dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah rakord pendampingan pengelblaan APBDes	kali	2	11.700.000	2	11.700.000				11.700.000	0	11.700.000	0,00%	100,00%	KEC DLINGO
	Rapat Koordinasi Muspika	Jumlah rakor MUSPIKA kec .Dlingo	kali	4	10.600.000	4	10.600.000				10.600.000	0	10.600.000	0,00%	100,00%	KEC DLINGO
	Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa	Jumlah pelaksanaan upacara kenegaraan/hari besar nasional Bangsa	kali	14	90.800.000	14	89.600.000				89.600.000	0	89.600.000	0,00%	100,00%	KEC DLINGO
	Penyusunan Profil Desa, Monografi Kecamatan	Jumlah dokumen profil dan monografi	dokumen	3	1.260.000	3	1.260.000				1.260.000	0	1.260.000	0,00%	100,00%	KEC DLINGO
	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	Jumlah rakor intensifikasi PBB	kali	6	4.550.000	6	4.550.000				4.550.000	0	4.550.000	0,00%	100,00%	KEC DLINGO
	Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah	Jumlah rapat koordinasi	kali	2	3.500.000	2	3.500.000				3.500.000	0	3.500.000	0,00%	100,00%	KEC DLINGO
	Program Pemerintahan Umum Kecamatan						51.249.500	84,33	43.219.500	99,9805	51.239.500	99,9805	51.239.500		99,98%	KEC PAJANGAN

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								III		IV						
1	4	5		8		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan						10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000		100,00%	KEC PAJANGAN
	Pengendalian Keamanan Lingkungan						3.600.000	100	3.600.000	100	3.600.000	100	3.600.000		100,00%	KEC PAJANGAN
	Penyebarluasan dan Sosialisasi Informasi Pendidikan						2.850.000	100	2.850.000	100	2.850.000	100	2.850.000		100,00%	KEC PAJANGAN
	Pendampingan dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Desa						4.500.000	63,33	2.850.000	100	4.500.000	100	4.500.000		100,00%	KEC PAJANGAN
	Rapat Koordinasi Muspika						3.600.000	75	2.700.000	100	3.600.000	100	3.600.000		100,00%	KEC PAJANGAN
	Rakorpem Desa						6.314.500	100	6.314.500	100	6.314.500	100	6.314.500		100,00%	KEC PAJANGAN
	Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa						6.725.000	100	6.725.000	100	6.725.000	100	6.725.000		100,00%	KEC PAJANGAN
	Penyusunan Profil Desa, Monografi Kecamatan						1.660.000	50	830.000	100	1.660.000	100	1.660.000		100,00%	KEC PAJANGAN
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup						12.000.000	61,25	7.350.000	99,9167	11.990.000	99,9167	11.990.000		99,92%	KEC PAJANGAN
	Program Pemerintahan Umum Kecamatan	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	persen	100	229.500.000	100	229.500.000	169	44.230.000	0	38.680.000	0	229.100.000	0,00%	99,83%	KEC PIYUNGAN
	Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan		persen	100	15.800.000	100	15.800.000	0	-		3.150.000	0	15.800.000	0,00%	100,00%	KEC PIYUNGAN
		Cetak	keg	1	250.000	1	250.000					0	0	0,00%	0,00%	KEC PIYUNGAN
		Penggandaan	lembar	3000	600.000	3000	600.000					0	0	0,00%	0,00%	KEC PIYUNGAN
		Sewa meja kursi	unit	120	600.000	120	600.000					0	0	0,00%	0,00%	KEC PIYUNGAN
		sewa tenda	unit	2	1.000.000	2	1.000.000					0	0	0,00%	0,00%	KEC PIYUNGAN
		sewa sound system	unit	1	500.000	1	500.000					0	0	0,00%	0,00%	KEC PIYUNGAN
		Makan Minum Rapat	dos	100	3.500.000	100	3.500.000					0	0	0,00%	0,00%	KEC PIYUNGAN
		Makan Minum Kegiatan	dos	250	8.750.000	250	8.750.000					0	0	0,00%	0,00%	KEC PIYUNGAN
		jasa harian lepas	oh	4	600.000	4	600.000					0	0	0,00%	0,00%	KEC PIYUNGAN
												0	0			KEC PIYUNGAN
	Pengendalian Keamanan Lingkungan		persen	100	13.775.000	100	13.775.000	55,5	7.645.000		895.000	0	13.775.000	0,00%	100,00%	KEC PIYUNGAN
		Makan Minum Rapat	dos	100	3.625.000	100	3.625.000					0	0	0,00%	0,00%	KEC PIYUNGAN
		Makan Minum Kegiatan	dos	110	3.850.000	110	3.850.000					0	0	0,00%	0,00%	KEC PIYUNGAN
		Jasa Nara Sumber	jpl	6	3.300.000	6	3.300.000					0	0	0,00%	0,00%	KEC PIYUNGAN
		Jasa Peserta	ok	100	3.000.000	100	3.000.000					0	0	0,00%	0,00%	KEC PIYUNGAN
	Penyebarluasan dan Sosialisasi Informasi Pendidikan		persen	100	9.625.000	100	9.625.000	45,45	4.375.000		-	0	9.625.000	0,00%	100,00%	KEC PIYUNGAN
		Makan Minum Rapat	dos	150	5.250.000	150	5.250.000					0	0	0,00%	0,00%	KEC PIYUNGAN
		Makan Minum Kegiatan	dos	125	4.375.000	125	4.375.000					0	0	0,00%	0,00%	KEC PIYUNGAN
												0	0			KEC PIYUNGAN
	Pendampingan dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Desa		persen	100	18.900.000	100	18.900.000	31,48	5.950.000		1.750.000	0	18.900.000	0,00%	100,00%	KEC PIYUNGAN

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								III		IV						
1	4	5		8		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Cetak	keg	2	400.000	2	400.000					0	0	0,00%	0,00%	KEC PIYUNGAN
		Makan Minum Rapat	dos	200	7.000.000	200	7.000.000					0	0	0,00%	0,00%	KEC PIYUNGAN
		Makan Minum Kegiatan	dos	140	4.900.000	140	4.900.000					0	0	0,00%	0,00%	KEC PIYUNGAN
		Jasa Nara Sumber	jpl	6	3.300.000	6	3.300.000					0	0	0,00%	0,00%	KEC PIYUNGAN
		Jasa Peserta	ok	110	3.300.000	110	3.300.000					0	0	0,00%	0,00%	KEC PIYUNGAN
	Rapat Koordinasi Muspika		persen	100	47.425.000	100	47.425.000	14,46	6.860.000		6.960.000	0	47.425.000	0,00%	100,00%	KEC PIYUNGAN
		Honor pendamping kegiatan	oh	25	750.000	25	750.000					0	0	0,00%	0,00%	KEC PIYUNGAN
		Cetak	keg	4	1.000.000	4	1.000.000					0	0	0,00%	0,00%	KEC PIYUNGAN
		Penggandaan	lembar	5000	1.000.000	5000	1.000.000					0	0	0,00%	0,00%	KEC PIYUNGAN
		sewa sound system	unit	4	2.000.000	4	2.000.000					0	0	0,00%	0,00%	KEC PIYUNGAN
		Makan Minum Rapat	dos	180	6.150.000	180	6.150.000					0	0	0,00%	0,00%	KEC PIYUNGAN
		Makan Minum Kegiatan	dos	495	17.325.000	495	17.325.000					0	0	0,00%	0,00%	KEC PIYUNGAN
		Pengadaan Kaos	potong	30	3.000.000	30	3.000.000					0	0	0,00%	0,00%	KEC PIYUNGAN
		Jasa Nara Sumber	jpl	18	9.600.000	18	9.600.000					0	0	0,00%	0,00%	KEC PIYUNGAN
		Jasa Peserta	ok	220	6.600.000	220	6.600.000					0	0	0,00%	0,00%	KEC PIYUNGAN
	Rakorper Desa		persen	100	5.250.000	100	5.250.000	0			5.250.000	0	5.250.000	0,00%	100,00%	KEC PIYUNGAN
		Makan Minum Rapat	dos	150	5.250.000	150	5.250.000					0	0	0,00%	0,00%	KEC PIYUNGAN
												0	0			KEC PIYUNGAN
	Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa		persen	100	87.650.000	100	87.650.000	22,13	19.400.000		8.025.000	0	87.250.000	0,00%	99,54%	KEC PIYUNGAN
		Honor Tim pengadaan barang dan jasa	keg	1	800.000	1	800.000					0	0	0,00%	0,00%	KEC PIYUNGAN
		Cetak	keg	1	500.000	1	500.000					0	0	0,00%	0,00%	KEC PIYUNGAN
		Sewa Meja Kursi	unit	100	400.000	100	400.000					0	0	0,00%	0,00%	KEC PIYUNGAN
		Sewa Tenda	unit	4	2.000.000	4	2.000.000					0	0	0,00%	0,00%	KEC PIYUNGAN
		sewa sound system	unit	13	5.000.000	13	5.000.000					0	0	0,00%	0,00%	KEC PIYUNGAN
		Makan Minum Rapat	dos	100	3.500.000	100	3.500.000					0	0	0,00%	0,00%	KEC PIYUNGAN
		Makan Minum Kegiatan	dos	750	26.250.000	750	26.250.000					0	0	0,00%	0,00%	KEC PIYUNGAN
		Pengadaan pakaian paskibra	stel	80	49.200.000	80	49.200.000					0	0	0,00%	0,00%	KEC PIYUNGAN
	Penyusunan Profil Desa, Monografi Kecamatan		persen	100	5.250.000	100	5.250.000	0	-		2.625.000	0	5.250.000	0,00%	100,00%	KEC PIYUNGAN
		Makan Minum Rapat	dos	150	5.250.000	150	5.250.000					0	0	0,00%	0,00%	KEC PIYUNGAN
	Peningkatan Pemberdayaan Keagamaan		persen	100	25.825.000	100	25.825.000	0	-		10.025.000	0	25.825.000	0,00%	100,00%	KEC PIYUNGAN
		Penggandaan	lembar	4000		4000	800.000					0	0	0,00%	0,00%	KEC PIYUNGAN

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				III		IV										
1	4	5		8		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					800.000											
		Makan Minum Rapat	dos	250	8.750.000	250	8.750.000					0	0	0,00%	0,00%	KEC PIYUNGAN
		Makan Minum Kegiatan	dos	195	6.825.000	195	6.825.000					0	0	0,00%	0,00%	KEC PIYUNGAN
		Jasa Nara Sumber	jpl	8	4.950.000	8	4.950.000					0	0	0,00%	0,00%	KEC PIYUNGAN
		Jasa Peserta	ok	150	4.500.000	150	4.500.000					0	0	0,00%	0,00%	KEC PIYUNGAN
	Program Pemerintahan Umum Kecamatan				227.370.000		227.370.000		166.622.480		221.939.600	0	221.939.600		97,61%	KEC SANDEN
	Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan			24.750.000		24.750.000	92,22	22.825.000	100	24.750.000	100	24.750.000		100,00%	KEC SANDEN
		Penyusunan Renja										0	0			KEC SANDEN
	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Honor tenaga keamanan			34.600.000		34.600.000	71,97	24.900.000	100	34.600.000	100	34.600.000		100,00%	KEC SANDEN
		Rakor keamanan										0	0			KEC SANDEN
	Penyebarluasan dan Sosialisasi Informasi Pendidikan	Sosialisasi Pendidikan			15.000.000		15.000.000	90,63	13.595.000	100	13.595.000	100	13.595.000		90,63%	KEC SANDEN
	Pendampingan dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Pendampingan			20.990.000		20.990.000	33,66	7.065.000	100	19.994.860	100	19.994.860		95,26%	KEC SANDEN
	Rapat Koordinasi Muspika	jumlah Rakor Muspika			10.000.000		10.000.000	84,7	8.470.000	100	9.974.860	100	9.974.860		99,75%	KEC SANDEN
	Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa	Upacara hari besar dan tiap tanggal 18			99.017.500		99.017.500	79,39	78.607.480	100	99.012.410	100	99.012.410		99,99%	KEC SANDEN
	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	Jumlah Rakor PBB			20.012.500		20.012.500	55,77	11.160.000	100	20.012.470	100	20.012.470		100,00%	KEC SANDEN
	Program Pemerintahan Umum Kecamatan	Cakupan Pelayanan Pemerintahan Umum Kecamatan		0,95	178.360.000	1612	177.035.000	0,783	139.722.500	1612	176.085.000	1612	176.085.000	100,00%	99,46%	KEC KASIHAN
	Monitoring Penyelenggaraan Pemerintahan umum dan Daerah	Jumlah Peserta Rapat koordinasi	Orang	100	42.275.000	100	42.275.000	0,727	30.737.500	100	42.125.000	100	42.125.000	100,00%	99,65%	KEC KASIHAN
		Jumlah peserta pelaksanaan Kegiatan fasilitasi	OK	500		500				500		500	0	100,00%		KEC KASIHAN
		Jumlah rakor, pembinaan, dan fasilitasi	Kali	10		10				10		10	0	100,00%		KEC KASIHAN
	Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	Jumlah peserta musrenbang dan rapat persiapan musrenbang	Orang	350	17.925.000	300	16.600.000	0,926	16.600.000	300	16.600.000	300	16.600.000	100,00%	100,00%	KEC KASIHAN
		Jumlah Narasumber	Kali	4		4				4		4	0	100,00%		KEC KASIHAN
	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah patroli/piket kemandan lingkungan	Bulan	12	42.940.000	12	42.940.000	0,591	25.395.000	12	42.940.000	12	42.940.000	100,00%	100,00%	KEC KASIHAN
		Jumlah Honor Petugas (2) Piket Malam	Bulan	12		12				12		12	0	100,00%		KEC KASIHAN
	Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa	Jumlah Jasa Pelatih	Kali	110	70.290.000	110	70.290.000	0,883	62.060.000	110	69.490.000	110	69.490.000	100,00%	98,86%	KEC KASIHAN
		Jumlah Pakaian Paskibra 80 Set	Set	80		80				80		80	0	100,00%		KEC KASIHAN
		Jumlah peserta upacara	Orang	360		360				360		360	0	100,00%		KEC KASIHAN

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								III		IV						
1	4	5		8		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	Belanja Jasa Narasumber	Kali	4	4.930.000	4	4.930.000	1	4.930.000	4	4.930.000	4	4.930.000	100,00%	100,00%	KEC KASIHAN
		Belanja peserta rapat/pendampingan	OK	120		120				120		120	0	100,00%		KEC KASIHAN
	Fasilitasi dan pengendalian pengelblaan keuangan desa					0						0	0			KEC KASIHAN
	Rapat koordinasi unsur Muspika					0						0	0			KEC KASIHAN
	Program Pemerintahan Umum Kecamatan				176.520.000							0	0			KEC SEWON
	Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen dihasilkan	dokumen	1	13.150.000							0	0			KEC SEWON
	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah pemantauan keamanan lingkungan	pemantauan	12	9.600.000							0	0			KEC SEWON
	Pendampingan dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah rakor pendampingan	kali	8	5.250.000							0	0			KEC SEWON
	Rapat Koordinasi Muspika	Jumlah rakor Muspika	kali	4	55.245.000							0	0			KEC SEWON
	Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa	Jumlah latihan upacara	kali	8	84.675.000							0	0			KEC SEWON
	Penyusunan Profil Desa, Monografi Kecamatan	Jumlah dokumen dihasilkan	dokumen	1	2.800.000							0	0			KEC SEWON
	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	Jumlah undangan sosialisasi PBB	OK	120	4.200.000							0	0			KEC SEWON
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup	Jumlah rakor persiapan lomba kebersihan lingkungan kantor	kali	2	1.600.000							0	0			KEC SEWON
												0	0			
	Program Pemerintahan Umum Kecamatan	Cakupan pelayanan pemerintahan umum			268.685.000		273.685.000		162.075.250		247.323.950	0	247.323.950		90,37%	KEC PLERET
	Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	Jumlah Musrenbang		1	13.125.000	1	13.125.000	1	11.632.250	1	12.032.250	1	12.032.250	100,00%	91,67%	KEC PLERET
	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah koordinasi patroli gabungan		340	12.150.000	340	12.150.000	255	9.075.000		12.150.000	0	12.150.000	0,00%	100,00%	KEC PLERET
	Pendampingan dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah koordinasi Pendampingan dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Desa		154	5.680.000	154	5.680.000	3	2.840.000		3.755.000	0	3.755.000	0,00%	66,11%	KEC PLERET
	Rapat Koordinasi Muspika	Jumlah Rapat Koordinasi Muspika		4	89.670.000	4	89.670.000	2	18.250.000		70.730.000	0	70.730.000	0,00%	78,88%	KEC PLERET
	Rakorpem Desa	Jumlah Rakorpem Desa		131	5.605.000	131	5.605.000	47	3.378.000		5.590.000	0	5.590.000	0,00%	99,73%	KEC PLERET
	Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa	Jumlah pelaksanaan Upacara Nasional		5	93.500.000	5	93.500.000	3	91.675.000		92.691.500	0	92.691.500	0,00%	99,14%	KEC PLERET
	Penyusunan Profil Desa, Monografi Kecamatan	Jumlah Jenis Dokumen		2	2.580.000	2	2.580.000		-	2	2.580.000	2	2.580.000	100,00%	100,00%	KEC PLERET
	Peningkatan Pemberdayaan Keagamaan	Jumlah koordinasi Kegiatan Keagamaan		350	31.335.000	350	36.335.000	350	17.725.000		34.535.000	0	34.535.000	0,00%	95,05%	KEC PLERET
	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	Jumlah Koordinasi Sosialisasi PBB		60	6.800.000	60	6.800.000	60	6.250.000		6.800.000	0	6.800.000	0,00%	100,00%	KEC PLERET
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup	Jumlah Rakor Pengelolaan Lingk Hidup dan persampahan		120	6.240.000	120	6.240.000	2	250.000		4.460.200	0	4.460.200	0,00%	71,48%	KEC PLERET

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								III		IV						
1	4	5		8		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah	Jumlah koordinasi pendampingan Pendataan dan Penataan dokumen/larsip		2	2.000.000	2	2.000.000	1	1.000.000		2.000.000	0	2.000.000	0,00%	100,00%	KEC PLERET
	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan						74.778.000				74.778.000	0	74.778.000		100,00%	KEC BAMBANGLIPURO
	Pemberdayaan Lembaga Desa						5.203.000		5.203.000		5.203.000	0	5.203.000		100,00%	KEC BAMBANGLIPURO
	Pembinaan Organisasi Perempuan						15.575.000		10.787.500		15.575.000	0	15.575.000		100,00%	KEC BAMBANGLIPURO
	Pemberdayaan Petani						3.000.000		3.000.000		3.000.000	0	3.000.000		100,00%	KEC BAMBANGLIPURO
	Pemantauan Penyebarluasan Informasi Bencana Alam						3.000.000		3.000.000		3.000.000	0	3.000.000		100,00%	KEC BAMBANGLIPURO
	Pendampingan Kegiatan TMMD						3.000.000		3.000.000		3.000.000	0	3.000.000		100,00%	KEC BAMBANGLIPURO
	Pendampingan Pengelolaan Lingkungan Hidup						45.000.000		15.750.000		45.000.000	0	45.000.000		100,00%	KEC BAMBANGLIPURO
	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Cakupan pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan	Persen		45.155.000	90	45.155.000	90	42.421.250	100	45.155.000	100	45.155.000	111,11%	100,00%	KEC BANGUNTAPAN
	Pengembangan Produk Unggulan Kecamatan	Pengiriman peserta Bantul Ekspo	kali	1	21.300.000	1	21.300.000	1	21.300.000	1	21.300.000	1	21.300.000	100,00%	100,00%	KEC BANGUNTAPAN
		Dekorasi	paket	1	9.500.000	1	9.500.000	1	9.500.000	1	9.500.000	1	9.500.000	100,00%	100,00%	KEC BANGUNTAPAN
		Penggandaan	lembar	2000	300.000	2000	300.000	2000	300.000	2000	300.000	2000	300.000	100,00%	100,00%	KEC BANGUNTAPAN
		Sewa mobilas darat	unit	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	100,00%	100,00%	KEC BANGUNTAPAN
		Makan minum rapat	om	200	7.000.000	200	7.000.000	200	7.000.000	200	7.000.000	200	7.000.000	100,00%	100,00%	KEC BANGUNTAPAN
		Makan minum pelaks keg	om	100	3.500.000	100	3.500.000	100	3.500.000	100	3.500.000	100	3.500.000	100,00%	100,00%	KEC BANGUNTAPAN
												0	0			KEC BANGUNTAPAN
	Pemantauan Penyebarluasan Informasi Bencana Alam	Monitoring wilayah rawan bencana alam dan pelatihan FPRB	kali	8	23.855.000	8	23.855.000	7	21.121.250	8	23.855.000	8	23.855.000	100,00%	100,00%	KEC BANGUNTAPAN
		Penggandaan	lembar	2900	435.000	2900	435.000	2175	326.250	2900	435.000	2900	435.000	100,00%	100,00%	KEC BANGUNTAPAN
		Makan minum rapat	om	100	3.500.000	100	3.500.000	75	2.625.000	100	3.500.000	100	3.500.000	100,00%	100,00%	KEC BANGUNTAPAN
		Makan minum pelaks keg	om	312	10.920.000	312	10.920.000	262	9.170.000	312	10.920.000	312	10.920.000	100,00%	100,00%	KEC BANGUNTAPAN
		Jasa Narasumber	jpl	300	3.000.000	300	3.000.000	300	3.000.000	300	3.000.000	300	3.000.000	100,00%	100,00%	KEC BANGUNTAPAN
		Transport Peserta	org	200	6.000.000	200	6.000.000	200	6.000.000	200	6.000.000	200	6.000.000	100,00%	100,00%	KEC BANGUNTAPAN

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								III		IV						
1	4	5		8		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Persen	85	64.857.500	85	64.857.500				64.857.500	0	64.857.500	0,00%	100,00%	KEC DLINGO
	Pengembangan Produk Unggulan Kecamatan	jumlah keikutsertaan dalam bantul ekspo dan rakor	kali	2	21.800.000	2	21.800.000				21.800.000	0	21.800.000	0,00%	100,00%	KEC DLINGO
	Pendampingan Lomba Tingkat Kecamatan/Desa	Jumlah Pelaksanaan Lomba-lomba di kecamatan/desa	kali	7	7.350.000	7	7.350.000				7.350.000	0	7.350.000	0,00%	100,00%	KEC DLINGO
	Pembinaan Organisasi Perempuan	Jumlah penyelenggaraan kegiatan Perempuan kecamatan	kali	4	12.060.000	4	12.060.000				12.060.000	0	12.060.000	0,00%	100,00%	KEC DLINGO
	Pemantuan Penyebarluasan Informasi Bencana Alam	Jumlah rapat koordinasi dan pemantuan lokasi rawan bencana	kali	4	6.650.000	4	6.650.000				6.650.000	0	6.650.000	0,00%	100,00%	KEC DLINGO
	Pemberdayaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah rakor penanggulangan kemiskinan	kali	2	9.297.500	2	9.297.500				9.297.500	0	9.297.500	0,00%	100,00%	KEC DLINGO
	Pendampingan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah rakor lingkungan hidup	kali	2	7.700.000	2	7.700.000				7.700.000	0	7.700.000	0,00%	100,00%	KEC DLINGO
					817.049.100		829.049.100				827.974.301	0	827.974.301		99,87%	KEC DLINGO
	Program pemberdayaan masyarakat	Cakupan pemberdayaan masyarakat			131.958.000		131.958.000	32	96.108.000	0	131.908.000	0	131.908.000		99,96%	KEC JETIS
	Pengembangan Produk Unggulan Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Jetis Ekspo dan Keikutsertaan Bantu Ekspo	kali	1	41.358.000		41.358.000	1	41.308.000		41.308.000	0	41.308.000		99,88%	KEC JETIS
	Pendampingan Lomba Tingkat Kecamatan/Desa	Jumlah Pendampingan lomba	kali	2	10.000.000		10.000.000	1	8.500.000		10.000.000	0	10.000.000		100,00%	KEC JETIS
	Pemberdayaan Lembaga Desa	Jumlah Rapat Koordinasi	bulan	12	37.100.000		37.100.000	9	15.950.000		37.100.000	0	37.100.000		100,00%	KEC JETIS
	Pembinaan Organisasi Perempuan	Jumlah rapat koordinasi	bulan	12	27.200.000		27.200.000	9	14.050.000		27.200.000	0	27.200.000		100,00%	KEC JETIS
	Pendampingan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Pelaksanaan Galamatra	bulan	12	16.300.000		16.300.000	12	16.300.000		16.300.000	0	16.300.000		100,00%	KEC JETIS
	Program pemberdayaan masyarakat						67.915.000	77,24	52.455.000	99,4258	67.525.000	99,4258	67.525.000		99,43%	KEC PAJANGAN
	Pengembangan Produk Unggulan Kecamatan						17.880.000	100	17.880.000	100	17.880.000	100	17.880.000		100,00%	KEC PAJANGAN

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								III		IV						
1	4	5		8		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pemberdayaan Lembaga Desa						16.920.000	98,52	16.670.000	100	16.920.000	100	16.920.000		100,00%	KEC PAJANGAN
	Pembinaan Organisasi Perempuan						16.795.000	49,27	8.275.000	100	16.795.000	100	16.795.000		100,00%	KEC PAJANGAN
	Pemberdayaan Petani						2.700.000	100	2.700.000	100	2.700.000	100	2.700.000		100,00%	KEC PAJANGAN
	Pemantauan Penyebarluasan Informasi Bencana Alam						1.020.000	61,76	630.000	61,7647	630.000	61,7647	630.000		61,76%	KEC PAJANGAN
	Pendampingan Kegiatan TMMD						3.600.000	33,33	1.200.000	100	3.600.000	100	3.600.000		100,00%	KEC PAJANGAN
	Pemberdayaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan						9.000.000	56,67	5.100.000	100	9.000.000	100	9.000.000		100,00%	KEC PAJANGAN
	Program pemberdayaan masyarakat	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan			49.000.000				49.000.000		49.000.000	0	49.000.000			KEC SEDAYU
	Penyelenggaraan lomba desa	Jumlah kegiatan		1	9.500.000	1	kali	1	9.500.000	1	9.500.000	1	9.500.000	100,00%		KEC SEDAYU
	Musrenbang tingkat kecamatan	Jumlah kegiatan		1	11.850.000	1	kali	1	11.850.000	1	11.850.000	1	11.850.000	100,00%		KEC SEDAYU
	Bantul Ekspo dan karnaval	jumlah kegiatan		1	9.600.000	1	kali	1	9.600.000	1	9.600.000	1	9.600.000	100,00%		KEC SEDAYU
	Pemberdayaan lembaga desa	Jumlah kegiatan		4	18.050.000	4	kali	4	18.050.000	4	18.050.000	4	18.050.000	100,00%		KEC SEDAYU
												0	0			
	Program Pemberdayaan Masyarakat tingkat Kecamatan	Cakupan Pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan	Persen	84	54.222.050		46.722.100		43.309.850		57.622.425	0	57.622.425		123,33%	KECSRANDAKAN
	Pengembangan produk unggulan kecamatan	Partisipasi Bantul Ekspo	kali	1	26.482.375	1	26.482.375	1	23.482.500	1	26.482.375	1	26.482.375	100,00%	100,00%	KEC SRANDAKAN
	Pembinaan organisasi perempuan	jumlah rakor	kali	6	15.239.975	6	15.239.975	4	10.981.775	6	15.239.975	6	15.239.975	100,00%	100,00%	KEC SRANDAKAN
	Pemberdayaan Petani	rakor dan pembinaan	kali	3		3		2	6.359.950	3	11.126.950	3	11.126.950	100,00%		KEC SRANDAKAN
	Pembantuan Penyebarluasan Informasi Bencana Alam	jumlah rakor	kali	2		2	4.999.750	1	2.485.625	2	4.773.125	2	4.773.125	100,00%	95,47%	KEC SRANDAKAN
	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan		0,95	22.000.000	100	22.000.000	0,77	16.947.500	100	22.000.000	100	22.000.000	100,00%	100,00%	KEC KASIHAN
	Pembinaan Organisasi Perempuan	Jumlah rapat/rakor Kader PKK	Kali	4	22.000.000	4		0,77	16.947.500	4		4		100,00%		KEC KASIHAN

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								III		IV						
1	4	5		8		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Jumlah peserta rapat/rakor	OK	180		180				180		180		100,00%		KEC KASIHAN
		Jumlah Kader PKK Kegiatan	Orang	120		120				120		120		100,00%		KEC KASIHAN
	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan				34.700.000							0				KEC SEWON
	Pembinaan Organisasi Perempuan	Jumlah pembinaan PKK	kali	6	16.950.000							0				KEC SEWON
	Pemberdayaan Petani	Jumlah pertemuan petani	kali	4	3.900.000							0				KEC SEWON
	Pemantuan Penyebarluasan Informasi Bencana Alam	Jumlah sosialisasi Bencana Alam	kali	2	5.100.000							0				KEC SEWON
	Pendampingan Kegiatan TMMD	Jumlah linmas yang dikirim	OK	50	1.750.000							0				KEC SEWON
	Pendampingan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah sosialisasi sampah dan kawasan kumuh	kali	4	7.000.000							0				KEC SEWON
	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Cakupan pelayanan pengentasan Kemiskinan			66.165.000		66.165.000		24.278.500		62.815.000	0	62.815.000		94,94%	KEC PLERET
	Pengembangan Produk Unggulan Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Produk Unggulan		1	16.040.000	1	16.040.000	1	16.040.000	1	16.040.000	1	16.040.000	100,00%	100,00%	KEC PLERET
	Pendampingan Lomba Tingkat Kecamatan/Desa	Jumlah koordinasi pendampingan Jumlah Lomba		130	6.875.000	130	6.875.000				6.050.000		6.050.000		88,00%	KEC PLERET
	Pembinaan Organisasi Perempuan	Jumlah Rakor dan Pembinaan Organisasi Perempuan		172	10.600.000	172	10.600.000	39	1.213.500		9.125.000		9.125.000		86,08%	KEC PLERET
	Pemberdayaan Petani	Jumlah Rakor Pembinaan gapoktan		160	5.400.000	160	5.400.000			160	5.400.000	160	5.400.000	100,00%	100,00%	KEC PLERET
	Pemantuan Penyebarluasan Informasi Bencana Alam	Jumlah Rakor dan Monitoring Informasi Bencana Alam		165	6.025.000	165	6.025.000	150	3.750.000	165	6.025.000	165	6.025.000	100,00%	100,00%	KEC PLERET
	Pendampingan Kegiatan TMMD	Jumlah Pengiriman Peserta Linmas		40	5.400.000	40	5.400.000	38	3.275.000	40	5.200.000	40	5.200.000	100,00%	96,30%	KEC PLERET
	Pemberdayaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Rakor Penanggulangan Kemiskinan		335	15.825.000	335	15.825.000				14.975.000		14.975.000	0,00%	94,63%	KEC PLERET
	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan				69.980.000		61.380.000	672	37.610.000		44.890.000	0	44.890.000		73,13%	KEC PANDAK
	Pengembangan Produk Unggulan Kecamatan			2	24.370.000	2	24.370.000	2	21.550.000	2	21.550.000	2	21.550.000	100,00%	88,43%	KEC PANDAK

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								III		IV						
1	4	5		8		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pendampingan Lomba Tingkat Kecamatan/Desa			150	3.000.000	150	3.000.000	140	2.800.000	140	2.800.000	140	2.800.000	93,33%	93,33%	KEC PANDAK
	Pemberdayaan Lembaga Desa			150	3.000.000	150	3.000.000			100	2.000.000	100	2.000.000	66,67%	66,67%	KEC PANDAK
	Pembinaan Organisasi Perempuan			930	18.600.000	500	10.000.000	260	5.200.000	500	10.000.000	500	10.000.000	100,00%	100,00%	KEC PANDAK
	Pemberdayaan Petani			385	7.700.000	12	7.700.000	220	4.400.000	11	4.400.000	11	4.400.000	91,67%	57,14%	KEC PANDAK
	Pemantauan Penyeberluasan Informasi Bencana Alam			12	2.025.000	12	2.025.000								0,00%	KEC PANDAK
	Pendampingan Kegiatan TMMD			48	960.000	2	960.000	48	960.000	2	960.000	2	960.000	100,00%	100,00%	KEC PANDAK
	Pendampingan Pengelolaan Lingkungan Hidup			4	10.325.000	4	10.325.000	2	2700.000	3	3.180.000	3	3.180.000		30,80%	KEC PANDAK
	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Cakupan pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan	0,84	1420	65.000.000	1420	65.000.000	1037	51.000.000	1420	65.000.000	1420	65.000.000	100,00%	100,00%	KEC IMOIGIRI
	Pengembangan Produk Unggulan Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Bantul Ekspo	kali	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	100,00%	100,00%	KEC IMOIGIRI
	Pendampingan Lomba Tingkat Kecamatan/Desa	Jumlah Koordinasi Persiapan Lomba	ok	300	6.000.000	300	6.000.000	190	4.500.000	300	6.000.000	300	6.000.000	100,00%	100,00%	KEC IMOIGIRI
	Pembinaan Organisasi Perempuan	Jumlah Rakord dan Pembinaan Sosialisasi dan Study Lapangan	ok	840	25.000.000	840	25.000.000	690	21.250.000	840	25.000.000	840	25.000.000	100,00%	100,00%	KEC IMOIGIRI
	Pemberdayaan Petani	Jumlah Rakord dan Pembinaan Petani	ok	90	6.000.000	90	6.000.000	0	-	90	6.000.000	90	6.000.000	100,00%	100,00%	KEC IMOIGIRI
	Pemantauan Penyeberluasan Informasi Bencana Alam	Jumlah rakor dan monitoring daerah rawan bencana dan pembinaan FPRB	kali	12	6.000.000	12	6.000.000	9	3.500.000	12	6.000.000	12	6.000.000	100,00%	100,00%	KEC IMOIGIRI
	Pendampingan Kegiatan TMMD	Jumlah pengiriman Linmas	kali	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	100,00%	100,00%	KEC IMOIGIRI
	Pemberdayaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Rakord dan Pembinaan TKPK Kecamatan dan Desa	ok	175	5.000.000	175	5.000.000	145	4.750.000	175	5.000.000	175	5.000.000	100,00%	100,00%	KEC IMOIGIRI

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								III		IV							
1	4	5		8		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Cakupan Pemberdayaan masyarakat Tingkat Kecamatan	persen	100	52.700.000	100	52.700.000	129,2	14.915.000	0	4.875.000	0	52.700.000		100,00%	KEC PIYUNGAN	
	Pengembangan Produk Unggulan Kecamatan		persen	100	10.400.000	100	10.400.000	91,59	9.525.000		-	0	10.400.000	0,00%	100,00%	KEC PIYUNGAN	
		Honor pendamping kegiatan	oh	4	1.200.000	4	1.200.000					0	0	0,00%	0,00%	KEC PIYUNGAN	
		Dekorasi	keg	1	3.000.000	1	3.000.000					0	0	0,00%	0,00%	KEC PIYUNGAN	
		Sewa kendaraan	unit	4	2.000.000	4	2.000.000					0	0	0,00%	0,00%	KEC PIYUNGAN	
		Makan Minum Rapat	dos	50	1.750.000	50	1.750.000					0	0	0,00%	0,00%	KEC PIYUNGAN	
		Makan Minum Kegiatan	dos	70	2.450.000	70	2.450.000					0	0	0,00%	0,00%	KEC PIYUNGAN	
												0	0			KEC PIYUNGAN	
		Pendampingan Lomba Tingkat Kecamatan/Desa		persen	100	8.050.000	100	8.050.000	0	-		-	0	8.050.000	0,00%	100,00%	KEC PIYUNGAN
		Makan Minum Rapat	dos	150	5.250.000	150	5.250.000					0	0	0,00%	0,00%	KEC PIYUNGAN	
		Makan Minum Kegiatan	dos	80	2.800.000	80	2.800.000					0	0	0,00%	0,00%	KEC PIYUNGAN	
		Penyelenggaraan Lomba RT										0	0			KEC PIYUNGAN	
			lembur PNS									0	0			KEC PIYUNGAN	
			Makan minum rapat									0	0			KEC PIYUNGAN	
		Penyelenggaraan Lomba Desa										0	0			KEC PIYUNGAN	
			lembur PNS									0	0			KEC PIYUNGAN	
			Makan minum rapat									0	0			KEC PIYUNGAN	
		Pembinaan Organisasi Perempuan		persen	100	14.000.000	100	14.000.000	25	3.500.000		3.500.000	0	14.000.000	0,00%	100,00%	KEC PIYUNGAN
			Makan Minum Kegiatan	dos	400	14.000.000	400	14.000.000					0	0	0,00%	0,00%	KEC PIYUNGAN
													0	0			KEC PIYUNGAN
		Pemberdayaan Petani		persen	100	5.250.000	100	5.250.000	0	-		-	0	5.250.000	0,00%	100,00%	KEC PIYUNGAN
			Makan Minum Rapat	dos	150	5.250.000	150	5.250.000					0	0	0,00%	0,00%	KEC PIYUNGAN
													0	0			KEC PIYUNGAN
		Pemantauan Penyebarluasan Informasi Bencana Alam		persen	100	15.000.000	100	15.000.000	12,6	1.890.000		1.375.000	0	15.000.000	0,00%	100,00%	KEC PIYUNGAN
			Makan Minum Kegiatan	dos	260	9.000.000	260	9.000.000					0	0	0,00%	0,00%	KEC PIYUNGAN
			Jasa Nara Sumber	jpl	6	3.300.000	6	3.300.000					0	0	0,00%	0,00%	KEC PIYUNGAN
			Jasa Peserta	ok	90	2.700.000	90	2.700.000					0	0	0,00%	0,00%	KEC PIYUNGAN
	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan						123.500.000	0	98.335.499		123.474.839	0	123.474.839		99,98%	KEC SANDEN	
	Pengembangan Produk Unggulan Kecamatan	Partisipasi Bantul ekspo					48.500.000	97,36	47.217.500	100	48.479.980	100	48.479.980		99,96%	KEC SANDEN	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								III		IV						
1	4	5		8		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		pameran UMKM Kecamatan Sanden										0	0			KEC SANDEN
	Pendampingan Lomba Tingkat Kecamatan/Desa	Jumlah lomba lomba : 1k kec & desa			20.000.000		52,48	10.495.000	100	19.994.860	100	19.994.860		99,97%	KEC SANDEN	
	Pemberdayaan Lembaga Desa	Jumlah kegiatan pembinaan LKD			10.000.000		47,5	4.750.000	100	10.000.000	100	10.000.000		100,00%	KEC SANDEN	
	Pembinaan Organisasi Perempuan	Jumlah pembinaan PKK			45.000.000		79,72	35.872.999	100	44.999.999	100	44.999.999		100,00%	KEC SANDEN	

2. Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (2018) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							III		IV						
1	2	4	5		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga	Jumlah cabor yang difasilitasi dan diberdayakan	36 cabor	36	208.100.000		36.975.000	36	201.804.900	36	201.804.900	100,00%		DINAS PENDIDIKAN PEMUDA & OLAH RAGA
		Peningkatan Mutu Organisasi dan Tenaga Keolahragaan	jumlah tenaga keolahragaan 2 cab olahraga yang terlatih	60 orang	120	208.100.000	32	36.975.000	120	201.804.900	120	201.804.900	100,00%		DINAS PENDIDIKAN PEMUDA & OLAH RAGA
		Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Jumlah cabor yang ikut kompetisi	23 Cabor	23	9.207.578.100		4.290.418.150	23	9.018.401.124	23	9.018.401.124	100,00%		DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
		Pengembangan olahraga rekreasi	jumlah peserta yang terlibat dalam kegiatan	75000 orang	78000	4.465.274.600	42150	2.138.575.000	78000	4.430.927.000	78000	4.430.927.000	100,00%		DINAS PENDIDIKAN PEMUDA & OLAH RAGA
		Pembinaan dan Penyelenggaraan kompetisi olahraga	jumlah cabang olahraga dan seni	30 cabang	30	4.742.303.500	17	2.151.843.150	30	4.587.474.124	30	4.587.474.124	100,00%		DINAS PENDIDIKAN PEMUDA & OLAH RAGA
		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan sesuai SPM	SD: 46 , SMP: 67	SD: 46 , SMP: 67	35.918.817.800		17.461.154.251		34.883.384.551		34.883.384.551			DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
		Evaluasi standar pelayanan minimal	Jumlah pelaksanaan sosialisasi dan evaluasi 27 indikator pencapaian SPM	501 sekolah	501	279.910.000			501	209.644.500	501	209.644.500	100,00%		DINAS PENDIDIKAN PEMUDA & OLAH RAGA
		Peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan	Jumlah verifikasi peningkatan mutu	16 paket	10	35.469.832.800	14	17.419.854.251	10	34.553.505.051	10	34.553.505.051	100,00%		DINAS PENDIDIKAN PEMUDA & OLAH RAGA

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (2018) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							III		IV						
1	2	4	5		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			jumlah penerima insentif GTT/PTT TK/RA/PAUD/SLB	3722 orang	3640		1861		3640		3640		100,00%		DINAS PENDIDIKAN PEMUDA & OLAH RAGA
			Jumlah penerima Insentif GTT/PTT SD	1384 orang	1320		692		1320		1320		100,00%		DINAS PENDIDIKAN PEMUDA & OLAH RAGA
			jumlah penerima Insentif GTT/PPT SMP	2709 orang	2670		1354,5		2670		2670		100,00%		DINAS PENDIDIKAN PEMUDA & OLAH RAGA
		Pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan	Jumlah dokumen	4 dokumen	4	169.075.000	1	41.300.000	4	120.235.000	4	120.235.000	100,00%		DINAS PENDIDIKAN PEMUDA & OLAH RAGA
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Persentase sarana dan prasarana olahraga dalam kondisi baik dibanding cabor	42 : 1	42 : 1	4.237.549.700		1.271.902.661	42 : 1	3.591.923.169	42 : 1	3.591.923.169	100,00%	84,76%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
		Peningkatan Sarana dan Prasarana olahraga	sarana dan prasarana di komplek stadion Sultan Agung dan lapangan Dwi Windu	2 lokasi	2	4.237.549.700	1	1.271.902.661	2	3.591.923.169	2	3.591.923.169	100,00%	84,76%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA & OLAH RAGA
		Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Jumlah SD/MI ber-SSN	24	24	1.174.145.000		223.759.500	23	580.700.300	23	580.700.300	95,83%	49,46%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
			Jumlah SMPMT's ber-SSN	42	42										DINAS PENDIDIKAN PEMUDA & OLAH RAGA
			Rasio guru - siswa SD/MI	15,5	15,5				16,02		16,02		103,35%		DINAS PENDIDIKAN PEMUDA & OLAH RAGA
			Rasio guru - siswa SMP/MTs	14	14				14,08		14,08		100,57%		DINAS PENDIDIKAN PEMUDA & OLAH RAGA
			Rasio ruang kelas - siswa SD/MI	23,23	23,23				23,51		23,51		101,21%		DINAS PENDIDIKAN PEMUDA & OLAH RAGA
			Rasio ruang kelas - siswa SMP/MTs	29	29				28,42		28,42		98,00%		DINAS PENDIDIKAN PEMUDA & OLAH RAGA
		Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	tersedianya aplikasi pendukung pendidikan	1 Paket	1	500.000.000		1.800.000		1.800.000		1.800.000		0,36%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA & OLAH RAGA
		Penyusunan kalender pendidikan dan penerimaan peserta didik baru (PPDB)	jumlah peserta PPDB dan kalender pendidikan	1,056 sekolah	1020	366.569.500	560	113.784.500	1020	344.784.500	1020	344.784.500	100,00%	94,06%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA & OLAH RAGA
		Pembinaan dan operasional dewan pendidikan	Tersosialisasinya program dewan pendidikan	5 paket	5	128.850.500	3	48.475.000	3	57.540.800	3	57.540.800	60,00%	44,66%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA & OLAH RAGA
		Pengembangan jardiknas	jumlah paket koneksi	12 paket	12		6		12		12		100,00%	99,50%	DINAS PENDIDIKAN

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (2018) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							III		IV						
1	2	4	5		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		dan pemeliharaan ICT				120.875.000		59.700.000		120.275.000		120.275.000			PEMUDA & OLAH RAGA
		Penanaman iman, taqwa, dan akhlak mulia	jumlah buku	1,000 eksemplar	1000	45.000.000			1000	44.850.000	1000	44.850.000	100,00%	99,67%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA & OLAH RAGA
		Peningkatan pelayanan pendidikan inklusi	jumlah siswa inklusi	25 siswa	15	12.850.000			15	11.450.000	15	11.450.000	100,00%	89,11%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA & OLAH RAGA
		Program Peningkatan Nilai Akademik	Peringkat rata-rata nilai US/ M SD/MI	3	3	3.899.400.500		1.826.070.500	4	3.473.795.500	4	3.473.795.500	133,33%	89,09%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
			Peringkat rata-rata nilai UN SMP/MTs	2					3		3				DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
		Penambahan Pelajaran	Jumlah siswa SMP/MTS yang mendapat tambahan pelajaran	13100 siswa	13100	2.731.900.000	9000	1.794.440.000	13100	2.463.765.000	13100	2.463.765.000	100,00%	90,19%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
			Jumlah siswa SD/MI yang mendapat tambahan pelajaran	12900 siswa	12900		8000		12900		12900		100,00%		DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
		Peningkatan Metode Pengajaran	Jumlah guru peserta diklat peningkatan mutu	907 orang	907	1.135.870.000			907	978.400.000	907	978.400.000	100,00%	86,14%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
		Peningkatan Peran Orangtua	Jumlah pendampingan peningkatan peran orang tua terhadap anak didik	1 kegiatan	1	31.630.500	1	31.630.500	1	31.630.500	1	31.630.500	100,00%	100,00%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
		Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Penggunaan Obat Rasional (POR)		94	6.251.350.000	88	1.814.405.548		3.942.853.081		3.942.853.081		63,07%	DINAS KESEHATAN
		Pengadaan obat dan peningkatan layanan farmasi	Pengadaan Obat		94	6.251.350.000	88	1.814.405.548							DINAS KESEHATAN
			Jumlah pengadaan obat dan perbekalan kesehatan		40	3.882.546.000	82	1.814.405.548							DINAS KESEHATAN
			Jumlah pengadaan gedung		0										DINAS KESEHATAN
			Jumlah pengadaan sarpras		0										DINAS KESEHATAN
			Waktu distribusi obat ke puskesmas		12	76.570.000	3								DINAS KESEHATAN
			Jumlah paket pemusnahan obat		0										DINAS KESEHATAN
			Waktu pengelolaan,move dan pelaporan obat		12	60.234.000	3								DINAS KESEHATAN
			Jumlah pengadaan obat penunjang yandas, program dan perbekalan kesehatan		30	2.232.000.000									DINAS KESEHATAN

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (2018) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							III		IV						
1	2	4	5		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Puskesmas melaksanakan pelayanan Kesehatan Dasar		4333	77.653.193.563	1854,74	17.030.193.370	2292,69189	25.796.512.806	6139,32823	71.234.159.902	141,69%	91,73%	DINAS KESEHATAN
			Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional		2										DINAS KESEHATAN
			Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Program Indonesia Sehat dengan pendekatan Keluarga (PIS-PK)		27										DINAS KESEHATAN
			Jumlah Puskesmas melaksanakan Gerakan Masyarakat Sehat		27										DINAS KESEHATAN
		Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan			154	683.905.000	23	174.219.000	39	153.383.700	154	666.330.900	100,00%	97,43%	DINAS KESEHATAN
			Belanja Pegawai dan honor Tim		12	105.120.000	3	24.000.000	3	34.182.000		106.182.000		101,01%	DINAS KESEHATAN
			Rapat Koordinasi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Tradisional		61	73.525.000	10	23.589.000	10	13.081.000		73.525.000		100,00%	DINAS KESEHATAN
			Peningkatan Kapasitas SDM Pelayanan Kesehatan Dasar dan Tradisional		53	186.885.000	4	40.310.000	17	18.037.800		181.885.000		97,32%	DINAS KESEHATAN
			Workshop Pelayanan Kesehatan dasar dan Tradisional		11	99.850.000	2	27.520.000	4	17.201.900		94.031.900		94,17%	DINAS KESEHATAN
			Bimbingan Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar dan Tradisional		4	49.650.000	2	27.000.000	1	6.900.000		49.650.000		100,00%	DINAS KESEHATAN
			pelayanan psikolog di puskesmas		12	126.875.000	2	31.800.000	3	29.799.000		126.875.000		100,00%	DINAS KESEHATAN
		Peningkatan kesehatan masyarakat	Jumlah kegiatan UKM Puskesmas		6	332.990.000				325.588.000		325.588.000		97,78%	DINAS KESEHATAN
			terlaksananya pembekalan aplikasi PIS PK (yankesdas)		7	40.000.000									DINAS KESEHATAN
			Terlaksananya penyamaan persepsi DO PIS PK (yankesdas)												DINAS KESEHATAN
		Monitoring, evaluasi dan pelaporan	- Terlaksananya kegiatan pengelolaan keuangan barang, kepegawaian dan program sesuai dengan ketentuan		12	155.685.000	3	19.050.000	3	80.413.000	9	152.860.000	75,00%	98,19%	DINAS KESEHATAN

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (2018) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							III		IV						
1	2	4	5		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Perijinan dan pengawasan praktek tenaga dan sarana kesehatan	Perijinan dan Pengawasan Praktik Tenaga & Sarana Kesehatan			120.364.000		46.980.000		21.663.100		119.432.200		99,23%	DINAS KESEHATAN
			Terlaksananya binwasdal bidang kesehatan		300	68.924.000	55	6.975.000	50	18.783.100	300	68.572.200	100,00%	99,49%	DINAS KESEHATAN
			Terlaksananya FGD Perizinan		135	9.815.000	25	2.285.000	40	2.880.000	135	9.815.000	100,00%	100,00%	DINAS KESEHATAN
			Terlaksananya Update Knowledge Petugas Perizinan		15	2.625.000					15	2.625.000	100,00%	100,00%	DINAS KESEHATAN
			Terlaksananya pengembangan software Pelayanan Perizinan di Bidang Kesehatan (SIMPERKES)		1	25.900.000	1	25.820.000			1	25.820.000	100,00%	99,69%	DINAS KESEHATAN
			Terbitnya Perda Pelayanan dan Perizinan Bidang Kesehatan		1	13.100.000	1	11.900.000			1	12.600.000	100,00%	96,18%	DINAS KESEHATAN
		Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Srandakan	Terlaksananya pelayanan kesehatan di Puskesmas			2.863.638.623		623.643.680	104	861.246.864	403	2.535.186.314		88,53%	DINAS KESEHATAN
			Belanja gaji pegawai BLUD		24	180.000.000	6	37.215.000	6	37.215.000					DINAS KESEHATAN
			Belanja Barang dan Jasa		352	2.262.604.223	97	482.845.480	97	817.645.144					DINAS KESEHATAN
			-BMHP		34	158.000.000	10	27.333.152	8	32.785.338					DINAS KESEHATAN
			-Jasa Pelayanan		12	1.567.609.877	3	332.216.300	3	574.678.505					DINAS KESEHATAN
			-Perkantoran		44	51.400.000	12	20.402.710	9	29.285.167					DINAS KESEHATAN
			-Kerumahtanggaan		262	425.794.346	62	93.863.768	65	164.228.513					DINAS KESEHATAN
			-Pemeliharaan		37	59.800.000	10	9.029.550	12	16.667.621					DINAS KESEHATAN
			belanja modal		2	421.034.400		103.583.200	1	6.386.720					DINAS KESEHATAN
			- tanah												DINAS KESEHATAN
			- peralatan dan mesin		1	121.034.400	1	2.083.200	0	-					DINAS KESEHATAN
			- gedung dan bangunan		1	300.000.000	1	101.500.000	1	6.386.720					DINAS KESEHATAN
			- jalan, jaringan, instalasi		0	-									DINAS KESEHATAN
			- asset tetap lainnya		0	-									DINAS KESEHATAN

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (2018) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							III		IV						
1	2	4	5		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Sanden	Terlaksananya pelayanan kesehatan di Puskesmas			2.326.200.000	184	515.948.028	232.271.887	869.468.540	663.271.887	2.328.435.539		100,10%	DINAS KESEHATAN
			Belanja gaji pegawai BLUD		12	192.000.000	3	40.250.000	3	57.000.000					DINAS KESEHATAN
			Belanja Barang dan Jasa		668	2.070.200.000	169	425.246.728	223.293.87	787.335.315					DINAS KESEHATAN
			-BMHP		120	135.000.000	36	29.260.140	29.307.9876	23.820.995					DINAS KESEHATAN
			~Jasa Pelayanan		36	1.386.500.000	3	308.900.150	5.9630.6433	613.997.155					DINAS KESEHATAN
			-Perkantoran		136	72.500.000	38	15.044.450	42.273.6244	16.736.406					DINAS KESEHATAN
			-Kerumah tanggaan		356	448.200.000	85	68.896.988	142,74.9194	115.705.759					DINAS KESEHATAN
			-Pemeliharaan		20	28.000.000	7	3.145.000	3	17.075.000					DINAS KESEHATAN
			belanja modal		19	64.000.000	12	50.451.300	5,9780.1642	25.133.225					DINAS KESEHATAN
			- tanah		0					-					DINAS KESEHATAN
			- peralatan dan mesin		19	64.000.000	12	50.451.300	9	25.133.225					DINAS KESEHATAN
			- gedung dan bangunan		0										DINAS KESEHATAN
			- jalan, jaringan, instalasi		0										DINAS KESEHATAN
			- asset tetap lainnya		0										DINAS KESEHATAN
		Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Kretek	Terlaksananya pelayanan kesehatan di Puskesmas			2.538.750.000		487.568.597		872.083.307		2.352.718.186		92,67%	DINAS KESEHATAN
			Belanja gaji pegawai BLUD		12	199.400.000	3	26.304.300	4	47.108.600					DINAS KESEHATAN
			Belanja Barang dan Jasa			2.157.350.000		461.264.297		752.834.677					DINAS KESEHATAN
			-BMHP		140	252.500.000	6	33.194.486	6	46.046.170					DINAS KESEHATAN
			~Jasa Pelayanan		12	1.250.000.000	3	302.158.350	4	508.913.635					DINAS KESEHATAN
			-Perkantoran		170	276.500.000	17	34.043.637	19	71.142.346					DINAS KESEHATAN
			-Kerumah tanggaan		145	210.000.000	12	69.664.474	13	84.948.226					DINAS KESEHATAN
			-Pemeliharaan		95	168.350.000	9	22.203.350	9	41.784.300					DINAS KESEHATAN
			belanja modal			185.000.000				72.140.030					DINAS KESEHATAN

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (2018) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							III		IV						
1	2	4	5		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%	16	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			- tanah												DINAS KESEHATAN
			- peralatan dan mesin		20	185.000.000				72.140.030					DINAS KESEHATAN
			- gedung dan bangunan												DINAS KESEHATAN
			- jalan, jaringan, instalasi												DINAS KESEHATAN
			- asset tetap lainnya												DINAS KESEHATAN
		Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Pundong	Terlaksananya pelayanan kesehatan di Puskesmas			2.776.220.028		728.925.728		846.267.593		2.843.546.092		102,43%	DINAS KESEHATAN
			Belanja gaji pegawai BLUD			288.000.000		62.000.000		44.250.000					DINAS KESEHATAN
			Belanja Barang dan Jasa			2.312.620.028		666.925.728		788.425.238					DINAS KESEHATAN
			-BMHP		2	123.600.000		23.729.233		20.480.597					DINAS KESEHATAN
			-Jasa Pelayanan		1	1.734.600.000		499.467.450		592.471.566					DINAS KESEHATAN
			-Perkantoran		4	56.880.000		19.949.559		20.812.497					DINAS KESEHATAN
			-Kerumah tanggaan		28	355.540.028		120.376.486		139.134.358					DINAS KESEHATAN
			-Pemeliharaan		3	42.000.000		3.403.000		15.526.220					DINAS KESEHATAN
			belanja modal			175.600.000				13.592.355					DINAS KESEHATAN
			- tanah							-					DINAS KESEHATAN
			- peralatan dan mesin		5	175.600.000				13.592.355					DINAS KESEHATAN
			- gedung dan bangunan							-					DINAS KESEHATAN
			- jalan, jaringan, instalasi							-					DINAS KESEHATAN
			- asset tetap lainnya							-					DINAS KESEHATAN
		Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Bambanglipuro	Terlaksananya pelayanan kesehatan di Puskesmas			3.109.000.000		710.259.536		1.080.322.386		3.032.827.365		97,55%	DINAS KESEHATAN
			Belanja gaji pegawai BLUD		120	240.000.000		72.360.000		72.360.000					DINAS KESEHATAN
			Belanja Barang dan Jasa			2.587.000.000		636.216.536		875.388.828					DINAS KESEHATAN
			-BMHP		150	313.800.000		61.522.845		63.118.508					DINAS KESEHATAN

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (2018) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							III		IV						
1	2	4	5		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%	16	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			-Jasa Pelayanan		12	1.824.000.000		437.425.950		672.886.140					DINAS KESEHATAN
			-Perkantoran		50	173.000.000		35.164.167		21.439.540					DINAS KESEHATAN
			-Kerumah tanggaan		48	119.200.000		72.139.549		105.204.640					DINAS KESEHATAN
			-Pemeliharaan		15	157.000.000		29.964.025		12.740.000					DINAS KESEHATAN
			belanja modal			282.000.000		1.683.000		132.573.558					DINAS KESEHATAN
			- tanah												DINAS KESEHATAN
			- peralatan dan mesin		50	282.000.000		1.683.000		132.573.558					DINAS KESEHATAN
			- gedung dan bangunan												DINAS KESEHATAN
			- jalan, jaringan, instalasi												DINAS KESEHATAN
			- asset tetap lainnya												DINAS KESEHATAN
		Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Pandak I	Terlaksananya pelayanan kesehatan di Puskesmas			1.973.301.034		415.109.933		645.032.458		1.866.287.417		94,58%	DINAS KESEHATAN
			Belanja gaji pegawai BLUD			165.360.000		27.961.329		27.961.329					DINAS KESEHATAN
			Belanja Barang dan Jasa			1.727.941.034		387.148.604		556.112.629					DINAS KESEHATAN
			-BMHP		20	180.800.000		42.881.225		60.891.320					DINAS KESEHATAN
			-Jasa Pelayanan		72	1.241.131.034		269.967.750		401.628.006					DINAS KESEHATAN
			-Perkantoran		4	57.600.000		5.645.950		12.132.800					DINAS KESEHATAN
			-Kerumah tanggaan		32	231.310.000		66.291.279		75.775.503					DINAS KESEHATAN
			-Pemeliharaan		40	17.100.000		2.362.400		5.685.000					DINAS KESEHATAN
			belanja modal			80.000.000				60.958.500					DINAS KESEHATAN
			- tanah												DINAS KESEHATAN
			- peralatan dan mesin		10	70.000.000				60.958.500					DINAS KESEHATAN
			- gedung dan bangunan		1	10.000.000									DINAS KESEHATAN
			- jalan, jaringan, instalasi												DINAS KESEHATAN
			- asset tetap lainnya												DINAS KESEHATAN

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (2018) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							III		IV						
1	2	4	5		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Pandak II	Terlaksananya pelayanan kesehatan di Puskesmas		100	1.810.000.000	12	417.793.848		678.559.250		1.808.613.942		99,92%	DINAS KESEHATAN
			Belanja gaji pegawai BLUD		48	144.000.000	12	36.912.900	12	36.912.900					DINAS KESEHATAN
			Belanja Barang dan Jasa			1.566.000.000		380.880.948		537.546.289					DINAS KESEHATAN
			-BMHP			100.000.000	10	19.222.600	15	31.890.700					DINAS KESEHATAN
			~Jasa Pelayanan		12	1.077.000.000	3	291.433.300	3	369.646.043					DINAS KESEHATAN
			-Perkantoran			62.400.000	6	19.576.250	4	10.440.950					DINAS KESEHATAN
			-Kerumahtanggaan			301.600.000	25	47.298.798	50	120.763.596					DINAS KESEHATAN
			-Pemeliharaan		30	25.000.000	9	3.350.000	10	4.805.000					DINAS KESEHATAN
			belanja modal			100.000.000				104.100.061					DINAS KESEHATAN
			- tanah												DINAS KESEHATAN
			- peralatan dan mesin		10	100.000.000				74.114.061					DINAS KESEHATAN
			- gedung dan bangunan												DINAS KESEHATAN
			- jalan, jaringan, instalasi												DINAS KESEHATAN
			- asset tetap lainnya							29.986.000					DINAS KESEHATAN
		Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Bantul I	Terlaksananya pelayanan kesehatan di Puskesmas		440	2.313.000.000		653.312.086		823.999.330	63	2.350.615.694	14,32%	101,63%	DINAS KESEHATAN
			Belanja gaji pegawai BLUD		72	288.000.000	33	82.920.000	22	59.565.000				0,00%	DINAS KESEHATAN
			Belanja Barang dan Jasa		348	1.849.200.000		432.159.286		751.884.330					DINAS KESEHATAN
			-BMHP		36	154.000.000	8	33.649.992	34	72.609.253					DINAS KESEHATAN
			~Jasa Pelayanan		12	1.221.120.750	3	317.113.850	5	494.975.658					DINAS KESEHATAN
			-Perkantoran		84	53.500.000	53	33.797.628	114	70.141.006					DINAS KESEHATAN
			-Kerumahtanggaan		168	299.579.250	15	25.922.366	70	29.382.933					DINAS KESEHATAN
			-Pemeliharaan		48	121.000.000	9	21.675.450	25	84.775.480					DINAS KESEHATAN
			belanja modal		20	175.800.000		138.232.800		12.550.000					DINAS KESEHATAN
			- tanah					-							DINAS KESEHATAN

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (2018) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							III		IV						
1	2	4	5		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			- peralatan dan mesin		20	175.800.000	16	138.232.800	4	12.550.000					DINAS KESEHATAN
			- gedung dan bangunan					-							DINAS KESEHATAN
			- jalan, jaringan, instalasi					-							DINAS KESEHATAN
			- asset tetap lainnya					-							DINAS KESEHATAN
		Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Bantul II	Terlaksananya pelayanan kesehatan di Puskesmas			1.853.991.800	3	393.144.271	3	501.788.263	12	1.522.680.948		82,13%	DINAS KESEHATAN
			Belanja gaji pegawai BLUD		12	200.000.000	3	40.215.000	3	40.215.000					DINAS KESEHATAN
			Belanja Barang dan Jasa					339.012.271		438.313.163					DINAS KESEHATAN
			-BMHP		30	137.000.000	8	38.957.750	8	36.356.875					DINAS KESEHATAN
			-Jasa Pelayanan		12	1.119.500.000	3	254.595.000	3	343.637.900					DINAS KESEHATAN
			-Perkantoran		120	73.991.800	25	9.563.825	30	16.028.576					DINAS KESEHATAN
			-Kerumahahtagaan		180	227.000.000	30	26.458.196	50	24.107.812					DINAS KESEHATAN
			-Pemeliharaan		12	46.500.000	3	9.437.500	3	18.182.000					DINAS KESEHATAN
			belanja modal					13.917.000	0	23.260.100					DINAS KESEHATAN
			- tanah		5	50.000.000									DINAS KESEHATAN
			- peralatan dan mesin			-	3	13.917.000		23.260.100					DINAS KESEHATAN
			- gedung dan bangunan			-									DINAS KESEHATAN
			- jalan, jaringan, instalasi			-									DINAS KESEHATAN
			- asset tetap lainnya			-									DINAS KESEHATAN
		Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Jetis I	Terlaksananya pelayanan kesehatan di Puskesmas			2.304.338.351	34	506.280.759	47	701.947.504	137	2.115.986.706		91,83%	DINAS KESEHATAN
			Belanja gaji pegawai BLUD		12	147.000.000	4	26.331.450	4	27.131.450					DINAS KESEHATAN
			Belanja Barang dan Jasa			2.018.938.351	27	474.628.559	38	650.368.804					DINAS KESEHATAN
			-BMHP		12	201.600.000	6	32.008.578	6	39.325.334					DINAS KESEHATAN
			-Jasa Pelayanan		12	1.104.000.000	4	275.410.485	6	383.291.180					DINAS KESEHATAN
			-Perkantoran		12	324.240.000	9	41.659.799	13	56.832.506					DINAS KESEHATAN

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (2018) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							III		IV						
1	2	4	5		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			-Kerumah tanggaan		12	341.098.351	5	119.668.797	8	159.609.954					DINAS KESEHATAN
			-Pemeliharaan		12	48.000.000	3	5.880.900	5	11.309.792					DINAS KESEHATAN
			belanja modal			138.400.000	3	5.320.750	5	24.447.250					DINAS KESEHATAN
			- tanah												DINAS KESEHATAN
			- peralatan dan mesin		12	138.400.000	3	5.320.750	5	24.447.250					DINAS KESEHATAN
			- gedung dan bangunan												DINAS KESEHATAN
			- jalan, jaringan, instalasi												DINAS KESEHATAN
			- asset tetap lainnya												DINAS KESEHATAN
		Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Jetis II	Terlaksananya pelayanan kesehatan di Puskesmas			1.476.250.000	3	376.804.981	56	483.065.898	290,08 0699	1.484.250.497		100,54%	DINAS KESEHATAN
			Belanja gaji pegawai BLUD		100	103.860.000	3	20.715.000	3	20.715.000					DINAS KESEHATAN
			Belanja Barang dan Jasa			1.242.390.000		353.878.163		414.061.930					DINAS KESEHATAN
			-BMHP		100	68.500.000	3	13.209.922	3	26.539.204					DINAS KESEHATAN
			-Jasa Pelayanan		100	852.750.000	3	225.481.329	3	229.628.750					DINAS KESEHATAN
			-Perkantoran		100	45.150.000	3	17.051.197	3	18.157.550					DINAS KESEHATAN
			-Kerumah tanggaan		100	185.490.000	3	32.660.604	3	81.729.526					DINAS KESEHATAN
			-Pemeliharaan		100	90.500.000	3	65.475.111	3	58.006.900					DINAS KESEHATAN
			belanja modal			130.000.000		2.211.818		48.288.968					DINAS KESEHATAN
			- tanah												DINAS KESEHATAN
			- peralatan dan mesin		100	94.000.000	1	2.211.818	3	36.288.968					DINAS KESEHATAN
			- gedung dan bangunan		100	36.000.000			1	12.000.000					DINAS KESEHATAN
			- jalan, jaringan, instalasi												DINAS KESEHATAN
			- asset tetap lainnya												DINAS KESEHATAN
		Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Imogiri I	Terlaksananya pelayanan kesehatan di Puskesmas			1.997.349.000	71,5	511.840.241	76	636.342.629	281,5	2.109.918.524		105,64%	DINAS KESEHATAN
			Belanja gaji pegawai BLUD		36	106.860.000	10,5	30.581.450	16	43.108.600					DINAS KESEHATAN

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (2018) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							III		IV						
1	2	4	5		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Belanja Barang dan Jasa			1.865.489.000	59	472.933.791	56	582.681.529					DINAS KESEHATAN
			-BMHP		15	81.186.400	3	30.719.114	1	34.527.270					DINAS KESEHATAN
			-Jasa Pelayanan		12	1.257.650.450	3	311.383.304	2	336.867.240					DINAS KESEHATAN
			-Perkantoran		100	223.652.150	25	70.553.283	25	87.183.239					DINAS KESEHATAN
			-Kerumahtanggaan		25	220.000.000	25	45.454.590	25	77.012.510					DINAS KESEHATAN
			-Pemeliharaan		6	83.000.000	3	14.823.500	3	47.091.270					DINAS KESEHATAN
			belanja modal			25.000.000	2	8.325.000	4	10.552.500					DINAS KESEHATAN
			- tanah												DINAS KESEHATAN
			- peralatan dan mesin		3	25.000.000	2	8.325.000	1	3.232.500					DINAS KESEHATAN
			- gedung dan bangunan												DINAS KESEHATAN
			- jalan, jaringan, instalasi												DINAS KESEHATAN
			- asset tetap lainnya						3	7.320.000					DINAS KESEHATAN
		Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Imogiri II	Terlaksananya pelayanan kesehatan di Puskesmas		100	1.908.369.400		424.131.785		673.920.248		1.963.892.468		102,91%	DINAS KESEHATAN
			Belanja gaji pegawai BLUD		12	256.800.000	3	38.000.000	4	61.000.000					DINAS KESEHATAN
			Belanja Barang dan Jasa			1.583.569.400		383.947.785		529.920.759					DINAS KESEHATAN
			-BMHP		8	114.814.650	10	30.296.800	9	25.685.705					DINAS KESEHATAN
			-Jasa Pelayanan		12	1.080.000.000	3	284.159.850	3	416.213.786					DINAS KESEHATAN
			-Perkantoran		10	130.304.750	20	21.567.285	25	54.925.350					DINAS KESEHATAN
			-Kerumahtanggaan		12	234.950.000	7	40.579.250	5	27.204.318					DINAS KESEHATAN
			-Pemeliharaan		12	23.500.000	2	7.344.600	2	5.891.600					DINAS KESEHATAN
			belanja modal			68.000.000		2.184.000		82.999.489					DINAS KESEHATAN
			- tanah												DINAS KESEHATAN
			- peralatan dan mesin		8	68.000.000	1	2.184.000	5	82.999.489					DINAS KESEHATAN
			- gedung dan bangunan		3										DINAS KESEHATAN
			- jalan, jaringan, instalasi		1										DINAS KESEHATAN
			- asset tetap lainnya												DINAS KESEHATAN

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (2018) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							III		IV						
1	2	4	5		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Dlingo I	Terlaksananya pelayanan kesehatan di Puskesmas			1.730.848.874		360.444.448		502.311.300		1.647.993.831		95,21%	DINAS KESEHATAN
			Belanja gaji pegawai BLUD					-							DINAS KESEHATAN
			Belanja Barang dan Jasa			1.665.848.874		360.444.448		463.721.400				0,00%	DINAS KESEHATAN
			-BMHP			95.500.000		20.133.783		31.001.743				0,00%	DINAS KESEHATAN
			~Jasa Pelayanan			1.001.148.874		210.444.448		288.721.400				0,00%	DINAS KESEHATAN
			-Perkantoran												DINAS KESEHATAN
			-Kerumahtanggaan			500.700.000		119.494.217		112.670.557				0,00%	DINAS KESEHATAN
			-Pemeliharaan			68.500.000		10.372.000		31.327.700				0,00%	DINAS KESEHATAN
			belanja modal			65.000.000		-		38.589.900				0,00%	DINAS KESEHATAN
			- tanah												DINAS KESEHATAN
			- peralatan dan mesin												DINAS KESEHATAN
			- gedung dan bangunan			65.000.000				38.589.900				0,00%	DINAS KESEHATAN
			- jalan, jaringan, instalasi												DINAS KESEHATAN
			- asset tetap lainnya												DINAS KESEHATAN
		Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Dlingo II	Terlaksananya pelayanan kesehatan di Puskesmas			1.204.100.000	49	233.016.847	45	401.479.046		1.235.659.282		102,62%	DINAS KESEHATAN
			Belanja gaji pegawai BLUD		24	123.000.000	6	25.250.000	6	22.500.000			0,00%	0,00%	DINAS KESEHATAN
			Belanja Barang dan Jasa			988.100.000		207.766.847		345.191.558				0,00%	DINAS KESEHATAN
			-BMHP		36	30.000.000	6	4.019.800	18	12.399.215			0,00%	0,00%	DINAS KESEHATAN
			~Jasa Pelayanan		12	744.900.000	3	124.239.700	3	271.470.000			0,00%	0,00%	DINAS KESEHATAN
			-Perkantoran		12	24.000.000	3	5.508.245	3	8.735.500			0,00%	0,00%	DINAS KESEHATAN
			-Kerumahtanggaan		72	144.400.000	19	29.265.382	9	50.606.043			0,00%	0,00%	DINAS KESEHATAN
			-Pemeliharaan		24	44.800.000	12	44.733.720	2	1.980.800			0,00%	0,00%	DINAS KESEHATAN
			belanja modal			93.000.000		-	0	33.787.488				0,00%	DINAS KESEHATAN
			- tanah						0						DINAS KESEHATAN

No	Sasara n	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (2018) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							III		IV						
1	2	4	5		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			- peralatan dan mesin		5	71.000.000	0	-	3	32.037.488			0,00%	0,00%	DINAS KESEHATAN
			- gedung dan bangunan		1	22.000.000	0	-	1	1.750.000			0,00%	0,00%	DINAS KESEHATAN
			- jalan, jaringan, instalasi												DINAS KESEHATAN
			- asset tetap lainnya												DINAS KESEHATAN
		Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Pleret	Terlaksananya pelayanan kesehatan di Puskesmas			3.310.218.000	2	604.194.037	3	904.806.934	9	2.899.778.247		87,60%	DINAS KESEHATAN
			Belanja gaji pegawai BLUD		12	120.000.000	3	33.283.800	4	41.508.800					DINAS KESEHATAN
			Belanja Barang dan Jasa			2.877.318.000	2	541.199.942	3	763.088.174					DINAS KESEHATAN
			-BMHP		12	160.000.000	2	37.782.885	2	38.086.461					DINAS KESEHATAN
			~Jasa Pelayanan		12	1.935.818.000	2	381.782.295	3	461.340.755					DINAS KESEHATAN
			-Perkantoran		12	531.900.000	2	91.195.282	4	184.555.413					DINAS KESEHATAN
			-Kerumah tanggaan		12	164.700.000	1	22.980.125	4	63.318.045					DINAS KESEHATAN
			-Pemeliharaan		12	84.900.000	1	7.459.355	2	15.787.500					DINAS KESEHATAN
			belanja modal			312.900.000	1	29.710.295	3	100.209.960					DINAS KESEHATAN
			- tanah		12	166.200.000	0								DINAS KESEHATAN
			- peralatan dan mesin		12	66.700.000	1	29.710.295	3	100.209.960					DINAS KESEHATAN
			- gedung dan bangunan		12	50.000.000				-					DINAS KESEHATAN
			- jalan, jaringan, instalasi		12	30.000.000				-					DINAS KESEHATAN
			- asset tetap lainnya							-					DINAS KESEHATAN
		Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Piyungan	Terlaksananya pelayanan kesehatan di Puskesmas			3.363.496.642	59	758.975.764	117	1.069.117.171	282	3.236.557.432		96,23%	DINAS KESEHATAN
			Belanja gaji pegawai BLUD		12 Bulan	220.000.000	3	64.943.750	2	40.740.000					DINAS KESEHATAN
			Belanja Barang dan Jasa			2.730.796.642	49	630.485.814	93	853.752.592					DINAS KESEHATAN
			-BMHP		25 Jenis	262.959.591	10	59.070.520	18	84.623.674					DINAS KESEHATAN
			~Jasa Pelayanan		12 Bulan	1.904.225.526	3	459.686.100	3	587.883.245					DINAS KESEHATAN
			-Perkantoran		25 jenis	81.467.380	6	16.179.505	22	21.013.200					DINAS KESEHATAN

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (2018) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							III		IV						
1	2	4	5		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%	16	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			-Kerumahtangaan		120 jenis	443.238.145	20	83.469.089	35	141.438.073					DINAS KESEHATAN
			-Pemeliharaan		60 Kali	38.906.000	10	12.080.600	15	18.794.400					DINAS KESEHATAN
			belanja modal			412.700.000	7	63.546.200	22	174.624.579					DINAS KESEHATAN
			- tanah		1 bidang	-		-							DINAS KESEHATAN
			- peralatan dan mesin		12 Jenis	332.700.000	7	63.546.200	22	174.624.579					DINAS KESEHATAN
			- gedung dan bangunan		1 Unit	-		-							DINAS KESEHATAN
			- jalan, jaringan, instalasi			80.000.000		-							DINAS KESEHATAN
			- asset tetap lainnya		1 jenis	-		-							DINAS KESEHATAN
		Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Banguntapan I	Terlaksananya pelayanan kesehatan di Puskesmas Banguntapan I		100	2.086.100.000	3	510.265.873	4	738.216.910	0	2.146.528.903		102,90%	DINAS KESEHATAN
			Belanja gaji pegawai BLUD		12	147.000.000	3	14.305.000	4	9.860.000					DINAS KESEHATAN
			Belanja Barang dan Jasa			1.846.500.000		477.891.494		652.111.550					DINAS KESEHATAN
			-BMHP		25	139.000.000	3	35.518.498	3	55.069.082					DINAS KESEHATAN
			-Jasa Pelayanan		12	1.185.000.000	3	308.827.350	3	456.809.047					DINAS KESEHATAN
			-Perkantoran		5	95.808.000	5	21.880.574	4	46.780.068					DINAS KESEHATAN
			-Kerumahtangaan		11	373.017.000	11	105.771.072	11	51.325.256					DINAS KESEHATAN
			-Pemeliharaan		15	53.675.000	3	5.894.000	3	42.128.097					DINAS KESEHATAN
			belanja modal			92.600.000		18.069.379		76.245.360					DINAS KESEHATAN
			- tanah												DINAS KESEHATAN
			- peralatan dan mesin		4	92.600.000	1	18.069.379	2	76.245.360					DINAS KESEHATAN
			- gedung dan bangunan												DINAS KESEHATAN
			- jalan, jaringan, instalasi												DINAS KESEHATAN
			- asset tetap lainnya												DINAS KESEHATAN
		Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Banguntapan II	Terlaksananya pelayanan kesehatan di Puskesmas			1.861.200.000		626.756.956		486.524.588		1.929.886.858		103,69%	DINAS KESEHATAN
			Belanja gaji pegawai BLUD		24	72.000.000	9	17.500.000							DINAS KESEHATAN

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (2018) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							III		IV						
							K	Rp	K	Rp					K
1	2	4	5		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
			Belanja Barang dan Jasa			1.715.200.000		604.416.956							DINAS KESEHATAN
			-BMHP		30	112.200.000	15	32.098.548							DINAS KESEHATAN
			-Jasa Pelayanan		12	1.090.000.000	3	236.187.100							DINAS KESEHATAN
			-Perkantoran		10	19.800.000	5	22.988.400							DINAS KESEHATAN
			-Kerumah tanggaa		30	461.200.000	10	261.200.533							DINAS KESEHATAN
			-Pemeliharaan		20	32.000.000	4	51.942.375							DINAS KESEHATAN
			belanja modal			74.000.000		4.840.000							DINAS KESEHATAN
			- tanah												DINAS KESEHATAN
			- peralatan dan mesin		6	74.000.000		4.840.000							DINAS KESEHATAN
			- gedung dan bangunan												DINAS KESEHATAN
			- jalan, jaringan, instalasi												DINAS KESEHATAN
			- asset tetap lainnya												DINAS KESEHATAN
		Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Banguntapan III	Terlaksananya pelayanan kesehatan di Puskesmas			1.231.191.000			352.073.614		721.619.985		58,61%		DINAS KESEHATAN
			Belanja gaji pegawai BLUD					13.000.000		22.000.000					DINAS KESEHATAN
			Belanja Barang dan Jasa					185.552.814		302.724.524					DINAS KESEHATAN
			-BMHP					10.420.250		4.738.000					DINAS KESEHATAN
			-Jasa Pelayanan					138.021.000		218.054.434					DINAS KESEHATAN
			-Perkantoran					17.593.564		58.585.855					DINAS KESEHATAN
			-Kerumah tanggaa					16.667.000							DINAS KESEHATAN
			-Pemeliharaan					2.851.000		21.346.235					DINAS KESEHATAN
			belanja modal							27.349.090					DINAS KESEHATAN
			- tanah												DINAS KESEHATAN
			- peralatan dan mesin							27.349.090					DINAS KESEHATAN
			- gedung dan bangunan												DINAS KESEHATAN

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (2018) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							III		IV			K	Rp		K
1	2	4	5		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			- jalan, jaringan, instalasi												DINAS KESEHATAN
			- asset tetap lainnya					475.000							DINAS KESEHATAN
		Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Sewon I	Terlaksananya pelayanan kesehatan di Puskesmas			2.591.175.611	3	659.692.439		769.909.866		2.591.059.204		100,00%	DINAS KESEHATAN
			Belanja gaji pegawai BLUD		12	190.564.500	3	52.744.350		52.744.350					DINAS KESEHATAN
			Belanja Barang dan Jasa			2.289.636.111		569.948.289		687.612.216					DINAS KESEHATAN
			-BMHP		7	192.784.774	3	51.430.328		41.021.244					DINAS KESEHATAN
			-Jasa Pelayanan		12	1.640.031.972	3	403.296.050		533.996.200					DINAS KESEHATAN
			-Perkantoran		4	56.687.250	3	17.746.000		8.661.400					DINAS KESEHATAN
			-Kerumahtanggaan		28	338.994.765	3	79.851.811		14.067.000					DINAS KESEHATAN
			-Pemeliharaan		3	61.137.350	3	17.624.100		89.866.372					DINAS KESEHATAN
			belanja modal			110.975.000		36.999.800		29.553.300					DINAS KESEHATAN
			- tanah												DINAS KESEHATAN
			- peralatan dan mesin		14	75.975.000	1	1.999.800		29.553.300					DINAS KESEHATAN
			- gedung dan bangunan		1	35.000.000	1	35.000.000							DINAS KESEHATAN
			- jalan, jaringan, instalasi												DINAS KESEHATAN
			- asset tetap lainnya												DINAS KESEHATAN
		Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Sewon II	Terlaksananya pelayanan kesehatan di Puskesmas		294	2.203.968.000	73	489.904.875	15	74.382.000		1.060.940.651		48,14%	DINAS KESEHATAN
			Belanja gaji pegawai BLUD		12	111.000.000	3	16.500.000	3	16.500.000					DINAS KESEHATAN
			Belanja Barang dan Jasa		12	111.000.000	67	455.099.875	78	601.813.335					DINAS KESEHATAN
			-BMHP		276	2.017.968.000	7	47.236.400	12	57.882.000					DINAS KESEHATAN
			-Jasa Pelayanan		36	190.000.000	3	278.180.793	3	385.855.250					DINAS KESEHATAN
			-Perkantoran		12	1.120.000.000	20	13.689.950	24	15.811.825					DINAS KESEHATAN
			-Kerumahtanggaan		88	80.968.000	23	72.204.732	30	130.189.272					DINAS KESEHATAN

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (2018) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							III		IV						
							1	2	4	5			8b (APBDP 2018)		11
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			-Pemeliharaan		60	392.250.000	14	43.788.000	9	12.074.988					DINAS KESEHATAN
			belanja modal		80	234.750.000	2	18.205.000	2	30.531.800					DINAS KESEHATAN
			- tanah		106	3.100.000.000	2	18.205.000	2	30.531.800					DINAS KESEHATAN
			- peralatan dan mesin		6	75.000.000									DINAS KESEHATAN
			- gedung dan bangunan												DINAS KESEHATAN
			- jalan, jaringan, instalasi												DINAS KESEHATAN
			- asset tetap lainnya												DINAS KESEHATAN
		Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Kasihan I	Terlaksananya pelayanan kesehatan di Puskesmas		100	3.025.000.000		620.141.959		1.047.926.376		2.798.703.468		92,52%	DINAS KESEHATAN
			Belanja gaji pegawai BLUD		60	354.420.000	24	53.331.450	24	53.331.450					DINAS KESEHATAN
			Belanja Barang dan Jasa		40	2.344.690.000	102	559.639.421	102	813.870.816					DINAS KESEHATAN
			-BMHP			366.786.382	52	69.284.445	52	144.451.199					DINAS KESEHATAN
			-Jasa Pelayanan		12	1.556.403.618	3	412.146.799	3	523.627.332					DINAS KESEHATAN
			-Perkantoran			90.000.000	32	25.586.295	32	35.007.388					DINAS KESEHATAN
			-Kerumahtanggaan			303.500.000	12	47.414.882	12	100.524.397					DINAS KESEHATAN
			-Pemeliharaan		28	28.000.000	3	5.207.000	3	10.260.500					DINAS KESEHATAN
			belanja modal		0	325.890.000		7.171.088		180.724.110					DINAS KESEHATAN
			- tanah		0		0	-	0	-					DINAS KESEHATAN
			- peralatan dan mesin		0	265.890.000	3	7.171.088	10	180.724.110					DINAS KESEHATAN
			- gedung dan bangunan		0		0	-	0	-					DINAS KESEHATAN
			- jalan, jaringan, instalasi		0		0	-	0	-					DINAS KESEHATAN
			- asset tetap lainnya		0	60.000.000	0								DINAS KESEHATAN
		Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Kasihan II	Terlaksananya pelayanan kesehatan di Puskesmas			1.720.000.000	21	438.617.038	3	567.512.981	56	1.749.610.321		101,72%	DINAS KESEHATAN
			Belanja gaji pegawai BLUD		24	73.200.000	3	15.469.008	3	8.119.008					DINAS KESEHATAN

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (2018) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							III		IV						
1	2	4	5		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Belanja Barang dan Jasa			1.562.800.000	11	349.429.630	0	550.464.373					DINAS KESEHATAN
			-BMHP		36	141.580.000	3	30.571.600		66.686.945					DINAS KESEHATAN
			-Jasa Pelayanan		12	1.036.300.000	3	251.190.527		397.153.458					DINAS KESEHATAN
			-Perkantoran		8	68.200.000	2	10.445.100		12.341.856					DINAS KESEHATAN
			-Kerumahtanggaan		12	280.720.000	2	55.822.403		67.903.334					DINAS KESEHATAN
			-Pemeliharaan		4	36.000.000	1	1.400.000		6.378.780					DINAS KESEHATAN
			belanja modal			84.000.000	7	73.718.400	0	8.929.600					DINAS KESEHATAN
			- elektronik		4	58.000.000	2	53.566.000							DINAS KESEHATAN
			- meubeler		4	6.000.000	0	-		6.450.000					DINAS KESEHATAN
			- alat kesehatan		4	5.000.000	1	240.000		46.000					DINAS KESEHATAN
			- komputer		4	15.000.000	3	11.980.000		2.433.600					DINAS KESEHATAN
			- gedung				1	7.932.400							DINAS KESEHATAN
		Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Pajangan	Terlaksananya pelayanan kesehatan di Puskesmas		81	2.722.000.000	32	576.575.299	45	1.111.734.381	120	2.821.755.428	148,15%	103,66%	DINAS KESEHATAN
			Belanja gaji pegawai BLUD		24	85.000.000	8	22.965.000	9	35.620.000					DINAS KESEHATAN
			Belanja Barang dan Jasa			2.442.000.000	23	549.430.299	28	847.802.281					DINAS KESEHATAN
			-BMHP		5	184.000.000	5	49.619.700	5	46.900.356					DINAS KESEHATAN
			-Jasa Pelayanan		12	1.650.000.000	3	393.461.250	4	588.415.811					DINAS KESEHATAN
			-Perkantoran		4	69.400.000	4	18.659.775	4	21.632.227					DINAS KESEHATAN
			-Kerumahtanggaan		23	431.000.000	8	85.638.799	10	183.788.887					DINAS KESEHATAN
			-Pemeliharaan		6	107.600.000	3	2.050.775	5	7.065.000					DINAS KESEHATAN
			belanja modal			195.000.000	1	4.180.000	8	228.312.100					DINAS KESEHATAN
			- tanah		0										DINAS KESEHATAN
			- peralatan dan mesin		7	195.000.000	1	4.180.000	8	228.312.100					DINAS KESEHATAN
			- gedung dan bangunan												DINAS KESEHATAN

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (2018) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							III		IV						
1	2	4	5		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			- jalan, jaringan, instalasi												DINAS KESEHATAN
			- asset tetap lainnya												DINAS KESEHATAN
		Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Sedayu I	Terlaksananya pelayanan kesehatan di Puskesmas		1	3.652.721.200	69	683.648.994			105	1.014.037.125	10500,00 %	27,76%	DINAS KESEHATAN
			Belanja gaji pegawai BLUD		24	105.000.000	5	10.304.400	7	13.108.800					DINAS KESEHATAN
			Belanja Barang dan Jasa		44	1.623.860.600	29	318.655.247							DINAS KESEHATAN
			-BMHP		3	113.000.000	3	14.708.184	3	35.101.207					DINAS KESEHATAN
			-Jasa Pelayanan		12	992.300.000	3	228.628.509	4	366.837.985					DINAS KESEHATAN
			-Perkantoran		15	178.320.600	12	29.332.851	14	68.174.052					DINAS KESEHATAN
			-Kerumahtanggaan		9	246.240.000	9	30.590.418	9	46.926.270					DINAS KESEHATAN
			-Pemeliharaan		5	94.000.000	2	15.395.285	5	16.552.575					DINAS KESEHATAN
			belanja modal		5	150.000.000	3	18.017.050							DINAS KESEHATAN
			- tanah												DINAS KESEHATAN
			- peralatan dan mesin		5	150.000.000	3	18.017.050	3	96.400.513					DINAS KESEHATAN
			- gedung dan bangunan												DINAS KESEHATAN
			- jalan, jaringan, instalasi												DINAS KESEHATAN
			- asset tetap lainnya												DINAS KESEHATAN
		Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Sedayu II	Terlaksananya pelayanan kesehatan di Puskesmas			1.585.000.000		397.072.293	0	351.554.766	114,35	1.442.315.272		91,00%	DINAS KESEHATAN
			Belanja gaji pegawai BLUD		48	194.400.000	9	32.250.000		32.250.000					DINAS KESEHATAN
			Belanja Barang dan Jasa		100	1.258.100.000	24	364.822.293		311.684.508					DINAS KESEHATAN
			-BMHP		28	131.000.000	7	23.308.990		15.373.490					DINAS KESEHATAN
			-Jasa Pelayanan		12	874.000.000	3	292.184.876		250.790.783					DINAS KESEHATAN
			-Perkantoran		46	55.000.000	10	10.934.200		9.430.265					DINAS KESEHATAN
			-Kerumahtanggaan		52	188.100.000	12	36.954.227		33.528.871					DINAS KESEHATAN

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (2018) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							III		IV						
1	2	4	5		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			-Pemeliharaan		23	10.000.000	7	1.440.000		2.561.099					DINAS KESEHATAN
			belanja modal		100	132.500.000				7.620.258					DINAS KESEHATAN
			- tanah												DINAS KESEHATAN
			- peralatan dan mesin		20	132.500.000				7.620.258					DINAS KESEHATAN
			- gedung dan bangunan												DINAS KESEHATAN
			- jalan, jaringan, instalasi												DINAS KESEHATAN
			- asset tetap lainnya												DINAS KESEHATAN
		Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Srandakan	Terselenggaranya upaya kesehatan masyarakat di Puskesmas			575.000.000		123.128.000	163	144.451.000	698	575.000.000		100,00%	
			PIS PK		24	205.480.000	17	53.040.000	13	40.290.000					DINAS KESEHATAN
			UKM Esensial		401	273.043.000	103	53.255.000	99	76.388.000					DINAS KESEHATAN
			UKM Pengembangan		71	19.805.000	7	2.605.000	9	2.355.000					DINAS KESEHATAN
			Fungsi Manajemen		24	30.600.000	5	6.325.000	7	9.425.000					DINAS KESEHATAN
			STBM												DINAS KESEHATAN
			Dukungan Manajemen		108	21.072.000	27	5.268.000	27	5.268.000					DINAS KESEHATAN
			UKM APBD		28	25.000.000	4	2.635.000	8	10.725.000					DINAS KESEHATAN
		Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sanden	Terselenggaranya upaya kesehatan masyarakat di Puskesmas			531.822.000	42	172.449.684	40	149.124.204	128	528.547.888		99,38%	DINAS KESEHATAN
			PIS PK		38	104.760.000	4	11.370.000	25	68.160.000					DINAS KESEHATAN
			UKM Esensial		65	304.601.000	30	132.142.684	10	55.869.200					DINAS KESEHATAN
			UKM Pengembangan		5	10.325.000	5	8.225.000	1	480.000					DINAS KESEHATAN
			Fungsi Manajemen		3	35.815.000	1	7.410.000	1	7.410.004					DINAS KESEHATAN
			STBM		2	25.985.000			1	8.060.000					DINAS KESEHATAN
			Dukungan Manajemen		7	25.336.000	1	5.952.000	1	4.560.000					DINAS KESEHATAN
			UKM APBD		6	25.000.000	1	7.350.000	1	4.585.000					DINAS KESEHATAN

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (2018) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							III		IV						
1	2	4	5		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%	16	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Kretek	Terselenggaranya upaya kesehatan masyarakat di Puskesmas			525.000.000		124.630.350		274.177.250		472.550.650		90,01%	DINAS KESEHATAN
			PIS PK		12	94.260.000	3	6.060.000	3	65.210.000					DINAS KESEHATAN
			UKM Esensial		12	357.305.000	3	87.531.750	3	181.147.900					DINAS KESEHATAN
			UKM Pengembangan		12	2.400.000	3	480.000	3	960.000					DINAS KESEHATAN
			Fungsi Manajemen		12	38.780.000	3	21.050.000	3	9.450.000					DINAS KESEHATAN
			STBM		12	13.000.000	3	2.600.000	3	7.300.000					DINAS KESEHATAN
			Dukungan Manajemen		12	19.255.000	3	6.908.600	3	10.109.350					DINAS KESEHATAN
			UKM APBD		24										DINAS KESEHATAN
		Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pundong	Terselenggaranya upaya kesehatan masyarakat di Puskesmas			525.000.000		48.485.000		231.010.200		520.950.000		99,23%	DINAS KESEHATAN
			PIS PK		1	193.910.000	1	8.380.000	1	88.170.000					DINAS KESEHATAN
			UKM Esensial		30	227.870.000	10	6.120.000	21	103.490.000					DINAS KESEHATAN
			UKM Pengembangan		17	50.030.000	5	11.990.000	5	13.880.000					DINAS KESEHATAN
			Fungsi Manajemen		2		2	2.400.000	2	8.800.000					DINAS KESEHATAN
			STBM		1	3.190.000	1	3.545.000							DINAS KESEHATAN
			Dukungan Manajemen		6	25.000.000	5	1.015.000	5	9.985.200					DINAS KESEHATAN
			UKM APBD		8	25.000.000	11	15.035.000	3	6.685.000					DINAS KESEHATAN
		Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Bambanglipuro	Terselenggaranya upaya kesehatan masyarakat di Puskesmas		1471	525.000.000		199.214.450		257.956.650		506.695.800		96,51%	DINAS KESEHATAN
			PIS PK		15	67.741.000		36.733.300		19.130.150					DINAS KESEHATAN
			UKM Esensial		1391	344.325.800		122.823.800		187.069.100					DINAS KESEHATAN
			UKM Pengembangan		16	18.771.700		4.933.750		11.775.850					DINAS KESEHATAN
			Fungsi Manajemen		20	33.990.000		15.600.000		11.680.000					DINAS KESEHATAN
			STBM		3	22.500.000		4.690.000		17.810.000					DINAS KESEHATAN
			Dukungan Manajemen		12	12.671.500		6.478.600		3.730.700					DINAS KESEHATAN

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (2018) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							III		IV						
1	2	4	5		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			UKM APBD		14	25.000.000		7.955.000		6.760.850					DINAS KESEHATAN
		Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pandak I	Terselenggaranya upaya kesehatan masyarakat di Puskesmas			575.000.000		115.778.950		311.155.200		572.450.000		99,56%	DINAS KESEHATAN
			PIS PK		10	70.755.000		21.260.000		45.905.000					DINAS KESEHATAN
			UKM Esensial		176	283.005.500		48.185.000		140.560.500					DINAS KESEHATAN
			UKM Pengembangan		42	73.159.500		23.166.000		31.804.500					DINAS KESEHATAN
			Fungsi Manajemen		20	36.160.000		8.540.000		20.330.000					DINAS KESEHATAN
			STBM		5	59.420.000		1.625.000		56.170.000					DINAS KESEHATAN
			Dukungan Manajemen		80	27.500.000		5.840.450		10.492.700					DINAS KESEHATAN
			UKM APBD		25	25.000.000		7.162.500		5.892.500					DINAS KESEHATAN
		Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pandak II	Terselenggaranya upaya kesehatan masyarakat di Puskesmas		100	575.000.000	95	123.096.000		250.251.250		573.180.000		99,68%	DINAS KESEHATAN
			PIS PK		14	90.274.000	4	12.180.000	5	31.184.000					DINAS KESEHATAN
			UKM Esensial		276	337.551.000	65	74.381.000	146	155.016.250					DINAS KESEHATAN
			UKM Pengembangan		34	61.140.000	12	17.565.000	11	23.905.000					DINAS KESEHATAN
			Fungsi Manajemen		28	26.000.000	8	6.175.000	11	13.450.000					DINAS KESEHATAN
			STBM		13	7.535.000	1	90.000	10	7.265.000					DINAS KESEHATAN
			Dukungan Manajemen		29	27.500.000	5	5.040.000	14	7.406.000					DINAS KESEHATAN
			UKM APBD			25.000.000		7.665.000		12.025.000					DINAS KESEHATAN
		Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Bantul I	Terselenggaranya upaya kesehatan masyarakat di Puskesmas		587	540.000.000	138	88.830.000	263	222.415.000	319	534.560.000	54,34%	98,99%	DINAS KESEHATAN
			PIS PK		27	91.125.000	0	-	22	44.670.000					DINAS KESEHATAN
			UKM Esensial		358	228.130.000	104	66.560.000	156	114.855.000					DINAS KESEHATAN
			UKM Pengembangan		63	123.545.000	4	7.840.000	46	22.145.000					DINAS KESEHATAN
			Fungsi Manajemen		8	20.600.000	2	4.000.000	2	5.150.000					DINAS KESEHATAN
			STBM		9	19.275.000	0	-	5	16.900.000					DINAS KESEHATAN

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (2018) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							III		IV						
1	2	4	5		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Dukungan Manajemen		96	17.325.000	24	3.630.000	24	6.770.000					DINAS KESEHATAN
			UKM APBD		26	40.000.000	4	6.800.000	8	11.925.000					DINAS KESEHATAN
		Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Bantul II	Terselenggaranya upaya kesehatan masyarakat di Puskesmas			540.000.000	26	59.657.000	0	258.606.800	77	511.790.000		94,78%	DINAS KESEHATAN
			PIS PK		5	42.284.000	1	50.000		-					DINAS KESEHATAN
			UKM Esensial		133	365.616.000	14	38.756.000		202.915.800					DINAS KESEHATAN
			UKM Pengembangan		3	7.350.000		-							DINAS KESEHATAN
			Fungsi Manajemen		20	56.100.000	2	4.475.000		35.135.000					DINAS KESEHATAN
			STBM		6	16.650.000	2	5.855.000		6.895.000					DINAS KESEHATAN
			Dukungan Manajemen		17	25.000.000	3	1.466.000		3.074.000					DINAS KESEHATAN
			UKM APBD		0	40.000.000	4	9.055.000		10.587.000					DINAS KESEHATAN
		Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Jetis I	Terselenggaranya upaya kesehatan masyarakat di Puskesmas		84	540.000.000	30	45.818.000	73	329.411.000	162	538.778.000	192,86%	99,77%	DINAS KESEHATAN
			PIS PK		12	75.929.000	3	3.640.000	3	52.904.000					DINAS KESEHATAN
			UKM Esensial		12	270.585.000	19	29.875.000	19	158.633.000					DINAS KESEHATAN
			UKM Pengembangan		12	72.435.000	1	7.553.000	10	52.790.000					DINAS KESEHATAN
			Fungsi Manajemen		12	52.041.000	4	1.000.000	12	15.367.000					DINAS KESEHATAN
			STBM		12	22.170.000	2	3.000.000	5	22.980.000					DINAS KESEHATAN
			Dukungan Manajemen		12	6.840.000	1	750.000	4	3.690.000					DINAS KESEHATAN
			UKM APBD		12	40.000.000	0		20	23.047.000					DINAS KESEHATAN
		Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Jetis II	Terselenggaranya upaya kesehatan masyarakat di Puskesmas			540.000.000	78	129.887.100		242.547.125	550,96 5948	483.051.118		89,45%	DINAS KESEHATAN
			PIS PK		100	143.520.000	3	19.650.000	6	57.320.000					DINAS KESEHATAN
			UKM Esensial		100	238.380.000	40	72.474.650	5	118.365.376					DINAS KESEHATAN
			UKM Pengembangan		100	53.615.000	15	17.947.500	3	12.875.900					DINAS KESEHATAN
			Fungsi Manajemen		100	27.645.000	10	8.210.000	3	10.005.000					DINAS KESEHATAN

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (2018) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							III		IV						
1	2	4	5		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			STBM		100	11.840.000	2	3.940.000	2	5.150.000					DINAS KESEHATAN
			Dukungan Manajemen		100	25.000.000	5	4.903.000	3	9.209.875					DINAS KESEHATAN
			UKM APBD		100	40.000.000	3	2.761.950	6	29.620.974					DINAS KESEHATAN
		Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Imogiri I	Terselenggaranya upaya kesehatan masyarakat di Puskesmas			525.000.000	48	139.158.000	59	258.584.690	201,49 9698	508.416.890		96,84%	DINAS KESEHATAN
			PIS PK		14	128.330.000	4	3.600.000	4	96.171.740					DINAS KESEHATAN
			UKM Esensial		72	211.775.000	18	104.493.000	18	58.332.000					DINAS KESEHATAN
			UKM Pengembangan		72	89.495.000	18	10.045.000	18	56.997.000					DINAS KESEHATAN
			Fungsi Manajemen		16	34.515.000	4	8.165.000	4	23.435.000					DINAS KESEHATAN
			STBM		3	27.600.000	1	9.275.000	2	13.170.000					DINAS KESEHATAN
			Dukungan Manajemen		12	8.285.000			10	4.558.950					DINAS KESEHATAN
			UKM APBD		12	25.000.000	3	3.580.000	3	5.920.000					DINAS KESEHATAN
		Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Imogiri II	Terselenggaranya upaya kesehatan masyarakat di Puskesmas			575.000.000		114.493.600		291.503.450		575.000.000		100,00%	DINAS KESEHATAN
			PIS PK		13	124.535.000	2	24.726.000	6	52.729.000					DINAS KESEHATAN
			UKM Esensial		82	344.964.500	20	74.341.500	38	185.670.500					DINAS KESEHATAN
			UKM Pengembangan		9	36.325.000	4	4.690.000	17	21.540.000					DINAS KESEHATAN
			Fungsi Manajemen		12	29.775.000	4	5.860.000	12	15.625.000					DINAS KESEHATAN
			STBM		1	2.980.000		-	1	1.490.000					DINAS KESEHATAN
			Dukungan Manajemen		6	11.420.500	4	2.832.100	6	6.644.200					DINAS KESEHATAN
			UKM APBD		5	25.000.000	1	2.044.000	4	7.804.750					DINAS KESEHATAN
		Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Dlingo I	Terselenggaranya upaya kesehatan masyarakat di Puskesmas			525.000.000		49.152.500		331.064.100		500.589.950		95,35%	DINAS KESEHATAN
			PIS PK			33.747.500		3.810.000		13.880.000					DINAS KESEHATAN
			UKM Esensial			298.972.500		23.327.500		199.587.000					DINAS KESEHATAN
			UKM Pengembangan			88.060.000		12.765.000		75.463.200					DINAS KESEHATAN

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (2018) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							III		IV						
1	2	4	5		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Fungsi Manajemen			23.100.000		4.025.000		12.250.000					DINAS KESEHATAN
			STBM			22.620.000		1.590.000		8.880.000					DINAS KESEHATAN
			Dukungan Manajemen			33.500.000		3.635.000		7.893.900					DINAS KESEHATAN
			UKM APBD			25.000.000				13.110.000					DINAS KESEHATAN
		Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Dlingo II	Terselenggaranya upaya kesehatan masyarakat di Puskesmas		403	575.000.000	160,24	113.872.350	177,42	261.713.046	413,66	491.448.137	102,65%	85,47%	DINAS KESEHATAN
			PIS PK		19	43.932.000	2,66	5.403.200	13	28.125.600					DINAS KESEHATAN
			UKM Esensial		255	357.455.000	94,35	53.637.650	115,65	160.279.000					DINAS KESEHATAN
			UKM Pengembangan		65	101.250.000	33,15	39.607.500	22,85	44.341.446					DINAS KESEHATAN
			Fungsi Manajemen		17	24.815.000	6,46	2.310.000	5,54	12.985.000					DINAS KESEHATAN
			STBM		15	11.400.000	3,3	1.640.000	5,7	8.940.000					DINAS KESEHATAN
			Dukungan Manajemen		32	11.148.000	16,32	1.799.000	12,68	3.832.000					DINAS KESEHATAN
			UKM APBD		12	25.000.000	4	9.475.000	2	3.210.000					DINAS KESEHATAN
		Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pleret	Terselenggaranya upaya kesehatan masyarakat di Puskesmas			525.000.000		92.958.641		181.805.768		481.595.400		91,73%	DINAS KESEHATAN
			PIS PK		12	156.370.000									DINAS KESEHATAN
			UKM Esensial		12	149.885.000									DINAS KESEHATAN
			UKM Pengembangan		12	135.400.000									DINAS KESEHATAN
			Fungsi Manajemen		12	32.900.000									DINAS KESEHATAN
			STBM		12	11.700.000									DINAS KESEHATAN
			Dukungan Manajemen		12	13.745.000									DINAS KESEHATAN
			UKM APBD		12	25.000.000	2	4.690.000	6						DINAS KESEHATAN
		Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Piyungan	Terselenggaranya upaya kesehatan masyarakat di Puskesmas			540.000.000	47	91.622.100	47	268.523.400		474.569.300		87,88%	DINAS KESEHATAN
			PIS PK		22 Dusun	74.085.000	3	4.000.000	13	52.645.000					DINAS KESEHATAN
			UKM Esensial		43 kali keoiata	268.277.000	15	55.711.100	17	138.588.400					DINAS KESEHATAN

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (2018) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							III		IV						
1	2	4	5		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%	16	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					n										
			UKM Pengembangan		11 kali kegiatan	71.760.000	5	9.720.000	7	22.973.500				DINAS KESEHATAN	
			Fungsi Manajemen		17 kali kegiatan	28.800.000	8	5.740.000	6	10.125.000				DINAS KESEHATAN	
			STBM		3 Desa	44.058.000	1	3.600.000	1	12.422.000				DINAS KESEHATAN	
			Dukungan Manajemen		15 jenis	13.020.000	7	1.716.000	3	3.984.500				DINAS KESEHATAN	
			UKM APBD		12 kegiatan	40.000.000	8	11.135.000		27.785.000				DINAS KESEHATAN	
		Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Banguntapan I	Terselenggaranya upaya kesehatan masyarakat di Puskesmas Banguntapan I		100	590.000.000	56	127.402.750	75	309.015.170		583.926.570		98,97%	DINAS KESEHATAN
			PIS PK		7	109.610.000	8	24.856.250	11	64.630.000				DINAS KESEHATAN	
			UKM Esensial		49	359.004.500	34	75.837.500	47	195.429.570				DINAS KESEHATAN	
			UKM Pengembangan		5	31.240.000	3	6.170.000	3	10.130.000				DINAS KESEHATAN	
			Fungsi Manajemen		17	24.565.000	4	8.095.000	5	10.345.000				DINAS KESEHATAN	
			STBM		3	8.850.000	0	-	3	8.850.000				DINAS KESEHATAN	
			Dukungan Manajemen		4	16.730.500	2	2.040.000	3	6.269.600				DINAS KESEHATAN	
			UKM APBD		13	40.000.000	5	10.404.000	3	13.361.000				DINAS KESEHATAN	
		Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Banguntapan II	Terselenggaranya upaya kesehatan masyarakat di Puskesmas			540.000.000	139	169.695.900		538.712.000		735.347.900		136,18%	DINAS KESEHATAN
			PIS PK		19	106.940.000	10	62.025.000	10	106.690.000				DINAS KESEHATAN	
			UKM Esensial		40	275.610.000	30	59.675.000		275.610.000				DINAS KESEHATAN	
			UKM Pengembangan		172	36.920.000	50	10.460.000		36.920.000				DINAS KESEHATAN	
			Fungsi Manajemen		26	35.615.000	15	13.720.000		35.625.000				DINAS KESEHATAN	
			STBM		20	31.735.000	5	5.400.000		31.737.000				DINAS KESEHATAN	
			Dukungan Manajemen		18	13.180.000	9	4.505.900		13.180.000				DINAS KESEHATAN	
			UKM APBD		43	40.000.000	20	13.910.000		38.950.000				DINAS KESEHATAN	

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (2018) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							III		IV						
1	2	4	5		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%	16	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Banguntapan III	Terselenggaranya upaya kesehatan masyarakat di Puskesmas			540.000.000				539.900.000		539.900.000		99,98%	DINAS KESEHATAN
			PIS PK							201.660.000					DINAS KESEHATAN
			UKM Esensial							279.430.000					DINAS KESEHATAN
			UKM Pengembangan							2.990.000					DINAS KESEHATAN
			Fungsi Manajemen							30.820.000					DINAS KESEHATAN
			STBM												DINAS KESEHATAN
			Dukungan Manajemen							25.000.000					DINAS KESEHATAN
			UKM APBD												DINAS KESEHATAN
		Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sewon I	Terselenggaranya upaya kesehatan masyarakat di Puskesmas			540.000.000	18	100.409.500		196.349.000		540.000.000		100,00%	DINAS KESEHATAN
			PIS PK		12	93.597.100	3	10.670.000	3	29.710.000					DINAS KESEHATAN
			UKM Esensial		12	282.955.750	3	61.485.000	3	110.952.000					DINAS KESEHATAN
			UKM Pengembangan		12	64.317.500	3	7.567.500	3	18.400.000					DINAS KESEHATAN
			Fungsi Manajemen		12	39.075.000	3	12.850.000	3	10.300.000					DINAS KESEHATAN
			STBM		3	8.590.000			3	8.590.000					DINAS KESEHATAN
			Dukungan Manajemen		12	11.464.650	3	1.610.000	3	2.620.000					DINAS KESEHATAN
			UKM APBD		12	40.000.000	3	6.227.000	3	15.777.000					DINAS KESEHATAN
		Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sewon II	Terselenggaranya upaya kesehatan masyarakat di Puskesmas			540.000.000	111	129.791.000	128	183.304.450	403	540.000.000		100,00%	DINAS KESEHATAN
			PIS PK		14	134.500.000	5	41.860.000	2	28.940.000					DINAS KESEHATAN
			UKM Esensial		248	273.860.000	64	59.328.000	91	118.086.450					DINAS KESEHATAN
			UKM Pengembangan		51	30.245.000	20	11.025.000	11	11.290.000					DINAS KESEHATAN
			Fungsi Manajemen		19	34.075.000	4	5.740.000	5	13.470.000					DINAS KESEHATAN
			STBM		2	6.400.000			1	3.275.000					DINAS KESEHATAN
			Dukungan Manajemen		60	20.920.000	15	4.538.000	18	8.243.000					DINAS KESEHATAN

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (2018) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							III		IV						
1	2	4	5		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%	16	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			UKM APBD		9	40.000.000	3	7.300.000							DINAS KESEHATAN
		Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Kasihan I	Terselenggaranya upaya kesehatan masyarakat di Puskesmas			540.000.000		137.407.450		239.238.250		537.361.000		99,51%	DINAS KESEHATAN
			PIS PK		100	67.254.000	30	18.230.000	20	15.514.000					DINAS KESEHATAN
			UKM Esensial		100	255.520.000	25	76.049.450	45	103.710.550					DINAS KESEHATAN
			UKM Pengembangan		256	123.726.000	8	27.575.000	241	68.341.000					DINAS KESEHATAN
			Fungsi Manajemen		34	33.200.000	2	4.200.000	23	10.920.000					DINAS KESEHATAN
			STBM		13	8.240.000	2	2.800.000	10	3.702.700					DINAS KESEHATAN
			Dukungan Manajemen		29	12.060.000	1	986.000	25	8.820.000					DINAS KESEHATAN
			UKM APBD		72	40.000.000	12	7.567.000	55	28.230.000					DINAS KESEHATAN
		Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Kasihan II	Terselenggaranya upaya kesehatan masyarakat di Puskesmas			540.000.000	30	157.219.950	42	206.272.900	131	535.654.500		99,20%	DINAS KESEHATAN
			PIS PK		12	105.301.150	3	30.331.000	4	38.169.000					DINAS KESEHATAN
			UKM Esensial		48	248.845.350	12	95.456.950	12	84.951.900					DINAS KESEHATAN
			UKM Pengembangan		42	111.193.500	10	22.289.500	11	37.369.500					DINAS KESEHATAN
			Fungsi Manajemen		4	10.560.000		-	3	8.085.000					DINAS KESEHATAN
			STBM		6	10.240.000	1	2.065.000	2	3.640.000					DINAS KESEHATAN
			Dukungan Manajemen		4	13.860.000	1	2.120.000	1	6.340.000					DINAS KESEHATAN
			UKM APBD		15	40.000.000	3	4.957.500	9	27.717.500					DINAS KESEHATAN
		Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pajangan	Terselenggaranya upaya kesehatan masyarakat di Puskesmas			575.000.000	78	99.125.000	275	320.605.000	218	567.800.000		98,75%	DINAS KESEHATAN
			PIS PK		18	78.260.000	5	27.080.000	5	38.780.000					DINAS KESEHATAN
			UKM Esensial		300	356.705.000	27	25.520.000	207	221.415.000					DINAS KESEHATAN
			UKM Pengembangan		47	51.145.000	18	27.080.000	17	13.695.000					DINAS KESEHATAN
			Fungsi Manajemen		40	26.700.000	7	9.825.000	26	10.025.000					DINAS KESEHATAN
			STBM		6	22.520.000	2	1.550.000	2	17.870.000					DINAS KESEHATAN

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (2018) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							III		IV								
							1	2	4	5		8b (APBDP 2018)		11		12	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Dukungan Manajemen		3	14.670.000	3	1.550.000	3	11.690.000							DINAS KESEHATAN
			UKM APBD		70	25.000.000	16	6.520.000	15	7.130.000							DINAS KESEHATAN
		Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sedayu I	Terselenggaranya upaya kesehatan masyarakat di Puskesmas		100	525.000.000	76	165.056.000	158	145.728.500	0	404.380.000			77,02%		DINAS KESEHATAN
			PIS PK		13	57.055.000	3	6.660.000	2	19.710.000							DINAS KESEHATAN
			UKM Esensial		203	281.870.000	45	107.156.000	78	89.619.000							DINAS KESEHATAN
			UKM Pengembangan		80	106.591.000	8	30.597.000	36	15.725.000							DINAS KESEHATAN
			Fungsi Manajemen		17	30.520.000	4	6.765.000	5	10.225.000							DINAS KESEHATAN
			STBM		2	14.965.000	1	5.515.000	1	2.035.000							DINAS KESEHATAN
			Dukungan Manajemen		62	8.999.000	9	2.122.500	31	2.407.500							DINAS KESEHATAN
			UKM APBD		20	25.000.000	6	6.240.500	5	6.007.000							DINAS KESEHATAN
		Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sedayu II	Terselenggaranya upaya kesehatan masyarakat di Puskesmas		100	525.000.000	38	147.534.800		220.445.400	138	525.000.000	138,00%	100,00%			DINAS KESEHATAN
			PIS PK		13	146.569.000	3	50.860.000		61.939.000							DINAS KESEHATAN
			UKM Esensial		72	258.226.000	16	66.611.800		105.600.400							DINAS KESEHATAN
			UKM Pengembangan		48	49.965.000	8	17.853.000		18.673.000							DINAS KESEHATAN
			Fungsi Manajemen		16	16.400.000	4	4.260.000		7.560.000							DINAS KESEHATAN
			STBM		2	20.240.000	2	6.510.000		12.425.000							DINAS KESEHATAN
			Dukungan Manajemen		36	8.600.000	5	1.440.000		4.440.000							DINAS KESEHATAN
			UKM APBD		72	25.000.000				9.808.000							DINAS KESEHATAN
		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat			458	2.731.062.000		915.106.500	442,33 3333	2.547.163.550	442,33 3333	2.547.163.550	96,58%	93,27%			DINAS KESEHATAN
		Promosi Kesehatan	Cakupan desa siaga kategori baik (purnama dan mandiri)		73	1.253.084.500		580.461.000	57,333 3333	1.114.288.550	57,333 3333	1.114.288.550	78,54%	88,92%			DINAS KESEHATAN
			Evaluasi kader kesehatan remaja		1	27.183.000											DINAS KESEHATAN
			Pengembangan media informasi kesehatan		86	27.183.000		580.461.300									DINAS KESEHATAN

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (2018) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							III		IV						
1	2	4	5		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pemberdayaan masyarakat sehat	Dusun Bebas 4 Masalah Kesehatan (DB4MK)		385	1.477.977.500		334.645.500	385	1.432.875.000	385	1.432.875.000	100,00%	96,95%	DINAS KESEHATAN
			Penyusunan RAD gemas		1	13.900.000									DINAS KESEHATAN
			Pembinaan sekolah model gemas		6	151.442.500	6	151.442.500							DINAS KESEHATAN
			Pengangkatan tenaga honorarium promkes		10	28.425.000									DINAS KESEHATAN
			Pembinaan Dusun pemberdayaan kesehatan		2	266.432.500	1	142.705.500							DINAS KESEHATAN
			Lomba Toga		1	20.537.500	1	19.937.500							DINAS KESEHATAN
			Lomba HKG PKK KB Kes		1	23.900.000									DINAS KESEHATAN
			Workshop Penjaringan dengan lintas sektor		1	3.765.000	1	3.765.000							DINAS KESEHATAN
			reward db4mk		385	967.060.000		2.280.000							DINAS KESEHATAN
			sosialisasi dan evaluasi BOK				1	14.515.000							DINAS KESEHATAN
		Program Perbaikan Gizi Masyarakat			1897,08	865.350.000	25	274.283.000	12	348.675.000	12	348.675.000	0,63%	40,29%	DINAS KESEHATAN
		Peningkatan status gizi	Prevalensi Balita Gizi Buruk		0,38										DINAS KESEHATAN
			Angka balita stunting		11,7										DINAS KESEHATAN
			Status balita gizi kurang		600										DINAS KESEHATAN
			Cakupan Keluarga Sadar Gizi		300										DINAS KESEHATAN
			Jumlah balita KEP mendapat PMT		600	378.000.000		126.000.000		189.000.000		189.000.000		50,00%	DINAS KESEHATAN
			Jumlah bumil KEK mendapat PMT		300	189.000.000		73.000.000		84.500.000		84.500.000		44,71%	DINAS KESEHATAN
			Jumlah pelatihan PMBA bagi kader		24	49.630.000	0	-		-		-			DINAS KESEHATAN
			Jumlah Kegiatan Pertemuan (Workshop, Audit Kasus Gizi Buruk, Sosialisasi, Rakor)		49	244.040.000	25	75.283.000	6	72.895.000	6	72.895.000	12,24%	29,87%	DINAS KESEHATAN

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (2018) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							III		IV						
1	2	4	5		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Jumlah honor Tim Pembina dan wakil pembina		12	4.680.000	0	-	6	2.280.000	6	2.280.000	50,00%	48,72%	DINAS KESEHATAN
											0	-			
		Program Pengembangan Lingkungan Sehat			3297	536.985.000	75	137.680.500	75	137.680.500	75	137.680.500	2,27%	25,64%	DINAS KESEHATAN
		Pembinaan dan Pengawasan Kesehatan Lingkungan			3297	536.985.000	75	137.680.500	75	137.680.500	75	137.680.500	2,27%	25,64%	DINAS KESEHATAN
			Terselenggaranya program kabupaten sehat			66.500.000									DINAS KESEHATAN
			- Terlaksananya sosialisasi Pokja Desa Sehat		8										DINAS KESEHATAN
			- Terlaksananya Rakor Kabupaten Sehat		4										DINAS KESEHATAN
			- Pembinaan pokja/tatanan Kab. Sehat		8										DINAS KESEHATAN
			Workshop Monev Desa Stop BABS		2	12.025.000									DINAS KESEHATAN
			Workshop Evaluasi 5 pilar STBM		2	16.250.000									DINAS KESEHATAN
			Pelatihan Pemicuan STBM		1	26.650.000									DINAS KESEHATAN
			Pengujian sampel kualitas air		2000	146.985.000									DINAS KESEHATAN
			Pelatihan laik sehat DAM		1	7.775.000									DINAS KESEHATAN
			Pelatihan RPAM		2	17.675.000									DINAS KESEHATAN
			Workshop Pamsimas		2	14.250.000									DINAS KESEHATAN
			Validasi data kesling		4	11.900.000									DINAS KESEHATAN
			Penyehatan (Laik Sehat) TPM		4	55.400.000									DINAS KESEHATAN
			Penyehatan (Laik Sehat) TTU		1	7.050.000									DINAS KESEHATAN
			Monev program kesorga		3	48.925.000									DINAS KESEHATAN
			Terlaksananya Tes Kebugaran Haji		1250	80.925.000									DINAS KESEHATAN
			pendampingan pembentukan UKK		1	4.900.000									DINAS KESEHATAN
			Monev UKK		3	8.175.000									DINAS KESEHATAN
			TOT kader kesehatan kerja		1	11.600.000									DINAS KESEHATAN

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (2018) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							III		IV						
1	2	4	5		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular			0	1.159.940.000	15	154.955.000	0	355.505.400		355.505.400		30,65%	DINAS KESEHATAN
		Penyemprotan/fogging sarang nyamuk				381.375.000		72.830.000		34.253.400		34.253.400		8,98%	DINAS KESEHATAN
			Audit kasus DBD		3		1	3.375.000							DINAS KESEHATAN
			Pengadaan insektisida dan lavarsida		2		1	6.985.000							DINAS KESEHATAN
			honor tim PSN kab		12										DINAS KESEHATAN
			workshop penyakit akibat vektor		1										DINAS KESEHATAN
			terlaksananya fogging focus		550		8	7.767.000							DINAS KESEHATAN
			terlaksananya pertemuan program DBD		5		1	7.500.000							DINAS KESEHATAN
			terlaksananya PSN		3		2	15.625.000							DINAS KESEHATAN
		Pelayanan pencegahan dan penanggulan penyakit menular				367.840.000		49.845.000		118.276.000		118.276.000		32,15%	DINAS KESEHATAN
			rapat koordinasi program		20		1	700.000		2.750.000		2.750.000			DINAS KESEHATAN
			honorarium non PNS		2		4	4.170.000		1.470.000		1.470.000			DINAS KESEHATAN
			evaluasi /validasi data program		10		3	4.775.000		6.510.000		6.510.000			DINAS KESEHATAN
			sosialisasi penyakit menular		6		8	20.350.000		11.960.000		11.960.000			DINAS KESEHATAN
			belanja pengendalian penyakit menular		9		1	8.540.000	4	88.676.000	4	88.676.000	44,44%		DINAS KESEHATAN
			pelatihan dan peningkatan kapasitas petugas		4		1	3.310.000		3.310.000		3.310.000			DINAS KESEHATAN
			audit kasus menular		3										DINAS KESEHATAN
			terbentuknya gerduda		4		1	8.000.000		3.600.000		3.600.000			DINAS KESEHATAN
			penemuan TB		70										DINAS KESEHATAN
			prevensi HIV		0,5										DINAS KESEHATAN
		Peningkatan surveillance Epidemiologi dan penanggulan wabah	Penyelenggaraan Kesehatan CJH			410.725.000	15	32.280.000		202.976.000		202.976.000		49,42%	DINAS KESEHATAN

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (2018) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							III		IV						
1	2	4	5		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Jumlah Kegiatan Rapat Surveilans												DINAS KESEHATAN
			Jumlah Belanja Medis												DINAS KESEHATAN
			Jumlah Belanja Analisa Laboratorium												DINAS KESEHATAN
			Jumlah Penggandaan Juknis Kegiatan Surveilans												DINAS KESEHATAN
			1.Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Petugas Surveilans, Imunisasi dan Haji		13	53.650.000	2	8.730.000	3	4.965.000	3	4.965.000	23,08%	9,25%	DINAS KESEHATAN
			2.Terlaksananya Peningkatan Jejaring Surveilans dengan Lintas Sektoral		6	72.175.000	2	5.900.000	1	3.425.000	1	3.425.000	16,67%	4,75%	DINAS KESEHATAN
			3.Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Program Surveilans, Imunisasi dan Haji		18	57.810.000	5	16.450.000	6	20.052.000	6	20.052.000	33,33%	34,69%	DINAS KESEHATAN
			4.Terlaksananya Distribusi Vaksin		2	5.200.000	0	-	1	2.600.000	1	2.600.000	50,00%	50,00%	DINAS KESEHATAN
			5.Terlaksananya Pengadaan Barang Pendukung Program Surveilans, Imunisasi dan Haji		41	221.890.000	6	1.200.000	12	145.900.000	12	145.900.000	29,27%	65,75%	DINAS KESEHATAN
		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan				678.720.000		127.920.461		267.440.239		267.440.239		39,40%	DINAS KESEHATAN
		Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan				334.588.000		107.200.000		60.639.000		60.639.000		18,12%	DINAS KESEHATAN
			Jumlah puskesmas terakreditasi		5										DINAS KESEHATAN
			Terlaksananya Pendampingan pascaakreditasi		2	68.938.000	1	43.333.000	5	167.968.000	5	167.968.000	250,00%	243,65%	DINAS KESEHATAN
			Terlaksananya Update Knowledge Pendampingan Akreditasi Puskesmas		50	5.650.000	50	5.650.000	1	25.605.000	1	25.605.000	2,00%	453,19%	DINAS KESEHATAN
		Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan	Nilai IKM			82.530.000		4.275.000		36.242.400		36.242.400		43,91%	DINAS KESEHATAN

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (2018) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							III		IV						
1	2	4	5		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%	16	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		- Rapat Koordinasi SIK,IKM	Terlaksananya pelayanan data dan informasi Puskesmas		15										DINAS KESEHATAN
		- Workshop DEST, PPID			12										DINAS KESEHATAN
		Pelayanan Kesehatan Rujukan:				261.602.000		16.445.461		170.558.839		170.558.839		65,20%	DINAS KESEHATAN
		- Beroperasinya Pelayanan PSC di Kabupaten Bantul													DINAS KESEHATAN
			* Terlaksananya Rapat Koordinasi Tim PSC		80 org	2.800.000	20	700.000							DINAS KESEHATAN
			* Terlaksananya Sosialisasi PSC bagi Tokoh Masyarakat / Lurah		100 org	5.650.000									DINAS KESEHATAN
			* Terlaksananya Sosialisasi PSC bagi LP/LS /Camat		50 org	4.047.500									DINAS KESEHATAN
			* Terlaksananya Sosialisasi PSC bagi Fasyankes		50 org	4.047.500									DINAS KESEHATAN
			* Terlaksananya Pengadaan Petugas Lapangan PSC		48 org	82.025.000									DINAS KESEHATAN
			* Terlaksananya Operasional PSC		1 unit	9.042.000									DINAS KESEHATAN
		- Meningkatkan Pelayanan Kegawatdaruratan dan Penanggulangan Bencana	* Terlaksananya Rapat Koordinasi Supervisor dan Koordinator Posko		30 org	1.147.500									DINAS KESEHATAN
			* Terlaksananya Rapat koordinasi LP/LS Pelayanan Kesehatan Rujukan dan bencana		200	8.950.000	60	2.235.000							DINAS KESEHATAN
			* Terlaksananya Rapat koordinasi kesiapsiagaan Hari Raya Idul Fitri		160 org	5.900.000									DINAS KESEHATAN
			* Terlaksananya Kesiapsiagaan Idul Fitri dan Hari Raya selain Idul Fitri		153 org	8.775.000	41	2.290.000							DINAS KESEHATAN
			* Terlaksananya Kesiapsiagaan Hari Raya Idul Fitri		522 org	23.280.000									DINAS KESEHATAN
			* Terlaksananya Primary Health Care Dissaster Plan		70 org	16.145.000									DINAS KESEHATAN
			* Terlaksananya Belanja pemeliharaan Handy talkie dan Radio pemancar ulang		1 unit	3.000.000	1	2.000.000							DINAS KESEHATAN

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (2018) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							III		IV						
1	2	4	5		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%	16	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			* Terlaksananya Belanja sewa Frekwensi dan pajak Radio		1 unit	2.000.000	1	1.320.461							DINAS KESEHATAN
			* Terlaksananya Bimbingan Teknis SPGDT		35 org	3.925.000	0								DINAS KESEHATAN
			* Terlaksananya Bimbingan teknis Pelayanan kegawatdaruratan dan bencana di Puskesmas		40 JPL	10.000.000	12	3.000.000							DINAS KESEHATAN
			* Terlaksananya Penyusunan SK Tim Penanggulangan Bencana		24 org	4.560.000									DINAS KESEHATAN
			* Terlaksananya Workshop Penyusunan rencana penanggulangan bencana dan krisis kesehatan		60 org	12.447.500									DINAS KESEHATAN
		Monev Kualitas Pelayanan RS di Kabupaten Bantul	* Terlaksananya Workshop Managemen Mutu RS		80 org	12.795.000									DINAS KESEHATAN
		Berdirinya Rumah sakit klas D di Kabupaten Bantul	* Terlaksananya Workshop perencanaan dan Pelaksanaan operasional RS kelas D		100 org	13.110.000									DINAS KESEHATAN
			* Terlaksananya Rakor perencanaan dan pelaksanaan operasional RS klas D		562 org	19.670.000	140	4.900.000							DINAS KESEHATAN
			* Terlaksananya Workshop perda retribusi RS kls D		25 org	3.725.000									DINAS KESEHATAN
			* Terlaksananya penyusunan SK Tim Peningkatan Mutu RS		24 org	4.560.000									DINAS KESEHATAN
		Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	Penduduk miskin yang mendapat pelayanan kesehatan/persen		12	17.871.460.000	3	3.764.534.559	3	8.996.379.575	3	8.996.379.575	25,00%	50,34%	DINAS KESEHATAN
		Pelayanan Jamkesda pada UPT Jamkesda	Jumlah pembayaran klaim/bulan		12	17.871.460.000	3	3.764.534.559	3	8.996.379.575	3	8.996.379.575	25,00%	50,34%	DINAS KESEHATAN
			Jumlah pembayaran premi/bulan		12										DINAS KESEHATAN
			Jumlah pembayaran kalim PSC /bulan		3										DINAS KESEHATAN

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (2018) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						III		IV							
1	2	4	5		8b (APBDP 2018)	11		12		13		X=13/8 X 100%	16		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya				11.098.158.300	14,57	285.552.114	74,94	12.385.354.320	74,94	12.385.354.320		111,60%	DINAS KESEHATAN
		Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas				1.412.870.000	13,57	141.593.117	74,94	1.109.617.670	74,94	1.109.617.670		78,54%	DINAS KESEHATAN
		Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan		1 paket		9.488.613.300	1	143.958.997		9.344.654.303	0	9.344.654.303		98,48%	DINAS KESEHATAN
		Pembangunan, Perluasan, dan Rehab Puskesmas, Pustu dan Jaringannya		1 paket		196.675.000	0	-		1.931.082.347	0	1.931.082.347		981,86%	DINAS KESEHATAN
		Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Institusi yang bermitra		103	626.080.000	37	102.591.835	12	279.436.987	12	279.436.987	11,65%	44,63%	DINAS KESEHATAN
		Pendampingan Jamkesda	Jumlah operasional Jamkesda/bulan		12	408.000.000	3	39.040.135	3	229.594.787	3	229.594.787	25,00%	56,27%	DINAS KESEHATAN
			Jumlah operasional Jamkesda/bulan												DINAS KESEHATAN
		Kemitraan pelayanan kesehatan			91	218.080.000	34	63.551.700	9	49.842.200	9	49.842.200	9,89%	22,86%	DINAS KESEHATAN
			Institusi yang bermitra dengan kesehatan												DINAS KESEHATAN
		Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita			300,8	136.000.000	9	35.257.500	8	58.660.000	8	58.660.000	2,66%	43,13%	DINAS KESEHATAN
		Pelayanan kesehatan anak dan Balita	Angka Kematian Bayi		300,8	136.000.000	9	35.257.500	8	58.660.000	8	58.660.000	2,66%	43,13%	DINAS KESEHATAN
			Cakupan Kunjungan Neonatal Lengkap (94%)		94										DINAS KESEHATAN
			Cakupan Kunjungan Bayi (91,8%)		91,8										DINAS KESEHATAN
			Cakupan Pelayanan Balita (90%)		90										DINAS KESEHATAN
			Jumlah Kegiatan Pertemuan (AMP, SD IDTK, MTBS, Pemberdayaan Masyarakat, Evaluasi)		25	136.000.000	9	35.257.500	8	58.660.000	8	58.660.000	32,00%	43,13%	DINAS KESEHATAN
			Jumlah belanja alat peraga												DINAS KESEHATAN
											0				
		Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia			53	229.655.000	29	102.393.000	9	10.990.000	9	10.990.000	16,98%	4,79%	DINAS KESEHATAN

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (2018) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							III		IV						
1	2	4	5		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pelayanan kesehatan Lansia	Puskesmas Santun Usila Strata II (4 puskesmas)		4										DINAS KESEHATAN
			Jumlah Kegiatan Pertemuan (Workshop dan Rakor)		10	125.075.000	2	2.600.000	3	8.710.000	3	8.710.000	30,00%	6,96%	DINAS KESEHATAN
			Jumlah honor Tim Pembina dan wakil pembina Bugar Lansia		12	4.680.000	0		6	2.280.000	6	2.280.000	50,00%	48,72%	DINAS KESEHATAN
			Jumlah Alat Pemerksaan Kesehatan		27	99.900.000	27	99.793.000						0,00%	DINAS KESEHATAN
		Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak			352	2.240.605.000	20	89.080.000	16	1.433.557.142	16	1.433.557.142	4,55%	63,98%	DINAS KESEHATAN
		Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Angka Kematian Ibu		352	2.240.605.000	20	89.080.000	16	1.433.557.142	16	1.433.557.142	4,55%	63,98%	DINAS KESEHATAN
			Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4		95						0	-			DINAS KESEHATAN
			Cakupan Pelayanan Ibu Nifas		95						0	-			DINAS KESEHATAN
			Cakupan pertolongan Persalinan oleh Bidan atau Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan		99						0	-			DINAS KESEHATAN
			Jumlah ibu hamil/ bersalin mendapat Jampersal		1	2.100.405.000		64.010.000		1.359.357.142	0	1.359.357.142		64,72%	DINAS KESEHATAN
			Jumlah kegiatan pertemuan (Rakor, peningkatan kapasitas, AMP)		38	115.120.000	17	19.970.000	7	66.820.000	7	66.820.000	18,42%	58,04%	DINAS KESEHATAN
			Jumlah Honorarium Tim Non PNS		12	4.680.000	0	-	6	2.280.000	6	2.280.000	50,00%	48,72%	DINAS KESEHATAN
			JumlahHonorarium Pegawai Kontrak		12	20.400.000	3	5.100.000	3	5.100.000	3	5.100.000	25,00%	25,00%	DINAS KESEHATAN
											0	-			
		Program Peningkatan Pencegahan Penyakit Tidak Menular				769.025.000	59276	635.993.195	60080	754.172.195	60080	754.172.195		98,07%	DINAS KESEHATAN
		Pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular			7591	769.025.000	59276	635.993.195	60080	754.172.195	60080	754.172.195	791,46%	98,07%	DINAS KESEHATAN
			Terbentuknya Pandu PTM		9	66.869.500	3	19.884.500	9	66.869.500	9	66.869.500	100,00%	100,00%	DINAS KESEHATAN
			Terbentuknya Posbindu		60	117.955.000	20	70.859.000	60	113.984.000	60	113.984.000	100,00%	96,63%	DINAS KESEHATAN

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (2018) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							III		IV						
1	2	4	5		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Terbentuknya Puskesmas Pelayanan Kesehatan Jiwa/ IPWL		10	41.719.500	3	20.235.000	10	41.719.500	10	41.719.500	100,00%	100,00%	DINAS KESEHATAN
			Deteksi Dini FR PTM		7500	25.790.000	59250	202.905.500	60000	207.815.500	60000	207.815.500	800,00%	805,80%	DINAS KESEHATAN
			Pengadaan Co Analiser, Strip Gula, Asam urat dan kolesterol, alat cek glukosa, asam urat dan kolesterol, tensi digital, tensi air raksa, body fat analiser, lancet, alkohol swab,ATK		12	322.991.000	0	322.109.195	1	323.783.695	1	323.783.695	8,33%	100,25%	DINAS KESEHATAN
		Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Bantuan Sosial	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat melalui Bantuan bagi Keluarga Miskin		53	1.146.002.950		852.067.150	53	1.144.027.850	53	1.144.027.850	100,00%	99,83%	DINAS SOSIAL P3A
		Pemberdayaan manajemen usaha bagi keluarga miskin	Bimtek, Rakor, Lomba KUBE		17	154.073.250	15	150.655.000	17	153.673.250	17	153.673.250	100,00%	99,74%	DINAS SOSIAL P3A
		Sosialisasi, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan bantuan bagi WARGA miskin	Pendampingan PKH, Rastra, KUBE, RTLH, WRSE		17	649.534.950	13	479.585.650	17	647.964.850	17	647.964.850	100,00%	99,76%	DINAS SOSIAL P3A
		Pendampingan, Pemantauan dan Penyaluran Bantuan	Rakor dan pembinaan Tagana, Bimtek RTLH, BPNT, Bansos&BPNT, Rastra		17	342.394.750	7	221.826.500	17	342.389.750	17	342.389.750	100,00%	100,00%	DINAS SOSIAL P3A
		pemantauan dan penyaluran bantuan bencana alam													DINAS SOSIAL P3A
		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			90	1.632.485.000		984.082.700	90	1.479.265.849	90	1.479.265.849	100,00%	90,61%	DINAS SOSIAL P3A
		Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	Permakanan panti		9	504.085.000	5	333.800.000	9	497.873.799	9	497.873.799	100,00%	98,77%	DINAS SOSIAL P3A
			Pemeriksaan Jamkesus								0	-			DINAS SOSIAL P3A
			Family Gathering								0	-			DINAS SOSIAL P3A
			Hari Disabilitas Internasional								0	-			DINAS SOSIAL P3A
			Workshop Lansia								0	-			DINAS SOSIAL P3A

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (2018) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							III		IV						
1	2	4	5		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Hari Lanjut Usia Nasional								0	-			DINAS SOSIAL P3A
			Sosialisasi adopsi								0	-			DINAS SOSIAL P3A
		Peningkatan kualitas KAMPANYE SOSIAL , pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	Belanja pegawai kontrak		9	399.500.000	5	253.095.750	9	318.609.900	9	318.609.900	100,00%	79,75%	DINAS SOSIAL P3A
			Hari Anti Narkoba Internasional								0	-			DINAS SOSIAL P3A
			Razia anjal dan gepeng								0	-			DINAS SOSIAL P3A
			Sosialisasi PMKS								0	-			DINAS SOSIAL P3A
		Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	Pelatihan bagi PMKS		22	728.900.000	8	397.186.950	22	662.782.150	22	662.782.150	100,00%	90,93%	DINAS SOSIAL P3A
		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial			60	1.233.355.000		691.483.991	60	1.207.449.189	60	1.207.449.189	100,00%	97,90%	DINAS SOSIAL P3A
		Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	Pembinaan TKSK, LKS, PSM		22	616.140.000	16	129.762.600	22	603.761.600	22	603.761.600	100,00%	97,99%	DINAS SOSIAL P3A
		Pendampingan Kegiatan Karang taruna	Terlaksananya pemilihan karang taruna berprestasi		93	202.215.000	90	184.768.791	93	201.955.100	93	201.955.100	100,00%	99,87%	DINAS SOSIAL P3A
		Peningkatan Kualitas Kesetiakawanan sosial nasional	HKSN		20	415.000.000	17	376.952.600	20	401.732.489	20	401.732.489	100,00%	96,80%	DINAS SOSIAL P3A
		Program Pelayanan Pendataan Jaminan Bantuan Sosial			100	1.377.958.250		1.197.907.555	100	1.369.323.200	100	1.369.323.200	100,00%	99,37%	DINAS SOSIAL P3A
		Updating Keluarga Miskin	Tersusnya data base keluarga miskin		17	768.308.250	15	691.287.500	17	762.306.800	17	762.306.800	100,00%	99,22%	DINAS SOSIAL P3A
		Penyusunan Data Base KK Miskin Penerima Bantuan	Tersusnya data base KK miskin penerima bantuan		17	609.650.000	15	506.620.055	17	607.016.400	17	607.016.400	100,00%	99,57%	DINAS SOSIAL P3A
		Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian / Perkebunan	Jumlah kelompok bahan pangan yang dikonsumsi	kelompok	9	899.590.000		467.101.500	9	894.722.000	9	894.722.000	100,00%	99,46%	DINAS PERTANIAN PKP

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (2018) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							III		IV						
1	2	4	5		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Ketersediaan pangan pokok	ton	460				460		460		100,00%		
		Peningkatan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	Jumlah peserta sosialisasi keamanan pangan	orang	340	363.735.000	340	146.821.500	340	360.296.500	340	360.296.500	100,00%	99,05%	DINAS PERTANIAN PKP
			Jumlah peserta wokshop keamanan pangan	orang	30				30		30		100,00%		DINAS PERTANIAN PKP
			Jumlah peserta pelatihan olahan pangan lokal	orang	20		20		20		20		100,00%		DINAS PERTANIAN PKP
			Jumlah peserta workshop PPH	orang	40				40		40		100,00%		DINAS PERTANIAN PKP
			Jumlah dokumen hasil analisis PPH	dokumen	1				1		1		100,00%		DINAS PERTANIAN PKP
			Jumlah peserta Gerakan Makan B2SA	orang	60				60		60		100,00%		DINAS PERTANIAN PKP
			Jumlah sampel bahan pangan yang dianalisis keamanan pangan	sampel	147		147		147		147		100,00%		DINAS PERTANIAN PKP
			Jumlah lomba dalam rangka penganekaragaman pangan	kategori	2		2		2		2		100,00%		DINAS PERTANIAN PKP
			Jumlah peserta pelatihan pemanfaatan pekarangan siswa SD	orang	125		125		125		125		100,00%		DINAS PERTANIAN PKP
		Pemantauan Distribusi dan Pengembangan Cadangan Pangan	Jumlah dokumen analisis cadangan pangan rumah tangga	dokumen	1	174.455.000		77.800.000	1	174.185.500	1	174.185.500	100,00%	99,85%	DINAS PERTANIAN PKP
			Jumlah laporan bulanan pemantauan harga dan pasokan pangan	dokumen	204		170		204		204		100,00%		DINAS PERTANIAN PKP
			Jumlah pertemuan tingkat lapangan Kelompok Lumbung	orang	500		300		500		500		100,00%		DINAS PERTANIAN PKP
			Jumlah peserta pelatihan teknis lumbung pangan	orang	25		25		25		25		100,00%		DINAS PERTANIAN PKP
			Jumlah peserta pelatihan LDPM	orang	50		50		50		50		100,00%		DINAS PERTANIAN PKP
			Jumlah peserta wokshop stabilitas harga dan pasokan pangan	orang	40		0		40		40		100,00%		DINAS PERTANIAN PKP
			Jumlah pertemuan tingkat lapangan PUPM/TTI	orang	150		100		150		150		100,00%		DINAS PERTANIAN PKP
			Jumlah peserta workshop analisis cadangan pangan rumah tangga	orang	50		25		50		50		100,00%		DINAS PERTANIAN PKP

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (2018) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							III		IV						
1	2	4	5		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Jumlah pertemuan tingkat lapangan LDPM	orang	425		175		425		425		100,00%		DINAS PERTANIAN PKP
		Peningkatan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Daerah Rawan Pangan	Jumlah peserta workshop akhir Demapan	orang	40	361.400.000	0	242.480.000	40	360.240.000	40	360.240.000	100,00%	99,68%	DINAS PERTANIAN PKP
			Jumlah kategori evaluasi Demapan	kategori	2		2		2		2		100,00%		DINAS PERTANIAN PKP
			Jumlah peserta pembinaan Demapan (fasilitasi tingkat lapangan)	orang	240		270		270		270		112,50%		DINAS PERTANIAN PKP
			Jumlah peserta pelatihan teknis	orang	25		25		25		25		100,00%		DINAS PERTANIAN PKP
			Jumlah kategori Lomba APN	kategori	8		6		6		6		75,00%		DINAS PERTANIAN PKP
			Jumlah peserta workshop NBM	orang	30		0		30		30		100,00%		DINAS PERTANIAN PKP
			Jumlah peserta workshop SKPG	orang	30		0		30		30		100,00%		DINAS PERTANIAN PKP
			Jumlah laporan ketersediaan dan kerawanan pangan	eksemplar	204		153		204		204		100,00%		DINAS PERTANIAN PKP
			Jumlah Peringatan HPS (Hari Pangan Sedunia)	kali	1		0		1		1		100,00%		DINAS PERTANIAN PKP
		Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Cakupan pemberian PMT-AS TK	Persen	98,97	108.700.000		71.625.000	98,97	108.700.000	98,97	108.700.000	100,00%	100,00%	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
		Optimalisasi Pokjanal Posyandu	Jumlah peserta pelatihan Kader Posyandu	Orang	225	108.700.000	225	71.625.000	225	108.700.000	225	108.700.000	100,00%	100,00%	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
		Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Cakupan pemberian PMT-AS TK		98,97	3.610.090.000		3.383.021.000		3.600.368.500		3.600.368.500		99,73%	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
		Pemberian tambahan makanan dan vitamin	Jumlah Pemberian Makanan Tambahan PMT-AS untuk 28086 anak	Kali	70	3.610.090.000	70	3.383.021.000		3.600.368.500		3.600.368.500		99,73%	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
		Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Cakupan pemberian PMT-AS PAUD	Persen	98,39	1.999.810.000		1.969.914.425	98,39	1.997.132.400	98,39	1.997.132.400	100,00%	99,87%	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
		Pelayanan kesehatan anak dan Balita	Jumlah pemebrian makanan tambahan PAUD dan Balita	Kali	1141	1.999.810.000	1141	1.969.914.425	1141	1.997.132.400	1141	1.997.132.400	100,00%	99,87%	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
		Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata				56.455.170.000		38.767.125.556		16.535.686.023		55.302.811.579		97,96%	RSUD PS
			BOR	%	80		65,18		59,28		59,28		74,10%		RSUD PS

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (2018) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							III		IV						
1	2	4	5		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			LOS	hari	6		4,86		4,79		4,79		79,83%		RSUD PS
			TOI	hari	2		2,14		2,24		2,24		112,00%		RSUD PS
			BTO	hari	50		5,06		45,54		45,54		91,08%		RSUD PS
		Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Alat- Alat Kesehatan Rumah Sakit Rawat Intensive, Instalasi Radiologi, Instalasi Bedah Sentral, Unit CSSD, dan Instalasi Gawat Darurat	Unit	90	55.955.170.000	6	38.767.125.556	0	16.037.106.023	90	54.804.231.579	100,00%	97,94%	RSUD PS
		Penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita dampak asap rokok	Pengadaan Alat- Alat Kesehatan Rumah Sakit Instalasi Rawat Inap dan Rawat Jalan	Paket					0			-			RSUD PS
		Peningkatan sarana promosi kesehatan dan kapasitas SDM	Terlaksananya Pengadaan Cetakan Rekam Medik	paket	1	100.000.000			1	99.400.000	1	99.400.000	100,00%	99,40%	RSUD PS
			Terlaksananya Kegiatan Promosi Kesehatan Dalam Rangka Hari Kesehatan Nasional	paket	1	100.000.000			1	100.000.000	1	100.000.000	100,00%	100,00%	RSUD PS
			Terlaksananya Kegiatan Character Building	paket	1	75.000.000			1	75.000.000	1	75.000.000	100,00%	100,00%	RSUD PS
			Terlaksananya Pengadaan Papan Nama Rumah Sakit Dalam Rangka Promosi Kresehatan Rumah Sakit	paket	1	65.000.000			1	64.450.000	1	64.450.000	100,00%	99,15%	RSUD PS
			Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Kalender Rumah Sakit dalam rangka Promosi Kesehatan Rumah Sakit	paket	1	60.000.000			1	59.950.000	1	59.950.000	100,00%	99,92%	RSUD PS
			Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Merchandise dan Buku Agenda dalam Rangka Promosi dan Publikasi Rumah Sakit	paket	1	100.000.000			1	99.780.000	1	99.780.000	100,00%	99,78%	RSUD PS
		Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit	Presentasi Capaian Standar Pelayanan Minimal	%	82	145.809.280.917	0	42.910.458.867	78	28.409.460.182	78	126.679.801.268	94,51%	86,88%	RSUDPS
			Capaian Evaluasi Kinerja	angka	80		77,41		77,41		77,41		96,76%		RSUD PS
			Nilai Akip	Angka	85		0		72,1		72,1		84,82%		RSUD PS

No	Sasara n	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (2018) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							III		IV						
1	2	4	5		8b (APBD 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pengelolaan BLUD RSUD	Jumlah Paket Pengelolaan BLUD RSUD	paket	12	145.809.280.917	3	42.910.458.867	3	28.409.460.182	12	126.679.801.268	100,00%	86,88%	RSUD PS

3. Terwujudnya akses dan mutu pendidikan yang berkualitas

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									III		IV							
1	2	4	5		8		8b (APBD P 2019)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun				57.635.919.600		136.098.799.272				127.472.064.714	0	127.472.064.714		93,66%	DISDIKPORA	
				Persentase peningkatan kompetensi guru/kepala sekolah SD/MI dalam pembelajaran		55,5		56			55		55	-	99,10%		DISDIKPORA	
				Persentase peningkatan kompetensi guru/Kepala Sekolah SMP/MTs dalam pembelajaran		53,5		54			53		53	-	99,07%		DISDIKPORA	
				Persentase peningkatan sarana prasarana mutu pendidikan SD		96,22		96			95,72		95,72	-	99,48%		DISDIKPORA	
				Persentase peningkatan sarana prasarana mutu pendidikan SMP	95,5	95,5		96			95		95	-	99,48%		DISDIKPORA	
				Persentase penyelenggaraan SD/MI sesuai SPM	78,14	78,14		78			77,64		77,64	-	99,36%		DISDIKPORA	
				Persentase penyelenggaraan SMP/MTs sesuai SPM	64,9	64,9		65			64,4		64,4	-	99,23%		DISDIKPORA	
				Persentase pengembangan bakat minat/prestasi siswa SD/MI, SMP/MTs	Persen SD	100		100					0	-	0,00%		DISDIKPORA	
					Persen SMP	100		100				100		100	-	100,00%		DISDIKPORA
		Penyelenggaraan Pendidikan	BOP Siswa SMP	36.518 siswa	36518	16.463.780.000	34.600	14.971.780.000	27390	10.232.207.480	34200	14.443.632.480	18259		50,00%		DISDIKPORA	

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
									III		IV							
1	2	4	5		8		8b (APBD P 2019)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
			Dasar SMP															
			jumlah penerima Operasional sekolah model, rujukan, UNBK, sekolah khusus bakat istimewa olahraga dan Inklusi	112 sekolah	112		112				112		0		0,00%		DISDIKPORA	
			Penyelenggaraan UNAS/UASBN Pendidikan Dasar	siswa	26000	1.015.830.100	25.800	970.565.100	25300	922.240.100	25300	922.240.100	25300	922.240.100	98,06%	95,02%	DISDIKPORA	
			Perijinan SD dan SMP Baru	jumlah terbitnya surat izin/ rekomendasi sekolah baru	surat izin	5	30.000.000	5	30.000.000	3	16.125.000	5	25.375.000	5	25.375.000	100,00%	84,58%	DISDIKPORA
			Pengembangan Pendidikan Dasar SMP	jumlah kelompok kerja lesson study	23 kelompok kerja	23	45.000.000	47	120.000.000	17	13.750.000	34	36.750.000	34	36.750.000	72,34%	30,63%	DISDIKPORA
			Pembangunan, rehab sarana dan prasarana bangunan pendidikan Dasar	jumlah sarana dan prasarana yang terbangun dan terehab sekolah SMP	4 unit	4	1.954.525.000	7	2.849.175.000	3	845.042.200	7	2.351.737.342	7	2.351.737.342	100,00%	82,54%	DISDIKPORA
			Pengembangan kompetensi siswa pendidikan dasar	Jumlah lomba pengembangan kopetensi siswa SMP	5 paket	5	1.114.050.000	7	1.823.925.000	3	519.922.000	5	985.192.000	5	985.192.000	71,43%	54,01%	DISDIKPORA
			Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar	jumlah sosialisasi	1 paket	1	70.000.000	1	70.000.000	1	66.567.800	1	66.567.800	1	66.567.800	100,00%	95,10%	DISDIKPORA
			Pengembangan Kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Dasar SD	jumlah sekolah penerima bahan ajar, naskah USM Daerah dan implementasi Kurtilas	391 sekolah	391	339.952.500	391	339.952.500	391	330.351.000	391	330.351.000	391	330.351.000	100,00%	97,18%	DISDIKPORA
			Pengembangan pendidikan dasar berbasis hak-hak anak dan kearifan lokal	jumlah cabang lomba	3 lomba	3	150.000.000	3	150.000.000	0	-	3	141.598.000	3	141.598.000	100,00%	94,40%	DISDIKPORA
			Pengembangan Pendidikan Dasar SD	jumlah lokasi penyelenggara	17 lokasi	17	1.318.505.000	17	1.318.505.000	12	584.032.500	17	1.222.880.000	17	1.222.880.000	100,00%	92,75%	DISDIKPORA
			Pembangunan, rehab sarana dan prasarana bangunan pendidikan SD	jumlah sarana dan prasarana yang terbangun dan terehab sekolah SD	5 ruang	5	5.148.628.000	5	5.582.978.000	3	2.305.079.840	5	5.169.401.761	5	5.169.401.761	100,00%	92,59%	DISDIKPORA

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									III		IV						
1	2	4	5		8		8b (APBD P 2019)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan SD	jumlah sekolah penerima rehab dan koleksi buku perpustakaan	2 paket	2	3.266.550.000	2	3.266.550.000	1	1.986.382.880	2	3.043.692.680	2	3.043.692.680	100,00%	93,18%	DISDIKPORA
		Pengembangan kompetensi siswa pendidikan SD	Jumlah kegiatan pengembangan kompetensi siswa SD	20 paket	20	2.298.534.000	20	2.298.534.000	11	1.225.828.389	19	1.869.979.712	19	1.869.979.712	95,00%	81,36%	DISDIKPORA
		penyelenggaraan pendidikan dasar SD/MI				21.556.000.000	59.100	21.234.350.000	44530,5	15.644.623.450	59100	20.643.003.750	59100	20.643.003.750	100,00%	97,22%	DISDIKPORA
		Monitoring, evaluasi dan pelaporan siswa	Jumlah penerima bantuan pendidikan	388 sekolah	388	14.000.000	112	150.000.000	47	29.600.000	112	129.500.000	112	129.500.000	100,00%	86,33%	DISDIKPORA
		Pengembangan Kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan SMP	jumlah sekolah penerima bahan ajar, kisi-kisi mapel UN dan implementasi Kurtilas	112 sekolah	112	150.000.000	3	7.297.500.629	1	1.304.134.000	3	7.273.747.600	3	7.273.747.600	100,00%	99,67%	DISDIKPORA
		Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan SMP	jumlah ruang kelas dan komputer	3 paket	3	2.467.866.500	24				24		24	-	100,00%		DISDIKPORA
		Monitoring dan evaluasi dan Pelaporan BOS	jumlah sekolah	501 sekolah	501	232.698.500	501	209.198.500	381	156.205.000	501	199.835.000	501	199.835.000	100,00%	95,52%	DISDIKPORA
		Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD	Jumlah sekolah	sekolah			388	46.860.601.887			388	45.204.344.597	388	45.204.344.597	100,00%	96,47%	DISDIKPORA
		Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP	Jumlah sekolah	sekolah			112	26.541.183.656			112	23.204.200.893	112	23.204.200.893	100,00%	87,43%	DISDIKPORA
		Program Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase lembaga PAUD yang aktif melaksanakan kegiatan	100 persen	100	2.986.277.033	100	3.118.152.033		864.370.543	100	2.584.993.911	100	2.584.993.911	100,00%	82,90%	DISDIKPORA
		Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini	jumlah Peserta guru penyusun kurikulum untuk PAUD, sosialisasi dan bimtek kurikulum PAUD	2,000 guru paud	2000	454.675.000	2.000	454.675.000	780	77.300.000	1930	440.100.000	1930	440.100.000	96,50%	96,79%	DISDIKPORA
		Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	jumlah lembaga	40 lembaga	40	825.339.633	40	853.589.633	23	246.430.600	40	651.551.300	40	651.551.300	100,00%	76,33%	DISDIKPORA
			jumlah peserta gebyar PAUD	300 orang	300		400		300		350		350	-	87,50%		DISDIKPORA

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									III		IV						
1	2	4	5		8		8b (APBD P 2019)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			jumlah verifikasi lembaga	8 paket	8		8		8		8		8	-	100,00%		DISDIKPORA
			jumlah peserta bimtek	200 orang	200		150		0		130		130	-	86,67%		DISDIKPORA
			jumlah mitra PAUD	4 lembaga	4		4		4		4		4	-	100,00%		DISDIKPORA
		Pengadaan sarana dan prasarana KBM PAUD	jumlah ruang kelas PAUD	4 unit	4	1.386.142.000	5	1.546.767.000	2	421.794.943	5	1.332.647.811	5	1.332.647.811	100,00%	86,16%	DISDIKPORA
		Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	jumlah peserta lomba apresiasi gugus PAUD	17 gugus PAUD	17	320.120.400	17	263.120.400	0	118.845.000	17	160.694.800	17	160.694.800	100,00%	61,07%	DISDIKPORA
			jumlah peserta lomba Bunda PAUD	17 kecamatan	17		17		0		17		17	-	100,00%		DISDIKPORA
			jumlah lembaga penerima BOP PAUD	1.209 lembaga	1209		1.209		1209		1209		1209	-	100,00%		DISDIKPORA
			jumlah peserta lomba kreativitas PAUD	250 peserta	250		300		250		300		300	-	100,00%		DISDIKPORA
		Program Pendidikan Non Formal	Persentase lembaga pendidikan non formal (PKBM, LKP, TBM) yang aktif melaksanakan kegiatan	100 persen	100	1.598.650.000	100	1.990.912.000		855.124.500	100	1.829.542.000	100	1.829.542.000	100,00%	91,89%	DISDIKPORA
		Penyelenggaraan pendidikan non formal	jumlah PKBM, pendidikan berbasis keluarga, UNPK dan SKB	4 paket	4	422.585.000	8	850.435.000	4	403.050.000	8	827.610.000	8	827.610.000	100,00%	97,32%	DISDIKPORA
		Pengembangan Pendidikan non formal	jumlah peserta pelatihan	970 orang	970	554.375.000	970	509.787.000	340	141.862.000	960	452.862.000	960	452.862.000	98,97%	88,83%	DISDIKPORA
		Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Paket A dan B	Jumlah Penyelenggaraan	13 Lembaga	13	229.885.000	13	235.885.000	7	113.480.000	10	132.010.000	10	132.010.000	76,92%	55,96%	DISDIKPORA
		Penyelenggaraan Paket C setara SMU	Jumlah Penyelenggara Paket C	12 Lembaga	12	391.805.000	12	394.805.000	6	196.732.500	12	208.530.000	12	208.530.000	100,00%	52,82%	DISDIKPORA
		Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah perpustakaan yang memiliki Akreditasi Nasional	Jumlah	4	1.617.628.500	4	1.807.878.500		993.642.999	4	1.773.612.569	4	1.773.612.569	100,00%	98,10%	DIPERPUSIP
		Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Kepustakaan	Jumlah koordinasi dengan forkom kabupaten dan kota se DIY : 5 kali	5 kali	5	49.850.000	5	134.250.000	5	32.850.000	5	131.580.000	5	131.580.000	100,00%	98,01%	DIPERPUSIP
		Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya	Pekan Film : 400 Orang	400 org	400	161.330.000	400	198.380.000	400	144.250.000	400	196.578.000	400	196.578.000	100,00%	99,09%	DIPERPUSIP

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									III		IV							
1	2	4	5		8		8b (APBD P 2019)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Baca															
			Terlaksananya sosialisasi pojok baca : 400 Orang	400	400		400		400		400		400	-	100,00%		DIPERPUSIP	
			Jumlah Buletin : 500 Eksemplar	500 eks	500		500		500		500		500	-	100,00%		DIPERPUSIP	
			Terselenggaranya kegiatan literasi : 378 Orang	378 Org	378		378		378		378		378	-	100,00%		DIPERPUSIP	
			Workshop : 100 Orang	100 org	100		100		100		100		100	-	100,00%		DIPERPUSIP	
			Terselenggaranya bedah buku : 225 Orang kegiatan	225 org	225		225		225		225		225	-	100,00%		DIPERPUSIP	
			Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah	2000 eks	2000	311.653.500	2.000	298.653.500	2000	282.206.899	2000	297.076.899	2000	297.076.899	100,00%	99,47%	DIPERPUSIP	
			Monitoring, Evaluasi dan Pelporan	Jumlah perpustakaan desa, sekolah dan komunitas : 15 lokasi	60 lokasi	60	163.855.000	60	163.855.000	60	143.346.400	60	158.033.400	60	158.033.400	100,00%	96,45%	DIPERPUSIP
			Pelatihan Pengelolaan Perpustakaan	Jumlah peserta pelatihan pengelola perpustakaan : 100 Orang	100 org	100	46.640.000	100	33.440.000	100	7.600.000	100	33.240.000	100	33.240.000	100,00%	99,40%	DIPERPUSIP
			Pengembangan Sarpras Perpustakaan	Jumlah sarana dan prasarana perpustakaan : 1 Aplikasi	1 aplikasi	1	884.300.000	1	979.300.000	1	383.389.700	1	957.104.270	1	957.104.270	100,00%	97,73%	DIPERPUSIP

4. Turunnya Jumlah Masyarakat Kurang Mampu

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							III		IV						
					1	2	4	5		8b (APBDP 2018)	11	12	13	X=13/8 X 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Presentase Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi		75	1.880.581.000			75	1849979130	75	1.849.979.130	100,00%	98,37%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		Kegiatan Pembinaan LPK	Jumlah LPK yang mengikuti pembinaan		10	199.775.000			10	197782000	10	197.782.000	100,00%	99,00%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							III		IV							
							8b (APBDP 2018)		11						12	
1	2	4	5		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	X=13/8 X 100%	16		
			Pemberdayaan Wirausaha bagi Lulusan Pelatihan	Jumlah pemberdayaan bagi wirausaha lulusan pelatihan		50	46.810.000			50	46810000	50	46.810.000	100,00%	100,00%	DINAS TENAGA KERJADAN TRANSMIGRASI
			Pemagangan / OJT Mantan Peserta Pelatihan di Perusahaan	Jumlah Peserta OJT		60	177.975.000			60	175100000	60	175.100.000	100,00%	98,38%	DINAS TENAGA KERJADAN TRANSMIGRASI
			Uji kompetensi peserta latihan di BLK	Jumlah Pesrta uji komptensi		6	48.575.000			6	48392000	6	48.392.000	100,00%	99,62%	DINAS TENAGA KERJADAN TRANSMIGRASI
			Pengukuran Produktifitas Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga kerja yang diukur produktifitasnya		20	28.350.000			20	25650000	20	25.650.000	100,00%	90,48%	DINAS TENAGA KERJADAN TRANSMIGRASI
			Sosialisasi dan Pelatihan Tentang Produktifitas Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga kerja peserta sosialisasi dan pelatihan		250	284.850.000			250	266921880	250	266.921.880	100,00%	93,71%	DINAS TENAGA KERJADAN TRANSMIGRASI
			Pelatihan Merjahit	Jumlah Peserta Pelatihan		64	181.728.000			64	181176600	64	181.176.600	100,00%	99,70%	DINAS TENAGA KERJADAN TRANSMIGRASI
			Pelatihan mekanik	Jumlah Peserta Pelatihan		48	141.086.000			48	140414400	48	140.414.400	100,00%	99,52%	DINAS TENAGA KERJADAN TRANSMIGRASI
			Pelatihan teknisi	Jumlah Peserta Pelatihan		32	90.724.000			32	90649600	32	90.649.600	100,00%	99,92%	DINAS TENAGA KERJADAN TRANSMIGRASI
			Pelatihan membelair	Jumlah Peserta Pelatihan		32	96.724.000			32	96488500	32	96.488.500	100,00%	99,76%	DINAS TENAGA KERJADAN TRANSMIGRASI
			Pelatihan juru las	Jumlah Peserta Pelatihan		32	96.724.000			32	96616000	32	96.616.000	100,00%	99,89%	DINAS TENAGA KERJADAN TRANSMIGRASI
			Pelatihan software	Jumlah Peserta Pelatihan		32	88.724.000			32	87017300	32	87.017.300	100,00%	98,08%	DINAS TENAGA KERJADAN TRANSMIGRASI
			Pelatihan tata boga	Jumlah Peserta Pelatihan		112	293.052.000			112	292116150	112	292.116.150	100,00%	99,68%	DINAS TENAGA KERJADAN TRANSMIGRASI
			Pelatihan Batik tulis	Jumlah Peserta Pelatihan		16	45.562.000			16	45415900	16	45.415.900	100,00%	99,68%	DINAS TENAGA KERJADAN TRANSMIGRASI
			Pelatihan bahasa inggris	Jumlah Peserta Pelatihan		16	59.922.000			16	59428800	16	59.428.800	100,00%	99,18%	DINAS TENAGA KERJADAN TRANSMIGRASI
			Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase pencari kerja yang menyerap informasi bursa kerja	PERSEN	80	300.943.500			80	282.671.975	80	282.671.975	100,00%	93,93%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
			Penanggulangan permasalahan ketenaakerjaan	Jumlah Penanggulangan Permasalahan ketenagakerjaan	kasus	10	8.843.500			8	8.391.900	8	8.391.900	80,00%	94,89%	DINAS TENAGA KERJADAN TRANSMIGRASI

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							III		IV			X=13/8 X 100%			
							8b (APBDP 2018)		11						12
1	2	4		5		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16	
			Penyusunan dan penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	Jumlah Kegiatan penyebarluasan informasi	kali	33	292.100.000			33	274.280.075	33	274.280.075	100,00% 93,90%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	PERSEN	80	571.244.480			81	531.674.430	81	531.674.430	101,25% 93,07%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
			Penyuluhan ketenagakerjaan	Jumlah kegiatan penyuluhan ketenagakerjaan	kali	18	106.650.000			18	104.597.650	18	104.597.650	100,00% 98,08%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
			Penempatan pencari kerja	Jumlah Pencari Kerja Yang ditempatkan	orang	2.700	464.594.480			2666	427.076.780	2.666	427.076.780	98,74% 91,92%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		Program Transmigrasi Umum	Persentase penempatan Transmigrasi	PERSEN	65	516.849.500			65	386.801.400	65	386.801.400	100,00% 74,84%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
			Penyuluhan, Pengarahan, dan Penempatan Transmigrasi	Jumlah KK yang ditempatkan	kk	30	516.849.500			28	386.801.400	28	386.801.400	93,33% 74,84%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		Program Perluasan Kerja	Persentase tenaga kerja yang berwirausaha	PERSEN	67	19.309.113.000			68	18.766.925.086	68	18.766.925.086	101,49% 97,19%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
			Kegiatan terapan teknologi tepat guna	Jumlah Peserta TTG	orang	40	100.000.000			40	99.999.650	40	99.999.650	100,00% 100,00%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
			Kegiatan Padat Karya Produktif dan Infrastruktur	Jumlah paket padat karya	lokasi	191	19.056.073.000			191	18.514.776.286	191	18.514.776.286	100,00% 97,16%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
			Pemanduan dan Pembinaan Usaha Tenaga Kerja Lansia dan Penyandang Cacat	Jumlah Peserta Pemanduan dan Pembinaan Usaha Tenaga Kerja Lansia dan Penyandang Cacat	orang	60	66.000.000			60	65.999.850	60	65.999.850	100,00% 100,00%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
			Pemanduan dan Pembinaan usaha tenaga kerja terdidik dan mandiri	Jumlah Peserta TKM	orang	60	87.040.000			60	86.149.300	60	86.149.300	100,00% 98,98%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian	Pengembangan Infrastruktur irigasi	unit	16	3.186.958.750		2296746849	16	3152318189	16	3.152.318.189	100,00% 98,91%	DINAS PERTANIAN PKP	
				Pengembangan jaringan dan optimasi air	ha	2.000			2000		2.000	-	100,00%		DINAS PERTANIAN PKP

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							III		IV						
							8b (APBDP 2018)		11						12
1	2	4	5		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Penguatan kelembagaan petani pemakai air	kelompok	10				10		10	-	100,00%		DINAS PERTANIAN PKP
		Peningkatan Prasarana Pertanian	Jumlah peserta sosialisasi pendampingan PSP	orang	375	2.485.819.000	375	1797082349	375	2459446209	375	2.459.446.209	100,00%	98,94%	DINAS PERTANIAN PKP
			Jumlah peserta pealitian pembuatan pupuk organik WISMP	orang	120		120		120		120	-	100,00%		DINAS PERTANIAN PKP
			Jumlah pengadaan/pembangunan irigasi air tanah dangkal	paket	18		0		18		18	-	100,00%		DINAS PERTANIAN PKP
			JUmlah peserta pelatihan penguatan kelembagaan P3A	orang	80		80		80		80	-	100,00%		DINAS PERTANIAN PKP
			Jumlah peserta sosialisasi asuransi pertanian	orang	150		150		150		150	-	100,00%		DINAS PERTANIAN PKP
			Jumlah peserta uji publik pemetaan LP2B	orang	255		0		255		255	-	100,00%		DINAS PERTANIAN PKP
			Jumlah pengadaan dam parit	paket	4		0		4		4	-	100,00%		DINAS PERTANIAN PKP
			Jumlah pengadaan renovasi bangunan kantor puskeswan	paket	4		4		4		4	-	100,00%		DINAS PERTANIAN PKP
			Jumlah peserta evaluasi LKMA PUAP	orang	340		340		340		340	-	100,00%		DINAS PERTANIAN PKP
			Jumlah peserta sekolah lapang iklim	orang	40		40		40		40	-	100,00%		DINAS PERTANIAN PKP
		Peningkatan Sarana dan Teknologi Pertanian	Jumlah pengawasan peredaran pupuk dan pestisida	kali	10	146.199.000	1	104784000	10	143006500	10	143.006.500	100,00%	97,82%	DINAS PERTANIAN PKP
			Jumlah paket pengujian pupuk	paket	1		0		0		-	-	0,00%		DINAS PERTANIAN PKP
			Jumlah peserta pelatihan pembuatan pupuk	orang	30		30		30		30	-	100,00%		DINAS PERTANIAN PKP
			Jumlah peserta pelatihan alsintan	orang	30		30		30		30	-	100,00%		DINAS PERTANIAN PKP
			Jumlah paket pengadaan pestisida	paket	2		2		2		2	-	100,00%		DINAS PERTANIAN PKP
			Jumlah peserta workshop pupuk	orang	100		100		100		100	-	100,00%		DINAS PERTANIAN PKP
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan UPT Pengolahan Pupuk Organik	Jumlah paket penyediaan operasional UPT PPO	paket	12	554.940.750	9	394880500	12	549865480	12	549.865.480	100,00%	99,09%	DINAS PERTANIAN PKP
			Jumlah jenis pengadaan bahan baku produksi pupuk organik	jenis	3		3		3		3	-	100,00%		DINAS PERTANIAN PKP
			Jumlah jenis pengadaan alat perlengkapan produksi pupuk organik	jenis	6		6		6		6	-	100,00%		DINAS PERTANIAN PKP
		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam	Cakupan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Persen	30%	88.550.000		37040000	30%	88550000	30%	88.550.000	100,00%	100,00%	DINAS PENGENDALIA

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							III		IV							
							8b (APBDP 2018)		11							12
1	2	4	5		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16	
		Membangun Desa														PENDUDUK
		Pendampingan Kerjasama Desa	Jumlah sub kegiatan pendampingan kerjasama desa	Kegiatan	5	88.550.000	2	37040000	5	88550000	5	88.550.000	100,00%	100,00%		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	persen	85	51.250.000		51.250.000	85	51.250.000	85	51.250.000	100,00%	100,00%		KEC KRETEK
		Penyelenggaraan lomba desa	Jumlah Pelaksanaan lomba desa tingkat kecamatan	kali	1	6.500.000	1	6500000	1	6500000	1	6.500.000	100,00%	100,00%		KEC KRETEK
		Musrenbang tingkat kecamatan	Jumlah kegiatan musrenbang tk kecamatan	kali	1	14.750.000	1	14750000	1	14750000	1	14.750.000	100,00%	100,00%		KEC KRETEK
		Bantul Ekspo dan karnaval	Jumlah pelaksanaan bantul expo	kali	1	30.000.000	1	30000000	1	30000000	1	30.000.000	100,00%	100,00%		KEC KRETEK
		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Cakupan pemberdayaan desa	Persen	13,33	749.352.810		159000000	13,33	737377810	13	737.377.810	100,00%	98,40%		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
		Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Jumlah verifikasi BKK dan P2MD	Proposal	4.200	348.672.810	1571	112270000	4200	339147810	4.200	339.147.810	100,00%	97,27%		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
		Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat	Jumlah kegiatan Bimtek P3MD	Sub Kegiatan	3	151.560.000	2	41530000	3	150310000	3	150.310.000	100,00%	99,18%		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
		Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa	Pengelolaan data profil desa	Desa	75	176.720.000	75	3900000	75	175520000	75	175.520.000	100,00%	99,32%		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
		Penyiapan masyarakat pengelola air bersih (PAB) Pedesaan	Jumlah Lokasi penerima bantuan PAB	Lokasi	20	72.400.000	0	1300000	20	72400000	20	72.400.000	100,00%	100,00%		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
		Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Jumlah lembaga ekonomi desa yang difasilitasi	Persen	7%	730.140.000		533165000	7%	730090000	7%	730.090.000	100,00%	99,99%		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
		Pelatihan ketrampilan usaha EKONOMI PERDESAAN	Jumlah Sub kegiatan Bumdes	Kegiatan	5	245.260.000	4	171040000	5	245210000	5	245.210.000	100,00%	99,98%		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
		Pemberdayaan usaha EKONOMI pedesaan	Jumlah peserta lomba pasar desa	Pasar Desa	13	238.500.000	13	127930000	13	238500000	13	238.500.000	100,00%	100,00%		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
		Pengembangan Teknologi Tepat Guna	Jumlah pelaksanaan kegiatan TTG	Kelompok	5	246.380.000	5	234195000	5	246380000	5	246.380.000	100,00%	100,00%		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							III		IV							
							8b (APBDP 2018)		11						12	
1	2	4	5		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Cakupan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Persen	30%	1.462.975.000		1215105000	30%	1454490000	30%	1.454.490.000	100,00%	99,42%	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK	
		Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	Jumlah pelaksanaan pendampingan Musyawarah Pembangunan Desa	Desa	75	14.900.000	0	0	75	149000000	75	14.900.000	100,00%	100,00%	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK	
		Penyelenggaraan lomba desa	Jumlah peserta ekspos lomba desa (17x30 Orang)	Orang	210	797.450.000	210	773385000	210	792050000	210	792.050.000	100,00%	99,32%	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK	
		Bulan bakti gotong royong masyarakat dan LKD	Jumlah Desa Pemenang Lomba LPMD Berprestasi Tingkat Kabupaten	Kejuaraan	6	240.090.000	6	238965000	6	239965000	6	239.965.000	100,00%	99,95%	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK	
		Pendampingan kegiatan TMMD	Jumlah Lokasi yang terfasilitasi TMMD Sengkuyung dan karya bakti TNI	Lokasi	23	292.950.000	2	170170000	23	290040000	23	290.040.000	100,00%	99,01%	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK	
		Bantul Ekspo dan karnaval	Jumlah pelaksanaan pameran bantul Ekspo dan carnival	Kali	2	32.085.000	2	32085000	2	32085000	2	32.085.000	100,00%	100,00%	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK	
		Pengembangan desa siaga	Jumlah peserta lomba desa siaga aktif	Kejuaraan	17	85.500.000	0	500000	17	85450000	17	85.450.000	100,00%	99,94%	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK	
		Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga	Cakupan penanganan keluarga pra sejahtera dan sejahtera 1	Persen	51	271.450.000		136400000	51	256175000	51	256.175.000	100,00%	94,37%	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK	
		Pelatihan tenaga pedamping kelompok bina keluarga di kecamatan	Jumlah peserta pelatihan Bina Keluarga Balita	kader	150	34.400.000	150	33200000	150	33200000	150	33.200.000	100,00%	96,51%	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK	
		Pengembangan ADIT UKA (asuhan Dini Tumbuh Kembang Anak)	Jumlah peserta pelatihan ADIT UKA	kader	225	128.175.000	225	17075000	225	123825000	225	123.825.000	100,00%	96,61%	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK	
		Pendampingan Forum komunikasi kader posdaya	Jumlah pertemuan forum kader Posdaya	Kali	12	14.000.000	9	7975000	12	14000000	12	14.000.000	100,00%	100,00%	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK	
		Evaluasi Kegiatan Tribina (BKB, BKR, dan BKL) dan POSDAYA	Jumlah penerima hadiah kategori lomba Tribina dan Posdaya	Kategori	9	34.900.000	9	27400000	9	27400000	9	27.400.000	100,00%	78,51%	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK	
		Monitoring dan Evaluasi pengelolaan dana bergulir bagi kelompok Ekonomi Produktif Keluarga Pra Sejahtera dan KS I	Monitoring kelompok UPPKS	orang	250	59.975.000	150	50750000	250	57750000	250	57.750.000	100,00%	96,29%	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK	
		Pedampngan Program Layanan bagi Keluarga Miskin dan PMKS	Jumlah peserta orientasi anggota kelompok UPPKS dari keluarga miskin	orang							-	-			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK	
		Program Pengembangan Analisa Data dan Dampak Kependudukan	Cakupan ketersediaan datadan informasi keluarga	Dokumen	1	278.436.400	0	34053400	1	270678400	1	270.678.400	100,00%	97,21%	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK	

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							III		IV						
							8b (APBDP 2018)		11						12
1	2	4	5		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	X=13/8 X 100%	16	
		Analisa Data dan Dampak Kependudukan	Jumlah peserta sosialisasi updating data	Orang	300	67.200.000	9	9750000	300	67200000	300	67.200.000	100,00%	100,00%	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
		Pengolahan, Updating Serta Analisa Data, dan Statistik Daerah	Jumlah pelaksanaan kegiatan pengolahan, updating dan analisis data statistik daerah	Kali	12	179.433.000	272	24303400	12	171675000	12	171.675.000	100,00%	95,68%	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
		Fasilitasi Proses Pencatatan Pelaporan Pelayanan Kontrasepsi dan Pengendalian Lapangan	Jumlah peserta pertemuan pengendalian program	Orang	408	31.803.400			408	31803400	408	31.803.400	100,00%	100,00%	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
		Program Keluarga Berencana	Cakupan peserta KB aktif		69%	5.700.413.600		3062737756	69%	5444761136	69%	5.444.761.136	100,00%	95,52%	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
		Pelayanan KIE	Jumlah peserta Sosialisasi Program KB	Kali / Orang	22.810	3.750.040.000	11400	1868650256	27630	3528350136	27.630	3.528.350.136	121,13%	94,09%	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
			Jumlah pelaksanaan KIE program KB	Kecamatan	17		13		17		17	-	100,00%		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
		Pembinaan Keluarga Berencana	Jumlah peserta pelatihan petugas pelayanan KB	Bulan	70	1.210.635.000	70	689120000	70	1205015000	70	1.205.015.000	100,00%	99,54%	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
		Monitoring dan evaluasi Yandu KB Kesehatan dan kespro dalam rangka TNI manunggal	Jumlah pelaksanaan kegiatan penilaian kegiatan KRR, Ibu Anak dan Pembinaan KB	Kali	1	41.500.000	1	0		41500000	-	41.500.000	0,00%	100,00%	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
		Pemantapan mekanisme operasional	Jumlah koordinasi tingkat kecamatan	Kali	4	187.453.600	1	106257500	4	177911000	4	177.911.000	100,00%	94,91%	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
			Jumlah koordinasi tingkat desa	Kali	4		1		4		4	-	100,00%		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
		Pelaksanaan Kegiatan Hari Keluarga Tingkat Kabupaten	Jumlah pelaksanaan kegiatan Hari Keluarga Nasional	kali	2	338.710.000		288760000	2	323410000	2	323.410.000	100,00%	95,48%	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
		Pencanangan dan Pembentukan Kampung KB	Jumlah peserta pencanangan kampung KB	Orang	200	21.575.000	0	0	200	20975000	200	20.975.000	100,00%	97,22%	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
		Pengadaan sarana mobilitas KB	Jumlah pemberian reward peserta KB Baru MOP	Botol/Box	83	115.500.000	83	83250000	83	115500000	83	115.500.000	100,00%	100,00%	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
		Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan KB	Jumlah Pemenang Lomba PLKB, IMP dan KB Pria	Kejuaraan	9	35.000.000	9	26700000	9	32100000	9	32.100.000	100,00%	91,71%	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
		Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Cakupan sosialisasi kesehatan reproduksi remaja	Persen	17,50%	155.225.000		102450000	17,50%	154775000	17,5%	154.775.000	100,00%	99,71%	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
		Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reroduksi	Jumlah pertemuan KIE tentang KRR	kali	7	32.425.000	6	21650000	7	31975000	7	31.975.000	100,00%	98,61%	DINAS PENGENDALIAN

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							III		IV							
							1	2	4	5		8b (APBDP 2018)		11		12
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Remaja (KRR)													PENDUDUK
			Lomba forum PIK remaja	Jumlah peserta orientasi PIK Remaja	Orang	150	32.800.000	150	32300000	150	32800000	150	32.800.000	100,00%	100,00%	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
			KIE kesehatan reproduksi remaja bagi remaja	Jumlah peserta KIE/Sosialisasi	Orang	1.800	90.000.000	1300	48500000	1800	90000000	1.800	90.000.000	100,00%	100,00%	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
			Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Cakupan layanan kader IMP	Persen	80%	41.940.000		16990000	80%	41940000	1	41.940.000	100,00%	100,00%	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
			Pendampingan Forum IMP	Jumlah peserta kegiatan pemantapan IMP (6x100 orang)	orang	6/600	41.940.000	4	16990000	6/600	41940000	6/600	41.940.000		100,00%	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
				Jumlah pelaksanaan pertemuan forum IMP (12x34 orang)	Kali	12		9		12		12	-	100,00%		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
			Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	Cakupan Desa sasaran P2W-KSS	Persen	5,33	69.300.000		64730000	5,33	69300000	5,33	69.300.000	100,00%	100,00%	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
			Peningkatan Peranan Wanita Menuju keluarga Sehat sejahtera (P2WKSS)	Jumlah peserta pelatihan warga binaan P2W-KSS	Desa	3	69.300.000	3	64730000	3	69300000	3	69.300.000	100,00%	100,00%	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK

5. Terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawa
								III		IV						
1	2	4		5		8b (APBD P 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi		cakupan koperasi yang melaksanakan RAT		80	725.588.500		539.809.844	80,9	607.099.360	80,9	607.099.360	101,13%	83,67%	DINAS KOPERASI UKMP
			Pembinaan, pengawasan, dan perharnaan koperasi berprestasi			97.401.000		88.132.344		97.381.860	0	97.381.860		99,98%		DINAS KOPERASI UKMP

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								III		IV						
1	2	4		5		8b (APBD P 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				terlaksananya Penilaian Kesehatan KSP/UPS	koperasi	200		200		200		200	-	100,00%		
				Terlaksananya Revitalisasi Koperasi	koperasi	10		5		10		10	-	100,00%		
				Terlaksananya Penilaian Koperasi Berprestasi	koperasi	20		20		20		20	-	100,00%		
			Peningkatan Manajemen Perkoperasian				202.490.000		148.481.000		201.421.000	0	201.421.000		99,47%	DINAS KOPERASI UKMP
				terselenggaranya pelatihan bisnis online bagi anggota koperasi	kali							0	-			
				terselenggaranya workshop	kali							0	-			
				terlaksananya pameran peringatan harkopnas	kali							0	-			
				terlaksananya pelatihan pembukuan	orang	60		60		60		60	-	100,00%		
				pelatihan pengawasan internal	orang	40		40		40		40	-	100,00%		
				terlaksananya promosi produk koperasidan anggota koperasi	koperasi	3		3		3		3	-	100,00%		
				terlaksananya pelatihan analisa pembiayaan	orang	80				80		80	-	100,00%		
			Pengembangan Kerjasama dan Kemitraan Koperasi				329.475.000		209.800.000		214.900.000	0	214.900.000		65,22%	DINAS KOPERASI UKMP
				kerjasama antar koperasi	koperasi							0	-			
				terlaksananya penilaian koperasi berprestasi	koperasi							0	-			
				terlaksananya tangkas trampil Tk SLTP/SLTA	kegiatan							0	-			
				terselenggaranya sosialisasi aplikasi koperasi	kali							0	-			
				jumlah pelatihan pelaku usaha melalui koperasi	koperasi	5				5		5	-	100,00%		
				terlaksananya workshop pengembangan kopersi	orang	80		80		80		80	-	100,00%		
				terlaksananya konsultasi kebijakan perkoperasian	kali	2		1		2		2	-	100,00%		
				pelatihan UMKM	kali			5		5		5	-	100,00%		
					5								-			
				terlaksananya FGD akses permodalan	kali	1		1		1		1	-	100,00%		
			Peningkatan Kualitas Kelembagaan DEKOPINDA			96.222.500		93.396.500		93.396.500		0	93.396.500		97,06%	DINAS KOPERASI UKMP

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							III		IV						
1	2	4	5		8b (APBD P 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			terlaksananya Rakerda Dekopinda								0	-			
			terlaksananya sarasehan hari koperasi								0	-			
			terlaksananya pelatihan	orang	30		30		30		30	-	100,00%		
			hibah perbaikan gedung dan bangunan								0	-			
			terselenggaranya tangkas trampil	orang	200		200		200		200	-	100,00%		
			terselenggaranya sarasehan	orang	200		200		200		200	-	100,00%		
											0	-			
		Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	peningkatan partisipasi produk usaha mikro	jenis		143.878.000		36.859.500	3	143.329.000	3	143.329.000		99,62%	DINAS KOPERASI UKMP
		Peningkatan Promosi UMKM				143.878.000		36.859.500		143.329.000	0	143.329.000		99,62%	
			jumlah promosi	kali							0	-			
			jumlah workshop	kali							0	-			
			studi banding	kali							0	-			
			sosialisasi	kali							0	-			
			jumlah pelaksanaan pameran		2				2		2	-	100,00%		DINAS KOPERASI UKMP
											0	-			
		Pengembangan industri rumah tangga dan UMKM									0	-			
		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	peningkatan jumlah wirausaha baru			1.038.281.000		461.198.000		798.148.000	0	798.148.000		76,87%	DINAS KOPERASI UKMP
		Pengembangan Kewirausahaan	peningkatan usahawan baru	orang							0	-			
			terlaksananya pelatihan wirausaha baru		560				560		560	-	100,00%		DINAS KOPERASI UKMP
			workshop bagi UMKM	orang	200				200		200	-	100,00%		
			workshop pemasaran online	orang					60		60	-			

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							III		IV						
1	2	4	5		8b (APBD P 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			sosialisasi pembiayaan bagi usaha mikro	orang	100				100		100	-	100,00%		
			pelatihan ex binaan lapas		30				24		24	-	80,00%		
											0	-			
		Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Usaha Mikro kecil yang mendapatkan kemudahan akses permodalan	angka	50	728.022.000		376.477.720	50	718.494.644	50	718.494.644	100,00%	98,69%	DINAS KOPERASI UKMP
		Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah				728.022.000		376.477.720		718.494.644	0	718.494.644		98,69%	DINAS KOPERASI UKMP
			terlaksananya monitoring bantuan dana pemerintah												DINAS KOPERASI UKMP
			terlaksananya kegiatan pasar rakyat												DINAS KOPERASI UKMP
			terlaksananya sertifikasi tanah												DINAS KOPERASI UKMP
			terlaksananya kegiatan fasilitas UKM												DINAS KOPERASI UKMP
			terlaksananya fasilitas SPIRT												DINAS KOPERASI UKMP
			pendampingan usaha mikro kecil	kecamatan	17		17		17		17	-	100,00%		DINAS KOPERASI UKMP
			sosialisasi percepatan IUMK		1.000				1000						DINAS KOPERASI UKMP
		Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Cakupan alat UTTP (ukur takar timbang dan perlengkapannya) yang ditera/ tera ulang		7	2.073.074.605			44,14	2.073.074.605	44,14	2.073.074.605	100,00%	100,00%	DINAS PERDAGANGAN
		Pelayanan Kemetrolagian Daerah				2.073.074.605		204.906.449		2.073.074.605	0	2.073.074.605		100,00%	DINAS PERDAGANGAN
			Jumlah peserta sosialisasi kemetrolagian	90 orang	240		240		240		240	-	100,00%		DINAS PERDAGANGAN
			Jumlah penyediaan alat standar pelayanan kemetrolagian	0 paket	1		1		1		1	-	100,00%		DINAS PERDAGANGAN
			Jumlah pengadaan kendaraan operasional kemetrolagian roda 4 (DAK)	0 unit	2		2		2		2	-	100,00%		DINAS PERDAGANGAN
			Jumlah penyediaan alat standar kemetrolagian (DAK)	0 paket	1		1		1		1	-	100,00%		DINAS PERDAGANGAN

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							III		IV						
1	2	4	5		8b (APBD P 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Jumlah penyediaan komputer dan kelengkapannya	0 unit	-		5		-		-	-			DINAS PERDAGANGAN
			Belanja operasional UPT Metrologi	3 bulan	12		12		12		12	-	100,00%		DINAS PERDAGANGAN
			Jumlah gedung UPT yang terpelihara	0 unit	1		1		1		1	-	100,00%		DINAS PERDAGANGAN
		Program peningkatan dan pengembangan ekspor	Jumlah Nilai Ekspor	US \$	75.180.000	1.783.750.300			207778415,3	1.783.750.300	207778415,3	1.783.750.300	276,37%	100,00%	DINAS PERDAGANGAN
		Pengembangan ekspor dengan instansi terkait/asosiasi/pengusaha				274.583.950		76.399.450		274.583.950	0	274.583.950		100,00%	DINAS PERDAGANGAN
			Jumlah peserta monev ijin usaha bidang perdagangan	orang	30		30		30		30	-	100,00%		DINAS PERDAGANGAN
			Jumlah peserta sosialisasi ijin usaha bidang perdagangan	orang	120		120		120		120	-	100,00%		DINAS PERDAGANGAN
			Kajian peraturan perijinan usaha perdagangan	dokumen	1		1		1		1	-	100,00%		DINAS PERDAGANGAN
			Terlaksananya publikasi melalui sosial media	paket	1		1		1		1	-	100,00%		DINAS PERDAGANGAN
			Publikasi lewat media cetak dan elektronik	unit	12		12		12		12	-	100,00%		DINAS PERDAGANGAN
		Pengembangan Pasar dan Ekspor Daerah				1.509.166.350		770.401.900		1.509.166.350	0	1.509.166.350		100,00%	DINAS PERDAGANGAN
			Jumlah peserta pelatihan pemasaran/ distribusi/ kemasan/ dll	orang	120		120		120		120	-	100,00%		DINAS PERDAGANGAN
			Jumlah pameran produk yang difasilitasi/diikuti	kali	8		8		8		8	-	100,00%		DINAS PERDAGANGAN
		Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Presentase deviasi harga komoditas strategis	persen	5	408.041.650			3,5	408.041.650	3,5	408.041.650	70,00%	100,00%	DINAS PERDAGANGAN
		Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk				243.564.650		22.998.550		243.564.650	0	243.564.650		100,00%	DINAS PERDAGANGAN
			Jumlah pemetaan toko modern dan pasar tradisional; jumlah pemetaan agen LPG, pangkalan LPG, dan Gudang; jumlah pemetaan jalur distribusi bapak	dokumen	3		3		3		3	-	100,00%		DINAS PERDAGANGAN

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							III		IV						
1	2	4	5		8b (APBD P 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Terlaksananya Operasi Pasar Murni (OPM) barang kebutuhan pokok strategis	dokumen	3		3		3		3	-	100,00%		DINAS PERDAGANGAN
		Pengembangan Pengelolaan Gedung dengan Sistem Resi Gudang				81.867.000		63.579.250		81.867.000	0	81.867.000		100,00%	DINAS PERDAGANGAN
			Jumlah peserta sosialisasi SRG	orang	150		150		150		150	-	100,00%		DINAS PERDAGANGAN
			Jumlah penyediaan baliho SRG	unit	1		1		1		1	-	100,00%		DINAS PERDAGANGAN
		Peningkatan pelayanan perdagangan				82.610.000		23.545.000		82.610.000	0	82.610.000		100,00%	DINAS PERDAGANGAN
			Telaksananya pengendalian dan pengawasan di bidang perdagangan	jenis pengawasan	9		9		9		9	-	100,00%		DINAS PERDAGANGAN
			Jumlah peserta sosialisasi terkait pelayanan perdagangan	orang	120		120		120		120	-	100,00%		DINAS PERDAGANGAN
		Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan	Jumlah kawasan pedagang kaki lima	kawasan	2	1.692.485.550			3	1.692.485.550	3	1.692.485.550	150,00%	100,00%	DINAS PERDAGANGAN
		Penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan				699.186.351		14.675.000		699.186.351	0	699.186.351		100,00%	DINAS PERDAGANGAN
			Jumlah tempat kuliner dan panggung terbuka di Karangtalun (PIK)	lokasi	1		1		1		1	-	100,00%		DINAS PERDAGANGAN
		Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan				993.299.199		243.394.000		993.299.199	0	993.299.199		100,00%	DINAS PERDAGANGAN
			Jumlah penyediaan tenda bagi PKL	unit	50		50		50		50	-	100,00%		DINAS PERDAGANGAN
			Jumlah peserta sosialisasi rencana relokasi pedagang Pantai Depok	orang	100		100		100		100	-	100,00%		DINAS PERDAGANGAN
			Jumlah lokasi terpadu Pedagang Kaki Lima dan Asongan	lokasi	2		2		2		2	-	100,00%		DINAS PERDAGANGAN
			Jumlah kajian penataan PKL dan DED Pembangunan Kawasan PKL	dokumen	1		1		1		1	-	100,00%		DINAS PERDAGANGAN
		Program Pemberdayaan Pedagang	Pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat	persen	4	889.399.500			3,5	889.399.500	3,5	889.399.500	79,55%	100,00%	DINAS PERDAGANGAN

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							III		IV						
1	2	4	5		8b (APBD P 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Peningkatan SDM, Kelembagaan dan Promosi Pasar				889.399.500		155.860.700		889.399.500	0	889.399.500		100,00%	DINAS PERDAGANGAN
			Jumlah pengadaan baliho	unit	6		6		6		6	-	100,00%		DINAS PERDAGANGAN
			Promosi pasar yang terlaksana	kali	10		10		10		10	-	100,00%		DINAS PERDAGANGAN
			Jumlah peserta pendampingan APPSI; jumlah peserta pelatihan pedagang pasar; jumlah peserta sarasehan pedagang pasar; jumlah peserta grebeg pasar	orang	1.702		1702		1702		1702	-	100,00%		DINAS PERDAGANGAN
			Peresmian pasar yang terlaksana	kali	1		1		1		1	-	100,00%		DINAS PERDAGANGAN
		Program Penataan Pasar Rakyat	Cakupan jumlah kondisi pasar baik	persen	69,7	9.521.039.131			78,12	9.521.039.131	78,12	9.521.039.131	112,08%	100,00%	DINAS PERDAGANGAN
		Pembangunan dan Rehabilitasi Pasar Rakyat				3.768.470.431		952.292.600		3.768.470.431	0	3.768.470.431		100,00%	DINAS PERDAGANGAN
			Jumlah pasar yang dibangun/rehab (besar)	pasar	1		1		1		1	-	100,00%		DINAS PERDAGANGAN
			Terbangunnya atap Pasar Piyungan	paket	1		1		1		1	-	100,00%		DINAS PERDAGANGAN
			Terbangunnya MCK Pasar Barongan	paket	1		1		1		1	-	100,00%		DINAS PERDAGANGAN
			Jumlah gudang pasar yang terbangun	unit	1		1		1		1	-	100,00%		DINAS PERDAGANGAN
			Jumlah pasar yang dibangun/rehab (kecil)	pasar	23		16		23		23	-	100,00%		DINAS PERDAGANGAN
			Jumlah DED pembangunan pasar	dokumen	1		1		1		1	-	100,00%		DINAS PERDAGANGAN
		Pengembangan Pasar Rakyat Ber SNI				10.625.500		4.375.000		10.625.500	0	10.625.500		100,00%	DINAS PERDAGANGAN
			Pendampingan pengembangan Pasar Rakyat ber-SNI (Pasar Imogiri)	bulan	12		12		12		12	-	100,00%		DINAS PERDAGANGAN
		Revitalisasi Pasar Rakyat				5.586.175.300		1.649.608.000		5.586.175.300	0	5.586.175.300		100,00%	DINAS PERDAGANGAN
			Jumlah pasar yang dibangun/rehab (DAK)	pasar	5				5		5	-	100,00%		DINAS PERDAGANGAN
		Intensifikasi Pendapatan Pasar				155.767.900	5	34.721.600		155.767.900	0	155.767.900		100,00%	DINAS PERDAGANGAN

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							III		IV						
1	2	4	5		8b (APBD P 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Evaluasi Dana Bergulir; Evaluasi pendapatan; Evaluasi intensifikasi pengelola MCK	kali	36		36		36		36	-	100,00%		DINAS PERDAGANGAN
			Jumlah kajian pendataan potensi pasar	dokumen	1		1		1		1	-	100,00%		DINAS PERDAGANGAN
		Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Penetapan nilai KHL (Kebutuhan Hidup Layak)	RUPIAH	1.489.046	867.360.100			1572150	809.917.100	1572150	809.917.100	105,58%	93,38%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Jumlah penyelesaian perselisihan HI	kasus	50	258.647.000			66	252.747.000	66	252.747.000	132,00%	97,72%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan	Jumlah kegiatan pemberian perlindungan hukum dan JAMSOSTEK	kali	9	64.375.000			9	64.275.000	9	64.275.000	100,00%	99,84%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	Jumlah kegiatan sosialisasi	perusahaan	33	55.291.500			33	52.931.500	33	52.931.500	100,00%	95,73%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		Pendampingan dewan pengupahan	Jumlah kegiatan pendampingan Dewan pengupahan	kali	3	113.550.000			3	94.590.000	3	94.590.000	100,00%	83,30%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		Pemberadayaan lembaga kerjasama tripartit daerah	Jumlah fasilitasi lembaga kerjasama tripartit	kali	7	77.000.000			7	69.559.000	7	69.559.000	100,00%	90,34%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		bimbingan teknis penyelesaian perselisihan industrial	Jumlah kegiatan bimtek	kali	5	72.105.000			5	70.605.000	5	70.605.000	100,00%	97,92%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		Peningkatan Kesejahteraan Pekerja	Jumlah kegiatan sosialisasi/workshop	kali	4	122.857.500			4	109.197.500	4	109.197.500	100,00%	88,88%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		Sinergitas Sarana Persyaratan Kerja	Jumlah kegiatan sosialisasi perusahaan	orang	50	34.060.000			50	31.288.000	50	31.288.000	100,00%	91,86%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		Pendampingan Pembuatan Persyaratan kerja	Jumlah peserta pendampingan terhadap lembaga	kali	20	34.274.100			20	33.924.100	20	33.924.100	100,00%	98,98%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		Pemberdayaan Sarana Kesejahteraan Kerja	Jumlah perusahaan yang disosialsasi	orang	100	35.200.000			100	30.800.000	100	30.800.000	100,00%	87,50%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

6. Terciptanya industri kreatif yang berkualitas

6	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi 8b (APBDP)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%) X=13/8 X 100%		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							III		IV						
							1	2	4	5		K	Rp	K	
		Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	cakupan pengembangan sentra industri potensial		20	890.000.000		662434000	20	682154000	20	682.154.000	100,00%	76,65%	DINAS KOPERASI UKMP
		Pemberdayaan IKM Sentra				870.000.000		662434000		662434000	0	662.434.000		76,14%	DINAS KOPERASI UKMP
			Pelatihan IKM	IKM			11		11		11	-			DINAS KOPERASI UKMP
			Promosi IKM	IKM			5		15		15	-			DINAS KOPERASI UKMP
		Penyusunan profil sentra													DINAS KOPERASI UKMP
			jumlah unit sarana prasarana yang dibangun												DINAS KOPERASI UKMP
		Fasilitasi Pelaksanaan Kemitraan IKM dan Perusahaan Besar dalam Pengadaan Bahan Baku Industri Hasil Tembakau				20.000.000		19720000		19720000					DINAS KOPERASI UKMP
			Kemitraan IKM dan Perusahaan Besar		1				1						DINAS KOPERASI UKMP
		B. Alat Tulis Kantor													DINAS KOPERASI UKMP
		B. Dekorasi													DINAS KOPERASI UKMP
		B. Pengandaan													DINAS KOPERASI UKMP
		B. Makan dan Minum Pelaksanaan Kegiatan													DINAS KOPERASI UKMP
		B. Jasa Narasumber/Moderator/T enaga Ahli													DINAS KOPERASI UKMP
		B. Jasa Peserta Seminar/Simposium/Sosialisasi													DINAS KOPERASI UKMP
		Program penataan struktur industri	jumlah kerjasama pemenuhan bahan baku industri	IKM	2	732.238.500		24445000	2	583828000	2	583.828.000	100,00%	79,73%	DINAS KOPERASI UKMP
		Pengembangan Kebijakan dan Kerjasama Industri	jumlah penyelenggara FGD penyediaan bahan baku industri	kali		732.238.500		24445000	2	583828000	2	583.828.000		79,73%	DINAS KOPERASI UKMP
			tersedianya tanah untuk akses jalan	m2					-		-				DINAS KOPERASI UKMP
			terjalinnya kemitraan	kali	2		1		2		2	-	100,00%		DINAS KOPERASI UKMP
			RIPD	dokumen	1				1		1	-	100,00%		DINAS KOPERASI UKMP

6	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi 8b (APBDP)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%) X=13/8 X 100%		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							III		IV						
1	2	4	5		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			persetujuan prinsip	ijin	8		4		8		8	-	100,00%		DINAS KOPERASI UKMP
			kajian pada sentra	dokumen	1				1		1	-	100,00%		DINAS KOPERASI UKMP
		Program Potensi Energi	Meningkatnya cakupan ketersediaan potensi energi		40	116.400.000		8150000	40	115360000	40	115.360.000	100,00%	99,11%	DINAS KOPERASI UKMP
		Pendataan Potensi Energi	tersusunnya draft dokumen potensi energi panas bumi geotherma	kajian		116.400.000		8150000		115360000					
			terlaksananya kajian energi	dokumen	2				2		2	-	100,00%		DINAS KOPERASI UKMP
		Program pengembangan industri kecil dan menengah	cakupan IKM non sentra yang dikembangkan		4,5	2.373.768.943		944647360	4,55	2089048362	4,55	2.089.048.362	101,11%	88,01%	DINAS KOPERASI UKMP
		Pembinaan IKM Melalui Dekranas Kabupaten Bantul				604.113.337		115148360		562927908	0	562.927.908		93,18%	DINAS KOPERASI UKMP
			terpenuhinya anggaran dekranas	tahun											DINAS KOPERASI UKMP
			terlaksananya promosi	lokasi			1		2		2	-			DINAS KOPERASI UKMP
			jumlah event	kali			1		1		1	-			DINAS KOPERASI UKMP
		Pengembangan dan Pemberdayaan IKM				779.305.000		425000000		647960000	0	647.960.000		83,15%	DINAS KOPERASI UKMP
			jumlah pelatihan industri	kelompok	580		500		580		580	-	100,00%		DINAS KOPERASI UKMP
			penguatan IKM, ditambah musren piyungan, dlingo, kretek, kasihan dan pelatihan AMT	IKM							0	-			DINAS KOPERASI UKMP
			pameran	kali											DINAS KOPERASI UKMP
		Pengembangan Pemasaran IKM				399.586.856		242424000		378763000	0	378.763.000		94,79%	DINAS KOPERASI UKMP
			pameran	kali	4		3		4		4	-	100,00%		DINAS KOPERASI UKMP
			workshop bekrافت	kali	1		1		1		1	-	100,00%		
			gebyar bekrافت	kali											
		Pengembangan Industri Kreatif				590.763.750		162075000		499397454	0	499.397.454		84,53%	DINAS KOPERASI UKMP
			tersusunnya kajian rencana aksi pengembangan industri kreatif	dokumen	1				-		-	-			
			terlaksananya festival batik	kali	1		1		1		1	-	100,00%		

6	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							III		IV						
1	2	4	5		8b (APBDP)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			terlaksananya kajian kelembagaan ekonomi kreatif	dokumen	1		1		-		-				
			workshop penguatan industri kreatif	kali	2				2		2		100,00%		
			terlaksananya publikasi/iklan pengembangan produk melalui media sosial	kali	3				3		3		100,00%		
			terlaksananya pameran	kali	2		1		2		2		100,00%		
					2						-				
		Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi	jumlah usaha yang terstandarisasi	IKM	10	486.405.000		184865000	152	474250000	152	474.250.000	100,00%	97,50%	DINAS KOPERASI UKMP
		Pengembangan Sistem dan Inovasi Teknologi Industri				486.405.000		184865000		474250000	0	474.250.000		97,50%	DINAS KOPERASI UKMP
			sosialisasi SNI	IKM							0				DINAS KOPERASI UKMP
			Sosialisasi HKI	IKM	1		1		1		1		100,00%		DINAS KOPERASI UKMP
			Sosialisasi SVLK	kali	1				1		1		100,00%		DINAS KOPERASI UKMP
			sertifikat halal	kali							0				DINAS KOPERASI UKMP
			sosialisasi HALAL	kali	4		4		4		4		100,00%		DINAS KOPERASI UKMP
			sosialisasi PIPT	kali	6		2		6		6		100,00%		DINAS KOPERASI UKMP
			Terselenggaranya pameran	kali	1				1		1		100,00%		DINAS KOPERASI UKMP
			terlaksananya HKI, SVLK, SPIRT, HALAL								0				DINAS KOPERASI UKMP
			workshop penguatan sentra		1				1		1		100,00%		DINAS KOPERASI UKMP

7. Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						III		IV							
						8b (APBDP 2018)		11		12				13	
1	2	4	5		K	Rn	K	Rn	K	Rn	K	Rn	K	Rn	16

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							III		IV							
							1	2	4	5		8b (APBDP 2018)		11		12
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan	Produktivitas padi (GKG)	kuintal/ha	65,61	4.065.673.870		2.590.014.390	59,97	3.855.628.462	59,97	3.855.628.462	91,40%	94,83%	DINAS PERTANIAN PKP	
			Produktivitas jagung (pipil kering)	kuintal/ha	59.52				73.17		73.17	-			DINAS PERTANIAN PKP	
			Produktivitas kedelai (wose)	kuintal/ha	15.87				15.52		15.52	-			DINAS PERTANIAN PKP	
			Produktivitas bawang merah	ton/ha	10.87				9.61		9.61	-			DINAS PERTANIAN PKP	
			Produktivitas pisang	kuintal/pohon	6.9				6.4		6.4	-			DINAS PERTANIAN PKP	
			Produktivitas cabe merah	ton/ha	2.92				4.79		4.79	-			DINAS PERTANIAN PKP	
			Produktivitas tembakau (rajang kering)	kuintal/ha	7.4				9.49		9.49	-			DINAS PERTANIAN PKP	
			Produktivitas tebu (hablur gula)	kuintal/ha	39.63				37.57		37.57	-			DINAS PERTANIAN PKP	
			Produktivitas kelapa (kopra)	kuintal/ha	12.45				14.74		14.74	-			DINAS PERTANIAN PKP	
			Luas tanamn kakao	Ha	130				98.4		98.4	-			DINAS PERTANIAN PKP	
		Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Berkelanjutan	Jumlah peserta Pelatihan Pengembangan Kakao	orang	75	480.656.400	75	422.564.800	75	479.727.800	75	479.727.800	100,00%	99,81%	DINAS PERTANIAN PKP	
			Jumlah peserta SL Penerapan Teknologi Tajarwo	orang	250		250		250		250	-	100,00%		DINAS PERTANIAN PKP	
			Jumlah peserta Pelatihan Pengembangan Pangan Lokal	orang	25		25		25		25	-	100,00%		DINAS PERTANIAN PKP	
			Jumlah peserta Pelatihan GAP Hortikultura	orang	50		50		50		50	-	100,00%		DINAS PERTANIAN PKP	
			Jumlah pengelolaan Kebun BPP	lokasi	12		6		12		12	-	100,00%		DINAS PERTANIAN PKP	
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Balai Benih Pertanian (BPP)	Jumlah produksi benih padi	ton	190	1.494.532.200	118,87	868.219.865	190	1.370.616.580	190	1.370.616.580	100,00%	91,71%	DINAS PERTANIAN PKP	
			Jumlah pembelian GKP Calon benih padi	ton	275		160,17		275		275	-	100,00%		DINAS PERTANIAN PKP	
		Pengembangan bibit unggul pertanian/berkebunan	Jumlah peserta workshop penangkaran benih	orang	50	96.845.500	50	53.978.000	50	95.403.000	50	95.403.000	100,00%	98,51%	DINAS PERTANIAN PKP	

No	Sasaran		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									III		IV						
									1	2	4	5		8b (APBDP 2018)		11	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Jumlah peserta sosialisasi penanganan benih tanaman	orang	50		50		50		50	-	100,00%		DINAS PERTANIAN PKP	
				Jumlah peserta pelatihan pengembangan perbenihan kakao	orang	30		30		30		30	-	100,00%		DINAS PERTANIAN PKP	
			Pengendalian dan Perlindungan Tanaman	Jumlah peserta pealtihan pembuatan TBS	orang	30	194.231.500	30	177.881.500	30	194.231.500	30	194.231.500	100,00%	100,00%	DINAS PERTANIAN PKP	
				Jumlah peserta gerakan pengendalian OPT tanamna pangan, perkebunan dan hortikultura	orang	1675		1300		1675		1675	-	100,00%		DINAS PERTANIAN PKP	
				Jumlah peserta pelatihan pengendalian dan perlindungan tanaman	orang	90		90		90		90	-	100,00%		DINAS PERTANIAN PKP	
				Jumlah peserta pelatihan pengaruh iklim terhadap tanaman	orang	60		60		60		60	-	100,00%		DINAS PERTANIAN PKP	
			Pengembangan Agribisnis Pertanian	Jumlah pameran/promosi pertanian	jenis	3	1.722.408.270	3	1.067.370.225	3	1.641.699.582	3	1.641.699.582	100,00%	95,31%	DINAS PERTANIAN PKP	
				Jumlah kategori Festival Pisang	kategori	4		4		4		4	-	100,00%		DINAS PERTANIAN PKP	
				Jumlah peserta pelatihan penanganan pasca panen	orang	40		40		40		40	-	100,00%		DINAS PERTANIAN PKP	
				Jumlah paket pembangunan sarana promosi pertanian	paket	1		1		1		1	-	100,00%		DINAS PERTANIAN PKP	
				Jumlah paket penyediaan operasional Kebun Buah Mangunan	paket	12		9		12		12	-	100,00%		DINAS PERTANIAN PKP	
				Jumlah paket pelaksanaan gelar teknologi	kali	17		17		17		17	-	100,00%		DINAS PERTANIAN PKP	
				Jumlah peserta pelatihan pengolahan hasil pertanian	orang	40		40		40		40	-	100,00%		DINAS PERTANIAN PKP	
			Program pemberdayaan penyuluh	Peningkatan Kemampuan	kelompok	32	477.294.500		275.665.750	32	472.604.500	32	472.604.500	100,00%	99,02%	DINAS PERTANIAN PKP	

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							III		IV						
							8b (APBDP 2018)		11						
1	2	4	5		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
		pertanian/perkebunan lapangan	Kelembagaan Kelas Kelompok Tani												
		Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	Jumlah penyebaran informasi melalui media radio	kali	16	142.984.500	7	31.340.750	14	141.074.500	14	141.074.500	87,50%	98,66%	DINAS PERTANIAN PKP
			Jumlah peserta pelatihan penyuluh swadaya pertanian	orang	25		25		25		25	-	100,00%		DINAS PERTANIAN PKP
			Jumlah talkshow media televisi regional	kali	4		1		4		4	-	100,00%		DINAS PERTANIAN PKP
			Jumlah dokumen program penyuluhan	dokumen	18		0		18		18	-	100,00%		DINAS PERTANIAN PKP
			Jumlah buletin pertanian yang terbit	eksemplar	100		0		100		100	-	100,00%		DINAS PERTANIAN PKP
		Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan	Jumlah peserta Lantip Trengginas	orang	150	334.310.000	60	244.325.000	60	331.530.000	60	331.530.000	40,00%	99,17%	DINAS PERTANIAN PKP
			Jumlah peserta sosialisasi dan pelatihan taruna tani	orang	125		125		125		125	-	100,00%		DINAS PERTANIAN PKP
			Jumlah peserta pelatihan SLA	orang	75		75		75		75	-	100,00%		DINAS PERTANIAN PKP
			Jumlah peserta identifikasi dan legalisasi kelompok tani	orang	340		340		340		340	-	100,00%		DINAS PERTANIAN PKP
			Jumlah peserta workshop temu usaha taruna tani	orang	25		25		25		25	-	100,00%		DINAS PERTANIAN PKP
			Jumlah kelompok klinik agribisnis keliling	kelompok	17		17		17		17	-	100,00%		DINAS PERTANIAN PKP
			Jumlah pelaksanaan PEDTA	kali	1		0		0		0	-	0,00%		DINAS PERTANIAN PKP
			Jumlah peserta peelatihan OVOP	orang	25		25		25		25	-	100,00%		DINAS PERTANIAN PKP
			Jumlah peserta verifikasi penghargaan petugas dan petani	orang	340		340		340		340	-	100,00%		DINAS PERTANIAN PKP
			Jumlah peserta Pelatihan Kewirausahaan Taruna T ani	orang	50		50		50		50	-	100,00%		DINAS PERTANIAN PKP
		Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Ternak yang dipotong sesuai dengan kaidah yang	ekor	4550	667.625.000		554.649.122	4550	630.075.828	4550	630.075.828	100,00%	94,38%	DINAS PERTANIAN PKP

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							III		IV						
							8b (APBDP 2018)		11						
1	2	4	5		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			baik dan benar												
			Jumlah pelayanan kesehatan ternak	ekor	6200				6200		6200	-	100,00%		DINAS PERTANIAN PKP
			Jumlah kasus penyakit hewan menular strategis (Rabies, Anthrax, Brucellosis, Hog Cholera)	kasus	0				0		0	-			DINAS PERTANIAN PKP
		Pendukung Kegiatan UPT Poskeswan	Jumlah paket pengadaan material medis (peratan dan perlengkapan)	paket	10	294.775.000	10	255.477.372	10	293.761.278	10	293.761.278	100,00%	99,66%	DINAS PERTANIAN PKP
			Jumlah paket penyediaan operasional UPT Puskesmas	paket	12		9		12		12	-	100,00%		DINAS PERTANIAN PKP
			Jumlah paket pengadaan bahan medis/obat-obatan hewan/ternak	paket	10		10		10		10	-	100,00%		DINAS PERTANIAN PKP
		Pendukung Kegiatan UPT Rumah Pemotongan Hewan	Jumlah paket penyediaan operasional UPT RPH	paket	12	216.600.000	9	188.441.500	12	209.134.300	12	209.134.300	100,00%	96,55%	DINAS PERTANIAN PKP
			Jumlah jenis pengadaan perlengkapan pemotongan hewan	jenis	5		5		5		5	-	100,00%		DINAS PERTANIAN PKP
		Peningkatan Kesehatan Ternak	Jumlah pengadaan desinfektan	liter	100	156.250.000	100	110.730.250	100	127.180.250	100	127.180.250	100,00%	81,40%	DINAS PERTANIAN PKP
			Jumlah spesimen yang dianalisis	spesimen	40		18		22		22	-	55,00%		DINAS PERTANIAN PKP
			Jumlah peserta sosialisasi penyakit hewan menular	orang	420		308		420		420	-	100,00%		DINAS PERTANIAN PKP
			Jumlah cetak leaflet penyakit hewan	lembar	1800		1800		1800		1800	-	100,00%		DINAS PERTANIAN PKP
			Jumlah dosis pengadaan vaksin	dosis	25000		25000		25000		25000	-	100,00%		DINAS PERTANIAN PKP
		Program peningkatan produksi hasil peternakan	Populasi Ternak	Unit Ternak	110456	682.641.000		324.541.400	110456	675.134.800	110456	675.134.800	100,00%	98,90%	DINAS PERTANIAN PKP
		Agribisnis Peternakan Unggulan Daerah	Jumlah sampel pakan yang diuji	paket	12	682.641.000	9	324.541.400	12	675.134.800	12	675.134.800	100,00%	98,90%	DINAS PERTANIAN PKP
			Jumlah pengadaan telur tetas	butir	36000		25200		36000		36000	-	100,00%		DINAS PERTANIAN PKP
			Jumlah peserta sosialisasi peternakan	orang	65		65		65		65	-	100,00%		DINAS PERTANIAN PKP

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							III		IV						
							1	2	4	5		8b (APBDP 2018)		11	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Jumlah kategori evaluasi petugas/kelembagaan peternakan	kategori	4		4		4		4	-	100,00%		DINAS PERTANIAN PKP
			Jumlah peserta pelatihan pakan	orang	150		30		150		150	-	100,00%		DINAS PERTANIAN PKP
			Jumlah peserta promosi produk peternakan	orang	3450		3000		3450		3450	-	100,00%		DINAS PERTANIAN PKP
			Jumlah peserta pelatihan peternakan	orang	120		120		120		120	-	100,00%		DINAS PERTANIAN PKP
			Jumlah peserta sosialisasi perbup izin usaha peternakan		150				150		150	-	100,00%		DINAS PERTANIAN PKP

8. Terpenuhiya kebutuhan perikanan masyarakat

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										s.d III		s.d IV						
1	2	4		5		8		8b (APBDP)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Terpenuhinya kebutuhan perikanan masyarakat		Program Peningkatan Produksi Perikanan	Jumlah produksi perikanan	ton	12847	2.413.174.850	12847	2623174850		1.204.325.531	12847	2.558.626.773	12847	2.558.626.773	100,00%	97,54%	DINAS PERTANIAN PKP
			Peningkatan Sarana Prasarana Perikanan Budidaya	Jumlah paket sosialisasi/temu/teknis/workshop	orang	280	1.276.249.000	280	1276249000	240	342.897.031	240	1.243.889.623	240	1.243.889.623	85,71%	97,46%	DINAS PERTANIAN PKP
				Jumlah paket pengadaan sarana prasarana perikanan budidaya	paket	3		3		2		3		3	-	100,00%		DINAS PERTANIAN PKP
				Jumlah peserta ekspose hasil penawasan pengendalian kesehatan ikan dan lingkungan	orang	100		100		0		100		100	-	100,00%		DINAS PERTANIAN PKP
			Peningkatan Kapasitas Usaha dan Kelembagaan Perikanan	Jumlah peserta sekolah lapang perikanan budidaya	orang	220	613.324.850	220	793324850	220	522.267.000	220	767.720.500	220	767.720.500	100,00%	96,77%	DINAS PERTANIAN PKP

No	Sasaran		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											s.d III		s.d IV						
1	2		4		5		8		8b (APBDP)		11		12		13		X=13/8 X 100%		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
					Jumlah peserta sarasehan pelaku utama perikanan	orang	200		200		100		100		100	-	50,00%		DINAS PERTANIAN PKP
					Jumlah peserta pelatihan teknis nelayan	orang	50		50		50		50		50	-	100,00%		DINAS PERTANIAN PKP
					Jumlah peserta pelatihan budidaya ikan	orang	60		60		60		60		60	-	100,00%		DINAS PERTANIAN PKP
					Jumlah paket pengadaan peningkatan kapasitas usaha dan kelembagaan perikanan	paket	3		3		3		3		3	-	100,00%		DINAS PERTANIAN PKP
				Peningkatan Kapasitas Pengelolaan UPT Balai Benih Ikan	Jumlah paket penyediaan operasional UPT BBI	paket	12	321.185.000	12	321185000	9	188.929.500	12	321.180.000	12	321.180.000	100,00%	100,00%	DINAS PERTANIAN PKP
					Jumlah paket pengadaan pakan ikan	paket	6		6		6		6		6	-	100,00%		DINAS PERTANIAN PKP
					Jumlah paket pengadaan calon induk ikan	paket	2		2		2		2		2	-	100,00%		DINAS PERTANIAN PKP
					Jumlah paket pengadaan alat perlengkapan produksi benih ikan	paket	6		6		5		6		6	-	100,00%		DINAS PERTANIAN PKP
				Peningkatan Prasarana dan Sarana Perikanan Tangkap	Jumlah peserta sosialisasi perijinan	orang	80	202.416.000	80	232416000	80	150.232.000	80	225.836.650	80	225.836.650	100,00%	97,17%	DINAS PERTANIAN PKP
					Jumlah paket penyediaan operasional TPI	paket	12		12		9		12		12	-	100,00%		DINAS PERTANIAN PKP
					Jumlah pengadaan sarana prasarana TPI	paket	1		1		1		1		1	-	100,00%		DINAS PERTANIAN PKP
					Jumlah Pembangunan Tempat Penampungan Air Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	paket	1		1		1		1		1	-	100,00%		DINAS PERTANIAN PKP

9. Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing dan unggul

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi	Perangkat Daerah Penanggung
----	---------	-----------------------------------	---------------------------	--------	---	---------------------------------	---	---------------------------------------	-----------------------------

		Daerah Dan Program/Kegiatan	(Outcome)/ Kegiatan (output)		Dievaluasi		III		IV		Dievaluasi		Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Jawab
1	2	4	5		8B (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Program pengembangan pemasaran pariwisata	Cakupan promosi pariwisata	%	72	3.512.860.000		636412800	72	1912584210	72	1.912.584.210	100,00%	54,45%	DINAS PARIWISATA
		Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata	Jumlah kajian	2 buku	2	105.000.000	1,8 buku	2800000	2	102895000	2	102.895.000	100,00%	98,00%	DINAS PARIWISATA
		Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata	Jumlah kerjasama dengan mitra pariwisata	8 keg	8	311.265.000	72 kegiatan	162580300	8	279844900	8	279.844.900	100,00%	89,91%	DINAS PARIWISATA
		Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	Jumlah promosi dan kerjasama pariwisata	12 keg	12	2.773.075.000	9 kegiatan	420007500	9	1212314310	9	1.212.314.310	75,00%	43,72%	DINAS PARIWISATA
		Pengembangan Sistem Informasi dan Pengendalian Pemasaran Pariwisata	Jumlah promosi melalui TI	3 keg	3	323.520.000	2 kegiatan	51025000	3	317530000	3	317.530.000	100,00%	98,15%	DINAS PARIWISATA
		Program peningkatan destinasi pariwisata	Jumlah peningkatan destinasi pariwisata	OW	3	7.708.175.000		2241359925	10	7116081231	10	7.116.081.231	333,33%	92,32%	DINAS PARIWISATA
		Pengembangan daerah tujuan wisata	Jumlah dokumen pengembangan daerah tujuan wisata	dokumen	16	872.025.000	10 kegiatan	240140000	16	845443500	16	845.443.500	100,00%	96,95%	DINAS PARIWISATA
		Peningkatan daya tarik Wisata	Jumlah pentas seni di destinasi wisata	keg	76	1.429.330.000	69 kegiatan	444770000	76	1280990130	76	1.280.990.130	100,00%	89,62%	DINAS PARIWISATA

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							III		IV							
1	2	4	5		8B (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Peningkatan Pelayanan Kepariwisataan	Jumlah koordinasi peningkatan pelayanan kepariwisataan	keg	8	406.650.000	6 kegiatan	247598500	8	386599000	8	386.599.000	100,00%	95,07%	DINAS PARIWISATA
			Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Destinasi Wisata	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana destinasi wisata	keg	16	5.000.170.000	10 kegiatan	1308851425	15	4603048601	15	4.603.048.601	93,75%	92,06%	DINAS PARIWISATA
			Program pengembangan Kemitraan	Peningkatan jumlah mitra pariwisata	Unit	3	1.013.575.000		635954700	3	1008820200	3	1.008.820.200	100,00%	99,53%	DINAS PARIWISATA
			Pengembangan SDM , Kelembagaan dan Pengendalian Pariwisata	Jumlah peserta sertifikasi kompetensi SDM usaha pariwisata	orang	910	523.400.000	575	391054700	910	523055200	910	523.055.200	100,00%	99,93%	DINAS PARIWISATA
			Pemberdayaan Desa Wisata	Jumlah lomba desa wisata dan workshop	keg	7	283.775.000	5	132850000	7	281690000	7	281.690.000	100,00%	99,27%	DINAS PARIWISATA
			Pengembangan Kelembagaan Pariwisata	Jumlah sarasehan forkom pokdarwis	keg	12	206.400.000	10	112050000	12	204075000	12	204.075.000	100,00%	98,87%	DINAS PARIWISATA

10. Terpenuhinya sarana prasarana publik dan prasarana dasar masyarakat

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								III		IV						
1	4	5		8		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Program Pengembangan Perumahan	Persentase penanganan RTLH	%	46	3.264.930.000	0	3.320.701.000	-	1888745167	0,6479	3227644968	0,6479	3.227.644.968	140,85%	97,20%	DINAS PU PKP
	Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan pemetaan perumahan	dokumen		301.300.000	5	268.750.000	5	262229000	5	264159000	5	264.159.000	100,00%	98,29%	DINAS PU PKP
	Penyelenggaraan pengembangan perumahan	Jumlah dokumen Kesesuaian Side Plant	dokumen		41.000.000	17	33.675.000	17	9465000	17	24405000	17	24.405.000	100,00%	72,47%	DINAS PU PKP
	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	Jumlah paket pendampingan pembangunan perumahan	kali		266.294.000	12	361.940.000	9	158402000	12	345035000	12	345.035.000	100,00%	95,33%	DINAS PU PKP
	Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat	Terbangunnya tempat parkir rusunawa	unit		2.656.336.000	2	2.656.336.000	1	1458649167	2	2594045968	2	2.594.045.968	100,00%	97,66%	DINAS PU PKP
		Terbangunnya IPAL Komunal	unit			1		1		0		0	-	0,00%		DINAS PU PKP
		Operasional dan rehabilitasi TPU	lokasi			1		1		1		1	-	100,00%		DINAS PU PKP
		Operasional dan rehabilitasi sarana dan prasarana rusunawa	unit			4		4		4		4	-	100,00%		DINAS PU PKP
		Operasional dan rehabilitasi sanitasi dan air limbah	bulan			12		9		12		12	-	100,00%		DINAS PU PKP
		Persentase penanganan RTLH	persentase			46		0		46		46	-	100,00%		DINAS PU PKP
	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Jumlah kawasan kumuh tertangani	lokasi	2	732.825.000	2	450.400.000	-	166826000	2	207814000	2	207.814.000	100,00%	46,14%	DINAS PU PKP
	Penanganan Kawasan Kumuh	Jumlah Dokumen Pemetaan Infrastruktur Perdesaan	dokumen		732.825.000	3	450.400.000	3	166826000	3	207814000	3	207.814.000	100,00%	46,14%	DINAS PU PKP
		Jumlah kawasan kumuh yang ditangani	kawasn			1		0		0		0	-	0,00%		DINAS PU PKP

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								III		IV						
1	4	5		8		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Jumlah Jembatan tertangani	unit	1	9.012.225.000	10	9.285.775.000	8	3614674950	11	9099372000	11	9.099.372.000	110,00%	97,99%	DINAS PU PKP
	Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan		unit		9.012.225.000	11	9.285.775.000	8	3614674950	11	9099372000	11	9.099.372.000	100,00%	97,99%	DINAS PU PKP
	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Tersedianya sarana dan prasarana kebinamargaan	unit	1	380.000.000	1	380.000.000	1	337629000	1	374120000	1	374.120.000	100,00%	98,45%	DINAS PU PKP
	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat	Jumlah alat berat (stom wals) yang dipelihara	unit		380.000.000	12	380.000.000	8	337629000	12	374120000	12	374.120.000	100,00%	98,45%	DINAS PU PKP
		Pemeliharaan wheel Loader	unit			1		1		1		1	-	100,00%		DINAS PU PKP
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Persentase saluran irigasi berfungsi baik	%	80,5	21.334.520.000	1	22.510.970.000	-	7452295209	0,81	21706976854	0,81	21.706.976.854	100,62%	96,43%	DINAS PU PKP
	Perencanaan pembangunan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Jumlah dokumen perencanaan/kajian/studi	dokumen		900.000.000	18	900.000.000	18	159330000	18	882142000	18	882.142.000	100,00%	98,02%	DINAS PU PKP
	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Jumlah paket Rehabilitasi/peningkatan jaringan irigasi	paket		17.684.320.000	44	18.860.770.000	38	6454207455	44	18234235400	44	18.234.235.400	100,00%	96,68%	DINAS PU PKP
	Pengelolaan jaringan irigasi	Rehab ringan jaringan irigasi partisipatif	paket		2.200.000.000	5	2.200.000.000	5	551061400	5	2056254500	5	2.056.254.500	100,00%	93,47%	DINAS PU PKP
	Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Irigasi	Jumlah paket rehabilitasi DAM	paket		200.000.000	1	200.000.000	1	58593300	1	196986000	1	196.986.000	100,00%	98,49%	DINAS PU PKP
	Peningkatan/Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Jumlah pengelolaan/pemeliharaan jaringan irigasi	kali		350.200.000	30	350.200.000	24	229103054	30	337358954	30	337.358.954	100,00%	96,33%	DINAS PU PKP
	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Cakupan penyediaan air baku	lokasi	7	70.000.000	7	70.000.000	7	2002500	7	61475500	7	61.475.500	100,00%	87,82%	DINAS PU PKP
	Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana air baku	Jumlah paket pemeliharaan sumur bor	paket		70.000.000	1	70.000.000	1	2002500	1	61475500	1	61.475.500	100,00%	87,82%	DINAS PU PKP

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								III		IV						
1	4	5		8		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Pemanfaatan Sumber Air/Mata Air	lokasi	31	701.691.000	26	948.241.000	31	244256150	25	884871250	25	884.871.250	96,15%	93,32%	DINAS PU PKP
	Pemeliharaan dan rehabilitasi embung, dan bangunan penampung air lainnya	Jumlah paket pembangunan/pemeliharaan embung	paket		551.691.000	4	518.241.000	4	149789150	4	493071850	4	493.071.850	100,00%	95,14%	DINAS PU PKP
	Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya air	Jumlah rambu larangan pemanfaatan sumber daya air	unit		150.000.000	31	430.000.000	31	94467000	31	391799400	31	391.799.400	100,00%	91,12%	DINAS PU PKP
		Jumlah peserta sosialisasi pemanfaatan sumber daya air	orang			1.400				1400		1400	-	100,00%		DINAS PU PKP
	Perencanaan Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Daya Air											0	-			
												0	-			
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Cakupan pengembangan IPAL Komunal		40	20.516.909.080	40	19.801.975.500	-	6272681676	35	18960756536	35	18.960.756.536	87,50%	95,75%	DINAS PU PKP
	Penyediaan sarana dan prasarana air minum dan air limbah	Tersedianya SR Air Limbah Terpusat			7.822.459.080	3	8.521.425.500	3	1878639686	3	8247567686	3	8.247.567.686	100,00%	96,79%	DINAS PU PKP
		Jumlah saluran Drainase Lingkungan				37		24		37		37	-	100,00%		
		Pembangunan IPAL Komunal				2		0		2		2	-	100,00%		
	Pengembangan pengelolaan, prasarana dan sarana air minum dan air limbah	Jumlah dokumen perencanaan air minum dan air limbah			720.000.000	16	806.800.000	11	210819600	15	728706850	15	728.706.850	93,75%	90,32%	DINAS PU PKP
	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air minum dan air limbah	Jumlah Pembangunan SPAM			11.974.450.000	7	10.473.750.000	7	4183222390	7	9984482000	7	9.984.482.000	100,00%	95,33%	DINAS PU PKP
		Jumlah pembangunan SR Air Minum				7		7		7		7	-	100,00%		
	Program Pembangunan Gedung	Cakupan gedung pemerintah dalam kondisi baik	%	82	10.438.000.000	1	10.651.550.000	-	2438340550	0,84	10503906900	0,84	10.503.906.900	102,44%	98,61%	DINAS PU PKP

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								III		IV						
1	4	5		8		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pembangunan Gedung		unit		10.438.000.000	14	10.651.550.000	8	2438340550	14	10503906900	14	10.503.906.900	100,00%	98,61%	DINAS PU PKP
	Program Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Penanganan jalan Kabupaten	km	15	40.298.453.000	15	43.821.465.000	-	21225345550	22,67	40071183160	22,67	40.071.183.160	151,13%	91,44%	DINAS PU PKP
	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan		ruas		2.968.900.000	41	3.627.100.000	33	1560593847	41	3566799357	41	3.566.799.357	100,00%	98,34%	DINAS PU PKP
	Peningkatan jalan		ruas		37.329.553.000	39	40.194.365.000	20	19664751703	35	36504383803	35	36.504.383.803	89,74%	90,82%	DINAS PU PKP
	Program Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase/Gorong-gorong	Drainase jalan kabupaten tertangani	m	400	8.604.275.000	400	11.214.075.000	-	838013200	425	10843595000	425	10.843.595.000	106,25%	96,70%	DINAS PU PKP
	Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase/Gorong-gorong	Jumlah talud, drainase dan gorong -gorong terbangun	paket		8.604.275.000	61	11.214.075.000	8	838013200	61	10843595000	61	10.843.595.000	100,00%	96,70%	DINAS PU PKP
	Program pembangunan rehabilitasi/pemeliharaan infrastruktur perdesaan	Persentase penanganan infrastruktur perdesaan	%	14,63	22.994.996.440	0	24.103.475.000	-	6276167500	0,1493	21712619000	0,1493	21.712.619.000	102,05%	90,08%	DINAS PU PKP
	Pembangunan infrastruktur perdesaan	Jumlah jalan desa terbangun	ruas		22.994.996.440	48	24.103.475.000	36	6276167500	45	21712619000	45	21.712.619.000	93,75%	90,08%	DINAS PU PKP
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase usaha jasa konstruksi kriteria baik	%	70	1.189.851.000	70%	1.239.851.000	-	682016300	70%	1125959400	70%	1.125.959.400	100,00%	90,81%	DINAS PU PKP
	Pengembangan Jasa Konstruksi	Jumlah pelatihan	kali		841.951.000	5	841.951.000	5	435119500	5	753267600	5	753.267.600	100,00%	89,47%	DINAS PU PKP
	Peningkatan Teknologi Informasi	Jumlah pengadaan komputer, laptop, printer dan UPS	unit		347.900.000	6	397.900.000	6	246896800	6	372691800	6	372.691.800	100,00%	93,66%	DINAS PU PKP
		Jumlah pengadaan server dan jaringan internet	unit			1		1		1		1	-	100,00%		
												0	-			

11. Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD	Realisasi Kinerja Pada Triwulan	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi	Perangkat Daerah
----	---------	--	--	--------	----------------------------------	---------------------------------	--	---------------------------------------	------------------

		Dan Program/Kegiatan			Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		III		IV		RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Penanggung Jawab
1	2	4	5B (APBD P 2018)		8b (APBD P 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Jumlah kelompok pengelola sampah	136	136	19.744.235.300		9.197.237.545	136	18.737.956.980	136	18737956980	100,00%	94,90%	DLH
		Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Jumlah pengadaan komposter	80	80	17.236.350.000	300	7.894.680.786	300	16.351.337.990	300	16351337990	375,00%	94,87%	DLH
			Jumlah pengadaan kantong pilah sampah	1000	1.000		1.000		1.000		1000	0	100,00%		DLH
			Jumlah pengadaan Dump Truck	3	20		3		20		20	0	100,00%		DLH
			Jumlah pengadaan Container	6	6		6		6		6	0	100,00%		DLH
			Jumlah pengadaan chain saw	5	5		5		5		5	0	100,00%		DLH
			Jumlah pengadaan Arm Roll	2	2		2		2		2	0	100,00%		DLH
			Jumlah pengadaan gerobak sampah	67	67		67		67		67	0	100,00%		DLH
			Jumlah pengadaan tong sampah pilah 3	365	365		365		393		393	0	107,67%		DLH
			Jumlah pengadaan alat penyemprot pestisida	5	5		5		5		5	0	100,00%		DLH
			Jumlah pembangunan rumah pilah sampah desa/dusun	28	28		-		28		28	0	100,00%		DLH
			Jumlah pembangunan depo sampah	3	3		3		3		3	0	100,00%		DLH
			Jumlah pengadaan Sky lift	1	1		1		1		1	0	100,00%		DLH
			Jumlah pengadaan pakaian kerja lapangan	365	365		365		365		365	0	100,00%		DLH
			Jumlah pengadaan mesin pemotong rumput	8	8		8		8		8	0	100,00%		DLH
			Jumlah pengadaan Back Hoe Loader	1	1		1		1		1	0	100,00%		DLH
			Jumlah pengadaan kendaraan roda tiga	23	23		23		23		23	0	100,00%		DLH
			Jumlah pengadaan mesin pencacah sampah organik	4	4		4		4		4	0	100,00%		DLH
		Kerjasama pengelolaan persampahan	Jumlah kontribusi sampah TPA Piyungan	6	6	1.169.945.300	6	597.437.759	6	1.074.151.816	6	1074151816	100,00%	91,81%	DLH
			Jumlah pelaksanaan kegiatan bersih sungai	3	3		3		3		3	0	100,00%		DLH
			Jumlah pelaksanaan pelatihan pengelolaan persampahan	6	16		6		16		16	0	100,00%		DLH

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							III		IV						
1	2	4	5B (APBD P 2018)		8b (APBD P 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Jumlah laporan kinerja pengelolaan persampahan	10	10		10		10		10	0	100,00%		DLH
			Jumlah pelaksanaan pertemuan saka kalpataru	6	6		6		6		6	0	100,00%		DLH
			Jumlah pelaksanaan pertemuan JPSM	6	6		3		3		3	0	50,00%		DLH
		Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah pengadaan alat pengolah limbah B3 Puskesmas	2	2	188.380.000	2	160.170.000	2	184.400.000	2	184400000	100,00%	97,89%	DLH
			Jumlah peserta sosialisasi tentang limbah dan penanganan limbah B3	180	180		180		180		180	0	100,00%		DLH
			Jumlah pendampingan penanganan limbah B3	16	16		16		16		16	0	100,00%		DLH
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah sekolah adiwiyata	12	12	423.180.000	12	281.554.000	12	417.384.000	12	417384000	100,00%	98,63%	DLH
			Jumlah pelaksanaan peringatan hari-hari LH	4	4		4		6		6	0	150,00%		DLH
			Jumlah pontren berwawasan LH	1	1		-		1		1	0	100,00%		DLH
			Jumlah peserta workshop Forkom LH	1	1		-		1		1	0	100,00%		DLH
			Jumlah pelaksanaan evaluasi kampung hijau/ proklam	3	3		3		3		3	0	100,00%		DLH
		Evaluasi Adipura	Jumlah peserta lomba kebersihan kantor	17	17	726.380.000	17	263.395.000	17	710.683.174	17	710683174	100,00%	97,84%	DLH
			Jumlah buku profil DLH	10	10		10		10		10	0	100,00%		DLH
			Jumlah publikasi melalui TV dan radio	9	9		9		9		9	0	100,00%		DLH
			Jumlah pemantauan titik pantau Adipura	29	29		29		29		29	0	100,00%		DLH
			Jumlah penyusunan studi penelitian		2				2						DLH
			Jumlah penyusunan naskah akademik		1				1						
		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Konsentrasi DO (Dissolved Oxygen) di Sungai Winongo	mg/l	7	3.468.842.500		1218781400	7,25	3284913848	7,25	3284913848	100,00%	94,70%	DLH
		Pengkajian dampak lingkungan	Jumlah lokasi pemantauan Udara Ambient		6	245.000.000	6	75727500	6	235493000	6	235493000	100,00%	96,12%	DLH

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							III		IV						
1	2	4	5B (APBD P 2018)		8b (APBD P 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%	16	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Jumlah Buku Laporan GRK		5				5		5	0	100,00%		DLH
			Jumlah pemantauan kualitas air sungai		15		5		15		15	0	100,00%		DLH
			JumlahBuku Kajian Sistem Pengolahan Limbah Cair Domestik Berbasis Masyarakat		5				5		5		100,00%		
			Jumlah Buku Kajian Daya Tampung Beban Pencemar di Sungai Code		5				5		5		100,00%		
			Jumlah Buku Laporan Kajian Limbah Cair Domestik		1				1		1		100,00%		
		Pengembangan kapasitas laboratorium lingkungan hidup	Jumlah Data Kualitas Lingkungan untuk Menunjang Pelaksanaan SKPD		11	2.223.842.500	8	670253900	11	2095958560	11	2095958560	100,00%	94,25%	DLH
			Jumlah Pengujian Kualitas LingkunganJumlah Pengujian Kualitas Lingkungan		11		8		11		11	0	100,00%		DLH
			Jumlah Alat Laboratorium		1		0		1		1	0	100,00%		DLH
		Pengendalian Kerusakan Lingkungan Alami dan Buatan	Jumlah pengadaan bangunan IPAL Terpadu Kawasan Industri Piyungan		1	1.000.000.000	0	2100000	1	953462287,7	1	953462287,7	100,00%	95,35%	DLH
		Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Penambahan Jumlah Usaha/Kegiatan di Kab Bantul Yang Memiliki Dokumen Lingkungan	sekolah	80	324.530.000		101950000	80	265774000	80	265774000	100,00%	81,90%	DLH
			Jumlah buku kajian lingkungan pemanfaatan pasar Piyungan		5				5		5		100,00%		
			Jumlah buku kajian lingkungan pemanfaatan pasar Ngipik		5				5		5		100,00%		
			Jumlah DED RTH Kcamatan Kasihan		5				5		5		100,00%		
			Jumlah DED RTH Kcamatan Banguntapan		5				5		5		100,00%		
			Jumlah DED RTH Kcamatan Piyungan		5				5		5		100,00%		
			Jumlah DEDTelaga Desa Kec Piyungan		5				5		5		100,00%		

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							III		IV						
1	2	4	5B (APBD P 2018)		8b (APBD P 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pengembangan data dan informasi lingkungan	Jumlah aplikasi		1	126.280.000	0	46700000	1	125780000	1	125780000	100,00%	99,60%	DLH
			Jumlah sosialisasi tentang DPLH untuk sekolah		2		2		2		2	0	100,00%		DLH
		Penyusunan data sumberdaya alam dan neraca sumberdaya hutan (NSDH) nasional dan daerah	Jumlah workshop lingkungan hidup		1	77.500.000	0	1100000	1	61807000	1	61807000	100,00%	79,75%	DLH
			Jumlah data kualitas lingkungan hidup		1		0		1		1	0	100,00%		DLH
		Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah sosialisasi tentang dokumen lingkungan		17	50.000.000	11	31175000	17	50000000	17	50000000	100,00%	100,00%	DLH
		Penyelesaian Aduan dan Sengketa Lingkungan Hidup	Jumlah aduan terselesaikan		22	33.250.000	3	22975000	22	28187000	22	28187000	100,00%	84,77%	DLH
		Penyusunan Raperda Lingkungan Hidup	Jumlah rancangan peraturan bupati		2	37.500.000	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	DLH
		Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Penambahan luasan tutupan lahan di kawasan lindung (sempadan pantai, mata air, lahan kritis)	ha/tahun	1	2.037.060.000		470700000	1	1964806562	1	1964806562	100,00%	96,45%	DLH
		Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air	Jumlah Pengadaan SPAH		80	253.060.000	80	152230000	80	249930000	80	249930000	100,00%	98,76%	DLH
			Jumlah baliho konservasi sumber daya air		3				3		3		100,00%		
		Koordinasi pengelolaan konservasi SDA	Jumlah pengadaan bibit tanaman		11.809	620.000.000	8000	302945000	11809	603126360	11809	603126360	100,00%	97,28%	DLH
		Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem	Jumlah taman yang dibangun		1	1.164.000.000	0	15525000	1	1111750202	1	1111750202	100,00%	95,51%	DLH
			Jumlah pengadaan bibit tanaman		2.713				2713						

12. Terciptanya kesadaran masyarakat dalam kesiap-siagaan bencana

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						III		IV							
1	2	4	5		8b (APBD P 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	cakupan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana	persen	187	4.455.330.700	30	862.707.500	151	1.875.981.580	187	3.920.709.264	100,00%	88,00%	BPBD
		Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	jumlah pemantauan dan penyebarluasan informasi bencana serta evakuasi	bulan	12	70.000.000	3	10.320.000	3	6.200.000	12	23.980.000	100,00%	34,26%	BPBD
		Peningkatan ketrampilan dan kualitas penanggulangan bencana alam	jumlah pelatihan tanggap bencana	desa	14	848.610.000	14	43.850.000		211.628.000	14	770.001.000	100,00%	90,74%	BPBD
		Sosialisasi mitigasi penanggulangan bencana alam & sosial	jumlah sosialisasi siaga dan penanggulangan bencana	kali	1	1.443.925.000	1	510.798.000		522.500.000	1	1.116.798.000	100,00%	77,34%	BPBD
		pemantauan dan penyaluran bantuan bencana alam	jumlah penyaluran bantuan bencana	Paket	3	162.343.200	2	60.782.000	1	33.180.000	3	123.953.184	100,00%	76,35%	BPBD
		Pengembangan desa siaga bencana	jumlah pelatihan dan pendampingan di 4 desa yg sdh terbentuk desa tangguh bencana	desa	4	87.800.000	4	85.175.000		2.625.000	4	87.800.000	100,00%	100,00 %	BPBD
		Gladi posko dan gladi lapang	jumlah gladi posko dan gladi lapang	keg	2	307.200.000	1	15.625.000	1	83.875.000	2	306.050.000	100,00%	99,63%	BPBD
		Pengembangan budaya sadar bencana	jumlah pengembangan budaya sadar bencana	kali	1	22.582.500	1	19.882.500		2.400.000	1	22.282.500	100,00%	98,67%	BPBD
		Penyelenggaraan posko pengendalian bencana	jumlah hari posko kedaruratan bencana	hari	30	34.950.000	0	-	30	29.000.000	30	29.000.000	100,00%	82,98%	BPBD
		Penguatan kapasitas satgas BPBD	jumlah satgas yang dilatih	satgas	4	150.000.000	0	-	4	127.440.000	4	127.440.000	100,00%	84,96%	BPBD
		Penguatan FPRB	jumlah anggota forum yang difasilitasi	orang	100	57.000.000	0	-	100	56.600.000	100	56.600.000	100,00%	99,30%	BPBD
		Pembentukan Sekolah Siaga Bencana	jumlah sekolah yang dibentuk	sekolah	2	105.990.000	0	-	2	11.205.000	2	104.075.000	100,00%	98,19%	BPBD
		Pembentukan Desa Tangguh Bencana	jumlah desa yang dibentuk	desa	1	290.000.000	0	17.000.000	1	271.999.580	1	288.999.580	100,00%	99,66%	BPBD
		Pengembangan Sistem Informasi Kebencanaan	jumlah SIM kebencanaan dan aplikasi yang dibuat	aplikasi	4	255.500.000	1	49.555.000	3	202.495.000	4	252.050.000	100,00%	98,65%	BPBD
		Pengembangan Sekolah Siaga Bencana	jumlah pengembangan sekolah yang sudah dibentuk	sekolah	4	48.305.000	0	-	4	45.875.000	4	45.875.000	100,00%	94,97%	BPBD
		Pembuatan Dokumen Penanggulangan Bencana	jumlah dokumen RPB yang dibuat	dok	5	571.125.000	3	49.720.000	2	268.959.000	5	565.805.000	100,00%	99,07%	BPBD

N o	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								III		IV						
1	2	4		5		8b (APBD P 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Program Peningkatan Kesiapsiagaan, Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran		Prosentase kesiapsiagaan, pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran	persen	280	206.756.000	80	1.140.000	0	129.728.300	80	191.624.300	28,57%	92,68%	BPBD
			Pencegahan, Pelaksanaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran	cakupan kegiatan pencegahan, pelaksanaan dan pengendalian bahaya kebakaran	persen	80	60.756.000	80	-		-	80	60.756.000	100,00%	100,00 %	BPBD
			Pendidikan dan Pelatihan Bahaya Kebakaran	jumlah peserta pendidikan dan pelatihan	Ok	200	146.000.000	0	1.140.000		129.728.300	0	130.868.300	0,00%	89,64%	BPBD
		Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Bencana		Persentase relokasi warga yang terdampak	persen	21	762.211.500	0	177.575.800	11	493.625.420	11	719.454.420	52,38%	94,39%	BPBD
			Relokasi Korban Bencana Alam	jumlah kk yang direlokasi	KK	10	254.561.500	0	-	10	223.367.920	10	223.937.920	100,00%	87,97%	BPBD
			Penyiapan Lahan untuk Relokasi Bencana Alam	jumlah lahan yang disiapkan	unit	1	507.650.000	0	177.575.800	1	270.257.500	1	495.516.500	100,00%	97,61%	BPBD
			Bina Lingkungan Sarpras di Lokasi Korban Bencana Alam	jumlah bantuan drainase utk korban relokasi	kk	10	-	0	-			0	-	0,00%		BPBD
		Program Pengendalian Banjir		Cakupan lokasi penanganan banjir	lokasi	18	9.247.722.000	-	1.920.492.800	19	8.973.971.000	19	8.973.971.000	105,56%	97,04%	DINAS PU PKP
			Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran tanggul dan sungai	Jumlah paket peningkatan afvour	paket	19	9.247.722.000	12	1.920.492.800	19	8.973.971.000	19	8.973.971.000	100,00%	97,04%	DINAS PU PKP
				Jumlah paket perkuatan tebing	paket	18		14		18		18	-	100,00%		DINAS PU PKP

13. Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Trwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						III	IV			
1	2	4	5		8b (APBD P 2018)	11	12	13	X=13/8 X 100%	16

					Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Program Perencanaan Tata Ruang	Meningkatnya ketersediaan dokumen rencana tata ruang			2	2.108.382.000		839.174.000	2	2.055.902.000	2	2.055.902.000	100,00%	97,51%	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
		Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tata ruang	Raperda RT RW dan KLHS RTRW	2 dokumen		2	203.943.500	1	133.258.000	2	200.243.500	2	200.243.500	100,00%	98,19%	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
		Penetapan kebijakan tentang RDT RK, RTRK, dan RTBL	Raperda RDTR	1 dokumen		1	171.095.000	1	101.170.000	1	164.585.000	1	164.585.000	100,00%	96,20%	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
			Raperda KLHS	Dokumen		1				1						
		Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang	sosialisasi tentang perundang-undangan tentang rencana tata ruang	4 desa		4	45.700.000	2	21.350.000	4	42.650.000	4	42.650.000	100,00%	93,33%	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
		Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	Tersusunnya Dokumen RDTR dan PZ	2 dokumen		2	688.300.000	0	48.485.250	2	671.751.000	2	671.751.000	100,00%	97,60%	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
		Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan	Dokumen Rencana Teknis Ruang Kawasan	1 dokumen		1	54.603.500	1	49.953.500	1	51.153.500	1	51.153.500	100,00%	93,68%	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
		Penyusunan Rencana tata Bangunan dan Lingkungan	Tersusunnya Dokumen RTBL dan Masterplan	6 dokumen		6	896.876.000	2	438.663.250	6	879.265.000	6	879.265.000	100,00%	98,04%	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
		Studi tentang Tata Ruang	Jumlah Penyusunan Dokumen RTH	1 dokumen		1	47.864.000	1	46.294.000	1	46.254.000	1	46.254.000	100,00%	96,64%	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
		Penyusunan Rencana Tata Ruang											-			Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
		Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Meningkatnya efektifitas penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan tanah dan tata ruang	Persentase		72	893.970.000		290.314.000	72	879.575.000	72	879.575.000	100,00%	98,39%	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
		Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang	Terselenggaranya pemanfaatan ruang menjadi lebih terkendali	Dokumen		4	363.800.000	9	136.099.000	4	349.830.000	4	349.830.000	100,00%	96,16%	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
		Pengembangan data pemanfaatan ruang	Peta dan meta tanah SG/ Tersosialisasinya TUPOKSI Dinas	Kali		20	530.170.000	5	154.215.000	20	529.745.000	20	529.745.000	100,00%	99,92%	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
			Sosialisasi di Media Televisi/ Tersedianya Data Tanah Desa dan SG	Desa		5		4		5		5	-	100,00%		Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

14. Terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									III		IV						
1	2	4	5		8		8b (APBD P 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Program Pengembangan dan Kereserian Kebijakan Pemuda	cakupan pelaksanaan kegiatan pemuda pelopor	kegiatan	3	688.575.000	3	738.575.000		248.250.000	3	733.665.000	3	733.665.000	100,00%	99,34%	DISDIKPORA
		Pengembangan potensi pemuda	jumlah pengembangan potensi pemuda/pelajar	kegiatan	5	688.575.000	6	738.575.000	3	248.250.000	6	733.665.000	6	733.665.000	100,00%	99,34%	DISDIKPORA
		Program peningkatan peran serta kepemudaan	peran serta kepemudaan dalam kegiatan kepemudaan	pemuda	500	2.612.698.500	500	2.612.698.500		1.386.188.500	500	2.591.913.500	500	2.591.913.500	100,00%	99,20%	DISDIKPORA
		Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan	jumlah pemuda pelopor keamanan lingkungan	orang	100	74.100.000	100	74.100.000	0	-	100	73.850.000	100	73.850.000	100,00%	99,66%	DISDIKPORA
		Pembinaan organisasi kepemudaan dan peningkatan peranserta pemuda	jumlah pembinaan pemuda	paket	15	2.538.598.500	15	2.538.598.500	8	1.386.188.500	15	2.518.063.500	15	2.518.063.500	100,00%	99,19%	DISDIKPORA
		Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	jumlah pemuda terlatih dibidang kewirausahaan	60 orang	60	80.695.000	60	180.695.000		48.045.000	60	178.385.000	60	178.385.000	100,00%	98,72%	DISDIKPORA
		Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda	jumlah pemuda peserta pelatihan	30 orang	30	80.695.000	70	180.695.000	15	48.045.000	70	178.385.000	70	178.385.000	100,00%	98,72%	DISDIKPORA
		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Rasio Linmas dengan RT	97		455.890.000	97	455.890.000		280.355.000	97	440.714.000	97	440.714.000	100,00%	96,67%	SATPOL PP
		Pembinaan dan Penyuluhan dan Keamanan Lingkungan	Peningkatan Kapasitas anggota Satlinmas dalam pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Ok	850	191.650.000	850	191.650.000	602	140.915.000	850	190.040.000	850	190.040.000	100,00%	99,16%	SATPOL PP
			Penyuluhan Bina Masyarakat	Ok	960		960		621		960		960	-	100,00%		SATPOL PP
			Pelatihan Ketrampilan Penyelamatan (rescue) Linmas	Ok	50		50		0		50		50	-	100,00%		SATPOL PP
		Pemberdayaan Linmas	Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Ok	780	264.240.000	780	264.240.000	780	139.440.000	780	250.674.000	780	250.674.000	100,00%	94,87%	SATPOL PP
			Apel siaga linmas	Ok	475		475		0		475		475	-	100,00%		SATPOL PP
			Pemberdayaan FKDM dan Linmas	Ok	600		600		200		300		300	-	50,00%		SATPOL PP

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									III		IV						
1	2	4	5		8		8b (APBD P 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Peringatan Hut Sat Pol PP dan Linmas	Ok	1375		1.375		1375		1375		1.375	-	100,00%		SATPOL PP
		Program Peningkatan Ketertiban dan Keamanan	Cakupan Kawasan Tertib	18		403.990.000	18	373.990.000		190.055.000	18	334.495.000	18	334.495.000	100,00%	89,44%	SATPOL PP
		Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketrentaman Masyarakat	Penanganan Pengaduan Masyarakat	Ok	1050	403.990.000	1.050	373.990.000	810	190.055.000	1050	334.495.000	1.050	334.495.000	100,00%	89,44%	SATPOL PP
			Kerjasama pengembangan kemampuan aparat Pol PP dengan TNI, Polri dan Kejaksaan	Ok	300		300		0		300		300	-	100,00%		SATPOL PP
			Penertiban	Ok	1800		1.800		868		1494		1.494	-	83,00%		SATPOL PP
			Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Ok	600		600		0		535		535	-	89,17%		SATPOL PP
			Operasi Gabungan	Ok	1300		1.300		701		1071		1.071	-	82,38%		SATPOL PP
			Pembinaan Satuan Keamanan Lingkungan	Ob	156		156		0		150		150	-	96,15%		SATPOL PP
			Penanganan Konflik	Ok	2000		2.000		275		555		555	-	27,75%		SATPOL PP
			Sosialisasi Pedukuhan Sapta tertib	Ok	200		200		200		200		200	-	100,00%		SATPOL PP
			Safari Kantrantibmas	Ok	200		200		200		200		200	-	100,00%		SATPOL PP
		Program pengembangan wawasan kebangsaan	Cakupan pembinaan wawasan kebangsaan			335.176.200	9	385.176.200	6	179.784.800	9	361.949.125	9	361.949.125	100,00%	93,97%	KESBANGPOL
		Pendidikan Wawasan Kebangsaan	Jumlah peserta workshop, peserta lomba upacara			335.176.200	9	385.176.200	6	179.784.800	9	361.949.125	9	361.949.125	100,00%	93,97%	KESBANGPOL
		Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Prosentase FKUB aktif			123.753.000	25	223.753.000	16	77.272.375	25	212.298.250	25	212.298.250	100,00%	94,88%	KESBANGPOL
		Pemantauan orang asing	Jumlah pemantauan orang asing			10.600.000	7	10.600.000	5	8.745.000	7	9.495.000	7	9.495.000	100,00%	89,58%	KESBANGPOL
		Pemberdayaan kerukunan antar umat beragama dan etnis	pelaksanaan dialog tokoh/koordinasi antar umat beragama dsn etnis			113.153.000	18	213.153.000	11	68.527.375	18	202.803.250	18	202.803.250	100,00%	95,14%	KESBANGPOL
		Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Prosentase FKDM tingkat kecamatan			279.470.000	45	429.470.000	18	160.337.500	45	307.322.500	45	307.322.500	100,00%	71,56%	KESBANGPOL

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									III		IV						
1	2	4	5		8		8b (APBD P 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pembinaan satuan keamanan lingkungan di masyarakat	Jumlah pembinaan satuan keamanan lingkungan di masyarakat dan jumlah rekomendasi			105.260.000	27	255.260.000	9	56.940.000	27	145.430.000	27	145.430.000	100,00%	56,97%	KESBANGPOL
		Pemberdayaan masyarakat untuk kewaspadaan dini dan menjaga keamanan lingkungan	Jumlah pemberdayaan masyarakat untuk kewaspadaan dini dan menjaga masyarakat			174.210.000	18	174.210.000	9	103.397.500	18	161.892.500	18	161.892.500	100,00%	92,93%	KESBANGPOL
		Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (pekat)	Menurunnya penyalahgunaan narkoba			66.250.000	17	66.250.000	11	14.005.000	17	50.981.800	17	50.981.800	100,00%	76,95%	KESBANGPOL
		Penertiban dan Konseling pelajar tidak disiplin	Jumlah penertiban pelajar tidak disiplin dan konseling di dalam kelas			37.945.000	13	37.945.000	10	12.155.000	13	30.980.000	13	30.980.000	100,00%	81,64%	KESBANGPOL
		Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	Jumlah pelaksanaan FGD dan sosialisasi			28.305.000	4	28.305.000	1	1.850.000	4	20.001.800	4	20.001.800	100,00%	70,67%	KESBANGPOL
		Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan		50	385.251.500	50	383.651.500		323.269.000	50	383.626.450	50	383.626.450	100,00%	99,99%	DINAS SOSIAL P3A
		Pelaksanaan sosialisasi dan KIE kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Sosialisasi dan advokasi		18	51.890.000	18	51.890.000	14	47.890.000	18	51.890.000	18	51.890.000	100,00%	100,00%	DINAS SOSIAL P3A
		Pengembangan Kabupaten Layak Anak	sosialisasi dan pelatihan		17	133.510.000	17	131.910.000	17	131.885.000	17	131.885.000	17	131.885.000	100,00%	99,98%	DINAS SOSIAL P3A
		Bimbingan Managemen Usaha Bagi perempuan Dalam Mengelola Usaha	Pelatihan kelompok desa prima		2	52.641.000	2	52.641.000	2	52.641.000	2	52.641.000	2	52.641.000	100,00%	100,00%	DINAS SOSIAL P3A
		Operasional Gabungan Organisasi Wanita	Rakor & peringatan Hari Kartini		22	41.000.000	22	41.000.000	12	21.699.500	22	40.999.950	22	40.999.950	100,00%	100,00%	DINAS SOSIAL P3A
		Penunjang Kegiatan Dhama Wanita	Kegiatan DWP		54	53.000.000	54	53.000.000	54	24.643.000	54	53.000.000	54	53.000.000	100,00%	100,00%	DINAS SOSIAL P3A
		Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Pelatihan & penguatan kelembagaan		3	53.210.500	3	53.210.500	3	44.510.500	3	53.210.500	3	53.210.500	100,00%	100,00%	DINAS SOSIAL P3A
		Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak			30	55.700.000	30	57.300.000		12.650.000	30	57.300.000	30	57.300.000	100,00%	100,00%	DINAS SOSIAL P3A
		Penyusunan data terpilah dan sistim informasi gender dan anak	Terlaksananya Pengolahan Updating dan Analisis Data Gender		80	15.700.000	80	15.700.000	80	15.700.000	40	6.900.000	80	15.700.000	100,00%	100,00%	DINAS SOSIAL P3A
		Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Perlindungan Perempuan dan Anak	Pelatihan tentang pemahaman KDRT bagi Guru BK		50	40.000.000	50	41600000	50	41.600.000	1	5.750.000	50	41.600.000	100,00%	100,00%	DINAS SOSIAL P3A

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									III		IV						
1	2	4	5		8		8b (APBD P 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan			481.895.000	100	475.200.500		343.021.000	100	472.700.000	100	472.700.000	100,00%	99,47%	DINAS SOSIAL P3A
		Pendampingan upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	Penanganan kasus		320	345.000.000		338.305.000		248.431.500	320	335.805.000	320	335.805.000		99,26%	DINAS SOSIAL P3A
		Forum Penanganan Korban Kekerasan	Pelatihan & rakor FPKK		3	42.061.000	3	42.061.500	2	14.861.000	3	42.061.000	3	42.061.000	100,00%	100,00%	DINAS SOSIAL P3A
		Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Seminar Hari Kartini & Hari Ibu		4	13.600.000	4	15.400.000	2	6.195.000	4	15.400.000	4	15.400.000	100,00%	100,00%	DINAS SOSIAL P3A
		Operasional Sekretariat Forum Anak Bantul	Partisipasi Fonaba		4	41.282.000	4	39.482.000	3	38.082.000	4	39.482.000	4	39.482.000	100,00%	100,00%	DINAS SOSIAL P3A
		Pelaksanaan kampanye Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	Sosialisasi pencegahan TPPO		450	39.952.000	450	39.952.000	450	35.451.500	450	39.952.000	450	39.952.000	100,00%	100,00%	DINAS SOSIAL P3A

15. Terwujudkan pelestarian dan pengembangan budaya daerah

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									III		IV						
1	2	4	5		8		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%	16	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Terwujudkan pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Program Pengembangan Nilai Budaya	Peningkatan Peristiwa Seni Budaya.			905.000.000		2.701.000.000		504.542.000		2.591.720.000	0	2.591.720.000		95,95%	DINAS KEBUDAYAAN
			Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Jumlah pentas seni budaya	19	19	108	825.000.000	13	425.092.000		2.512.270.000	0	2.512.270.000		98,17%	DINAS KEBUDAYAAN
			Pembuatan Film Dokumenter	Jumlah film dokumenter	1	1	1	80.000.000	1	79.450.000		79.450.000	0	79.450.000		99,31%	DINAS KEBUDAYAAN
		Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	Peningkatan kualitas kemitraan			65.000.000	2	62.000.000		62.000.000		62.000.000		62.000.000		95,38%	DINAS KEBUDAYAAN
			Membangun kemitraan/pengelolaan kebudayaan antar daerah	Pentas seni kemitraan	1	1	1	65.000.000	1	62.000.000		62.000.000	0	62.000.000		100,00%	DINAS KEBUDAYAAN

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									III		IV							
1	2	4	5		8		8b (APBDP 2018)		11		12		13		X=13/8 X 100%		16	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Program Pengelolaan Warisan Budaya Tak Benda	Cakupan Pelestarian Warisan Budaya Tak Benda			229.250.000		458.250.000		111.422.000		444.678.000	0	444.678.000		97,04%	DINAS KEBUDAYAAN	
			Pengembangan Nilai dan Geografi Sejarah	Jumlah lawatan sejarah	2 kali	2	66.000.000		66.000.000		59.097.000		61.450.000	0	61.450.000		93,11%	DINAS KEBUDAYAAN
			Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam	Lomba Foto dan Dokumen Dolanan Anak	2 kali	2	86.000.000		195.000.000		2.575.000		187.078.000	0	187.078.000		95,94%	DINAS KEBUDAYAAN
			Penyelenggaraan Dialog Kebudayaan	Jumlah dialog budaya	2 kali	2	50.450.000		170.450.000		49.750.000		169.350.000	0	169.350.000		99,35%	DINAS KEBUDAYAAN
			Seminar dalam rangka Revitalisasi dan Reaktualisasi Budaya Lokal	Terlaksananya Seminar dalam rangka Revitalisasi dan Reaktulisasi Budaya lokal	2 kali	2	26.800.000		26.800.000		-		26.800.000	0	26.800.000		100,00%	DINAS KEBUDAYAAN
		Program Pengelolaan Warisan Budaya Benda	Warisan Budaya dan Cagar Budaya Yang Dilestarikan			173.000.000		353.000.000		128.687.400		298.763.400	0	298.763.400		84,64%	DINAS KEBUDAYAAN	
			Sosialisasi Pengelolaan Warisan Budaya Cagar Budaya	Terselenggaranya Sosialisasi Pengelolaan Warisan Budaya Cagar Budaya	2 kali	2	44.000.000		94.000.000		43.669.400		93.669.400	0	93.669.400		99,65%	DINAS KEBUDAYAAN
			Seminar Pemanfaatan Cagar Budaya	Terlaksananya Seminar Pemafaatan Cagar Budaya	1 kali	1	36.000.000		36.000.000		33.000.000		33.000.000	0	33.000.000		91,67%	DINAS KEBUDAYAAN
			Rehab Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya direhab fisik	1	1	39.000.000		169.000.000		-		120.076.000	0	120.076.000		71,05%	DINAS KEBUDAYAAN
			Pengembangan Museum	Dokumen pengembangan museum	1	1	54.000.000		54.000.000		52.018.000		52.018.000	0	52.018.000		96,33%	DINAS KEBUDAYAAN

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1. Permasalahan yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

- a. Angka Harapan Lama Sekolah
- b. Peringkat rata-rata nilai Ujian SD dan SMP
- c. Angka Kemiskinan
- d. Kekerasan perempuan dan anak
- e. Pertumbuhan ekonomi
- f. Pemerataan Pendapatan
- g. Pengangguran
- h. Angka Kematian Ibu
- i. Angka Kematian Bayi
- j. *Net Death Rate (NDR)*
- k. Kecukupan air irigasi
- l. Indeks Kualitas Air
- m. Ketersediaan energy
- n. Skor pola pangan harapan
- o. Kemampuan kelembagaan kelas kelompok tani
- p. Pertumbuhan produksi tanaman hortikultura
- q. Pertumbuhan produksi perikanan
- r. Angka Kriminalitas
- s. Penyediaan lahan relokasi warga
- t. Indeks Pembangunan Kebudayaan

2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah terbagi menjadi 1) Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, 2) Urusan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, 3) Urusan Pilihan, dan 4) Urusan Penunjang. Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dikaitkan dengan pencapaian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah disajikan pada tabel 2.148 berikut ini:

**Tabel 2.147. Permasalahan Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan Daerah**

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Satuan	Target 2018	Capaian 2018	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
I	Aspek Kesejahteraan Masyarakat								
A	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi								
1		Pertumbuhan Ekonomi	%	5,4	5,47	Melampaui			BPS
2		Pemerataan Pendapatan	Angka	0,3093	0,4126*	Belum Tercapai	Belum meratanya pusat pertumbuhan ekonomi dan masih rendahnya tingkat produktifitas tenaga kerja	1. Menciptakan dan mengembangkan kawasan pertumbuhan ekonomi baru, 2. Meningkatkan produktifitas tenaga kerja,	BPS
B	Fokus Kesejahteraan Masyarakat								
		Indeks Pembangunan Manusia	Angka Indeks	79,32	79,45	Melampaui			BPS
3		Angka	%	12,13	13,43	Belum	Program	<i>Refocusing</i>	BPS

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Satuan	Target 2018	Capaian 2018	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
		Kemiskinan				Tercapai	kegiatan penanganan kemiskinan belum terintegrasi	penanganan kemiskinan	
C	Fokus Seni Budaya dan Olahraga								
4		Cakupan Pelestarian adat dan tradisi	Persen	21					Disbud
5		Persentase prestasi olahraga tingkat propinsi (POPDA/ Pekan Olah Raga Pelajar) yang diikuti	%	27	34,21	Melampaui	Fasilitas latihan di Kabupaten Bantul masih sangat kurang, berupa GOR dan kolam renang	a. Atlet berprestasi diberikan beasiswa; b. Pembenahan Fasilitas Olahraga yang akan mampu menunjang kebutuhan atlet berprestasi	Dikpora
II	Aspek Pelayanan Umum								
A	Fokus Layanan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar								
	Urusan Pendidikan								

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Satuan	Target 2018	Capaian 2018	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
6		Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,4	15,03	Belum Tercapai	BOP belum terpenuhi	Pemenuhan BOP	BPS
7		Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	8,89	9,35	Melampaui			BPS
8		Angka Partisipasi Kasar (APK)							
		- APK SD/MI	%	96,2	98,45	Melampaui	Minat sekolah di Bantul khususnya pada Kecamatan pinggiran yang berbatasan dengan Kabupaten/Kota dan dimungkinkan anak usia sekolah SD/MI ini sudah menduduki jenjang pendidikan yang lebih tinggi (SMP/MTs).	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi tentang pendidikan di Kabupaten Bantul	Dikpora

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Satuan	Target 2018	Capaian 2018	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
		- APK SMP/MTs	%	95,2	97,83	Melampaui	Tidak semua orang tua siswa menyekolahkan anaknya di Bantul dan dimungkinkan anak usia sekolah SMP ini sudah menduduki jenjang pendidikan yang lebih tinggi (SMA/SMK)	Memberikan sosialisasi kepada Penduduk Bantul di wilayah perbatasan Kab/Kota untuk menyekolahkan anaknya di Bantul	Dikpora
9		APK PAUD	%	98,8	107,11	Melampaui	Masih kurangnya penilik PAUD, Penilik LKP dan Penilik PKBM	Penambahan penilik PAUD, Penilik LKP dan Penilik PKBM.	Dikpora
10		APM SD/MI							

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Satuan	Target 2018	Capaian 2018	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
		- APM SD/MI	%	84,45	89,55	Melampaui	Minat sekolah di Bantul khususnya pada Kecamatan pinggiran yang berbatasan dengan Kabupaten/Kota dan dimungkinkan anak usia sekolah SD/MI ini sudah menduduki jenjang pendidikan yang lebih tinggi (SMP/MTs).	Memperbaiki akses sekolah yang ada di Kabupaten Bantul, sehingga dapat meningkatkan minat siswa untuk bersekolah di kabupaten bantul	Dikpora
		- APM SMP/MTs	%	67,9	77,33	Melampaui	Tidak semua orang tua siswa menyekolahkan anaknya di Bantul dan dimungkinkan anak usia sekolah SMP ini sudah menduduki jenjang pendidikan yang lebih tinggi (SMA/SMK)	Meningkatkan mutu pendidikan yang ada di Kabupaten Bantul	Dikpora

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Satuan	Target 2018	Capaian 2018	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
11		Peringkat rata-rata nilai USM SD/MI	Angka (SD)	Ranking III DIY	Ranking IV DIY	Belum Tercapai	Masih kurangnya Kesejahteraan bagi GTT dan PTT	Penambahan insentif secara bertahap	Dikpora
12		Peringkat rata-rata nilai UN SMP/MTs	Angka (SMP)	Ranking II DIY	Ranking III DIY	Belum Tercapai	Masih kurangnya Kesejahteraan bagi GTT dan PTT	Penambahan insentif secara bertahap.	Dikpora
13		Jumlah Prestasi Non Akademik Tk Nasional	Buah	5	8	Melampaui	Masih kurangnya partisipasi warga dalam penyelenggaraan Pendidikan Non Formal	Peningkatan peran aktif dari semua pihak untuk memberikan motivasi agar warga belajar memiliki kesadaran untuk belajar secara aktif di PKBM	Dikpora
14		Presentase Kelulusan							Dikpora

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Satuan	Target 2018	Capaian 2018	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
		SD/MI	%	100	100	Sesuai		Penajaman bedah SKL UASBN, Try out mulai dari Tingkat Kecamatan, MKKS, Tingkat Kabupaten dan Tingkat Propinsi.	Dikpora
		SMP/MTs	%	100	100	Sesuai		a. Pelayanan Pendidikan dengan kegiatan Penguatan mapel yang diujikan dalam UN dan Achivement Motivation Training (AMT) untuk mencapai prestasi dalam Ujian Nasional b. Pendampingan khusus bagi siswa yang nilai akademiknya di bawah rata-rata sekolah.	Dikpora

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Satuan	Target 2018	Capaian 2018	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
15		Angka Melanjutkan							
		Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	100	109,61	Melampaui		Memperbaiki akses sekolah yang ada di Kabupaten Bantul, sehingga dapat meningkatkan minat siswa untuk bersekolah di kabupaten bantul	Dikpora
		Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	100	108,54	Melampaui		Memperbaiki akses sekolah yang ada di Kabupaten Bantul, sehingga dapat meningkatkan minat siswa untuk bersekolah di kabupaten bantul	Dikpora
16		Angka Putus Sekolah							

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Satuan	Target 2018	Capaian 2018	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
		SD/MI	%	0,02	0,01	Melampaui	Faktor sosial dan budaya masyarakat, seperti adanya siswa yang tidak mau menyelesaikan sekolahnya dengan alasan bekerja membantu perekonomian orang tua	Tidak membiarkan anak bekerja mencari uang dalam masa belajar	Dikpora
		SMP/MTs	%	0,02	0,02	Sesuai	Faktor keluarga, seperti adanya ketidakharmonisan keluarga dapat menyebabkan anak putus sekolah	Membangkitkan kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan anak, Memberikan dorongan dan bantuan kepada anak dalam belajar	Dikpora
	Urusan Kesehatan								
17		Umur Harapan Hidup	Tahun	73,3	73,66	Melampaui			BPS

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Satuan	Target 2018	Capaian 2018	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
18		Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 KH	85	108,36	Belum Tercapai	Masih Rendahnya Kompetensi petugas dalam penanganan pasca persalinan		Dinkes
									Dinkes
							Masih Rendahnya Kompetensi petugas dalam penanganan pasca persalinan	Kemitraan dengan rumah sakit Sardjito dan RSUD Panembahan Senopati dalam peningkatan kapasitas petugas, Drilling KIA (simulasi kegawatan maternal)	Dinkes

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Satuan	Target 2018	Capaian 2018	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
							Belum optimalnya layanan kesehatan ibu hamil yang berdampak pada kualitas bayi baru lahir	Pembebasan retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas	Dinkes
							Pengetahuan ibu tentang tanda bahaya kehamilan masih kurang	Kunjungan rumah ibu hamil dan neonatus resiko tinggi, konsultasi dokter ahli, pendampingan ibu hamil, bedah buku KIA, kelas ibu hamil	Dinkes
									Dinkes
19		Angka Kematian Bayi (AKB)	Per 1000 KH	8,20	8,28	Belum Tercapai	Belum optimalnya layanan kesehatan ibu hamil yang berdampak pada kualitas bayi baru lahir	Pembebasan retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas	Dinkes

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Satuan	Target 2018	Capaian 2018	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
							Rendahnya kualitas layanan pada bayi baru lahir di layanan primer dan RS rujukan	perbaikan gizi masyarakat melalui peningkatan gerakan 1000 hari pertama kehidupan	Dinkes
							Pemantauan secara intensif layanan KIA di puskesmas dan dinas kesehatan	Desa Bebas 4 Masalah Kesehatan	Dinkes
							Edukasi pada masyarakat untuk kehamilan dan persalinan yang terencana	Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat dasar maupun rujukan	Dinkes

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Satuan	Target 2018	Capaian 2018	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
20		Prevalensi Balita Gizi Buruk	%	0,40	0,41	Belum Tercapai	pola asuh yang kurang tepat	Pemberian PMT pada Balita Gizi buruk	Dinkes

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Satuan	Target 2018	Capaian 2018	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
							Adanya kelainan kongenital	Gerakan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) sejak remaja	Dinkes

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Satuan	Target 2018	Capaian 2018	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
									Dinkes

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Satuan	Target 2018	Capaian 2018	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
							Masih terdapat Bayi lahir pendek dan /atau Berat Badan Lahir Rendah.	Pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan lingkungan melalui Upaya Peningkatan Gizi Keluarga (UPGK)	Dinkes
									Dinkes
21		Prevalensi penderita HIV	Angka	<0,5	0,19	Melampaui	Perlunya peran lintas sektor yang proaktif	update knowledge pada kelompok potensial	Dinkes

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Satuan	Target 2018	Capaian 2018	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
							Kurangnya kesadaran masyarakat melakukan tes HIV	Peningkatan akses pelayanan kesehatan pada kelompok kunci dan pada kelompok potensial serta kelompok berisiko rendah (Bumil dan penderita TB) dengan cara intensifikasi konseling, penemuan dan pengobatan kasus melalui VCT di Puskesmas	Dinkes
							Banyak populasi berisiko yang terscreening	Adanya penambahan Rumah Sakit layanan yang mampu melayani tes HIV sehingga lebih banyak populasi berisiko yang terscreening	Dinkes

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Satuan	Target 2018	Capaian 2018	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
22		Angka Kesakitan/Insidenc e Rate (IR) DBD	Per 100.000 penduduk	130	19,52	Melampaui	Kasus dengue menurun	Pemberdayaan masyarakat melalui Gerak PSN dan pemberantasan vektor	Dinkes
							Cuaca yang berubah-ubah mempengaruhi kasus DBD	Komunikasi Informasi Edukasi yang terus menerus dilakukan oleh jajaran kesehatan didukung lintas sektro, kecamatan dan kelurahan	Dinkes
							PSN yang dilakukan rutin oleh Puskesmas	Meningkatkan kesehatan lingkungan secara berkesinambungan	Dinkes
								Mendorong kesadaran warga untuk mandiri dan pemantauan jentik	Dinkes

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Satuan	Target 2018	Capaian 2018	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
23		Net Death Rate (permil)	Per 1000 Pasien	16,8	22,62	Belum Tercapai	Belum terpenuhinya target Angka kesembuhan kasus TB	Meningkatkan peran serta masyarakat untuk pemantauan penderita TB	RSUD
								Meningkatkan kapasitas petugas dalam penanganan TB <i>Multi Drug Resisten</i>	RSUD
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
24		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Infrastruktur	Klasifikasi	74	74,36	Melampaui	Masih kurangnya tenaga terampil yang bersertifikat dalam mendukung pembangunan infrastruktur	Perlunya pembinaan dan peningkatan sumber daya pelaku jasa konstruksi	DPUPKP

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Satuan	Target 2018	Capaian 2018	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
25		Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap	%	74,58	74,58	Sesuai	Semakin besarnya kerusakan jalan kabupaten, akibat banyaknya kendaraan tonase besar yang melewati jalan kabupaten, terutama di jalur penambangan galian C.	Peningkatan struktur jalan pada jalur yang dilalui angkutan penambangan galian C.	DPUPKP
26		Persentase Gedung Pemerintah Kondisi Baik	%	82	84	Melampaui			DPUPKP
27		Persentase kecukupan air irigasi	%	81,66	80,44	Belum Tercapai	Masih adanya kerusakan jaringan irigasi Ketidaktepatan pemanfaatan air irigasi	Rehabilitasi jaringan irigasi Penguatan kelembagaan P3A dan GP3A	DPUPKP Diperpautkan
28		Presentase penanganan banjir	%	27,34	28,84	Melampaui			DPUPKP

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Satuan	Target 2018	Capaian 2018	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
29		Presentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	70,35	70,45	Melampaui			Dipertaru
30		Jumlah dokumen tata ruang yang sudah diperdakan	Dokumen	2	2	Sesuai	Perlu waktu dan proses yang panjang dalam penetapan perda dokumen tata ruang	Koordinasi dengan pihak terkait (BIG, kemenATR dan pihak propinsi) dengan lebih intensif	Dipertaru
31		Persentase cakupan pengendalian tata ruang	%	72	72	Sesuai	Masih terdapat pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukan	Mengintensifkan pengendalian tata ruang	Dipertaru
		Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman							
32		Persentase Kawasan kumuh perkotaan yang tertangani	%	80	92,06	Melampaui	Masih terdapat kawasan permukiman kumuh perkotaan	Penerapan hunian berimbang	DPUPKP
							Masih adanya masyarakat dengan rumah tidak layak huni (RTLH)	Perbaikan RTLH	DPUPKP

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Satuan	Target 2018	Capaian 2018	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
							Masih adanya perumahan permukiman yang belum memiliki tempat pemakaman umum	Penyediaan area dan fasilitas pemakaman umum oleh Pemerintah	DPUPKP
		Urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat							
33		Angka Kriminalitas	Persen	0,035	0,055	Belum Tercapai	Masih kurangnya kepedulian masyarakat pada pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum	Sosialisasi pada masyarakat mengenai pentingnya pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum	Satpol PP
34		Persentase Penegakan Perda	%	63	66,35	Melampaui	Kurangnya PPNS untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran Perda	Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum	Satpol PP

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Satuan	Target 2018	Capaian 2018	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
35		Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3	%	100	100	Sesuai	Rendahnya minat kaum muda untuk menjadi anggota linmas	Promosi fungsi Linmas kepada generasi muda. dalam menjaga Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K3) di lingkungannya.	Satpol PP
36		Jumlah intoleransi di masyarakat	Kasus	0	0	Sesuai	Semakin berkurangnya semangat nasionalisme, kebebasan yang kebablasan, lebih mengutamakan kepentingan pribadi/ golongan, dan terjebak dalam konflik sosial.	Penyelesaian konflik melalui tokoh lintas agama, tokoh masyarakat, dan lintas sektoral sehingga bisa menekan intoleransi di masyarakat.	Kesbangpol
37		Persentase pemilih yang berpartisipasi	%	-	-	Sesuai			Kesbangpol
38		Desa Tangguh Bencana	Desa	25,34	37,33	Melampaui	Bantul merupakan daerah rawan bencana	Meningkatkan kewaspadaan masyarakat melalui mitigasi bencana	BPBD

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Satuan	Target 2018	Capaian 2018	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
39		Persentase kecepatan Reaksi Tanggap Darurat Bencana yang memenuhi respon time 15 menit	%	98	100	Melampaui	Masih tingginya kasus kebakaran dan bencana di Kabupaten Bantul	Meningkatkan kapasitas dan pengetahuan aparatur, relawan dan warga; Meningkatkan sarana dan prasarana operasi.	BPBD
40		Persentase Relokasi Warga	%	45,46	36,36	Belum Tercapai	Penyediaan lahan relokasi harus melalui mekanisme pelepasan lahan.	Menyediakan Lahan Relokasi; Meningkatkan fasilitas pendukung di kawasan relokasi; Pendampingan pasca relokasi.	BPBD
41		Persentase Sekolah Siaga Bencana	%	3,7	4,25	Melampaui	Sekolah merupakan tempat berkumpulnya siswa sehingga mempunyai tingkat resiko tinggi apabila terjadi bencana pada saat jam belajar	Meningkatkan kompetensi dan jumlah fasilitator; Meningkatkan kapasitas siswa dan guru dalam pencegahan serta penanganan bencana	BPBD
		Urusan Sosial							

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Satuan	Target 2018	Capaian 2018	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
42		Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	%	12,75	7,29	Melampaui	Untuk pemenuhan SPM bidang Sosial perlu tersedianya shelter untuk penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), seperti fakir miskin, gelandangan, anak terlantar, lansia terlantar, difabel terlantar, orang dengan penyakit tertentu; ODGJ.	- Pembangunan shelter, pemenuhan sarana prasarana dan SDM-nya	Dinsos
								- Pemberian bantuan untuk difabel dan permakanan Boga Sehat	
							Banyaknya missing data dari sensus awal 2015 yang belum mengcover keseluruhan PMKS yang ada, dan masih banyak ketidaksesuaian data antara satu aplikasi dengan	Verivali data membutuhkan sensus ulang data mikro dan aplikasi terintegrasi	Dinsos

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Satuan	Target 2018	Capaian 2018	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
							aplikasi yang lain		
B		Fokus Layanan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar							
		Urusan Tenaga Kerja							
43		Angka Pengangguran	%	2,2	2,72	Belum Tercapai	Kualitas tenaga kerja tidak memenuhi kompetensi yang dibutuhkan pasar kerja.	Melaksanakan pelatihan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.	Disnakertrans
							Masih rendahnya produktivitas tenaga kerja	Meningkatkan produktivitas tenaga kerja dengan mengadakan pelatihan tingkat lanjut.	Disnakertrans

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Satuan	Target 2018	Capaian 2018	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
								Memperbanyak dan mengintensifkan pelatihan kewirausahaan.	Disnakertrans
							Banyaknya aturan baru di Bidang Ketenagakerjaan	Intensifkan sosialisasi hukum ketenagakerjaan baik secara klasikal maupun langsung ke perusahaan.	Disnakertrans
							Kesempatan kerja yang masih terbatas.	Intensifikasi pencarian lowongan pekerjaan melalui <i>job canvassing</i> dan informasi pasar kerja melalui bursa kerja <i>on-line</i> lebih ditingkatkan.	Disnakertrans
		Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
								Pembentukan desa ramah gender	

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Satuan	Target 2018	Capaian 2018	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
44		Rasio kekerasan Perempuan dan Anak	Rasio	0,38	0,73	Belum Tercapai	Belum optimalnya pemenuhan hak-hak perempuan dan anak	Intensifikasi sosialisasi, advokasi, dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) menuju Bantul Kota Layak Anak (KLA) sampai ke tingkat desa	Dinsos
								Pembentukan desa ramah gender	
								Memperkuat jejaring dan kemitraan dengan lembaga peduli anak	
								Mengoptimalkan fungsi fasilitator forum anak terutama untuk pendampingan forum anak di kecamatan dan desa	
		Urusan Pangan							

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Satuan	Target 2018	Capaian 2018	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
45		Ketersediaan energi	kkal/kapita/hari	3.085	3.121	Melampaui		Untuk mempertahankan ketersediaan energi perlu peningkatan produksi pertanian dan perkebunan	Diperpautkan
46		Ketersediaan protein	kkal/kapita/hari	72,4	87,36	Melampaui		Untuk mempertahankan ketersediaan protein perlu optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan	Diperpautkan
47		Skor Pola Pangan Harapan	Angka	93,4	91,7	Belum Tercapai	Pola konsumsi belum Bergizi Berimbang Sehat dan Aman (B2SA)	Peningkatan pemanfaatan pekarangan	Diperpautkan

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Satuan	Target 2018	Capaian 2018	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
									Diperpautkan
48		Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Kelas Kelompok Tani	Kelompok	31	69	Melampaui		Peningkatan pelatihan teknologi pertanian, sekolah lapang agribisnis, dan pembentukan taruna tani	Diperpautkan
		Urusan Pertanahan							
49		Cakupan Sertifikasi Tanah	%	88	93,16	Melampaui	Belum semua bidang tanah bersertifikat.	Peningkatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)	Dipertaru

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Satuan	Target 2018	Capaian 2018	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
							Masih terdapat pemanfaatan tanah yang belum sesuai ketentuan	Mengintensifkan pengendalian pemanfaatan tanah	Dipertaru
		Urusan Lingkungan Hidup							
49		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	50	53,36	Melampaui			DLH
50		Indeks Kualitas Air (IKA)	Angka	40	34,67	Belum Tercapai	Tingginya pencemaran air sungai oleh limbah rumah tangga, industri, dan sampah	Meningkatkan koordinasi antar Kabupaten/Kota melalui Kartamantul	DLH

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Satuan	Target 2018	Capaian 2018	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
								Mengoptimalkan peran komunitas sungai, pelaku usaha dan masyarakat dalam pengelolaan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup	DLH
							Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan.	Pemantapan fungsi pengawasan DLH terhadap pelaku usaha agar mengolah limbahnya hingga memenuhi baku mutu	DLH
								Penegakan regulasi tentang pengelolaan lingkungan hidup	DLH
51		Indeks Kualitas Udara (IKUd)	Angka	65	85,66	Melampaui			

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Satuan	Target 2018	Capaian 2018	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
52		Indeks Tutupan Lahan	Angka	40,21	43,15	Melampaui	Terbatasnya lahan ruang terbuka hijau	Mendorong masyarakat untuk melakukan penghijauan secara mandiri.	DLH
							Keterbatasan tenaga untuk kebersihan lingkungan	Menambah tenaga kebersihan lingkungan secara bertahap	DLH
53		Volume sampah yang tertangani	ribu m3	440	440	Sesuai	Kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam pengelolaan sampah dengan prinsip 3R	Fasilitasi kelompok pengelola sampah dengan prinsip 3R	DLH
		Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil							
54		Rata-rata Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	87	97,83	Melampaui	Masih ada penduduk yang belum melakukan pembaharuan data kependudukan	Membuat aplikasi untuk merubah data secara <i>on line</i> dengan aplikasi <i>Smart on</i> yang bisa diunduh di <i>Play Store</i>	Disdukcapil

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Satuan	Target 2018	Capaian 2018	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
							Masih ada masyarakat yang melakukan laporan dan merubah status kepindahannya ke suatu tempat tetapi belum melakukan perekaman	Mendekatkan pelayanan adminduk kepada masyarakat	Disdukcapil
55		Persentase Instansi yang Memanfaatkan Data Penduduk Disdukcapil	%	80	85	Melampaui	masih ada instansi yang belum mengajukan pemanfaatan kerjasama pemanfaatan data		Disdukcapil
56		Indeks Kepuasan Masyarakat	%	80,25	88,69	Melampaui			Bagian Organisasi
		Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
57		Indeks Desa Membangun	Jumlah Desa Mandiri	18	22	Melampaui	Belum optimalnya fungsi sarana Pengelola Air Bersih (PAB)	- Penguatan Kelembagaan	DPPKBP MD

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Satuan	Target 2018	Capaian 2018	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
								- Peningkatan pemeliharaan sarana PAB	DPPKBP MD
							Belum optimalnya pengelolaan profil desa	Peningkatan kapasitas SDM Pengelola Profil Desa	DPPKBP MD
							Kurangnya pemahaman kelompok sasaran dan pelaksanaan di tingkat desa dalam mengelola bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa (BKK dan P2MD) sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Intensifikasi pelatihan kepada masyarakat	DPPKBP MD

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Satuan	Target 2018	Capaian 2018	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
							Pelaksanaan Lomba Desa di tingkat Kecamatan belum sesuai Permendagri No 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa (Lomba Desa)	Mendorong dan meningkatkan kapasitas peran kecamatan dalam menyelenggarakan Evaluasi Perkembangan Desa	DPPKBP MD
							Belum optimalnya potensi dan permasalahan di desa menjadi dasar perencanaan pembangunan desa	Bimbingan teknis Peningkatan Kapasitas Desa dalam pelaksanaan musrenbangdes	DPPKBP MD
							Belum optimalnya kapabilitas aparat pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi informasi	- Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai	DPPKBP MD
								- Pelatihan pemanfaatan teknologi informasi	DPPKBP MD

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Satuan	Target 2018	Capaian 2018	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
							Terbatasnya akses permodalan dalam program Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2W-KSS)	- Partisipasi pada kegiatan bazar maupun pameran	DPPKBP MD
								- Peningkatan kapasitas pengurus LPMD	DPPKBP MD
							Belum optimalnya peran LPMD dalam pengembangan desa	- Mendorong desa mengalokasikan anggaran operasional LPMD	DPPKBP MD
								- Mendorong desa mengalokasikan anggaran operasional LPMD	DPPKBP MD
								- Evaluasi LPMD berprestasi	DPPKBP MD

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Satuan	Target 2018	Capaian 2018	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
							Belum optimalnya program pengembangan ekonomi lokal desa	- Intensifikasi pembentukan Bumdes	DPPKBP MD
								- Pelatihan peningkatan kapasitas pengelola Bumdes	DPPKBP MD
								- Pelatihan keterampilan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa (KUEMD)	DPPKBP MD
								- Optimalisasi pengelolaan pasar desa	DPPKBP MD
		Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Satuan	Target 2018	Capaian 2018	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
58		Persentase kategori keluarga kurang sejahtera	%	12,9	11,94	Melampaui	Kurangnya intervensi lintas sektor untuk program KB sehingga program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) mengalami stagnasi	Optimalisasi keterlibatan lintas sektor	DPPKBPMD
59		Rata-rata jumlah jiwa dalam keluarga (jiwa)	Jiwa	3.2	3,12	Melampaui	Kurangnya jumlah Penyuluh Keluarga Berencana (PKB)	Penambahan tenaga penguat PKB dan peningkatan peran dari Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dan kader	DPPKBPMD
		Total Fertility Rate (TFR)	%	-	-	Sesuai			DPPKBPMD

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Satuan	Target 2018	Capaian 2018	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
							Masih adanya pernikahan di bawah umur (di bawah 20 tahun)	- Pembentukan kelompok-kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-Remaja) dan KIE bagi Remaja.	DPPKBP MD
								- Peningkatan advokasi kepada pemangku kepentingan perihal Kesehatan Reproduksi.	DPPKBP MD
							Kelompok Kegiatan (BKB, BKR, BKL, PIK-R) belum berjalan secara maksimal	Penguatan kelembagaan dengan peningkatan manajemen kelembagaan	DPPKBP MD

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Satuan	Target 2018	Capaian 2018	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
							Masih rendahnya pemanfaatan modal Pinjaman dana Bergulir dalam kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).	Pembinaan pemanfaatan modal pada Kelompok UPPKS	DPPKBP MD
		Urusan Perhubungan							
60		Persentase penurunan kecelakaan lalu lintas	%	1,83	1,99	Melampaui	Masih kurangnya kesadaran dan keselamatan berlalu lintas	- Penegakan aturan keselamatan berlalu lintas	Dishub
								- Promosi keselamatan berlalu lintas	Dishub
								- pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan	Dishub
								Perbaikan fasilitas keselamatan lalu lintas	Dishub

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Satuan	Target 2018	Capaian 2018	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
		Urusan Komunikasi dan Informatika							
61		Persentase SKPD yang menerapkan Layanan Unggulan Digital Government Services (DGS)	%	75	77,7	Melampaui	Belum optimalnya pelaksanaan <i>e-government</i>	- Pengembangan replikasi <i>Smart City</i> dan <i>Smart Villages</i>	Diskominfo
62		Indeks kualitas layanan informasi publik	Angka	77	75,33	Belum Tercapai	Belum optimalnya pengelolaan saluran informasi publik Terbatasnya jangkauan jaringan dan wifi publik	Ketersediaan teknologi informasi yang memadai Perluasan jaringan fiber optic (FO) dan wifi publik Pembangunan Mall Pelayanan Publik	Diskominfo
		Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah							
		Cakupan Jumlah KUKM yang Naik Kelas	Unit	180	183	Melampaui	Masih adanya koperasi yang masuk kategori kurang sehat	Bimtek manajemen perkoperasian bagi pengurus, dan pengawas koperasi	DKUKMP

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Satuan	Target 2018	Capaian 2018	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
63		Jumlah Usaha Mikro yang Naik Kelas	Unit	180	183	Melampaui	Masih rendahnya daya saing Koperasi	- Peningkatan pelayanan bagi anggota koperasi	DKUKMP
64		Peningkatan tingkat Kesehatan Koperasi	Unit	10	10	Sesuai		- Penguatan kapasitas kelembagaan dan permodalan koperasi	DKUKMP
							Masih rendahnya daya saing	- Pelatihan pengembangan usaha bagi pelaku usaha	DKUKMP
							pelaku usaha	- Mendorong pelaku usaha untuk mendaftarkan produknya	DKUKMP
		Urusan Penanaman Modal							
65		Pertumbuhan Investasi	%	8,08	11,85	Melampaui	Masih rendahnya realisasi investasi di Kabupaten Bantul	- Peningkatan promosi penanaman modal dalam menarik minat investor	DPMPPT

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Satuan	Target 2018	Capaian 2018	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
								- Optimalisasi penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	DPMPT
							Masih rendahnya realisasi investasi di Kabupaten Bantul .	- Peningkatan promosi penanaman modal dalam menarik minat investor	DPMPT
								- Optimalisasi penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	DPMPT
		Urusan Kepemudaan dan Olahraga							
66		Jumlah Pemuda Pelopor	Orang	4	5	Melampaui	Masih rendahnya jumlah pemuda yang memenuhi kriteria sebagai pemuda pelopor	Kerjasama dengan forum pemuda pelopor untuk menemukan calon pemuda	Dikpora

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Satuan	Target 2018	Capaian 2018	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
							pembangunan	pelopor	
		Urusan Statistik							
							Kurang <i>update</i> dan validnya data statistik	- Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait	Diskominfo
								- Peningkatan SDM statistik	Diskominfo
		Urusan Persandian							
							Masih belum optimalnya fungsi persandian	- Pemberdayaan SDM Persandian	Diskominfo
		Urusan Kebudayaan							
67		Indeks Pembangunan Kebudayaan	Angka	60	68,4	Melampaui			
68		Jumlah desa budaya	Desa	12	12	Tercapai		Peningkatan promosi budaya lokal di kalangan generasi muda	Disbud

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Satuan	Target 2018	Capaian 2018	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
		Cakupan Perlindungan Warisan Budaya	Persen	21	100,23	Melampaui		Koordinasi dan mencermati peraturan yang berlaku.	Disbud
		Urusan Perpustakaan							
69		Persentase Peningkatan Pemustaka yang berkunjung ke Perpustakaan	%	30	41	Melampaui	Belum optimalnya kualitas dan kuantitas Sumberdaya Manusia pengelola perpustakaan	- Pengangkatan PHL	Dispursip
								- Bimtek pengelola perpustakaan	Dispursip
							Masih rendahnya minat dan budaya baca masyarakat	- Promosi Gerakan literasi	Dispursip
							Masih kurangnya sarpras perpustakaan di masyarakat	Mengoptimalkan peran masyarakat dalam membangun, memanfaatkan dan mengelola bahan literasi (operamalamb ali)	Dispursip

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Satuan	Target 2018	Capaian 2018	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
		Urusan Kearsipan							
70		Persentase SKPD yang menyelenggaraan kearsipan sesuai standar dengan nilai baik	%	46	46,3	Melampaui	Masih rendahnya kesadaran tentang budaya tertib arsip	Dilakukan sosialisasi/ pendampingan kearsipan, pengawasan kearsipan dan monev penyelenggaraan kearsipan.	Dispursip
							Belum semua PD memiliki SDM Kearsipan/ Arsiparis	Rekrutment PHL dan mengusulkan formasi Arsiparis Bimtek Kearsipan	Dispursip
							Belum Optimalnya Sarpras Pengolahan Arsip	Pemenuhan Sarpras secara bertahap	Dispursip
							Pengelolaan Arsip di masing-masing PD/Desa belum sesuai standar	Implementasi UU, Perda dan Perbup Kearsipan secara konsisten dan berkesinambungan.	Dispursip

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Satuan	Target 2018	Capaian 2018	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
C		Fokus Layanan Urusan Pilihan							
		Urusan Kelautan dan Perikanan							
71		Pertumbuhan produksi perikanan	%	1,35	1,14	Belum Tercapai	kinerja kelompok budidaya ikan menurun	Penguatan kelompok budidaya ikan	
72		Produksi Perikanan	ton	13.022	13.059	Melampaui		Pelatihan budidaya ikan yang menasar generasi muda	Diperpautkan
								Pemanfaatan Teknologi budidaya ikan padat tebar hemat lahan dan air (Matlair	Diperpautkan

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Satuan	Target 2018	Capaian 2018	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
								Perlunya pelatihan tentang inovasi pengolahan hasil perikanan sehingga bisa meningkatkan nilai jualnya	Diperpautkan
								Fasilitasi akses permodalan dan pemberian bantuan kepada pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan.	Diperpautkan
		Urusan Pariwisata							
73		Pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan	%	7	13	Melampaui			
74		Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	3.644.083	4.204.422	Melampaui	Belum optimalnya perwujudan Sapta Pesona dan Sadar Wisata	Peningkatan sarana prasarana wisata, dan penguatan kapasitas SDM serta lembaga pengelolaan obyek wisata.	Dinas Pariwisata

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Satuan	Target 2018	Capaian 2018	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
75		Lama Tinggal Wisatawan	Hari	1,9	1,9	Sesuai	Atraksi dan daerah tujuan wisata belum maksimal tergarap	Pembinaan Sadar Wisata secara kontinyu dengan memanfaatkan semua media	Dinas Pariwisata
							Tidak meratanya sebaran kunjungan wisatawan	Melaksanakan promosi pariwisata dengan mengadakan kerjasama pertukaran pelajar dengan luar daerah	Dinas Pariwisata
								Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana di destinasi wisata	Dinas Pariwisata
								Meningkatkan daya tarik wisata dengan mengadakan even even/pentas di destinasi wisata	Dinas Pariwisata

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Satuan	Target 2018	Capaian 2018	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
							Meningkatnya minat masyarakat untuk mendirikan desa wisata belum didukung oleh sumber daya yang memadai	Melaksanakan sosialisasi Sapta Pesona, Sadar Wisata dan syarat terbentuknya Desa Wisata	Dinas Pariwisata
								Meningkatnya sarana prasarana dan lembaga pengelola obyek wisata	Dinas Pariwisata
		Urusan Pertanian							
76		Pertumbuhan produksi tanaman pangan	%	0,1015	0,13085	Melampaui	Lambatnya aplikasi teknologi oleh petani	Perbanyakan demplot dan pelatihan	Diperpautkan
77		Pertumbuhan produksi tanaman hortikultura	%	1,05	0,85	Belum Tercapai	Luas panen pisang mengalami penurunan	Pemanfaatan lahan pekarangan dan pengadaan bibit	Diperpautkan
78		Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan	%	0,2	0,24	Melampaui		Perlu kaderisasi di Gapoktan/ kelompok tani	Diperpautkan

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Satuan	Target 2018	Capaian 2018	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
79		Pertumbuhan produksi daging (sapi, kambing, domba, kuda, unggas)	%	0,7	0,71	Melampaui	Akses pasar belum mantap dan skala masih kecil	Pelatihan tentang pemasaran sehingga meningkatkan pengetahuan tentang strategi menembus pasar	Diperpautkan
80		Produksi Daging	ton	14.398,44	14.855,73	Melampaui	Manajemen pengelolaan peternakan belum optimal.	Optimalisasi pengelolaan peternakan.	Diperpautkan
81		Produksi Tanaman pangan	ton	231.560,21	216.152	Belum Tercapai	Produktivitas padi menurun	Rehab jaringan irigasi pasca bencana	Diperpautkan
82		Produksi Tanaman Hortikultura	ton	6.553,93	15.635	Melampaui	Lambatnya aplikasi teknologi oleh petani	Perbanyak demplot dan pelatihan	Diperpautkan
83		Produksi Tanaman Perkebunan	ton	14.524,09	14.526	Melampaui	Regenerasi petani yang lambat	Pembentukan dan pelatihan taruna tani	Diperpautkan
								Perlu kaderisasi di Gapoktan/ kelompok tani	

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Satuan	Target 2018	Capaian 2018	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
							Akses pasar belum mantap dan skala masih kecil	Pelatihan tentang pemasaran sehingga meningkatkan pengetahuan tentang strategi menembus pasar	
		Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral							
84		Cakupan Pengembangan Potensi Ketersediaan Energi	%	76	76	Sesuai		Pendataan potensi ketersediaan energi secara berkala	DKUKMP
		Urusan Perdagangan							

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Satuan	Target 2018	Capaian 2018	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
85		Pertumbuhan Ekspor	%	7	13,96	Melampaui	Keterbatasan jangkauan pelayanan dan fasilitasi promosi produk Bantul	Meningkatkan <i>database</i> perdagangan yang belum optimal	Dinas Perdagangan
86		Jumlah Pasar Tipe A	Unit	1	1	Sesuai		Mendorong kemudahan akses informasi pasar domestik dan ekspor yang terkini	Dinas Perdagangan

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Satuan	Target 2018	Capaian 2018	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
87		Pertumbuhan PDRB Sub Kategori Perdagangan	%	4,76	6,02	Melampaui			
		Urusan Perindustrian							
88		Cakupan Industri Kreatif	%	35	42,9				
89		Pertumbuhan industri	%	1,7	3,47	Melampaui	Keterbatasan ketersediaan Kebutuhan Bahan Baku	Kerjasama dengan Asosiasi dan Pemerintah Daerah	DKUKMP
							Masih adanya produk yang belum memenuhi standar	Fasilitasi sertifikasi dan standarisasi produk	DKUKMP
							Belum adanya izin penggunaan tanah <i>Sultan Ground</i> (SG) pada Panitikismo DIY untuk pembangunan akses jalan menuju Kawasan Industri Piyungan	Permohonan perijinan penggunaan tanah <i>Sultan Ground</i> (SG) pada Panitikismo DIY	DKUKMP

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Target 2018	Capaian 2018	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
	Urusan Transmigrasi							
						Animo pendaftar mayoritas menginginkan lokasi di Pulau Sumatera, tetapi alokasi penempatan mayoritas di Pulau Kalimantan dan Sulawesi	Sosialisasi dan informasi gambaran lokasi daerah tujuan melalui penyuluhan, dan penjajakan kerja sama ketransmigrasi an di daerah tujuan baru	Disnakertra ns
						Daerah-daerah yang potensial untuk transmigrasi mensyaratkan sharing dana pembangunan untuk daerah asal yang akan menempatkan transmigrannya	Koordinasi dengan TAPD untuk penganggaran sharing anggaran.	Disnakertra ns
	Fokus Layanan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan							
90	Indeks Tata Kelola Pemerintahan (Indonesia Governance)	Klasifikasi	70 (Baik)	79,6	Melampaui			

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Satuan	Target 2018	Capaian 2018	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
		Index/IGI							
		Fungsi Penunjang Perencanaan							
91		Persentase rata-rata capaian sasaran daerah	%	94,5	87,63	Belum Tercapai	Belum optimalnya implementasi pelaksanaan program kegiatan PD, Belum optimalnya sistem aplikasi terintegrasi dalam perencanaan, penganggaran dan pengendalian pembangunan daerah	Optimalisasi perencanaan dan pengendalian program dan kegiatan PD, Optimalisasi bersama penyedia (BPPT dan Kemen PAN RB)	Bappeda
92		Persentase rata-rata Pencapaian Target Kinerja Program PD	%	90,4	87,63	Belum Tercapai		- Peningkatan kapasitas SDM Pengelola aplikasi	Bappeda
							Banyaknya aplikasi yang harus digunakan dan tidak terintegrasi	- Koordinasi dengan institusi terkait	Bappeda
		Fungsi Penunjang Keuangan							

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Satuan	Target 2018	Capaian 2018	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
93		Opini Pemeriksaan BPK	Predikat	1 (WTP)	1 (WTP)	Sesuai	Pengelolaan aset belum optimal	Peningkatan pengelolaan BMD, Aplikasi pengelolaan BMD,	BKAD
							Pengelolaan keuangan belum optimal	Peningkatan pemahaman ketentuan tentang pengelolaan keuangan, Peningkatan aplikasi Sepak@t	
94		Percepatan Belanja Pemerintah	%	65	66,7	Melampaui	Pengelolaan keuangan belum optimal	Peningkatan pemahaman ketentuan tentang pengelolaan keuangan, Peningkatan aplikasi Sepak@t	BKAD
95		Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	23	21,47	Belum Tercapai		Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan peningkatan proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan	BKAD

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Satuan	Target 2018	Capaian 2018	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
96		Persentase PAD terhadap Belanja Daerah	%	18	22,31	Melampaui		Peningkatan aplikasi Sepak@t	BKAD
		Fungsi Penunjang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan							
97		Presentase Pemenuhan Kompetensi Aparatur	%	90	89,03	Belum Tercapai	Masih banyaknya jabatan fungsional tertentu yang belum terisi karena membutuhkan kualifikasi tertentu	Penyelenggaraan diklat untuk peningkatan kompetensi, penerbitan ijin belajar serta penataan kembali PNS yang sudah ada	BKPP
98		Nilai Indeks Kepuasan Aparatur	%	81,5	82,44	Melampaui	Pengisian SKP masih dianggap sebagai formalitas sehingga pada saat penilaian masih banyak ASN yang belum mengisi SKP	Penegakan aturan kepegawaian	BKPP

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Satuan	Target 2018	Capaian 2018	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
							Masih rendahnya kesadaran perangkat daerah untuk melaporkan tentang adanya kasus-kasus indisipliner untuk pembinaan pegawai	Penegakan aturan kepegawaian	BKPP
		Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan							
							Rendahnya tindak lanjut/ pemanfaatan hasil-hasil penelitian	Publikasi dan promosi hasil penelitian	Bappeda
		Fungsi Penunjang Lainnya							
		Fungsi Penunjang Pengawasan							
99		Nilai Maturitas SPIP	Level	Level 3 (2,5)	Level 3 (3,2)	Melampaui	Jumlah pengawas auditor tidak sebanding dengan beban kerja Inspektorat	- Optimalisasi fungsi Pengawas/Auditor - Penambahan jumlah SDM	Inspektora

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Satuan	Target 2018	Capaian 2018	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
							Masih kurangnya kapasitas Tenaga Pemeriksa dan aparatatur pengawasan	Peningkatan kapasitas Tenaga Pemeriksa dan aparatatur pengawasan	Inspektora
		Fungsi Penunjang Perumusan Kebijakan							
100		Nilai Evaluasi Kinerja SKPD	Angka	72	83,45	Melampaui	Belum optimalnya pelaksanaan fungsi perumusan kebijakan	Optimalisasi fungsi perumusan kebijakan	Bappeda
101		Indeks Kepuasan Masyarakat	%	81	88,7	Melampaui			Setda
102		Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai	3,5 (Sangat Tinggi)	3,24	Belum Tercapai			Setda
103		Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	Nilai	83 (A)	81,39	Belum Tercapai			Bappeda

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Satuan	Target 2018	Capaian 2018	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
104		Persentase Belanja Pegawai	%	49	42,51	Melampaui			BKAD
105		Persentase Raperda yang disetujui	%	80	70	Belum Tercapai	Terdapat target Perda yang tidak tercapai sesuai Program Pembentukan Peraturan Daerah, dikarenakan ada berapa raperda yang direkomendasikan oleh Gubernur untuk tidak ditetapkan menjadi perda dengan alasan harus disesuaikan dengan peraturan pemerintah no. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan ada raperda yang cukup	Komitmen pimpinan dan kerjasama antar instansi serta lembaga terkait dalam proses penyusunan raperda	Bagian Hukum

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Satuan	Target 2018	Capaian 2018	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
							ditetapkan dengan Peraturan Bupati.		
	Fungsi Penunjang Pemerintahan Umum								

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Satuan	Target 2018	Capaian 2018	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
106		IKM Kecamatan	%	85	90	Melampaui	Adanya keterlambatan dalam pengusulan Raperda baru di Prolegda	Penjadwalan waktu dan komitmen terhadap penyelesaian pembahasan	Adpem
107		Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	%	90			Lemahnya komitmen anggota DPD terhadap agenda yang telah ditetapkan	Penguatan komitmen bersama	Bagian Pemdes
108		Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	%	85					Bagian Pemdes
109		Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	%	85	85	Sesuai			Bappeda
III		Aspek Daya Saing							
110		Nilai Tukar Petani	Angka	101,6	103,16	Melampaui			

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Satuan	Target 2018	Capaian 2018	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
111		Percepatan Layanan Perizinan dan Non Perizinan Tepat Waktu	%	79	83,87	Melampaui	Belum optimalnya penerapan aplikasi Perizinan Berusaha Terpadu Secara Elektronik atau <i>Online Single Submission</i> (OSS).	- Koordinasi dan konsultasi secara intensif terkait permasalahan teknis penerapan aplikasi dan Standar Perizinan Berusaha	DPMPT
112		Indeks Kepuasan Masyarakat	%	79	83,29	Melampaui		- Bimbingan Teknis penyelenggara pelayanan perizinan	DPMPT
								- Peningkatan sarana prasarana pendukung	DPMPT
113		Upah Minimum Kabupaten	Rp	1.527.150	1.649.800	Melampaui	TDK ada Krn KHL kita lebih rendah dr Umk berjalan	peninjauan kebutuhan hidup layak secara berkala sehingga mengetahui kondisi KHL secara real	Disnakertrans

Sumber: Bappeda Kabupaten Bantul, diolah, 2019